SALINAN

WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

Menimbang :

a. bahwa untuk memastikan pembangunan daerah yang berkelanjutan, berkeadilan dan sejahtera, dengan berlandaskan pada prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas publik, diperlukan arah dan kebijakan yang jelas melalui penyusunan rencana kerja pemerintah daerah;
b. bahwa dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah perlu mempertimbangkan kebutuhan, aspirasi, dan kondisi sosial masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga pembangunan daerah lebih relevan dan berdampak positif;
c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan pedoman perencanaan pembangunan tahunan daerah, diperlukan pengaturan mengenai rencana kerja pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat program dan kegiatan/sub kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
10. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan.
11. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/ sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
12. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan/sub kegiatan, program atau sasaran, dan tujuan dalam bentuk Keluaran *(output*), Hasil *(outcome*), Dampak *(impact*).
13. Keluaran *(output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil *(outcome)* dapat terwujud.
14. Hasil *(outcome)* adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan/sub kegiatan dalam satu program.
15. Dampak *(impact)* adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian Hasil (o*utcome)* beberapa program.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

17. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan/sub kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.

Pasal 2

(1) RKPD Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2027 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2027.
(2) RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, program prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja dan pendanaan Tahun 2027 serta prakiraan maju Tahun 2028.
(3) Program prioritas pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada RKPD Tahun 2027 berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029.

Pasal 3

RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai:
a. pedoman penyusunan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2027; dan
b. pedoman penyusunan rancangan KUA dan PPAS Tahun 2027 untuk penyusunan rancangan APBD Tahun Anggaran 2027.

Pasal 4

(1) RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika berisi:
    a. bab I : pendahuluan;
    b. bab II : gambaran umum kondisi Daerah;
    c. bab III : kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah;
    d. bab IV : sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
    e. bab V : Rencana Kerja dan pendanaan Daerah;
    f. bab VI : Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
    g. bab VII : penutup.
(2) Dokumen RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

(1) Pengendalian dan evaluasi perencanaan RKPD Tahun 2027 bertujuan untuk mewujudkan:
    a. konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanan dan hasil rencana pembangunan Daerah;
    b. konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan
    c. kesesuaian antara capaian pembangunan Daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
(2) Pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
    a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan
c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah.

(3) Pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang dibidang perencanaan.

Pasal 6

(1) Perubahan RKPD Tahun 2027 dapat dilakukan dalam hal hasil evaluasi pelaksanaan pada tahun berjalan menunjukkan:
a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan; dan/atau
b. keadaan yang menyebabkan saldo sisa lebih pembiayaan anggaran tahun sebelumnya, harus digunakan untuk tahun berjalan,
yang menimbulkan penambahan dan/atau pengurangan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru dalam perubahan RKPD Tahun 2027.

(2) Perumusan perubahan RKPD Tahun 2027 memperhatikan visi, misi, dan Program Wali Kota, serta hasil kesepakatan bersama antara Wali Kota dan DPRD tentang penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru pada KUA dan PPAS.

(3) Penambahan dan/atau pengurangan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru dalam perubahan RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau penambahan dalam Renstra Perangkat Daerah sebagai acuan penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 7

Dalam hal RKPD Tahun 2027 dan/atau pemutakhiran RKPD Tahun 2027 telah ditetapkan serta terdapat pemutakhiran Program Strategis Nasional, Pemerintah Daerah melakukan penambahan program/kegiatan/sub kegiatan baru yang dituangkan dalam Peraturan Wali Kota tentang Perubahan RKPD Tahun 2027.

Pasal 8

Penambahan dan/atau pengurangan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), berdasarkan:
a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
b. belanja Daerah yang bersifat mengikat;
c. tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang besar bagi pemerintah maupun masyarakat;
d. dalam rangka mempercepat capaian sasaran RKPD dan/atau Renstra Perangkat Daerah;
e. adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan Daerah; dan
f. dilakukan jika kegiatan dan/atau sub kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan keluaran yang signifikan terhadap pencapaian hasil program.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 6 Juli 2026

WALI KOTA SALATIGA,

ttd

ROBBY HERNAWAN

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal 6 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

ttd

MUTHOIN

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2026 NOMOR 12

Salinan Produk Hukum Daerah
Sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,

PETRUS MAS SENTOT, SH.
Pembina Tk. I
NIP. 19690113 199603 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
DAFTAR ISI iii
DAFTAR GAMBAR x
DAFTAR GRAFIK xi
DAFTAR TABEL xiv

BAB I PENDAHULUAN I-1
1.1. Latar Belakang I-1
1.1.1 Proses Penyusunan I-2
1.1.2 Prinsip dan Pendekatan Penyusunan I-4
1.2. Dasar Hukum Penyusunan I-6
1.3. Hubungan Antar Dokumen RKPD I-8
1.4. Maksud dan Tujuan I-10
1.5. Sistematika Dokumen RKPD Kota Salatiga Tahun 2027 ..... I-10

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-1
2.1. Aspek Geografis dan Demografis II-1
2.1.1. Kondisi Geografi II-1
2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah II-3
2.1.3. Wilayah Rawan Bencana II-5
2.1.4. Aspek Demografi II-7
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-10
2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi II-10
2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya II-26
2.3. Aspek Daya Saing Daerah II-37
2.3.1. Daya Saing Ekonomi Daerah II-37
2.3.2. Daya Saing SDM II-44
2.3.3. Daya Saing Fasilitas/ Infrastruktur Wilayah II-53
2.3.4. Daya Saing Iklim Investasi II-58
2.4. Aspek Pelayanan Umum II-61
2.4.1 Fokus Urusan Wajib Pelayanan Dasar II-65
2.4.2 Fokus Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar II-95
2.4.3 Fokus Urusan Pemerintahan Pilihan II-135
2.4.4 Fokus Layanan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan II-150
2.4.5 Fokus Layanan Fungsi Penunjang Lainnya II-157
2.5. Evaluasi Hasil Program RKPD Tahun 2025 dan Realisasi terhadap Target Akhir RPD Tahun 2023-2026 ..... II-164
2.5.1 Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah II-165
2.5.2 Realisasi pencapaian target kinerja program tahun 2025 ..... II-192
2.6. Permasalahan Pembangunan II-237
2.7. Permasalahan Pembangunan dan Isu Strategis II-244
2.8. Inovasi Daerah II-246
2.9. Penghargaan Daerah II-269

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH III-1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah III-1
3.1.1. Kondisi Perekonomian Global III-1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3.1.2. Proyeksi dan Arah Pembangunan Ekonomi Nasional III-2
3.1.3. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Tengah III-7
3.1.4. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Kota Salatiga III-8
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah III-10
3.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah III-10
3.2.2. Kebijakan Belanja Daerah III-18
3.2.3. Kebijakan Pembiayaaan Daerah III-22

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-1
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan IV-1
4.1.1 Visi Pembangunan Daerah IV-1
4.1.2 Misi Pembangunan Daerah IV-3
4.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah IV-4
4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2027 ..... IV-11
4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2027 ..... IV-11
4.2.2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027 ..... IV-23
4.2.3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Salatiga Tahun 2027 ..... IV-29
4.3 Pokok – Pokok Pikiran DPRD IV-114
4.4 Prioritas Pembangunan Daerah dalam mendukung Kebijakan Nasional IV-118
4.4.1 Sustainable Development Goals (SDGs) IV-118
4.4.2 Pengarus Utamaan Gender (PUG) dan Iklusi Sosial IV-140
4.4.3 Pengarusutamaan Kerentanan Bencana dan Perubahan IV-149
4.4.4 Standar Pelayanan Minimal IV-155
4.4.5 Penanggulangan Kemiskinan IV-179
4.4.6 Percepatan Penurunan Stunting IV-201
4.5 Pemanfaatan Kelitbangan dalam Pencapaian Prirotitas Pembangunan dukungan Program Unggulan Wali Kota IV-235

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-1
5.1. Rencana Kerja V-2
5.1.1. Rencana Kerja Prioritas Pertama V-2
5.1.2. Rencana Kerja Prioritas Kedua V-104
5.2. Pendanaan Daerah V-130
LAMPIRAN BAB V RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH V-133

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN VI-1
6.1 Indikator Kinerja Utama VI-1
6.2 Indikator Kinerja Daerah VI-2
6.3 Keselarasan Sasaran Indikator Makro Provinsi Jawa Tengah dengan Kota Salatiga VI-11
6.4 Keselarasan Indikator Utama Pembangunan Provinsi Jawa Tengah dengan Kota Salatiga VI-11
6.5 Keselarasan Indikator Tematik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027 ..... VI-20
6.6 Keselarasan Intervensi Pembangunan Kewilayahan RKP dengan RKPD VI-21

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

6.7 Keselarasan Kegiatan Prioritas Utama (Prioritas Nasional) dengan Kota Salatiga VI-22
6.8 Indikator Kinerja Program VI-30
6.9 Indikator Utama Pembangunan VI-69

BAB VII PENUTUP VII-1
7.1 Kaidah Pelaksanaan VII-1
7.2 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi VII-2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1	Diagram Proses Penyusunan RKPD 2027	I-4
Gambar 1. 2	Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan Antara Pusat, Provinsi dan Kota Salatiga	I-9
Gambar 2. 1	Peta Kota Salatiga	II-2
Gambar 2. 2	Peta Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan	II-4
Gambar 2. 3	Peta Rencana Pola Ruang Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana Kota Salatiga	II-7
Gambar 3. 1.	Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2025	III-6
Gambar 3. 2.	Pertumbuhan PDRB Jawa Tengah Tahun 2025	III-7

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2. 1	Perbandingan Jumlah Penduduk Laki-laki dan Perempuan di Kota Salatiga Tahun 2021-2025	II-8
Grafik 2. 2	Pertumbuhan Ekonomi Kota Salatiga Tahun 2021-2025	II-11
Grafik 2. 3	Inflasi Kota Salatiga tahun 2021-2025	II-12
Grafik 2. 4	Indeks Gini Kota Salatiga Tahun 2021-2025	II-13
Grafik 2. 5	Perkembangan Tingkat Kemiskinan (%) Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2025	II-13
Grafik 2. 6	Posisi Relative Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah Tahun 2025	II-14
Grafik 2. 7.	Garis Kemiskinan (Rp) Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2025	II-15
Grafik 2. 8.	Perkembangan Garis Kemiskinan Kota Salatiga Tahun 2021 – 2025	II-16
Grafik 2. 9.	Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2025	II-16
Grafik 2. 10.	Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Salatiga dan Perbandingannya dengan Prov. Jateng dan Nasional Tahun 2021– 2025	II-17
Grafik 2. 11.	Posisi Relative Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah Tahun 2025	II-18
Grafik 2. 12.	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Salatiga, Prov. Jateng dan Nasional Tahun 2025	II-19
Grafik 2. 13.	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Salatiga, Prov. Jateng dan Nasional Tahun 2022- 2025	II-19
Grafik 2. 14.	Posisi Relative Indeks Kedalaman Kemiskinan (P2) Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah Tahun 2025	II-20
Grafik 2. 15.	Perkembangan TPAK Kota Salatiga, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2025 (%)	II-24
Grafik 2. 16.	Perkembangan Rasio Penduduk Yang Bekerja Kota Salatiga, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2025 (%)	II-25
Grafik 2. 17.	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2025(%)	II-26
Grafik 2. 18.	Perkembangan Usia Harapan Hidup Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2025 (angka)	II-27
Grafik 2. 19.	Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Salatiga Tahun 2021-2025	II-28
Grafik 2. 20.	Skor Pola Pangan Harapan Kota Salatiga Tahun 2021-2025	II-30
Grafik 2. 21.	Score Capaian KLA di Kota Salatiga Tahun 2020-2024	II-31
Grafik 2. 22.	Perbandingan IDG Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024	II-33
Grafik 2. 23.	Perbandingan IDG Kota Salatiga dengan Kota-Kota Lain di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024	II-33
Grafik 2. 24.	Nilai IKG Kota Salatiga Tahun 2021-2025	II-34
Grafik 2. 25.	Perbandingan IPG Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2025	II-36
Grafik 2. 26.	Prevalensi Balita Gizi Buruk di Kota Salatiga Tahun 2021-2025	II-36
Grafik 2. 27.	Pengeluaran Perkapita Kota Salatiga (Ribu Rupiah)	II-42

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Grafik 2. 28. Perbandingan Pengeluaran Perkapita Kota Salatiga diantara Kota-kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 (Ribu Rupiah) II-43
Grafik 2. 29. Grafik PDRB Perkapita Tahun 2021-2025 ..... II-43
Grafik 2. 30. Capaian IPM Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional II-44
Grafik 2. 31. Perbandingan Posisi IPM Kota Salatiga dengan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 ..... II-45
Grafik 2. 32. Perkembangan Usia Harapan Hidup saat Lahir Kota Salatiga, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2025 ..... II-46
Grafik 2. 33. Perbandingan Usia Harapan Hidup saat Lahir Kota Salatiga diantara kota di Provinsi Jawa Tengah 2025 ..... II-46
Grafik 2. 34. Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah Dan Nasional Tahun 2021-2025 ..... II-47
Grafik 2. 35. Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kota Salatiga diantara kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 ..... II-48
Grafik 2. 36. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah Dan Nasional Tahun 2021-2025 ..... II-48
Grafik 2. 37. Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) II-49
Grafik 2. 38. Angka Melek Huruf (usia 15-59) Tahun 2021-2025 ..... II-51
Grafik 2. 39. Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik di Kota Salatiga Tahun 2021-2025 ..... II-54
Grafik 2. 40. Persentase Jaringan Drainase Dalam Kondisi Baik di Kota Salatiga Tahun 2021-2025 ..... II-54
Grafik 2. 41. Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik di Kota Salatiga Tahun 2021-2025 ..... II-55
Grafik 2. 42. Realisasi IKLH di Kota Salatiga Tahun 2021-2025 ..... II-55
Grafik 2. 43. Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman di Kota Salatiga II-58
Grafik 2. 44. Realisasi Pertumbuhan Investasi di Kota Salatiga Tahun 2021-2025 ..... II-58
Grafik 2. 45. Persentase Peminat Transmigrasi di Kota Salatiga Tahun 2021-2025 ..... II-60
Grafik 2. 46. Indeks Reformasi Birokrasi di Kota Salatiga Tahun 2021-2025 ..... II-63
Grafik 2. 47. Indeks Pelayanan Publik di Kota Salatiga Tahun 2021-2025 ..... II-64
Grafik 2. 48. Indeks Integritas Nasional Kota Salatiga Tahun 2021-2025 ..... II-64
Grafik 2. 49. Prosentase Penduduk Usia 4-6 tahun yang bersekolah di TK/RA di Kota Salatiga Tahun 2021-2025 ..... II-67
Grafik 2. 50. Angka Kematian Ibu (AKI) di Kota Salatiga Tahun 2021-2025 ..... II-73
Grafik 2. 51. Angka Kematian Bayi (AKB) di Kota Salatiga Tahun 2021-2025 ..... II-74
Grafik 2. 52. Prevalensi Balita Gizi Buruk di Kota Salatiga Tahun 2021-2025 ..... II-74
Grafik 2. 53. Succes Rate Tuberkulosis (TB) di Kota Salatiga Tahun 2021-2025 ..... II-75
Grafik 2. 54. Prosentase Lingkungan Permukiman Kumuh Perkotaan di Kota Salatiga Tahun 2021-2025 ..... II-86
Grafik 2. 55. Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman di Kota Salatiga II-86
Grafik 2. 56. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni di Kota Salatiga Tahun 2021-2025 ..... II-88
Grafik 2. 57. Cakupan Penegakan PERDA dan PERKADA di Kota Salatiga Tahun II-90
Grafik 2. 58. Cakupan Penanganan PMKS di Kota Salatiga Tahun 2021-2025 ..... II-93
Grafik 2. 59. Persentase Penempatan Tenaga Kerja di Kota Salatiga Tahun 2020-2024 ..... II-96
Grafik 2. 60. Cakupan Presentase Perempuan dalam Parlemen di Kota Salatiga Tahun 2021-2025 ..... II-98

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Grafik 2. 61. Cakupan Presentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja di Kota Salatiga Tahun 2020-2024 ..... II-98
Grafik 2. 62. Penyelesaian Kasus Tanah Negara di Kota Salatiga Tahun 2021-2025 ..... II-103
Grafik 2. 63. Tren Emisi dan Serapan GRK II-107
Grafik 2. 64. Tren Emisi GRK Sektor Pengadaan dan Penggunaan Energi 2020-2024 ..... II-108
Grafik 2. 65. Tren Emisi GRK Sektor Limbah 2020-2024 ..... II-109
Grafik 2. 66. Tren Emisi GRK Sektor IPPU (Proses dan penggunaan Produk Industri) 2020-2024 ..... II-110
Grafik 2. 67. Tren Emisi GRK Sektor AFOLU (Agriculture, Forestry and Land Use) 2020-2025 ..... II-111
Grafik 2. 68. Persentase Sampah yang Terangkut di Kota Salatiga Tahun 2021-2025 ..... II-113
Grafik 2. 69. Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Salatiga Tahun 2021-2025 ..... II-119
Grafik 2. 70. Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang Dibina di Kota Salatiga Tahun 2021-2025 ..... II-126
Grafik 2. 71. Jumlah Koperasi Aktif di Kota Salatiga Tahun 2021-2025 ..... II-128
Grafik 2. 72. Perkembangan Banyaknya Organisasi Kesenian di Kota Salatiga Tahun 2021-2025 ..... II-132

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Prinsip Penyusunan RKPD Kota Salatiga Tahun 2027 ..... I-5
Tabel 1. 2 Pendekatan Penyusunan RKPD Kota Salatiga Tahun 2027 ..... I-5

Tabel 2. 1 Data Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin di Kota Salatiga Tahun 2021-2025 ..... II-8
Tabel 2. 2 Data Persebaran Penduduk Per Kecamatan di Kota Salatiga Tahun 2021-2025..... II-9
Tabel 2. 3 Data Penduduk Kota Salatiga Berdasarkan Kelompok Usia Tahun 2025..... II-9
Tabel 2. 4 Data Penduduk Kota Salatiga Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025..... II-10
Tabel 2. 5. Tingkat dan Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem Tiap Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2023..... II-21
Tabel 2. 6. Persentase Kemiskinan Esktrem Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah per Maret 2025 ..... II-22
Tabel 2. 7. Jumlah Rumah Tangga Miskin Kota Salatiga..... II-23
Tabel 2. 8. Jumlah Produksi Berdasarkan Jenis Komoditas di Kota Salatiga Tahun 2021-2025..... II-30
Tabel 2. 9. Data Stunting Kota Salatiga 2021-2025..... II-37
Tabel 2. 10. Nilai PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Kota Salatiga Tahun 2021-2025 (dalam miliar rupiah)..... II-38
Tabel 2. 11. Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kota Salatiga Tahun 2021-2025 (dalam miliar rupiah) II-39
Tabel 2. 12. Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kota Salatiga Tahun 2021-2025 (dalam miliar rupiah) II-40
Tabel 2. 13. Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kota Salatiga Tahun 2021-2025 (dalam miliar rupiah) II-40
Tabel 2. 14. Laju Pertumbuhan PDRB menurut Pengeluaran Kota Salatiga Tahun 2021-2025 (persen)..... II-41
Tabel 2. 15. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Per Kapita Kota Salatiga Tahun 2021-2025 ..... II-41
Tabel 2. 16. Komponen IPM Kota Salatiga Tahun 2021-2025 ..... II-45
Tabel 2. 17. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang..... II-53
Tabel 2. 18. Indeks Risiko Bencana dan Indeks Ketahanan Daerah Kota Salatiga Tahun 2022 – 2025..... II-61
Tabel 2. 19. Indeks Reformasi Birokrasi Kota Salatiga Tahun 2025..... II-62
Tabel 2. 20. Perkembangan Capaian Pembangunan Pendidikan di Kota Salatiga tahun 2021-2025..... II-65
Tabel 2. 21. Perkembangan Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik di Kota Salatiga..... II-65
Tabel 2. 22. Perkembangan Rasio Murid-Guru di Kota Salatiga Tahun 2021-2025 ..... II-66
Tabel 2. 23. Perkembangan Prosentase Guru Layak Mengajar di Kota Salatiga Tahun 2021—2025..... II-66
Tabel 2. 24. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar di Kota Salatiga Tahun 2021-2025..... II-67

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 2. 25. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah di Kota Salatiga Tahun 2021-2025 ..... II-67
Tabel 2. 26. Laporan Rapor Pendidikan Kota Salatiga Tahun 2024 ..... II-69
Tabel 2. 27. SPM Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan II-71
Tabel 2. 28. Capaian SDGs Urusan Pendidikan II-71
Tabel 2. 29. Data Stunting Kota Salatiga 2021-2025 ..... II-75
Tabel 2. 30. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Kesehatan II-77
Tabel 2. 31. SPM Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan II-78
Tabel 2. 32. Capaian SDGs Urusan Kesehatan II-80
Tabel 2. 33. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang II-82
Tabel 2. 34. SPM Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum II-83
Tabel 2. 35. SPM Pelayanan Dasar Air Minum II-84
Tabel 2. 36. SPM Pelayanan Dasar Air Limbah Domestik II-84
Tabel 2. 37. Capaian SDGs Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang II-84
Tabel 2. 38. Luas PSU berdasarkan BA/SK II-87
Tabel 2. 39. SPM Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat II-89
Tabel 2. 40. Capaian SDGs Perumahan Rakyat II-89
Tabel 2. 41. Rasio Linmas Dibanding Jumlah Penduduk Kota Salatiga Tahun 2021-2025 ..... II-89
Tabel 2. 42. Capaian Indikator Kinerja Daerah Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat II-90
Tabel 2. 43. SPM Pelayanan Dasar Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat II-91
Tabel 2. 44. Capaian SDGs Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat II-92
Tabel 2. 45. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Sosial II-94
Tabel 2. 46. SPM Pelayanan Dasar Urusan Sosial II-94
Tabel 2. 47. Capaian SDGs Urusan Sosial II-95
Tabel 2. 48. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Tenaga Kerja II-96
Tabel 2. 49. Capaian SDGs Urusan Tenaga Kerja II-97
Tabel 2. 50. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak II-99
Tabel 2. 51. Capaian SDGs Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak II-99
Tabel 2. 52. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Pangan II-100
Tabel 2. 53. Capaian SDGs Urusan Pangan II-101
Tabel 2. 54. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Pertanahan II-103
Tabel 2. 55. Indikator Kinerja Daerah Lingkungan Hidup II-104
Tabel 2. 56. Data Potensi Energi Baru Terbarukan Kota Salatiga II-105
Tabel 2. 57. Data Peningkatan Kapasitas dan Pengawasan Lingkungan II-106
Tabel 2. 58. Total Emisi GRK Berdasarkan Sektor II-107
Tabel 2. 59. Kertersediaan RTH di Kota Salatiga 2021-2025 ..... II-113
Tabel 2. 60. Persentase Sampah yang Terangkut Tahun 2021 sd 2025 ..... II-113
Tabel 2. 61. Persentase Sampah yang Terangkut di Kota Salatiga Tahun 2021-2025 ..... II-114
Tabel 2. 62. Capaian SDGs Urusan Lingkungan Hidup II-114
Tabel 2. 63. Indikator Kinerja Daerah Administrasi Kependudukan Sipil II-116
Tabel 2. 64. Banyaknya Pelayanan Permohonan Akta-Akta di Kota Salatiga II-117
Tabel 2. 65. Capaian SDGs Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil II-117
Tabel 2. 66. Indeks Kualitas Data (IKD) Kota Salatiga Tahun 2025 ..... II-118

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 2. 67. Indikator Kinerja Daerah Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kota Salatiga Tahun 2021-2025 ..... II-119
Tabel 2. 68. Capaian SDGs Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana II-120
Tabel 2. 69. Indikator Kinerja Daerah Perhubungan di Kota Salatiga Tahun 2021-2025 ..... II-121
Tabel 2. 70. Indikator Kinerja Daerah Komunikasi dan Informatika di Kota Salatiga Tahun 2021-2025 ..... II-122
Tabel 2. 71. Indikator Kinerja Daerah Penanaman Modal di Kota Salatiga II-129
Tabel 2. 72. Capaian Indikator Kinerja Daerah Kepemudaan dan Olahraga di Kota Salatiga Tahun 2021-2025 ..... II-131
Tabel 2. 73. Indikator Kinerja Daerah Statistik dan Persandian di Kota Salatiga II-131
Tabel 2. 74. Indikator Kinerja Daerah Kebudayaan di Kota Salatiga Tahun 2021-2025 ..... II-132
Tabel 2. 75. Data Dukung Kebudayaan di Kota Salatiga Tahun 2021-2025 ..... II-133
Tabel 2. 76. Capaian Indikator Kinerja Daerah Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah II-133
Tabel 2. 77. Jumlah Pengunjung, Anggota dan Koleksi Perpustakaan Umum di Kota Salatiga Tahun 2021-2025 ..... II-134
Tabel 2. 78. Capaian Indikator Kinerja Daerah Kelautan dan Perikanan II-135
Tabel 2. 79. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Pariwisata II-136
Tabel 2. 80. Capaian SDGs Urusan Pariwisata II-138
Tabel 2. 81. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Pertanian II-139
Tabel 2. 82. Jumlah Produksi Daging, Telur dan Susu Kota Salatiga 2021-2025 ..... II-139
Tabel 2. 83. Populasi Ternak Ruminansia dan Non Ruminansia Kota Salatiga 2021-2025 ..... II-147
Tabel 2. 84. Luas Penggunaan Lahan Pertanian Kota Salatiga 2021-2025 ..... II-148
Tabel 2. 85. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Perdagangan Tahun 2021-2025 ..... II-149
Tabel 2. 86. Capaian SDGs Urusan Perdagangan II-149
Tabel 2. 87. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Perindustrian II-149
Tabel 2. 88. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Transmigrasi II-150
Tabel 2. 89. Capaian Indikator Kinerja Daerah Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan II-150
Tabel 2. 90. Capaian Indikator Kinerja Daerah Fungsi Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Tahun 2021-2025 ..... II-151
Tabel 2. 91. Capaian Indikator Kinerja Daerah Fungsi Keuangan Tahun 2021-2025 ..... II-152
Tabel 2. 92. Capaian SDGs Urusan Keuangan II-153
Tabel 2. 93. Capaian Indikator Kinerja Daerah Fungsi Kepegawaian Tahun 2021-2025 ..... II-154
Tabel 2. 94. Capaian SDGs Kepegawaian II-154
Tabel 2. 95. Capaian Indikator Kinerja Daerah Fungsi Pengawasan Tahun 2021-2025 ..... II-155
Tabel 2. 96. Capaian Indikator Kinerja Daerah Sekretariat DPRD Tahun 2021-2025 ..... II-157
Tabel 2. 97. Capaian SDGs Setwan II-157
Tabel 2. 98. Realisasi Indikator Kinerja Daerah Sekretariat Daerah Tahun 2020-2024 ..... II-159
Tabel 2. 99. Capaian Indikator SDGs yang diampu Sekretariat Daerah II-160

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 2. 100. Capaian Indikator Kinerja Daerah Kecamatan Sidomukti Tahun 2021-2025 ..... II-161
Tabel 2. 101. Capaian Indikator Kinerja Daerah Kecamatan Sidorejo Tahun 2021-2025 ..... II-162
Tabel 2. 102. Capaian Indikator Kinerja Daerah Kecamatan Tingkir Tahun 2021-2025 ..... II-162
Tabel 2. 103. Capaian Indikator Kinerja Daerah Kecamatan Argomulyo Tahun 2021-2025 ..... II-163
Tabel 2. 104. Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kota Salatiga Tahun 2025 (Berdasarkan RPD Kota Salatiga Tahun 2023 – 2026) II-166
Tabel 2. 105. Capaian Indikator Kinerja Pemerintah Daerah Kota Salatiga Tahun 2025 (berdasarkan RPD 2023 - 2026) II-170
Tabel 2. 106. Capaian Indikator Kinerja Daerah Kota Salatiga Tahun 2025 (berdasarkan RPJMD 2025 – 2029) II-179
Tabel 2. 107. Evaluasi Rata – Rata Capaian Kinerja per Urusan Tahun 2025 Kota Salatiga II-192
Tabel 2. 108. Evaluasi Capaian Kinerja Program per Urusan Tahun 2025 Kota Salatiga II-195
Tabel 2. 109. Rumusan Permasalahan RKPD Kota Salatiga Tahun 2027 ..... II-237
Tabel 2. 110. Persandingan Permasalahan dan Isu Strategis Tahun 2027 ..... II-245
Tabel 2. 111. Hasil Pengukuran Indeks Inovasi Daerah Kota Salatiga Tahun 2021-2025 ..... II-247
Tabel 2. 112. Inovasi Perangkat Daerah di Kota Salatiga Tahun 2025 ..... II-248
Tabel 2. 113. Data Penghargaan Kota Salatiga di Tingkat Nasional, Provinsi dan Eks Karisidenan Tahun 2025 ..... II-270

Tabel 3. 1. Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM) Tahun 2027 ..... III-6
Tabel 3. 2. Capaian Perkembangan Ekonomi tahun 2023, 2024, 2025 dan Target Perkembangan Ekonomi Tahun 2026 dan proyeksi tahun 2027 ..... III-10
Tabel 3. 3. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025, Target Pendapatan Tahun 2026 dan Proyeksi Pendapatan Tahun 2027 ..... III-12
Tabel 3. 4. Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2025, Target Tahun 2026 dan Proyeksi Tahun 2027 ..... III-15
Tabel 3. 5. Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Salatiga Tahun 2027 ..... III-17
Tabel 3. 6. Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2025, Target Tahun 2026 dan Proyeksi Tahun 2027 ..... III-21
Tabel 3. 7. Realisasi Anggaran Penerimaan Pembiayaan Tahun 2025, Target Tahun 2026 dan Proyeksi Tahun 2027 ..... III-24
Tabel 3. 8. Struktur APBD Kota Salatiga Tahun 2027 ..... III-24
Tabel 3. 9. Alokasi Pagu Perangkat Daerah Tahun 2027 ..... III-25
Tabel 3. 10. Alokasi Pagu Dana Kelurahan Tahun 2027 ..... III-26

Tabel 4. 1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Salatiga beserta target kinerja Tahun 2027 berdasarkan hasil capaian tahun 2025 ..... IV-5
Tabel 4. 2. Strategi dan Arah Kebijakan dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2027 ..... IV-7
Tabel 4. 3. Target Indikator sasaran pembangunan tahun 2027 ..... IV-13
Tabel 4. 4. Keterkaitan Tema Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Tengah, dan Kota Salatiga Tahun 2027 ..... IV-32

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 4. 5. Keterkaitan Arah kebijakan dan Strategi Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kota Salatiga Tahun 2027 ..... IV-33
Tabel 4. 6. Dukungan Kegiatan Kota Salatiga terhadap Program Prioritas Delegasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027 ..... IV-57
Tabel 4. 7. Dukungan Program Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2027 terhadap Program Prioritas Nasional Tahun 2027 ..... IV-60
Tabel 4. 8. Dukungan Pemerintah Kota Salatiga terhadap 17 Program Prioritas Presiden IV-69
Tabel 4. 9. Dukungan Pemerintah Kota Salatiga terhadap Program Strategis Nasional (ProSN) Tahun 2027 ..... IV-73
Tabel 4. 10. Keterkaitan Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah, Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas pada RKPD Kota Salatiga Tahun 2027 ..... IV-85
Tabel 4. 12. Dukungan Pencapaian Indikator Tematik Provinsi Jawa Tengah dengan RKPD Kota Salatiga Tahun 2027 ..... IV-104
Tabel 4. 12. Keselarasan Prioritas Pembangunan dan Prioritas Tahun 2027 sesuai Rancangan RPJMD dengan Program Unggulan Kepala Daerah IV-106
Tabel 4. 13. Keterkaitan Permasalahan, Isu Strategis dan Strategi sesuai Prioritas Pembangunan Kota Salatiga Tahun 2027 ..... IV-108
Tabel 4. 14. Kamus Usulan Aspirasi Kota Salatiga Tahun 2027 ..... IV-115
Tabel 4. 15. Keterkaitan Sasaran, Prioritas terhadap Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2027 Kota Salatiga IV-118
Tabel 4. 16. Cascading Tujuan dan Sasaran Pembangunan terhadap Pengarus Utamaan Gender (PUG) Tahun 2027 Kota Salatiga IV-140
Tabel 4. 17. Sasaran dan Prioritas dalam mendukung Pengarusutamaan Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim IV-149
Tabel 4. 18. Sasaran dan Prioritas dalam Mendukung Pencapaian Standar Pelayanan Minimal IV-155
Tabel 4. 19. Sasaran dan Prioritas dalam Mendukung Penanggulangan Kemiskinan IV-179
Tabel 4. 20. Sasaran dan Prioritas dalam Mendukung Percepatan Penurunan Stunting IV-201
Tabel 4. 21. Rekomendasi Perencanaan dalam Pencapaian Program Unggulan Wali Kota IV-235

Tabel 5. 1 Dukungan Program Pembangunan Daerah Kota Salatiga terhadap Prioritas Nasional Tahun 2027 ..... V-2
Tabel 5. 2 Dukungan Program Pembangunan Daerah Kota Salatiga terhadap Prioritas Presiden Tahun 2027 ..... V-11
Tabel 5. 3 Dukungan Program Pembangunan Daerah Kota Salatiga terhadap Program Strategis Nasional Tahun 2027 ..... V-13
Tabel 5. 4 Rekapitulasi Dukungan Program pada Prioritas Pembangunan Kota Salatiga tahun 2027 ..... V-25
Tabel 5. 5 Keterkaitan Program Unggulan dengan Penyelesaian Permasalahan Pembangunan dqan Isu Strategis V-36
Tabel 5. 5 Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2027 yang menerapkan Konsesp Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS) V-42
Tabel 5. 6 Akomodasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kota Salatiga Tahun 2027 ..... V-59
Tabel 5. 7 Akomodasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kota Salatiga Tahun 2027 ..... V-75

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 5. 8 Akomodasi untuk Kebijakan Penurunan Stunting Tahun 2027 ..... V-81
Tabel 5. 9 Akomodasi untuk Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Tahun 2027 ..... V-95
Tabel 5. 10 Kerangka Pendanaan Kota Salatiga Tahun 2027 ..... V-130

Tabel 6. 1. Indikator Kinerja Utama Kota Salatiga Tahun 2027 ..... VI-1
Tabel 6. 2. Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah Kota Salatiga Tahun 2027 ..... VI-2
Tabel 6. 3. Keselarasan Sasaran Indikator Makro Provinsi Jawa Tengah dengan Kota Salatiga VI-11
Tabel 6. 4. Keselarasan Indikator Utama Pembangunan Provinsi Jawa Tengah dengan Kota Salatiga VI-12
Tabel 6. 5. Keselarasan Indikator Tematik Provinsi Jawa Tengah dengan RKPD Kota Salatiga Tahun 2027 ..... VI-21
Tabel 6. 6. Keselarasan Intervensi Pembangunan Kewilayahan antara RKP dengan RKPD Kota Salatiga VI-21
Tabel 6. 7. Keselarasan Kegiatan Prioritas Utama (Prioritas Nasional) dengan Kota Salatiga VI-23
Tabel 6. 8. Program , Indikator dan Target Kinerja berdasarkan urusan Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2027 ..... VI-31
Tabel 6. 9. Indikator Utama Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2027 ..... VI-69

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Salatiga Tahun 2027 merupakan penjabaran tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Salatiga Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2025. Selain itu, Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 juga memperhatikan penjabaran tahun ketiga dari visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2024. Selanjutnya penyusunan RKPD Tahun 2027 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Salatiga Tahun 2025-2045, serta mempertimbangkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 dan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027.

Penyusunan dokumen RKPD Tahun 2027 memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja RKPD Tahun 2025, isu-isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional di daerah yang meliputi kebijakan program strategis nasional, amanat pembangunan global / nasional / regional, regulasi yang berlaku, dan dinamika agenda pembangunan nasional lainnya. Selain itu, kebijakan pembangunan daerah tahun 2027 juga memperhatikan berbagai proyeksi dalam RKPD Tahun 2027. Penyusunan RKPD Kota Salatiga Tahun 2027 juga memedomani arah kebijakan pembangunan dari program Asta Cita dalam RPJMN 2025 – 2029, RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029, rancangan RKP 2027, Program Strategis Nasional, dan RKPD Provinsi Tahun 2027. Berdasarkan dokumen perencanaan tersebut, RKPD Kota Salatiga tahun 2027 diarahkan pada tahap kedua pembangunan lima tahun yaitu tahap "***Pengembangan SDM yang sehat dan cerdas dan perekonomian daerah yang unggul, didukung pelayanan publik bermutu dan infrastruktur wilayah yang sesuai daya dukung lingkungan hidup***". Tahun kedua ini difokuskan pada ***"Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif didukung dengan SDM Unggul"***. Prioritas Kota Salatiga tahun 2027 diharapkan memberikan dukungan pada tahap pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027 untuk "Peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah" yang difokuskan pada tema pembangunan **"Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah Sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi"** . Selain itu tema pembangunan 2027 Kota Salatiga juga mendukung Fokus tahapan RPJMN pada tahun 2027 yaitu **penguatan fondasi transformasi ekonomi** melalui implementasi proyek strategis nasional.

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah, RKPD mempunyai nilai yang penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, antara lain :

1. Merupakan instrumen pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah jangka menengah;
2. Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, berupa program/kegiatan OPD dan/atau lintas OPD;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Mewujudkan konsistensi program dan sinkronisasi pencapaian sasaran rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
4. Menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun RAPBD; dan
5. Menjadi pedoman dalam mengevaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD

1.1.1 Proses Penyusunan

Proses penyusunan RKPD dilaksanakan melalui 6 (enam) tahapan, mulai dari persiapan penyusunan RKPD; penyusunan rancangan awal; penyusunan rancangan; pelaksanaan Musrenbang yang dimulai dari tingkat Kelurahan sampai ke tingkat Kota; perumusan rancangan akhir; dan penetapan RKPD.

Penjelasan proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan RKPD
   a. Penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPD;
   b. Orientasi mengenai RKPD oleh Tim Penyusun RKPD;
   c. Penyusunan agenda tim kerja penyusunan RKPD; dan
   d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.
2. Penyusunan Rancangan Awal RKPD
   a. Analisis gambaran umum kondisi daerah;
   b. Analisis rancangan kerangka ekonomi daerah;
   c. Analisis kapasitas keuangan daerah;
   d. Penelaahan rancangan awal renja perangkat daerah;
   e. Penelaahan rancangan awal renja perangkat daerah;
   f. Perumusan permasalahan pembangunan daerah;
   g. Penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD;
   h. Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dengan program strategis nasional;
   i. Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
   j. Perumusan prioritas pembangunan daerah; dan
   k. Perumusan rencana kerja program dan pendanaan.

   Rancangan awal RKPD dibahas bersama dengan kepala Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan.
3. Penyusunan Rancangan RKPD

   Penyusunan Rancangan RKPD sebagai proses penyempurnaan Rancangan Awal RKPD Kota Salatiga Tahun 2027 berdasarkan hasil verifikasi Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan dengan penyelarasan tema pembangunan, prioritas dan arah kebijakan pembangunan baik Nasional, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Salatiga.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Pelaksanaan Musrenbang RKPD

   Musrenbang RKPD sebagai forum pemangku kepentingan, dilaksanakan untuk membahas Rancangan RKPD. Musrenbang RKPD di tingkat Kota Salatiga merupakan rangkaian proses perencanaan yang dimulai dari Pra Musrenbang di tingkat RT dan RW, Musrenbang Kelurahan, Kecamatan, Forum Konsultasi Publik dan Forum Perangkat Daerah. Proses Musrenbang RKPD ini melibatkan berbagai stakeholders seperti unsur pemerintah daerah beserta jajarannya, DPRD, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, tokoh masyarakat dan tokoh agama, termasuk pelibatan perempuan dan anak secara terintegrasi dan partisipatif.

5. Perumusan Rancangan Akhir RKPD

   Perumusan Rancangan Akhir RKPD merupakan proses penyempurnaan Rancangan RKPD berdasarkan Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Kota Salatiga. Rancangan Akhir RKPD yang telah disempurnakan disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk dibahas oleh seluruh perangkat daerah untuk memastikan seluruh program dan kegiatan perangkat daerah telah diakomodir.

6. Penetapan RKPD Tahun 2027

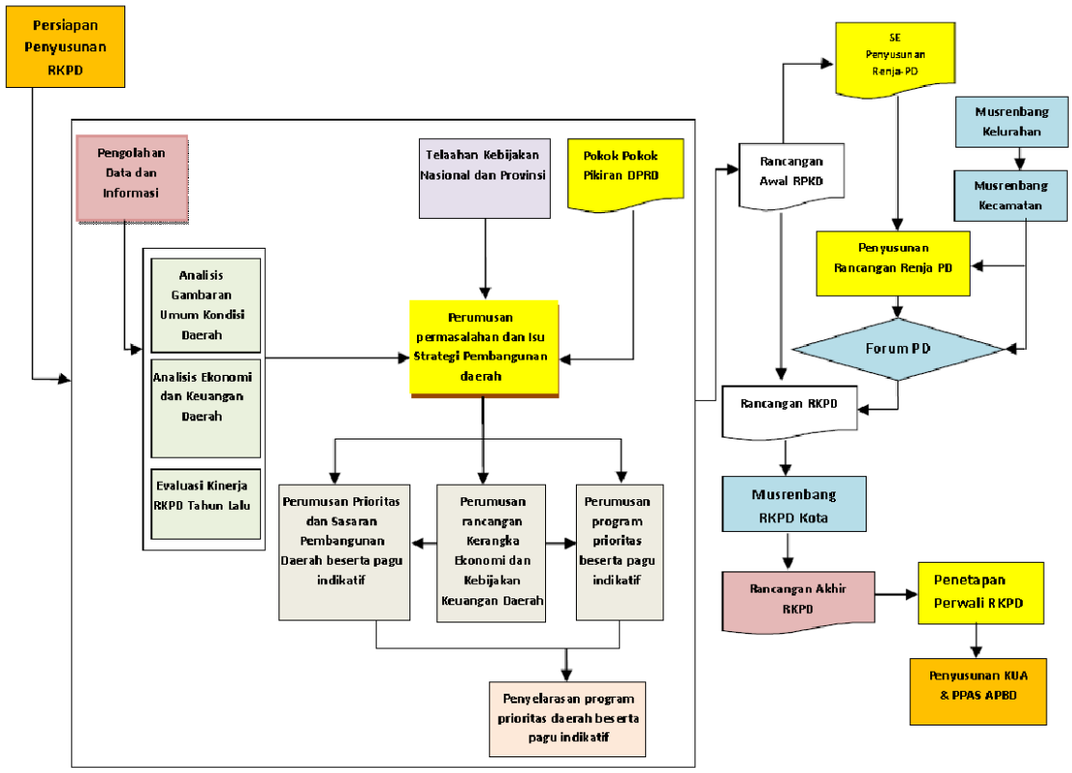
   Rancangan Peraturan Wali Kota tentang RKPD yang telah disempurnakan disampaikan oleh kepala Bappeda kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah untuk persetujuan penetapan dan pengundangan.

Kedudukan dokumen RKPD sangat strategis dan terkait erat dengan dokumen penganggaran daerah, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juga menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD. RKPD Kota Salatiga Tahun 2027 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (Peraturan Walikota) menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027 untuk menyusun APBD Tahun Anggaran 2027.

Proses penyusunan RKPD Kota Salatiga Tahun 2027 secara sederhana dapat dibuat diagram pada Gambar 1.1 berikut

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Gambar 1. 1 Diagram Proses Penyusunan RKPD 2027



1.1.2 Prinsip dan Pendekatan Penyusunan

Pemerintah Daerah Kota Salatiga dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 diwajibkan untuk memperhatikan dan mengintegrasikan prinsip-prinsip perbaikan tata kelola pemerintahan sebagaimana diukur melalui *Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention* (MCSP) yang dikoordinasikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dokumen RKPD Tahun 2027 ini mempunyai kedudukan, peran, dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagai berikut :

1. Secara substansial memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, perkiraan maju, dan perangkat daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam satu tahun;
2. Secara normatif menjadi dasar penyusunan rancangan kebijakan umum APBD (KUA) dan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (R-APBD);
3. Secara operasional memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam rencana kerja (Renja) perangkat daerah; dan
4. Secara faktual menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 1. 1 Prinsip Penyusunan RKPD Kota Salatiga Tahun 2027

PRINSIP	INDIKATOR
Merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional	Konsistensi dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah Kota Salatiga (RKPD) tahun 2027 dengan RKPD Provinsi Jawa Tengah dan Rencana Kerja Pemerintah
Dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing	Pelibatan para pemangku kepentingan pada proses penyusunan dokumen perencanaan melalui Musrenbang berjenjang dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, dan Tingkat Kota; forum konsultasi publik, dan forum Rencana Kerja Perangkat Daerah
Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah	Pendekatan yang berorientasi pada substansi, dengan penyusunan rencana kerja yang diperjelas lokasi kegiatan sesuai dengan RTRW sebagaimana Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2023-2043, pembangunan kewilayahan Propinsi Jawa Tengah dan Nasional
Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional	Penetapan urutan kegiatan sebagai prioritas pembangunan disusun berdasarkan pada data potensi dan kebutuhan lokasi kegiatan, serta menyesuaikan dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional

Sementara itu pendekatan penyusunan RKPD Kota Salatiga Tahun 2027 dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada proses yaitu pendekatan teknokratik, partisipatif, *bottom up/top down* serta politik, serta pendekatan yang berorientasi pada substansi yaitu pendekatan tematik-holistik, integratif, dan spasial. Detil konfigurasi pendekatan proses penyusunan RKPD Kota Salatiga Tahun 2026 adalah sebagaimana tabel-tabel di bawah ini.

Tabel 1. 2 Pendekatan Penyusunan RKPD Kota Salatiga Tahun 2027

PENDEKATAN	PARAMETER
TEKNOKRATIK	Dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.
	Ketersediaan dan kelengkapan sumber data dan informasi dalam penyusunan RKPD Kota Salatiga Tahun 2027.
	Kapasitas Perencana Daerah dalam Penyiapan RKPD Kota Salatiga Tahun 2027.
	Mendasarkan pada hasil evaluasi kinerja RKPD periode tahun 2025
PARTISIPATIF	Dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang dilaksanakan melalui forum-forum yang diselenggarakan seperti Musrenbang dan Konsultasi Publik
DARI BAWAH (BOTTOM – UP)	Usulan dari Musrenbang berjenjang dari tingkat Kelurahan, tingkat kecamatan, dan Tingkat Kota
	Partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan
DARI ATAS (TOP-DOWN)	Sinkronisasi Prioritas Daerah dalam RKPD Kota Salatiga Tahun 2027, Prioritas Provinsi Jawa Tengah dalam RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027 dan Prioritas Nasional dalam RKP 2027

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PENDEKATAN	PARAMETER
	Sinergitas program dan kegiatan dalam RKPD Kota Salatiga Tahun 2027, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027 dan RKP Tahun 2027
POLITIK	Dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala Daerah terpilih yang dijabarkan dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD
	Melakukan telaah terhadap pokok-pokok pikiran DPRD Kota Salatiga hasil penjaringan aspirasi masyarakat yang dilaksanakan saat reses pada tahun 2025
HOLISTIK - TEMATIK	Dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya
INTEGRATIF	Menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah
DARI BAWAH (BOTTOM – UP)	Dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Salatiga Tahun 2027, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Minimal;

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Salatiga-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029;
19. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Salatiga;
20. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2023-2043;
22. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengarusutaman Gender;
23. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
24. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Salatiga Tahun 2025-2045;
25. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Salatiga Tahun 2025-2029;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, yang selanjutnya diperjelas dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Ineventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027.

1.3. Hubungan Antar Dokumen RKPD

RKPD Kota Salatiga tahun 2027 memiliki hubungan erat dengan beberapa dokumen perencanan lainnya yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. RKPD dan RPJPD 2025-2045

   RKPD Kota Kota Salatiga Tahun 2027 merupakan penjabaran periode kedua RPJPD yakni periode 2025-2029. RKPD berisikan prioritas program dan kegiatan berdasarkan sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kota Salatiga Tahap kedua yang telah disesuaikan dengan RPJPD Provinsi Jawa Tengah dan RPJPN.
2. RKPD dengan RPJMD 2025-2029

   RKPD Kota Salatiga Tahun 2027 merupakan penjabaran tahun kedua dari RPJMD tahun 2025-2029 yang berisikan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan prioritas pembangunan. RKPD berisi penjabaran program pembangungan dan capaian kinerja tahunan dalam mendukung target capaian lima tahunan. Melalui RKPD, dapat dilakukan upaya penyesuaian dalam mencapai target pembangunan akhir periode RPJMD.
3. RKPD dan Renja PD

   RKPD sebagai pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah adalah dokumen tahunan OPD yang berisikan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berkenaan dan mengacu pada Renstra OPD.
4. RKPD dan APBD

   RKPD digunakan sebagai bahan evaluasi untuk memastikan bahwa APBD telah disusun berdasarkan RKPD.
5. RKPD dan RTRW

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Penyusunan RKPD memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai rencana pola ruang, rencana struktur ruang, dan rencana kawasan strategis Kota Salatiga sebagai dasar untuk memantapkan lokasi kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang.

6. RKPD dan RPKD

   Dalam penyusunan RKPD memperhatikan dan mempertimbangkan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2023-2027, di mana program-program dalam RPKD telah masuk ke dalam RKPD yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam hal penurunan angka kemiskinan.

7. RKPD dan TPB (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)

   Dalam penyusunan RKPD telah memuat empat pilar pembangunan TPB, yang telah masuk dalam program kegiatan di RKPD

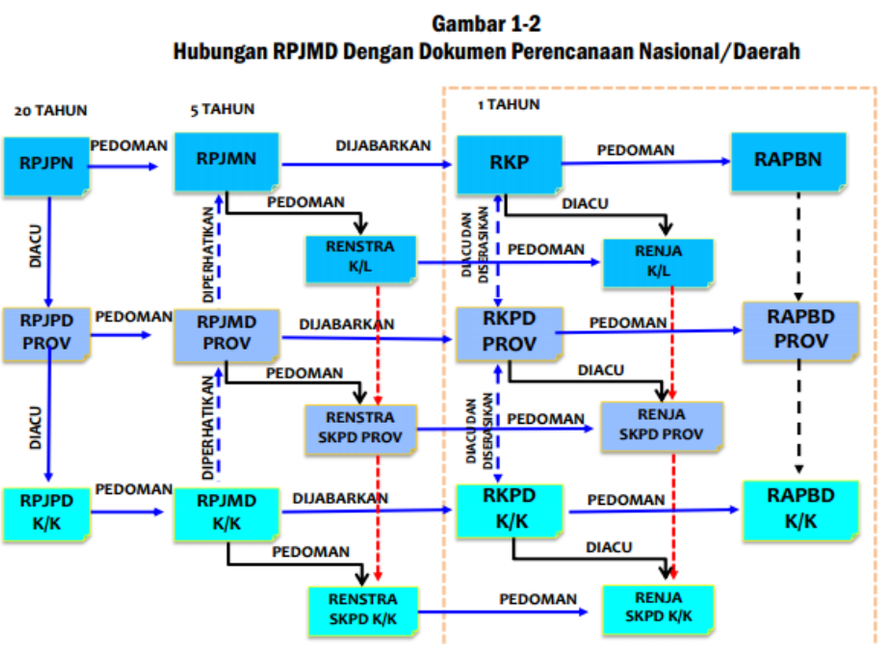
8. RKPD dan SPM

   Dalam penyusunan RKPD telah memuat indikator SPM ke dalam indikator program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pelaksana SPM.

9. RKPD dengan Dokumen Perencanaan Nasional dan Provinsi

   Dalam siklus manajemen pembangunan yang meliputi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, RKPD memiliki fungsi dan peran yang cukup krusial. RKPD merupakan penjabaran dari dokumen perencanaan 20 tahunan yaitu RPJPD dan dokumen perencanaan 5 tahunan yaitu RPJMD serta memperhatikan dan mengacu pada dokumen perencanaan nasional dan provinsi. Dokumen RKPD menjadi acuan penyusunan Renja Perangkat Daerah (Renja PD) yang juga disusun dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD) sebagai dokumen perencanaan strategis perangkat daerah.

Gambar 1. 2 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan Antara Pusat, Provinsi dan Kota Salatiga



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Selain berpedoman pada Dokumen Pusat dan Provinsi yang merupakan dokumen wajib yang perlu diselaraskan, RKPD Kota Salatiga tahun 2027 juga mengacu pada dokumen-dokumen sektoral yang menjadi salah satu sumber informasi penting untuk digunakan sebagai bahan telaahan dalam menentukan permasalahan dan isu strategis pembangunan. Selanjutnya akan menjadi salah satu dasar penentuan prioritas dan sasaran pembangunan, rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah serta penyelarasan program prioritas dan pagu indikatif.

1.4. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Salatiga Tahun 2027 dimaksudkan untuk :

1) Sebagai acuan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2027 dan menetapkan program prioritas untuk seluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
2) Sebagai acuan dalam menetapkan program prioritas untuk seluruh urusan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka pencapaian target indikator utama pembangunan (IUP) RPJPD Kota Salatiga Tahun 2025-2045;
3) Sebagai acuan dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2027.

b. Tujuan

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Salatiga Tahun 2027 bertujuan untuk :

1) Memberikan landasan operasional dan pedoman penyelenggaraan pembangunan bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang berisikan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2027;
2) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan tahun 2027 yang berpedoman pada dokumen RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPJMD Tahun 2025-2029;
3) Memberikan arah, acuan dan indikator capaian yang harus dipenuhi serta menjadi instrumen untuk melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah;
4) Sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD Kota Salatiga Tahun 2027

RKPD Kota Salatiga Tahun 2027 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB I PENDAHULUAN

Memuat gambaran umum penyusunan dokumen RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Bab ini mengemukakan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika dokumen RKPD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memberikan penjelasan tentang gambaran umum kondisi daerah yang terdiri dari aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Selanjutnya mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan tahun 2025 dan realisasinya terhadap target RPJMD serta permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis di Kota Salatiga.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun 2025 dan perkiraan tahun 2027, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas pembangunan tahun 2027 berdasarkan hasil evaluasi dan analisis pelaksanaan RKPD tahun 2025, keterkaitannya dengan RPJPD dan teknokratik RPJMD serta identifikasi prioritas pembangunan di tingkat daerah dan nasional.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan daerah yang disusun dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, prioritas dan fokus pembangunan daerah tahun 2027 beserta pagu indikatif.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Memuat indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Daerah (IKD).

BAB VII PENUTUP

Memuat harapan berkenaan dengan pelaksanaan RKPD Kota Salatiga tahun 2027.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografis dan Demografis

2.1.1. Kondisi Geografi

Kota Salatiga terletak antara 007.17’ dan 007.17’.23” Lintang Selatan, dan antara 110.27’.56,81” dan 110.32’.4,64” Bujur Timur. Kota Salatiga terletak di ketinggian 450-825 dari permukaan air laut Wilayah Kota Salatiga secara morfologis berada di daerah cekungan kaki Gunung Merbabu dan dikelilingi oleh beberapa gunung, antara lain Gunung Telomoyo, Gunung Payung dan Gunung Rong. Keberadaan gunung tersebut menyebabkan tanah di Kota Salatiga subur dan potensi alam yang cukup besar.

Berdasarkan kondisi topografi, wilayah Kota Salatiga dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu :

a. Daerah Bergelombang ± 65%, terdiri dari Kelurahan Dukuh, Ledok, Kutowinangun Lor, Kutowinangun Kidul, Salatiga, Sidorejo Lor, Bugel, Kumpulrejo dan Kauman Kidul.
b. Daerah Miring ± 25%, terdiri dari Kelurahan Tegalrejo, Mangunsari, Sidorejo Lor, Sidorejo Kidul, Tingkir Lor, Pulutan, Kecandran, Randuacir, Tingkir Tengah dan Cebongan.
c. Daerah Datar ± 10%, terdiri dari Kelurahan Kalicacing, Noborejo, Kalibening dan Blotongan

Berdasarkan kondisi geologi, tekstur tanah Kota Salatiga dibedakan menjadi tanah Latosol Coklat dan tanah Latosol Coklat Tua, dengan rincian sebagai berikut:

a. Tanah Latosol Coklat

   Tanah latosol coklat bahan induknya terdiri dari tufa vulkanis intermedier, tekstur remah dan gembur, produktivitas tanah sedang sampai tinggi. Jenis tanah ini terdapat di sebagian wilayah Kota Salatiga dan cocok ditanami padi, palawija, sayur-sayuran, buah-buahan, cengkih dan lain-lain.
b. Tanah Latosol Coklat Tua

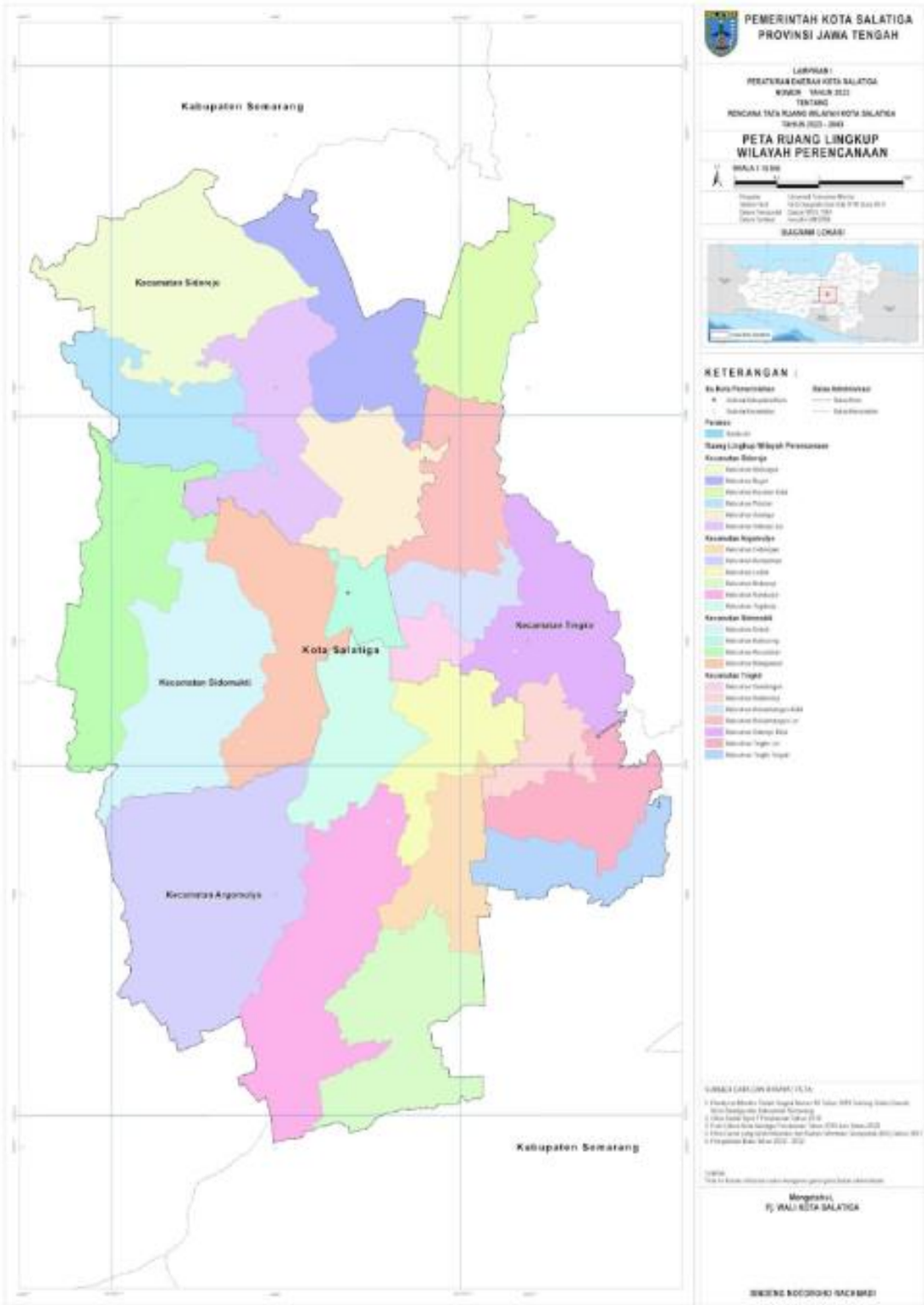
   Bahan dasarnya terdiri dari tufa vulkanis intermedier, tekstur tanahnya remah dan gembur sekali. Tanah ini terdapat di bagian ujung kota, sekitar Gunung Rong. Tanah ini cocok ditanami kopi, teh, coklat, padi, pisang, cengkih dan tanaman campuran

Berdasarkan kondisi klimatologi, Kota Salatiga beriklim tropis dengan suhu udara rata-rata 23ºC-28ºC. Curah hujan dipengaruhi oleh keadaan iklim, keadaan topografi dan perputaran/ pertemuan arus udara.

Peta wilayah Kota Salatiga disajikan pada Gambar 2.1.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Gambar 2. 1 Peta Kota Salatiga



Sumber : Perda Nomor 03 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2023-2043

Berdasarkan letak geografisnya, Kota Salatiga beriklim tropis dengan dua pergantian musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Musim penghujan terjadi pada bulan Nopember–April dipengaruhi oleh angin muson barat, sedang musim kemarau terjadi antara bulan Mei–Oktober yang dipengaruhi oleh angin muson timur. Sedangkan jumlah curah hujan terendah 3 mm/tahun dan tertinggi 62 mm/tahun.

Wilayah administrasi Kota Salatiga dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Semarang dengan batas wilayah sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

a. Sebelah Utara berbatasan dengan:

- Kecamatan Pabelan: Desa Pabelan, Desa Pejanten
- Kecamatan Tuntang: Desa Kesongo, Desa Watu Agung

b. Sebelah Timur berbatasan dengan:

- Kecamatan Pabelan: Desa Ujung-ujung, Desa Sukoharjo, Desa Glawan
- Kecamatan Tengaran: Desa Bener, Desa Tegal Waton,Desa Nyamat

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan:

- Kecamatan Getasan: Desa Sumogawe, Desa Samirono, Desa Jetak
- Kecamatan Tengaran: Desa Patemon, Desa Karang Duren

d. Sebelah Barat berbatasan dengan:

- Kecamatan Tuntang: Desa Candirejo, Desa Jombor, Desa Sraten, Desa Gedongan
- Kecamatan Getasan: Desa Polobogo Kecamatan Getasan.

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

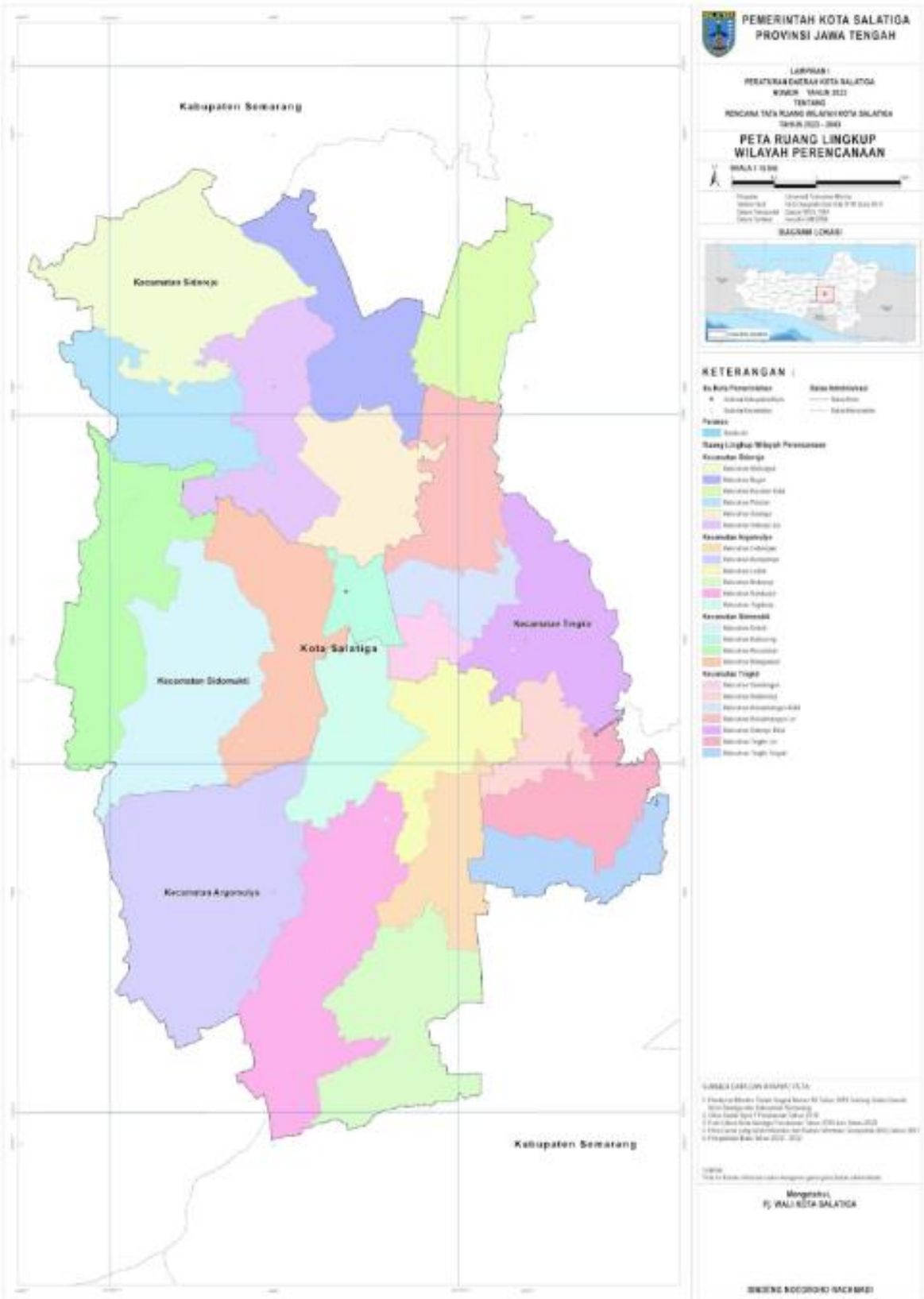
Kota Salatiga berjarak ± 53 kilometer dari Kota Surakarta dan ± 50 kilometer dari Kota Semarang, serta dilintasi jalur arteri primer (jalan nasional) Jakarta-Semarang-Surakarta. Karena menjadi perlintasan dua kota besar di Jawa Tengah (Semarang–Surakarta) dan perlintasan dari Jawa Timur (jalur tengah) ke Jawa Barat, maka transportasi darat yang melalui Kota Salatiga cukup ramai. Oleh karena itu, Kota Salatiga berpotensi menjadi kota transit.

Dalam RPJMN Tahun 2025-2029, pengembangan Kawasan Perkotaan Salatiga (tematik kota pendidikan) sebagai kota satelit dari WM Semarang, antara lain melalui :

a. Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu
b. Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau
c. Penyediaan dan penirgkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga keda yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan
d. Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Gambar 2. 2 Peta Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan



Sumber : RTRW Kota Salatiga, 2023

Menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga, pembagian Sistem Pusat Pelayanan di Kota Salatiga, masing-masing memiliki fungsi sebagai berikut.

a. Pusat Pelayanan Kota (PPK) Salatiga berfungsi sebagai pusat pemerintahan skala kota dan perdagangan dan jasa skala regional, pusat pelayanan Pendidikan tinggi yang berpusat pada Kelurahan Kalicacing mencakup wilayah pelayanan Kelurahan Kalicacing

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

di Kecamatan Sidomukti, Kelurahan Salatiga di Kecamatan Sidorejo dan Kelurahan Kutowinangun Kidul dan Kelurahan Kutowinangun Lor di Kecamatan Tingkir.

b. **Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) Salatiga** adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub daerah yang meliputi :
   1) **SPPK Sidorejo** yang berfungsi sebagai kawasan pendidikan, perdagangan dan jasa, pariwisata, permukiman, dan pusat pemerintahan skala kecamatan berada pada Kelurahan Sidorejo Lor di Kecamatan Sidorejo;
   2) **SPPK Tingkir** yang berfungsi sebagai kawasan pelayanan transportasi, pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional, perdagangan dan jasa, permukiman, dan pusat pemerintahan skala kecamatan berada pada Kelurahan Sidorejo Kidul di Kecamatan Tingkir;
   3) **SPPK Argomulyo** yang berfungsi sebagai pengembangan kawasan peruntukan industri, pusat kegiatan pertahanan dan kemanan negara, sport centre, perdagangan dan jasa, permukiman, dan pusat pemerintahan skala kecamatan berada pada Kelurahan Randuacir di Kecamatan Argomulyo;
   4) SPPK Sidomukti yang berfungsi sebagai kawasan perdagangan dan jasa, pusat kegiatan kesehatan, pusat kegiatan pertahanan dan kemanan negara, permukiman, dan pusat pemerintahan skala kecamatan berada pada Kelurahan Mangunsari di Kecamatan Sidomukti.

c. **Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Salatiga** berfungsi sebagai pusat pelayanan pemerintahan, Pendidikan, permukiman dan perdagangan dan jasa berada di:
   1) Kecamatan Argomulyo, terdiri atas Kelurahan Noborejo, Kelurahan Ledok, Kelurahan Tegalrejo, Kelurahan Kumpulrejo dan Kelurahan Cebongan;
   2) Kecamatan Sidomukti, terdiri atas Kelurahan Kecandran dan Kelurahan Dukuh;
   3) Kecamatan Sidorejo, terdiri atas Kelurahan Blotongan; Kelurahan Bugel; Kelurahan Kauman Kidul dan Kelurahan Pulutan;
   4) Kecamatan Tingkir, terdiri atas Kelurahan Gendongan, Kelurahan Kalibening, Kelurahan Tingkir Lor dan Kelurahan Tingkir Tengah.

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Wilayah rawan bencana di Kota Salatiga tersebar di beberapa kelurahan diantaranya di Kelurahan Blotongan, Bugel, Sidorejo Kidul, Tegalrejo, Randuacir dan Kumpulrejo. Peningkatan dan Pembangunan jalur evakuasi bencana meliputi:

a. Jalan lingkungan menuju lapangan Prampelan pada Kelurahan Blotongan di Kecamatan Sidorejo;
b. Jalan lingkungan menuju gedung pertemuan pada Kelurahan Sidorejo Lor di Kecamatan Sidorejo;
c. Jalan lingkungan menuju gedung pertemuan pada Kelurahan Sidorejo Kidul di Kecamatan Tingkir;
d. Jalan lingkungan menuju gedung pertemuan pada Kelurahan Randuacir di Kecamatan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Argomulyo;

e. Jalan lingkungan menuju lapangan sepak bola di Kelurahan Randuacir di Kecamatan Argomulyo; dan
f. Jalan lainnya berdasarkan kajian.

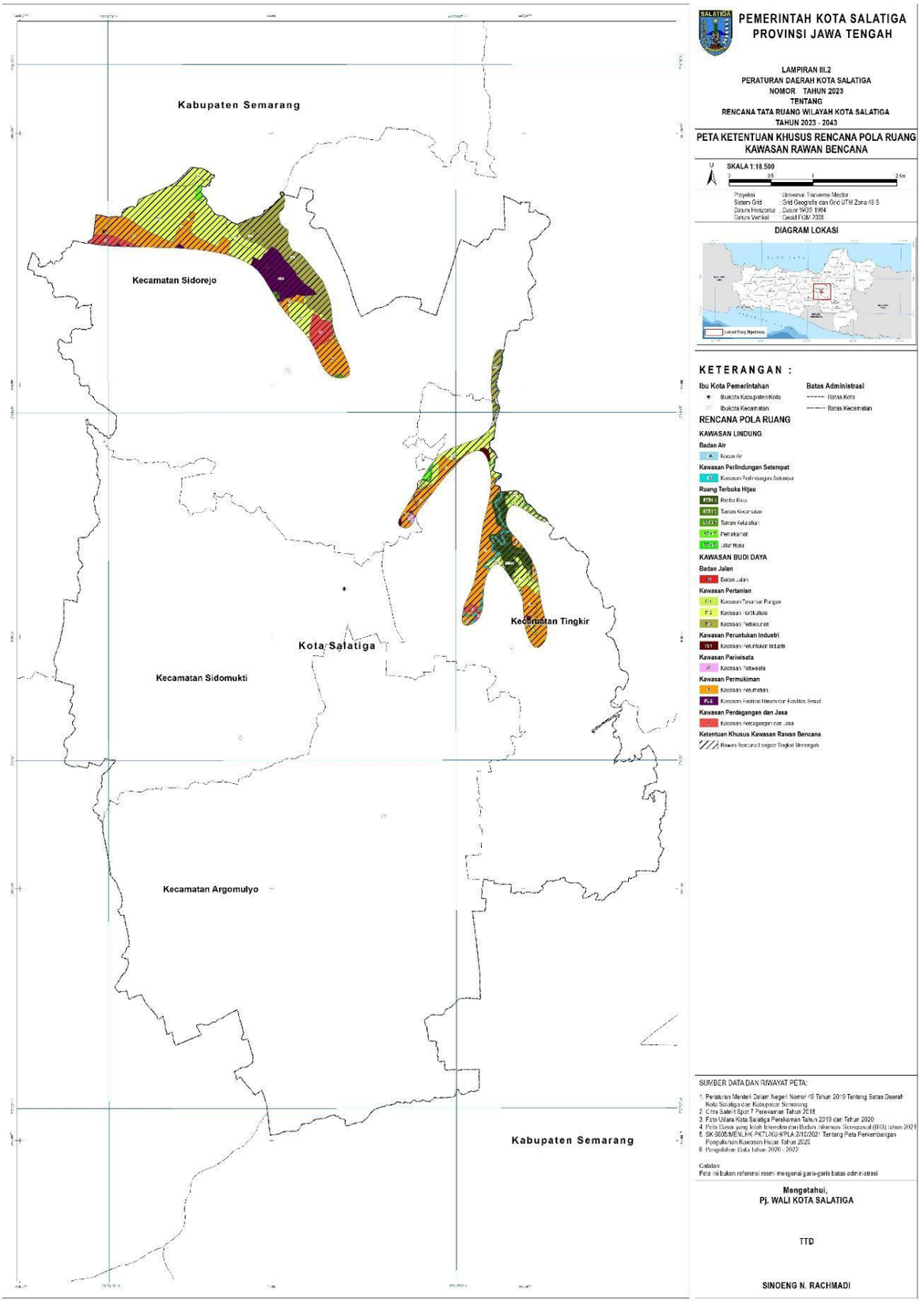
Sedangkan untuk tempat evakuasi bencana meliputi :

a. Lapangan Kelurahan Randuacir di Argomulyo dan Kelurahan Blotongan di Kecamatan Sidorejo;
b. Bangunan kantor pemerintah pada Kelurahan Sidorejo Lor di Kecamatan Sidorejo, Kelurahan Sidorejo Kidul di Kecamatan Tingkir,Kelurahan Randuacir di Kecamatan Argomulyo; dan
c. Ruang/Bangunan lainnya.

Peta Rencana Pola Ruang Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana Kota Salatiga sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Gambar 2. 3 Peta Rencana Pola Ruang Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana Kota Salatiga



Sumber : RTRW Kota Salatiga, 2023

2.1.4. Aspek Demografi

Data jumlah penduduk Kota Salatiga pada tahun 2025 sebanyak 199.906 jiwa, jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebanyak 198.871 jiwa, maka mengalami kenaikan jumlah penduduk sebanyak 1.035 jiwa atau 0,47%. Pada tahun 2025 jumlah penduduk laki-laki sebanyak 98.761 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 100.589 jiwa artinya

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

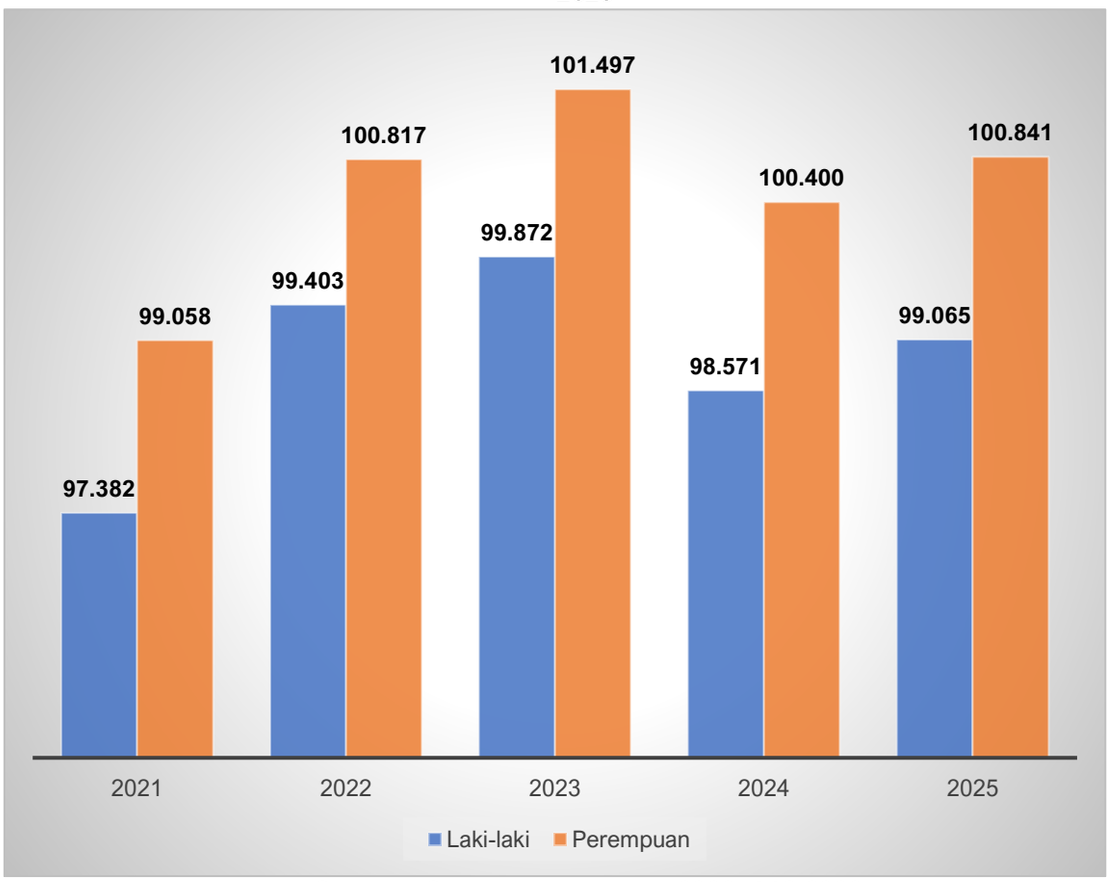
penduduk laki-laki lebih sedikit dibanding penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin tahun 2025 sebesar 98,24%, meningkat sebesar 0,07% dibandingkan tahun 2024 sebesar 98,17%. Data jumlah penduduk dan rasio jenis kelamin di Kota Salatiga tahun 2021-2025 disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2. 1 Data Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin di Kota Salatiga Tahun 2021-2025

No	Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)			Rasio Jenis Kelamin
		Laki-laki	Perempuan	Total	
1.	2021	97.382	99.058	196.440	98,30
2.	2022	99.403	100.817	200.220	98,59
3.	2023	99.872	101.497	201.369	98,39
4.	2024	98.571	100.400	198.971	98,17
5.	2025	99.065	100.841	199.906	98,24

Sumber : Salatiga dalam Angka 2026, BPS 2026

Grafik 2. 1 Perbandingan Jumlah Penduduk Laki-laki dan Perempuan di Kota Salatiga Tahun 2021-2025



Sumber : Salatiga dalam Angka 2026, BPS 2026

Persebaran penduduk Kota Salatiga tahun 2025 tertinggi di Kecamatan Sidorejo dengan jumlah penduduk sebanyak 54.898 jiwa dan terendah di Kecamatan Sidomukti sebanyak 45.741 jiwa. Data persebaran penduduk per Kecamatan di Kota Salatiga tahun 2021-2025 disajikan pada Tabel 2.2 berikut.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 2. 2 Data Persebaran Penduduk Per Kecamatan di Kota Salatiga Tahun 2021-2025

Tahun	Argomulyo	Tingkir	Sidomukti	Sidorejo	Kota Salatiga
2021	50.264	46.838	45.054	54.284	196.440
2022	51.542	47.699	45.764	55.215	200.220
2023	52.045	48.106	46.125	55.093	201.369
2024	51.376	47.206	45.634	54.755	198.971
2025	51.894	47.374	45.740	54.898	199.906

Sumber : Salatiga dalam Angka 2026, BPS 2026

Pada tahun 2025, jumlah penduduk berdasarkan kelompok usia tertinggi yaitu kelompok usia lebih dari 60 tahun sebanyak 27.285 jiwa atau sebesar 13,28 % dari jumlah penduduk. Sedangkan kelompok usia terendah yaitu kelompok usia kurang dari 1 tahun sebanyak 1.818 jiwa atau sebesar 0,91% dari jumlah penduduk.

Data jumlah penduduk berdasarkan kelompok usia tahun 2025 disajikan pada Tabel 2.3.

Tabel 2. 3 Data Penduduk Kota Salatiga Berdasarkan Kelompok Usia Tahun 2025

No	Usia (tahun)	Jenis Kelamin		Jumlah (jiwa)	%
		Laki-laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)		
1.	0 sd.1	961	857	1.818	0,91
2.	1 sd 5	6.258	5.784	12.042	6,02
3.	6 sd 10	7.497	6.989	14.486	7,25
4.	11 s.d. 15	8.013	7.570	15.583	7,80
5.	16 s.d. 20	8.045	7.585	15.630	7,82
6.	21 s.d. 25	7.388	7.180	14.568	7,29
7.	26 s.d. 30	7.209	7.340	14.549	7,28
8.	31 s.d. 35	7.358	7.143	14.501	7,25
9.	36 s.d. 40	6.815	7.086	13.901	6,95
10.	41 s.d. 45	8.143	8.395	16.538	8,27
11.	46 s.d. 50	7.454	7.539	14.993	7,50
12.	51 s.d. 55	6.188	6.630	12.818	6,41
13.	56 s.d. 60	5.619	6.318	11.937	5,97
14.	Lebih dari 60	12.117	14.425	26.542	13,28
Jumlah 2025		98.761	100.589	199.906	100
2024		98.571	100.400	198.971	
2023		99.872	101.497	201.369	
2022		99.403	99.058	200.220	
2021		97.382	98.629	196.440	

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga Tahun, 2026

Berdasarkan tingkat pendidikan, jumlah penduduk Kota Salatiga tahun 2025 tertinggi adalah penduduk berpendidikan SLTA/ Sederajat sebanyak 52.430 jiwa dan terendah adalah penduduk berpendidikan Sarjana Strata III sebanyak 190 jiwa.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Data penduduk Kota Salatiga berdasarkan tingkat pendidikan berdasarkan pendidikan tahun 2025 disajikan pada Tabel 2.4.

Tabel 2. 4 Data Penduduk Kota Salatiga Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1)	Tidak/Belum Sekolah	45.336 Jiwa
2)	Belum Taman SD/Sederajat	18.889 Jiwa
3)	Tamat SD/sederajat	26.328 Jiwa
4)	SLTP/ Sederajat	26.574 Jiwa
5)	SLTA/ Sederajat	52.844 Jiwa
6)	Diploma I/II	1.806 Jiwa
7)	Akademi/Diploma III/Sarjana Muda	6.096 Jiwa
8)	Diploma IV/Strata I	19.910 Jiwa
9)	Strata II	1.927 Jiwa
10)	Strata III	196 Jiwa
Jumlah		**199.906 Jiwa**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun, 2026

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan akhir dari penyelenggaraan pembangunan daerah yang merupakan upaya menciptakan kondisi kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Aspek kesejahteraan masyarakat meliputi (1) aspek kesejahteraan dengan fokus kesejahteraan ekonomi, dan (2) aspek kesejahteraan dengan fokus kesejahteraan sosial budaya. Kinerja masing-masing aspek kesejahteraan masyarakat sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

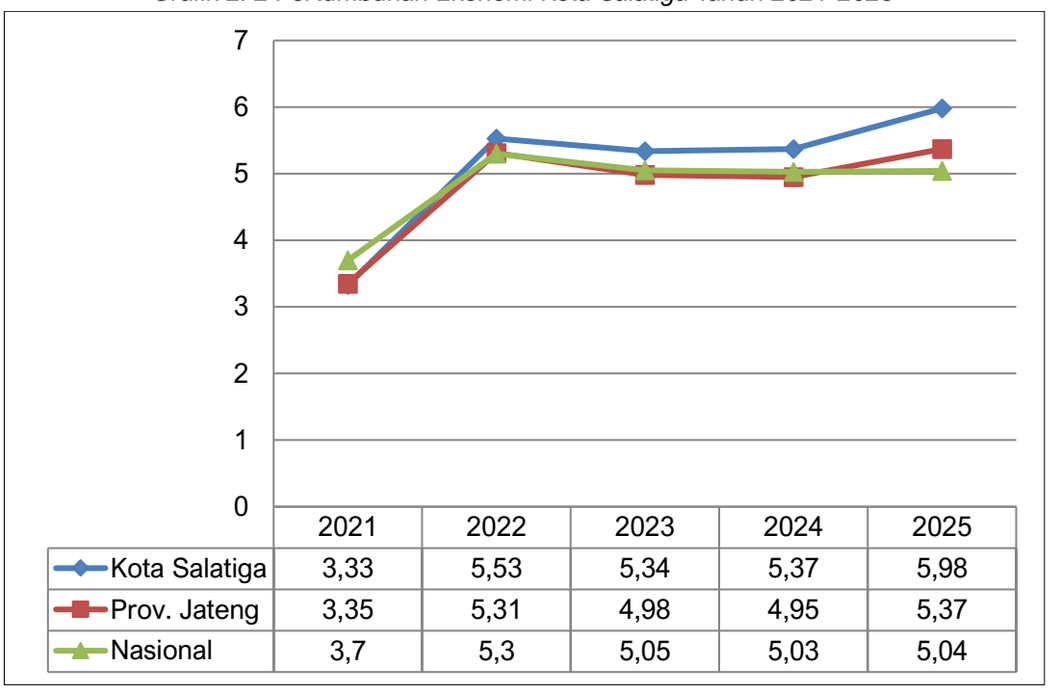
Keberhasilan pembangunan antara lain dapat dilihat pada beberapa indikator utama ekonomi, antara lain, pertumbuhan ekonomi, gini rasio, TPT, TPAK, angka kemiskinan dan rasio penduduk miskin.

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga dapat dianalisis melalui nilai tambah yang dihasilkan oleh setiap sektor produksi yang tercermin dalam nilai PDRB ADHK. Selama periode 2021 - 2025, terjadi fluktuasi cenderung meningkat dalam nilai laju pertumbuhan ekonomi. Dari tahun 2021 laju pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga sebesar 3,33% menjadi 5,98% di tahun 2025. Kemudian jika dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga lebih tinggi dari Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Pergerakan laju ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional sama dengan laju pertumbuhan ekonomu Kota Salatiga memiliki tren fluktuatif cenderung meningkat. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Grafik 2. 2 Pertumbuhan Ekonomi Kota Salatiga Tahun 2021-2025



	2021	2022	2023	2024	2025
Kota Salatiga	3,33	5,53	5,34	5,37	5,98
Prov. Jateng	3,35	5,31	4,98	4,95	5,37
Nasional	3,7	5,3	5,05	5,03	5,04

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2026

b. Laju Inflasi

Inflasi merupakan persentase kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga. Namun, tidak jarang ada barang dan jasa yang harganya justru turun. Kenaikan harga satu atau dua sejumlah barang dan jasa saja tidak dapat disebut inflasi, terkecuali bila kenaikan itu meluas yang mengakibatkan kenaikan harga barang dan jasa lainnya. Dampak dari inflasi salah satunya adalah menurunnya daya beli masyarakat, yang dapat diartikan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat terganggu karena ketidakmampuan penduduk dalam mengkonsumsi barang dan jasa.

Inflasi Kota Salatiga pada tahun 2025 cenderung mengikuti pola inflasi Kota Semarang sebagai kota acuan Indeks Harga Konsumen (IHK) di Provinsi Jawa Tengah. Keterkaitan tersebut dipengaruhi oleh hubungan distribusi barang dan jasa, kesamaan pola konsumsi masyarakat, serta mobilitas ekonomi antarwilayah yang cukup tinggi. Sebagian besar pasokan kebutuhan pokok dan barang strategis di Kota Salatiga berasal dari wilayah Semarang dan sekitarnya, sehingga perubahan harga di Kota Semarang relatif cepat ditransmisikan ke tingkat harga di Salatiga.

Kota Salatiga memiliki industri yang kuat dan konsumsi rumah tangga sebagai komponen besar PDRB. Indeks harga umum mencerminkan perilaku harga lokal terkait makanan, energi, transportasi, dan jasa yang dipengaruhi oleh faktor nasional/regional. Karena itu, tren inflasi Jawa Tengah memberikan gambaran yang cukup representatif bagi Salatiga dalam banyak kasus.

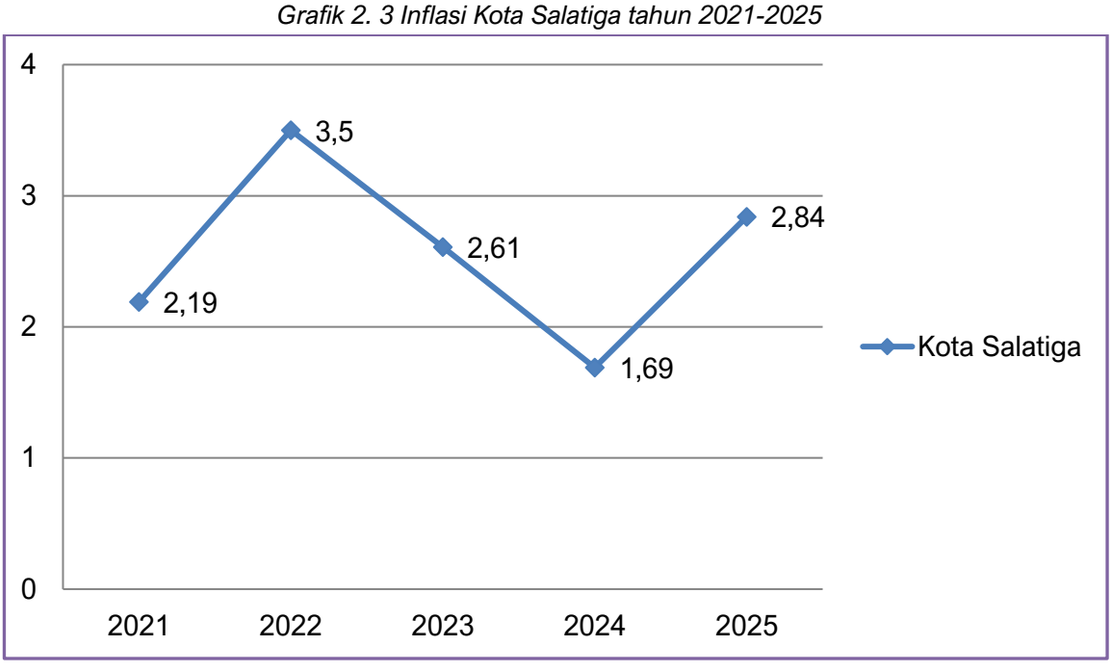
Inflasi di Kota Semarang pada Tahun 2025 sebesar 2,84%, sehingga angka ini digunakan oleh Kota Salatiga sebagai angka inflasi yang mengalami peningkatan sebesar 1,15 % tahun 2024 sebesar 1,69%. Jika mengikuti pola ekonomi regional (Provinsi Jawa Tengah), maka inflasi tahunan di Salatiga kemungkinan menguat dari awal tahun hingga

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

akhir tahun, seperti yang terlihat di provinsi. Inflasi pada 2025 cenderung masih berada dalam target inflasi yang sehat menurut standar Bank Indonesia (sekitar 2–3 %).

Tidak ada bukti deflasi atau inflasi ekstrem di wilayah sekitar, sehingga tekanan harga di Salatiga kemungkinan moderat dan mencerminkan tren regional. Faktor pendorong utama kemungkinan serupa seperti provinsi: harga pangan dan energi, dinamika permintaan musiman, serta kebijakan fiskal/moneter yang mempengaruhi harga barang dan jasa konsumsi. Laju inflasi Kota Salatiga selama kurun waktu tahun 2021-2025 terlihat dalam grafik berikut.

Grafik 2. 3 Inflasi Kota Salatiga tahun 2021-2025



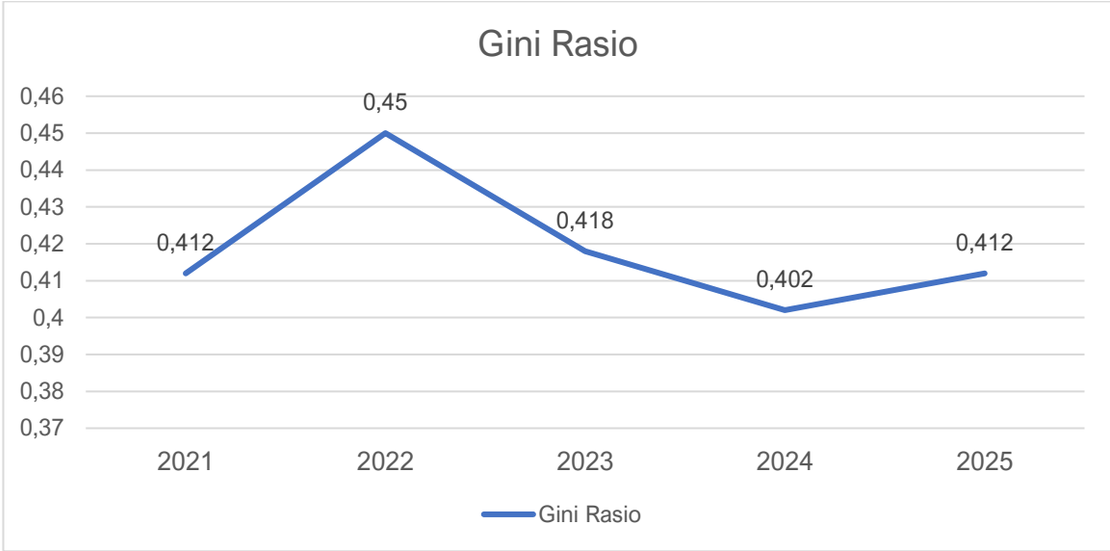
c. Ketimpangan Pendapatan (Gini Rasio)

Salah satu indikator yang dipergunakan untuk menilai ketimpangan pemerataan pendapatan di suatu wilayah adalah dengan menggunakan Indeks Gini. Koefisien Indeks Gini adalah 0 (nol) hingga 1 (satu) yang mengandung arti bahwa sama sekali tidak terjadi ketimpangan ketika capaian indeks Gini ketika bernilai 0 (nol) dan ketimpangan dapat dikatakan tinggi apabila capaian Indeks Gini ketika bernilai 1 (satu). Ketimpangan pemerataan pendapatan menggunakan Indeks Gini dapat diklasifikasikan kedalam 3 kategori, yaitu rendah, sedang dan tinggi. Indeks Gini dikategorikan rendah apabila capaiannya dibawah 0,3. Capaian Indeks Gini dikatakan sedang apabila capaiannya berada diantara 0,3 hingga 0,4 dan dikategorikan tinggi apabila capaiannya diatas 0,4 hingga 1.

Tingkat ketimpangan pendapatan Kota Salatiga pada tahun 2025 naik dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 0,402 dan pada tahun 2025 menjadi sebesar 0,412. Ini berarti bahwa ketimpangan pemerataan pendapatan Kota Salatiga cenderung semakin menurun tetapi masih tergolong tinggi. Grafik ketimpangan pendapatan menurut Indeks Gini di Kota Salatiga ditunjukkan pada grafik berikut.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Grafik 2. 4 Indeks Gini Kota Salatiga Tahun 2021-2025



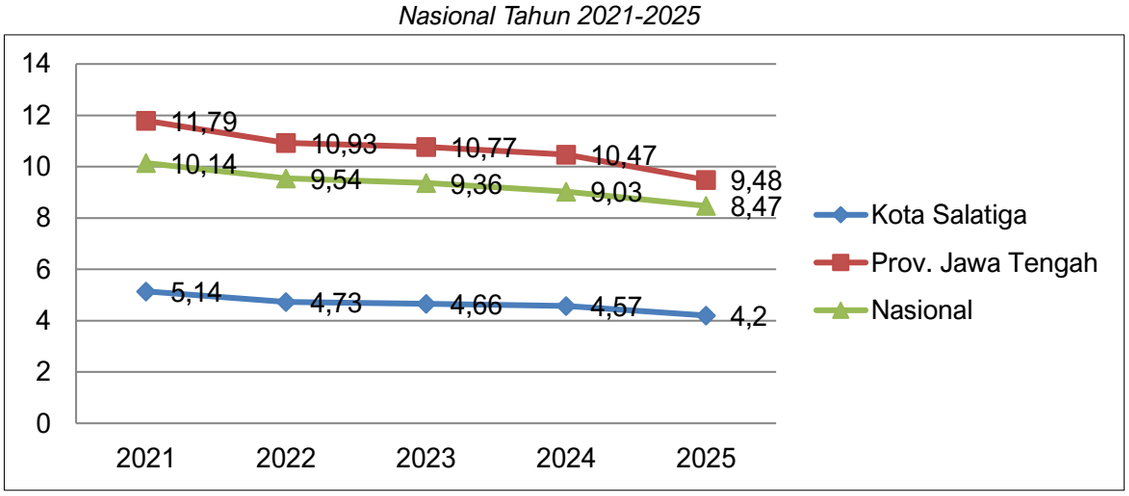
Sumber : BPS Jawa Tengah Tahun 2025

d. Angka Kemiskinan

Pada Tahun 2025 jumlah penduduk miskin di Kota Salatiga mencapai 8.660 jiwa. Dibandingkan tahun 2024 jumlah penduduk miskin menurun 0,67 ribu orang, dari sebelumnya 9.330 jiwa. Kemiskinan Kota Salatiga 3 (tiga) tahun terakhir mengalami penurunan dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi Covid-19. Berdasarkan data BPS, persentase penduduk miskin Kota Salatiga pada tahun 2025 sebesar 4,20% menurun 0,37% dibanding dengan tahun 2024 sebesar 4,57%. Kota Salatiga memiliki persentase penduduk miskin nomor 2 (dua) terendah se - Jawa Tengah setelah Kota Semarang.

Meskipun demikian, capaian penurunan angka kemiskinan Kota Salatiga berada di bawah rata-rata capaian Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 9,48% dan capaian rata-rata nasional sebesar 8,47% semester pertama. Kondisi tersebut bisa dilihat pada Grafik berikut ini.

Grafik 2. 5 Perkembangan Tingkat Kemiskinan (%) Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2025

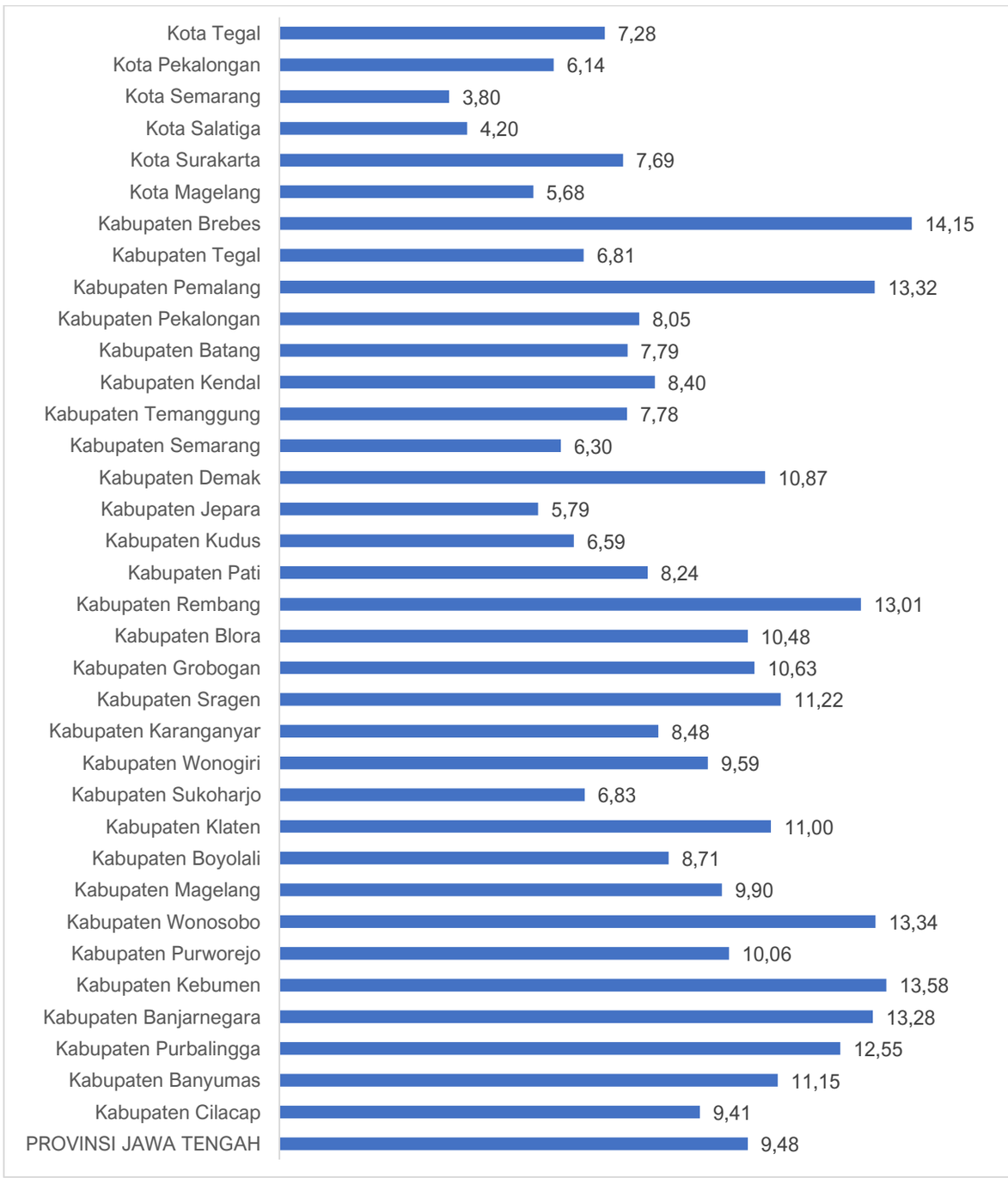


Sumber : Bappeda Kota Salatiga, Tahun 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Capaian Persentase Penduduk Miskin Kota Salatiga jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Jawa Tengah, Kota Salatiga menduduki peringkat 2 terbawah sebesar 4,20%. Adapun persentase penduduk miskin terbanyak di Provinsi Jawa Tengah adalah Kabupaten Brebes dengan persentase penduduk miskin sebesar 14,15%, sedangkan kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin paling sedikit adalah Kota Semarang dengan persentase penduduk miskin sebesar 3,30%. Adapaun data posisi relative persentase penduduk miskin Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah adalah sebagaimana tersaji pada grafik di bawah ini.

Grafik 2. 6 Posisi Relative Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah Tahun 2025



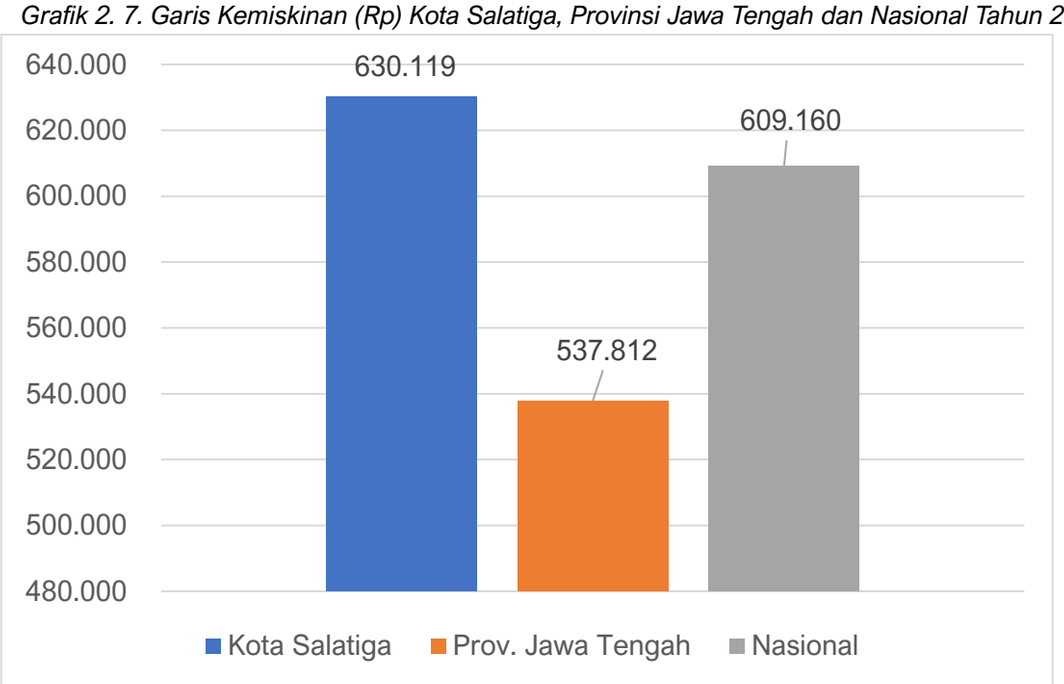
Sumber : Bappeda Kota Salatiga, Tahun 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Penduduk dikatakan miskin apabila memiliki rata-rata pengeluaran per-kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan (GK). Dalam menghitung GK, BPS melihat dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM). Dalam menghitung GKM, BPS memberikan definisi bahwa GKM adalah merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Sedangkan GKBM adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan.

Tahun 2025 garis kemiskinan Kota Salatiga sebesar Rp. 630.119,- dengan demikian lebih tinggi dari rata-rata garis kemiskinan Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar Rp.537.812,- dan relatif sama dengan garis kemiskinan nasional yaitu Rp.609.160,- . Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 2. 7. Garis Kemiskinan (Rp) Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2025



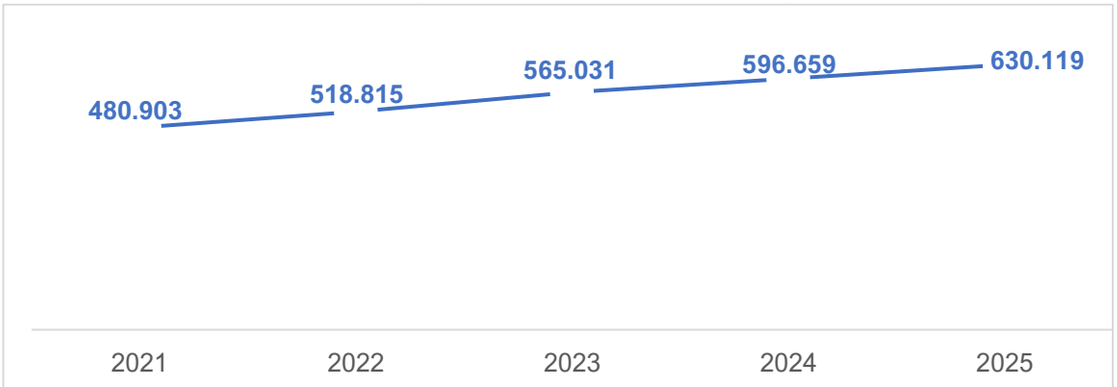
Sumber: Bappeda Kota Salatiga, 2025

Garis kemiskinan menjadi ukuran yang paling berpengaruh terhadap perubahan jumlah penduduk miskin. Kenaikan garis kemiskinan jika tidak diikuti dengan peningkatan pendapatan masyarakat maka akan berdampak pada kenaikan jumlah penduduk miskin. Untuk itu perlu ada penekanan dalam menghadapi tren atau kenaikan garis kemiskinan dengan mendorong program dan kegiatan sektor riil yang menyentuh langsung kepada masyarakat dengan kategori berpenghasilan rendah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Garis Kemiskinan Tahun 2025 tercatat naik Rp. 630.119,- jika dibandingkan pada Tahun 2024 Rp. 596.659,- mengalami kenaikan Rp. 33.460,-. Tren garis kemiskinan Kota Salatiga dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

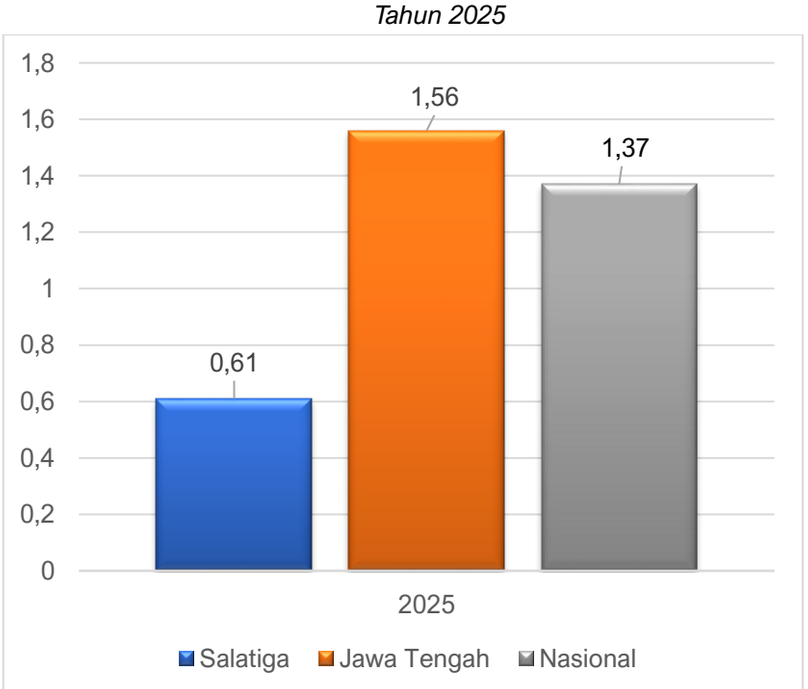
Grafik 2. 8. Perkembangan Garis Kemiskinan Kota Salatiga Tahun 2021 – 2025



Sumber : Bappeda Kota Salatiga, Tahun 2025

Untuk mengukur kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, dilihat dari Indeks Kedalaman Kemiskinannya. Semakin kecil nilai Poverty Gap önden, semakin besar potensi ekonomi untuk dana pengentasan kemiskinan berdasarkan identifikasi karakteristik penduduk miskin dan juga untuk target sasaran bantuan dan program. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) sebagai rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan di Kota Salatiga pada tahun 2025 adalah sebesar 0,61. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar grafik berikut ini:

Grafik 2. 9. Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2025

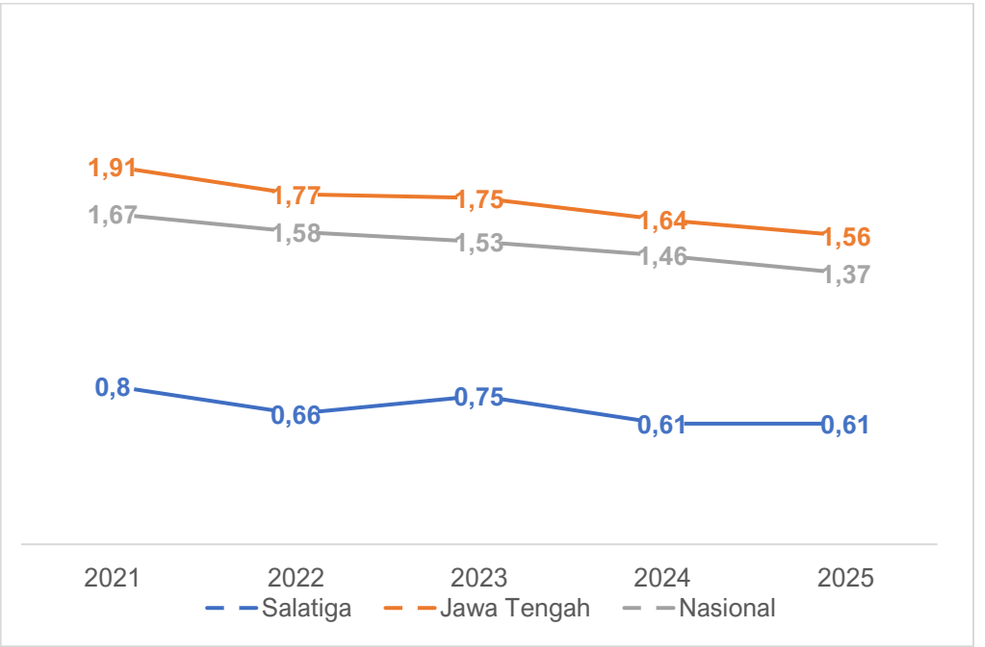


Sumber : Bappeda Kota Salatiga, Tahun 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pencapaian P1 Kota Salatiga dalam kurun waktu tahun 2021-2025 terlihat fluktuatif, namun pada tahun 2025 mengalami penurunan yaitu sebesar 0,61. Untuk mengetahui perkembangan P1 Kota Salatiga tahun 2021-2025 serta perbandingannya dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2. 10. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Salatiga dan Perbandingannya dengan Prov. Jateng dan Nasional Tahun 2021– 2025

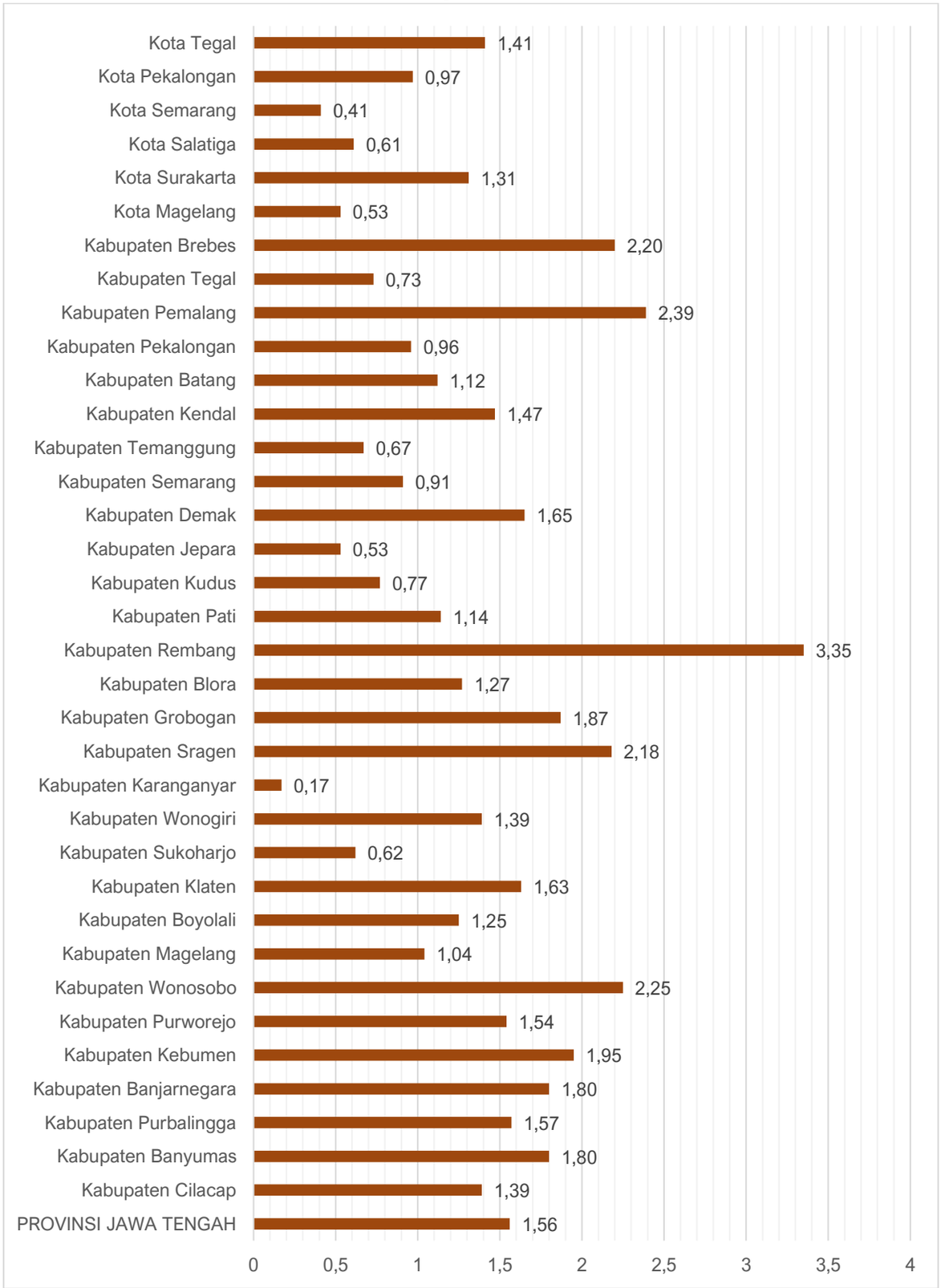


Sumber : Bappeda Kota Salatiga, Tahun 2025

Berdasarkan data posisi relative Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah Tahun 2025 seperti pada tabel, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Salatiga jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Jawa Tengah, Kota Salatiga menduduki peringkat 2 terbawah sebesar 0,61%. Adapun Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) terbanyak di Provinsi Jawa Tengah adalah Kabupaten Rembang dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) sebesar 3,35%, sedangkan kabupaten/kota dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) paling sedikit adalah Kota Karanganyar dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) sebesar 0,17%.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Grafik 2. 11. Posisi Relative Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah Tahun 2025



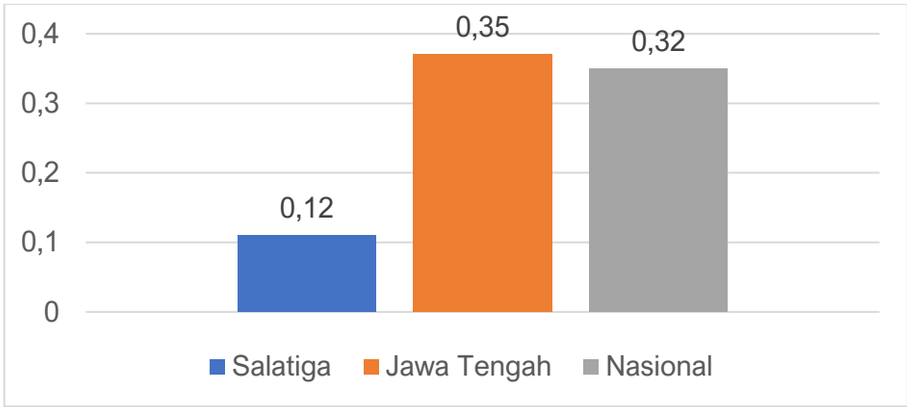
Sumber : Bappeda Kota Salatiga, Tahun 2025

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Kondisi tahun 2025 indeks keparahan kemiskinan (P2) Kota Salatiga sebesar 0,12 Provinsi Jawa Tengah 0,35 dan nasional sebesar 0,32. Jika disandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

capaian Kota Salatiga pada tahun 2025 masih lebih baik. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar grafik berikut:

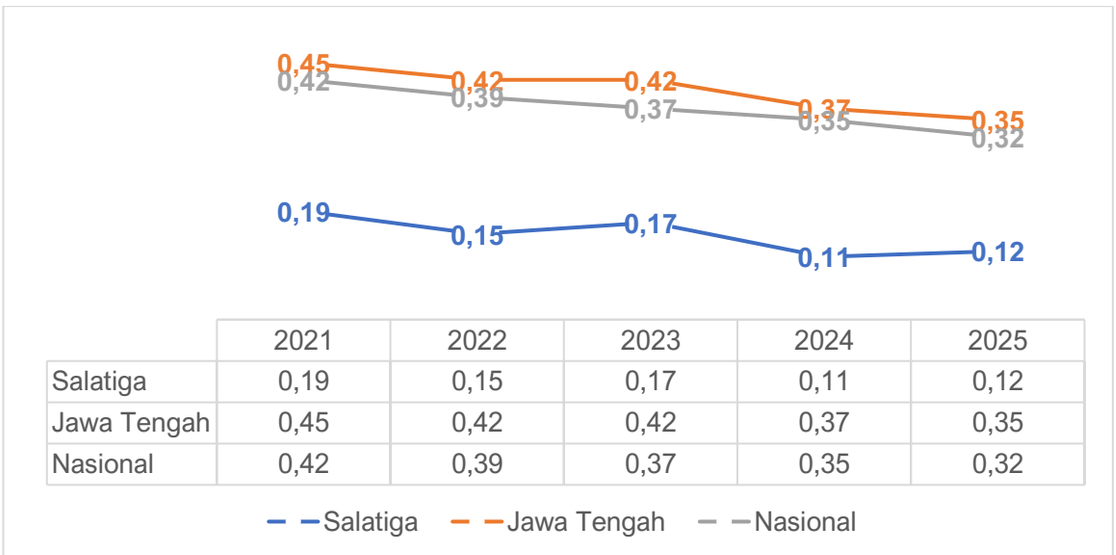
Grafik 2. 12. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Salatiga, Prov. Jateng dan Nasional Tahun 2025



Sumber : Bappeda Kota Salatiga, Tahun 2025

Dalam kurun waktu tahun 2021-2025, capaian indeks keparahan kemiskinan Kota Salatiga mengalami fluktuasi. Hal tersebut dapat dilihat dari P2 Kota Salatiga pada tahun 2021 naik menjadi 0,19 lalu menjadi 0,15 pada tahun 2022 0,17 pada tahun 2023 dan pada tahun 2024 0,11. Pada tahun 2025 mengalami penurunan menjadi 0,12. Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Salatiga dan perbandingannya dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tahun 2021-2025 dapat dilihat pada gambar grafik berikut:

Grafik 2. 13. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Salatiga, Prov. Jateng dan Nasional Tahun 2022- 2025



	2021	2022	2023	2024	2025
Salatiga	0,19	0,15	0,17	0,11	0,12
Jawa Tengah	0,45	0,42	0,42	0,37	0,35
Nasional	0,42	0,39	0,37	0,35	0,32

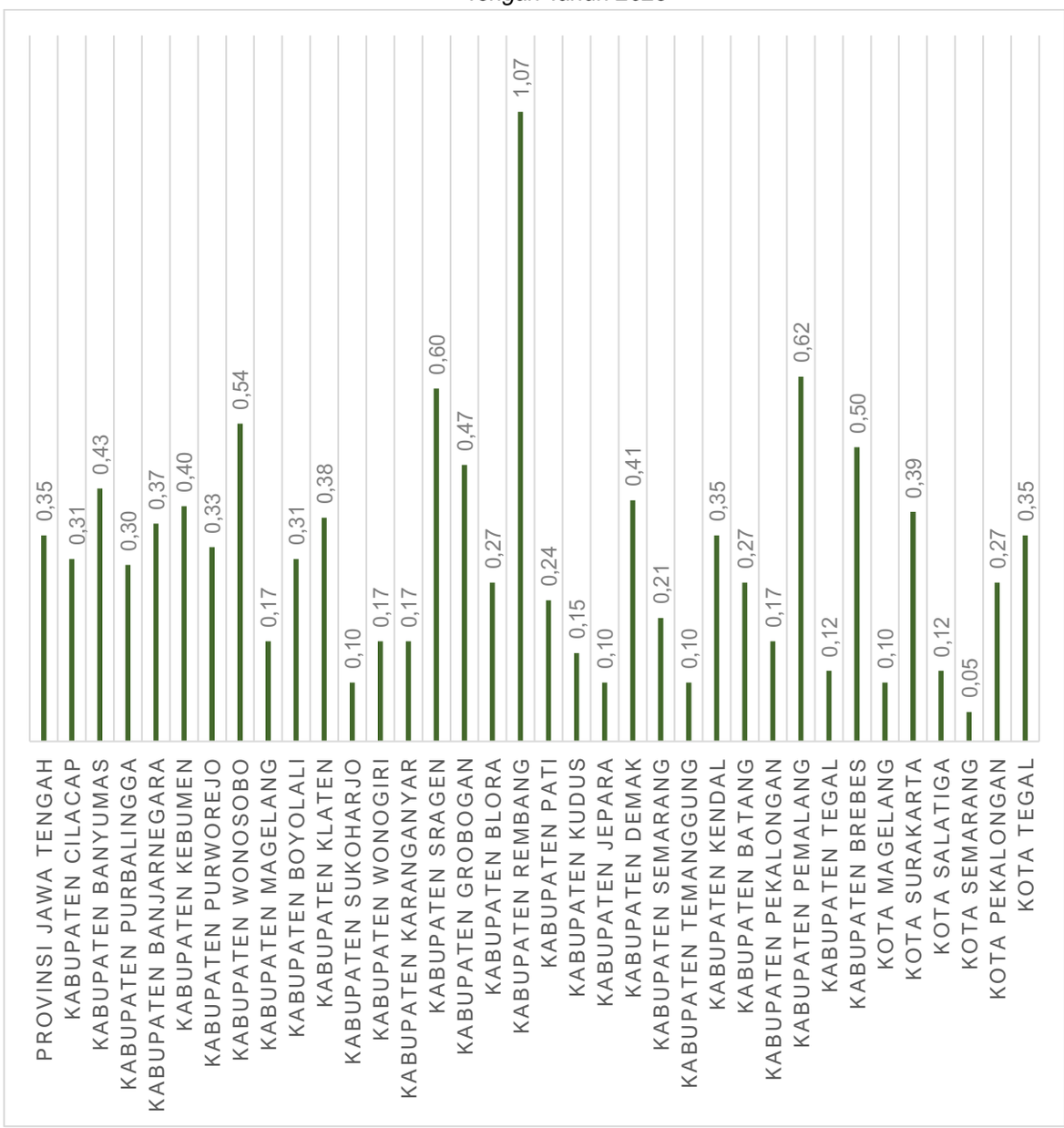
Sumber : Bappeda Kota Salatiga, Tahun 2025

Berdasarkan data posisi relative Indeks Kedalaman Kemiskinan (P2) Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah Tahun 2025 seperti pada tabel, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P2) Kota Salatiga jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Jawa Tengah, Kota Salatiga menduduki peringkat 2 terbawah sebesar 0,12%. Adapun Indeks Kedalaman Kemiskinan (P2) terbanyak di Provinsi Jawa Tengah adalah Kabupaten Rembang dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P2) sebesar 1,07%, sedangkan kabupaten/kota dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P2) paling sedikit adalah Kota Semarang dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P2) sebesar 0,05%.

Grafik 2. 14. Posisi Relative Indeks Kedalaman Kemiskinan (P2) Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah Tahun 2025



Sumber : Bappeda Kota Salatiga, Tahun 2025

Kemiskinan ekstrem adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar untuk menopang kelangsungan hidupnya (BPS, 2024). Ini meliputi kebutuhan akan makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, serta akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial. Pengukuran kemiskinan ekstrem umumnya menggunakan ukuran kemiskinan absolut yang konsisten antar negara dan antar waktu. Bank Dunia merevisi garis kemiskinan ekstrem dari US1,90

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

menjadi US2,15 per kapita per hari (menggunakan *Purchasing Power Parity*/PPP tahun 2017) (World Bank, 2024). Badan Pusat Statistik (BPS) menghitung jumlah dan angka kemiskinan ekstrem setiap tahunnya berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) (BPS, 2024).

Tabel 2. 5. Tingkat dan Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem Tiap Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2023

No	Kode	Nama Daerah	Estimasi Jumlah Kemiskinan (ribu jiwa)			Estimasi Tingkat Kemiskinan Ekstrem (%)		
			2021*	2022*	2023**	2021*	2022*	2023**
1	**3300**	**Provinsi Jawa Tengah**	**795,51**	**689,71**	**391,92**	**2,28**	**1,97**	**1,11**
2	3301	Cilacap	20,7	37,96	21,79	1,2	2,19	1,25
3	3302	Banyumas	63,53	23,91	13,07	3,72	1,39	0,76
4	3303	Purbalingga	17,23	20,84	11,25	1,83	2,19	1,18
5	3304	Banjarnegara	36,59	14,23	14,01	3,95	1,53	1,5
6	3305	Kebumen	52,84	65,86	29,74	4,42	5,51	2,49
7	3306	Purworejo	9,08	7,74	9,75	1,27	1,08	1,36
8	3307	Wonosobo	26,54	38,73	12,58	3,36	4,89	1,59
9	3308	Magelang	28,5	29,95	18,11	2,19	2,29	1,37
10	3309	Boyolali	18,42	5,36	1,96	1,87	0,54	0,2
11	3310	Klaten	24,3	26,19	14,77	2,07	2,23	1,26
12	3311	Sukoharjo	10,51	3,26	6,74	1,17	0,36	0,74
13	3312	Wonogiri	19,35	16,15	3,04	2,02	1,69	0,32
14	3313	Karanganyar	13,99	17,53	2,85	1,57	1,95	0,31
15	3314	Sragen	25,96	20,96	13,85	2,92	2,36	1,55
16	3315	Grobogan	25,54	31,74	3,16	1,85	2,29	0,23
17	3316	Blora	11,29	23,91	1,98	1,31	2,76	0,23
18	3317	Rembang	23,86	24,48	11,22	3,72	3,79	1,73
19	3318	Pati	29,5	10,86	15,61	2,34	0,86	1,23
20	3319	Kudus	8,84	5,64	3,91	1	0,63	0,43
21	3320	Jepara	8,84	23,59	17,12	0,69	1,82	1,31
22	3321	Demak	37,73	25,59	16,82	3,21	2,16	1,41
23	3322	Semarang	7,43	12,88	4,16	0,69	1,19	0,38
24	3323	Temanggung	16,1	7,51	2,58	2,07	0,96	0,33
25	3324	Kendal	17,8	22,59	6,28	1,82	2,3	0,64
26	3325	Batang	23	12,09	16,16	2,97	1,55	2,06
27	3326	Pekalongan	20,49	18,75	10,86	2,27	2,07	1,19
28	3327	Pemalang	59,88	36,17	23,9	4,61	2,78	1,84
29	3328	Tegal	12,87	10,56	3,48	0,9	0,73	0,24
30	3329	Brebes	82,43	72,22	75,59	4,56	3,99	4,17
31	3371	Kota Magelang	1,22	0,16	0	1	0,13	0
32	3372	Kota Surakarta	18,33	4,19	0,73	3,53	0,81	0,14
33	3373	Kota Salatiga	3,05	2,11	0,76	1,55	1,06	0,37
34	3374	Kota Semarang	7,8	11,55	0	0,42	0,61	0
35	3375	Kota Pekalongan	7,18	2,07	3,56	2,32	0,67	1,13
36	3376	Kota Tegal	4,81	2,39	0,56	1,93	0,95	0,22

Keterangan
* : Estimasi dihitung oleh Badan Pusat Statistik (BPS)
** : Estimasi dihitung oleh Satgas data P3KE

Sumber: Kemenko PMK, 2024

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Penentuan persentase kemiskinan ekstrem Kota Salatiga merujuk pada metode perhitungan dari BPS pada tahun 2021, 2022, 2024, maupun angka kemiskinan akstrem tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Satgas P3KE. Pada tahun 2025, BPS kembali mengeluarkan angka kemiskinan ekstrem sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 6. Persentase Kemiskinan Esktrem Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah per Maret 2025

Kabupaten/ Kota	Nilai Estimasi P0 Ekstrem	Kabupaten/Kota	Nilai Estimasi P0 Ekstrem
Cilacap	1,28	Kudus	0,28
Banyumas	1,02	Jepara	0,84
Purbalingga	1,17	Demak	1,22
Banjarnegara	1,09	Semarang	0,32
Kebumen	1,26	Temanggung	0,44
Purworejo	1,4	Kendal	0,49
Wonosobo	1,26	Batang	0,4
Magelang	1,28	Pekalongan	0,51
Boyolali	0,84	Pemalang	0,92
Klaten	0,67	Tegal	0,87
Sukoharjo	0,42	Brebes	0,75
Wonogiri	0,81	Kota Magelang	0,61
Karanganyar	0,39	Kota Surakarta	0,81
Sragen	2,27	Kota Salatiga	0,10
Grobogan	0,89	Kota Semarang	0,31
Blora	0,89	Kota Pekalongan	0,38
Rembang	3,18	Kota Tegal	0,68
Pati	0,61		

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025 (data diolah)

Berdasarkan data Kemiskinan Ekstrem Jateng 2025, Kota Salatiga menempati posisi terbaik sebagai wilayah dengan kemiskinan ekstrem terendah di Jawa Tengah, yaitu sebesar 0,10%. Jika dibandingkan dengan 6 kota lain di Jawa Tengah, Kota Salatiga terbukti jauh lebih unggul dalam menekan angka kemiskinan ekstrem.

1. Kota Salatiga: 0,10%
2. Kota Surakarta: 0,17%
3. Kota Pekalongan: 0,22%
4. Kota Tegal: 0,26%
5. Kota Semarang: 0,29%
6. Kota Magelang: 0,32%

Kota Salatiga unggul signifikan, bahkan hampir tiga kali lipat lebih rendah dari Kota Semarang (0,29%) yang merupakan pusat ekonomi pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa dimensi kota tidak menjamin pemerataan pendapatan yang maksimal.

Secara makro, struktur 5 besar daerah dengan angka kemiskinan ekstrim terendah di Jawa Tengah diwakili daerah dengan karakteristik geografis berupa pegunungan, dataran rendah, maupun pesisir, yaitu Kota Salatiga (0,10%), Kota Surakarta (0,17%),

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sukoharjo (0,20%), Kudus (0,20%), dan Pati (0,21%). Kesuksesan integrasi geografis antara daerah urban (Solo-Salatiga) dengan penyangganya (Sukoharjo) membuktikan bahwa intervensi sosial dan konektivitas ekonomi yang inklusif sangat efektif memotong rantai kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah.

Kondisi data kemiskinan terakhir yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Salatiga merupakan hasil padu-padan antara DTKS, DT Jateng dan Data P3KE. Data tersebut selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota Salatiga Nomor 000.7.2/270/2024 tanggal 29 Oktober 2024 berjumlah 4.815 kepala rumah tangga miskin dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 7. Jumlah Rumah Tangga Miskin Kota Salatiga

No	Kecamatan	Kelurahan	KRT Aktif
1	Argomulyo	Cebongan	163
2	Argomulyo	Kumpulrejo	319
3	Argomulyo	Ledok	240
4	Argomulyo	Noborejo	359
5	Argomulyo	Randuacir	196
6	Argomulyo	Tegalrejo	159
7	Sidomukti	Dukuh	231
8	Sidomukti	Kalicacing	89
9	Sidomukti	Kecandran	273
10	Sidomukti	Mangunsari	409
11	Sidorejo	Blotongan	278
12	Sidorejo	Bugel	44
13	Sidorejo	Kauman Kidul	54
14	Sidorejo	Pulutan	217
15	Sidorejo	Salatiga	172
16	Sidorejo	Sidorejo Lor	244
17	Tingkir	Gendongan	51
18	Tingkir	Kalibening	123
19	Tingkir	Kutowinangun Kidul	217
20	Tingkir	Kutowinangun Lor	361
21	Tingkir	Sidorejo Kidul	360
22	Tingkir	Tingkir Lor	201
23	Tingkir	Tingkir Tengah	55

Sumber : Hasil Padu Padan DTKS, DT Jateng dan P3KE, 2024 (Data diolah)

Beberapa Indikator Intervensi Penghapusan Kemiskinan diantaranya: jamban/sanitasi layak, sumber air minum layak, sambungan listrik, rumah tidak layak huni, disabilitas, anak tidak sekolah usia 7-18 tahun, individu tidak bekerja dan rumah tangga berisiko stunting.

Untuk intervensi penanggulangan kemiskinan pada tahun 2026 selanjutnya berpedoman pada Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Desil 1 sampai dengan Desil 5.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

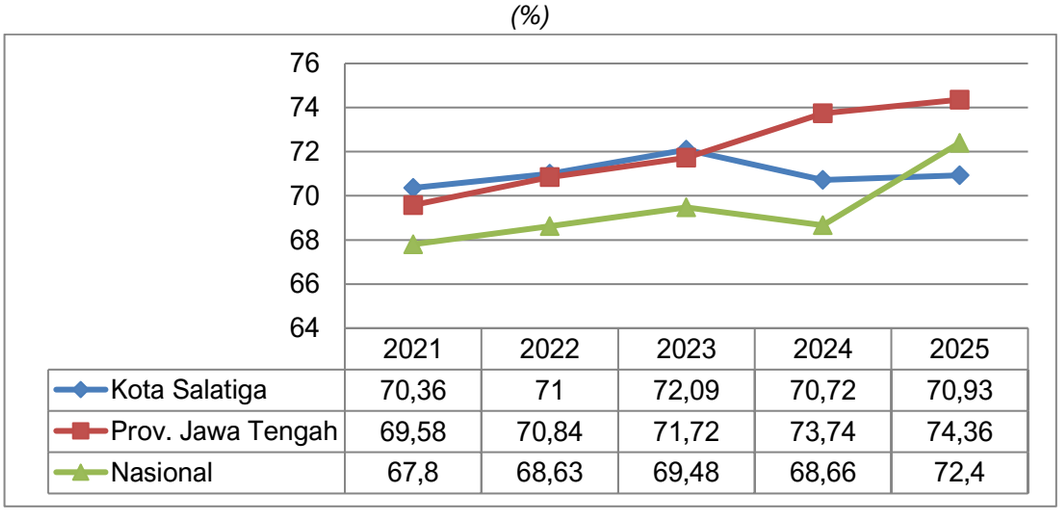
e. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari. TPAK sendiri merupakan persentase angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Jumlah TPAK digunakan untuk mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu wilayah. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Capaian TPAK Kota Salatiga Agustus Tahun 2025 sebesar 70,93% mengalami kenaikan 0,21% dari tahun 2024 sebesar 70,72%. Angka ini diperoleh dari jumlah angkatan kerja sebesar 114.52 ribu orang dibagi jumlah penduduk usia kerja sebanyak 161.45 ribu orang dikalikan 100% (sumber data dari Berita Resmi Stastistik Kota Salatiga No 17/12/3373/Th.XVII, tanggal 11 Desember 2025). Target indikator TPAK sampai dengan tahun terakhir RPD (tahun 2023-2026) yaitu tahun 2026 sebesar 70,10% sedangkan realisasi kinerja tahun 2025 adalah 70,93% maka realiasi sudah mencapai lebih dari yang ditargetkan. Faktor – faktor keberhasilan tersebut diantaranya yaitu bertambahnya jumlah angkatan kerja, jumlah penduduk usia kerja dan berkurangnya jumlah pengangguran.

Pada tahun 2025, capaian TPAK Kota Salatiga berada di bawah capaian TPAK Provinsi Jawa Tengah bulan Agustus yang tercatat sebesar *74,36 persen*, namun lebih tinggi dibandingkan capaian TPAK nasional sebesar *72,40 persen*. Perbandingan perkembangan TPAK Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, dan nasional selama periode *2021–2025* tersaji pada grafik di bawah ini.

Grafik 2. 15. Perkembangan TPAK Kota Salatiga, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2025 (%)



	2021	2022	2023	2024	2025
Kota Salatiga	70,36	71	72,09	70,72	70,93
Prov. Jawa Tengah	69,58	70,84	71,72	73,74	74,36
Nasional	67,8	68,63	69,48	68,66	72,4

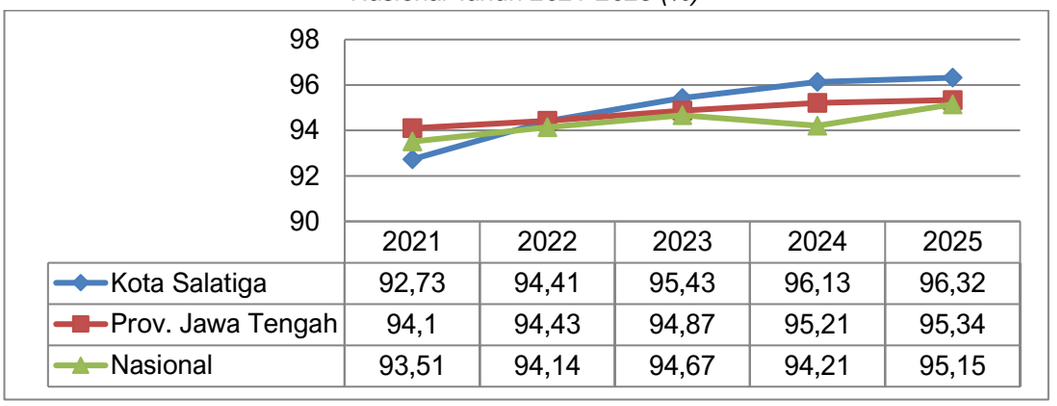
Sumber : BPS Jawa Tengah, Tahun 2025

Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan jumlah penduduk yang bekerja dengan jumlah angkatan kerja. Kondisi setelah adanya pandemi Covid-19 rasio penduduk yang bekerja di Kota Salatiga menunjukan tren yang cenderung membaik.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan terbesar adalah sektor manufaktur, sedangkan yang mengalami penurunan jumlah yang cukup besar adalah sektor jasa-jasa. Gambaran perkembangan rasio penduduk yang bekerja Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional sebagai berikut:

Grafik 2. 16. Perkembangan Rasio Penduduk Yang Bekerja Kota Salatiga, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2025 (%)



	2021	2022	2023	2024	2025
Kota Salatiga	92,73	94,41	95,43	96,13	96,32
Prov. Jawa Tengah	94,1	94,43	94,87	95,21	95,34
Nasional	93,51	94,14	94,67	94,21	95,15

Sumber : BPS Jawa Tengah, Tahun 2025

Rasio penduduk bekerja di Kota Salatiga selama periode 2021–2025 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, dari 92,73 persen pada tahun 2021 menjadi 96,32 persen pada tahun 2025. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sebagian besar penduduk usia kerja di Kota Salatiga telah terserap dalam kegiatan ekonomi, serta mencerminkan membaiknya kondisi pasar kerja pascapandemi.

Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan nasional, rasio penduduk bekerja Kota Salatiga secara konsisten berada pada level yang relatif tinggi, khususnya sejak tahun 2023. Pada tahun 2025, rasio penduduk bekerja Kota Salatiga tercatat lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Tengah (95,34 persen) maupun nasional (95,15 persen). Hal ini menunjukkan bahwa kinerja penyerapan tenaga kerja di Kota Salatiga relatif lebih baik, serta pasar kerja lokal mampu menyerap angkatan kerja secara optimal.

Peningkatan rasio penduduk bekerja ini juga mencerminkan stabilitas aktivitas ekonomi daerah, terutama pada sektor-sektor jasa, perdagangan, dan industri pengolahan yang menjadi tulang punggung perekonomian Kota Salatiga. Namun demikian, kenaikan rasio yang mulai melambat pada tahun 2025 mengindikasikan bahwa ruang peningkatan penyerapan tenaga kerja mulai terbatas, sehingga tantangan ke depan tidak hanya pada penciptaan lapangan kerja baru, tetapi juga pada peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.

f. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) merupakan indikator ketenagakerjaan yang ditunjukkan untuk melihat seberapa besar jumlah pengangguran di suatu wilayah dibandingkan dengan jumlah penduduk yang termasuk pada kategori angkatan kerja.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

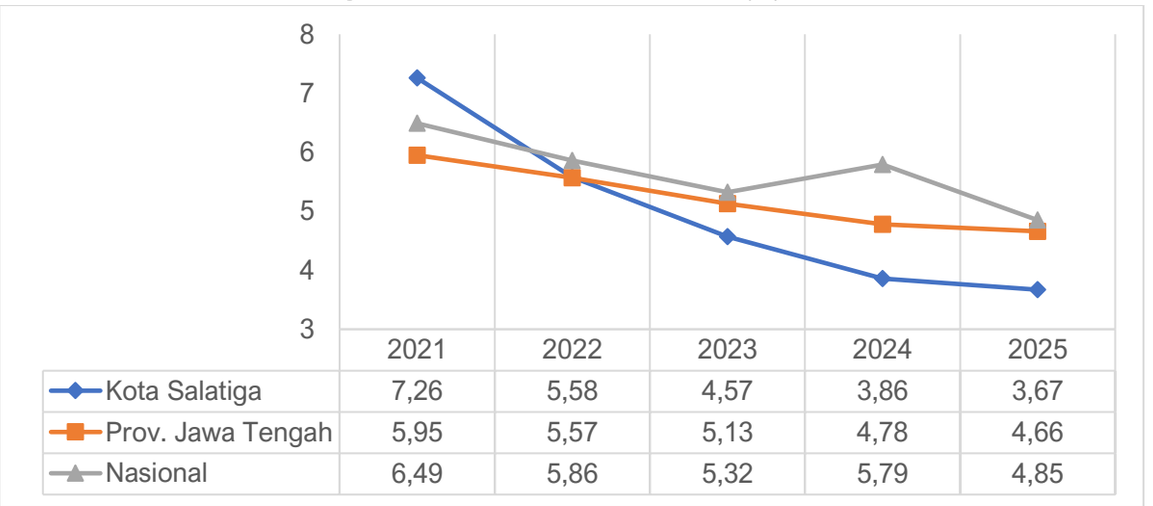
Besar kecilnya tingkat pengangguran terbuka mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. Pengangguran terbuka meliputi :

- penduduk yang sedang mencari pekerjaan;
- penduduk yang sedang mempersiapkan suatu usaha;
- penduduk yang merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan;
- penduduk yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai

Indikator kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka merupakan indikator kinerja negatif, yang artinya semakin rendah realisasi akan semakin baik capaian kinerjanya.

Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Salatiga Agustus Tahun 2025 yaitu 3,67% mengalami penurunan sebesar 0,19% dari Agustus Tahun 2024 sebesar 3,86%. Berarti di antara 100 orang angkatan kerja ditemukan sekitar 3 sampai 4 orang penganggur. Perkembangan tingkat pengangguran terbuka terlihat pada grafik berikut ini:

Grafik 2. 17. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2025(%)



	2021	2022	2023	2024	2025
Kota Salatiga	7,26	5,58	4,57	3,86	3,67
Prov. Jawa Tengah	5,95	5,57	5,13	4,78	4,66
Nasional	6,49	5,86	5,32	5,79	4,85

Sumber : Bappeda Kota Salatiga, Tahun 2025

2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya

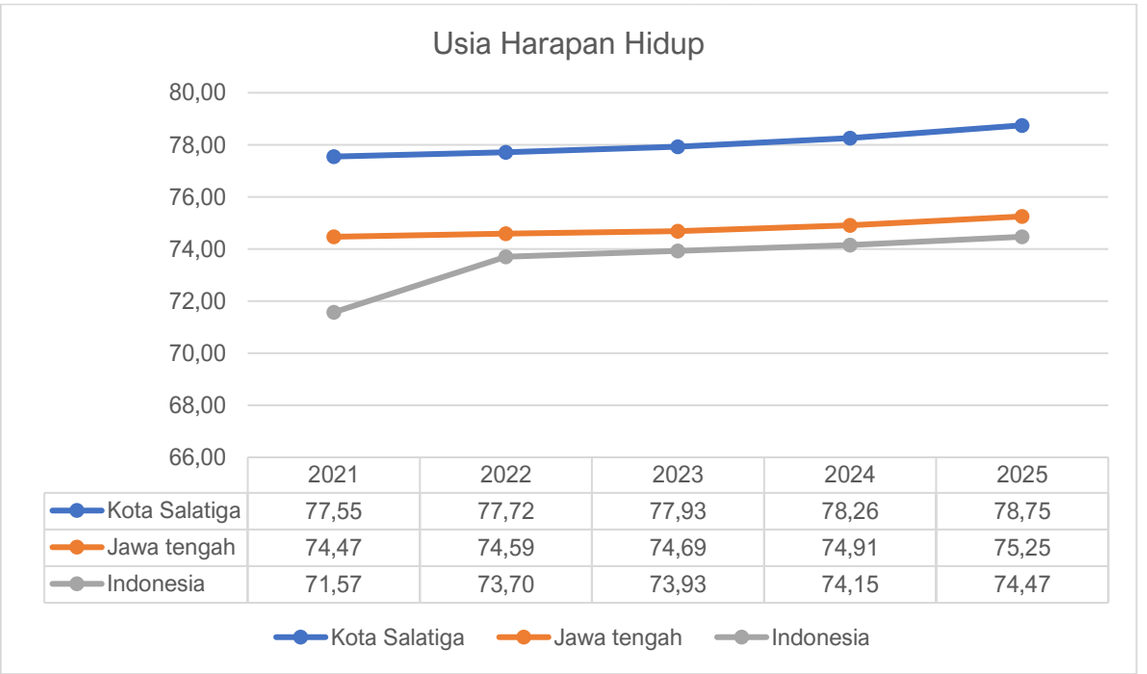
a. Angka Harapan Hidup

Definisi Usia Harapan Hidup adalah rata- rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x pada suatu tahun tertentu dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakat. Angka Harapan Hidup yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun.

Usia harapan hidup saat lahir tahun 2025 Kota Salatiga sebesar 78,75 tahun berada diatas capaian Provinsi Jawa Tengah sebesar 75,24 dan capaian Nasional sebesar 74,47. Hal ini berarti dari tahun 2021 sampai tahun 2025, rata-rata penduduk Kota Salatiga dapat bertahan hidup pada usia 78 tahun. Perkembangan Usia harapan hidup dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Grafik 2. 18. Perkembangan Usia Harapan Hidup Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2025 (angka)



	2021	2022	2023	2024	2025
Kota Salatiga	77,55	77,72	77,93	78,26	78,75
Jawa tengah	74,47	74,59	74,69	74,91	75,25
Indonesia	71,57	73,70	73,93	74,15	74,47

Sumber : BPS Kota Salatiga, Tahun 2025

b. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk merupakan salah satu indikator penting dalam menggambarkan dinamika kependudukan yang berpengaruh terhadap kebutuhan pelayanan dasar dan arah kebijakan pembangunan daerah. Berdasarkan data Tahun 2021–2025, laju pertumbuhan penduduk Kota Salatiga menunjukkan kondisi fluktuatif dengan kecenderungan meningkat pada dua tahun terakhir.

Pada Tahun 2021, laju pertumbuhan penduduk Kota Salatiga tercatat sebesar 0,83 persen. Selanjutnya pada Tahun 2022 dan 2023 terjadi perlambatan pertumbuhan masing-masing menjadi 0,8 persen dan 0,57 persen. Penurunan laju pertumbuhan yang mengindikasikan melambatnya dinamika pertumbuhan penduduk. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain perubahan struktur demografi, dinamika kelahiran dan kematian, serta mobilitas penduduk.

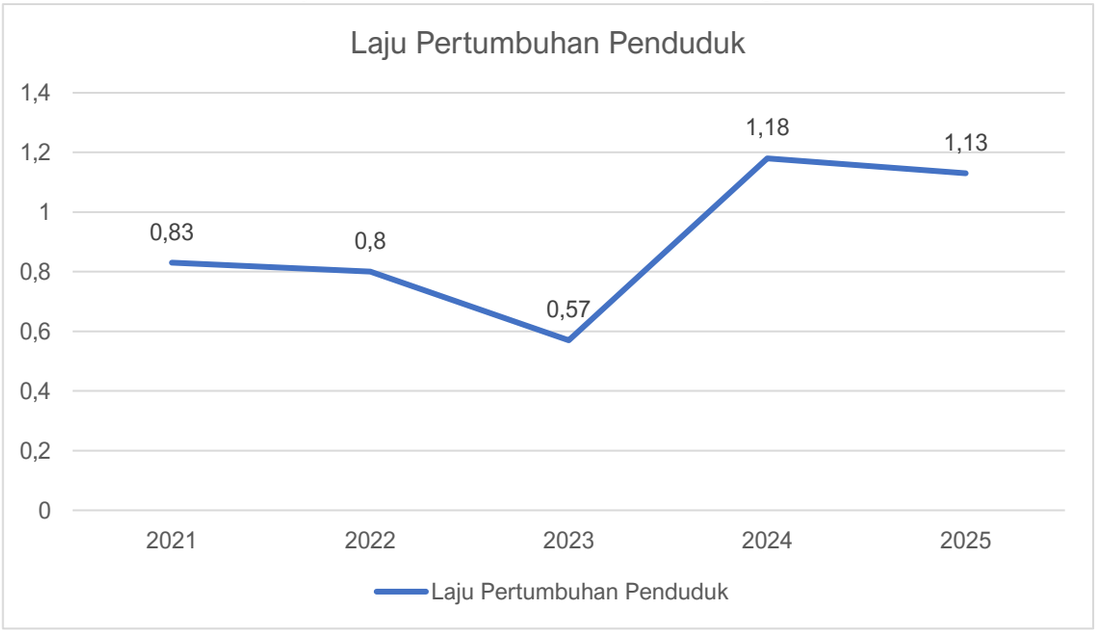
Pada Tahun 2024 dan 2025, laju pertumbuhan penduduk kembali mengalami peningkatan masing-masing menjadi 1,18 persen dan 1,13 persen. Peningkatan ini mencerminkan mulai pulihnya pertumbuhan penduduk yang sejalan dengan membaiknya kondisi sosial ekonomi daerah serta meningkatnya mobilitas dan migrasi penduduk ke Kota Salatiga.

Secara umum, rata-rata laju pertumbuhan penduduk Kota Salatiga selama periode 2021–2025 berada pada kisaran ±0,90 persen per tahun, yang menunjukkan pertumbuhan penduduk relatif terkendali. Namun demikian, kecenderungan peningkatan pada dua tahun terakhir perlu menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah, khususnya dalam penyediaan pelayanan dasar, perumahan dan permukiman,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

serta penciptaan lapangan kerja, guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan kependudukan.

Grafik 2. 19. Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Salatiga Tahun 2021-2025



Sumber : BAPPEDA, Tahun 2026

c. Cakupan penduduk memenuhi kriteria yang terdata dalam DTKS

Indikator kinerja Cakupan Penduduk memenuhi kriteria yang terdata dalam DTKS dapat dihitung dengan membagi jumlah penduduk terdata dalam DTKS dibagi dengan jumlah seluruh penduduk yang memenuhi. Indikator tersebut merupakan indikator kinerja positif, yang artinya semakin tinggi realisasi akan semakin baik capaian kinerjanya.

Pada tahun 2024 angka kemiskinan ditargetkan 4.67- 4,59 dan terealisasi 4,57 di akhir RPD ditargetkan 4,67-4.59, sehingga capaian kinerja mencapai 100,21% dengan status Tercapai. Faktor yang menyebabkan tercapainya kinerja ini diantaranya melaksanakan koordinasi intensif secara vertikal dan horisontal dengan stakeholder dan mitra lembaga pemberdayaan sosial dalam pelaksanaan masalah kesejahteraan sosial. Adapun kegiatannya meliputi :

1) pemberian perlindungan dan jaminan sosial termasuk penyaluran bantuan sosial
2) penanganan rehabilitasi sosial Pemerlu Kesejahteraan sosial yaitu antara lain anak terlantar, anak jalanan/gelandangan pengemis, Anak Berhadapan dengan Hukum, Lanjut usia terlantar, difabel, kelompok rentan;
3) penanganan layanan kedaruratan sosial termasuk bencana alam dan non alam
4) verfikasi dan validasi DTKS (data kemiskinan/penerima bansos).

Cakupan penduduk terdata DTKS yang ditangani ditargetkan 75% terealisasi 92,72% dan di akhir RPD target 70 persen dengan capaian kinerja di Tahun 2024 sebesar 123,62% dengan status Tercapai. (Data 2025?) Faktor- faktor yang mendukung diantaranya :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1) pemberian perlindungan dan jaminan sosial termasuk penyaluran bantuan sosial
2) penanganan rehabilitasi sosial Pemerlu Kesejahteraan sosial yaitu antara lain anak terlantar, anak jalanan/gelandangan pengemis, Anak Berhadapan dengan Hukum, Lanjut usia terlantar, difabel, kelompok rentan;
3) penanganan layanan kedaruratan sosial termasuk bencana alam dan non alam
4) verikasi dan validasi DTKS (data kemiskinan/ penerima bansos)

Pada tahun 2025, berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, maka semua data tertuju pada DTSEN yang merupakan gabungan dari DTKS, P3KE, dan Regsosek. Inpres ini menetapkan beberapa strategi kebijakan, antara lain:

1. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat: Mengurangi biaya hidup masyarakat untuk meringankan beban ekonomi.
2. Peningkatan pendapatan masyarakat: Mendorong peningkatan pendapatan melalui berbagai program dan inisiatif.
3. Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan: Mengidentifikasi dan mengurangi daerah-daerah yang masih terjebak dalam kemiskinan.

d. Pola Pangan Harapan

Indikator kualitas konsumsi pangan ditunjukkan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang dipengaruhi oleh keragaman dan keseimbangan konsumsi antar kelompok pangan. PPH biasanya digunakan untuk perencanaan konsumsi, kebutuhan dan penyediaan pangan yang ideal di suatu wilayah. Semakin beragam bahan pangan yang dikonsumsi masyarakat, maka semakin rendah tingkat ketergantungan masyarakat terhadap jenis bahan pangan tertentu. Hal ini akan mendorong terwujudnya ketahanan pangan di tengah masyarakat.

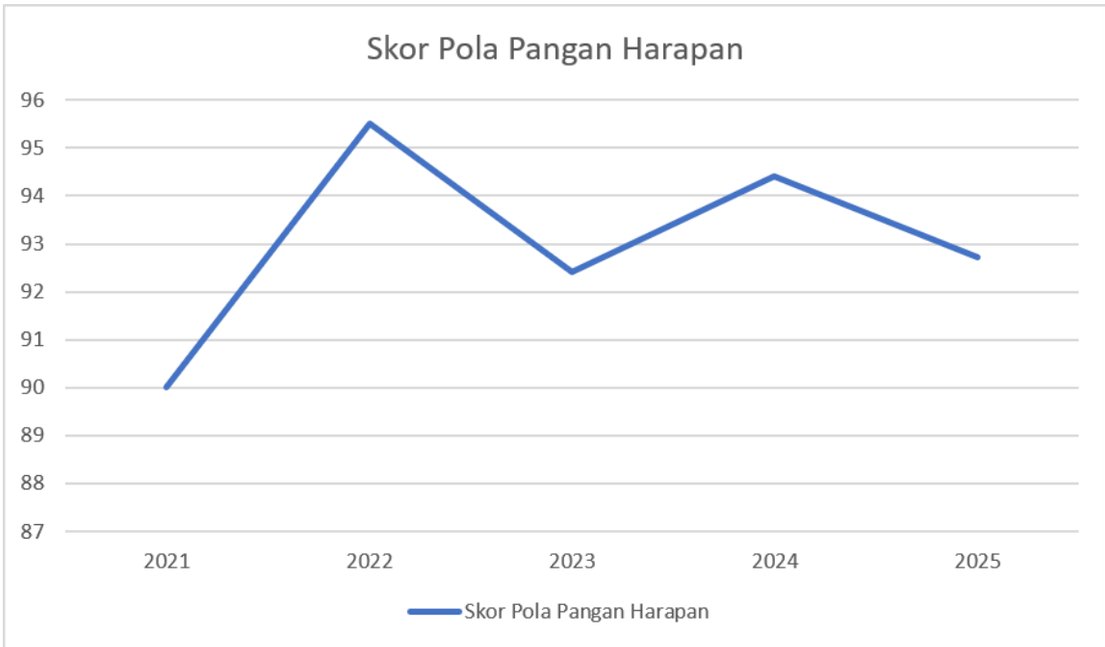
Indikator kinerja Pola Pangan Harapan merupakan indikator kinerja positif, yang artinya semakin tinggi realisasi akan semakin baik capaian kinerjanya. Jika skor PPH semakin mendekati 100, konsumsi pangan masyarakat semakin beragam dan bergizi seimbang.

Realisasi Skor Pola Pangan Harapan tahun 2021 sebesar 90 tahun 2022 sebesar 95,51 tahun 2023 sebesar 92,2 dan realisasi tahun 2024 adalah 94,4 realisasi tahun 2025 adalah 92,73 dengan target 96,90 Jika dibandingkan Target Skor PPh pada Tahun 2025 tidak tercapai. Demikian Skor Pola Pangan Harapan mengalami fluktuasi naik turun dalam beberapa tahun terakhir.

Dasar perhitungan Skor Pola Pangan Harapan untuk tahun ini menggunakan Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pola Pangan Harapan, adapun Realisasi Skor PPH sejak Tahun 2021 menggunakan perhitungan Susenas Tahun 2020.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Grafik 2. 20. Skor Pola Pangan Harapan Kota Salatiga Tahun 2021-2025



Sumber : Dinas Pangan dan Pertanian, 2025

Terdapat 9 komoditas kelompok pangan yang mempengaruhi skor PPH berupa padi-padian; umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah, dan lain-lain. Dari kesembilan kelompok pangan diatas, diperoleh 5 kelompok pangan yang memiliki nilai dibawah skor maksimal, yaitu padi-padian, umbi-umbian, buah/ biji berminyak, kacang-kacangan, dan gula.

Tabel 2. 8. Jumlah Produksi Berdasarkan Jenis Komoditas di Kota Salatiga Tahun 2021-2025

JENIS KOMODITI	PRODUKSI (KU)				
	2021	2022	2023	2024	2025
Padi	74.511,00	71.870,00	62.181,00	58.170,00	66.598,00
Palawija	**18.335,00**	**16.412,00**	**19.746,90**	**15.944,30**	**18.881,00**
Jagung	1.339,00	1.887,00	2.319,80	2.610,80	2.586,00
Singkong	15.248,00	14.331,00	15.602,10	13.040,00	14.590,00
Ubi Jalar	1.545,000	14,000	1.825,000	293,500	1.705,000
Kacang Tanah	203,00	180,00	0	0	0
Daging	**20.477.043,00**	**30.012.661,00**	**29.649.612,00**	**27.911.246,00**	**16.061.046,00**
Sapi	1.395.800,00	1.701.880,00	1.372.200,00	1.190.820,00	825.933,00
Kambing	7.830,00	13.440,00	35.805,00	22.996,00	39.020,00
Domba	9.195,00	9.510,00	8.580,00	22.539,00	6.860,00
Babi	23.530,00	28.275,00	35.165,00	51.283,00	23.767,00
Ayam Ras	19.026.758,00	28.244.356,00	28.182.662,00	26.602.304,00	15.156.231,00
Ayam Buras	13.930,00	15.200,00	15.200,00	21.304,00	9.235,00
Telur	**200.793,00**	**204.605,00**	**225.524,00**	**228.326,00**	**202.300,00**
Ayam Ras	136.443,00	128.086,00	168.175,00	48.066,00	25.356,00
Ayam Buras	51.650,00	40.994,00	16.860,00	119.239,00	119.872,00
Itik	8.600,00	24.371,00	28.213,00	48.743,00	54.035,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

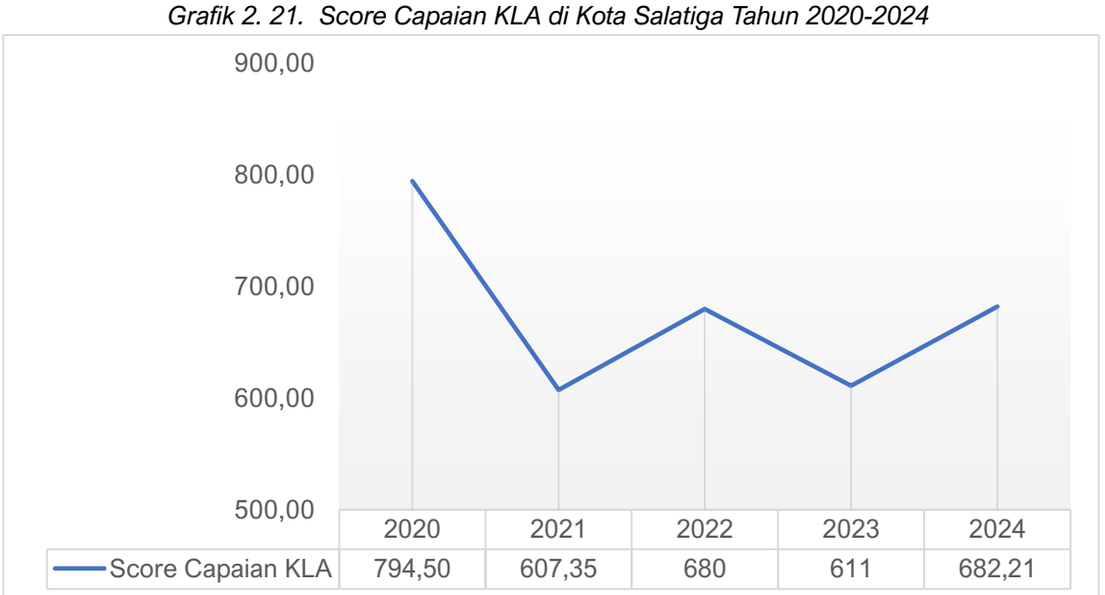
JENIS KOMODITI	PRODUKSI (KU)				
	2021	2022	2023	2024	2025
Puyuh	4.100,00	11.154,00	12.276,00	12.278,00	3.037,00
Susu	**4.688.280,00**	**3.796.200,00**	**2.463.844,00**	**2.949.505,00**	**3.067.396,00**
Ayam Ras	4.688.280,00	3.796.200,00	2.463.844,00	2.949.505,00	3.067.396,00

Jika dibandingkan dengan realisasi kinerja sebelumnya, maka terdapat realisasi penurunan sebesar 2,6 point. Penurunan angka ini banyak terdapat di komoditas padi dan umbi–umbian. jika dilihat dari penurunan angka komoditas padi dan umbi–umbian ini, sebagai kesuksesan pemerintah dalam mendorong bahan pangan non beras dan diversifikasi produk lokal.

e. Score Capaian Kota Layak Anak

Kota Layak Anak (KLA) adalah suatu pembangunan kabupaten/kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak. Indikator kinerja Capaian Kota Layak Anak (KLA) merupakan indikator kinerja positif, yang artinya semakin tinggi realisasi akan semakin baik capaian kinerjanya.

Grafik 2. 21. Score Capaian KLA di Kota Salatiga Tahun 2020-2024



Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Tahun 2024

Tahun 2025 tidak dilakukan penilaian oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dikarenakan penilaian dilakukan 2 tahun sekali, sehingga masih menggunakan nilai pada tahun 2024. Target kinerja capaian kota layak anak tahun 2024 sebesar 620 dapat tercapai sebesar 682 sehingga realisasi capaian sebesar 110%. Tingkatan Kota Layak Anak Kota Salatiga berada pada kategori Madya

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

dengan kriteria score 500 sampai dengan 800. Angka capaian kinerja untuk capaian kota layak anak didapatkan dari hasil penilaian evalusai kota layak anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Nilai untuk KLA didapatkan dari penilaian pada tahun berjalan dengan menilai kinerja pada tahun sebelumnya.

Pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2013, standar nasional skor kota layak anak adalah 1000, maka jika dibandingkan dengan skor capaian tahun 2024 sebesar 682,21 Kota Salatiga masih perlu meningkatkan kinerjanya untuk mencapai standar nasional yang telah ditetapkan.

f. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

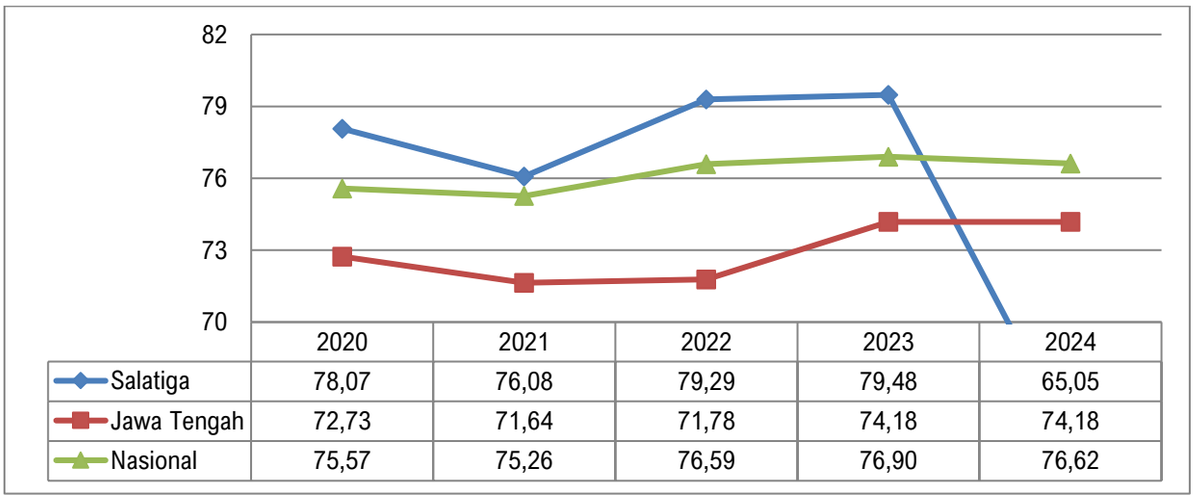
Indeks Pemberdayaan Gender atau disingkat IDG merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender berdasakan partisipasi politik dan ekonomi. Tiga indikator yang dipakai dalam IDG, antara lain keterlibatan di parlemen, partisipasi sebagai tenaga profesional, dan sumbangan dalam pendapatan pekerjaan.

Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Salatiga tahun 2024 menunjukkan adanya partisipasi perempuan yang berbeda-beda pada tiga indikator utama. Pertama, keterlibatan perempuan di parlemen tercatat sebesar 8 persen, menunjukkan masih rendahnya representasi perempuan dalam pengambilan keputusan politik. Kedua, partisipasi perempuan sebagai tenaga profesional mencapai 46,39 persen, yang menandakan kontribusi yang cukup signifikan dalam sektor profesional, namun masih memiliki ruang untuk ditingkatkan agar kesetaraan gender di dunia kerja semakin tercapai. Ketiga, sumbangan perempuan terhadap pendapatan pekerjaan tercatat 40,72 persen, yang menggambarkan peran perempuan dalam ekonomi lokal namun masih di bawah proporsi ideal untuk kesetaraan ekonomi.

Data untuk tahun 2025 belum tersedia dikarenakan menunggu rilis dari BPS Provinsi Jawa Tengah pada bulan Mei 2026, sehingga perlu perhatian lebih dalam pemantauan dan pengumpulan data terkini untuk memastikan tren partisipasi dan pemberdayaan perempuan. Dalam konteks Rancangan RKPD 2027, arah kebijakan perlu menekankan penguatan kesetaraan gender melalui peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, profesional, dan ekonomi. Strategi ini dapat dilaksanakan melalui program peningkatan kapasitas kepemimpinan perempuan, fasilitasi akses pendidikan dan pelatihan profesional, serta pemberdayaan ekonomi perempuan melalui UMKM, kewirausahaan, dan peluang kerja formal. Pendekatan ini sejalan dengan target SDGs dalam mewujudkan kesetaraan gender (SDGs 5) dan meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan daerah secara menyeluruh.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Grafik 2. 22. Perbandingan IDG Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024

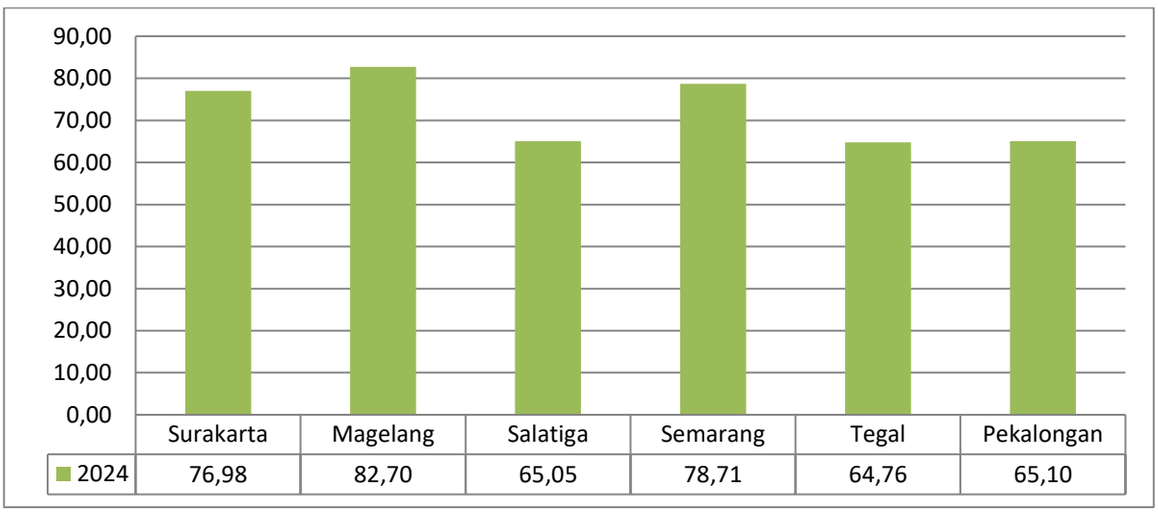


	2020	2021	2022	2023	2024
Salatiga	78,07	76,08	79,29	79,48	65,05
Jawa Tengah	72,73	71,64	71,78	74,18	74,18
Nasional	75,57	75,26	76,59	76,90	76,62

Sumber : BPS Jawa Tengah, Tahun 2024

Perbandingan IDG Kota Salatiga dengan Kota-kota lain di Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 berada pada peringkat keenam. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2. 23. Perbandingan IDG Kota Salatiga dengan Kota-Kota Lain di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024



	Surakarta	Magelang	Salatiga	Semarang	Tegal	Pekalongan
2024	76,98	82,70	65,05	78,71	64,76	65,10

Sumber : BPS Jawa Tengah, Tahun 2024

g. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

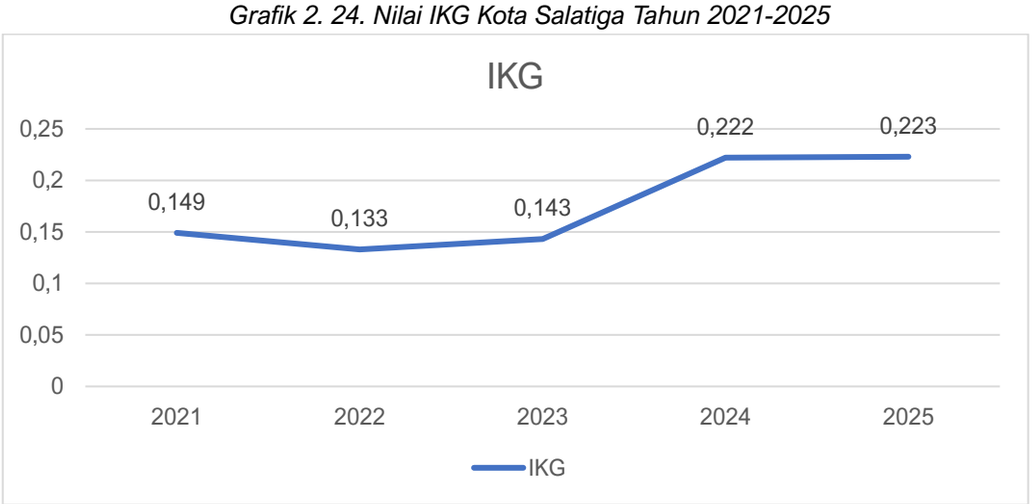
Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kota Salatiga selama periode 2021–2025 menunjukkan dinamika capaian kesetaraan gender yang perlu dicermati dalam perencanaan pembangunan daerah. Pada tahun 2021, nilai IKG Kota Salatiga tercatat sebesar 0,149 dan turun menjadi 0,133 pada tahun 2022. Penurunan tersebut mengindikasikan adanya perbaikan kondisi kesetaraan gender yang mencerminkan dampak positif dari implementasi kebijakan dan program pengarusutamaan gender di Kota Salatiga. Namun demikian, pada tahun 2023 nilai IKG kembali meningkat menjadi 0,143 dan pada tahun 2024 mengalami kenaikan yang cukup signifikan menjadi 0,222 yang terus meningkat di tahun 2025 menjadi sebesar 0,223. Peningkatan nilai IKG ini menunjukkan adanya kecenderungan meningkatnya ketimpangan gender, yang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

mengindikasikan belum optimalnya keberlanjutan capaian pembangunan responsif gender, khususnya dalam aspek partisipasi ekonomi, akses terhadap kesempatan kerja, serta keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan pembangunan.

Pemerintah Kota Salatiga perlu terus memperkuat kebijakan dan program pengarusutamaan gender, khususnya dalam peningkatan akses perempuan terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi, serta memperkuat peran perempuan dalam pengambilan keputusan pembangunan, guna memastikan penurunan ketimpangan gender yang berkelanjutan pada tahun-tahun mendatang.

Grafik 2. 24. Nilai IKG Kota Salatiga Tahun 2021-2025



Sumber : BPS Jawa Tengah, Tahun Mei 2025

h. Indeks Pembangunan Keluarga

Indeks Pembangunan Keluarga (i-Bangga) merupakan indikator komposit yang digunakan untuk mengukur kualitas pembangunan keluarga dari tiga dimensi utama, yaitu ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga. Berdasarkan data yang tersedia, nilai i-Bangga Kota Salatiga mengalami fluktuasi dalam periode tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, nilai i-Bangga tercatat sebesar 60,1 dan mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 56,1. Data untuk tahun 2022 dan 2023 tidak tersedia, namun pada tahun 2024 nilai i-Bangga meningkat signifikan menjadi 67,3. Peningkatan ini menunjukkan adanya kemajuan dalam kualitas kehidupan keluarga di Kota Salatiga, yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti peningkatan layanan sosial, akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta keberhasilan program pembinaan keluarga yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Nilai i-Bangga yang terus ditingkatkan dapat menjadi landasan kuat dalam merumuskan kebijakan pembangunan berbasis keluarga, guna mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan berdaya. Suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga serta menggambarkan peran dan fungsi keluarga. Indeks pembangunan kualitas keluarga mencerminkan seberapa tinggi kualitas suatu keluarga. Daerah yang memiliki indeks pembangunan yang tinggi mengindikasikan memiliki ketahanan yang baik dalam menghadapi berbagai

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

tantangan sosial ekonomi. Indeks pembangunan keluarga Kota Salatiga Kota Salatiga menunjukan angka sebesar 67,3. Angka ini ditargetkan semakin meningkat setiap tahunnya. Angka indeks pembangunan keluarga yang tinggi artinya keluarga tersebut telah berhasil menciptakan kondisi lingkungan yang harmonis.

Pada tahun 2025, Indeks Pembangunan Keluarga Kota Salatiga 79,7 naik 12,4 point. Ke depan, Pemerintah Kota Salatiga perlu terus memperkuat sinergi program pembangunan keluarga, khususnya dalam peningkatan kualitas pengasuhan, kesehatan keluarga, ketahanan ekonomi keluarga, serta penguatan peran institusi keluarga, guna menjaga dan meningkatkan capaian i-Bangga secara berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya.

i. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender atau disingkat IPG adalah angka pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia (sama seperti definisi IPM), namun terpilih berdasarkan jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPG mendekati/sama dengan angka 100.

Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Salatiga selama periode 2020–2024 menunjukkan kinerja yang relatif stabil dan konsisten dengan tren peningkatan.

Pada tahun 2020, IPG Kota Salatiga tercatat sebesar 95,18 dan terus mengalami peningkatan menjadi 95,37 pada tahun 2021 serta 95,44 pada tahun 2022. Tren peningkatan nilai IPG tersebut berlanjut pada tahun 2023 dan 2024, dengan nilai IPG masing-masing sebesar 95,45 dan 95,59. Kondisi ini mencerminkan semakin membaiknya kesetaraan capaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan di Kota Salatiga, khususnya pada aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

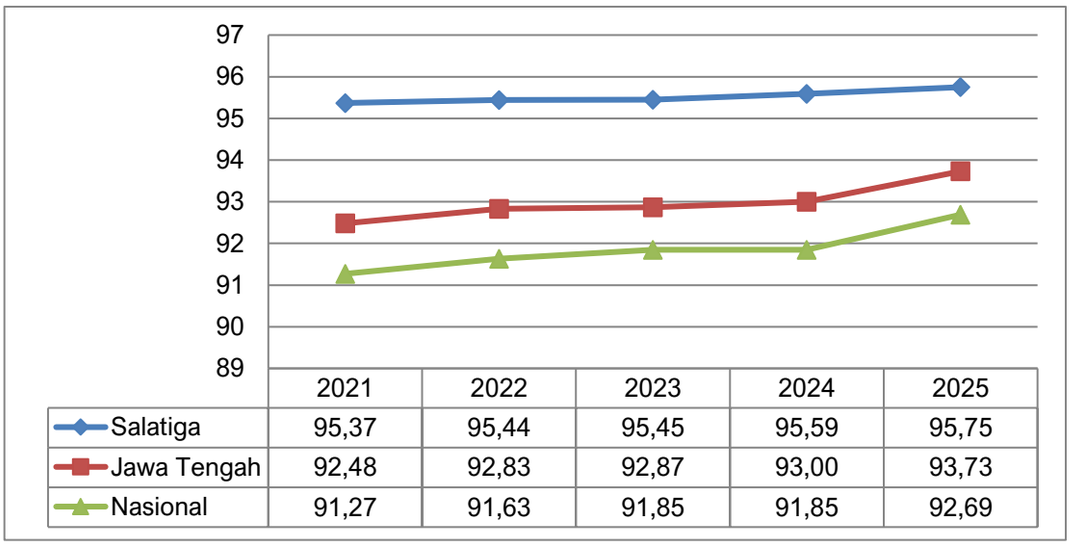
Dibandingkan dengan tingkat Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, capaian IPG Kota Salatiga selama periode tersebut secara konsisten berada di atas rata-rata provinsi maupun nasional. Pada tahun 2025, IPG Kota Salatiga sebesar 95,75 yang lebih tinggi dibandingkan IPG Jawa Tengah sebesar 93,73 dan IPG Nasional sebesar 92,69. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan gender di Kota Salatiga relatif lebih maju dan menjadi salah satu daerah dengan capaian kesetaraan gender yang baik.

IPG Provinsi Jawa Tengah dan Nasional juga menunjukkan tren peningkatan selama periode 2020–2025, meskipun dengan laju yang lebih moderat. IPG Jawa Tengah meningkat dari 91,18 pada tahun 2020 menjadi 93,00 pada tahun 2024 dan pada tahun 2025 menjadi 93,73. Sementara itu, IPG Nasional meningkat dari tahun 2023 sebesar 91,06 menjadi 91,85 pada tahun 2024 dan di tahun 2025 menjadi 92,69. Perbandingan ini mempertegas posisi Kota Salatiga sebagai daerah dengan kinerja pembangunan gender yang lebih unggul.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Capaian IPG Kota Salatiga berada diatas capaian IPG Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 93,00 dan Nasional sebesar 91,85 sebagaimana terlihat pada grafik berikut:

Grafik 2. 25. Perbandingan IPG Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2025



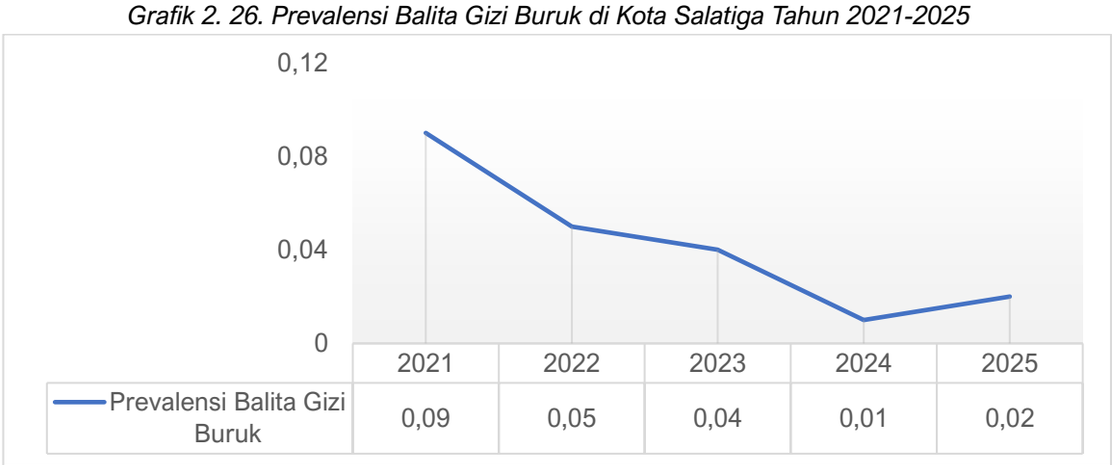
	2021	2022	2023	2024	2025
Salatiga	95,37	95,44	95,45	95,59	95,75
Jawa Tengah	92,48	92,83	92,87	93,00	93,73
Nasional	91,27	91,63	91,85	91,85	92,69

Sumber : BPS Jawa Tengah, April 2025

j. Prevalensi Balita Gizi Buruk

Pada tahun 2025 prevalensi gizi buruk di Kota Salatiga sebesar 0,02%. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan pemenuhan gizi balita sehingga dalam kurun waktu 2021-2025 prevalensi balita gizi buruk mengalami tren menurun. Walaupun masih munculnya kasus gizi buruk berulang dengan balita yang sama karena adanya kelainan pada balita tersebut. Upaya yang dilakukan diantaranya meningkatkan KIE, Sosialisasi terkait gizi seimbang dan bahayanya balita dengan gizi buruk serta dengan memanfaatkan rumah pemulihan gizi secara maksimal bekerjasama dengan dokter spesialis anak melalui pemeriksaan dan konsultasi kesehatan serta dengan memberikan makanan tambahan bagi balita gizi kurang dan keluarga miskin.

Grafik 2. 26. Prevalensi Balita Gizi Buruk di Kota Salatiga Tahun 2021-2025



	2021	2022	2023	2024	2025
Prevalensi Balita Gizi Buruk	0,09	0,05	0,04	0,01	0,02

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Permasalahan status gizi salah satunya adalah kejadian stunting (Gizi kronis), dimana Kota Salatiga saat ini masih memiliki angka prevalensi stunting sebesar 7,01 persen atau sebanyak 605 Balita Stunting pada tahun 2024 dan tersebar pada semua kecamatan dan kelurahan di Kota Salatiga. Masih adanya kejadian Stunting ini karena kurangnya kesadaran Permasalahan status gizi salah satunya adalah kejadian stunting (Gizi kronis), dimana Kota Salatiga saat ini masih memiliki angka prevalensi stunting sebesar 6,71 persen atau sebanyak 548 Balita Stunting pada tahun 2025 dan tersebar pada semua kecamatan dan kelurahan di Kota Salatiga. Masih adanya kejadian Stunting ini karena kurangnya kesadaran orang tua balita dalam pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita, kurangnya pengetahuan ibu dalam pemberian makanan pada bayi dan balita, adanya penyakit infeksi pada balita, masih ada kasus anemi dan KEK pada ibu hamil, dan kondisi sanitasi yang kurang baik. Stunting akan mempengaruhi secara nyata pada kualitas sumber daya manusia Kota Salatiga pada tahun-tahun mendatang.

Tabel 2. 9. Data Stunting Kota Salatiga 2021-2025

Tahun	BADUTA		BALITA	
2021	286/3.431	8,34%	856/9.480	9,03%
2022	204/3.746	5,44%	647/10.418	6,21%
2023	135/2927	4,61%	484/8.177	5,92%
2024	181/2698	6,71%	605/8627	7,01%
2025	151/2595	5,82%	548/8162	6,71%

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2025

2.3. Aspek Daya Saing Daerah

2.3.1. Daya Saing Ekonomi Daerah

a. Pertumbuhan PDRB

Salah satu indikator penting untuk mengetahui perkembangan perekonomian suatu daerah dalam suatu periode dapat digambarkan dari Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Analisis Pertumbuhan PDRB merupakan salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk melihat perkembangan kesejahteraan masyarakat dari sudut pandang ekonomi. Melalui dinamika dari berbagai kegiatan ekonomi yang ada, akan dapat diidentifikasi karakteristik wilayah berikut potensi-potensi dan kelemahan yang memerlukan perhatian demi kemajuan wilayah yang semakin baik dimasa mendatang.

Pada tahun 2025, jumlah PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan 2010 sebesar Rp.12.198.74 (dalam miliar) mengalami kenaikan sebesar Rp.693,69 (dalam miliar) atau 6,03% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp.11.505,05 (dalam miliar) .

Kontribusi tertinggi PDRB ADHK menurut lapangan usaha pada sektor industri pengolahan sebesar Rp. 3.561,03 (dalam miliar). Sedangkan kontribusi terendah pada sektor pertambangan dan penggalian sebesar Rp. 1,18 (dalam miliar).

Data PDRB ADHK tahun dasar 2010 menurut lapangan usaha Kota Salatiga Tahun 2021-2025 disajikan pada Tabel berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 2. 10. Nilai PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Kota Salatiga Tahun 2021-2025 (dalam miliar rupiah)

Kategori	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	430,02	445,45	453,68	477,82	498,10
B	Pertambangan dan Penggalian	3,27	2,94	2,99	2,18	1,18
C	Industri Pengolahan	2.955,35	3.092,87	3.242,60	3.364,87	3.561,03
D	Pengadaan Listrik dan Gas	23,08	24,56	25,26	26,76	27,66
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,87	8,15	8,46	8,70	8,70
F	Konstruksi	1.299,23	1.312,76	1.377,88	1.475,24	1.557,34
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.380,39	1.436,36	1.500,64	1.574,03	1.642,77
H	Transportasi dan Pergudangan	259,35	391,62	419,69	447,59	476,33
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	762,77	872,57	972,29	1.034,99	1.131,35
J	Informasi dan Komunikasi	546,88	558,13	594,27	648,42	716,88
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	337,29	339,17	346,27	353,48	380,44
L	Real Estate	519,27	544,72	579,00	600,50	625,55
M, N	Jasa Perusahaan	119,39	126,15	133,41	144,30	156,77
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	476,44	487,32	499,82	535,25	547,16
P	Jasa Pendidikan	436,81	443,50	468,26	498,21	533,08
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	162,41	167,56	176,63	188,51	199,42
R, S, T, U	Jasa lainnya	100,49	111,47	117,54	124,20	134,98
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	**9.822,00**	**10.365,44**	**10.918,73**	**11.505,05**	**12.198,74**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Salatiga, 2026

PDRB ADHB menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga pada setiap tahun, sedangkan PDRB ADHK menggunakan harga pada tahun tertentu dan saat ini yang digunakan yaitu tahun dasar 2010. PDRB ADHB dapat digunakan untuk melihat pergeseran struktur ekonomi.

Pada tahun 2025, jumlah PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku sebesar Rp. 19.384,47 (dalam miliar) mengalami peningkatan sebesar Rp1.308,84 (dalam miliar) atau 7,80% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp. 19.079,27 (dalam miliar) Kontribusi tertinggi PDRB ADHB menurut lapangan usaha pada sektor industri pengolahan sebesar Rp. 6.407,05 (dalam miliar). Sedangkan kontribusi terendah pada sektor pertambangan dan penggalian sebesar Rp. 2,08 (dalam miliar).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Data Produk Domestik Regional Bruto Kota Salatiga Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) menurut lapangan usaha tahun 2021-2025 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2. 11. Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kota Salatiga Tahun 2021-2025 (dalam miliar rupiah)

Kategori	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	631,75	683,29	727,26	791,94	838,85
B	Pertambangan dan Penggalian	5,34	4,95	5,16	3,82	2,08
C	Industri Pengolahan	4.586,93	5.042,85	5.551,83	5.992,10	6.407,05
D	Pengadaan Listrik dan Gas	25,76	27,66	28,74	30,57	31,60
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9,31	9,85	10,32	11,15	11,53
F	Konstruksi	1.929,82	2.086,17	2.282,64	2.456,46	2.618,10
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.823,95	1.973,25	2.136,25	2.285,99	2430,27
H	Transportasi dan Pergudangan	324,56	517,84	600,04	649,49	702,42
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.002,97	1.196,13	1.317,09	1.431,13	1.580,88
J	Informasi dan Komunikasi	542,72	555,04	593,00	649,02	719,96
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	498,68	543,54	567,51	693,65	650,22
L	Real Estate	631,73	675,21	725,01	755,84	794,18
M,N	Jasa Perusahaan	174,33	192,12	210,37	232,41	256,71
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	705,65	741,13	806,63	853,08	878,73
P	Jasa Pendidikan	741,66	757,28	806,63	871,84	949,66
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	242,33	252,67	272,01	295,90	318,20
R, S, T, U	Jasa lainnya	129,09	148,68	161,50	174,86	194,04
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	14.008,91	15.407,64	16.773,09	19.079,27	19.384,47

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Salatiga, 2026

PDRB menurut pengeluaran mengalami perubahan klasifikasi dimana pengeluaran konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) yang sebelumnya termasuk bagian dari pengeluaran konsumsi rumah tangga menjadi komponen terpisah. Sehingga klasifikasi PDRB menurut pengeluaran dirinci menjadi 6 komponen yaitu komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi LNPRT, pengeluaran konsumsi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventori dan net ekspor barang dan jasa.

Tabel 2. 12. Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kota Salatiga Tahun 2021-2025 (dalam miliar rupiah)

Jenis Pengeluaran	2021	2022	2023	2024	2025
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	8.824,97	9.692,95	10.533,34	11.412,78	12.117,88
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	143,12	161,69	180,22	202.48	215,94
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.307,85	1.321,27	1.391,99	1.484,97	1.539,61
Pembentukan Modal tetap Bruto	6.384,00	6.761,85	7.143,45	7.672,15	8.324,95
Perubahan Inventori	111,89	146,33	168,40	125.97	115,07
Net Ekspor Barang dan Jasa/Net	(2.762,91)	(2.676,44)	(2.647,15)	-2.819,08	-2.928,98
Produk Domestik Regional Bruto	14.008,91	15.407,64	16.773,34	18.079,27	19.384,47

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Salatiga, 2026

Selain dinilai dengan Atas Dasar Harga Berlaku, PDRB menurut pengeluaran juga dinilai Atas Dasar Harga Konstan 2010 atau atas dasar harga berbagai produk yang dinilai dengan harga pada tahun 2010. PDRB ADHK menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir. Seluruh komponen pengeluaran akhir PDRB ADHK juga menunjukkan peningkatan dari tahun 2021-2025, dan terjadi fluktuasi penurunan dan kenaikan di beberapa komponen. Sedangkan pada tahun 2021 dan tahun 2025 terjadi kenaikan di beberapa komponen dengan nilai akhir PDRB 12.198,74milyar rupiah.

Tabel 2. 13. Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kota Salatiga Tahun 2021-2025 (dalam miliar rupiah)

Jenis Pengeluaran	2021	2022	2023	2024	2025
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	6.152,12	6.493,80	6.814,96	7.188,09	7.528,79
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	87,15	91,43	98,08	108,25	113,58
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	795,55	796,20	812,57	838,42	848,72
Pembentukan Modal tetap Bruto	4.182,73	4.263,74	4.408,81	4.610,58	4.934,97
Perubahan Inventori	90,51	118,27	124,83	88,49	82,43
Net Ekspor Barang dan Jasa/Net	(1.486,07)	(1.398,12)	(1.340,56)	(1.328,77)	(1.309,75)
Produk Domestik Regional Bruto	9.822,00	10.365,31	10.918,69	11.505,05	12.198,74

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Salatiga, 2026

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Laju Pertumbuhan PDRB tahun 2025 yang dipengaruhi oleh berbagai jenis pengeluaran yang mengalami pertumbuhan PDRB pada Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga dengan angka 5,33%. Besarnya PK-LNPRT sama dengan output atau biaya produksi yang dikeluarkan dalam rangka melakukan aktivitas pelayanan pada masyarakat, anggota organisasi, atau kelompok masyarakat tertentu. Biaya produksi LNPRT sama dengan nilai konsumsi antara ditambah biaya primer (kompensasi pegawai, penyusutan, dan pajak atas produksi lainnya). Biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan lembaga atas penggunaan barang dan jasa (antara) dan faktor produksi, ditambah nilai barang dan jasa yang berasal dari produksi sendiri atau pemberian pihak lain (transfer). LNPRT dibedakan atas 6 jenis lembaga, yaitu:

- Organisasi kemasyarakatan
- Organisasi sosial
- Organisasi profesi dan serikat buruh
- Organisasi kebudayaan, olahraga, dan rekreasi
- Partai Politik
- Lembaga keagamaan

Tabel 2. 14. Laju Pertumbuhan PDRB menurut Pengeluaran Kota Salatiga Tahun 2021-2025 (persen)

Jenis Pengeluaran PDRB	2021	2022	2023	2024	2025
Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	1,85	5,55	4,95	5,48	4,82
Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga	1,47	4,90	7,28	10,37	4,92
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2,43	0,08	2,11	3,23	1,23
Pembentukan Modal Tetap Bruto	0,74	1,94	3,35	4,61	6,64
Perubahan Inventori	(25,89)				
Net Ekspor Barang dan Jasa	11,09		0		
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	**3,33**	**5,53**	**5,34**	**5,37**	**5,98**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Salatiga, 2026

PDRB per kapita Kota Salatiga menunjukan peningkatan dari tahun 2021 sampai dengan 2025 dan terjadi pertumbuhan positip dengan nilai 5.98%. Pertumbuhan PDRB per kapita setiap tahunnya yang selalu lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan jumlah penduduk, menunjukkan tingkat kemakmuran dari penduduk yang lebih tinggi pada setiap tahunnya, hanya saja di tahun 2021 dampak pandemi menyebabkan pertumbuhan PDRB per kapita berada dibawah pertumbuhan penduduk.

Tabel 2. 15. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Per Kapita Kota Salatiga Tahun 2021-2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Nilai PDRB (Miliar RP)					
-ADHB	14.008,91	15.407,64	16.770,34	18.080,61	19.384,47
-ADHK 2010	9.822,00	10.365,31	10.918,69	11.505,05	12.198,74

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 (%)	3,35	5,53	5,34	5,41	5,98
PDRB perkapita (Juta Rp)					
-ADHB	72,39	78,26	84,31	89,83	95,23
-ADHK 2010	50,75	53,14	54,89	57,13	59,93
Pertumbuhan PDRB perkapita ADHK 2010 (%)	2,71	4,70	3,29	4,08	4,90
Jumlah Penduduk (Orang)	193.525	196,54	198,971	201,37	203.550
Pertumbuhan (%)	**0,83**	**0,80**	**1,21**	**1,18**	**1,13**

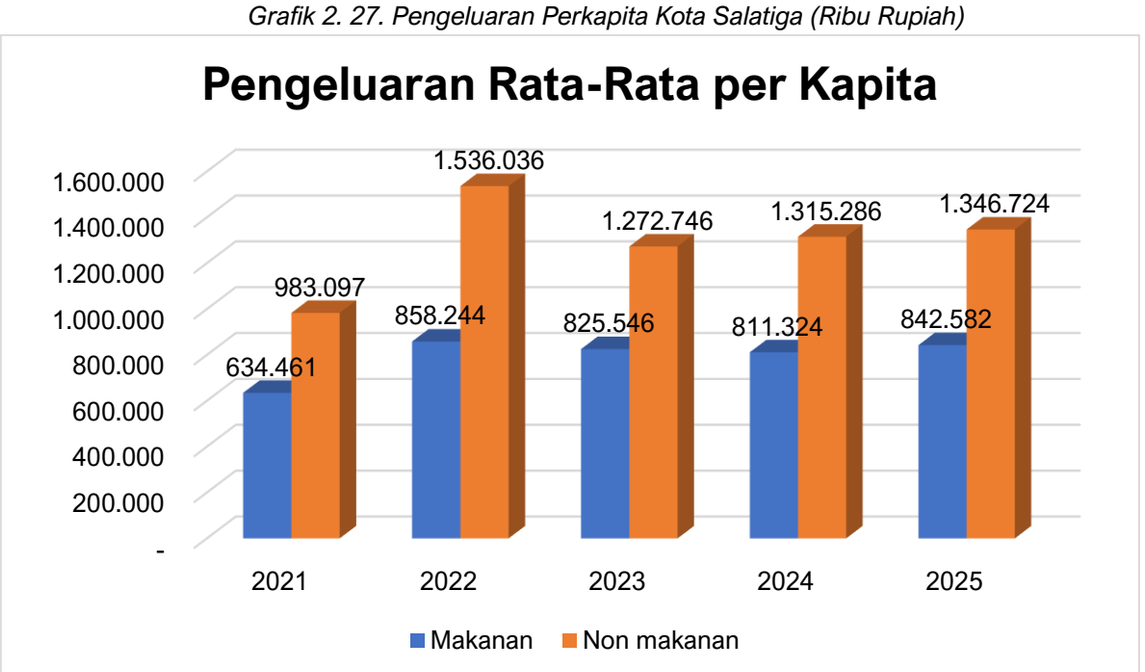
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Salatiga, 2026

b. Pengeluaran Riil Per Kapita

Besarnya pengeluaran konsumsi per kapita digunakan sebagai pendekatan untuk mengetahui tingkat pendapatan masyarakat dan tingkat kemampuan ekonomi masyarakat. Pengeluaran rumah tangga ini terdiri dari pengeluaran makanan dan bukan makanan yang menggambarkan bagaimana penduduk mengalokasikan kebutuhan rumah tangganya.

Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan untuk kelompok makanan di Kota Salatiga tahun 2025 sebesar Rp 842.582,00 yang didominasi oleh kelompok komoditi makanan dan minuman jadi (Rp 306.858,00) kemudian disusul oleh kelompok komoditi rokok dan tembakau (Rp 74.366,00). Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk kelompok non makanan di Kota Salatiga tahun 2025 sebesar Rp 1.346.724,00 yang didominasi oleh kelompok komoditi perumahan dan fasilitas rumah tangga (Rp 558.296,00) kemudian disusul oleh kelompok aneka komoditas dan jasa (Rp 368.364,00).

Grafik 2. 27. Pengeluaran Perkapita Kota Salatiga (Ribu Rupiah)

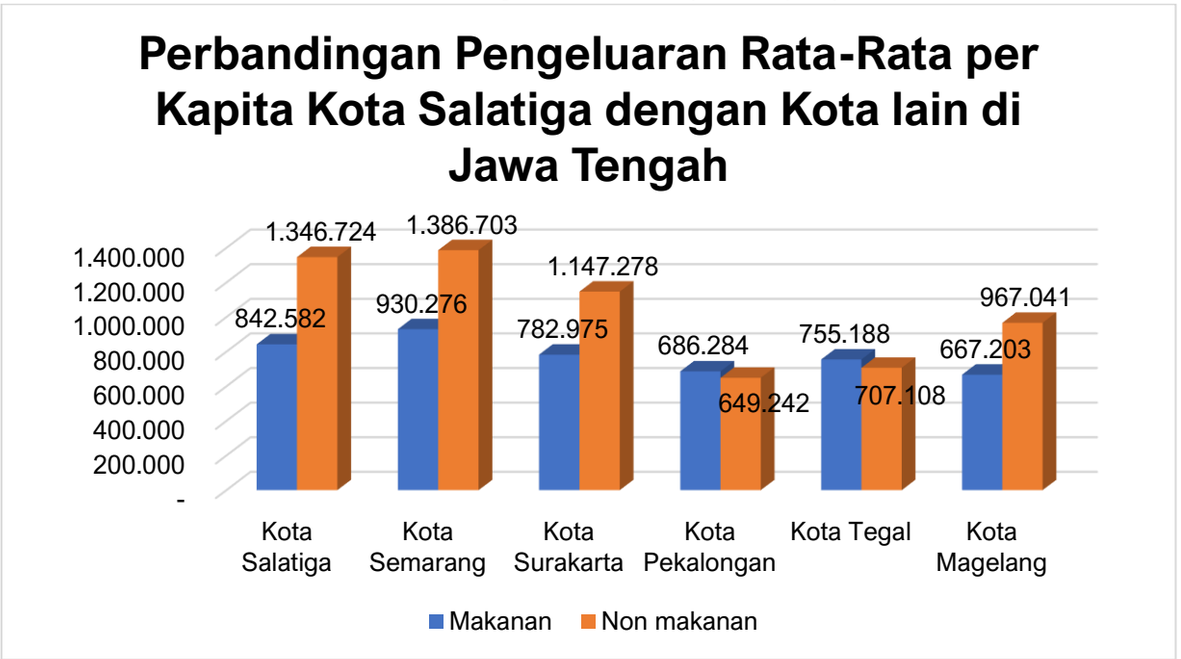


Sumber : BPS Kota Salatiga, Tahun 2026

Perbandingan pengeluaran per kapita Kota Salatiga dengan kota-kota di Provinsi Jawa Tengah berada pada peringkat kedua sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Grafik 2. 28. Perbandingan Pengeluaran Perkapita Kota Salatiga diantara Kota-kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 (Ribu Rupiah)

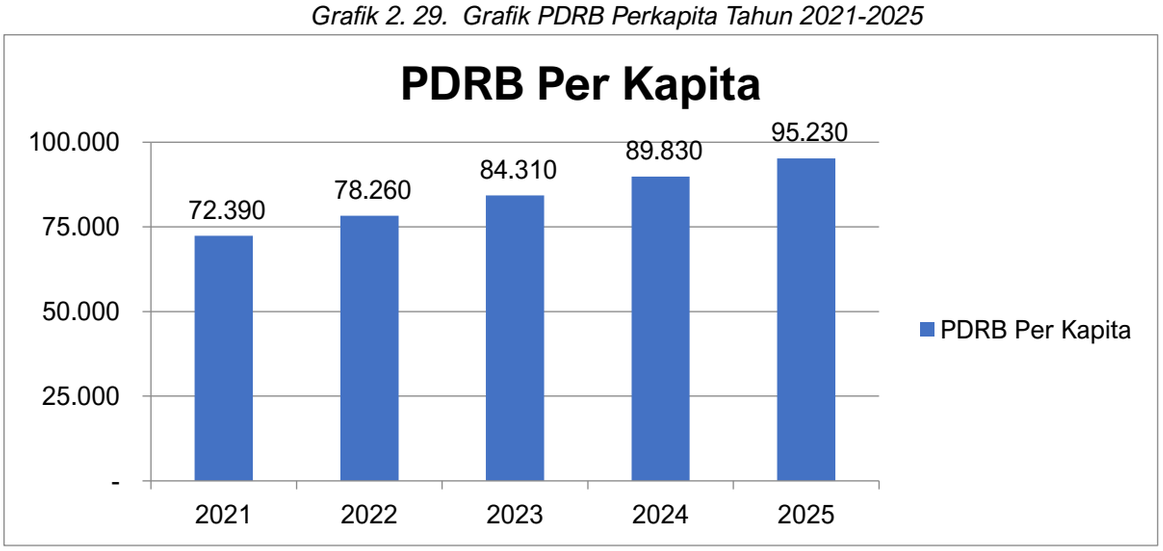


Sumber : BPS Jawa Tengah, Tahun 2026

c. Pendapatan Riil Per Kapita

PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) merupakan jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah. Nominal PDRB bila dibagi dengan jumlah penduduk suatu wilayah akan menghasilkan PDRB per kapita. Hasil perhitungan ini digunakan sebagai pendekatan untuk menghitung pendapatan per kapita penduduk suatu wilayah. PDRB perkapita di Kota Salatiga setiap tahunnya cenderung meningkat, yaitu pada tahun 2022 di angka Rp. 84.310.000,00 dan pada 2024 sebesar Rp. 89.830.000,00. Selanjutnya pada tahun 2025 di angka Rp. 95.230.000,00 Data PDRB perkapita di Kota Salatiga disajikan pada Grafik di bawah ini.

Grafik 2. 29. Grafik PDRB Perkapita Tahun 2021-2025



Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2026

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2.3.2. Daya Saing SDM

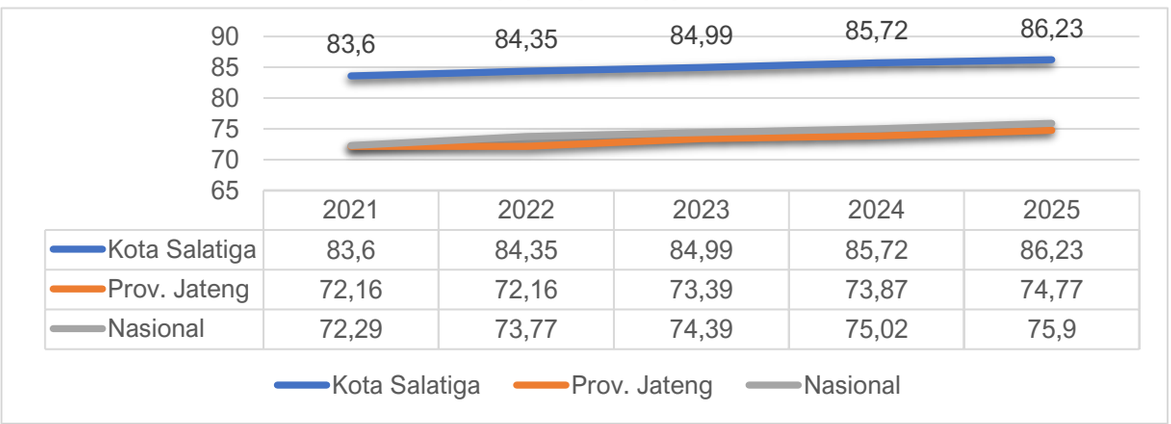
a. Indeks Pembangunan Manusia

Capaian IPM Kota Salatiga yang berada pada kategori sangat tinggi dan menunjukkan tren peningkatan selama periode Tahun 2021–2025 mencerminkan keberhasilan pembangunan sumber daya manusia, khususnya pada dimensi kesehatan dan pendidikan. Kondisi tersebut sejalan dengan arah pembangunan daerah yang menitikberatkan pada pengembangan SDM yang sehat dan cerdas sebagai fondasi utama peningkatan daya saing dan produktivitas masyarakat. Dalam konteks pengembangan perekonomian daerah yang unggul, peningkatan IPM berperan strategis dalam mendukung tersedianya tenaga kerja yang berkualitas, adaptif, dan berdaya saing. SDM yang memiliki tingkat pendidikan dan kesehatan yang baik akan mendorong peningkatan produktivitas ekonomi, penguatan sektor unggulan daerah, serta penciptaan lapangan kerja yang berkualitas.

Selanjutnya, peningkatan IPM juga berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik bermutu, khususnya pada sektor pendidikan dan kesehatan, yang merupakan komponen utama dalam pembentukan kualitas pembangunan manusia. Penguatan akses, mutu, dan pemerataan layanan dasar menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan capaian IPM dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pengembangan infrastruktur wilayah yang sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup turut mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. Penyediaan infrastruktur dasar yang memadai, ramah lingkungan, dan berwawasan kesehatan akan berkontribusi pada peningkatan standar hidup layak, yang merupakan salah satu dimensi utama IPM.

Dengan demikian, IPM menjadi indikator kunci dalam mendukung pencapaian Tema RKPD Tahun 2027, serta menjadi dasar dalam penajaman arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah yang berorientasi pada pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pelayanan publik yang berkualitas, dan keberlanjutan lingkungan hidup. Jika dibandingkan dengan capaian IPM Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, maka IPM Kota Salatiga selama enam tahun terakhir selalu berada diatas capaian IPM Provinsi Jawa Tengah dan Nasional sebagaimana terlihat pada Grafik berikut.

Grafik 2. 30. Capaian IPM Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2025



	2021	2022	2023	2024	2025
Kota Salatiga	83,6	84,35	84,99	85,72	86,23
Prov. Jateng	72,16	72,16	73,39	73,87	74,77
Nasional	72,29	73,77	74,39	75,02	75,9

Sumber : BPS Jawa Tengah, Tahun 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Ketiga dimensi dasar tersebut diukur dengan empat komponen IPM yaitu Umur harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita. Capaian komponen IPM selalu mengalami peningkatan dalam kurun waktu tahun 2021-2025. Data capaian masing-masing komponen IPM Kota Salatiga Tahun 2021-2025 disajikan pada Tabel di bawah ini.

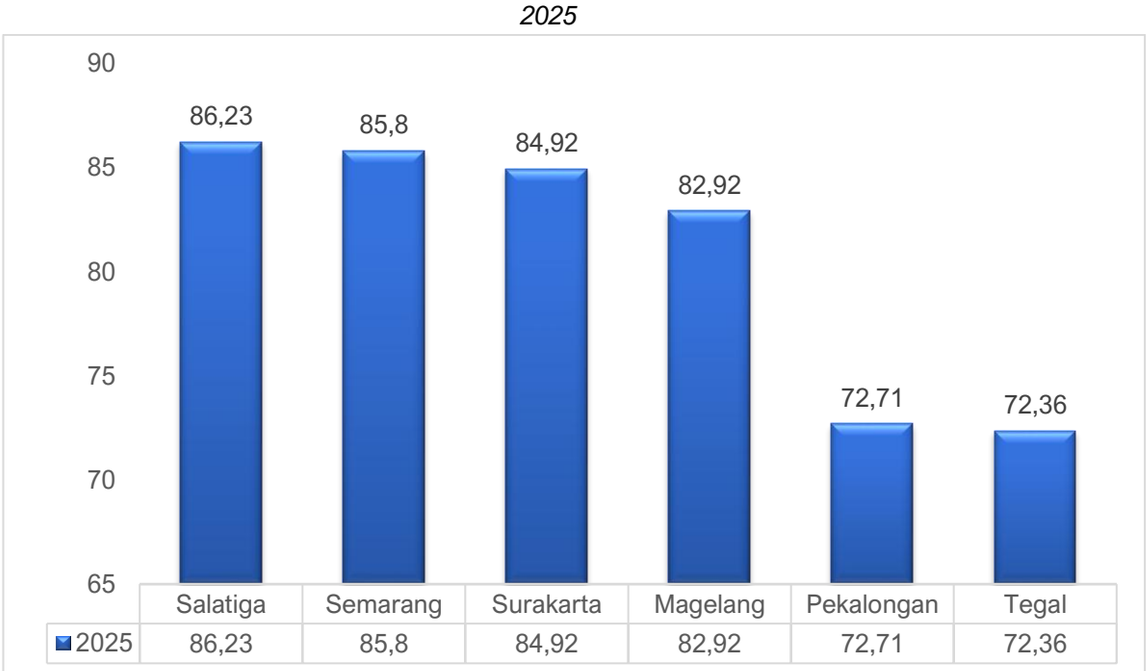
Tabel 2. 16. Komponen IPM Kota Salatiga Tahun 2021-2025

No.	Komponen	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Umur Harapan Hidup (UHH)	77,55	77,72	77,93	78,27	78,75
2.	Harapan Lama Sekolah (HLS)	15,42	15,43	15,44	15,46	15,47
3.	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	10,66	10,95	11,24	11,48	11,49
4.	Pengeluaran Riil Perkapita (ribu Rp)	15.843	16.351	16.650	17.096	17.523
IPM Kota Salatiga		83,14	84,35	84,99	85,72	86,23
Jawa Tengah		69,98	69,98	70,52	73,87	74,77
Nasional		71,94	73,77	74,39	75,02	75,9

Sumber : BPS Jawa Tengah Tahun 2025

Pada tahun 2025 tidak terjadi perubahan peringkat di antara 6 (enam) Kabupaten/Kota dibandingkan tahun sebelumnya. Kota Salatiga masih menempati peringkat pertama, diikuti Kota Semarang diperingkat kedua, dan Kota Surakarta di peringkat ketiga. Perbandingan posisi capaian IPM Kota Salatiga diantara kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 sebagaimana terlihat pada Grafik berikut.

Grafik 2. 31. Perbandingan Posisi IPM Kota Salatiga dengan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025



Sumber : BPS Jawa Tengah, Tahun 2025

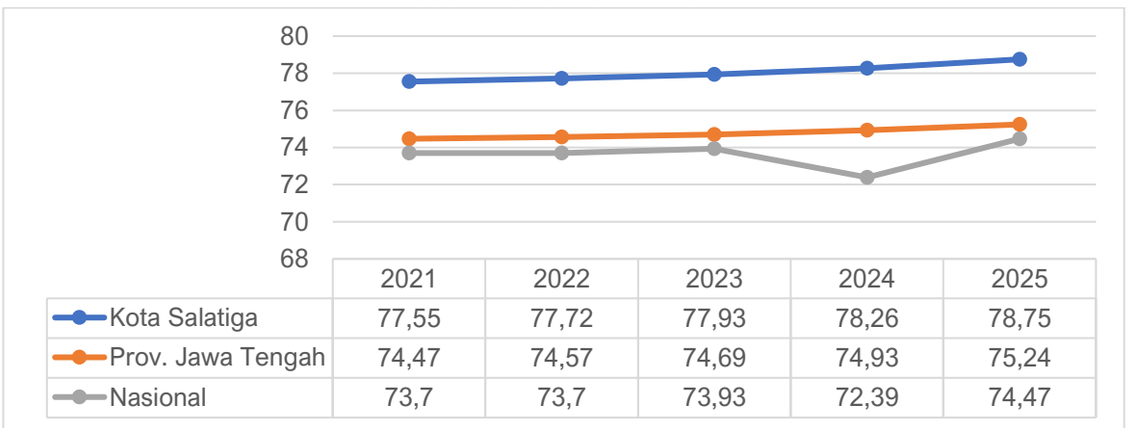
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1) Usia Harapan Hidup saat Lahir

Usia harapan hidup saat lahir adalah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh seorang bayi saat lahir sampai pada tahun tertentu saat ia meninggal. Data ini berguna untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan dan dampaknya pada kesejahteraan masyarakat. Semakin lama harapan hidup yang mampu dicapai maka semakin tinggi derajat kesehatannya. Usia harapan hidup saat lahir menunjukkan kualitas kesehatan masyarakat, yang mencerminkan "lamanya hidup" sekaligus "hidup sehat" suatu masyarakat.

Usia harapan hidup saat lahir tahun 2025 Kota Salatiga sebesar 78,75 tahun berada diatas capaian Provinsi Jawa Tengah sebesar 75,24 dan capaian Nasional sebesar 74,47. Hal ini berarti dari tahun 2021 sampai tahun 2025, rata-rata penduduk Kota Salatiga dapat bertahan hidup pada usia 78 tahun. Tren perkembangan Usia Harapan Hidup saat Lahir Kota Salatiga selama kurun waktu 2021 hingga 2025 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2. 32. Perkembangan Usia Harapan Hidup saat Lahir Kota Salatiga, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2025

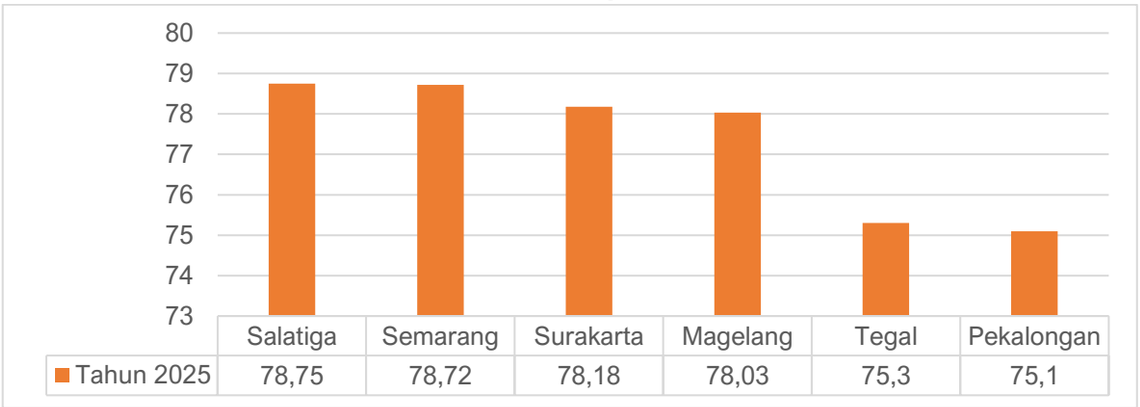


	2021	2022	2023	2024	2025
Kota Salatiga	77,55	77,72	77,93	78,26	78,75
Prov. Jawa Tengah	74,47	74,57	74,69	74,93	75,24
Nasional	73,7	73,7	73,93	72,39	74,47

Sumber : BPS Jawa Tengah, Tahun 2025

Perbandingan Usia Harapan Hidup saat Lahir Kota Salatiga dengan kota-kota di Jawa Tengah berada pada peringkat pertama di ikuti oleh Kota Semarang sebagaimana terlihat dalam grafik dibawah ini:

Grafik 2. 33. Perbandingan Usia Harapan Hidup saat Lahir Kota Salatiga diantara kota di Provinsi Jawa Tengah 2025



	Salatiga	Semarang	Surakarta	Magelang	Tegal	Pekalongan
Tahun 2025	78,75	78,72	78,18	78,03	75,3	75,1

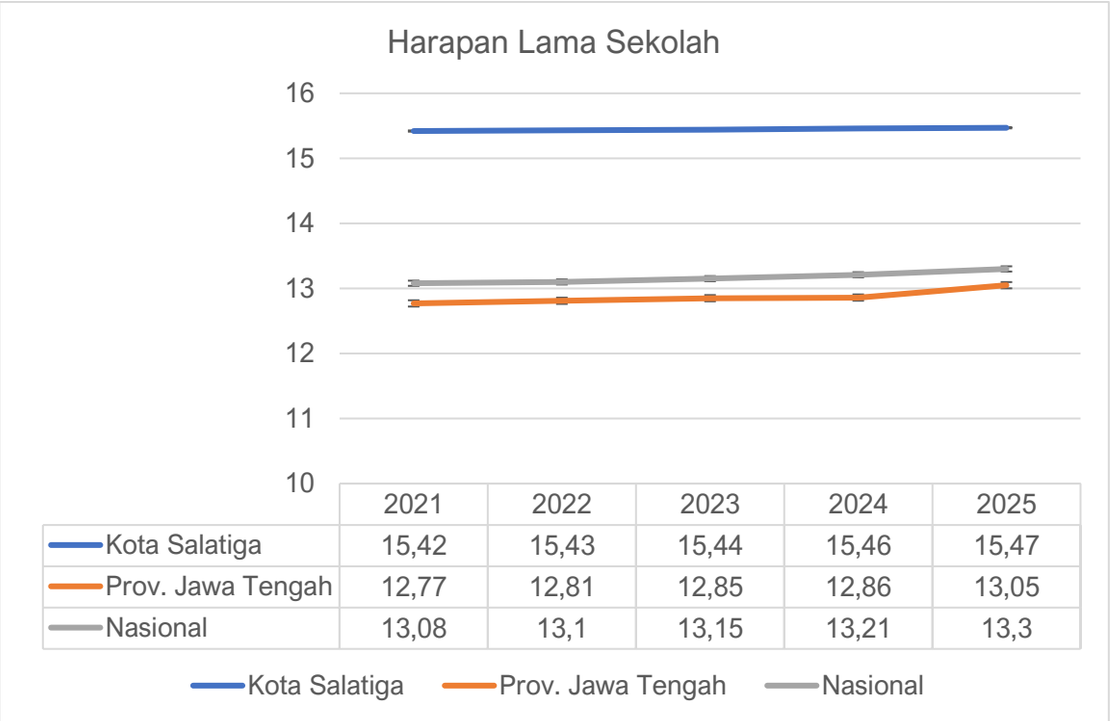
Sumber : BPS Jawa Tengah, Tahun 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2) Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan lama sekolah atau disingkat HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Grafik 2. 34. Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah Dan Nasional Tahun 2021-2025



	2021	2022	2023	2024	2025
Kota Salatiga	15,42	15,43	15,44	15,46	15,47
Prov. Jawa Tengah	12,77	12,81	12,85	12,86	13,05
Nasional	13,08	13,1	13,15	13,21	13,3

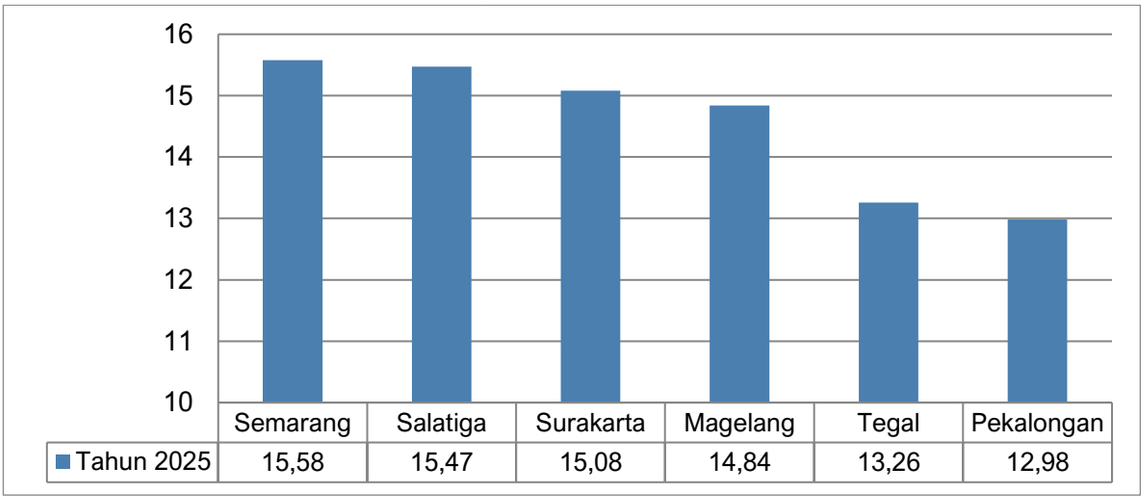
Sumber : BPS Jawa Tengah, Tahun 2025

HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. HLS Kota Salatiga pada tahun 2025 yaitu 15,47 tahun mengalami kenaikan 0,01 tahun dari tahun 2024 sebesar 15,46 tahun. Angka capaian Kota Salatiga berada diatas Provinsi Jawa Tengah sebesar 13,05 tahun dan Nasional sebesar 13,3 tahun.

Dibandingkan dengan kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah, Kota Salatiga berada di posisi kedua tertinggi 15,47 setelah Kota Semarang sebesar 15,58 tahun, secara rinci dapat dilihat pada Grafik berikut.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Grafik 2. 35. Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kota Salatiga diantara kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025



Sumber : BPS Jawa Tengah, Tahun 2025

3) Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-Rata Lama Sekolah atau disingkat RLS didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. RLS dihitung untuk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Penghitungan RLS pada usia 25 tahun ke atas juga mengikuti standard internasional yang digunakan oleh UNDP.

Perkembangan RLS Kota Salatiga Tahun 2025 sebesar 11,49 tahun, mengalami peningkatan 0,01 dibanding tahun 2024 sebesar 11,48 tahun. Peningkatan RLS juga terjadi di Provinsi Jawa Tengah dan secara Nasional, namun angka capaian Kota Salatiga berada di atas capaian Provinsi Jawa Tengah Sebesar 8,15 tahun dan Nasional sebesar 9.07 tahun. Secara rinci dapat dilihat pada Grafik berikut.

Grafik 2. 36. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah Dan Nasional Tahun 2021-2025

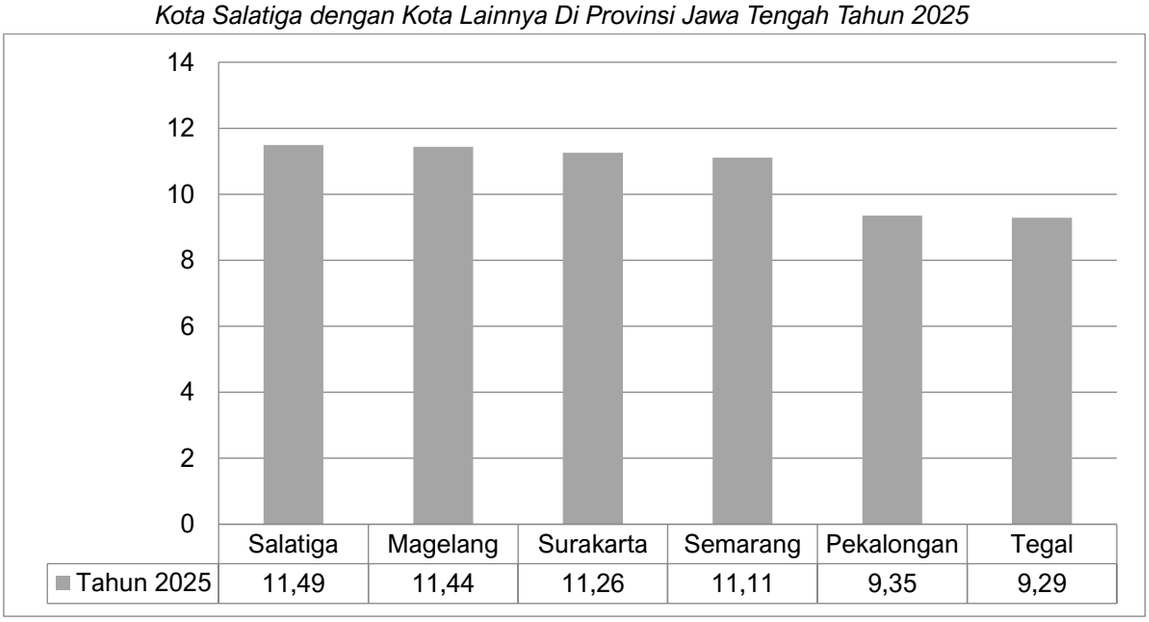


Sumber : BPS Jawa Tengah, Tahun 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Perbandingan RLS Kota Salatiga dengan kota lainnya di Jawa Tengah tahun 2025 masih sama seperti tahun 2024 yaitu berada pada peringkat pertama diikuti Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Semarang, Kota Pekalongan dan terakhir Kota Tegal, sebagaimana terlihat pada grafik berikut.

Grafik 2. 37. Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)
Kota Salatiga dengan Kota Lainnya Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025



Sumber : BPS Jawa Tengah, Tahun 2025

b. Indeks Literasi Masyarakat

Indeks Literasi Masyarakat dapat diukur dari kemampuan antara lain: membaca, menulis, memahami bacaan, eksplorasi pengetahuan, transformasi menjadi pengetahuan dan transformasi menjadi produk/jasa. Pada Tahun 2025, target Indeks Literasi Masyarakat (ILM) ditetapkan sebesar 52,76 dan terealisasi sebesar 63,14. Dengan capaian tersebut, tingkat keberhasilan mencapai 119,67%, sehingga ILM Kota Salatiga masuk dalam kategori sedang. Nilai tersebut diperoleh berdasarkan hasil survei terhadap masyarakat Kota Salatiga, dengan pengukuran indeks yang mencakup beberapa dimensi, yaitu kemampuan membaca, berbicara, menulis, memahami bacaan, melakukan eksplorasi pengetahuan, mentransformasikan informasi menjadi pengetahuan, serta mengembangkan pengetahuan menjadi produk atau jasa. Capaian ini menunjukkan bahwa tingkat literasi masyarakat mengalami perkembangan yang positif dan telah melampaui target yang ditetapkan.

Nilai indeks ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan budaya literasi di Kota Salatiga telah berjalan, meskipun masih diperlukan berbagai langkah strategis untuk terus memperkuat minat baca, akses terhadap sumber pengetahuan, serta pemanfaatan literasi dalam kehidupan sehari-hari.

Pada Tahun 2025, target Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) ditetapkan sebesar 6,95, berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, capaian IPLM Kota Salatiga Tahun 2025 sebesar 22,99, sehingga tingkat keberhasilan mencapai 330,79%. Pada tahun 2025, pengukuran IPLM menggunakan instrumen dan metodologi terbaru sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Nomor 7 Tahun 2025. Perubahan ini berdampak terjadinya ketidaksesuaian antara capaian dengan target yang telah ditetapkan ditahun sebelumnya. Dalam metodologi terbaru, pengukuran IPLM lebih menitikberatkan pada dimensi kinerja sebesar 70 persen dan dimensi kepatuhan/fisik sebesar 30 persen. Dengan pendekatan ini, hasil pengukuran tidak dapat secara langsung diinterpretasikan sebagai kenaikan atau penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, melainkan sebagai nilai baru yang mencerminkan perspektif pengukuran yang lebih substantif terhadap kinerja perpustakaan. Berdasarkan hasil pengukuran Tahun 2025, capaian Kota Salatiga pada masing-masing dimensi adalah sebagai berikut: Dimensi Kepatuhan sebesar 0,220 dan Dimensi Kinerja sebesar 0,243. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kontribusi terbesar terhadap nilai IPLM.

Pada Tahun 2025, target Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (NTGM) ditetapkan sebesar 85,83 dan terealisasi sebesar 54,04. Dengan capaian tersebut, tingkat keberhasilan mencapai 62,96%, sehingga NTGM Kota Salatiga masuk dalam kategori rendah. Pengukuran Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) pada Tahun 2025 menggunakan instrumen dan metodologi terbaru sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 9 Tahun 2025. Perubahan metodologi ini berdampak pada ketidaksesuaian antara capaian aktual dengan target yang telah ditetapkan pada tahun sebelumnya, karena terdapat penyesuaian indikator serta pembobotan penilaian. Dalam metode terbaru, pengukuran TKM difokuskan pada tiga dimensi utama, yaitu dimensi pra membaca sebesar 15 persen, dimensi saat membaca sebesar 50 persen, dan dimensi pasca membaca sebesar 35 persen. Berdasarkan hasil pengukuran Tahun 2025, capaian Kota Salatiga pada masing-masing dimensi adalah sebagai berikut: Dimensi Pra Membaca sebesar 49,19; Dimensi Saat Membaca sebesar 52,29; dan Dimensi Pasca Membaca sebesar 58,49.

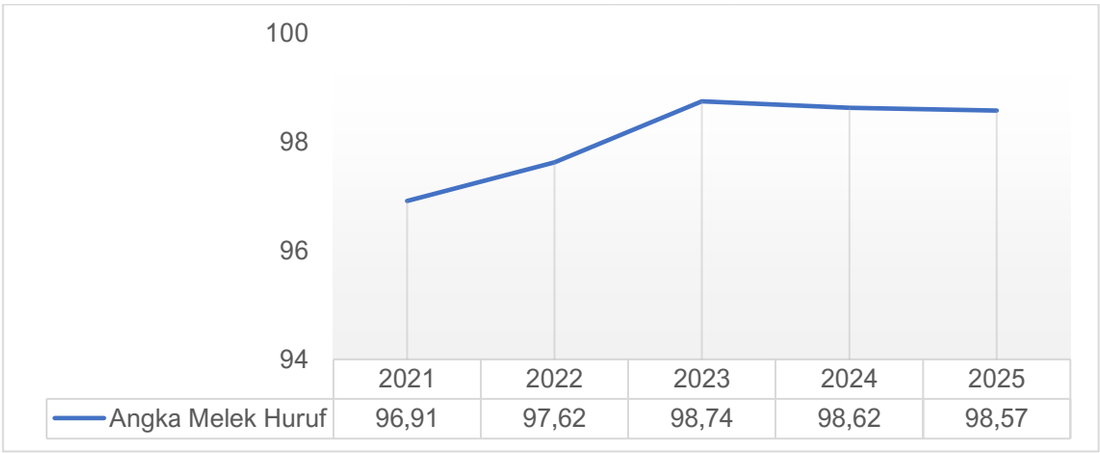
Pada Tahun 2025, target Indeks Literasi Masyarakat (ILM) ditetapkan sebesar 52,76 dan terealisasi sebesar 63,14. Dengan capaian tersebut, tingkat keberhasilan mencapai 119,67%, sehingga ILM Kota Salatiga masuk dalam kategori sedang. Nilai tersebut diperoleh berdasarkan hasil survei terhadap masyarakat Kota Salatiga, dengan pengukuran indeks yang mencakup beberapa dimensi, yaitu kemampuan membaca, berbicara, menulis, memahami bacaan, melakukan eksplorasi pengetahuan, mentransformasikan informasi menjadi pengetahuan, serta mengembangkan pengetahuan menjadi produk atau jasa. Capaian ini menunjukkan bahwa tingkat literasi masyarakat mengalami perkembangan yang positif dan telah melampaui target yang ditetapkan.

c. Angka Melek huruf

Angka melek huruf merupakan salah satu indikator yang dihasilkan dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS). Angka melek huruf yang tinggi menunjukkan bahwa sistem pendidikan dasar dan program keaksaraan yang ada efektif.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Grafik 2. 38. Angka Melek Huruf (usia 15-59) Tahun 2021-2025



Sumber : BPS, Tahun 2026

Perkembangan AMH Kota Salatiga tahun 2021 – 2025 menunjukkan peningkatan yang cukup baik yang juga menunjukkan tren kenaikan seiring dengan membaiknya akses pendidikan, walaupun sempat menurun pada tahun 2021. Nilainya terus meningkat setiap tahun berkisar 0,02-1. Kondisi ini menunjukkan bahwa 98 orang dari 100 orang dewasa di Kota Salatiga mampu untuk membaca dan menulis.

d. Penerapan Ekonomi Hijau

Ekonomi hijau (green economy) adalah sebuah model ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial, sekaligus secara signifikan mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologis. Sederhananya, ini adalah sistem ekonomi yang tidak hanya mengejar pertumbuhan produk domestik bruto (PDB), tetapi juga memastikan bumi tetap lestari. Ciri utamanya adalah : rendah karbon, hemat sumber daya, dan inklusif secara sosial (melibatkan dan mensejahterakan semua lapisan masyarakat).

Di Indonesia, termasuk yang diterapkan di Kota salatiga, transisi menuju ekonomi hijau menjadi fokus utama dalam perencanaan pembangunan jangka panjang untuk memastikan bahwa kemajuan ekonomi tidak dibayar mahal oleh kerusakan alam.

Indikator Ekonomi Hijau

Untuk mengukur apakah suatu daerah sudah berhasil menerapkan ekonomi hijau, para ahli dan lembaga dunia (seperti UNEP atau Bappenas di Indonesia) menggunakan beberapa indikator utama. Indikator ini biasanya dibagi ke dalam tiga pilar besar:

1. Pilar Lingkungan (Kesehatan Ekosistem)

   Indikator pada Pilar ini mengukur beban yang ditanggung alam akibat aktivitas ekonomi. Indikator yang termasuk dalam pilar lingkungan adalah :

   a. Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK): Mengukur seberapa besar emisi karbon yang dihasilkan untuk setiap unit pertumbuhan ekonomi. Targetnya adalah emisi menurun saat ekonomi tumbuh (decoupling).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

b. Bauran Energi Terbarukan: Persentase penggunaan energi bersih (seperti surya, angin, hidro, atau geotermal) dibandingkan dengan bahan bakar fosil.
c. Efisiensi Sumber Daya: Jumlah air, bahan baku, dan lahan yang digunakan dalam proses produksi.
d. Tingkat Pengelolaan Sampah dan Limbah : Seberapa banyak sampah yang berhasil didaur ulang atau dikelola dengan baik (konsep circular economy) dibandingkan yang menumpuk di TPA

2. Pilar Ekonomi (Efisiensi dan Investasi Hijau)

Indikator ini melihat bagaimana sektor ekonomi beradaptasi menjadi lebih ramah lingkungan. Indikator yang termasuk dalam pilar Ekonomi adalah :

a. Produk Domestik Bruto (PDB) Hijau : Pertumbuhan ekonomi yang sudah dikurangi dengan biaya kerusakan lingkungan dan penyusutan sumber daya alam.
b. Investasi Hijau : Jumlah dana (baik dari APBN/APBD maupun swasta) yang dialokasikan untuk proyek ramah lingkungan, seperti transportasi publik listrik atau restorasi hutan.
c. Sektor Hijau : Pertumbuhan kontribusi industri yang bersertifikat ramah lingkungan terhadap perekonomian secara keseluruhan

3. Pilar Sosial (Inklusivitas dan Kesejahteraan)

Indikator ini melihat Ekonomi hijau tidak akan sukses jika masyarakatnya tetap miskin atau kehilangan mata pencaharian. Indikator yang termasuk dalam pilar Sosial adalah

a. Pekerjaan Hijau (Green Jobs): Jumlah lapangan kerja yang berkontribusi langsung pada pelestarian lingkungan (misalnya teknisi panel surya, ahli pengelolaan limbah, atau petani organik).
b. Akses Energi Bersih dan Air Bersih: Persentase masyarakat, terutama di kelas bawah, yang memiliki akses konisten terhadap air bersih dan listrik yang terjangkau.
c. Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Ketimpangan: Memastikan bahwa transisi ekonomi ini adil dan tidak membebani masyarakat rentan.

Pada Intinya, Ekonomi hijau menggeser paradigma lama yang berprinsip rusak dulu, perbaiki nanti menjadi tumbuh bersama alam sejak awal. Kota Salatiga telah menerapkan prinsip ekonomi hijau , hal ini dibuktikan dengan telah diterapkan beberapa indikator ekonomi hijau di Kota Salatiga yaitu intensitas Emisi GRK, tingkat pengelolaan sampah dan limbah, baik limbah cair industri maupun limbah cair komunal rumah tangga, PDB, akses air bersih, dan Penurunan tingkat kemiskinan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2.3.3. Daya Saing Fasilitas/ Infrastruktur Wilayah

a. Persentase Kawasan Wajah Kota yang Tertata Dengan Baik

Indikator Persentase Kawasan Wajah Kota Yang Tertata dengan baik merupakan indikator kinerja positif yang artinya semakin besar realisasi semakin baik capaian kinerjanya. Target kawasan wajah kota yang menjadi target sasaran antara lain

1) Jl. Diponegoro-Fatmawati, (100%)
2) Jl. Jenderal Sudirman
3) Jl. W. Mongonsidi, (100%)
4) Jl. Soekarno Hatta, (100%)
5) Tamansari,
6) Lap Pancasila dan sekitarnya, (100%)
7) Jl. Sukowati-Jl,Tentara Pelajar (100%, ruas Sukowati)
8) Jl. Brigjen Sudiarto, (100%)
9) Jl. Hasanudin, (100%)
10) Jl. A. Yani, (50%)
11) Jl. Pattimura, (100%)
12) Tingkir – Barukan,
13) Jl. Kartini, (100%)
14) Jl. Osamaliki, (100%)
15) Jl. Veteran,
16) Jl. Pemuda,
17) Jl. Muh Yamin,

Dari 17 target diatas yang terealisasi pada tahun 2025 sebanyak 10 ruas dan 0.5 ruas jalan (yaitu jalan A.Yani) sehingga realisasi presentase kawasan wajah kota yang tertat dengan baik pada tahun 2025 adalah 61,8%.

b. Wilayah dengan infrastruktur kondisi baik

Indikator kinerja Wilayah dengan infrastruktur kondisi baik dapat di hitung dengan rata rata dari (jalan, drainase kondisi baik dan rasio luas irigasi yang terlayani jaringan irigasi) secara lebih detail akan di bahas di bawah ini.

Tabel 2. 17. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

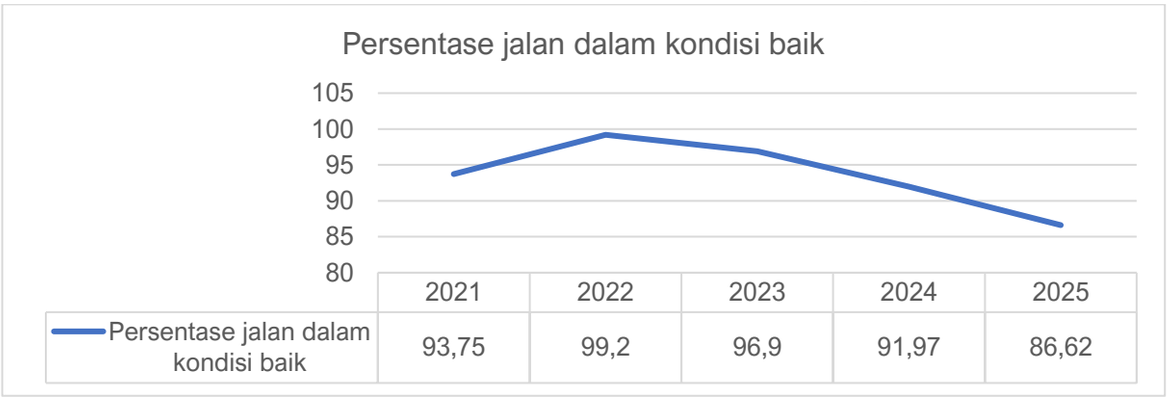
No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD2025 2029	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2025	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2025(%)	Kategori Status	Status
1)	Wilayah dengan infrastruktur kondisi baik	%	70,29	83	94,32	94,32	134,19	Sangat Tinggi	Tercapai

Sumber Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tahun 2025

Tahun 2025 persentase jalan dalam kondisi baik sebesar 86,62% dari total jalan berdasarkan SK Jalan tahun 2017 sepanjang 337,471 km yang berada dalam kondisi mantap sepanjang 292,324 km dan 45,147 Km dengan kondisi tidak mantap

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Grafik 2. 39. Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik di Kota Salatiga Tahun 2021-2025

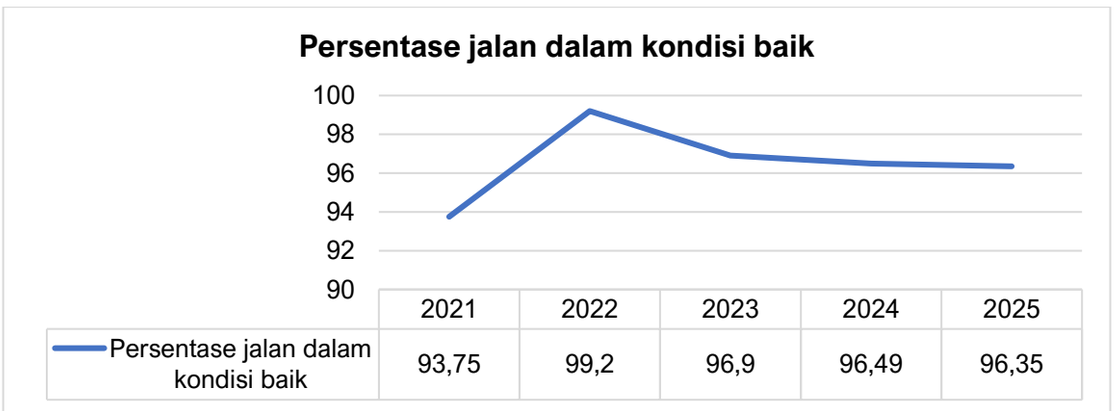


	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase jalan dalam kondisi baik	93,75	99,2	96,9	91,97	86,62

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tahun 2025

Jaringan drainase dalam kondisi baik di Kota Salatiga mengalami perkembangan dengan tren meningkat dalam kurun waktu 2021-2025 walaupun pada tahun 2025 jaringan drainase dalam kondisi baik mengalami sedikit penurunan dibanding tahun 2024. Sampai dengan tahun 2025 panjang saluran drainase terbangun adalah 378,48 KM. Pada tahun 2025 ini panjang drainase kondisi baik adalah 96.35% atau sepanjang 364,65 KM. Kondisi lainya adalah 12,7 KM kondisi rusak ringan 1,13 KM kondisi rusak berat.

Grafik 2. 40. Persentase Jaringan Drainase Dalam Kondisi Baik di Kota Salatiga Tahun 2021-2025



	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase jalan dalam kondisi baik	93,75	99,2	96,9	96,49	96,35

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tahun 2025

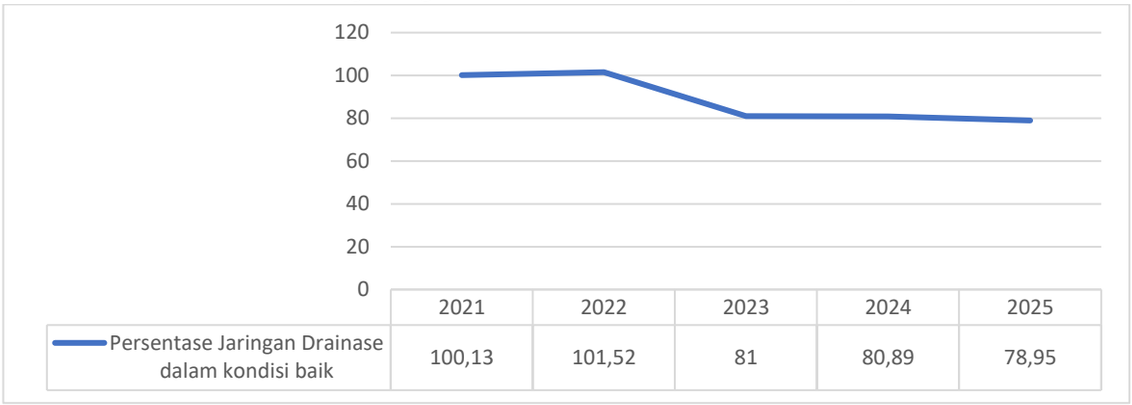
Sampai dengan tahun 2025 panjang jaringan irigasi kondisi baik adalah 11.875 m dan kondisi sedang adalah 12.013 m, sedangkan panjang jaringan irigasi keseluruhan adalah 23.888 m. Tahun 2025 jaringan irigasi dengan kondisi baik sebesar 78,95%. Dibandingkan capaian tahun 2024 yang terealisasi sebesar 80,89%, capaian tahun 2025 adalah mengalami penurunan sebesar 1,94%.

Untuk mengukur kinerja sistem irigasi secara komprehensif untuk mendukung ketahanan pangan menggunakan Indeks Kinerja Sistem Irigasi. Indeks ini tidak hanya mengukur sarana prasarana fisik jaringan, tetapi juga termasuk produktivitas tanam, sarana penunjang jaringan utama dan kelembagaannya berdasarkan pada Peraturan Menteri PUPR No.12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi mengamanatkan bahwa evaluasi kinerja sistem irigasi di Kota Salatiga sebesar 12 DI.

Dari 12 daerah irigasi di Kota Salatiga yang ada semuanya terlayani meskipun dengan kondisi jaringan irigasi yang tidak semuanya baik.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Grafik 2. 41. Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik di Kota Salatiga Tahun 2021-2025



	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase Jaringan Drainase dalam kondisi baik	100,13	101,52	81	80,89	78,95

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tahun 2025

c. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Nilai IKLH merupakan penggabungan analisis dari 3 indikator yang meliputi Indeks Pencemaran Air, Indeks Pencemaran Udara, Indeks Tutupan Lahan. Sedangkan Persentase kendaraan angkutan umum yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan merupakan bagian yang mendukung capaian indikator Indeks Pencemaran Udara.

Berikut rumus perhitungan IKU Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021:

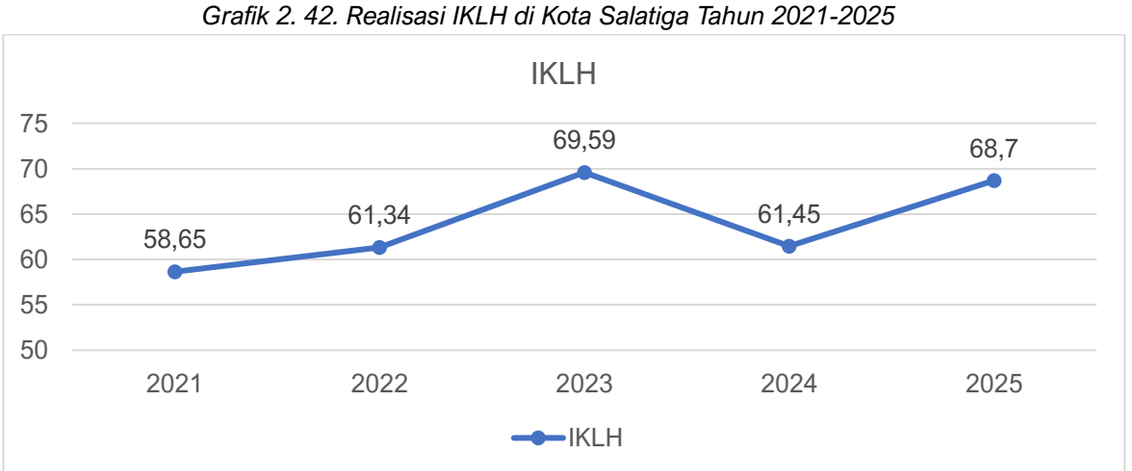
IKLH	=	*(0,376 x Realisasi Indeks Pencemaran Air) + (0,405 x Realisasi Indeks Pencemaran Udara) + (0,219 x Realisasi Indeks Tutupan Lahan)*

Berdasarkan rumus di atas maka realisasi kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

Realisasi IKLH	=	*(0,376 x 73,76) + (0,405 x 75,97) + (0,219 x 46,58)*	*= 68,70*

Indikator kinerja indeks Kualitas Lingkungan Hidup merupakan indikator kinerja positif, yang artinya semakin tinggi realisasi akan semakin baik capaian kinerjanya.

Grafik 2. 42. Realisasi IKLH di Kota Salatiga Tahun 2021-2025



Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

d. Rasio Konektivitas Kota

Indikator Rasio Konektivitas Kota merupakan indikator kinerja positif, yang artinya semakin besar realisasi semakin baik capaian kinerjanya. Rasio Konektivitas Kota Tahun 2025 sebesar 0,88 dan terealisasi sebesar 0,88 sehingga capaian kinerja indikator Rasio Konektivitas Kota adalah 100% dengan kategori sangat tinggi. Perhitungan di dapatkan dari 15 jumlah trayek di bagi dengan 17 kebutuhan trayek di Kota Salatiga. Target Nasional atas kinerja Konektivitas dan Aksesbilitas Nasional adalah tidak ada sehingga tidak bisa ditampilkan perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional, namun pada penentuan target dibatasi bahwa tingkat capaian maksimal adalah 1, dengan realisasi sebesar 0,88 atas target 0,88, capaian ini sangat baik dikarenakan jumlah trayek lebih banyak dengan jumlah trayek yang dibutuhkan.

e. Kinerja Lalu Lintas Kota

Indikator Kinerja Lalu Lintas Kota merupakan indikator kinerja negatif, yang artinya semakin kecil realisasi semakin baik capaian kinerjanya. Kinerja Lalu Lintas Kota Tahun 2025 sebesar 0,31 dan terealisasi sebesar 0,23 sehingga capaian kinerja indikator Kinerja Lalu Lintas Kota adalah 125,81% dengan kategori sangat tinggi. Perhitungan indikator diperoleh dari rata rata VCR (Volume, Capacity, Ratio) 40 jalan yang telah disurvey di Kota Salatiga.

Standar nasional untuk kinerja lalu lintas tidak ada sehingga tidak bisa ditampilkan perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional, Namun pada penetuan target dibatasi bahwa tingkat capaian maksimal adalah 1, dengan realiasi sebesar 0,31 atas target sebesar 0,4 capaian ini terkategori sangat baik dikarenakan berada pada nilai yang lebih kecil dari target.

f. Persentase Rumah yang di dukung oleh PSU

Indikator Kinerja Prosentase Rumah yang di dukung oleh PSU merupakan indikator kinerja positif, yang artinya semakin besar realisasi semakin baik capaian kinerjanya. Adapun analisa terhadap capaian indikator Kinerja Utama Prosentase Rumah yang di dukung oleh PSU 2025 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dijelaskan sebagai berikut dihitung dengan rumus:

$$\textbf{\textit{Prosentase Rumah yang di dukung oleh PSU}} = \frac{\textit{Jumlah rumah yang sudah dan sedang dibangun terfasilitasi PSU}}{\textit{Jumlah Rumah yang terfasilitasi PSU di Perumahan}} \textit{ X 100\%}$$

Berdasarkan rumus di atas, prosentase rumah yang di dukung oleh PSU tahun 2025 sebagai berikut:

$$\textbf{\textit{Prosentase Rumah yang di dukung oleh PSU}} = \frac{\textit{6.502}}{\textbf{\textit{8.719}}} \textit{ X 100\%} \quad \textit{= 74,57\%}$$

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

g. Pemukiman yang Tertata

Indikator Kinerja Permukiman yang Tertata merupakan indikator kinerja positif, yang artinya semakin besar realisasi semakin baik capaian kinerjanya. Adapun analisa terhadap capaian indikator Kinerja Utama Kinerja Permukiman yang Tertata Tahun 2025 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dijelaskan sebagai berikut dihitung dengan rumus:

$$\textbf{Permukiman yang Tertata} = \frac{\text{Luasan Permukiman yang sudah di tata}}{\text{Luas Permukiman se Kota Salatiga}} \text{ X } 100\%$$

Berdasarkan rumus di atas, realisasi kinerja Permukiman yang Tertata tahun 2024 sebagai berikut:

$$\textbf{Permukiman yang Tertata} = \frac{181{,}17}{2636{,}45} \text{ X } 100\% = 6{,}87\%$$

h. Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU

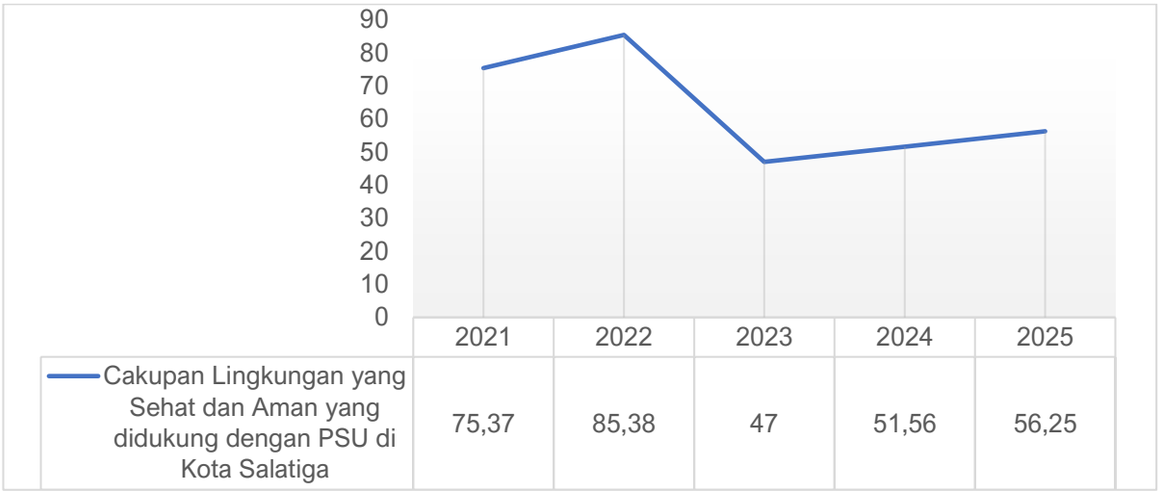
Indikator Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU dapat dihitung dengan jumlah PSU Perumahan yang sudah diserahterimakan di bagi jumlah perumahan di Kota Salatiga, indikator ini merupakan indikator positif yang artinya semakin besar realisasi semakin baik capaian kinerjanya.

Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU pada tahun 2025 ditargetkan 55% mencapai realisasi 56,25%. Persentase ini dicapai dari jumlah perumahan yang sudah dibangun terfasilitasi PSU sebanyak 36 perumahan dibagi jumlah perumahan yang sudah diserahkan sebanyak 64 perumahan dikalikan 100%. Apabila dibandingkan dengan realisasi di tahun 2024 yaitu sebesar 51,56 %, realisasi kinerja mengalami peningkatan karena berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 pelaksanaan Program Pengembangan Perumahan didukung oleh 4 (empat) kegiatan, yaitu:

1) Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
2) Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
3) Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
4) Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
5) Program-program tersebut ditujukan untuk meningkatkan kualitas PSU serta memelihara PSU dalam keadaan baik, sehingga jumlah perumahan yang menyerahkan PSU kepada Pemerintah Kota Salatiga mengalami peningkatan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Grafik 2. 43. Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman di Kota Salatiga Tahun 2021-2025



Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Tahun 2025

2.3.4. Daya Saing Iklim Investasi

a. Pertumbuhan Nilai Investasi

Investasi adalah istilah yang dijadikan mantra untuk segala yang berbau ekonomi. Lewat investasi, pemerintah berusaha mencapai target pertumbuhan ekonomi. Caranya adalah dengan mengalokasikan anggaran untuk membangun infrastruktur, meningkatkan kualitas pendidikan, memperluas fasilitas kesehatan, dan lain sebagainya. Untuk menghitung pertumbuhan nilai investasi digunakan rumus sebagai berikut:

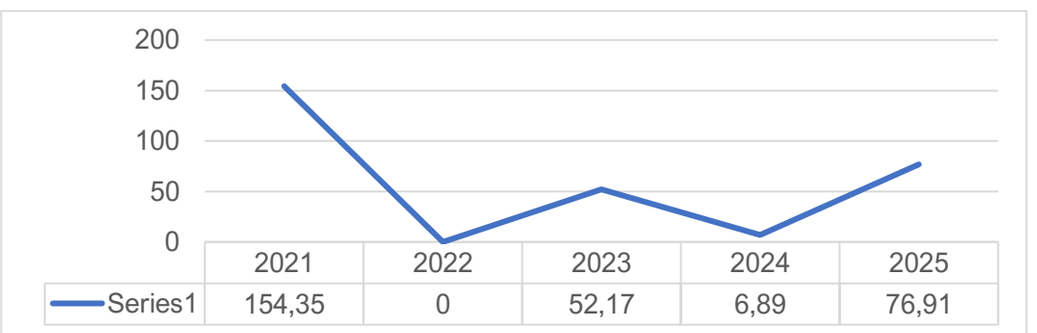
$$\textbf{Pertumbuhan Nilai Investasi} = \frac{\text{Realisasi investasi tahun n – Realisasi investasi tahun (n-1)}}{\text{Realisasi Investasi tahun (n-1)}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus di atas, realisasi pertumbuhan nilai investasi tahun 2024 sebagai berikut:

$$76{,}91 = \frac{1.123.128.465.959 - 634.853.695.566}{634.853.695.566} \times 100\%$$

Indikator kinerja indeks Pertumbuhan Nilai Investasi merupakan indikator kinerja positif, yang artinya semakin tinggi realisasi akan semakin baik capaian kinerjanya.

Grafik 2. 44. Realisasi Pertumbuhan Investasi di Kota Salatiga Tahun 2021-2025



Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tahun 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sebagai indikator kinerja yang bersifat positif, pertumbuhan nilai investasi menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai pertumbuhan investasi maka semakin baik capaian kinerja pembangunan di bidang perekonomian. Capaian pertumbuhan sebesar 76,91 persen ini mengindikasikan bahwa upaya pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan investasi telah memberikan hasil yang baik. Selain itu, peningkatan investasi juga berpotensi memberikan dampak ekonomi yang luas, seperti mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan kesempatan kerja, memperluas kegiatan usaha, serta memperkuat aktivitas ekonomi di berbagai sektor. Dengan demikian, pertumbuhan investasi yang tinggi menjadi salah satu indikator penting yang menunjukkan meningkatnya kepercayaan investor terhadap potensi dan stabilitas perekonomian daerah.

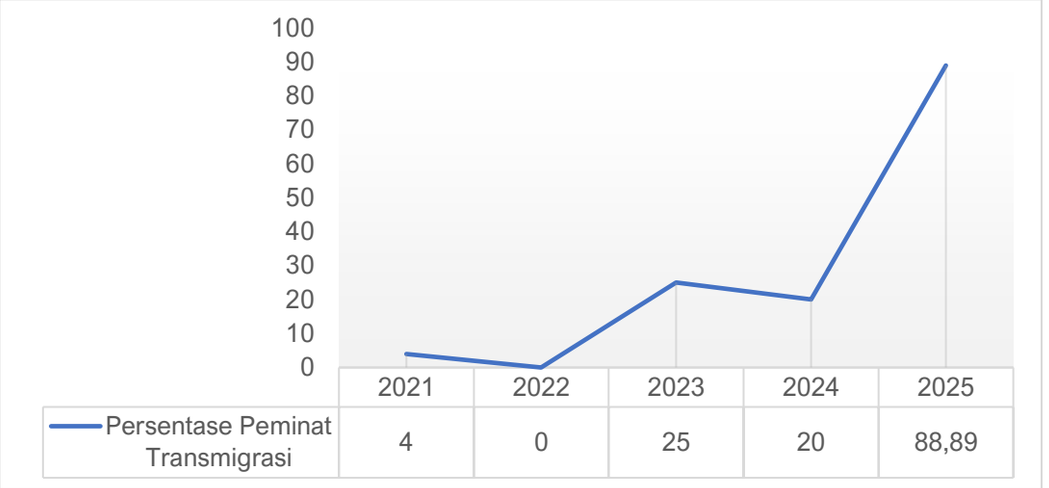
Tingginya pertumbuhan investasi di Kota Salatiga turut memberikan dampak yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di wilayah tersebut. Masuknya investasi baru, baik dari sektor industri, perdagangan, maupun jasa, mendorong terbukanya lapangan kerja yang lebih luas bagi masyarakat Salatiga dan sekitarnya. Hal ini sejalan dengan meningkatnya jumlah unit usaha dan kegiatan ekonomi yang beroperasi di kota ini, sehingga permintaan terhadap tenaga kerja pun turut meningkat. Kondisi tersebut pada akhirnya berkontribusi pada penurunan tingkat pengangguran serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum. Oleh karena itu, menjaga dan terus mendorong iklim investasi yang kondusif di Kota Salatiga menjadi langkah strategis yang tidak hanya penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga bagi peningkatan kualitas dan kuantitas kesempatan kerja bagi seluruh lapisan masyarakat. Meskipun demikian, realisasi kinerja indikator pertumbuhan nilai investasi dalam beberapa tahun terakhir masih menunjukkan fluktuasi yang perlu terus dipantau dan dioptimalkan guna memastikan dampak positifnya terhadap penyerapan tenaga kerja dapat dirasakan secara berkelanjutan.

b. Persentase Peminat Transmigrasi

Persentase Peminat Transmigrasi adalah dihitung dengan cara membagi jumlah calon transmigran yang berminat dibagi dengan peserta penyuluhan calon transmigran di kalikan 100%. Indikator kinerja Persentase Peminat Transmigrasi merupakan indikator kinerja positif, yang artinya semakin tinggi realisasi akan semakin baik capaian kinerjanya. Pada Tahun 2025 peminat transmigrasi sejumlah 8 orang dengan jumlah peserta penyuluhan sejumlah 9 orang. Dengan demikian prosentase peminat transmigrasi sebesar 88,89%.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Grafik 2. 45. Persentase Peminat Transmigrasi di Kota Salatiga Tahun 2021-2025



Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Tahun 2025

c. Indeks Ketahanan Daerah (IKD) terhadap Bencana

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Terbitnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menetapkan bahwa penanggulangan bencana menjadi urusan wajib daerah. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di daerah. Upaya mengurangi indeks risiko bencana akan mampu dilaksanakan di daerah dengan implementasikan fase perencanaan, pelaksaan, dan monitoring serta evaluasinya.

Indikator Indeks Ketahanan Daerah (IKD) terhadap Bencana merupakan indikator kinerja positif, yang artinya semakin besar realisasi semakin baik capaian kinerjanya. Target Indeks Ketahanan Daerah (IKD) terhadap Bencana Tahun 2024 sebesar 3,86 dan terealisasi sebesar 3,91.

Sedangkan berdasarkan data BNPB tahun 2025, Kota Salatiga mencatatkan Indeks Risiko Bencana (IRB) sebesar 98,79 (kategori sedang) dan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) sebesar 0,52. Apabila dibandingkan tahun 2024 mengalamai peningkatan, artinya kenaikan IKD ini mencerminkan penguatan aspek tata kelola, kesiapsiagaan, dan mitigasi struktural yang cukup positif. Upaya pelokalan kesiapsiagaan, termasuk pelibatan komunitas dan penguatan regulasi lokal, mulai menunjukkan hasil.

Capaian Indeks Risiko Bencana (IRB) Kota Salatiga Tahun 2025 sesuai Surat BNPB Nomor B-42/BNPB/D-I/SS.01.03/1/2026 perihal Penyampaian IKD dan IRB 2025 di Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar 98,79 dan kategori “Sedang”. Capaian deks risiko bencana Kota Salatiga dikategorikan sedang akibat akumulasi tiga variabel utama: bahaya (hazard), kerentanan (vulnerability), dan kapasitas (capacity). Faktor-faktor spesifik yang membentuk indeks risiko tersebut meliputi:

(1) Faktor Geografis dan Topografis: Lokasi Salatiga berada di ketinggian 425–825 mdpl dan dikelilingi oleh gunung berapi, yang menempatkannya pada jalur ancaman bencana geologi (letusan gunung api dan gempa bumi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

(2) Faktor Hidrometeorologis: Wilayah ini rawan terhadap bencana musim penghujan dan kemarau, seperti tanah longsor, cuaca ekstrem, angin puting beliung, dan kekeringan.
(3) Kerentanan Sosial dan Fisik: Kepadatan penduduk di pusat kota dan permukiman padat memicu tingginya risiko kerentanan ekonomi, sosial, serta kerentanan fisik terhadap bahaya seperti kebakaran.
(4) Kapasitas Penanggulangan: Indeks berada di tingkat sedang berkat adanya keseimbangan antara ancaman bencana dan tingkat kesiapsiagaan, mitigasi, serta kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat setempat

Sebagai gambaran capaian IRB dan IKD Kota Salatiga tahun 2022 - 2025 adalah sebagai berikut

Tabel 2. 18. Indeks Risiko Bencana dan Indeks Ketahanan Daerah Kota Salatiga Tahun 2022 – 2025

No	Tahun	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)
1.	2022	90,89	0,33
2.	2023	83,98	0,43
3.	2024	76,52	0,5
4.	2025	98,79	0,52

2.4. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Indikator variabel aspek pelayanan umum terdiri dari fokus layanan urusan wajib pelayanan dasar dan fokus layanan urusan pemerintah pilihan.

Integrasi target pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), pengarusutamaan pencapaian TPB/SDGs, pengarusutamaan gender serta mewujudkan perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) dalam bentuk rumusan program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator yang terukur yang dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah sesuai urusannya.

a. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah ukuran untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur terhadap penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Untuk mendapatkan IKM, dilakukan kegiatan pengukuran secara komprehensif yang disebut Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

Indeks Kepuasan masyarakat pada Tahun 2025 terealisasi sebesar 87,61 dan capaian kinerjanya sebesar 103,07% dari target RPD Tahun 2025 sebesar 85 maka status tercapai.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

b. Indeks Sistem Pemerimtahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Penerapan SPBE sebagai key driver transformasi digital bertujuan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik menuju puncak tertinggi kepuasan masyarakat pengguna SPBE sehingga ketika masyarakat mengingat SPBE yang terlintas adalah pemerintah yang akuntabel dan layanan yang berkualitas. Presiden telah menetapkan Arsitektur SPBE Nasional melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 132/2022. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memiliki komitmen yang kuat untuk mengakselerasi implementasi integrasi penerapan SPBE yang bermuara pada cita-cita utama, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pada Tahun 2025 Indeks SPBE terealisasi sebesar 4,11 dengan predikat sangat baik berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/76/M.PD.06/2025 tanggal 31 Desember 2025 tentang Penyampaian Hasil Pemantauan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2025 dan capaian kinerjanya sebesar 158,07% dari target RPD Tahun 2025 sebesar 2,60 maka status tercapai.

c. Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi adalah indikator yang menunjukkan sejauh mana perbaikan tata kelola pemerintahan telah dilakukan oleh instansi pemerintah. Indeks ini menggambarkan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan serta menggambarkan sejauh mana perbaikan tata kelola pemerintahan telah dilaksanakan oleh instansi pemerintah, yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Berdasarkan Indeks Reformasi Birokrasi yang diperoleh dari Portal Reformasi Birokrasi Nasional (https://www.portalrb.id/login), yang diakses pada tanggal 12 Februari 2026, diperoleh nilai sementara sebesar 81 dengan predikat Memuaskan (A-), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 19. Indeks Reformasi Birokrasi Kota Salatiga Tahun 2025

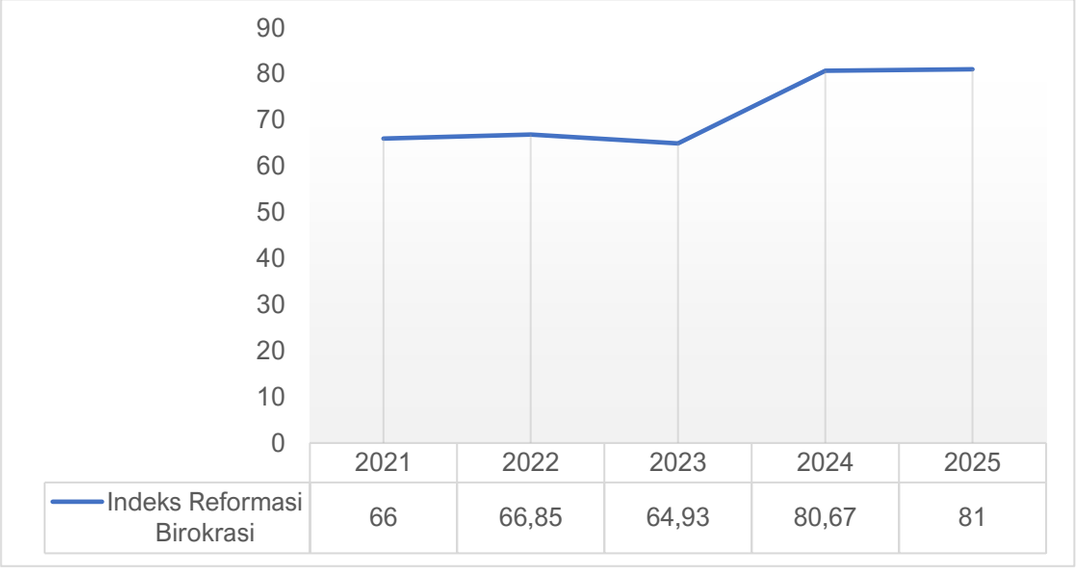
No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai
A	RB General	100	72,42
B	RB Tematik	20	8,58
C	Indeks RB	120	81

Sumber: Portal Reformasi Birokrasi Nasional per tanggal 12 Februari 2026

Di bawah ini merupakan realisasi kinerja nilai indeks reformasi birokrasi yang cenderung fluktuatif dalam lima tahun terakhir dengan capaian tertinggi ada pada tahun 2025.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Grafik 2. 46. Indeks Reformasi Birokrasi di Kota Salatiga Tahun 2021-2025



Sumber : Sekretariat Daerah, Tahun 2025

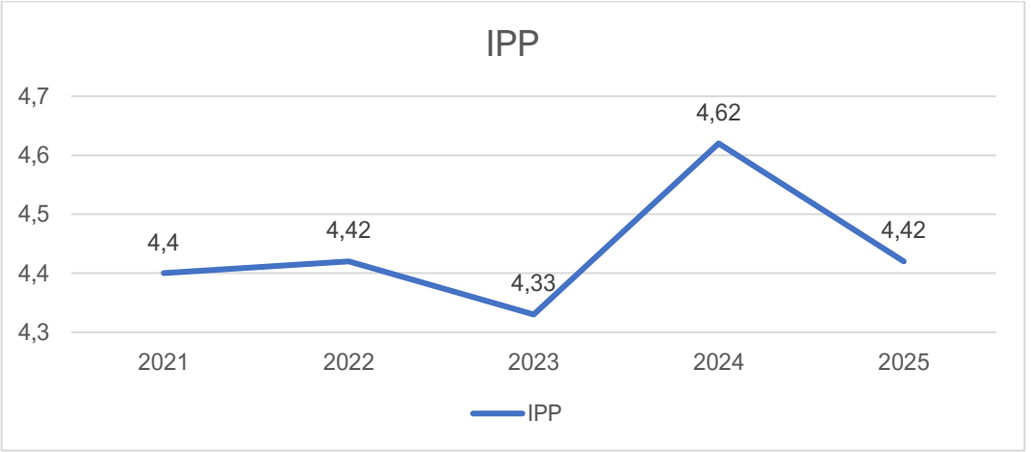
d. Indeks Pelayanan Publik

Berdasarkan PermenPAN RB No. 17 Tahun 2017, Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk menilai kinerja pelayanan publik di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia. Penilaian ini didasarkan pada beberapa aspek, yaitu Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan, serta Inovasi. Penyusunan indikator IPP dilakukan dengan mengaitkan enam prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik (keadilan, partisipasi, akuntabilitas, transparansi, berdaya guna, dan aksesibilitas) dengan enam aspek penilaian kinerja instansi dalam pelayanan publik (kebijakan pelayanan, sarana prasarana, konsultasi dan pengaduan, profesionalisme SDM, sistem informasi pelayanan publik, dan inovasi pelayanan).

Pencapaian Indeks Pelayanan Publik Kota Salatiga menunjukkan fluktuasi namun berakhir dengan peningkatan yang kuat selama periode 2021 hingga 2025. Indeks ini awalnya menunjukkan tren kenaikan dari 4,40 pada tahun 2021 menjadi 4,42 ditahun 2022. Pada tahun 2023, nilai indeks Pelayanan Publik Kota Salatiga mengalami sedikit penurunan menjadi 4,33. Peningkatan drastis ditahun 2024 menjadi 4,62 menunjukkan adanya upaya serius dan keberhasilan dalam reformasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Salatiga, yang dapat didukung oleh adopsi teknologi, peningkatan kompetensi ASN, penyederhanaan prosedur, atau peningkatan responsivitas terhadap keluhan masyarakat. Kondisi tersebut mencerminkan komitmen kuat Pemerintah Kota Salatiga untuk memberikan pelayanan terbaik kepada warganya. Akan tetapi pada tahun 2025, nilai IPP mengalami penurunan 4,42, sehingga diperlukan upaya lebih keras dalam mencapai target di tahun 2026 sebesar 4.68 dan tahun 2027 sebesar 4, 70 (KepmenPAN RB Nomor 3 Tahun 2026).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Grafik 2. 47. Indeks Pelayanan Publik di Kota Salatiga Tahun 2021-2025



Sumber : Sekretariat Daerah, 2026

e. Indeks Integritas Nasional

Indeks Integritas Nasional merupakan salah satu indikator yang esensial dalam perencanaan tata kelola pemerintahan. Indeks Integritas Nasional merupakan indikator penting untuk menilai tingkat integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemerintahan daerah. Indeks ini bertujuan untuk memantau, mengevaluasi, dan memperbaiki praktik antikorupsi, serta mendorong terciptanya budaya integritas di sektor publik. Dengan adanya indeks ini, diharapkan dapat terwujud pemerintahan yang bersih, jujur, dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat. Pada tahun 2025, Indeks Integritas Nasional Kota Salatiga adalah sebesar 77,95. Penilaian integritas nasional di Kota Salatiga diperoleh dari hasi penilaian SPI yang dilaksanakan setiap tahun. Penggunaan indikator ini dalam dokumen perencanaan mencerminkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta meningkatkan transparansi dalam pelayanan publik.

Nilai Indeks Integritas Nasional Kota Salatiga dari tahun 2021 sampai dengan 2025 mengalami perkembangan yang fluktuatif, dengan hasil agak menurun pada tahun 2025.

Grafik 2. 48. Indeks Integritas Nasional Kota Salatiga Tahun 2021-2025



Sumber: Inspektorat Kota Salatiga.2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2.4.1 Fokus Urusan Wajib Pelayanan Dasar

a. Urusan Pendidikan

Strategi pembangunan pendidikan dijabarkan melalui empat sendi pokok yaitu Pemerataan kesempatan, Relevansi pendidikan dengan pembangunan, Kualitas pendidikan dan Efisiensi pengelolaan. Strategi yang dilakukan bertujuan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat.

Pembangunan pendidikan di Kota Salatiga Tahun 2025 menunjukkan kondisi yang sangat baik ditunjukan dengan meningkatnya angka rata-rata lama sekolah 11,49 tahun dan harapan lama sekolah 15,47 tahun, serta Prosentase Melek Huruf Usia 15 Tahun ke atas (usia 15-59) sebesar 96,76%. Perkembangan capaian pembangunan pendidikan di Kota Salatiga dalam kurun tahun 2021-2025 sebagai berikut.

Tabel 2. 20. Perkembangan Capaian Pembangunan Pendidikan di Kota Salatiga tahun 2021-2025

Capaian Pembangunan	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	10,66	10,95	11,24	11,48	11.49
Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,42	15,43	15,44	15,46	15.47
Prosesntase Melek Huruf Usia 15	%	96,91	97,62	98,74	99,62	96,76

Sumber : Dinas Pendidikan, Tahun 2025

Pemerataan kesempatan pendidikan diupayakan melalui penyediaan sarana dan prasarana belajar yang memadai dan tenaga pengajar mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan ditunjukan dengan ruang kelas dalam kondisi baik. Tahun 2025 persentase ruang kelas dalam kondisi baik untuk jenjang PAUD sebesar 89.42%, namum jenjang SD dan jenjang SMP mengalami penurunan sebesar 3.33%. Hal ini menjadikan perhatian pemerintah daerah dalam rangka menjaga mutu pendidikan yang lebih baik. Perkembangan Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik di Kota Salatiga kurun waktu 2020-2025 sebagai berikut.

Tabel 2. 21. Perkembangan Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik di Kota Salatiga Tahun 2021-2025

Prosentase Ruang Kelas Dalam	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
PAUD	%	87,33	80,17	92,45	87,43	89,42
SD	%	87,28	88,4	91,98	88,44	85,11
SMP	%	97,70	98,62	97,10	87,78	84,45

Sumber : Dinas Pendidikan, Tahun 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Rasio murid-guru adalah perbandingan antara jumlah murid pada suatu jenjang sekolah dengan jumlah guru di sekolah yang bersangkutan. Rasio ini menggambarkan beban kerja guru dalam mengajar serta melihat mutu pengajaran di kelas. Semakin rendah nilai rasio ini berarti semakin bertambah tingkat pengawasan dan perhatian guru terhadap murid sehingga mutu pengajaran semakin tinggi. Rasio murid-guru di Kota Salatiga tahun 2025 yaitu 13,13. Perkembangan rasio murid-guru di Kota Salatiga Tahun 2020-2025 sebagai berikut.

Tabel 2. 22. Perkembangan Rasio Murid-Guru di Kota Salatiga Tahun 2021-2025

Tahun	SEKOLAH	MURID	GURU	RATA-RATA PER SEKOLAH		RASIO MURID GURU
				MURID	GURU	
2021	81	15900	1074	196,3	13,26	14,08
2022	80	15621	1056	195,26	13,2	14,79
2023	80	15069	1096	188,36	13,70	13,74
2024	80	14953	1136	186,91	14,2	13,16
2025	80	15009	1143	187,61	14,29	13,13

Sumber : Dinas Pendidikan, Tahun 2025

Prosentase Guru Layak Mengajar pada tahun 2025 di Kota Salatiga untuk jenjang PAUD sebanyak 91.86%, jenjang SD 95.72% dan jenjang SMP 99.33%.

Tabel 2. 23. Perkembangan Prosentase Guru Layak Mengajar di Kota Salatiga Tahun 2021—2025

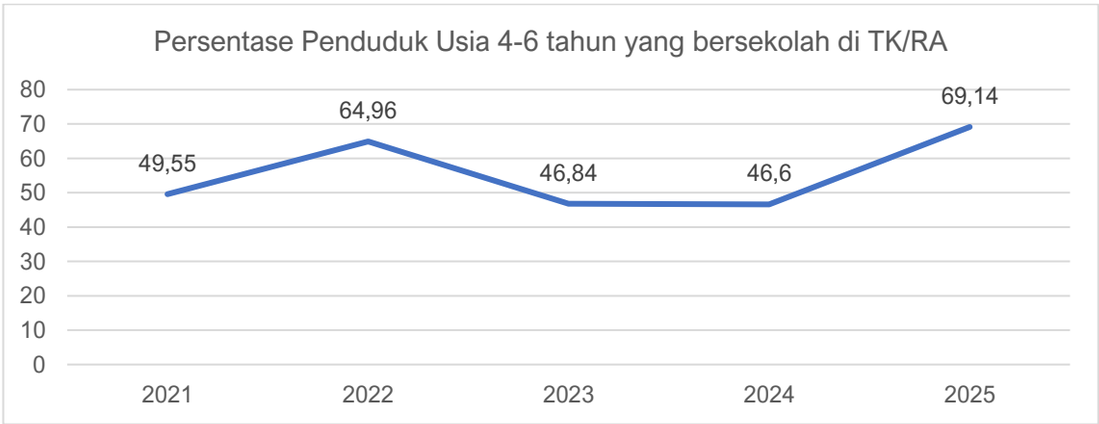
Prosentase Guru Layak Mengajar	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
PAUD	%	84,95	86,91	88,15	87,80	91,86
SD	%	97,30	97,39	97,95	97,15	95,72
SMP	%	96,43	97,63	98,19	99,10	99,33

Sumber : Dinas Pendidikan, Tahun 2025

Pemerataan pendidikan di Kota Salatiga dimulai dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini cenderung meningkat dalam kurun waktu 2021-2025, hal ini ditunjukkan dengan Prosentase Penduduk Usia 4-6 tahun yang bersekolah di TK/RA. Target sebesar 46.6% realisasi sebesar 69.14% dengan capaian 121,51%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 46,84% terdapat penurunan sebesar 0,24% ., terdapat 2 lembaga PAUD yang tidak beroperasi lagi yaitu TK Pelangi Nusantara, TK Tabita dan 1 kelompok belajar yang tidak melakukan proses pembelajaran yaitu KB Permata.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Grafik 2. 49. Prosentase Penduduk Usia 4-6 tahun yang bersekolah di TK/RA di Kota Salatiga Tahun 2021-2025



Sumber : Dinas Pendidikan, Tahun 2025

Angka Partisipasi Kasar adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia di jenjang pendidikan tertentu. APK menunjukkan seberapa tingkat partisipasi penduduk pada suatu tingkat pendidikan. Tahun 2025 APK di Kota Salatiga untuk jenjang PAUD sebesar 50.97%, jenjang SD sebesar 117.02%, dan jenjang SMP 135.55%. Perkembangan APK di Kota salatiga dalam kurun waktu 2020-2025 sebagai berikut.

Tabel 2. 24. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar di Kota Salatiga Tahun 2021-2025

Angka Partisipasi	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
PAUD	%	38,33	40,10	46,84	46,60	50,97
SD	%	113,46	114,07	113,81	115,85	117,02
SMP	%	130,81	130,59	130,90	133,63	135,55

Sumber : Dinas Pendidikan, Tahun 2025

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan jumlah penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dengan jenjangnya. Persentase APS menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah di Kota Salatiga mulai Tahun 2023 ada penambahan indikator yaitu APS Kesetaraan. Perkembangan APS di Kota Salatiga dalam kurun waktu tahun 2021-2025 sebagai berikut.

Tabel 2. 25. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah di Kota Salatiga Tahun 2021-2025

Angka Partsi	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
Usia 5-6 tahun	%	84,81	89,61	96,88	97,88	81,90
Usia 7-12 tahun	%	99,22	99,23	99,30	99,34	87,40
Usia 13-15 tahun	%	96,72	90,56	96,80	96,82	91,79
Pendidikan Kesetaraan	%	n/a	n/a	65,56	71,05	71,79

Sumber : Dinas Pendidikan, Tahun 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Berdasarkan data Angka Partisipasi Sekolah (APS), capaian partisipasi pendidikan pada berbagai kelompok usia menunjukkan hasil yang beragam. Pada kelompok usia 5–6 tahun (PAUD), realisasi APS tahun 2025 tercatat sebesar 81,90 persen, masih berada jauh di bawah target tahun 2024 sebesar 97,88 persen. Kondisi ini mengindikasikan masih perlunya penguatan akses dan partisipasi pendidikan anak usia dini. Pada kelompok usia 7–12 tahun (SD/MI), realisasi APS tahun 2025 mencapai 87,40 persen, belum memenuhi target tahun 2024 sebesar 99,34 persen. Demikian pula pada kelompok usia 13–15 tahun (SMP/MTs), realisasi APS tahun 2025 sebesar 91,79 persen, masih berada di bawah target tahun 2024 yang ditetapkan sebesar 96,82 persen. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama masih memerlukan upaya peningkatan yang berkelanjutan. Sementara itu, pada Pendidikan Kesetaraan, realisasi APS tahun 2025 mencapai 71,79 persen, sedikit melampaui target tahun 2024 sebesar 71,05 persen. Capaian ini menunjukkan kinerja yang relatif stabil dan positif dalam menjangkau masyarakat yang belum terlayani pendidikan formal.

Berdasarkan capaian tersebut, penyusunan Racangan RKPD Tahun 2027 perlu memprioritaskan peningkatan APS terutama pada kelompok usia PAUD, SD/MI, dan SMP/MTs, melalui perluasan akses layanan pendidikan, penguatan peran satuan pendidikan dan masyarakat, serta peningkatan kesadaran akan pentingnya pendidikan. Di sisi lain, capaian pada Pendidikan Kesetaraan perlu dipertahankan dan ditingkatkan sebagai bagian dari upaya pemerataan layanan pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Salah satu indikator keberhasilan urusan pendidikan juga dapat dilihat dari Capaian Kemampuan Literasi dan Kemampuan Numerasi. Namun laporan Raport Pendidikan Kota Salatiga 2025 belum keluar, untuk sementara menggunakan laporan Rapor Pendidikan Kota Salatiga Tahun 2024.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 2. 26. Laporan Rapor Pendidikan Kota Salatiga Tahun 2024

Jenis Satuan Pendidikan	Status Satuan Pendidikan	No	Indikator	Capaian	Skor Rapor 2024	Definisi Capaian	Perubahan Skor dari Tahun Lalu	Skor Rapor 2024	Peringkat di Provinsi	Sumber Data
SMP Umum	Semua	A.1	Kemampuan literasi	Baik	94,84	Sebagian besar peserta didik telah mencapai batas kompetensi minimum untuk literasi membaca.	Naik 0,08	94,76	Peringkat atas (1-20%)	Asesmen Nasional 2024
SMP Umum	Semua	A.1.skor	Kemampuan literasi		84,87		Naik 1,03	83,84	Peringkat atas (1-20%)	Asesmen Nasional 2024
SMP Kemenag	Semua	A.1	Kemampuan literasi	Baik	89,67	Sebagian besar peserta didik telah mencapai batas kompetensi minimum untuk literasi membaca.	Naik 1.47	88,2	Peringkat atas (1-20%)	Asesmen Nasional 2024
SMP Kemenag	Semua	A.1.skor	Kemampuan literasi		80,04		Naik 3,34	76,7	Peringkat atas (1-20%)	Asesmen Nasional 2024
SD Umum	Semua	A.1	Kemampuan literasi	Baik	92,54	Sebagian besar peserta didik telah mencapai batas kompetensi minimum untuk literasi membaca.	Turun 1,25	93,79	Peringkat atas (1-20%)	Asesmen Nasional 2024
SD Umum	Semua	A.1.skor	Kemampuan literasi		74,42		Naik 0,11	74,31	Peringkat atas (1-20%)	Asesmen Nasional 2024
SD Kemenag	Semua	A.1	Kemampuan literasi	Baik	81,62	Sebagian besar peserta didik telah mencapai batas kompetensi minimum untuk literasi membaca.	Naik 4,45	77,17	Peringkat atas (1-20%)	Asesmen Nasional 2024
SD Kemenag	Semua	A.1.skor	Kemampuan literasi		65,81		Naik 3,56	62,25	Peringkat atas (1-20%)	Asesmen Nasional 2024
SMP Umum	Semua	A.2	Kemampuan numerasi	Baik	91,62	Sebagian besar peserta didik telah mencapai batas kompetensi minimum untuk numerasi	Naik 0.69	90,93	Peringkat atas (1-20%)	Asesmen Nasional 2024
SMP Umum	Semua	A.2.skor	Kemampuan numerasi		71,98		Naik 0.44	71,54	Peringkat atas (1-20%)	Asesmen Nasional 2024
SMP Kemenag	Semua	A.2	Kemampuan numerasi	Baik	85,87	Sebagian besar peserta didik telah mencapai batas ompetensi minimumuntuk numerasi	Naik 4,50	81,37	Peringkat atas (1-20%)	Asesmen Nasional 2024

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Jenis Satuan Pendidikan	Status Satuan Pendidikan	No	Indikator	Capaian	Skor Rapor 2024	Definisi Capaian	Perubahan Skor dari Tahun Lalu	Skor Rapor 2024	Peringkat di Provinsi	Sumber Data
SMP Kemenag	Semua	A.2.skor	Kemampuan numerasi		67,68		Naik 1,65	66,03	Peringkat atas (1-20%)	Asesmen Nasional 2024
SD Umum	Semua	A.2	Kemampuan numerasi	Baik	88,65	Sebagian besar peserta didik telah mencapai batas kompetensi minimum untuk numerasi	Naik 3,58	85,07	Peringkat atas (1-20%)	Asesmen Nasional 2024
SD Umum	Semua	A.2.skor	Kemampuan numerasi		61,2		Naik 7,17	54,92	Peringkat atas (1-20%)	Asesmen Nasional 2024
SD Kemenag	Semua	A.2	Kemampuan numerasi	Sedang	70	40% - 70% peserta didik telah mencapai kompetensi inimum untuk numerasi namun perlu upaya mendorong lebih banyak peserta didik dalam mencapai kompetensi minimum.	Naik 10	60.00	Peringkat atas (1-20%)	Asesmen Nasional 2024
SD Kemenag	Semua	A.2.skor	Kemampuan numerasi		54,03		Naik 7,58	46,45	Peringkat atas (1-20%)	Asesmen Nasional 2024

Laporan ini berisi capaian seluruh indikator yang mempengaruhi indeks SPM Anda berdasarkan hasil agregat per jenjang di kabupaten/kota Anda.
Laporan ini dapat memberi gambaran kualitas satuan pendidikan Anda seperti yang tertuang di Permendikbudristek Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.

Laporan diperbarui 17 Maret 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 2. 27. SPM Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan

No.	Pelayanan Dasar/ Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
1	Pendidikan Kesetaraan	61,95	69,74	65,56	65,56	76,37
2	Pendidikan Anak Usia Dini	84,81	88,38	96,06	98,76	100
3	Pendidikan pada Sekolah Dasar	90,90	87,75	98,42	98,46	100

Sumber : Dinas Pendidikan, Tahun 2025

Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan dinilai berdasarkan Angka Partisipasi Sekolah pada Kesetaraan, PAUD dan Pendidikan Dasar. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, mengenai target dan indikator penerima layanan SPM Pendidikan bahwa pengumpulan data sesuai dengan Standar Teknis SPM ditujukan untuk pencapaian 100% (seratus persen) dari Target dan Indikator Kinerja pencapaian SPM setiap tahun.

Rata-rata Indeks Pencapaian SPM Bidang Pendidikan pada tahun 2023 sesuai dengan penerapan Indikator sesuai Permendagri Nomor 59 tahun 2021, yaitu Tuntas Madya dengan Pendidikan Kesetaraan, 65,56 (Tuntas Pratama) , Anak Usia Dini 96,76 (Tuntas Utama) dan Pendidikan pada Sekolah Dasar 98,46 (Tuntas Utama). Namun untuk tahun 2025 Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan tidak bisa dilaksanakan dengan maksimal, dikarenakan kurangnya anggaran pendidikan khusunya untuk pemenuhan SPM. Sebagai bahan RKPD tahun 2027 berikut kami sampaikan data capaian SDGs Urusan Pendidikan.

Indikator SDGs Tujuan 4: Menjamin Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Mempromosikan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat bagi Semua.

Tabel 2. 28. Capaian SDGs Urusan Pendidikan

NO	INDIKATOR NASIONAL	INDIKATOR KOTA SALATIGA	SATUAN	TAHUN				
				2021	2022	2023	2024	2025
1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat	Angka	99,05	90,53	99,97	97,15	90,59
2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat	Angka	75,43	75,90	81,72	78,76	90,60
3	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/sederajat	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/sederajat	Angka	63,54	64.08	67,64	70,74	
4	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Persen	98,9	95,70	95,7		98,82
5	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Persen	100	96,88	88,6		100
6	Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B	Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B	Persen	86,2	81,82	86,2		
7	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat	Angka Komposit	107,03	106,58	106,05	115,85	116,66
8	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat	Angka Komposit	84,12	84,62	84,15	133,63	135,38

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	INDIKATOR NASIONAL	INDIKATOR KOTA SALATIGA	SATUAN	TAHUN				
				2021	2022	2023	2024	2025
9	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/sederajat.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/sederajat.	Angka Komposit	118,12	119.89	112,30	95,92	
10	Rata-rata lama sekolah penduduk umur lebih dari 15 tahun	Rata-rata lama sekolah	Tahun	10,66	10,95	11.24	11.48	11.49
11	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Komposit	38,3	40,10	46,84	46,60	47,27
12	Persentase APK SMA/SMK/MA/sederajat	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/sederajat.	Angka Komposit	118,12	119.89	112,30	95.92	
13	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat; dan (4) Rasio APK perempuan/laki-laki di PT	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SD/MI/sederajat	Rasio	01:00.8	98,13	98,1		
14	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun	Persentase angka melek aksara penduduk umur lebih dari 15 tahun.	Persen	99,2	99,6	99,63	98,74	99,16
15	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 dan umur 15-59 tahun.	Persentase angka melek aksara penduduk umur lebih dari 15 tahun.	Persen					99.81
16	Persentase Penduduk Melek Huruf	Persentase Penduduk Melek Huruf	persen					
17	Persentase Kelas dalam Kondisi Baik (SD/MI	Persentase Kelas dalam Kondisi Baik (SD/MI)	Persen	78,7	87,3	91,98	88,44	85,11
18	Persentase Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Persentase Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	persen					
19	Persentase guru layak mengajar SMP/ MTs	Persentase guru layak mengajar SMP/ MTs	Persen	97,5	96,4	98.19	99.1	99,33
20	Persentase guru SMP yang bersertifikat pendidik	Persentase guru SMP yang bersertifikat pendidik	persen			57,53	58,65	66,85

Sumber : Dinas Pendidikan, Tahun 2025

b. Urusan Kesehatan

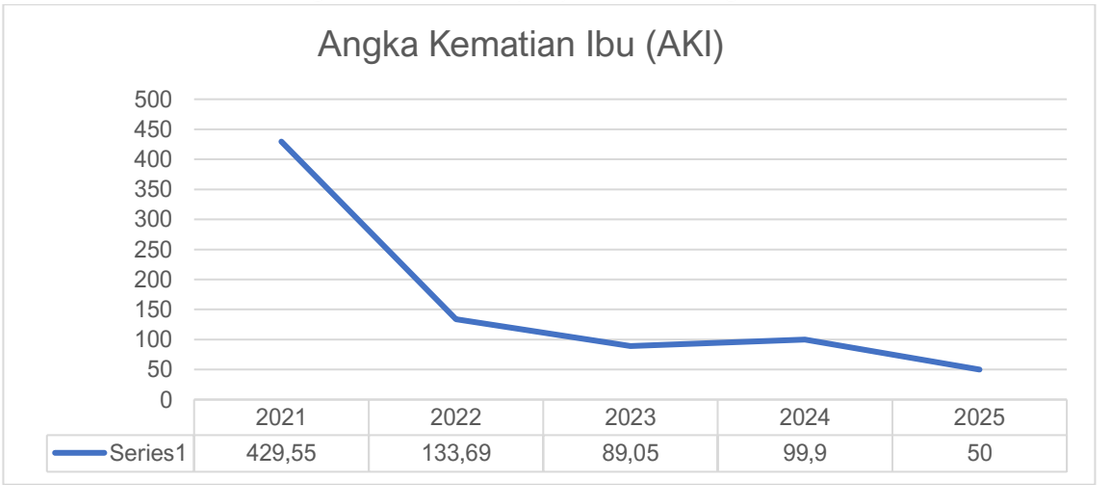
Tujuan dari pembangunan manusia dibidang kesehatan adalah untuk mencapai umur panjang yang sehat. Peningkatan derajat kesehatan dipengaruhi oleh empat faktor penentu, antara lain: Faktor lingkungan, Perilaku kesehatan, Pelayanan kesehatan dan Kependudukan/keturunan. Dari empat faktor tersebut yang dapat diintervensi dengan cepat yaitu Faktor kesehatan lingkungan dan faktor Pelayanan kesehatan. Kinerja daerah urusan kesehatan mendukung pencapaian tujuan ke 4 RPD tahun 2023-2026 yaitu “Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pengendalian pertumbuhan penduduk”.

Target Angka Kematian Ibu (AKI) Kota Salatiga tahun 2025 ditetapkan 129/100.000KH atau 2 kasus kematian ibu, sedangkan realisasi AKI pada tahun 2025 sebesar 50/100.000 KH atau 1 kasus kematian ibu. Dengan demikian capaian kinerja AKI pada tahun 2024 sudah memenuhi target ditetapkan. Karena indikator negative berarti kinerja AKI telah mencapai 258% dengan predikat tercapai.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Penyebab dari kematian ibu pada tahun 2025 karena Komplikasi Non Obstetrik (ibu mengalami dengue shock syndrome). Evaluasi yang perlu dilakukan adalah skrining penyakit pada masa kehamilan, serta pembinaan ke FKTP agar menerapkan SOP Pelayanan.

Grafik 2. 50. Angka Kematian Ibu (AKI) di Kota Salatiga Tahun 2021-2025



Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2025

Angka Kematian Bayi (AKB) menjadi sasaran strategis pembangunan di bidang kesehatan di Kota Salatiga. Kasus kematian bayi yang dilahirkan berkaitan erat dengan riwayat dan kondisi ibu sejak hamil, penatalaksanaan persalinan atau bahkan penyakit penyerta/kelainan bawaan pada bayi.

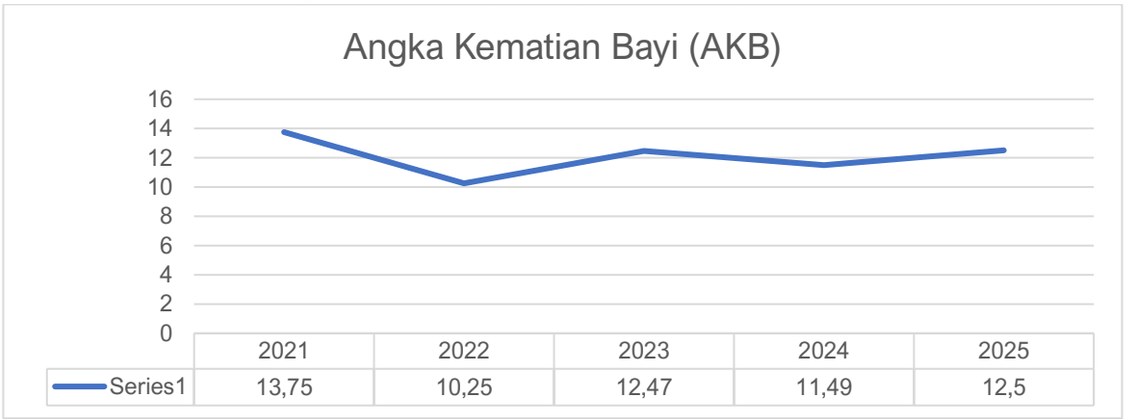
Berbagai upaya dilakukan untuk mencegah terjadinya kematian pada bayi lahir terutama karena masih adanya ibu hamil dengan KEK dan anemia. Upaya yang dilakukan adalah Optimalisasi SHK (*Screening Hipotiroid Kongenital*) dan meningkatkan cakupan ANC (*Ante Natal Care*) yaitu pemeriksaan ibu hamil secara optimal, hingga mampu menghadapi masa persalinan, nifas, menghadapi persiapan pemberian ASI secara eksklusif, serta kembalinya kesehatan alat reproduksi dengan wajar.

Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun 2025 tercatat sebesar 12,5 per 1.000 kelahiran hidup, sementara target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023–2026 adalah sebesar 11,17 per 1.000 kelahiran hidup. Kondisi ini menunjukkan bahwa capaian AKB tahun 2025 belum sepenuhnya memenuhi target pembangunan kesehatan yang telah ditetapkan, sehingga diperlukan perhatian dan upaya penguatan intervensi pada sektor kesehatan ibu dan anak.

Capaian AKB tersebut mengindikasikan masih adanya tantangan dalam penurunan kematian bayi, yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kondisi kesehatan ibu selama kehamilan, kualitas pelayanan persalinan dan neonatal, serta akses terhadap layanan kesehatan bayi baru lahir. Oleh karena itu, peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan kesehatan maternal dan neonatal menjadi aspek yang perlu terus diperkuat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

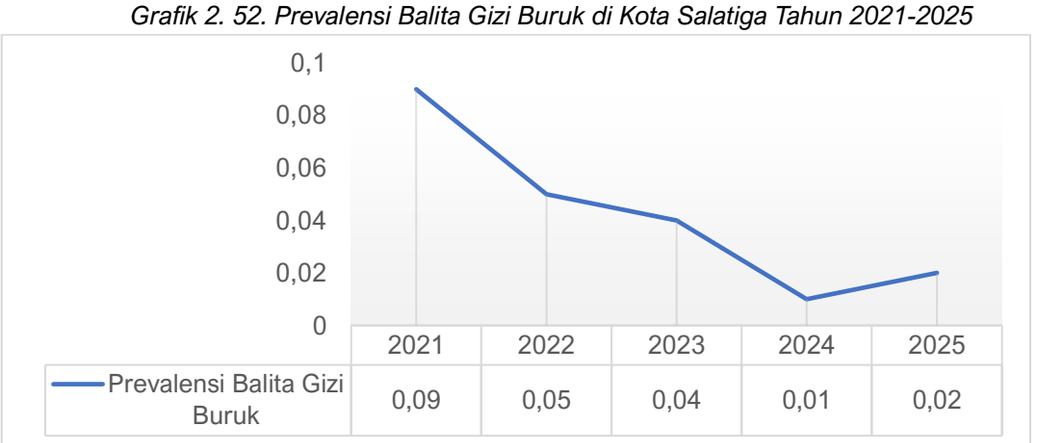
Grafik 2. 51. Angka Kematian Bayi (AKB) di Kota Salatiga Tahun 2021-2025



Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2025

Pada tahun 2025 prevalensi gizi buruk di Kota Salatiga sebesar 0,01%. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan pemenuhan gizi balita sehingga dalam kurun waktu 2021-2025 prevalensi balita gizi buruk mengalami tren menurun. Walaupun masih munculnya kasus gizi buruk berulang dengan balita yang sama karena adanya kelainan pada balita tersebut. Upaya yang dilakukan diantaranya meningkatkan KIE, Sosialisasi terkait gizi seimbang dan bahayanya balita dengan gizi buruk serta dengan memanfaatkan rumah pemulihan gizi secara maksimal bekerjasama dengan dokter spesialis anak melalui pemeriksaan dan konsultasi kesehatan serta dengan memberikan makanan tambahan bagi balita gizi kurang dan keluarga miskin.

Grafik 2. 52. Prevalensi Balita Gizi Buruk di Kota Salatiga Tahun 2021-2025



Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2025

Permasalahan status gizi salah satunya adalah kejadian stunting (Gizi kronis), dimana Kota Salatiga saat ini masih memiliki angka prevalensi stunting sebesar 6,71 persen atau sebanyak 548 Balita Stunting pada tahun 2025 dan tersebar pada semua kecamatan dan kelurahan di Kota Salatiga. Masih adanya kejadian Stunting ini karena kurangnya kesadaran orang tua balita dalam pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita, kurangnya pengetahuan ibu dalam pemberian makanan pada bayi dan balita, adanya penyakit infeksi pada balita, masih ada kasus anemi dan KEK pada ibu hamil, dan kondisi sanitasi yang kurang baik. Stunting akan mempengaruhi secara nyata pada kualitas sumber daya manusia Kota Salatiga pada tahun-tahun mendatang.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

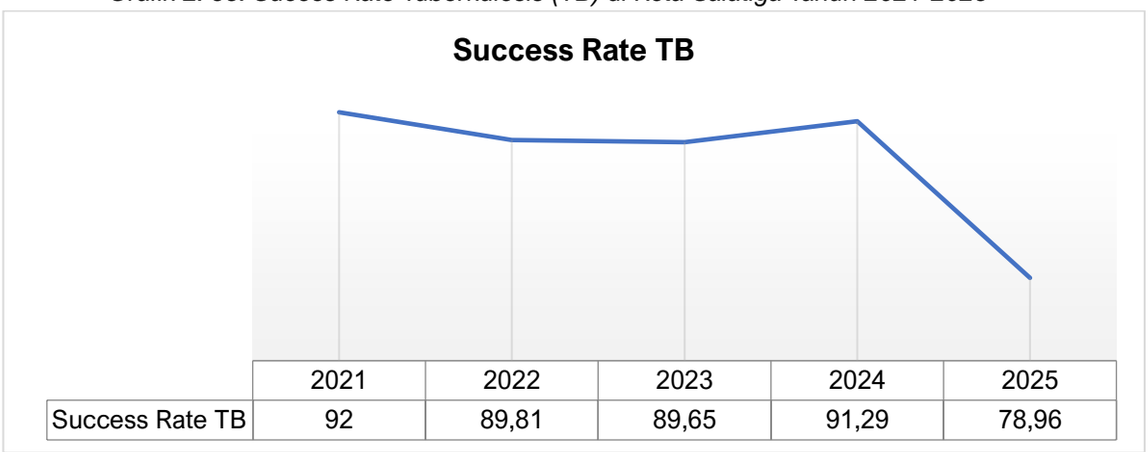
Tabel 2. 29. Data Stunting Kota Salatiga 2021-2025

Tahun	BADUTA		BALITA	
2021	286/3.431	8,34%	856/9.480	9,03%
2022	204/3.746	5,44%	647/10.418	6,21%
2023	135/2927	4,61%	484/8.177	5,92%
2024	181/2698	6,71%	605/8627	7,01%
2025	151/2595	5,82%	548/8162	6.71%

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2025

Salah satu sasaran strategis dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yaitu menurunnya penyakit menular dan tidak menular. Keberhasilan menurunnya penyakit menular terlihat dari Success Rate Tuberkulosis (TB) Kota Salatiga yang capaiannya pada Tahun 2025 sebesar 78,96% dari target 2025 sebesar 94%. Pelayanan program TB di fasilitas dalam tatalaksana pengobatan TB secara keseluruhan sudah sesuai standar. Perkembangan penanganan Tuberkulosis (TB) cenderung fluktuatif dari tahun 2021-2025.

Grafik 2. 53. Succes Rate Tuberkulosis (TB) di Kota Salatiga Tahun 2021-2025



	2021	2022	2023	2024	2025
Success Rate TB	92	89,81	89,65	91,29	78,96

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2025

-Persentase HIV/AIDS yang ditangani.

Perkembangan temuan kasus HIV di Kota Salatiga selama periode 2021–2025 menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2020 ditemukan sebanyak 15 kasus HIV, kemudian menurun menjadi 12 kasus pada tahun 2021. Namun demikian, pada tahun 2022 jumlah kasus yang ditemukan meningkat menjadi 24 kasus dan kembali meningkat pada tahun 2023 menjadi 28 kasus. Seluruh kasus yang ditemukan pada tahun 2020 hingga 2023 tersebut telah mendapatkan pengobatan antiretroviral (ARV) secara 100 persen, yang menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam menjamin akses layanan pengobatan bagi orang dengan HIV.

Pada tahun 2024, jumlah temuan kasus HIV kembali meningkat menjadi 37 kasus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 81,08 persen telah mendapatkan pengobatan ARV. Capaian ini menunjukkan bahwa meskipun upaya penemuan kasus dan akses layanan pengobatan telah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

berjalan, masih terdapat tantangan dalam memastikan seluruh kasus HIV yang ditemukan dapat segera terhubung dengan layanan pengobatan ARV secara optimal.

Peningkatan jumlah temuan kasus HIV dapat mencerminkan meningkatnya upaya deteksi dini dan penjangkauan layanan kesehatan, namun di sisi lain juga menunjukkan perlunya penguatan upaya pencegahan penularan HIV. Penurunan persentase cakupan pengobatan ARV pada tahun 2024 menjadi perhatian penting, mengingat pengobatan ARV yang berkelanjutan merupakan kunci dalam meningkatkan kualitas hidup orang dengan HIV serta menekan risiko penularan.

Sesuai kebijakan program pencegahan dan pemberantasan penyakit HIV/AIDS seluruh penderita HIV/AIDS harus mendapatkan pelayanan sesuai standar. Tata laksana penderita HIV/AIDS meliputi Voluntary Counseling Testing (VCT) yaitu tes konseling secara sukarela, perawatan orang sakit dengan HIV/AIDS, pengobatan Anti Retroviral (ARV), pengobatan infeksi oportunistik, dan rujukan kasus spesifik. Pada tahun 2025 ditemukan 24 kasus Orang Dengan HIV dan 83,33% di antaranya mendapatkan pengobatan ARV.

-Angka Kesakitan Malaria per 1.000 Penduduk

Perkembangan kasus malaria di Kota Salatiga selama periode 2021–2025 menunjukkan fluktuasi dengan peningkatan yang signifikan pada tahun 2024. Pada tahun 2020 tercatat sebanyak 35 kasus malaria dengan Annual Parasite Incidence (API) sebesar 0,18 per 1.000 penduduk. Jumlah kasus tersebut meningkat pada tahun 2021 menjadi 38 kasus. Selanjutnya, pada tahun 2022 terjadi penurunan jumlah kasus menjadi 10 kasus dengan API sebesar 0,05 per 1.000 penduduk, dan kembali menurun pada tahun 2023 menjadi 13 kasus dengan API sebesar 0,06 per 1.000 penduduk.

Malaria merupakan salah satu penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. Pada Tahun 2025, terdapat 49 kasus Malaria (API: 0,25/1.000 penduduk) menurun jika dibandingkan Tahun 2024 (API: 0,80/1.000 penduduk). Tahun 2023 terdapat 13 Kasus Malaria (API: 0,06/1.000 penduduk), sedangkan Tahun 2022 terdapat 10 kasus (API: 0,05/1.000 penduduk), dan pada Tahun 2021 terdapat 38 Kasus (API: 0,19/1.000 penduduk). Kasus malaria yang ditemukan sebagian besar merupakan kasus yang di bawa dari daerah endemis. Oleh karena itu perlu diwaspadai sumber penularan dan peta wilayah kasusnya, sehingga penularan di wilayah Salatiga dapat dicegah sedini mungkin.

-Prevalensi Hipertensi Penduduk Usia di atas 15 Tahun

Menurunnya penyakit tidak menular untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terlihat dari perkembangan prevalensi hipertensi penduduk usia di atas 15 tahun. Pada tahun 2025 Prevalensi Hipertensi penduduk usia diatas 15 tahun dengan target 38,61%, terealisasi sebesar 33,60%. Meskipun capaian sudah masuk kategori kategori sangat berhasil dengan angka 114,91%, Dinas Kesehatan tetap harus meningkatkan edukasi kepada masyarakat tentang PTM, memaksimalkan skrining pada masyarakat usia produktif secara berkala agar status kesehatan masyarakat dengan hipertensi dapat terkontrol.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 2. 30. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Kesehatan

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPD 2023-2026	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPD s.d Tahun 2025	Realisasi Capaian Kinerja RPD s.d Tahun 2005 (%)	Kategori Status	Status
1)	Persentase Akreditasi Puskesmas Strata Utama	%	82	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Tercapai
2)	Peringkat Kelulusan Akreditasi RSUD	Predikat	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Sangat Tinggi	Tercapai

Pada Tahun 2025 Persentase Akreditasi Puskesmas Strata Utama ditetapkan target sebesar 100% Puskesmas terakreditasi minimal strata utama, dan berdasarkan hasil reakreditasi semua puskesmas mendapatkan hasil paripurna. Sehingga target tahun 2025 tercapai karena capaian kinerja sebesar 100 %. Enam puskesmas yang terakreditasi Paripurna antara lain Puskesmas Cebongan, Tegalrejo, Sidorejo Kidul, Mangunsari, Kalicacing, dan Sidorejo Lor.

No.	Nama Puskesmas	Akreditasi
1	Sidorejo Lor	Paripurna
2	Sidorejo Kidul	Paripurna
3	Kalicacing	Paripurna
4	Cebongan	Paripurna
5	Tegalrejo	Paripurna
6	Mangunsari	Paripurna

Pada tahun 2025 peringkat kelulusan akreditasi RSUD ditetapkan Paripurna dan sampai akhir tahun 2025 ini statusnya adalah paripurna sehinga target tercapai. Tercapainya target ini tidak lepas dari dukungan sumber daya yang memadai serta kelengkapan administrasi yang mendukung RSUD mendapat predikat akreditasi paripurna.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Permenkes Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar teknis khusus bidang kesehatan, kondisi pelayanan dasar Urusan Kesehatan dapat dilihat dari SPM yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Salatiga dengan capaian tahun 2021-2025 sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 2. 31. SPM Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan

No.	Pelayanan Dasar/ Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	97,53	100	100	100	100
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100	100	100	100	100
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	98,20	100	100	100	100
4	Pelayanan Kesehatan Balita	93,79	97,06	100	100	100
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	25,14	100	100	100	100
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	26,62	93,08	100	100	100
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	70,88	93,34	100	100	100
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	33,71	93,17	97,69	98,16	100
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	67,71	93,84	100	100	100
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	73,52	100	100	100	100
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	33,43	100	100	100	100
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus/HIV)	50,60	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2025

Pencapaian Indikator SPM Bidang Kesehatan pada tahun 2025 mengalami kenaikan dibandingkan capaian pada tahun 2024. Pencapaian telah mencapai kategori Tuntas Paripurna (100%) yaitu Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin, Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar, Usia Produktif, Usia lanjut, Penderita Hipertensi, Penderita Diabetes Melitus, Pelayanan Kesehatan Orang Terduga tuberkulosis, dan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus sedangkan capaian cakupan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita, Penderita Hipertensi dan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat mencapai kategori Tuntas Utama. Oleh karena itu IP SPM Bidang Kesehatan Kota Salatiga Tahun 2025 berkategori TUNTAS UTAMA.

Walaupun Indikator SPM Bidang Kesehatan sudah mencapai target yang telah ditetapkan, akan tetapi upaya peningkatan pelayanan dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1) Meningkatkan koordinasi dengan PKK, tokoh masyarakat dan lintas sektor terkait
2) Mendekatkan Posbindu hingga ke tingkat RW di semua wilayah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3) Menetapkan posyandu terintegrasi percontohan sebagai bentuk pelaksanaan Integrasi Layanan Primer (ILP) di setiap wilayah puskesmas
4) Meningkatkan edukasi ke masyarakat

Dengan upaya-upaya pemenuhan penerapan SPM tersebut diharapkan progress capaian indikator SPM Kesehatan akan sesuai dengan target pada tahun berikutnya.

Indikator SDGs TUJUAN :2 - Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan. Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah agenda pembangunan global yang disepakati oleh negara-negara anggota United Nations pada tahun 2015 untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan hingga tahun 2030. Dalam konsep pembangunan berkelanjutan, pencapaian tujuan-tujuan ekonomi harus selaras dengan tujuan sosial maupun kepentingan lingkungan. Dua Unsur Pembangunan Berkelanjutan:

a. Adanya konsep yang mengatur tata kelola organisasi dalam kehidupan budaya, hubungan sesama manusia dan sumberdaya alam. Dari unsur pertama tersebut diharapkan menghasilkan “social organization” (organisasi sosial)
b. Adanya teknik sosial yang tepat untuk mengkoordinasikan tindakan sosial untuk mencegah kerusakan prilaku dan mempercepat perkembangan pembentukan modal sosial.

Berbagai program kesehatan difokuskan pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui penguatan pelayanan kesehatan dasar, upaya promotif dan preventif, serta peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan. Tindak pencapaian target SDGs di lingkup Dinas Kesehatan Kota Salatiga meliputi:

Goal 2 : Tanpa kelaparan
Goal 3 : Kehidupan sehat dan sejahtera
Goal 6 : Air besih dan sanitasi layak

Adapun capaian indikator SDGs dijabarkan dalam tabel dibawah ini:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 2. 32. Capaian SDGs Urusan Kesehatan

NO	INDIKATOR NASIONAL	INDIKATOR KOTA SALATIGA	SATUAN	TAHUN				
				2021	2022	2023	2024	2025
1	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	Persen	92,2	95,92 (BPS)	97,9	98,55	100
2	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang prosesnya melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang prosesnya melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	Persen	100	100	100	100	100
3	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	Persentase bayi (0-12 bln) yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap	Persen	116	100	100	100	100
4	Persentase rumah tangga yang memilki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Sanitasi Layak	Persen	100%	97,72	98,2	96,02	97,04
5	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Persentase Kasus Stunting	Persen	9,03	6,21	5,92	6,51	6,71
6	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	Persentase Kasus Stunting	Persen	9,03	6,21	4,61	5,75	5,82
7	Prevalensi anemia pada ibu hamil	Persentase Ibu Hamil yang Anemia	NA	12,3	11,18	11	7,43	5,77
8	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Eks.	Persen	73,7	78,59	82,4	82,07	100
9	Angka Kematian Ibu (AKI)	Angka Kematian Ibu (AKI).	/100.00 KH	430	133,69	89,05	99,9	50
10	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Persen	100	100	100	100	100
11	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Persen	100	100	100	100	100
12	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	per 1000 KH	12,3	11,59	13,8	11,49	14,5
13	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	per 1000 KH	8,91	6,24	9,35	7,99	0,5

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	INDIKATOR NASIONAL	INDIKATOR KOTA SALATIGA	SATUAN	TAHUN				
				2021	2022	2023	2024	2025
14	Angka kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Angka kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	per 1000 KH	13,8	10,25	12,5	11,49	12,5
15	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Persentase bayi (0-12 bln) yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap	Persen	116	127,5	131	100	100
16	Prevalensi HIV pada Populasi Dewasa	Prevalensi HIV pada Populasi Dewasa	%	0,01	0,02	0,02	0,32	0,41
17	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk	Angka	35	381,58	403	456,32	586
18	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar		100	100	167	100	100
19	Persentase Kab/Kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B	Persentase puskesmas yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B	%	NA	100	100	100	100
20	Jumlah Orang Yang Memerlukan Intervensi Terhadap Penyakit Tropis Yang Terabaikan (Filiariasis dan Kusta)	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	0rang	1	1	0 kasus/tidak ada kasus	Filariasis: 0 Kusta: 2	Filariasis: 0 Kusta: 1
21	Prevalensi tekanan darah tinggi	Prevalensi Hipertensi Penduduk Usai >18 tahun	Persen	0,72	0,81	38,42	38,58	33,6
22	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	Unit		6	6	6	6
23	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	Persentase cakupan kepesertaan JKN	Persen	92,2	95,92	97,9	99,55	100
24	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Persentase cakupan kepesertaan JKN	Persen	92,2	95,92	97,9	99,55	100
25	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	NA	NA	25,36	23,15	99,55	100
26	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	%	100	100	100	100	100
27	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	Persentase penduduk berakses air minum layak	%	98,78	98,04	98,71	98,58	99
28	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap	%	98,82	98,04	98,71	-	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	INDIKATOR NASIONAL	INDIKATOR KOTA SALATIGA	SATUAN	TAHUN				
				2021	2022	2023	2024	2025
	sumber air minum layak dan berkelanjutan	layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.						
29	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air	%	96,3	97,4	95,7	88,28	89,31
30	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Jumlah Kelurahan yang melaksanakan STBM	Kelurahan	23	23	23	23	23
31	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	Kelurahan	23	23	23	23	23

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2025

c. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dalam meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur perkotaan, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang menetapkan sasaran strategis meningkatkan kualitas sarana prasarana jalan dan jembatan yang memadai untuk kenyamanan dan kelancaran transportasi serta meningkatkan kualitas penataan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Tabel 2. 33. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPD-2023 2026	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPD s.d Tahun 2025	Realisasi Capaian Kinerja RPD s.d Tahun 2025 (%)	Kategori Status	Status
1)	Tingkat Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	%	98	98	95,21	98,17	98,17	Sangat tinggi	Tercapai
2)	Wilayah dengan infrastruktur kondisi baik	%	91	83	94.32	94.32	103,65	Sangat Tinggi	Tercapai

Sumber Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tahun 2025

Pencapaian Indikator Pekerjaan Umum dalam hal ini Prosentase Tingkat Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pada tahun 2025 dengan Berkas permohonan KKPR yang masuk sejumlah 375 permohonan, diizinkan sejumlah 257 permohonan, diizinkan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

bersyarat sejumlah 21 permohonan, diizinkan terbatas sejumlah 80 permohonan, dan tidak diijinkan sejumlah 3 permohonan, sehingga pada tahun 2025 ini prosentase Tingkat Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah terealisasi 95,21%.

Tahun 2025 Wilayah dengan infrastruktur kondisi baik target 83 % dan realisasi sebesar 94,32%. Realisasi kinerja RPJMD s.d Tahun 2025 adalah sebesar 94,32% sedangkan realisasi capaian kinerja RPJMD s.d tahun 2025 adalah sebesar 105,2%, sehingga kategori status sangat tinggi. Total panjang jalan sesuai SK Jalan tahun 2017 adalah sepanjang 337,471 km. Dari panjang jalan tersebut pada tahun 2025 kondisinya 86,62% dalam kondisi mantab, yang terdiri dari 292,324 km dalam kondisi baik dan 45,147 Km dengan kondisi tidak mantap. Faktor pendukung diantaranya ketersediaan anggaran baik untuk pemeliharaan maupun untuk peningkatan kondisi jalan.

Pada Tahun 2025 panjang jaringan irigasi kondisi baik adalah 11.875 m dan kondisi sedang adalah 12.013 m sedangkan panjang jaringan irigasi keseluruhan adalah 23.888 m, dari data tersebut maka capaian persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik sebesar 78,95% dengan 12 daerah irigasi yang ada semuanya terlayani. Penyebab keberhasilan ini karena ketersediaan anggaran dan dukungan OP irigasi yang turut mendukung pemeliharaan jaringan irigasi.

SPM urusan Pekerjaan Umum di tingkat kabupaten/kota mencakup pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari, dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik. Realisasi SPM tahun 2021-2025 sebagai berikut:

Tabel 2. 34. SPM Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum

No.	Jenis Pelayanan Dasar	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum sehari-hari	131,82	99,09	99.28	88,45	97,31
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik	100	82,28	86.89	98,06	92,32

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tahun 2025

Pencapaian Indikator Standar Minimal Bidang Pekerjaan Umum berupa Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terhadap kuantitas. Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air bersih melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap kualitas air.

Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik berupa sistem pengelolaan air limbah domestik setempat (SPALD-S) terhadap kuantitas akses pengolahan air limbah domestik. Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat terhadap kualitas pelayanan air limbah domestik.

Jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten/Kota dan Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk, lumpur tinja diolah di IPLT, dan memiliki sambungan rumah dan air limbah nya diolah di IPAL.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Permasalahan yang dihadapi bidang pekerjaan Umum pada Pencapaian SPM antara lain:

1) belum adanya data rumah tangga akses air minum dan sanitasi yang akurat;
2) kesulitan mencari lahan untuk pembngunan IPLT baru karena adanya penolakan di rencana lokasi Gunungsari
3) keterbatasan lahan di masyarakat untuk pembangunan IPAL komunal (SPALD-T)

Solusi yang dilakukan diantaranya adalah perlunya survey/sensus BNBA bagi rumah tangga yang belum memiliki akses air minum dan sanitasi juga pengoptimaan IPLT yang lama untuk 10 tahun ke depan dengan meningkatkan kapasitas perlu kajian penggunaan alat mekanis.
Indeks Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kota Salatiga untuk jenis pelayanan dasar Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari- hari berada pada kategori Tuntas Madya, sedangkan pada jenis pelayanan dasar penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik berkategori Tuntas Utama, sehingga IP SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kota Salatiga Tahun 2025 dikategorikan Tuntas Madya.

Tabel 2. 35. SPM Pelayanan Dasar Air Minum

No.	Air Minum	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Persentase Air Minum Layak	81,87	91,55	98,44	93,20	97,31
2.	Persentase Air Minum Jaringan Perpipaan	75,05	95,00	91,30	91,30	90,20
3.	Persentase Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan	24,95	2,98	8,7	6,16	7,11
4.	Persentase Air Minum Aman	72,15	82,65	91,71	87,04	90,20

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tahun 2025

Tabel 2. 36. SPM Pelayanan Dasar Air Limbah Domestik

No.	Air Limbah Domestik	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Persentase Air Limbah Domestik Layak	93,75	94,37	94,67	96,67	80,25
2.	Persentase Air Limbah Domestik Belum Layak	6,25	5,63	5,33	5,92	2,64
3.	Persentase Air Limbah Domestik Aman	7,75	8,37	12,12	10,93	12,07

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025

Tabel 2. 37. Capaian SDGs Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	INDIKATOR NASIONAL	INDIKATOR KOTA SALATIGA	SATUAN	TAHUN				
				2021	2022	2023	2024	2025
1	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga,perkotaan	Persentase Pemenuhan Air Baku	Persen	97	98,19	99,3	82,51	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	INDIKATOR NASIONAL	INDIKATOR KOTA SALATIGA	SATUAN	TAHUN				
				2021	2022	2023	2024	2025
	dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau							
2	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	Persen	98,6	98,04	98,7	93.20	97,31
3	Persentase rumah angga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Sanitasi Layak	Persen	93,75	94,37	94,61	92.00	80,25
4	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur airlimbah dengan sistem terpusatskala kota, kawasan dan komunal	Jumlah kecamatan yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kawasan dan komunal	Kecamatan	2	4,00	4	4	4
5	Jumlah Kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Jumlah Kecamatan yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kecamatan	PM	4,00	4	4	4
6	Kondisi mantap jalan nasional	Persentase Jalan kota dalam Kondisi baik	Persen	96.45	99,20	91.00	91,97	86,62

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025

d. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Salah satu isu yang masih berkembang saat ini adalah semakin menurunnya kualitas kawasan permukiman. Beberapa faktor penyebab kekumuhan antara lain meningkatnya arus urbanisasi di perkotaan, kemampuan ekonomi khususnya untuk masyarakat Berpenghasilan Rendah

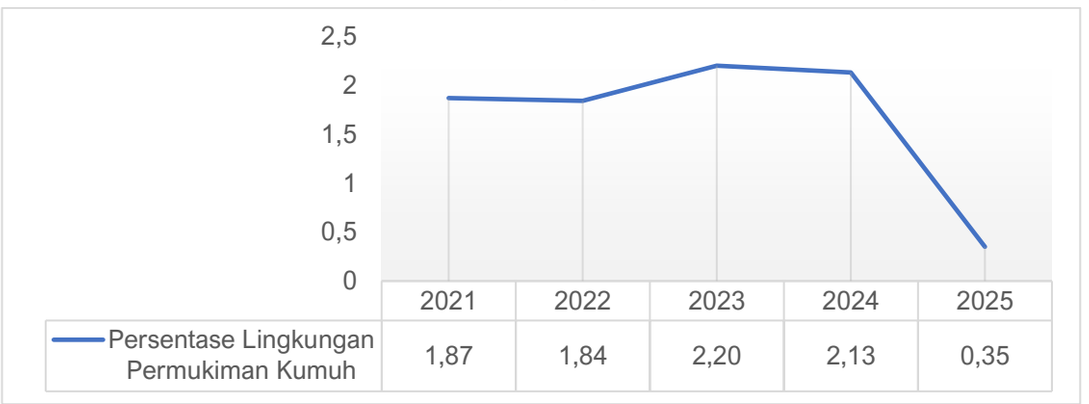
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

(MBR) serta pertumbuhan penduduk itu sendiri. Hal ini mendorong tumbuhnya kawasan kumuh permukiman.

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Salatiga Nomor 600.2/127/2024 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Salatiga, Total luasan Kawasan kumuh Kota Salatiga tingkat kumuh ringan dan sedang pada akhir 2024 adalah 28,77 Ha. Luasan ini menjadi awal perhitungan untuk periode 2025 setelah sebelumnya menggunakan SK Kumuh 2020 dengan total luasan kumuh 128,59 .

Pada tahun 2025 luasan kawasan kumuh yang tertangani bertambah 6,92 Ha. Sehingga luasan kawasan kumuh Salatiga saat ini menjadi 18,97 Ha atau 0,35 % dari total luas Kota Salatiga yaitu 5.498 Ha.

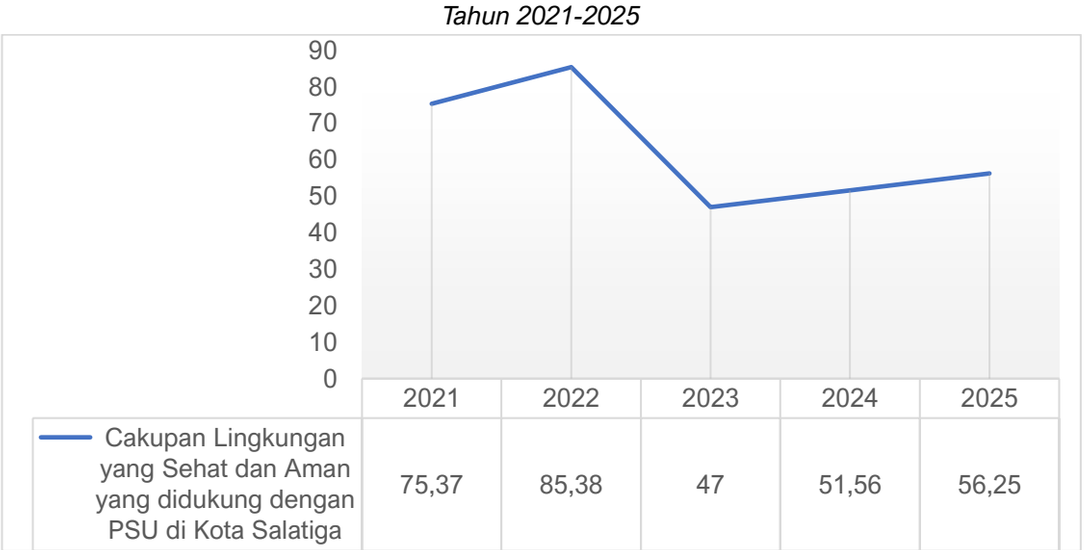
Grafik 2. 54. Prosentase Lingkungan Permukiman Kumuh Perkotaan di Kota Salatiga Tahun 2021-2025



Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Tahun 2025

Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU pada tahun 2025 ditargetkan 55% mencapai realisasi 56,25%. Persentase ini dicapai dari jumlah perumahan yang sudah dibangun terfasilitasi PSU sebanyak 36 perumahan dibagi jumlah perumahan yang sudah diserahkan sebanyak 64 perumahan dikalikan 100%.

Grafik 2. 55. Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman di Kota Salatiga Tahun 2021-2025



Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Tahun 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 2. 38. Luas PSU berdasarkan BA/SK

NO	NAMA PERUMAHAN	PERUNTUKAN	LUAS BA	NO HGB	LUAS BIDANG
A	**GRIYO KECANDRAN**	1. Jalan dan drainase	542,69	3300	542,69
B	**PURI KARANG PADANG TAHAP 3**	1.Jalan Dan Drainase	887,2	2457 &3275	887
		2.RTH 1	481,05		481,05
C	**PESONA MERBABU 5**	1. Jalan dan Drainase 1	1650,71	118	1650,71
		2.Jalan dan Drainase 2	105,77	184	105,77
		3. sumur Resapan	369,07	1303	369,07
D	**GRAND VISARA**	1.Jalan dan Drainase	1008,8		885,95
		2.RTH 1	102,66		122,85
		3.RTH 2	83,15		235,48
		4. Ruang Terbuka	115,17		115,17
E	**AMAYA TOWN HOUSE**				
	Ngemplak rt 01 rw 02	1.Lalan dan Drainase	586,44	713	586,44
	Kel. Dukuh	2. Ruang terbuka	25		25
F	**TAMAN ASRI REGENCY**				
	Rt 01 Rw 01	1. Jalan dan Drainase 1	191,34		191,34
	Kel. Cebongan	2. Jalan dan Drainase 2	134,3		134,3
G	**Griya Dukuh Asri**	1.Balai rt 01	250		250
		2.Balai Rw, Balai Rt 02, Lapangan Voli, Masjid,dan RTH	1304		1304
		3.Balai Rt 03 dan Lapangan Voli	400		400
		4.Balai Rt 04	120		120
		5.Jalan, Drainase dan RTH	350		350
I	**RTH Benoyo**	1.RTH Benoyo	594		594

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga, 2025

Rumah tangga dengan akses hunian layak yang ditargetkan 95% terealisasi 95,57 %, dengan capaian kinerja sebesar 100,61%. Realisasi peningkatan kualitas RTLH yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, sampai dengan tahun 2025 adalah sebanyak 2.674 unit, dengan rincian penambahan sebagai berikut:

a) Tahun 2017 sebanyak 411 unit;
b) Tahun 2018 sebanyak 58 unit;
c) Tahun 2019 sebanyak 415 unit;
d) Tahun 2020 sebanyak 340 unit;
e) Tahun 2021 sebanyak 226 unit;
f) Tahun 2022 sebanyak 211 unit;
g) Tahun 2023 sebanyak 416 unit;

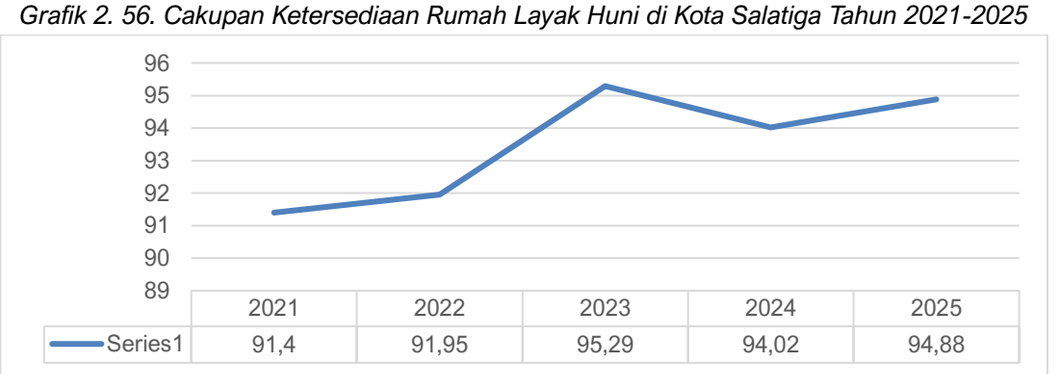
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

h) Tahun 2024 sebanyak 241 unit dan

i) Tahun 2025 sebanyak 356 unit.

Pada tahun 2025 target RPD untuk peningkatan kualitas RTLH tahun 2025 sejumlah 88 unit, terealisasi 356 unit, hal ini mengalami peningkatan 47% dibanding 2024 yang hanya 241 unit. Rumah tangga dengan akses hunian layak (ketersediaan rumah layak huni) yang ditargetkan 95% di tahun 2025, terealisasi sebesar 94,88 %, yang dihitung berdasarkan prosentase perbandingan antara jumlah rumah layak huni tahun 2025 sejumlah 45.551 rumah dan jumlah rumah sekota Salatiga pada tahun 2025 sejumlah 48.008 rumah, dengan capaian kinerja sebesar 99,87%. Capaian ini juga menggambarkan capaian SDGs Perumahan Rakyat yang menggunakan indikator capaian ketersediaan Rumah Layak Huni sebagai pengukur keberhasilan kinerja SDGs.

Grafik 2. 56. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni di Kota Salatiga Tahun 2021-2025



Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Tahun 2025

Untuk mengukur kesejahteraan rumah tangga di Kota Salatiga pada sektor perumahan menggunakan indikator Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak. Indikator tersebut menjadi salah satu kebijakan RKPD Kota Salatiga tahun 2027 yang selanjutnya ditetapkan dalam target kinerja mendukung Indikator Utama Pembangunan pada RPJPD 2025-2045. Capaian Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak pada tahun 2025 sebesar 99,87% yang dijadikan dasar untuk penetapan target pada tahun 2027.

Indikator SPM Bidang Perumahan rakyat berupa Presentase jumlah Warga Negara korban bencana kota yang memperoleh rumah layak huni dan Presentase jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah Kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah layak huni untuk Kota Salatiga sampai saat ini masih belum terdata secara lengkap. Hal ini dikarenakan masih belum adanya inventarisasi obyek penerima layanan SPM bidang Perumahan Rakyat, Data Program Pemerintah yang berkaitan dengan relokasi penduduk serta integrasi informasi kebencanaan Kota Salatiga.

Walaupun capaian indikator SPM Bidang Perumahan Rakyat sampai dengan tahun 2025 belum bisa dihitung karena tidak adanya realisasi kegiatan, tetapi program-program pendukung penerapan SPM bidang Perumahan Rakyat telah difasilitasi oleh Pemerintah Kota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Salatiga berupa pengalokasian anggaran untuk mewujudkan kebutuhan dasar masyarakat atas perumahan.

Pengalokasian anggaran tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kota serta fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kota. Pada tahun 2025, realisasi capaian indikator program kegiatan yang mendukung indikator tersebut mencapai target yang ditetapkan dengan rata-rata capaian 100%.

Tabel 2. 39. SPM Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat

No.	Jenis Pelayanan Dasar	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kota	0	100	100	100	100

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Tahun 2025

Pada Tahun 2025 di Kota Salatiga tidak terdapat bencana, sehingga Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat jenis pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota tidak ada pemenuhan penerima layanan dasar dan tidak terdapat pencapaian mutu minimal layanan dasar dan Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota.

Tabel 2. 40. Capaian SDGs Perumahan Rakyat

NO	INDIKATOR NASIONAL	INDIKATOR KOTA SALATIGA	SATUAN	TAHUN				
				2021	2022	2023	2024	2025
1	Proporsi rumah tangga yang memilki hunian yang layak dan terjangkau	Rumah tangga dengan akses hunian layak	Persen	91,4	91,95	95,29	94,02	94,88

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Tahun 2025

e. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Dalam meningkatkan ketentraman, ketertiban dan kondusifitas wilayah di Kota Salatiga ditunjang dengan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang ada. Rasio Linmas dibanding penduduk kota salatiga yaitu 74 orang Linmas per 10.000 penduduk. Perkembangan rasio pertugas Linmas dalam kurun waktu 2021-2025 sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 2. 41. Rasio Linmas Dibanding Jumlah Penduduk Kota Salatiga Tahun 2021-2025

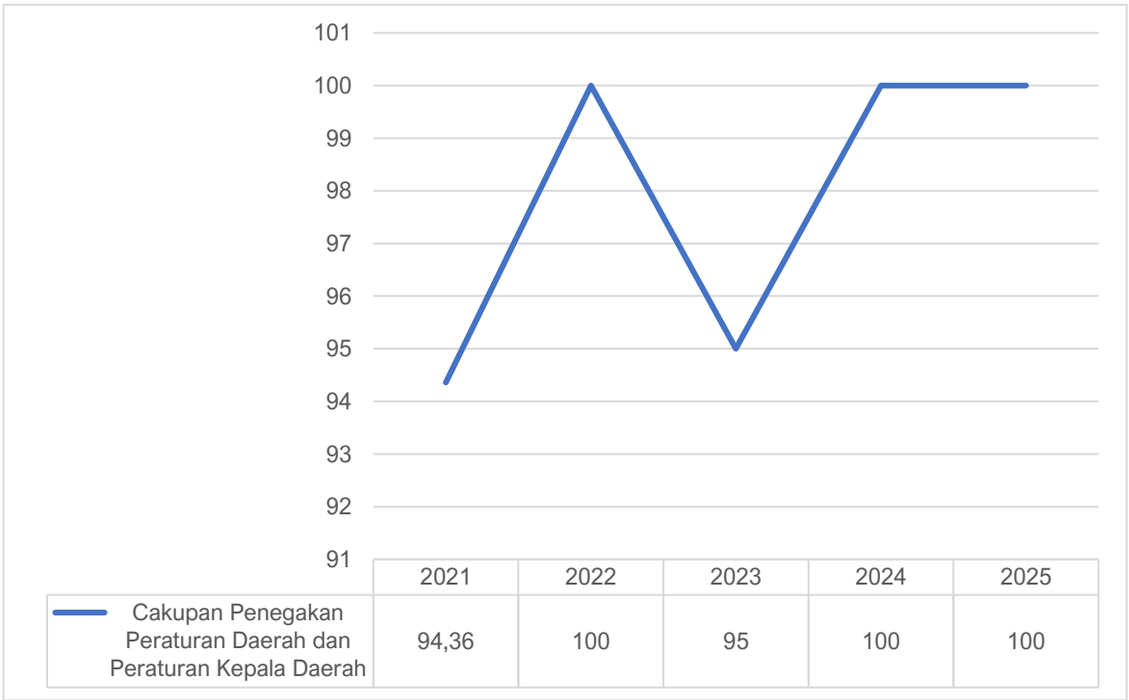
	2021	2022	2023	2024	2025
Jml linmas	1.264	1258	1312	1467	1483
Jml Penduduk	196.440	200.220	201.369	198.971	199.906
Rasio 1 : x	155	159	153	135	134
rasio per 10.000	64	62	65	73	74

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja, Tahun 2024

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kondusifitas wilayah tergambar dari penegakan PERDA di Kota Salatiga relatif stabil dalam kurun waktu 2021-2025. Cakupan penegakan perda pada tahun 2025 sebesar 100% Dengan penyelesaian sejumlah 309 kasus dari 315 kasus pelanggaran PERDA dan PERKADA sedangkan yang lainnya sudah ditindaklanjuti dan diselesaikan tetapi masih ada yang dalam proses administrasi APIP.

Grafik 2. 57. Cakupan Penegakan PERDA dan PERKADA di Kota Salatiga Tahun 2021-2025



Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja, Tahun 2024

Tabel 2. 42. Capaian Indikator Kinerja Daerah Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPD-2023 2026	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Kinerja RPD s.d Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja RPD s.d Tahun 2024 (%)	Kategori Status	Status
1)	Persentase Penegakan Perda dan Gangguan Trantibum yang diselesaikan	%	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Tercapai
2)	Cakupan pelayanan kebakaran kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Tercapai
3)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba	%	1.70	1.71	1.66	1.66	102,92	Sangat Tinggi	Tercapai
4)	Terselesainya kasus konflik horisontal secara damai dan adil baik terkait sosial, budaya maupun politik	%	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Tercapai

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Bakesbangpol, BPDB Tahun 2024

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ditargetkan 100% pada tahun 2025 terealisasi sebanyak 100% dikarenakan dengan kategori sangat berhasil, dikarenakan setiap pelanggaran yang dilaporkan masyarakat ke Satpol PP sudah ditindaklanjuti dan diselesaikan tetapi masih ada yang dalam proses administrasi.

Prevalensi penyalahgunaan narkoba yang ditargetkan 1.7 per 10.000 penduduk ditangani oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga, terealisasi 0,85. Realisasi tersebut menunjukkan bahwa masih ada kasus penyalahgunaan Narkoba sebanyak 1.71 orang per 10.000 penduduk atau di tahun 2025, atau masih ada 17 kasus penyalahgunaan narkoba. Capaian Prevalensi penyalahgunaan narkoba untuk akhir RPD ditargetkan 1,70, sedangkan realisasi pada tahun 2025 tercapai 0,85, sehingga capaian kinerja mencapai 150% dengan status Tercapai.

Terselesainya kasus konflik horisontal secara damai dan adil baik terkait sosial, budaya maupun politik target 100% dan realisasi 100% serta capaian realisasi 100% dan target RPD tahun 2026 sebesar 100% maka status tercapai. Faktor keberhasilan diantaranya :

1) Adanya koordinasi rutin pada Tim Penanganan Konflik Sosial, Tim Cipta Kondusifitas dan FKDM serta Foeum Komunikasi Pimpina Daerah.
2) Sinergitas dan komunikasi antara Pemerintah Kota , TNI, Polri , FKDM dan masyarakat sehingga mampu menciptakan kondusifitas wilayah

Pada tahun 2025 target yang ditetapkan untuk Kelurahan Tangguh Bencana sebesar 19,00% dan terealisasi 26,08% dengan capaian 137,26% yang diperoleh dari perbandingan antar target 17,00% dengan realisasi 26,08% sehingga capaiannya 137,26 %, dengan status tercapai. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan ini karena pada tahun 2024 BPBD Kota Salatiga telah membentuk 2 (dua) kelurahan Tangguh Bencana yaitu di Kelurahan Blotongan dan Kelurahan Kauman Kidul.

Target yang ditetapkan untuk Indeks Resiko Bencana Pada tahun 2024 sebesar 90,45% dan terealisasi 90,89% dengan capaian 100,10% dan target RPD Tahun 2026 sebesar 90.00% maka status tercapai. Penyebab keberhasilan ini karena terjalinnya koordinasi dan komunikasi yang baik antar perangkat daerah yang terlibat dalam penyusunan indeks Ketahanan daerah.

Tabel 2. 43. SPM Pelayanan Dasar Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Jenis Pelayanan Dasar	2021	2022	2023	2024	2025
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	100	100	100	100	96.67
2	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	100	100	100	100
3	Pelayanan informasi rawan bencana	100	100	100	100	BPBD
4	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	100	100	100	BPBD
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100	100	100	BPBD

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja, Tahun 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Seluruh Indeks Penerapan SPM bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sampai dengan 2025 hanya sebesar 96.67% dengan kategori Tuntas Utama. Hal ini disebabkan karena kesalahan sistem di spm bangda kemendagri yang tidak bisa meloloskan upload SOP pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda/Perkada terhadap pelayanan kerugian material. Dari permasalahan masih ada beberapa hal yang menjadi kendala dari Satpol PP dan BPBD dalam pencapaian SPM tahun 2025 diantaranya:

1) Masih adanya SDM PNS Pemadam kebakaran yang berum bersertikat. pemadam kenakaran hanya ada 3 yang sudah uzur semua paling muda tahun 2009
2) Belum tersedianya gedung BPBD yang berfungsi untuk penyimpan logistik dan peralatan bencana.

Tabel 2. 44. Capaian SDGs Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

NO	INDIKATOR NASIONAL	INDIKATOR KOTA SALATIGA	SATUAN	TAHUN				
				2021	2222	2023	2024	2025
1	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	orang		0	0,00	1	0
2	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi	Indeks	91,2	90,89	94	76,52	98,79
3	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB)	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB)	Dokumen	Belum	1	1	1	1 (sudah terpenuhi di tahun 2024)
4	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	kecamatan	Belum	Belum	4	4	4
5	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	Dokumen	Belum	1	1	1	1 (sudah terpenuhi di tahun 2024)
6	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	Indeks	91,2	90,89	84	76,52	98,79

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

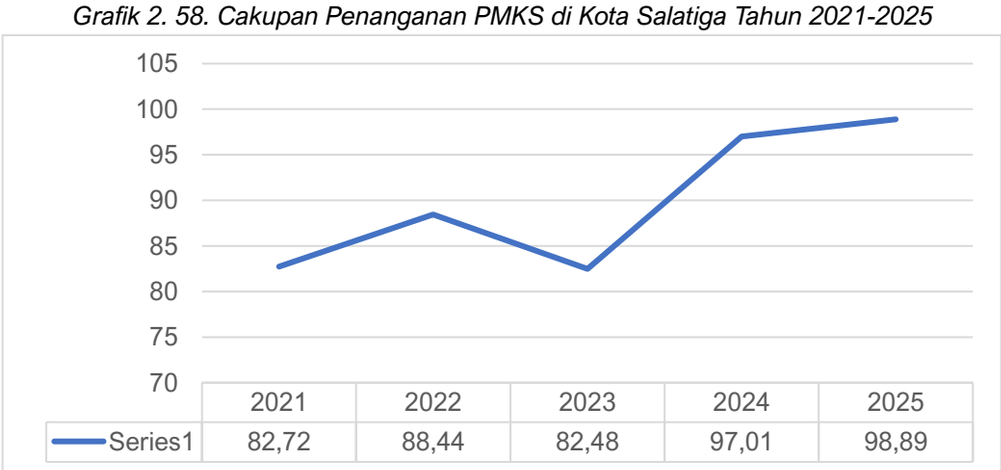
NO	INDIKATOR NASIONAL	INDIKATOR KOTA SALATIGA	SATUAN	TAHUN				
				2021	2222	2023	2024	2025
7	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) daerah	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) daerah	Dokumen	Belum	1	1	1	1 (sudah terpenuhi di tahun 2024)
8	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir	Kasus	0	0	1,00	0 kasus	0 kasus
9	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk	NA	0 kasus	0 kasus	0 kasus	0 kasus	0 kasus

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Bakesbangpol, BPDB Tahun 2025

f. Urusan Sosial

Pada tahun 2025 penduduk Salatiga yang terdata DTKS, selanjutnya mulai tahun 2025 disebut dengan DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) sebanyak 72.146 orang dan yang sudah diverifikasi dan validasi (Verval) sebanyak 70.625 orang, sehingga cakupan penduduk memenuhi kreteria yang terdata dalam DTKS mencapai 97,89.

Grafik 2. 58. Cakupan Penanganan PMKS di Kota Salatiga Tahun 2021-2025



Sumber : Dinas Sosial, Tahun 2024

Cakupan penduduk terdata DTKS yang ditangani ditargetkan 95% terealisasi 97.01% dan capaian kinerja di Tahun 2024 sebesar 102,11% dengan status Tercapai.

Faktor yang menyebabkan tercapainya capaian indikator cakupan penduduk memenuhi kriteria yang terdata dalam DTKS adalah melaksanakan koordinasi yang intensif secara vertikal dan horisontal dengan stakeholder dan mitra lembaga pemberdayaan sosial dalam pelaksanaan penanganan masalah kesejahteraan sosial antara lain :

1) pemberian perlindungan dan jaminan sosial termasuk penyaluran bantuan sosial

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2) penanganan rehabilitasi sosial Pemerlu Kesejahteraan sosial yaitu antara lain anak terlantar, anak jalanan/gelandangan pengemis, Anak Berhadapan dengan Hukum, Lanjut usia terlantar, difabel, kelompok rentan;
3) penanganan layanan kedaruratan sosial termasuk bencana alam dan non alam
4) verifikasi dan validasi DTKS (data kemiskinan /penerima bansos)

Tabel 2. 45. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Sosial

Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPD-2023 2026	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPD s.d Tahun 2025	Realisasi Capaian Kinerja RPD s.d Tahun 2025 (%)	Kategori Status	Status
Cakupan penduduk terdata DTKS yang ditangani	%	70	92.8	97.95	97.95	105,55	Sangat Tinggi	Tercapai

Sumber : Dinas Sosial, Tahun 2025

Standar pelayanan minimal urusan sosial yang menjadi kewenangan kabupaten/kota berdasarkan PP 2 Tahun 2018 terdiri atas rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti, rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti, rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti, rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti, perlindungan dan jaminan sosial ada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota. Realisasi SPM tahun 2020-2023 sebagai berikut :

Tabel 2. 46. SPM Pelayanan Dasar Urusan Sosial

No.	Jenis Pelayanan Dasar	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Panti	100	98,73	100	100	100
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Luar Panti	70	100	100	100	100
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Di Luar Panti	100	100	100	100	100
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis Di Luar Panti	100	99,72	100	100	100
5.	Perlindungan Dan Jaminan Sosial Ada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial, Tahun 2025

Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial sebagaimana diamanahkan pada Permendagri 59 Tahun 2021 untuk Kota Salatiga sampai dengan tahun 2025 untuk semua jenis pelayanan telah berada pada Kategori Tuntas Paripurna, sehingga IP SPM Bidang Sosial di Kota Salatiga dikategorikan Tuntas Paripurna.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 2. 47. Capaian SDGs Urusan Sosial

NO	INDIKATOR NASIONAL	INDIKATOR KOTA SALATIGA	SATUAN	TAHUN				
				2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan	Angka	5,14	4,73	4,66	4,57	4,20
2	Presentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas	Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Persen	53,20	55,60			
3	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang memperoleh Rehabilitasi Sosial dasar di luar panti	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang memperoleh Rehabilitasi Sosial dasar di luar panti		100	99,72	100	100	100
4	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Jumlah	4491	5.093	4.470	4.847	4.277
5	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	Jiwa		0	0 (tidak pernah terjadi kasus bencana sosial)	0 (tidak pernah terjadi kasus bencana sosial	0 (tidak pernah terjadi kasus bencana sosial
6	Koefisien Gini	Indeks Gini (Gini Ratio)	Angka Komposit	0,41	0,45	0,417	0,402	0,412

Sumber : Dinas Sosial, Tahun 2025

2.4.2 Fokus Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

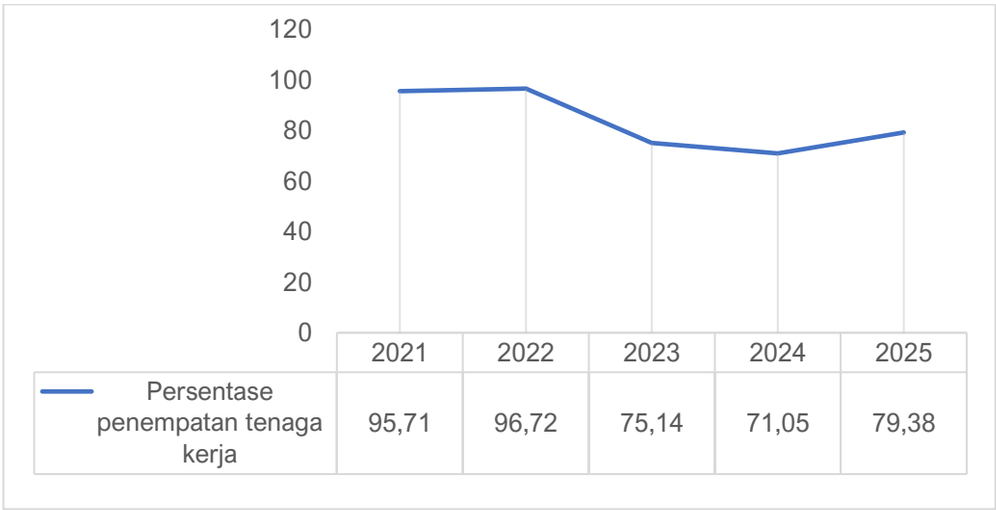
Gambaran aspek pelayanan umum pada fokus urusan wajib non pelayanan dasar terlihat pada capaian indikator kinerja masing-masing urusan sebagai berikut:

a. Tenaga kerja

Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota pada tahun 2025 mencapai 79,38% yang mengalami kenaikan dari tahun 2024 yaitu 71,05 %. Hal ini di sebabkan karena adanya kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki pencari kerja dengan pasar kerja yang tersedia.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Grafik 2. 59. Persentase Penempatan Tenaga Kerja di Kota Salatiga Tahun 2020-2024



Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Tahun 2023

Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah salah satunya ditentukan oleh tingkat pendidikan, artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3. Pada tahun 2025 jumlah penduduk lulusan S1/S2/S3 di Kota Salatiga sebanyak 21.511 jiwa, sedangkan total jumlah penduduk 199.350 jiwa atau 10,79%. Pada Agustus 2025, penduduk bekerja masih didominasi oleh mereka yang berpendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Kejuruan yaitu sebanyak 25,69 persen.

Tabel 2. 48. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Tenaga Kerja

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPD-2023 2026	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPD s.d Tahun 2025	Realisasi Capaian Kinerja RPD s.d Tahun 2025 (%)	Kategori Status	Status
1)	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang memiliki ijin	%	100	90	68	68	75,56	Tinggi	Akan tercapai
2)	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	%	50	74,92	79,38	79,38	105,96	Sangat Tinggi	Tercapai
3)	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	juta%	99.72	110,18	104,297	104,297	94,66	Sangat Tinggi	Tercapai
4)	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	%	76.9	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Tercapai

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Tahun 2025

Capaian Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang memiliki ijin yang ditargetkan 90% terealisasi 68% dengan capaian kinerja sebesar 75,56% dengan status akan tercapai.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Faktor yang melatarbelakangi belum tercapainya ini disebabkan kurangnya perhatian dan kesadaran Lembaga Pelatihan Kerja dalam hal pelaporan, upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan rapat koordinasi dan kunjungan ke Lembaga Pelatihan Kerja.

Capaian prosentase pencari kerja yang ditempatkan yang ditargetkan 74,92% terealisasi melebihi target yaitu mencapai 79,38% dengan target RPD tahun 2026 sebesar 50% dan capaian sebesar 105,96 % dengan status tercapai. Faktor pendukung diantaranya salah satu perusahaan besar di Kota Salatiga mempunyai program perekrutan tenaga kerja. Tingkat produktifitas tenaga kerja yang ditargetkan 110,18% dengan realisasi 104,297% dan capaian sebesar 96,44% dan target RPD sebesar 99.72% dengan status akan tercapai.

Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga kerja ditargetkan 100% terealisasi sebesar 100% dengan capaian 100% dan target RPD tahun 2026 sebesar 76.9% dengan status tercapai.

1) Faktor keberhasilan ini karena Perencanaan kegiatan sejalan dan mengacu pada dokumen rencana tenaga kerja daerah.
2) Perencanaan kegiatan mempertimbangkan kebutuhan di lapangan yang diinventarisir pada saat melakukan tugas dan fungsi pengawasan dan pembinaan

Tabel 2. 49. Capaian SDGs Urusan Tenaga Kerja

NO	INDIKATOR NASIONAL	INDIKATOR KOTA SALATIGA	SATUAN	TAHUN				
				2021	2022	2023	2024	2025
1	Presentase Tenaga kerja formal	Presentase Tenaga kerja formal	Persen	50,5	60,67	68	59,37	54,20
2	Presentase Tenaga kerja informal sektor pertanian	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja di sektor pertanian	Persen		2,82	3,27	3,91	5,30
3	Upah rata-rata per jam pekerja.	Rata-rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai	Rupiah		3.032.318	2.952.582	18.881	20.108
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Tingkat Penggangguran Terbuka	Persen	7,26	5,58	4,57	3,86	3,67

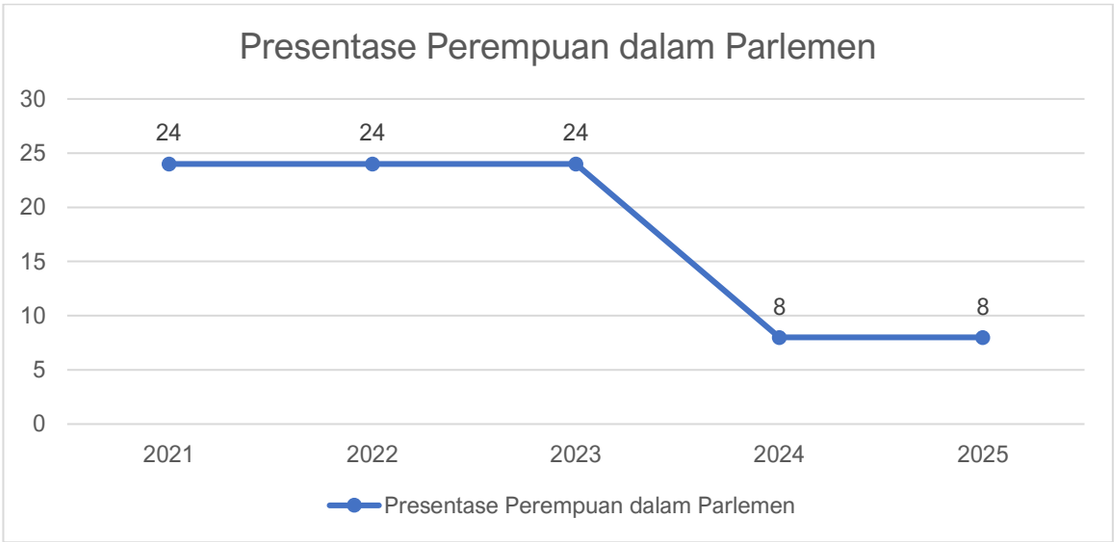
Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Tahun 2025

b. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

Pada tahun 2025 persentase perempuan dalam parlemen di Kota Salatiga sebanyak 8 % atau sebanyak 2 orang perempuan dari 25 orang jumlah keseluruhan Anggota DPRD Salatiga hasil Pemilu 2025.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

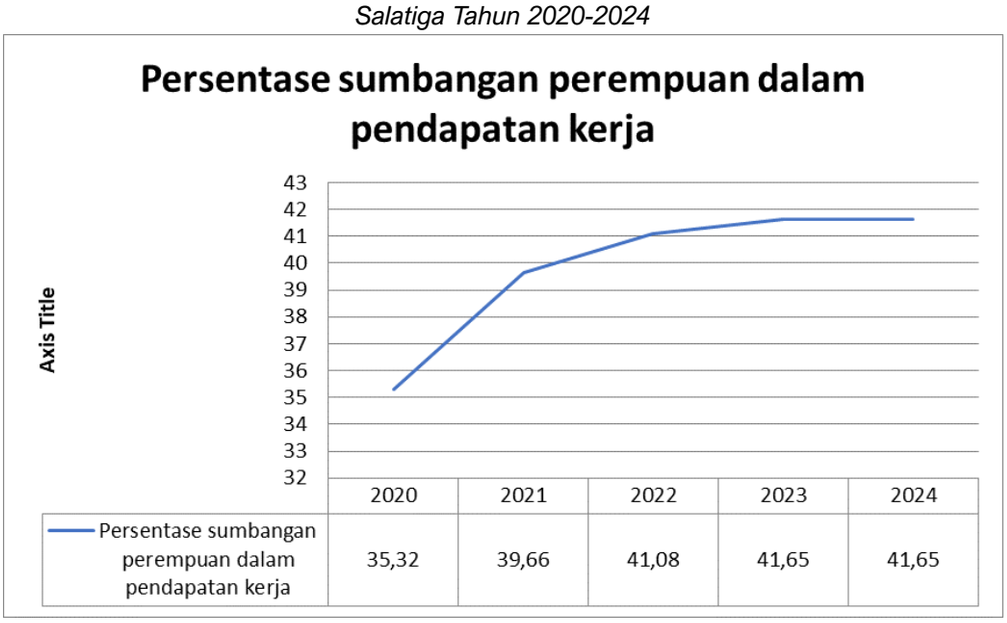
Grafik 2. 60. Cakupan Presentase Perempuan dalam Parlemen di Kota Salatiga Tahun 2021-2025



Tahun 2025 sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, belum dirilis oleh BPS Kota Salatiga, namun sebagai bahan penyusunan RKPD tahun 2027, untuk sementara kita menggunakan capaian sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja pada tahun 2024. Presentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja tahun 2024 mencapai 41.65% dari target yang ditetapkan sebesar 40% sehingga capaian kinerjanya 1.65%.

Angka tersebut sama dengan capain kinerja pada tahun 2023 dengan target yang ditetapkan sebesar 40% terealisasi sebesar 41,65%. Faktor pendukungnya diantaranya adanya pelatihan – pelatihan yang mendorong upaya peningkatan peran serta gender dan peningkatan ekonomi rumah tangga terhadap masyarakat khususnya perempuan di Kota Salatiga juga semakin mudahnya akses bagi kaum perempuan untuk mendapatkan pekerjaan di sektor formal.

Grafik 2. 61. Cakupan Presentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja di Kota Salatiga Tahun 2020-2024



Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 7 Mei 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pada tahun 2025 masih terdapat banyak kasus kekerasan, jumlah kekerasan pada anak sebanyak 57 kasus sedangkan kasus kekerasan pada perempuan sebanyak 30 kasus. Hal tersebut mengalami peningkatan pada tahun 2024 kasus kekerasan pada anak sebanyak 33 kasus, dan untuk kasus kekerasan terhadap perempuan sebanyak 23 kasus. Melihat masih tingginya kasus kekerasan setiap tahunnya menunjukan bahwa kasus kekerasan menjadi isu penting yang harus segera ditangani. Di sisi lain juga menunjukkan bahwa korban kekerasan sudah mulai berani untuk mengadukan kasus kekerasan yang dialaminya, terlebih dengan kemajuan teknologi maka kasus pengaduan kekerasan bisa dilakukan secara online.

Tabel 2. 50. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPD-2023 2026	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPD s.d Tahun 2025	Realisasi Capaian Kinerja RPD s.d Tahun 2025 (%)	Kategori Status	Status
1)	Persentase kelembagaan forum anak tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan	%	39.29	35.71	100.00	100.00	280	Sangat Tinggi	tercapai

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Tahun 2025

Persentase kelembagaan forum anak tingkat kota, kecamatan dan kelurahan yang ditargetkan 35.71% terealisasi 100%. Angka tersebut didapatkan dari perhitungan jumlah kelembagaan forum anak yang sudah terbentuk di Kota Salatiga yaitu mulai dari 1 kelembagaan forum anak tingkat kota, 4 kelembagaan forum anak tingkat kecamatan dan 23 kelembagaan forum anak tingkat kelurahan. Berdasarkan target RPD tahun 2026 sebesar 39,29 % dan tahun 2025 capaian kinerjanya sebesar 280% dengan status tercapai.

Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja tidak terlepas dari semua pihak dan stakeholder terkait, karena komitmen untuk membentuk kelembagan forum anak,khususnya dari Rumanksa selaku Forum Anak Tingkat Kota di Salatiga yang aktif dalam berbagai kegiatan. Tidak terlepas juga dari keanggotan Rumanksa yang diisi oleh anak-anak milenial yang melek akan teknologi, sehingga lebih bisa meningkatkan kinerja untuk mendukung terlaksananya kegiatan-kegiatan yang ada

Tabel 2. 51. Capaian SDGs Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	INDIKATOR NASIONAL	INDIKATOR KOTA SALATIGA	SATUAN	TAHUN				
				2021	2022	2023	2024	2025
1	Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan	Prevalensi kekerasan terhadap anak	Persen	0,037	0,05	0,02	0,06	0,06

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Tahun 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

c. Pangan

Tabel 2. 52. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Pangan

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPD-2023 2026	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPD s.d Tahun 2025	Realisasi Capaian Kinerja RPD s.d Tahun 2025 (%)	Kategori Status	Status
1)	Ketersediaan beras	%	70	100	70	267,67	382,34	Sangat Tinggi	tercapai
2)	Ketersediaan energi per kapita	kkal/kapita	2.487	2.487	2.487	2.796	112,26	Sangat Tinggi	tercapai
3)	Ketersediaan protein perkapita	gram/kapita	111	110	110	78,06	70,96	Tinggi	Akan Tercapai
4)	Rasio ketersedian pangan sesuai kebutuhan	%	1.65	1,63	1,63	1,57	100	Sangat Tinggi	Tercapai

Sumber : Dinas Pangan dan Pertanian, Tahun 2025

Ketersediaan beras ditargetkan 70% dengan realisasi 267,67% dan capaian realiasi kinerja 382,34% dimana target dalam dokumen RPD tahun 2025 sebesar 70% sehingga status tercapai. Ketersediaan energi per kapita target sebesar 2.487 kkal/kapita dengan realisasi 2.796 kkal/perkapita dengan capaian realisasi 112,26 % dimana target dalam dokumen RPD tahun 2025 sebesar 2.487 kkal/perkapita sehingga status tercapai.

Capaian yang melebihi target ini dikarenakan terjaminnya pasokan bahan makanan dari luar Kota Salatiga, khususnya kelompok bahan makanan penghasil energi seperti beras, jagung, tepung gandum, ubi kayu, ubi jalar, dan gula. Pasokan dari luar kota menjadi sangat strategis karena Kota Salatiga bukan merupakan daerah penghasil bahan pangan pokok. Ketersedian protein per kapita adalah komponen dalam perhitungan ketersedian pangan per hari. Angka ini diperoleh dari komponen bahan makanan produk hewani dan kacang-kacangan.

Pada Tahun 2025 ketersediaan protein perkapita dengan target 110 gram/kapita dan realisasi 78,06 gram/kapita , capaian kinerja sebesar 70.06 gram/kapita serta target RPD Tahun 2026 sebesar 111 gram/kapta maka status akan tercapai. Hal ini menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 2 point. Jika mengacu pada ketersediaan protein yang ditetapkan oleh Widya Karya Pangan Nasionaldan Gizi X Tahun 2012 yaitu 63 gr/kapita/hari untuk protein. Kelompok bahan makanan buah/biji berminyak dan kacang-kacangan memiliki skor dibawah skor maksimal, sehingga ketersediaan pada kelompok bahan makanan ini perlu ditingkatkan melalui peningkatan produksi maupun ekspor dari daerah lain.

Rasio ketersediaan pangan sesuai kebutuhan dengan target 1,57% dan realisasi sebesar 1.57% dengan capaian kinerja 100% dan target RPD Tahun 2026 sebesar 1,63% sehingga status tercapai.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pada Renstra 2025-2029, indikator Kinerja Urusan Daerah (IKD) untuk Ketersediaan energi per kapita (kkal/kapita) dan Ketersediaan Protein Per kapita (Gram/Kapita) sudah tidak dicantumkan dalam indikator Urusan Pangan. Faktor yang mendorong keberhasilan dalam indikator Ketersediaan Pangan Sesuai Kebutuhan adalah ketersediaan pangan dalam memenuhi kebutuhan pangan yang ada di Kota Salatiga. Meskipun Salatiga bukan kota pertanian, akan tetapi kebutuhan pangan di Masyarakat

Tabel 2. 53. Capaian SDGs Urusan Pangan

NO	INDIKATOR NASIONAL	INDIKATOR KOTA SALATIGA	SATUAN	TAHUN				
				2021	2022	2023	2024	2025
1	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan	Penguatan cadangan pangan	Persen	70,00	100,00	100	267,67	267,67
2	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	nilai	90	95,51	92,4	94,4	92,73

Sumber : Dinas Pangan dan Pertanian, Tahun 2025

Prevalence of Undernourishment (POU) Kota Salatiga Tahun 2021–2025

Prevalence of Undernourishment (POU) atau prevalensi kekurangan gizi merupakan indikator yang mengukur proporsi penduduk yang mengalami kekurangan asupan kalori secara kronis. Sebagai indikator yang bersifat negatif, semakin rendah nilai POU maka semakin baik kondisi ketahanan pangan dan gizi masyarakat di suatu wilayah.

Data POU Kota Salatiga dalam kurun waktu 2021 hingga 2025 menunjukkan tren yang menggembirakan. Pada tahun 2021, nilai POU tercatat sebesar 6,89 persen, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 5,97 persen. Tren penurunan ini terus berlanjut pada tahun 2023 dengan nilai 5,83 persen, dan penurunan yang lebih signifikan terjadi pada tahun 2024 dengan nilai 4,04 persen. Pada tahun 2025, nilai POU bertahan di angka yang sama yaitu 4,04 persen, menunjukkan bahwa capaian yang telah diraih berhasil dipertahankan.

Penurunan POU secara konsisten dari 6,89 persen pada tahun 2021 menjadi 4,04 persen pada tahun 2024–2025 mencerminkan keberhasilan berbagai program pemerintah daerah Kota Salatiga dalam menangani permasalahan kekurangan gizi di masyarakat. Penurunan sebesar 2,85 poin persentase selama periode lima tahun ini mengindikasikan bahwa intervensi di bidang ketahanan pangan, peningkatan akses terhadap bahan pangan bergizi, serta program pemberdayaan masyarakat telah memberikan dampak yang nyata dan terukur.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Meskipun tren penurunan POU menunjukkan hasil yang positif, nilai POU yang stagnan antara tahun 2024 dan 2025 perlu menjadi perhatian bersama. Kondisi ini mengisyaratkan perlunya upaya yang lebih intensif dan inovatif untuk mendorong penurunan lebih lanjut, mengingat kelompok penduduk yang masih mengalami kekurangan gizi umumnya adalah kelompok yang paling rentan dan sulit dijangkau. Oleh karena itu, penguatan program ketahanan pangan berbasis komunitas, peningkatan akses layanan gizi, serta sinergi lintas sektor perlu terus dioptimalkan guna memastikan seluruh masyarakat Kota Salatiga dapat memenuhi kebutuhan pangannya secara layak dan berkelanjutan.

Indikator	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
POU	6,89	5,97	5,83	4,04	4,04

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kota Salatiga Tahun 2021–2025

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kota Salatiga dalam kurun waktu 2021 hingga 2025 menunjukkan perkembangan yang berfluktuasi. Pada tahun 2021, IKP Kota Salatiga tercatat sebesar 85,55 dan mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi 87,39. Tren positif ini terus berlanjut hingga mencapai puncaknya pada tahun 2023 dengan nilai 94,20, yang merupakan capaian tertinggi selama periode pengamatan. Namun demikian, pada tahun 2024 IKP mengalami penurunan menjadi 91,35, dan penurunan yang lebih signifikan terjadi pada tahun 2025 dengan nilai 79,33.

Penurunan IKP pada tahun 2025 perlu dipahami dalam konteks yang lebih komprehensif. Hal ini dikarenakan pada tahun 2025 terjadi pemutakhiran metodologi dan indikator perhitungan IKP yang mencakup tiga aspek utama, yaitu: (1) Aspek Ketersediaan Pangan, yang mengukur kecukupan pasokan dan produksi bahan pangan di wilayah Kota Salatiga; (2) Aspek Keterjangkauan Pangan, yang menilai kemampuan daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pangan yang bergizi dan memadai; serta (3) Aspek Pemanfaatan Pangan, yang mencerminkan kualitas konsumsi, keberagaman pangan, serta status gizi masyarakat.

Dengan adanya pemutakhiran indikator tersebut, perbandingan nilai IKP tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya perlu dilakukan secara hati-hati, karena perbedaan nilai yang terjadi tidak semata-mata mencerminkan penurunan kinerja ketahanan pangan, melainkan juga dipengaruhi oleh perubahan cakupan dan standar pengukuran yang lebih komprehensif dan terbarukan. Ke depan, pemutakhiran metodologi ini diharapkan dapat menghasilkan gambaran kondisi ketahanan pangan Kota Salatiga yang lebih akurat, terukur, dan selaras dengan standar nasional, sehingga dapat menjadi dasar perumusan kebijakan pangan yang lebih tepat sasaran bagi seluruh lapisan masyarakat.

Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
IKP	85,55	87,39	94,2	91,35	79,33

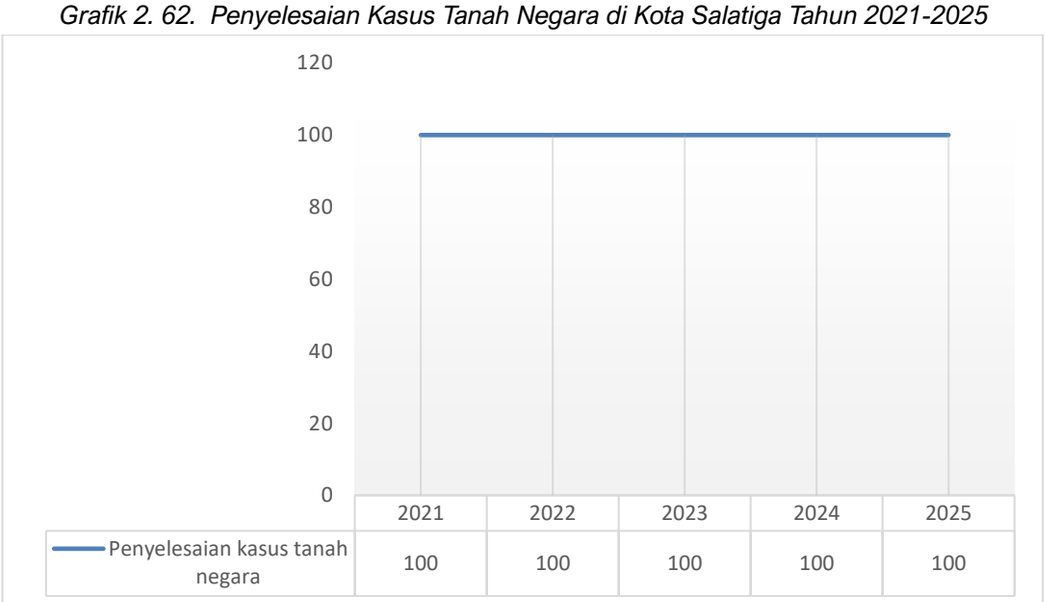
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

d. Pertanahan

Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi khususnya Persentase penyelesaian kasus tanah negara tahun 2025 ditargetkan sebesar 25% dan terealisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 400%. Pada Tahun 2025 tidak ada kasus sengketa tanah yang terjadi di Kota Salatiga.

Apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja di tahun 2024, realisasi kinerjanya sudah mencapai 100% dan menunjukkan bahwa realisasi kinerja telah mencapai target akhir RPJMD. Keberhasilan pencapaian kinerja ini didukung oleh terlaksananya koordinasi yang baik dengan OPD terkait yang mendukung dan bekerja sama dalam pelaksanaan penyelesaian permasalahan pertanahan. Selain itu, capaian kinerja ini juga didukung dengan adanya pelaksanaan Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dengan anggaran sebesar Rp12.506.000.00 dan terealisasi sebesar Rp0,00.

Grafik 2. 62. Penyelesaian Kasus Tanah Negara di Kota Salatiga Tahun 2021-2025



Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Tahun 2025

Tabel 2. 54. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Pertanahan

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPD-2023 2026	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPD s.d Tahun 2025	Realisasi Capaian Kinerja RPD s.d Tahun 2025(%)	Kategori Status	Status
1)	Prosentase luas lahan bersertifikat	%	100	100	71,95	71,95	89,93	Sangat Tinggi	Tercapai

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Tahun 2025

Persentase luas lahan bersertifikat ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 71,95%. Angka ini diperoleh dari luas PSU yang bersertifikat yaitu seluas 8.177,48 m^2 dibagi luas PSU yang telah diserahkan ke Pemerintah Kota Salatiga pada tahun 2025 yaitu seluas 11.365,25m^2 dikalikan 100%.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

e. Lingkungan Hidup

(1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

IKLH adalah nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu (*Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2025*), yang merupakan nilai komposit dari indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks kualitas lahan.

Dari hasil pemantauan, inventarisasi data dan perhitungan yang telah dilaksanakan di Kota Salatiga untuk tahun 2025 telah diperoleh nilai IKA, IKU, dan IKL sebagai berikut :

Tabel 2. 55. Indikator Kinerja Daerah Lingkungan Hidup

No	Indikator	satuan	2021	2022	2023	2024	2025
1)	Indeks pencemaran air	Nilai	42,50	45,00	-	-	-
2)	Indeks Kualitas Air (IKA)	nilai	-	-	44.29	48,67	73,76
3)	Indeks pencemaran udara	Nilai	79,82	84,11	-	-	-
4)	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Nilai	-	-	84.84	87,80	75,97
5)	Indeks tutupan lahan	Nilai	47,21	47,28	-	-	-
6)	Indeks Kualitas lahan (IKL)	nilai	-	-	33.62	34,67	46,58

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2025

Indeks Kualitas Air (IKA) adalah suatu nilai yang menggambarkan status dan kondisi mutu air di lokasi tertentu pada waktu tertentu. Realisasi Indeks Kualitas Air Tahun 2025 sebesar 73,76 meningkat dibanding tahun 2024 yang hanya sebesar 48,67. Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah nilai yang menggambarkan status dan kondisi mutu udara di lokasi tertentu pada waktu tertentu. Indeks Kualitas Udara (IKU) Tahun 2025 sebesar 75,97, lebih rendah dibandingkan tahun 2024 yang bernilai sebesar 87,90.

Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) adalah nilai yang menggambarkan status dan kondisi tutupan lahan di lokasi tertentu pada waktu tertentu. Indeks Kualitas Lahan (IKL) adalah nilai yang menggambarkan status dan kondisi tutupan lahan dengan menambahkan faktor koreksi pada ekosistem gambut di lokasi tertentu pada waktu tertentu. Untuk Kota Salatiga tidak ada ekosistem gambut, jadi faktor koreksi pada ekosistem gambut dianggap nol. Sehingga Nilai Indeks Kualitas Lahan Kota Salatiga Tahun 2025 adalah sama dengan IKTL yaitu sebesar 46,58, meningkat dibandingkan tahun 2024 yang bernilai sebesar 34,67.

Dari hasil indeks IKA, IKU dan IKL, dapat diperoleh capaian nilai IKLH di tahun 2025 sebagai berikut :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

IKLH = (0,376 x IKA) + (0,405 x IKU) + (0,219 x IKL)

= (0,376 x 73,76) + (0,405 x 75,97) + (0,219 x 46,58)

= 68,70

Capaian IKLH tahun 2025 sebesar 68,70 ini naik 7,25 point dari capaian IKLH tahun 2024 yang hanya sebesar 61,45. Hal ini menandakan bahwa kualitas lingkungan hidup di Kota Salatiga tahun 2024 semakin baik dibanding tahun sebelumnya. Upaya Peningkatan Kualitas Udara, Kualitas Air dan Tutupan Lahan serta pengelolaan sampah yang dilakukan Kota Salatiga di tahun 2025 semakin baik, sehingga berpengaruh signifikan terhadap kualitas Lingkungan Hidup tahun 2025 di Kota Salatiga.

(2) Potensi Energi Terbarukan

Data Potensi Energi Baru Terbarukan di Kota Salatiga adalah sebagaimana disajikan dalam bentuk tabel berikut ini.

Tabel 2. 56. Data Potensi Energi Baru Terbarukan Kota Salatiga

No	Infrastruktur EBT	2025	Jumlah Unit	Kapasitas	Keterangan
1.	Biogas	-	81	M3	63 unit biogas 7-8 m3, dan 18 unit biogas 12-15 m3
2.	PLTA	-	--	kW	
3.	PLTM	-	-	kW	
4.	PLTMH	-	-	kVa	
5.	PLTS SHS	-	-	kWp	
6.	PLTS Ground Mounted	-	-	kWp	
7.	PLTS Rooftop	4	36	kWp	
8.	PJUTS	-	-	-	
9.	Panas Bumi	-	-	-	
10.	PLTSA	-	-	-	PLTSa belum punya, adanya pirolis 2 unit di TP3R Bulu, Tegalrejo, Kec Argomulyo, Salatiga

(3) Data Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Berikut ini merupakan data dukung terkait Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 2. 57. Data Peningkatan Kapasitas dan Pengawasan Lingkungan

No	Uraian	TAHUN					Keterangan
		2021	2022	2023	2024	2025	
1.	Total Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan (dokumen)	159	49	34	13	18	SPPL yang dihitung adalah pengajuan SPPL manual bukan dengan system
2	Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi thd IL dan Izin PPLH (perusahaan)	65	53	52	73	130	
3	ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan thd IL dan Izin PPLH (persen)	41,54	5,66	7.69	17,81	9,23	ketaatan yang dimaksud adalah usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah kabupaten /Kota

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2025

(4) Data Emisi Gas Rumah Kaca

Besaran emisi Gas Rumah Kaca Kota Salatiga dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2020-2024 mengalami tren naik sebesar 28,36% atau 77,76 Gg CO2eq. Tren peningkatan tersebut dipengaruhi oleh sektor pengadaan dan penggunaan energi, yaitu mengalami peningkatan emisi sebesar 34,70% atau setara 71,33 Gg CO2eq. Peningkatan emisi juga dipengaruhi oleh sektor limbah yang mengalami peningkatan emisi sebesar 11,13% atau setara dengan 5,07 Gg CO2eq. Peningkatan emisi juga terjadi pada sektor IPPU yang mengalami peningkatan emisi di tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu sebesar 38,52% atau setara dengan 3,55 Gg CO2eq. Sedangkan untuk sektor AFOLU mengalami penurunan emisi sebesar 15,89% atau setara dengan 2,19 Gg CO2eq di tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun 2020. Besaran emisi Gas Rumah Kaca Kota Salatiga tahun 2020-2024 tidak menghitung emisi dari sumber bangkitan Listrik dikarenakan tidak ada industri energi atau pembangkit listrik di Kota Salatiga, hal ini berdasarkan Pedoman Penyusunan Data Aktivitas IGRK (Inventarisasi Gas Rumah Kaca) Pemerintah Daerah Sektor Energi Tahun 2020. Dalam kurun waktu 2020-2024, emisi tertinggi dihasilkan pada tahun 2024 sebesar 351,92 Gg CO2eq.

Berikut ini merupakan besaran tren emisi GRK pada setiap sektor di Kota Salatiga dalam kurun waktu 5 tahun (2020-2024):

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

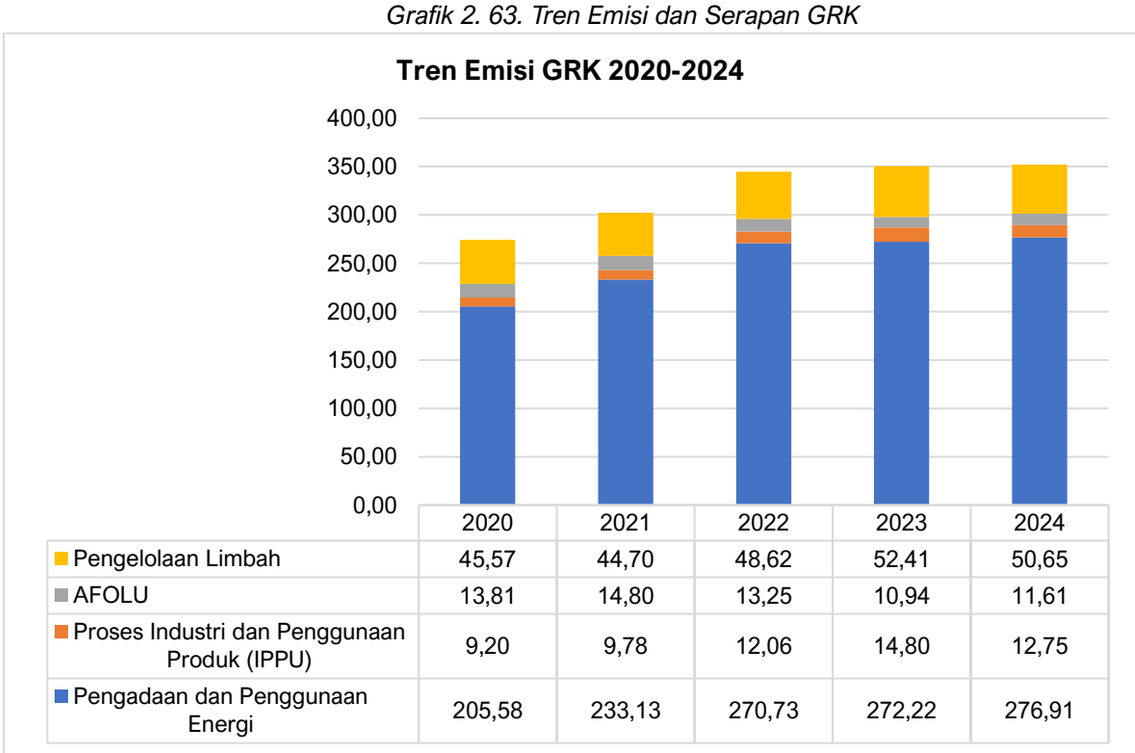
Tabel 2. 58. Total Emisi GRK Berdasarkan Sektor

Sektor	2020	2021	2022	2023	2024
Pengadaan dan Penggunaan Energi	205,58	233,13	270,73	272,22	276,91
Proses Industri dan Penggunaan Produk (IPPU)	9,20	9,78	12,06	14,80	12,75
AFOLU	13,81	14,80	13,25	10,94	11,61
Pengelolaan Limbah	45,57	44,70	48,62	52,41	50,65
Total	**274,17**	**302,41**	**344,66**	**350,37**	**351,92**

Sumber: Laporan GRK Kota Salatiga, 2025

Sedangkan untuk tren emisi masing masing sektor digambarkan sebagai berikut :

Grafik 2. 63. Tren Emisi dan Serapan GRK

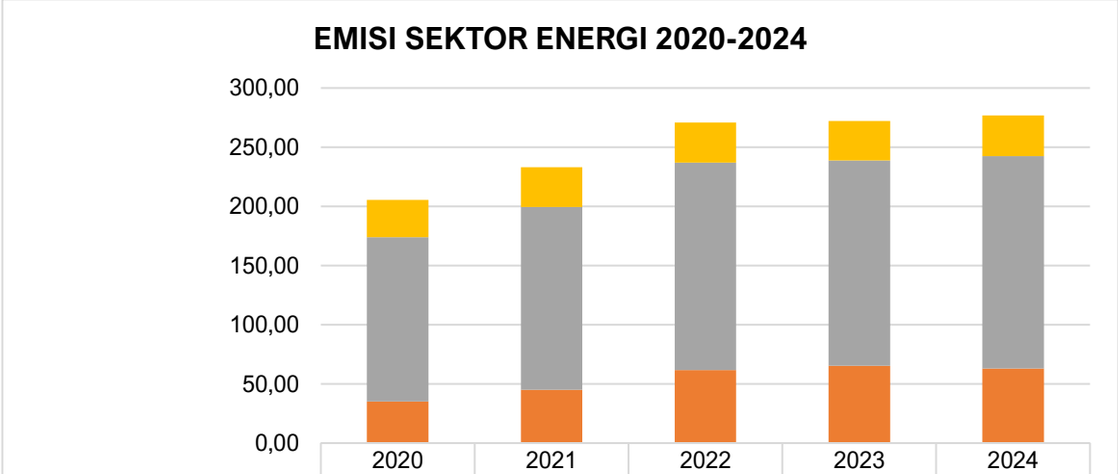


Sumber: Laporan GRK Kota Salatiga, 2025

Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang dihasilkan selama 2020-2024 untuk masing-masing sektor dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berbeda. Pada tahun 2024 sumber emisi yang berkontribusi terhadap emisi GRK paling tinggi yaitu: (1) sektor pengadaan dan penggunaan energi; (2) sektor pengelolaan limbah; (3) sektor IPPU; (4) sektor AFOLU dengan penjabaran sebagai berikut.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Grafik 2. 64. Tren Emisi GRK Sektor Pengadaan dan Penggunaan Energi 2020-2024



	2020	2021	2022	2023	2024
Residential	31,64	33,63	33,77	33,53	34,43
Transportasi	138,72	154,51	175,26	173,46	179,43
Industri Manufaktur dan Konstruksi	35,23	44,99	61,71	65,23	63,05
Industri Energi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: Laporan GRK Kota Salatiga, 2025

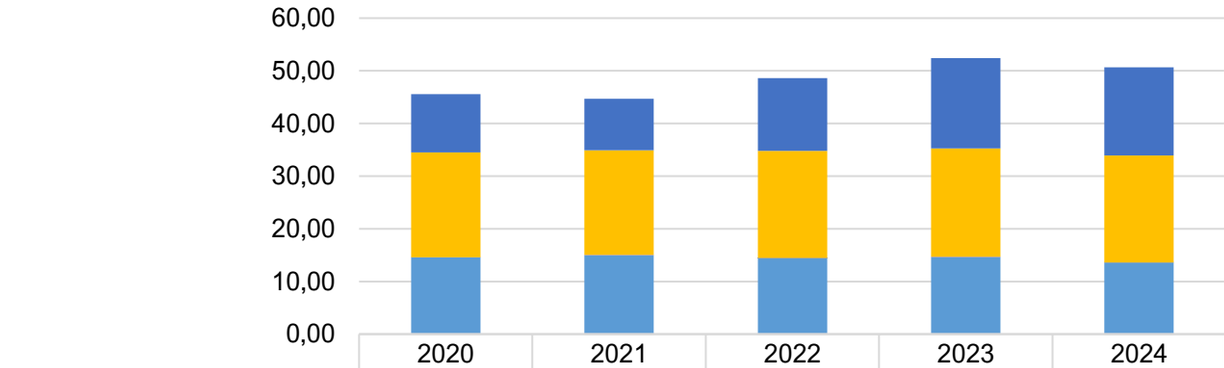
Kegiatan yang paling berkontribusi terhadap emisi GRK di sektor pengadaan dan penggunaan energi yaitu kegiatan transportasi dengan menyumbang emisi 64,80% dari total emisi di sektor energi atau setara dengan 179,43 Gg CO2eq di tahun 2024. Pada tahun 2020-2024 sub sektor transportasi mengalami peningkatan emisi sebesar 29,35% atau setara 40,72 Gg CO2eq, hal ini dipengaruhi oleh peningkatan konsumsi BBM jenis Pertalite (6.360 kilo liter), Pertamax (3.632 kilo liter), bio solar (7.578 kilo liter), dan dex (474 kilo liter).

Kontributor kedua di sektor pengadaan dan penggunaan energi yaitu kegiatan industri dengan menyumbang emisi 22,77% dari total emisi di sektor energi atau setara dengan 63,05 Gg CO2eq di tahun 2024. Hal ini didukung dari komposisi PDRB yang menampilkan bahwa industri pengolahan di Kota Salatiga merupakan kontributor utama, dengan komposisi mencapai 33,14% di tahun 2024. Data industri riil yang terkumpul sebanyak 18 perusahaan yang menggunakan BBM dalam proses produksinya, namun jika ketersediaan data industri di Kota Salatiga terinventarisasi dengan lebih baik maka akan memunculkan hasil yang lebih akurat.

Sub sektor residential dalam inventarisasi gas rumah kaca kota Salatiga menduduki posisi ketiga kontributor emisi pada sektor energi, yaitu sebesar 34,43 Gg CO2eq atau 12,43% dari total emisi sektor energi pada tahun 2024. Sub sekor residensial mengalami peningkatan emisi sebesar 2,79 Gg CO2eq di tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun 2020. Peningkatan emisi tersebut dipengaruhi oleh peningkatan jumlah konsumsi LPG penduduk Kota Salatiga pada periode tersebut.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Grafik 2. 65. Tren Emisi GRK Sektor Limbah 2020-2024



	2020	2021	2022	2023	2024
Limbah Cair Industri	11,05	9,78	13,82	17,15	16,70
Limbah Cair Domestik	19,90	19,86	20,30	20,56	20,32
Pembakaran	0	0	0	0	0
Pengolahan Limbah Padat	0,03	0,02	0,10	0,02	0,02
Pembuangan Akhir Sampah	14,60	15,04	14,36	14,68	13,61

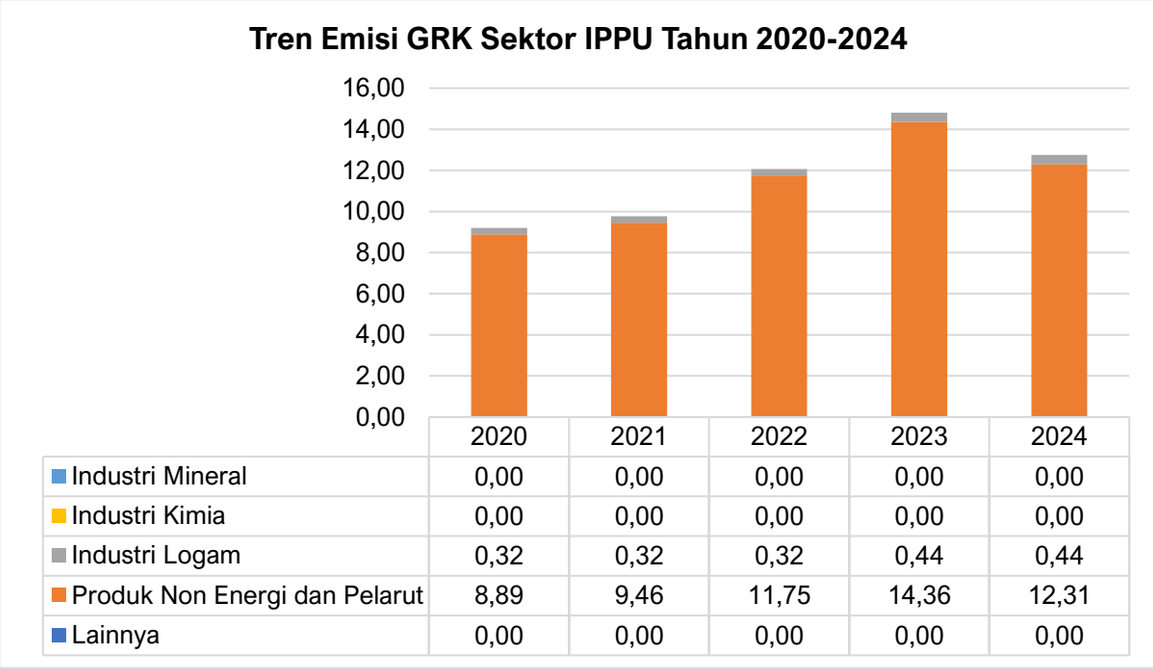
Sumber: Laporan GRK Kota Salatiga 2025

Sektor limbah sangat ditentukan oleh jumlah penduduk dan sistem pengelolaan limbah padat maupun limbah cair. Laju pertumbuhan penduduk Kota Salatiga dari tahun 2020-2024 sebesar 3,46%. Sistem pengelolaan limbah padat yang diterapkan di Kota Salatiga yaitu Pengangkutan ke TPA, ditimbun dalam tanah, dibuang ke lahan kosong, dibuat kompos, dan didaur ulang. Selain itu untuk sistem pengelolaan limbah cair di Kota Salatiga berupa penggunaan septic tank, cubluk dan IPAL. Dalam kurun waktu 2020-2024 tren emisi untuk pengelolaan limbah di Kota Salatiga mengalami peningkatan sebesar 5,07 Gg CO2eq (11,13%). Peningkatan emisi tersebut disebabkan oleh peningkatan emisi dari limbah cair domestik, dan limbah cair industri.

Berdasarkan kategori pengelolaan limbah tahun 2024 maka, proporsi pengelolaan limbah cair domestik sebesar 20,32 Gg CO2eq (40,11%), limbah cair industri sebesar 16,70 Gg CO2eq (32,97%), pembuangan akhir sampah padat 13,61 Gg CO2eq (26,88%) sedangkan untuk pengolahan limbah padat dengan proses biologi berkontribusi kecil yaitu 0,02 (0,04%). Berikut ditampilkan proporsi sumber emisi sektor limbah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Grafik 2. 66. Tren Emisi GRK Sektor IPPU (Proses dan penggunaan Produk Industri) 2020-2024



	2020	2021	2022	2023	2024
Industri Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industri Kimia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industri Logam	0,32	0,32	0,32	0,44	0,44
Produk Non Energi dan Pelarut	8,89	9,46	11,75	14,36	12,31
Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

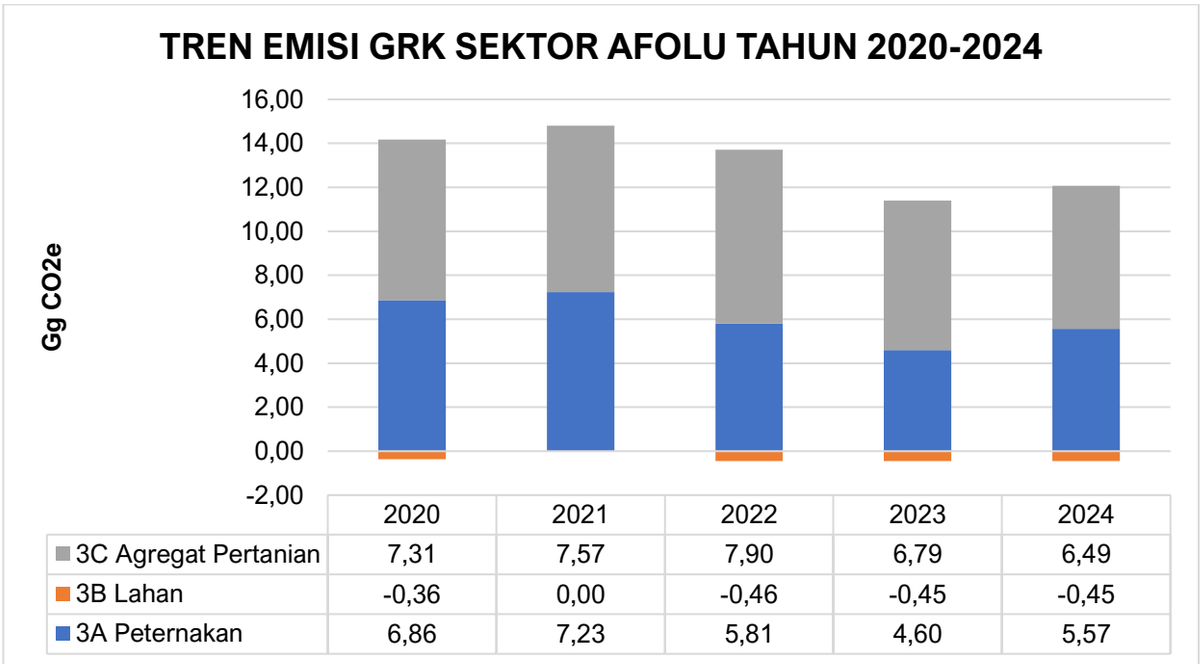
Sumber: Laporan GRK Kota Salatiga, 2025

Emisi dari sektor proses industri dan penggunaan produk hasil dari inventarisasi GRK Kota Salatiga dihasilkan dari aktivitas produk non energi dan pelarut dan industri logam PT Metica Prima Industrial Works. Sedangkan untuk kategori lainnya tidak ada kegiatan industri sesuai dengan kategori yang menghasilkan emisi GRK dalam prosesnya. Kegiatan di sektor ini mengalami perubahan yang fluktuatif namun cenderung mengalami tren naik. Emisi pada tahun 2020 sebesar 9,20 Gg CO2eq meningkat di tahun 2024 menjadi 12,31 Gg CO2eq, emisi tertinggi terjadi pada tahun 2023 yaitu sebesar 14,80 Gg CO2eq. Emisi dari penggunaan pelumas dihasilkan dari kegiatan transportasi dan kegiatan industri yang ada di Kota Salatiga. Berikut ditampilkan tabel emisi GRK untuk sektor proses industri dan penggunaan produk di Kota Salatiga.

Berdasarkan kategori proses industri dan penggunaan produk di Kota Salatiga data yang dapat digunakan adalah data dari sub sektor produk non energi dan pelarut dan industri logam, dimana pada tahun 2020 hingga 2024 emisi yang dihasilkan fluktuatif. Emisi GRK tertinggi terjadi di tahun 2023 sebesar 14,80 Gg CO2eq, emisi pada tahun 2020 yaitu sebesar 9,20 Gg CO2eq dan meningkat di tahun 2024 menjadi 12,75 Gg CO2eq. Peningkatan emisi pada sub sektor produk non energi dan pelarut dikarenakan meningkatnya jumlah penggunaan pelumas baik disektor transportasi maupun di sektor industri sebesar 233,75 Kilo Liter.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Grafik 2. 67. Tren Emisi GRK Sektor AFOLU (Agriculture, Forestry and Land Use) 2020-2025



	2020	2021	2022	2023	2024
3C Agregat Pertanian	7,31	7,57	7,90	6,79	6,49
3B Lahan	-0,36	0,00	-0,46	-0,45	-0,45
3A Peternakan	6,86	7,23	5,81	4,60	5,57

Sumber: Laporan GRK Kota Salatiga, 2025

Emisi dari sektor pertanian, kehutanan dan penggunaan lahan atau biasa dikenal dengan AFOLU (Agriculture, Forestry and Land Use) Kota Salatiga periode 2020-2024 mengalami tren penurunan emisi sebesar 15,89% (2,19 Gg CO2eq). Kegiatan peternakan mengalami penurunan sebesar 1,30 Gg CO2eq atau 18,87%, dan pada perubahan lahan terjadi penyerapan emisi di tahun 2020, dan tahun 2022-2024. Sub sektor agregat pertanian juga mengalami penurunan emisi, yaitu sebesar 11,15% atau setara 0,82 Gg CO2eq. Berdasarkan sektor AFOLU maka kontribusi emisi tertinggi tahun 2024 dihasilkan dari kegiatan pertanian sebesar 0,39 Gg CO2eq (61,9%), dan kegiatan peternakan 0,23 Gg CO2eq (36,5%).

Implementasi Rencana Aksi Nasional dan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK dan RAD-GRK) yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah merupakan faktor yang sangat penting guna mewujudkan target penurunan emisi GRK Indonesia pada tahun 2030. Efektivitas implementasi tersebut perlu didukung dengan pemantauan, evaluasi dan pelaporan (PEP) guna meningkatkan kinerja berbagai aksi mitigasi emisi GRK secara berkelanjutan. Kegiatan PEP yang dimaksud yaitu kegiatan memantau, mengevaluasi dan melaporkan pencapaian aksi-aksi mitigasi dan penurunan emisi GRK-nya yang terdapat pada RAD GRK yang terdiri dari:

- Kegiatan Inti, yaitu aksi-aksi yang berdampak langsung terhadap penurunan dan penyerapan emisi GRK; dan
- Kegiatan Pendukung, yaitu aksi-aksi yang tidak berdampak langsung kepada penurunan emisi GRK tapi mendukung pelaksanaan kegiatan inti atau prasyarat untuk pelaksanaan kegiatan inti.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Berdasarkan kegiatan mitigasi pada berbagai sektor yang telah dilaksanakan di Kota Salatiga baik oleh Pemerintah Daerah, pelaku usaha ataupun masyarakat yang telah dilaporkan dalam aplikasi AKSARA, maka kontribusi penurunan emisi GRK di Kota Salatiga sebesar 19.134,02 Ton CO2eq. Penurunan emisi tersebut diperoleh dari sektor energi sebesar 3.894,03 Ton CO2eq , sektor Lahan sebesar 394,83 Ton CO2eq, sektor transportasi 1.097,12 Ton CO2eq, sektor air limbah sebesar 239,88 Ton CO2eq, sektor persampahan 8.490,61 Ton CO2eq, sektor pertanian 5.017,54 Ton CO2eq.

Dengan target penurunan Emisi GRK Kumulatif dalam RPJMD pada tahun 2025 adalah 71.295 TonCo2EQ, sedangkan realisasi 2025 sebesar 19.134,02 TonCo2EQ, didapatkan realisasi capaian kinerja RPJMD sampai dengan tahun 2025 adalah sebesar 26,83%, artinya target penurunan emisi GRK di Salatiga ini tidaka tercapai dengan kategori status sangat rendah.

Berdasarkan data profil emisi Kota Salatiga, rendahnya laju penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dipengaruhi oleh beberapa faktor strategis yang saling berkaitan antara sektor energi, limbah, dan karakteristik wilayah perkotaan.

Penurunan emisi GRK di Kota Salatiga sangat rendah hal ini dipengaruhi beberapa faktor antara lain :

(a) Dominasi Emisi dari Sektor Energi dan Transportasi

Salatiga merupakan kota transit dengan mobilitas kendaraan yang sangat tinggi. Sektor energi (terutama transportasi) menyumbang porsi emisi terbesar, peningkatan jumlah kendaraan , serta pertumbuhan kepemilikan kendaraan pribadi berbahan bakar fosil terus meningkat setiap tahunnya. Disisi lain karakteristik Kota Salatiga Sebagai kota yang menghubungkan Semarang dan Solo, volume kendaraan yang melintas (beban emisi dari luar) menambah beban polusi yang sulit dikendalikan secara lokal.

(b) Tantangan Pengelolaan Limbah

Sektor limbah menjadi penyumbang emisi terbesar kedua. Hal ini dipicu oleh Limbah Domestik & Industri, seiring pertumbuhan penduduk, volume limbah cair dan padat dari rumah tangga serta industri pengolahan terus naik, disisi lain Metode Pembuangan Sampah masih sangat bergantung pada pembuangan sampah padat ke TPA yang menghasilkan gas metana (CH_4) dalam jumlah signifikan jika tidak dikelola dengan sistem sanitary landfill yang optimal.

(c) Karakteristik wilayah perkotaan

Kemampuan alam dalam menyerap emisi di Salatiga tidak sebanding dengan produksinya. Atau dengan kata lain daya serap rendah, sebagai contoh, di salah satu kecamatan (Argomulyo), RTH dan tutupan lahan dilaporkan hanya mampu menyerap sekitar 15,9% dari total emisi domestik yang dihasilkan, disisi lain adanya alih fungsi lahan, pembangunan fisik dan pemukiman akibat peningkatan jumlah penduduk mengurangi area yang seharusnya berfungsi sebagai penyerap karbon.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

(5) Ketersediaan RTH

Ketersediaan RTH di Kota Salatiga pada tahun 2025 meningkat sebesar 0,4% menjadi 17,41% atau seluas 957,08 hektar, dibandingkan dari ketersediaan RTH 2024 yang hanya 17,01% atau seluas 935,29 hektar.

Tabel 2. 59. Kertersediaan RTH di Kota Salatiga 2021-2025

Tahun	Luas RTH (Ha)	Luas Wilayah (Ha)	Persentase terhadap luas Wilayah (%)
2021	824,77	5.498,47	15
2022	896,81	5.498,47	16,31
2023	928,60	5.498,57	16,89
2024	935,29	5.498,57	17,01
2025	957,08	5.498,57	17,41

Sumber Dinas Lingkungan Hidup 2025

(6) Pengelolaan Persampahan

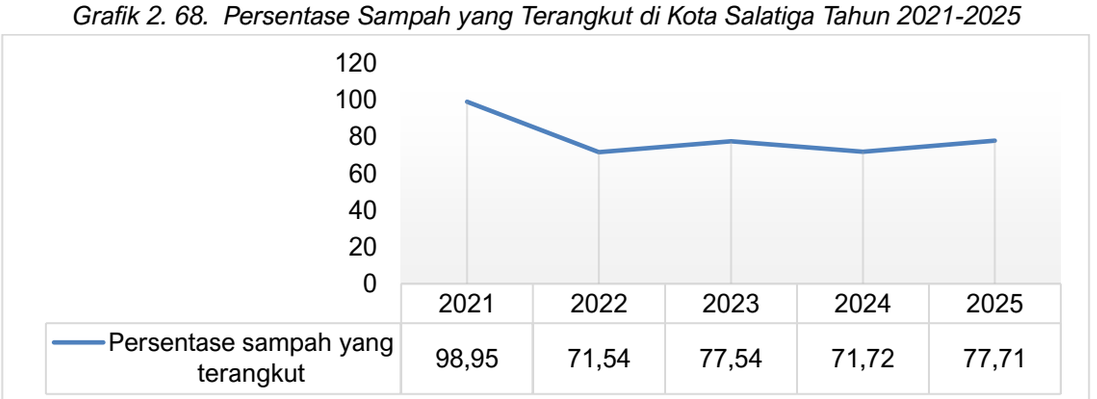
Dalam pengelolaan persampahan di Kota Salatiga volume sampah yang terangkut pada tahun 2025 mencapai 324,07 m³ per hari atau 77,71% dari total volume sampah per hari 451,84 m³. Prosentase sampah yang terangkut tren naik capaiannya dikarenakan sampah sudah terpilah dan terolah di TPS3R maupun dikelola oleh Bank Sampah yang ada di Kota Salatiga yang bertujuan untuk mengurangi kuantitas serta menjamin semakin sedikitnya kebutuhan lahan untuk penyediaan TPA sampah di perkotaan.

Tabel 2. 60. Persentase Sampah yang Terangkut Tahun 2021 sd 2025

Tahun	VOLUME (M^3/HARI)	TERANGKUT (M^3/HARI)	Persentase sampah yang terangkut (%)
2021	387.05	383	98,95
2022	448.9	321.16	71,54
2023	424.96	329.51	77,54
2024	450.99	323.46	71,72
2025	451.84	324.07	77,71

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2025

Grafik 2. 68. Persentase Sampah yang Terangkut di Kota Salatiga Tahun 2021-2025



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 2. 61. Persentase Sampah yang Terangkut di Kota Salatiga Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun									
		2021		2022		2023		2024		2025	
		jumlah	%	jumlah	%	jumlah	%	jumlah	%	Jumlah	%
1.	Timbunan Sampah	40.969		41.668		40.969		41.668		42.202,39	
2.	Pengurangan Sampah	7.274	17,76	7.877	18,9	7.274	17,76	7.877	18,9	9.782.51	23,18
3.	Penanganan Sampah	29.510	72,03	32.307	77,53	29.510	72,03	32.307	77,53	31.761,51	75,26
4.	Pengelolaan Sampah	36.784	89,78	40.184	96,44	36.784	89,78	40.184	96,44	41.544,03	98,44
5.	Sampah tidak terkelola	4.185	10,22	1.484	3,56	4.185	10,22	1.484	3,56	658.35	1,56

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2025

Pada tahun 2025 timbunan sampah naik sebesar 0,493% persen menjadi 42.202,39 ton/tahun dibandingkan tahun 2024 yaitu 41.995,45 ton/tahun. Prosentase sampah terkelola tahun 2025 sebesar 98,44%, sedangkan yang belum terkelola sebanyak 1,56%.

Data pengelolaan persampahan tahun 2025 ini merupakan data yang sudah tersimpan di Sistem Informasi kinerja Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) yang membutuhkan validasi dari kementrian Lingkungan Hidup untuk kemudian disahkan oleh Wali Kota Salatiga. Saat ini data tersebut masih dalam proses validasi.

Tabel 2. 62. Capaian SDGs Urusan Lingkungan Hidup

NO	INDIKATOR NASIONAL	INDIKATOR KOTA SALATIGA	SATUAN	TAHUN				
				2021	2022	2023	2024	2025
1	Indeks Kualitas Air	Indeks Kualitas Air	Nilai	42,5	47,87	44,29	48,67	73,76
2	Persentase sampah perkotaan yang tertangani	Persentase Penanganan Sampah	Persen	72	77,53	77,54	76,51	75,26

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	INDIKATOR NASIONAL	INDIKATOR KOTA SALATIGA	SATUAN	TAHUN				
				2021	2022	2023	2024	2025
3	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan.	Persentase Ruang Terbuka Hijau	Persen	27,7	17,00	17,00	17,01	17,41
4	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau dikawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang	Persentase Ruang Terbuka Hijau	Persen	27,7	17,00	17,00	17,01	17,41
5	Jumlah peserta PROPER yang mencapai minimal ranking BIRU	Jumlah peserta PROPER yang mencapai minimal ranking BIRU	Perusahaan	Data Belum Tersedia	3,00	3	3	4
6	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Ton/Tahun	5.593,014 ton per tahun	5.593,725 ton per tahun	5.593,014 ton per tahun	5.602,884 ton per tahun	5.635,418 ton per tahun
7		Persentase penataan /penaatan limbah B3				75	100	100
8	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).	Dokumen	ada	ada	ada	ada	ada
9	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya	Indeks Kualitas Lahan	Angka Komposit	47,21	47,28	33,62	34,67	46,55

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kinerja urusan administrasi kependudukan menunjukkan capaian yang relatif tinggi dan cenderung stabil selama periode 2021–2025. Persentase cakupan akta kelahiran terus mengalami peningkatan, dari 99,44 persen pada tahun 2024 menjadi 99,54 persen pada Semester I Tahun 2025. Capaian ini mencerminkan semakin optimalnya pelayanan pencatatan sipil serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan sejak dini.

Persentase penduduk yang memiliki KTP elektronik juga menunjukkan kinerja yang baik meskipun mengalami fluktuasi. Pada tahun 2023 capaian meningkat signifikan hingga 99,22 persen, kemudian berada pada angka 97,95 persen pada tahun 2024 dan 97,9 persen pada Semester I Tahun 2025. Kondisi ini dipengaruhi oleh dinamika data kependudukan, termasuk penduduk pemula wajib KTP serta mobilitas penduduk, sehingga diperlukan penguatan strategi pelayanan jemput bola dan pemutakhiran data secara berkelanjutan.

Sementara itu, persentase anak usia 0–17 tahun kurang 1 hari yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan sejak mulai tercatat pada tahun 2023. Capaian KIA meningkat dari 83,84 persen pada tahun 2023 menjadi 85,86 persen pada tahun 2024 dan mencapai 87,52 persen pada Semester I Tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan efektivitas program percepatan kepemilikan KIA melalui integrasi layanan dengan sektor pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya.

Berdasarkan capaian tersebut, pada Rancangan RKPD Tahun 2027 perlu diarahkan pada upaya mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan, khususnya melalui perluasan cakupan KIA dan peningkatan kepemilikan KTP elektronik bagi penduduk pemula. Penguatan inovasi layanan, digitalisasi administrasi kependudukan, serta kolaborasi lintas sektor menjadi strategi utama guna menjamin seluruh penduduk memperoleh dokumen kependudukan yang lengkap, akurat, dan berkelanjutan. Capaian pemanfaatan data kependudukan dan pencatatan sipil, mengingat aspek ini merupakan substansi penting dalam mendukung peningkatan kualitas administrasi kependudukan serta perencanaan pembangunan daerah yang lebih akurat dan berbasis data.

Tabel 2. 63. Indikator Kinerja Daerah Administrasi Kependudukan Sipil

No	Indikator Kinerja Daerah	satuan	2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase cakupan akta kelahiran	%	98,67	99,07	99,08	99,44	99,54
2	Persentase penduduk ber KTP elektronik	%	95,53	96,26	99,22	97,95	97,9

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator Kinerja Daerah	satuan	2021	2022	2023	2024	2025
3	Persentase anak 0-17 th kurang 1 hari yang memiliki Kartu Indentitas Anak (KIA)	%	n/a	n/a	83.84	85,86	87,52

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2025

Banyaknya pelayanan permohonan Akta-Akta di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2025, sebagai berikut:

Tabel 2. 64. Banyaknya Pelayanan Permohonan Akta-Akta di Kota Salatiga Tahun 2021-2025

Banyaknya Pelayanan Permohonan Akta-Akta pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga				
Tahun	**Kelahiran**	**Kematian**	**Perkawinan**	**Perceraian**
2020	3.286	1.531	257	63
2021	3.650	2.503	290	46
2022	3.207	1790	246	40
2023	2.919	1617	216	35
2024	2513	1574	218	41
2025	3070	2041	288	50

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2025

Tabel 2. 65. Capaian SDGs Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	INDIKATOR NASIONAL	INDIKATOR KOTA SALATIGA	SATUAN	TAHUN				
				2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah	Persentase kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah		98	98,03	98,03	98,09	98,13
2		Persentase anak yang memiliki akte kelahiran		98,23	98,44	99,08	99,10	99,13
3	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	Persentase Penduduk Berumur 0-17 Tahun yang Memiliki Akta Kelahiran	Persen	98,23	98,44	99,08	99,10	99,13
4		Persentase anak yang memiliki akte kelahiran		98,23	98,44	99,08	99,10	99,13
5	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada

Sumber : BPS Kota Salatiga, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Tahun 2025)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Selain indikator cakupan dokumen kependudukan, kualitas pengelolaan data kependudukan juga menjadi aspek penting dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas tersebut adalah Indeks Kualitas Data (IKD) yang mencerminkan tingkat akurasi, kelengkapan, konsistensi, dan kemutakhiran data kependudukan yang dikelola pemerintah daerah. Berdasarkan Laporan Progres Kinerja Pelayanan Administrasi Kependudukan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, Kota Salatiga memperoleh Indeks Kualitas Data (IKD) sebesar 4,54 pada skala 5. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas pengelolaan data kependudukan Kota Salatiga berada pada kategori sangat baik dan telah mendukung penyediaan data yang valid untuk berbagai kebutuhan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, penyaluran bantuan sosial, pelaksanaan pemilu, serta integrasi data sektoral.

Tingginya capaian IKD menunjukkan keberhasilan Pemerintah Kota Salatiga dalam melakukan pemutakhiran data kependudukan secara berkelanjutan, meningkatkan sinkronisasi data antarinstansi, serta mendorong pemanfaatan data kependudukan sebagai basis pengambilan keputusan. Meski demikian, upaya peningkatan kualitas data perlu terus dilakukan melalui penguatan interoperabilitas sistem informasi, percepatan perekaman penduduk rentan administrasi kependudukan, serta optimalisasi pelaporan peristiwa kependudukan dan pencatatan sipil secara tepat waktu. Dalam rangka mendukung kebijakan Satu Data Indonesia dan percepatan transformasi digital pemerintahan, peningkatan kualitas data kependudukan menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah yang perlu terus diperkuat pada periode perencanaan tahun 2027.

Tabel 2. 66. Indeks Kualitas Data (IKD) Kota Salatiga Tahun 2025

No	Indikator	Satuan	2025
1	Indeks Kualitas Data (IKD)	Indeks (0–5)	4,54

Sumber: Laporan Progres Kinerja Pelayanan Administrasi Kependudukan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

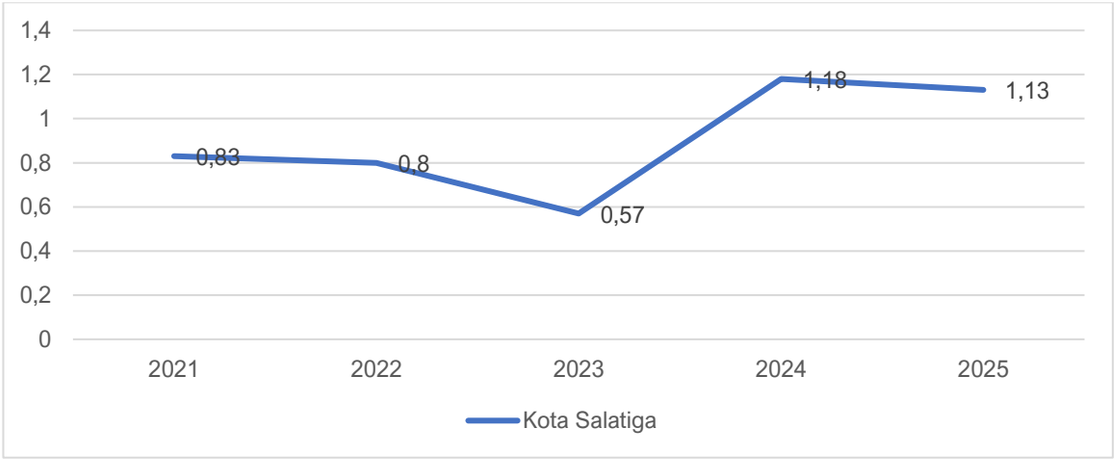
g. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Laju pertumbuhan penduduk Kota Salatiga menunjukkan dinamika yang perlu mendapatkan perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah. Berdasarkan data, realisasi laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2024 tercatat sebesar 1,18 persen, relatif mendekati target tahun 2025 sebesar 1,30 persen. Namun demikian, capaian 2025 menunjukkan angka 1,13 persen, yang mengindikasikan terjadinya penurunan jumlah penduduk secara sementara. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain mobilitas penduduk, migrasi keluar daerah, serta dinamika administrasi kependudukan seperti pemutakhiran data dan penyesuaian hasil pencatatan penduduk. Penurunan laju pertumbuhan penduduk ini menjadi sinyal penting bagi Pemerintah Kota Salatiga untuk memperkuat kebijakan pengendalian penduduk sekaligus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan daya dukung wilayah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dalam konteks Rancangan RKPD Tahun 2027, arah kebijakan perlu difokuskan pada penguatan pengelolaan kependudukan melalui peningkatan kualitas data dan sistem administrasi kependudukan yang akurat dan berkelanjutan. Selain itu, diperlukan sinergi lintas sektor dalam perencanaan pembangunan agar dinamika laju pertumbuhan penduduk dapat diantisipasi secara tepat, sehingga tetap mendukung pencapaian pembangunan ekonomi, sosial, dan pelayanan publik yang berkelanjutan di Kota Salatiga.

Grafik 2. 69. Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Salatiga Tahun 2021-2025



Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Tahun 2025

Total Feritility Rate (TFR) adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia suburnya. Target TFR Kota Salatiga tahun 2025 sebesar 2,20% dan realisasi sebesar 2,02%. Age Specific Fertility Rates (ASFR) adalah angka kelahiran menurut umur. ASFR Kota Salatiga menurut jumlah kelompok wanita usia subur (usia 15-19 tahun) pada tahun 2025 sebesar 6,33/1000. Maka perhitungan TFR = 5 x 0,404 = 2,02%. Dengan capaian 2,02 bisa dikatakan bahwa untuk PUS rata-rata memiliki 2 anak.

Tabel 2. 67. Indikator Kinerja Daerah Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kota Salatiga Tahun 2021-2025

No	Indikator Kinerja Daerah	satuan	2021	2022	2023	2024	2025
1	TFR (Total Fertility Rate)	%	1,90	1,84	1,81	1,71	1,24

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Tahun 2025

Capaian indikator Sustainable Development Goals (SDGs) pada Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kota Salatiga selama periode 2021–2025 menunjukkan perkembangan yang beragam serta mencerminkan dinamika kependudukan yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah. Indikator Angka Pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive Prevalence Rate/CPR) pada Pasangan Usia Subur (PUS) tercatat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

mengalami fluktuasi dan cenderung menurun dalam dua tahun terakhir, dari 67,70 persen pada tahun 2024 menjadi 65,44 persen pada tahun 2025. Kondisi ini mengindikasikan tantangan dalam menjaga keberlanjutan kepesertaan KB aktif, terutama pada kelompok PUS non-MKJP. Sebaliknya, indikator persentase penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) menunjukkan peningkatan yang signifikan, khususnya pada tahun 2025 yang mencapai 41,19 persen.

Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan kebijakan dan intervensi pelayanan KB yang berorientasi pada metode kontrasepsi yang lebih efektif dan berkelanjutan, sejalan dengan target SDGs dalam menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan reproduksi. Indikator Angka Kelahiran pada Perempuan Usia 15–19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR) masih menunjukkan fluktuasi yang memerlukan perhatian serius. Dinamika angka kelahiran remaja ini menandakan perlunya penguatan upaya pencegahan perkawinan anak dan peningkatan edukasi kesehatan reproduksi remaja sebagai bagian dari komitmen pencapaian SDGs, khususnya dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta kesetaraan gender.

Sementara itu, Total Fertility Rate (TFR) Kota Salatiga selama periode pengamatan menunjukkan kecenderungan yang belum stabil, dengan peningkatan pada tahun 2025 menjadi 2,02. Kondisi ini menggambarkan adanya perubahan pola fertilitas yang perlu dikelola secara tepat agar tetap mendukung keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan daya dukung wilayah.

Di sisi lain, capaian indikator unmet need KB menunjukkan perbaikan yang sangat signifikan. Persentase PUS yang kebutuhan ber-KB-nya belum terpenuhi berhasil ditekan hingga 3,65 persen pada tahun 2025. Capaian ini mencerminkan meningkatnya akses, keterjangkauan, dan kualitas pelayanan keluarga berencana di Kota Salatiga, sekaligus mendukung pencapaian target SDGs dalam menjamin hak reproduksi masyarakat.

Berdasarkan capaian SDGs tersebut, dalam Rancangan RKPD Tahun 2027 arah kebijakan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana perlu difokuskan pada penguatan keberlanjutan kepesertaan KB aktif, peningkatan kualitas dan cakupan MKJP, penurunan angka kelahiran remaja, serta pengendalian tingkat fertilitas secara berkelanjutan. Upaya tersebut dilaksanakan melalui integrasi program Bangga Kencana, penguatan edukasi dan advokasi, serta sinergi lintas sektor guna mendukung pencapaian SDGs dan pembangunan berkelanjutan di Kota Salatiga.

Tabel 2. 68. Capaian SDGs Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	INDIKATOR NASIONAL	INDIKATOR KOTA SALATIGA	SATUAN	TAHUN				
				2021	2022	2023	2024	2025
1	Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) umur 15-49 tahun yang berstatus kawin	CPR/ Peserta KB Aktif	Persen	71,9	64,65	67,46	67,70	65.44

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	INDIKATOR NASIONAL	INDIKATOR KOTA SALATIGA	SATUAN	TAHUN				
				2021	2022	2023	2024	2025
2	Persentase penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persentase penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persen		26,06	26,28	26.65	41.19
3	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	per 1000 penduduk	0,92	9,02	8,26	0.68	122.4
4	Total Fertility Rate (TFR)	Total Fertility Rate (TFR)	Persen	1,9	1,84	2,2	1,71	2.02
5	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KByang tidak terpenuhi)	Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmetneed)	Persen	14,2	20,54	14,9	8.51	3.65

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Tahun 2025

h. Perhubungan

Tabel 2. 69. Indikator Kinerja Daerah Perhubungan di Kota Salatiga Tahun 2021-2025

No	Indikator Kinerja Daerah	satuan	2021	2022	2023	2024	2025
1	Rasio Ijin Trayek	%	n/a	n/a	23.31	23,52	22,26
2	Rasio Panjang Jalan per Jumlah kendaraan	%	n/a	n/a	21.41	19,49	18,97
3	Persentase Kepemilikan KIR angkutan	%	n/a	n/a	92.23	75,44	62,72

Sumber : Dinas Perhubungan, Tahun 2025

Pada tahun 2025 target rasio ijin trayek sebesar 23,59%, terealisasi sebesar 22,26% dengan tingkat capaian sebesar 94,36% dibandingkan realisasi tahun 2024 terjadi penurunan sebesar 1,26%

Target pada tahun 2025 untuk target rasio panjang jalan per jumlah kendaraan sebesar 22,79% dan terealisasi 18,97% sehingga capaian realisasi sebesar 83,24% dibandingkan tahun 2024 terjadi penurunan sebesar 0,52% dimana tahun 2024 realisasi 19,49%. Faktor- faktornya adalah panjang jalan cenderung tetap sedangkan jumlah kendaraan semakin bertambah seiring dengan meningkatnya pergerakan orang dan barang disamping itu meningkatnya jumlah penduduk memicu peningkatan pergerakan orang dan barang sehingga memicu pertumbuhan alat transportasi terutama angkutan orang.

Persentase Kepemilikan KIR angkutan target 2025 sebesar 83% dan realisasi 62,72% maka capaian realisasi sebesar 75,51% dibandingkan tahun 2024 terealisasi sebesar 75,44% sehingga terjadi penurunan sebesar 12,72%.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Hal -hal yang melatarbelakangi ini di antaranya persyaratan Pemerintah Kota Salatiga melalui Dinas Perhubungan yang memberikan subsidi BBM ke pengemudi angkota dan mewajibkan kendaraan tersebut memiliki persyaratan administrasi yang lengkap dan persyaratan teknis, antara lain melakukan uji KIR secara rutin.

i. Komunikasi dan Informatika

Dalam menyediakan layanan data dan statistik, Pemerintah Kota Salatiga memiliki system data yang terintegrasi dalam website yang memberikan informasi daerah kepada masyarakat. Seiring dengan perubahan dan penyelarasan Indikator Kinerja Daerah sesuai Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025–2029, indikator kinerja pada periode sebelumnya yaitu Indeks SPBE dan tingkat pengembangan layanan e-government dan smarcity tidak lagi disajikan karena telah mengalami perubahan substansi, definisi, dan metode pengukuran, sehingga tidak dapat diperbandingkan secara langsung dan untuk tingkat pengembangan layanan e-government dan smarcity tidak lagi dilakukan penilaian.

Tingkat ketersediaan informasi publik pada tahun 2025 dengan target nilai 90,5 meraih predikat Informatif dangan nilai 94,78 dan terealisasi 100% dengan capaian realisasi kinerja sebesar 104,73%. Capaian ini menurun 5,22% dibandingkan tahun 2024 yaitu 100%. Faktor-faktor di antaranya:

1) Dilaksanakannya kegiatan Workshop Forum PPID, monev PPID dan monev website kepada seluruh OPD, sebagai sarana untuk koordinasi, monitoring serta evaluasi dalam penyediaan, pengelolaan serta pelayanan informasi publik.
2) Dokumen DIP dari OPD dilakukan digitalisasi, disimpan dan dipublikasi kepada masyarakat melalui website resmi PPID yaitu ppid.salatiga.go.id dan medsos yang lengkap sesuai dengan peraturan yang ada serta terupdate.
3) Melaksanakan workshop Forum Admin PPID dengan peserta seluruh admin/tenaga teknis OPD dengan materi penyusunan DIP.

Pada Tahun 2025 target RPD indeks SPBE sebesar 2,6 terealisasi 4,11 dengan predikat sangat baik, nilai indeks ini meningkat 12,91% dibanding tahun 2024 yang hanya 3,64 dan capaian kinerjanya sebesar 158,2%.

Faktor yang mendukung keberhasilan ini diantaranya layanan pengembangan aplikasi , layanan in frastruktur dasar data center, disaster recover sudah berjalan dengan baik.

Tabel 2. 70. Indikator Kinerja Daerah Komunikasi dan Informatika di Kota Salatiga Tahun 2021-2025

No	Indikator Kinerja Daerah	satuan	2021	2022	2023	2024	2025
1	Tingkat keterbukaan informasi publik	skor	87.00	100	100	100	94,78
2	Tingkat pengembangan layanan e-Government dan smart city	Skor	87.00	na	n/a	n/a	n/a

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator Kinerja Daerah	satuan	2021	2022	2023	2024	2025
3	Indeks SPBE	Skor	n/a	n/a	3,26	3,64	4,11

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, Tahun 2025

Arah transformasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menuju Indeks Pemerintah Digital (Pemdi) dengan mengacu pada Surat Edaran KemenPANRB Nomor B/66/PD.02/2025 tanggal 21 April 2025 serta amanat Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029 (Lampiran I halaman 188) yang menyatakan adanya perubahan instrumen evaluasi dari SPBE menjadi Indeks Pemdi.

Sehubungan dengan hal tersebut, capaian Indeks SPBE untuk periode selanjutmya bertransformasi ke Pemdi secara bertahap, yang mencakup aspek tata kelola dan manajemen, penyelenggara, data, keamanan siber, teknologi pemerintah digital, keterpaduan layanan digital pemerintah, serta kepuasan pengguna layanan digital pemerintah, sehingga transformasi digital daerah dapat selaras dengan kebijakan nasional dan lebih terukur.

Pemerintahan Digital (Pemdi) merupakan upaya transformasi penyelenggaraan pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi digital secara terintegrasi guna meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan, kualitas pelayanan publik, serta pengambilan keputusan berbasis data. Dalam implementasinya, Pemerintahan Digital didukung oleh berbagai aspek yang meliputi tata kelola dan layanan pemerintahan berbasis elektronik, keamanan informasi, serta pengelolaan data yang terstandar dan terintegrasi.

Sebagai perangkat daerah yang mengampu urusan komunikasi dan informatika, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga berperan dalam mendorong percepatan transformasi digital melalui penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), peningkatan keamanan informasi, dan pengembangan tata kelola data daerah. Upaya tersebut dilakukan untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat.

Pada Tahun 2025, capaian SPBE Kota Salatiga memperoleh nilai 4,11 dengan predikat Sangat Baik. Capaian tersebut menunjukkan tingkat kematangan yang tinggi dalam aspek tata kelola, manajemen, dan layanan pemerintahan berbasis elektronik, sekaligus menjadi fondasi utama dalam penguatan Pemerintahan Digital di daerah.

Dari aspek keamanan informasi, Tingkat Pengamanan Informasi Daerah mencapai nilai 70,85. Capaian ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Salatiga dalam membangun tata kelola keamanan informasi yang mendukung keandalan, keberlangsungan, dan perlindungan layanan digital pemerintah. Penguatan keamanan informasi menjadi faktor penting dalam menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan digital.

Selain itu, tata kelola data daerah terus diperkuat melalui implementasi Satu Data Indonesia. Hasil evaluasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) Kota Salatiga pada Tahun 2025 memperoleh nilai 80,07 yang menunjukkan kualitas pengelolaan data yang baik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

melalui pemenuhan prinsip standar data, metadata, interoperabilitas data, dan penggunaan kode referensi serta data induk. Capaian tersebut mendukung terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, dan mudah diakses untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi pembangunan, serta pengambilan kebijakan berbasis data.

Capaian SPBE, Tingkat Pengamanan Informasi Daerah, dan evaluasi Satu Data Indonesia tersebut merupakan modal penting dalam mendukung implementasi Pemerintahan Digital di Kota Salatiga. Sinergi ketiga aspek tersebut diharapkan dapat mempercepat terwujudnya ekosistem pemerintahan digital yang terintegrasi, aman, dan berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat.

Rumah tangga dengan akses internet merupakan indikator untuk mengukur semakin baik kondisi akses internet di masyarakat menjadi salah satu kebijakan pada RKPD tahun 2027 yang selanjutnya ditetapkan dalam target kinerja untuk mendukung Indikator utama pembangunan RPJPD tahun 2025-2045 sesuai dengan Indikator utama pembangunan dari Provinsi Jawa Tengah yang diturunkan ke Kabupaten/Kota.

j. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pengembangan sektor usaha mikro dan kecil mendorong peningkatan perekonomian daerah. Pengembangan sektor ini akan berdampak pada peningkatan jumlah tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Untuk meningkatkan keberdayaan usaha mikro dan kecil, pemerintah melakukan pembinaan baik dengan memberikan bantuan modal ataupun dengan memberikan pelatihan yang menunjang pengembangan usaha mikro dan kecil.

Pada tahun 2025 target usaha mikro dan kecil yang dibina sebesar 99,78% dan realisasi sebesar 99,87%. Realisasi tahun 2025 dibandingkan realisasi 2024 mengalami peningkatan sebesar 0,10%. Hitungan ini berasal dari perbandingan antara jumlah usaha mikro sebanyak banyaknya UMKM yang dibina sebanyak 26.566 unit usaha dibagi dengan jumlah usaha mikro kecil dan menengah sebanyak 26,601 unit usaha

Prosentase usaha mikro dan kecil ini meningkat di dukung oleh keterbukaan informasi publik dan pelayanan yang cepat, responsif dan akuntabel melalui media sosial dan media online serta animo pelaku UKM untuk mengikuti pelatihan yang tinggi. Pembinaan dilakukan melalui pelatihan, fasilitasi sertifikasi halal dan badan hukum kelompok UMKM, fasilitasi aplikasi pintar umkm, broadcast dan konsultasi baik melalui tatap muka maupun melalui media online.

Sertifikasi halal merupakan salah satu instrumen penting dalam meningkatkan daya saing dan kepercayaan konsumen terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Bagi pelaku usaha, kepemilikan sertifikat halal tidak hanya menjadi jaminan keamanan dan kehalalan produk bagi konsumen muslim, tetapi juga membuka peluang pasar yang lebih luas, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Pemerintah Kota Salatiga melalui Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Usaha Mikro (UMKM) telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendorong percepatan sertifikasi halal bagi para pelaku usaha di wilayahnya.

Sebagai bagian dari Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilaksanakan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan, dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan, Pemerintah Kota Salatiga telah berhasil memfasilitasi sebanyak 6.293 UMKM untuk memperoleh sertifikat halal melalui Sub Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro. Capaian ini merupakan wujud nyata dari keseriusan pemerintah daerah dalam memberikan kemudahan akses sertifikasi halal kepada para pelaku usaha mikro, khususnya dalam rangka mendukung implementasi kewajiban sertifikasi halal sebagaimana diamanatkan dalam regulasi nasional.

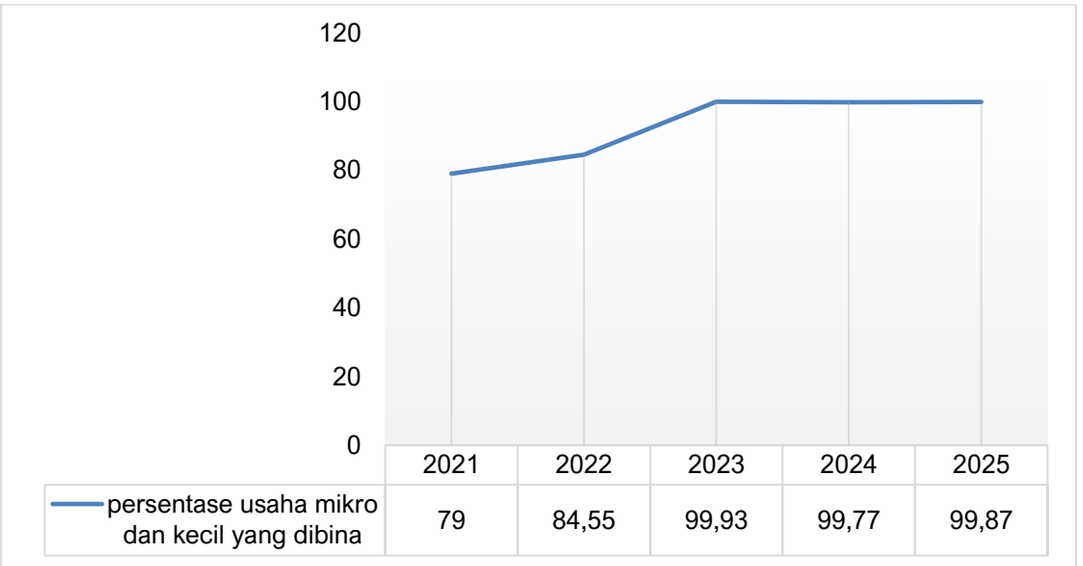
Fasilitasi sertifikasi halal yang diberikan oleh Pemerintah Kota Salatiga mencakup berbagai bentuk dukungan, mulai dari pendampingan proses pengajuan sertifikasi, koordinasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), hingga sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha mengenai pentingnya sertifikasi halal bagi keberlangsungan dan pengembangan usaha mereka. Kemudahan yang diberikan ini diharapkan dapat mendorong semakin banyak pelaku UMKM di Kota Salatiga untuk secara aktif mengurus sertifikasi halal produknya, sehingga produk-produk lokal Salatiga semakin kompetitif dan terpercaya di mata konsumen.

Capaian sebanyak 6.293 UMKM yang telah memperoleh sertifikat halal ini memberikan dampak positif yang berlapis bagi perekonomian Kota Salatiga. Pertama, dari sisi perlindungan konsumen, masyarakat Kota Salatiga mendapatkan jaminan kehalalan produk yang lebih luas dari berbagai pelaku usaha lokal. Kedua, dari sisi pengembangan usaha, para pelaku UMKM yang telah bersertifikat halal memiliki peluang yang lebih besar untuk memasuki pasar yang lebih luas, termasuk pasar modern, platform e-commerce, serta peluang ekspor ke negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim. Ketiga, dari sisi kelembagaan, meningkatnya jumlah UMKM bersertifikat halal mencerminkan semakin kuatnya tata kelola usaha dan profesionalisme para pelaku UMKM di Kota Salatiga.

Ke depan, Pemerintah Kota Salatiga perlu terus mengakselerasi program fasilitasi sertifikasi halal ini dengan memperluas jangkauan pendampingan, memperkuat sinergi dengan BPJPH, Majelis Ulama Indonesia (MUI), perguruan tinggi, dan asosiasi pelaku usaha, serta memanfaatkan teknologi digital untuk mempermudah proses pengajuan dan pemantauan sertifikasi halal. Dengan demikian, semakin banyak pelaku UMKM di Kota Salatiga yang dapat merasakan manfaat nyata dari kepemilikan sertifikat halal, sekaligus memperkuat posisi Kota Salatiga sebagai kota yang ramah terhadap pengembangan ekosistem usaha halal yang inklusif dan berdaya saing tinggi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Grafik 2. 70. Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang Dibina di Kota Salatiga Tahun 2021-2025



Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Mengah, Tahun 2025

Persentase koperasi aktif target sebesar 71,67% dan realisasi sebesar 63,57% dan capaian 88,71%. Realisasi tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi tahun 2024, terjadi kenaikan angka sebesar 10,5. Pada 2025 target koperasi aktif 71,67% dari total 151 koperasi, atau ada 108 koperasi di Salatiga yang ditargetkan aktif. Realisasinya terdapat 96 koperasi aktif dari 151 keseluruhan koperasi yang ada (63,57%). Ini berarti (8,1%) di bawah target.

Capaian yang belum maksimal juga di sebabkan banyak koperasi yang mengalami permasalahan likuiditas, adanya permasalahan internal pengurus koperasi sendiri, permasalahan kredit macet, koperasi bermasalah hukum, sehingga beberapa koperasi tidak melaksanakan RAT dan ada yang menutup usahanya. Semakin banyak indikator yang harus dipenuhi untuk memperoleh status koperasi aktif, juga menjadi sebab jumlah koperasi aktif menurun.

TAHUN BUKU	JUMLAH KOPERASI AKTIF
2021	126
2022	93
2023	93
2024	95
2025	96

Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) merupakan salah satu program nasional dalam rangka memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis kelurahan. Melalui pengembangan gerai-gerai KKMP di berbagai kelurahan, program ini bertujuan untuk mendekatkan akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok sehari-hari sekaligus mendorong tumbuhnya unit-unit usaha produktif yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat di tingkat kelurahan.

Progres Pembangunan Gerai KKMP

Dalam rangka memperluas jangkauan layanan KKMP di Kota Salatiga, saat ini tengah berlangsung pembangunan gerai di beberapa kelurahan, yaitu Kelurahan Blotongan, Dukuh,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Noborejo, Cebongan, dan Randuacir. Sementara itu, Kelurahan Tegalrejo telah lebih dahulu menyelesaikan pembangunan gerainya dan kini telah beroperasi secara aktif melayani kebutuhan masyarakat setempat. Keberadaan gerai KKMP yang tersebar di berbagai kelurahan ini diharapkan dapat menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat yang memberikan manfaat langsung bagi warga sekitar.

Usaha yang Telah Berjalan

KKMP di Kota Salatiga telah berhasil mengembangkan beberapa unit usaha yang berjalan secara aktif, di antaranya distribusi gas LPG 3 kg, agen Pos Pay, penjualan sembako kebutuhan pokok masyarakat, serta pengadaan barang dan jasa melalui platform e-Katalog. Keberagaman unit usaha yang dijalankan ini mencerminkan kemampuan KKMP dalam merespons kebutuhan riil masyarakat sekaligus memanfaatkan peluang usaha yang tersedia di lingkungan sekitar. Kehadiran usaha distribusi gas LPG 3 kg dan sembako secara khusus memberikan kontribusi nyata dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan kebutuhan pokok bagi masyarakat di tingkat kelurahan.

Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT)

Rapat Anggota Tahunan (RAT) merupakan forum tertinggi dalam organisasi koperasi yang menjadi sarana pertanggungjawaban pengurus kepada anggota sekaligus wahana pengambilan keputusan strategis organisasi. Hingga saat ini, sebanyak delapan kelurahan telah berhasil melaksanakan RAT, yaitu Kelurahan Kutowinangun Kidul, Kalicacing, Sidorejo Lor, Ledok, Randuacir, Sidorejo Kidul, Tegalrejo, dan Gendongan. Capaian ini menunjukkan komitmen yang baik dari pengurus KKMP di kelurahan-kelurahan tersebut dalam menjalankan tata kelola organisasi koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi yang demokratis dan transparan.

Pada periode Mei hingga Juni, sejumlah kelurahan telah menjadwalkan pelaksanaan RAT, antara lain Kelurahan Kutowinangun Lor pada tanggal 29 Mei, serta Kelurahan Kecandran, Salatiga, Bugel, Kauman Kidul, dan Tingkir Lor yang sedang dalam tahap persiapan pelaksanaan. Sementara itu, terdapat lima kelurahan yang hingga kini belum memberikan informasi mengenai jadwal pelaksanaan RAT, yaitu Kelurahan Blotongan, Dukuh, Pulutan, Kalibening, dan Tingkir Tengah. Kelurahan-kelurahan tersebut perlu segera mendapat perhatian dan dorongan dari pemerintah daerah agar pelaksanaan RAT dapat segera terlaksana demi menjaga akuntabilitas dan keberlangsungan organisasi KKMP di wilayah masing-masing.

Hambatan dan Tantangan

Dalam perjalanannya, pengembangan KKMP di Kota Salatiga masih menghadapi sejumlah hambatan yang perlu mendapat perhatian serius. Dari sisi permodalan, keterbatasan modal usaha masih menjadi kendala utama yang menghambat pengembangan dan perluasan unit usaha KKMP. Selain itu, keterbatasan akses terhadap rantai pasok yang efisien

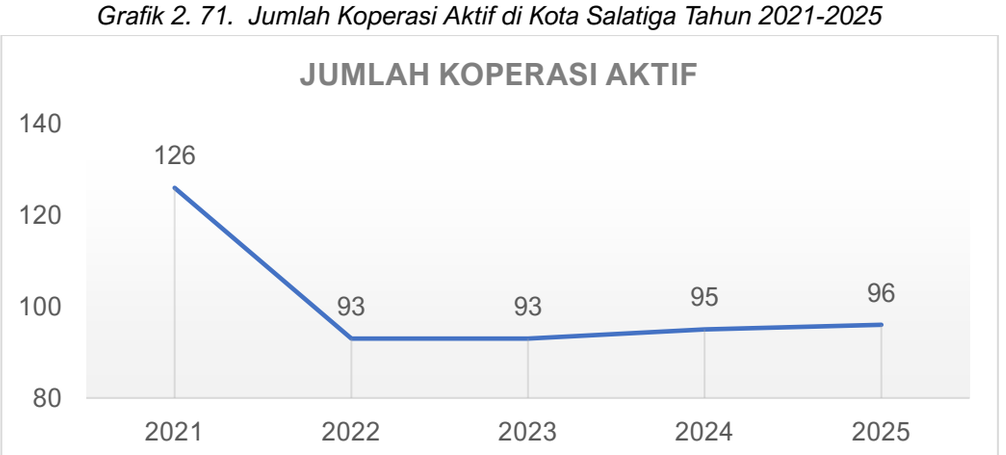
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

menyebabkan sulitnya memperoleh pasokan barang dengan harga kompetitif, sehingga berdampak pada daya saing produk yang dijual di gerai KKMP. Kondisi ini diperparah dengan lokasi gerai yang dinilai kurang strategis di beberapa kelurahan, sehingga belum mampu menarik minat masyarakat secara optimal.

Dari sisi kelembagaan, kepengurusan yang kurang solid menjadi persoalan mendasar yang perlu segera diatasi. Menurunnya semangat dan motivasi pengurus serta pengawas dalam menjalankan roda organisasi berpotensi menghambat pertumbuhan dan keberlanjutan KKMP. Kondisi ini semakin dirasakan seiring dengan hadirnya posisi Manajer KKMP yang berasal dari luar organisasi dengan kompensasi yang dinilai tidak sebanding dengan pengurus dan pengawas yang telah merintis KKMP dari awal. Ketimpangan penghargaan ini menimbulkan rasa ketidakadilan di kalangan pengurus dan pengawas yang telah berjasa membangun KKMP dari nol, sehingga berdampak pada menurunnya motivasi dan komitmen mereka dalam mengelola organisasi. Persoalan ini perlu segera diselesaikan melalui penataan ulang sistem penghargaan dan kompensasi yang lebih adil, transparan, dan proporsional bagi seluruh elemen yang berkontribusi dalam pengembangan KKMP, agar semangat gotong royong dan kebersamaan yang menjadi ruh gerakan koperasi dapat kembali tumbuh dan menguat.

Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis yang komprehensif, antara lain penguatan akses permodalan melalui kemitraan dengan lembaga keuangan, penataan rantai pasok yang lebih efisien, peningkatan kapasitas pengurus melalui pelatihan dan pendampingan intensif, serta pembenahan sistem tata kelola organisasi yang lebih berkeadilan. Dengan penanganan yang tepat dan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, pengurus, pengawas, manajer, dan seluruh anggota, KKMP diharapkan dapat berkembang menjadi koperasi yang sehat, mandiri, dan mampu memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi seluruh masyarakat Kota Salatiga.

Grafik 2. 71. Jumlah Koperasi Aktif di Kota Salatiga Tahun 2021-2025



k. Penanaman Modal

Target persentase kenaikan nilai investasi berskala nasional (PMA) tahun 2025 adalah 10,5% dan terealisasi sebesar 5,59%. Capaian indikator kinerja dibandingkan antar target dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

realisasi kinerja menunjukkan bahwa capaian kinerja untuk persentase kenaikan nilai investasi berskala nasional (PMA) tidak tercapai dan mengalami penurunan kinerja sebesar 4,91%. Capaian kinerja tersebut tidak bisa dicapai karena sebagian besar pelaku usaha modal asing tidak dapat melakukan penambahan investasi yang terkendala dengan aturan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Selain itu kepindahan kepemilikan perusahaan dari PMDN ke PMA atau sebaliknya dapat menyebabkan ketidakberhasilan atas capaian kinerja.

Target persentase kenaikan jumlah berskala nasional (PMA/PMDN) tahun 2025 adalah sebesar 4,00% dan terealisasi sebesar 10,53%. Capaian kinerja tersebut dapat tercapai karena kesadaran pelaku usaha dalam melaporkan kegiata usahanya meningkat. Capaian indikator kinerja ini bila dibandingkan antara target dan realisasi kinerja menunjukkan bahwa capaian kinerja persentase kenaikan jumlah berskala nasional (PMA/PMDN) tercapai dan mengalami peningkatan kinerja sebesar 6,53%.

Capaian kinerja tahun 2025 sebesar 10,53% dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2024 sebesar 41,02% mengalami penurunan sebesar 30,49%. Namum capaian kinerja tahun 2025 sebesar 10,53 % melebihi target 4%.

Penyebab ketidak berhasilan kenaikan nilai investasi PMA di antaranya adalah

a. Perluasan kegiatan usaha terkendala zonasi lahan
b. Penambahan realisasi investasi yang tidak signifikan

Pada tahun 2023 target investasi PMDN sebesar 10% dan realisasi 76,62%. Capaian indikator kinerja bila dibandingkan antara target dan realisasi kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja tersebut belum sudah tercapai. Namun dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2022 sebesar 9,29% mengalami kenaikan sebesar 67,33%. Capaian kinerja nilai investasi PMDN tahun 2022 sebesar Rp101,195 miliar, sedangkan capaian nilai investasi tahun 2023 sebesar Rp178,729 milliar mengalami kenaikan sebesar Rp77,53 miliar.

Penyebab belum tercapainya capaian ini dikarenakan:

- ✓ Realisasi Investasi yang diakui sebagai realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) merupakan realisasi dari pelaku usaha yang usahanya menengah keatas. Sehingga untuk usaha menegah kebawah belum diakui sebagai realisasi investasi PMDN, padahal sebenarnya dapat menambah nilai realiasai investasi PMDN.
- ✓ Ancaman resesi yang melanda Indonesia juga menjadi pengaruh turunnya nilai investasi PMDN di Kota Salatiga -Selain itu juga kesadaran pelaku usaha dalam melaporkan laporan kegiatan penanaman modalnya masih rendah.

Tabel 2. 71. Indikator Kinerja Daerah Penanaman Modal di Kota Salatiga Tahun 2021-2025

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
1	Kenaikan nilai investasi PMA	Milyar Rupiah	887,89	(931,90)	415,192	(72.306)	19,183
2	Persentase kenaikan nilai investasi PMA	%	n/a	n/a	43,61	-17,42	5,59

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
3	Kenaikan nilai investasi PMDN	Milyar Rupiah	92.592	8,603	n/a	113.237	469,091
4	Persentase kenaikan nilai investasi PMDN	%	n/a	n/a	76.62	63,36	160,67
5	Persentase Kenaikan Jumlah investor berskala nasiona (PMA)/PMDN)	%	n/a	n/a	166.22	3.13	23,84

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tahun 2025

I. Kepemudaan dan olah raga

Berdasarkan capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) bidang Kepemudaan dan Olahraga Kota Salatiga Tahun 2021–2025, kinerja pembangunan menunjukkan hasil yang beragam pada masing-masing indikator. Pada indikator Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri, capaian yang mulai terukur sejak tahun 2023 sebesar 2,5 persen mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi 1,96 persen dan kembali menurun pada tahun 2025 menjadi 1,03 persen. Kondisi ini mencerminkan masih rendahnya keterlibatan pemuda dalam aktivitas ekonomi produktif serta perlunya penguatan kebijakan dan program pemberdayaan ekonomi pemuda.

Selanjutnya, indikator Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Kemasyarakatan menunjukkan capaian sebesar 43,61 persen pada tahun 2023 dan meningkat menjadi 43,95 persen pada tahun 2024, namun mengalami penurunan cukup signifikan pada tahun 2025 menjadi 36,03 persen. Penurunan tersebut mengindikasikan adanya tantangan dalam menjaga konsistensi dan keberlanjutan partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan.

Sementara itu, indikator Cakupan Pembinaan Olahraga menunjukkan kinerja yang sangat baik dan stabil. Sejak tahun 2023 hingga 2025, capaian indikator ini tercatat 100 persen, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan olahraga telah menjangkau seluruh sasaran secara optimal dan berkelanjutan.

Berdasarkan capaian tersebut, penyusunan Ranwal RKPD Tahun 2027 perlu diarahkan pada penguatan peran dan kapasitas pemuda, khususnya melalui peningkatan partisipasi dalam kegiatan ekonomi mandiri dan organisasi kepemudaan, dengan dukungan program yang lebih inovatif, inklusif, dan adaptif terhadap kebutuhan pemuda. Di sisi lain, capaian positif pada bidang pembinaan olahraga perlu dipertahankan serta ditingkatkan kualitas dan keberlanjutannya guna mendukung peningkatan prestasi olahraga dan penguatan budaya hidup sehat masyarakat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 2. 72. Capaian Indikator Kinerja Daerah Kepemudaan dan Olahraga di Kota Salatiga Tahun 2021-2025

Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
Tingkat Partisipasi Pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	n/a	n/a	2.5	1,96	1,03
Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan	%	n/a	n/a	43,61	43,95	36,03
Cakupan pembinaan olah raga	%	n/a	n/a	100	100	100

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga, Tahun 2025

m. Statistik dan Persandian

Perubahan Indikator Kinerja Daerah pada urusan Statistik dan Persandian dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap arah kebijakan dan sasaran strategis dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025–2029. Penyesuaian ini bertujuan untuk memastikan indikator yang digunakan lebih relevan, terukur, dan selaras dengan perkembangan kebutuhan pengelolaan statistik sektoral serta penguatan keamanan informasi daerah. Melalui perubahan indikator tersebut, diharapkan pengukuran kinerja tidak hanya berfokus pada output kegiatan, tetapi juga pada kualitas tata kelola data, pemanfaatan statistik dalam perencanaan pembangunan, serta peningkatan tingkat kematangan penyelenggaraan persandian dan keamanan informasi. Dengan demikian, Indikator Kinerja Daerah yang ditetapkan mampu mencerminkan capaian kinerja secara lebih akurat dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah sesuai Renstra Dinas Kominfo 2025–2029.

Tabel 2. 73. Indikator Kinerja Daerah Statistik dan Persandian di Kota Salatiga Tahun 2021-2025

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	%	84.29	100	94	100	100
2	Tingkat pengamanan informasi daerah	%	92.30	70.85	80	100	70,85
3.	Indeks Kematangan pembangunan Statistik	Angka	-	-	-	-	2,61

Sumber: Dinas Kominfo, 2025

Persentase ketersediaan data statistik sectoral target RPD pada tahun 2025 adalah 95%, terealisasi 100%, sama dengan pencapaian di tahun 2024 yaitu sebesar 100%, sedangkan Persentase pengamanan informasi daerah target RPD 85%, terealisasi 70,85%, turun 29,15% dibanding tahun 2024 yang mencapai 100%.

Baseline Indeks Kematangan Pembangunan Statistik di tahun 2025 adalah 2,61. Indeks ini diharapkan menunjukkan peningkatan dari 2,61 pada 2025 menjadi proyeksi 2,63 di tahun

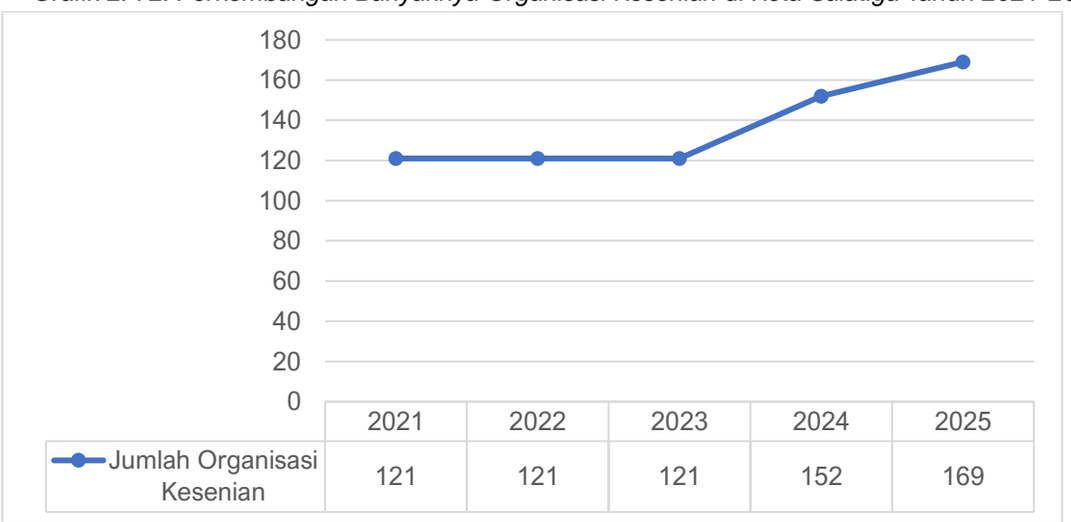
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2026 sesuai target renstra. Angka ini menunjukkan kestabilan dalam pengelolaan dan pengembangan data statistik yang penting sebagai dasar pengambilan keputusan strategis. Keberlanjutan pada aspek ini sangat krusial untuk mendukung transparansi dan peningkatan kualitas layanan publik berbasis data. Peningkatan ini mengindikasikan upaya perangkat daerah dalam membangun statistik di perangkat daerah.

n. Kebudayaan

Kota Salatiga yang disebut sebagai Indonesia mini terdiri dari beragam etnis sehingga menumbuhkan keragaman seni dan budaya yang ada. Jenis organisasi yang ada di antaranya Drumblek, Rebana, Tari, Kuda Lumping/Jaranan, Keroncong, Dangdut, Reog, Band dan lain-lain. Jumlah Organisasi Kesenian di Kota Salatiga cenderung meningkat pada tiga tahun terakhir dengan jumlah 169 organisasi kesenian. Berikut gambaran perkembangan organisasi kesenian di Kota Salatiga dalam kurun waktu 2021-2024.

Grafik 2. 72. Perkembangan Banyaknya Organisasi Kesenian di Kota Salatiga Tahun 2021-2025



Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Tahun 2025

Pada Tahun 2025 persentase obyek pemajuan yang dilindungi , dikembangkan dan dimanfaatkan dengan target capaian sebesar 44.12% kemudian disesuaikan target nya menjadi 57,97% dan terealisasi sebesar 76,81%, sehingga capaiannya sebesar 132,5%. Persentase cagar budaya yang dilestarikan terealisasi sebanyak 46,38% dari target awal 38% yang disesuaikan menjadi 38,57%, sehingga capaian nya sebesar 120,25%.

Tabel 2. 74. Indikator Kinerja Daerah Kebudayaan di Kota Salatiga Tahun 2021-2025

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
1)	Persentase obyek pemajuan yang dilindungi,dikembangkan dan dimanfaatkan	%	n/a	n/a	41,18	57,97	76,81
2)	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	%	14,18	22,86	28,57	38,57	46,38

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Tahun 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 2. 75. Data Dukung Kebudayaan di Kota Salatiga Tahun 2021-2025

No	Indikator Kinerja Daerah	2021	2022	2023	2024	2025
1)	Jumlah Karya Budaya Tercatat	0	0	3	1	2
2)	Jumlah Cagar Budaya (CB)	141	140	140	140	138
3)	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan	n/a	n/a	68	69	69

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Tahun 2025

Keterangan :

Karya Budaya Tercatat : Warisan Budaya Tak Benda
Cagar Budaya : Cagar Budaya yang Terdata
Obyek Pemajuan Kebudayaan : Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan penyelamatan dan publikasi)

o. Perpustakaan dan Kearsipan

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat pada tahun 2025 target 6,95% terealisasi 22,99% dengan capaian 330,79% dan target RPD 2026 sebesar 7,45% sehingga status tercapai. Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dengan target di tahun 2025 sebesar 76,5% terealisasi 90,16% dengan capaian kinerja 117,86% dan target RPD tahun 2026 sebesar 77% maka status tercapai.

Tabel 2. 76. Capaian Indikator Kinerja Daerah Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPD-2023 2026	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPD s.d Tahun 2025	Realisasi Capaian Kinerja RPD s.d Tahun 2025 (%)	Kategori Status	Status
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	%	7,45	6,45	22.99	22.99	330.79	Sangat Tinggi	Tercapai
2	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah)	%	77	76.5	90.16	90.16	117.86	Sangat tinggi	Tercapai

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Tahun 2025

Jumlah perpustakaan di Kota Salatiga pada tahun 2025 sebanyak 361 perpustakaan dengan jumlah kunjungan harian sebanyak pengunjung 77.110 orang mengalami peningkatan dari tahun 2024 dikarenakan sudah dibukanya kembali layanan perpustakaan pada Hari Sabtu dan Minggu.

Berikut data perkembangan jumlah pengunjung, anggota dan jumlah koleksi Perpustakaan Umum Kota Salatiga dalam kurun waktu 2021-2025.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 2. 77. Jumlah Pengunjung, Anggota dan Koleksi Perpustakaan Umum di Kota Salatiga Tahun 2021-2025

Tahun	PENGUNJUNG	ANGGOTA	KOLEKSI BUKU	KOLEKSI NON BUKU / AV
2021	35.870	38.764	61.016	686
2022	18.007	39.667	64.692	686
2023	23.608	41.036	66.226	686
2024	59.914	41.909	66.642	686
2025	77.110	43.086	73.654	686

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Tahun 2025

Persentase koleksi buku yang tersedia di perpustakaan pada tahun 2025 sebanyak 73.654, meningkat sebesar 5.76% dari tahun 2024. Koleksi ini merupakan penambahan dari belanja koleksi yang terdiri dari koleksi buku cetak dan elektronik.

Indikator kinerja Penyelenggaraan pemerintahan daerah Urusan Perpustakaan mengalami perubahan pada Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2023-2026, dengan indikatornya sebagai berikut :

1) Indeks Literasi Masyarakat pada tahun 2025 tercapai sebesar 63,14 dari target 52,76, sehingga capaian kinerjanya sebesar 119,67%.
2) Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat pada tahun 2025 tercapai sebesar 22,99 dari target 6,95, sehingga capaian kinerjanya sebesar 330,79%.
3) Nilai Tingkat kegemaran membaca pada tahun 2025 tercapai sebesar 54,04 dari target 85,83, sehingga capaianya 62,96%

Indikator kinerja Penyelenggaraan pemerintahan daerah Urusan Kearsipan juga mengalami perubahan pada Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2023-2026, dengan indikatornya Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional, pada tahun 2025 tercapai sebesar 90,16 dari target 76,5, sehingga capaiannya 117,86%.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2.4.3 Fokus Urusan Pemerintahan Pilihan

a. Kelautan dan Perikanan

Tabel 2. 78. Capaian Indikator Kinerja Daerah Kelautan dan Perikanan

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPD-2023 2026	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPD s.d Tahun 2025	Realisasi Capaian Kinerja RPD s.d Tahun 2025 (%)	Kategori Status	Status
1	Peningkatan produksi perikanan (ikan konsumsi)	%	6	6	6	9	150	Sangat Tinggi	Tercapai
2	Peningkatan Produksi Perikanan (benih)	%	5	5	6	1	16,67	Tidak Tercapai	Tidak Tercapai

Sumber : Dinas Pangan dan Pertanian, Tahun 2025

Peningkatan Produksi perikanan budidaya (ikan konsumsi) yang ditargetkan 6% dan terealisasi 9% dengan realisasi capaian kinerja 150% dan target RPD tahun 2026 sebesar 6 persen sehingga status tercapai.

Peningkatan produksi perikanan (benih) ditargetkan 5% dan realisasi 1% dengan capaian kinerja 16,67% dan target RPD tahun 2026 sebesar 5% sehingga status Tidak akan tercapai. Permasalahan tidak tercapainya indikator tersebut adalah karena Penurunan Produksi Benih Nila Dikarenakan Adanya Peremajaan Indukan (Afkir), sementara Induk Baru Belum Optimal Produksinya. Upaya mengatasi permasalahan dengan Memperbaiki Jadwal (Waktu) Perencanaan Dalam Peremajaan Indukan, sehingga saat akhir tahun, indukan sudah produktif

Produksi ikan merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kinerja sektor perikanan di suatu daerah. Sebagai indikator yang bersifat positif, semakin tinggi persentase peningkatan produksi ikan maka semakin baik capaian kinerja pembangunan di bidang ketahanan pangan dan perikanan. Di Kota Salatiga, perkembangan produksi ikan dalam kurun waktu 2021 hingga 2025 menunjukkan dinamika yang cukup beragam, mulai dari penurunan yang cukup dalam hingga pemulihan yang signifikan.

Pada tahun 2021, produksi ikan di Kota Salatiga mencatatkan pertumbuhan negatif sebesar -0,25 persen, yang mengindikasikan adanya sedikit penurunan produksi dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi serupa terjadi pada tahun 2022 dengan pertumbuhan negatif sebesar -0,54 persen. Penurunan yang paling tajam terjadi pada tahun 2023, di mana produksi ikan mengalami kontraksi hingga -10,46 persen. Penurunan drastis ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain perubahan iklim, gangguan ekosistem perairan, keterbatasan sarana produksi, maupun berkurangnya jumlah pembudidaya ikan aktif di Kota Salatiga.

Namun demikian, kondisi tersebut berhasil berbalik arah secara signifikan pada tahun 2024, di mana produksi ikan mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 6,34 persen. Tren

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

pemulihan ini terus berlanjut dan semakin menguat pada tahun 2025 dengan pertumbuhan sebesar 8,12 persen, menjadikannya capaian tertinggi selama periode pengamatan. Pemulihan yang konsisten dalam dua tahun terakhir ini mencerminkan keberhasilan upaya pemerintah daerah Kota Salatiga dalam mendorong kembali aktivitas perikanan, baik melalui program pembinaan pembudidaya ikan, peningkatan akses terhadap sarana dan prasarana produksi, maupun penguatan kelembagaan kelompok nelayan dan pembudidaya.

Fase kontraksi (2021–2023) — Produksi ikan mengalami penurunan tiga tahun berturut-turut, mencapai titik terdalam −10,46% pada 2023. Kemungkinan dipengaruhi dampak pascapandemi, kualitas benih, dan keterbatasan lahan budidaya.
Fase pemulihan (2024–2025) — Pertumbuhan berbalik positif ke +6,34% (2024) dan menguat ke +8,12% (2025). Pemulihan selama dua tahun berturut-turut menunjukkan intervensi program mulai memberikan hasil.
Akselerasi 2025 — Pertumbuhan 2025 (+8,12%) melampaui 2024 (+6,34%), menunjukkan momentum positif yang menguat.

Momentum pertumbuhan positif yang dicapai pada tahun 2024 dan 2025 perlu terus dijaga dan ditingkatkan. Penguatan sektor perikanan di Kota Salatiga tidak hanya berkontribusi pada peningkatan ketersediaan sumber protein hewani bagi masyarakat, tetapi juga berperan dalam mendukung ketahanan pangan daerah, membuka lapangan kerja di sektor perikanan, serta meningkatkan pendapatan para pembudidaya dan pelaku usaha perikanan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang konsisten dan berkelanjutan untuk memastikan pertumbuhan produksi ikan di Kota Salatiga dapat terus meningkat secara stabil di tahun-tahun mendatang.

	2021	2022	2023	2024	2025
Peningkatan Produksi Ikan dalam 1 tahun (%)	-0,25	-0,54	-10,46	6,34	8,12

b. Pariwisata

Pariwisata di Kota Salatiga menunjukkan perkembangan yang cukup positif dengan meningkatnya aktivitas wisatawan nusantara, terutama pada wisata kuliner, rekreasi keluarga, dan kegiatan berbasis komunitas. Berbagai kegiatan promosi dan event lokal mampu menjaga keberlangsungan aktivitas pariwisata.

Tabel 2. 79. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Pariwisata

Indikator	Satuan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara	%	106,06	69,14	86,16	113	113,52

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Indikator	Satuan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara	%	-37,062	183,7259	55,32	117,73	123,45
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	8,08	8,72	7,85	7,92	7,92
Tingkat hunian akomodasi	%	17,42	55,97	153,08	51,42	52,2
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	0,02	5,83	0,15	0,16	0,18
Jumlah daya tarik wisata	dtw	10	13	15	14	15
Jumlah desa/kampung wisata	desa	1	2	2	2	3

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Tahun 2025

Pada Tahun 2025 target persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara sebesar 109,71% yang kemudian disesuaikan menjadi 113% dan terealisasi sebesar 113,52% dan target RPD tahun 2026 sebesar 110.13% sehingga status tercapai. Penyebab berhasilnya capaian kinerja disebabkan karena :

a. Adanya koordinasi antar stakeholder pelaku pariwisata, pokdarwis, PHRI, pelaku ekonomi kreatif dan masyarakat serta OPD lintas sektoral terkait dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif;
b. Penggunaan berbagai motode dan media untuk mempromosikan pariwisata baik di dalam dan luar daerah.

Pada tahun 2025 persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara target 70% yang kemudian disesuaikan menjadi 100% dan realisasi 123,45% dan capaian kinerja 123,45% target RPD Tahun 2026 adalah 79% sehingga status tercapai. Hal- hal yang mendukung keberhasilan antara lain :

a) Kegiatan promosi melalui pameran promosi dan berbagai media serta event/ gelar pentas seni yang dilaksanakan baik di dalam kota maupun di luar kota Salatiga
b) Daya Tarik Kota Salatiga sebagai kota MICE dan kota tertoleran.
c) Peningkatan kelengkapan sarana prasarana dan pelayanan akomodasi hotel/penginapan/home stay di Kota Salatiga
d) Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antar stakeholder pelaku pariwisata, Pokdarwis, PHRI, pelaku ekonomi kreatif dan masyarakat serta OPD lintas sector terkait dalam pengembangan pariwisata.

Pada tahun 2025 tingkat hunian akomodasi target sebesar 25% dengan penyesuaian target sebesar 51,42% dan realisasi sebesar 52,2% dan capaian kinerja sebesar 101,52%.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Target RPD tahun 2026 sebesar 28% maka status tercapai maka status tercapai. Penyebab keberhasilan ini disebabkan:

a) Kegiatan promosi melalui pameran promosi dan berbagai media dan event/pentas gelar seni yang dilaksanakan di dalam / luar kota Salatiga.
b) Peningkatan kelengkapan sarpras dan pelayanan akomodasi horel/penginapan/home stay di Kota Salatiga
c) Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antar stakeholder pelaku pariwisata, Pokdarwis , PHRI , pelaku ekonomi kreatif dan masyarakat serta OPD lintas sektor terkait pengembangan pariwisata.

Pada Tahun 2025 target kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku adalah 9,5% dengan realisasi 7,92% dan capaian kinerja sebesar 83,37% dan target RPD tahun 2026 sebesar 10% sehingga status akan tercapai.

Pendapatan Asli Daerah sektor pariwisata yang dikelola Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga meliputi retribusi kolam renang Pemandian Kalitaman, sewa kafetaria, parkir Kalitaman, bilas air panas Kalitaman, retribusi penyewaan tanah insidentil, sewa Taman Wisata Sejarah Salatiga (TWSS) dan sewa Gedung Pemerintah Daerah (GPD.

Pada Tahun 2025 target kontribusi PAD Sektor pariwisata terhadap PAD Kota adalah 0,14% dengan penyesuaian target sebesar 0,16% terealisasi 0,18% dan capaian kinerjanya adalah 114,15%.

Tabel 2. 80. Capaian SDGs Urusan Pariwisata

NO	INDIKATOR NASIONAL	INDIKATOR KOTA SALATIGA	SATUAN	TAHUN				
				2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah wisatawan mancanegara	Jumlah wisatawan mancanegara	orang	467	1.318	1367	4.481	10.013
2	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	orang	182.743	286.916	253.312	1.225.681	2.617.085

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Tahun 2025

c. Pertanian

Kinerja sektor pertanian di Kota Salatiga tahun 2025 menunjukkan peran dalam mendukung ketahanan pangan lokal dan pengendalian inflasi pangan serta sebagai sektor penyangga stabilitas ekonomi dan sosial.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 2. 81. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Pertanian

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPD-2023 2026	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPD s.d Tahun 2025	Realisasi Capaian Kinerja RPD s.d Tahun 2025 (%)	Kategori Status	Status
1	Produktivitas padi	%	6.15	6.15	6.30	6.30	102,55	Sangat Tinggi	Tercapai
2	Peningkatan produktivitas tanaman hortikultura	%	10	10	-0,4	-0,4	-4	Rendah	Tidak tercapai
3	Peningkatan produktivitas peternakan daging sapi	%	6,90	0,03	0,12	0,12	133,33	Sangat Tinggi	Tercapai
4	Produktivitas Sapi Perah	%	0,52	0.80	3,00	3,00	165,15	Sangat tinggi	tercapai
5	Penurunan kejadian kematian hewan akibat penyakit zoonosis	%	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi	tercapai

Sumber : Dinas Pangan dan Pertanian, Tahun 2025

Produktivitas padi yang ditargetkan Tahun 2025 sebesar 6.15 % terealisasi 6.30% dengan capaian kinerja 102,55% dan target RPD Tahun 2026 sebesar 6.15% dengan status tercapai. Penyebab keberhasilan peningkatan produktivitas padi adalah :

- ✓ Memberikan pelatihan dan pendampingan teknik budidaya yang tepat serta sesuai rekomendasi kepada petani seperti bimbingan teknik pembuatan Nitrobacter,
- ✓ Melakukan identifikasi potensi kerusakan saluran irigasi serta usulan pembangunan jalan usaha tani;
- ✓ Penyediaan stok pestisida dan agensi hayati yang diberikan ke petani serta melakukan gerakan pengendalian OPT secara masif.

Tabel 2. 82. Jumlah Produksi Daging, Telur dan Susu Kota Salatiga 2021-2025

No	Produksi Ternak	2021	2022	2023	2024	2025
1.	**Daging (kg)**	20.477.043	30.012.683	29.658.657	27.670.545	33.579.752
2.	Sapi	1.395.800	1.701.880	1.372.200	1.190.820	1.436.241
3.	Kambing	7.830	13.440	35.805	22.996	61.910,16
4.	Domba	9.195	9.510	8.580	22.539	12.793,19
5.	Babi	23.530	28.275	35.165	51.283	51.685,71
6.	Ayam Ras	19.026.758	28.244.356	28.182.662	26.350.754	31.984.739,48
7.	Ayam Buras	13.930	15.200	15.199,80	21.304,36	21.419,86
8.	Entog	-	9.022,15	9.045,90	10.849	10.963,00
9.	**Telur (kg)**	**204.605**	**235.983,94**	**302746**	**255.038,38**	**236.580**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Produksi Ternak	2021	2022	2023	2024	2025
10.	Ayam Ras	128.086	128.086,00	168.174,60	48.066,40	25.356
11.	Ayam Buras	40.994	40.993,86	68.320,77	119.238,98	119.871,55
12.	Itik	24.371	24.370,57	28.212,70	48.743	54.035,38
13.	Puyuh	11.154	11.153,61	12.275,57	12.278,10	10.921,84
14.	Entog	-	31.379,90	25.763,08	26.676,90	26.395,69
15.	**Susu (liter)**	**3.796.200**	**3.842.236,00**	**2.491.967,34**	**2.990.980,09**	**3.114.481,56**
15.	Susu	3.796.200	3.842.236,00	2.491.967,34	2.990.980,09	3.114.481,56

Sumber : Dinas Pangan dan Pertanian, Tahun 2025

Berdasarkan data produksi daging dan ternak Kota Salatiga periode 2021–2025, subsektor peternakan menunjukkan prospek pertumbuhan yang cukup baik dengan kecenderungan peningkatan produksi dari sebagian besar komoditas utama. Total produksi daging meningkat dari sekitar 20,48 juta kg pada tahun 2021 menjadi 33,58 juta kg pada tahun 2025 atau tumbuh sekitar 64 persen dalam lima tahun terakhir. Kondisi ini menunjukkan bahwa subsektor peternakan masih menjadi salah satu sektor strategis dalam mendukung ketahanan pangan dan pengembangan ekonomi lokal.

Kontributor terbesar produksi daging masih didominasi oleh ayam ras yang secara konsisten menyumbang lebih dari 90 persen total produksi daging. Produksi ayam ras meningkat dari 19,03 juta kg pada tahun 2021 menjadi 31,98 juta kg pada tahun 2025. Dominasi tersebut menunjukkan bahwa Salatiga memiliki keunggulan komparatif pada subsektor perunggasan modern yang didukung oleh sistem budidaya yang relatif maju, akses pasar yang luas, serta tingginya permintaan masyarakat terhadap daging ayam sebagai sumber protein hewani utama.

Selain ayam ras, komoditas babi menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Produksi meningkat dari 23,53 ton pada tahun 2021 menjadi 51,69 ton pada tahun 2025. Tren ini mengindikasikan adanya peluang pengembangan pasar tertentu (niche market) yang dapat menjadi sumber pertumbuhan baru bagi subsektor peternakan. Komoditas kambing juga memperlihatkan pertumbuhan yang sangat tinggi, dari 7,83 ton pada tahun 2021 menjadi sekitar 61,91 ton pada tahun 2025. Peningkatan tersebut menunjukkan semakin berkembangnya usaha ternak rakyat yang berpotensi mendukung penyediaan daging lokal sekaligus meningkatkan pendapatan peternak skala kecil.

Sementara itu, produksi sapi cenderung berfluktuasi namun tetap berada pada tingkat yang cukup tinggi. Pada tahun 2025 produksi sapi mencapai 1.436 ton, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa subsektor sapi masih memiliki peluang untuk dikembangkan, terutama sebagai penyedia daging berkualitas dan sebagai bagian dari program penguatan ketahanan pangan berbasis peternakan ruminansia.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Komoditas domba dan entok menunjukkan kontribusi yang relatif kecil terhadap total produksi daging, namun tetap memiliki prospek pengembangan pada segmen pasar tertentu. Produksi domba mengalami fluktuasi yang mengindikasikan perlunya perbaikan manajemen usaha dan penguatan kelembagaan peternak. Adapun entok memperlihatkan tren peningkatan sejak mulai tercatat pada tahun 2022, yang menunjukkan adanya diversifikasi usaha peternakan yang dapat terus didorong.

Apabila tren pertumbuhan saat ini dapat dipertahankan, maka struktur pengembangan peternakan Salatiga ke depan diperkirakan akan mengarah pada tiga kelompok utama:

Kelompok Perunggasan (Ayam Ras)

Perunggasan akan tetap menjadi motor utama produksi daging daerah karena memiliki:

- Skala produksi terbesar.
- Pertumbuhan produksi yang stabil.
- Siklus produksi cepat.
- Permintaan pasar yang tinggi dan berkelanjutan.

Fokus kebijakan:

- Penguatan biosekuriti dan kesehatan ternak.
- Pengembangan industri hilir dan pengolahan daging ayam.
- Modernisasi kandang dan efisiensi pakan.
- Penguatan rantai pasok dan distribusi.

Kelompok Sapi Potong

Sapi memiliki nilai ekonomi tinggi dan berperan penting dalam menjaga ketahanan pangan.

Fokus kebijakan:

- Peningkatan produktivitas melalui perbaikan bibit.
- Integrasi peternakan dengan pertanian.
- Pengembangan penggemukan sapi rakyat.
- Penguatan kemitraan usaha dan akses pembiayaan.

Kelompok Tumbuh Cepat: Kambing dan Babi

Pertumbuhan produksi yang tinggi menunjukkan peluang pengembangan pasar yang masih terbuka.

Fokus kebijakan:

- Pengembangan sentra ternak rakyat.
- Peningkatan kualitas bibit dan reproduksi.
- Penguatan kelompok peternak.
- Pengembangan pasar khusus dan produk olahan.

Berdasarkan struktur dan tren produksi tersebut, arah kebijakan pembangunan peternakan Kota Salatiga ke depan dapat difokuskan pada:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1. **Menjadikan perunggasan sebagai sektor penggerak utama pertumbuhan ekonomi peternakan daerah**, melalui peningkatan produktivitas, efisiensi usaha, dan pengembangan industri hilir.
2. **Memperkuat peternakan sapi sebagai penopang ketahanan pangan daerah**, dengan fokus pada peningkatan populasi produktif dan kualitas ternak.
3. **Mengembangkan kambing sebagai komoditas unggulan peternakan rakyat**, mengingat laju pertumbuhannya paling tinggi dan relatif sesuai dengan karakteristik usaha peternak skala kecil.
4. **Mendorong diversifikasi produksi ternak melalui pengembangan babi, domba, dan entok**, terutama untuk memenuhi kebutuhan pasar khusus dan meningkatkan variasi sumber pendapatan peternak.
5. **Membangun ekosistem peternakan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir**, mencakup penyediaan bibit, pakan, kesehatan hewan, pengolahan hasil, pemasaran, dan akses pembiayaan.

Dengan pendekatan tersebut, pembangunan subsektor peternakan Kota Salatiga tidak hanya berorientasi pada peningkatan volume produksi daging, tetapi juga pada penguatan komoditas yang memiliki keunggulan kompetitif dan prospek pasar terbaik, sehingga kebijakan yang diambil menjadi lebih fokus, efektif, dan berbasis potensi spesifik masing-masing subsektor.

Berdasarkan data produksi telur Kota Salatiga tahun 2021–2025, subsektor perunggasan petelur menunjukkan potensi yang cukup besar untuk terus berkembang sebagai salah satu penopang ketahanan pangan dan penyedia protein hewani masyarakat. Total produksi telur mengalami fluktuasi namun tetap berada pada level yang tinggi, yaitu dari sekitar 204,6 ton pada tahun 2021 meningkat hingga mencapai puncak sebesar 302,7 ton pada tahun 2023, kemudian berada pada kisaran 236,6 ton pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa usaha peternakan unggas petelur di Salatiga masih memiliki kapasitas produksi yang kuat dan prospek pengembangan yang menjanjikan.

Struktur produksi telur di Kota Salatiga masih didominasi oleh telur ayam ras yang menjadi sumber utama pasokan telur masyarakat. Meskipun produksi telur ayam ras mengalami penurunan dalam dua tahun terakhir, komoditas ini tetap memiliki peran strategis karena didukung oleh tingginya permintaan pasar, jaringan distribusi yang relatif baik, serta kemudahan pengembangan teknologi budidaya. Penurunan produksi yang terjadi dapat menjadi sinyal perlunya penguatan aspek efisiensi usaha, manajemen pakan, pengendalian penyakit, dan regenerasi populasi ayam petelur agar daya saing usaha tetap terjaga.

Di sisi lain, telur ayam buras menunjukkan perkembangan yang sangat positif. Produksi meningkat hampir tiga kali lipat dari sekitar 41 ton pada tahun 2021 menjadi hampir 120 ton pada tahun 2025. Tren ini menunjukkan adanya peningkatan minat pasar terhadap telur ayam buras yang dinilai memiliki nilai tambah dari aspek kesehatan, cita rasa, maupun preferensi konsumen tertentu. Kondisi tersebut menjadi peluang bagi pengembangan peternakan rakyat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

berbasis ayam lokal yang mampu meningkatkan pendapatan rumah tangga peternak sekaligus mendukung diversifikasi sumber pangan.

Komoditas telur itik juga memperlihatkan pertumbuhan yang cukup signifikan. Produksi meningkat dari sekitar 24 ton pada tahun 2021 menjadi lebih dari 54 ton pada tahun 2025. Peningkatan ini mencerminkan adanya peluang pasar yang terus berkembang, baik untuk konsumsi rumah tangga maupun kebutuhan industri kuliner dan pengolahan pangan. Dengan karakteristik produk yang berbeda dibandingkan telur ayam, telur itik berpotensi menjadi komoditas unggulan pada segmen pasar tertentu yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi.

Sementara itu, produksi telur puyuh cenderung stabil meskipun mengalami sedikit penurunan pada tahun 2025. Stabilitas tersebut menunjukkan bahwa usaha peternakan puyuh masih memiliki pangsa pasar yang cukup baik dan dapat terus dikembangkan sebagai usaha peternakan skala kecil dengan kebutuhan lahan dan modal yang relatif lebih rendah. Adapun telur entok yang mulai tercatat sejak tahun 2022 menunjukkan tingkat produksi yang relatif stabil sehingga dapat menjadi alternatif diversifikasi usaha peternakan unggas.

Berdasarkan tren produksi selama lima tahun terakhir, terdapat tiga kelompok subsektor yang berpotensi menjadi fokus pengembangan di Kota Salatiga, yaitu:

Unggulan Utama: Telur Ayam Ras

Telur ayam ras masih menjadi komoditas utama karena memberikan kontribusi terbesar terhadap total produksi telur daerah. Tingginya kebutuhan konsumsi masyarakat menjadikan komoditas ini sebagai penopang utama ketahanan pangan berbasis protein hewani.

Fokus pengembangan:

- Peningkatan produktivitas ayam petelur.
- Efisiensi biaya pakan dan produksi.
- Penguatan biosekuriti dan kesehatan ternak.
- Pengembangan sentra peternakan petelur modern.
- Penguatan rantai distribusi dan pemasaran.

Berkembang Pesat: Telur Ayam Buras

Pertumbuhan produksi yang sangat tinggi menunjukkan bahwa ayam buras memiliki prospek sebagai komoditas unggulan baru berbasis peternakan rakyat.

Fokus pengembangan:

- Perbaikan mutu bibit ayam lokal.
- Pengembangan usaha peternakan skala rumah tangga.
- Sertifikasi dan branding produk telur ayam kampung.
- Penguatan kelompok peternak dan kemitraan usaha.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Potensial Bernilai Tambah: Telur Itik

Kenaikan produksi yang konsisten menunjukkan bahwa telur itik memiliki peluang pasar yang terus berkembang, terutama untuk kebutuhan industri makanan dan produk olahan.

Fokus pengembangan:

- Pengembangan kawasan budidaya itik petelur.
- Diversifikasi produk olahan telur asin dan produk turunannya.
- Peningkatan kualitas pakan dan manajemen pemeliharaan.
- Penguatan akses pasar dan promosi produk lokal.

Dengan mempertimbangkan karakteristik dan tren perkembangan masing-masing komoditas, arah kebijakan pengembangan produksi telur di Kota Salatiga dapat difokuskan pada:

1. **Mempertahankan dan meningkatkan daya saing subsektor telur ayam ras sebagai penyumbang utama produksi telur daerah** melalui modernisasi usaha peternakan, peningkatan efisiensi produksi, dan penguatan sistem kesehatan hewan.
2. **Menjadikan ayam buras sebagai prioritas pengembangan peternakan rakyat**, mengingat laju pertumbuhannya yang tinggi serta potensinya dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan diversifikasi sumber protein hewani.
3. **Mengembangkan telur itik sebagai komoditas unggulan bernilai tambah**, terutama melalui penguatan industri pengolahan dan pemasaran produk turunannya.
4. **Mendorong diversifikasi usaha unggas petelur melalui pengembangan puyuh dan entok**, sebagai alternatif usaha peternakan yang adaptif terhadap keterbatasan lahan dan modal.
5. **Membangun sistem agribisnis perunggasan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir**, meliputi penyediaan bibit, pakan, kesehatan ternak, pengolahan hasil, pemasaran, dan dukungan pembiayaan usaha.

Dengan strategi tersebut, pengembangan produksi telur di Kota Salatiga tidak hanya berorientasi pada peningkatan volume produksi, tetapi juga pada penguatan komoditas yang memiliki pertumbuhan tinggi, nilai tambah ekonomi, serta peluang pasar yang menjanjikan sehingga kebijakan pembangunan peternakan menjadi lebih fokus, efektif, dan berbasis pada potensi spesifik masing-masing subsektor unggas petelur.

Berdasarkan data produksi susu Kota Salatiga periode 2021–2025, subsektor peternakan sapi perah menunjukkan prospek yang cukup menjanjikan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi peternakan daerah. Produksi susu tercatat sebesar 3,80 juta liter pada tahun 2021 dan meningkat menjadi 3,84 juta liter pada tahun 2022. Meskipun pada tahun 2023 terjadi penurunan menjadi sekitar 2,49 juta liter, produksi kembali menunjukkan tren pemulihan pada tahun 2024 dan 2025 hingga mencapai 3,11 juta liter. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa usaha sapi perah di Kota Salatiga memiliki daya tahan yang cukup

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

baik terhadap berbagai tantangan produksi serta masih memiliki peluang besar untuk terus berkembang.

Sebagai daerah yang berada dalam kawasan sentra peternakan sapi perah di wilayah Jawa Tengah, Kota Salatiga memiliki posisi strategis dalam pengembangan agribisnis susu. Ketersediaan sumber daya manusia yang telah berpengalaman dalam usaha peternakan sapi perah, kedekatan dengan pusat pengolahan susu, serta akses pasar yang relatif baik menjadi modal penting untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing subsektor ini.

Tren pemulihan produksi setelah penurunan pada tahun 2023 menunjukkan bahwa kapasitas produksi susu daerah masih cukup kuat. Apabila berbagai kendala yang memengaruhi produktivitas, seperti kualitas pakan, efisiensi pemeliharaan, kesehatan ternak, dan regenerasi populasi sapi perah dapat diatasi, maka produksi susu berpotensi kembali meningkat dan bahkan melampaui capaian tertinggi yang pernah dicapai sebelumnya.

Selain berperan sebagai penyedia pangan bergizi, subsektor susu memiliki nilai tambah ekonomi yang relatif tinggi karena produk susu dapat dikembangkan menjadi berbagai produk olahan seperti susu pasteurisasi, yoghurt, keju, es krim, dan aneka produk pangan berbasis susu lainnya. Potensi hilirisasi tersebut membuka peluang peningkatan pendapatan peternak dan pelaku usaha pengolahan hasil peternakan di Kota Salatiga.

Melihat perkembangan produksi selama lima tahun terakhir, terdapat beberapa potensi utama yang dapat menjadi penggerak pertumbuhan subsektor susu di Kota Salatiga:

(a) Peningkatan Produktivitas Susu

Produktivitas susu per ekor sapi masih dapat ditingkatkan melalui penerapan teknologi budidaya yang lebih baik, perbaikan kualitas pakan, serta penguatan layanan kesehatan hewan.

Potensi pengembangan:

- Peningkatan produksi susu per ekor.
- Efisiensi biaya produksi.
- Peningkatan kualitas susu segar.
- Penurunan risiko penyakit dan gangguan reproduksi.

(b) Penguatan Peternakan Rakyat Berbasis Sapi Perah

Sebagian besar usaha sapi perah masih didominasi oleh peternak skala kecil dan menengah yang memiliki peran penting dalam penyediaan susu segar daerah.

Potensi pengembangan:

- Peningkatan kapasitas usaha peternak.
- Penguatan kelembagaan kelompok dan koperasi susu.
- Kemudahan akses pembiayaan dan teknologi.
- Regenerasi peternak muda.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

(c) Pengembangan Industri Hilir Susu

Produksi susu yang cukup besar membuka peluang pengembangan industri pengolahan berbasis susu yang dapat memberikan nilai tambah lebih tinggi dibandingkan penjualan susu segar.

Potensi pengembangan:

- Produk susu pasteurisasi.
- Yoghurt dan minuman fermentasi.
- Keju dan produk olahan susu lainnya.
- Pengembangan UMKM berbasis susu lokal.

(d) Penguatan Pasar dan Branding Produk Susu Lokal

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap konsumsi pangan bergizi menjadi peluang besar bagi pengembangan produk susu lokal.

Potensi pengembangan:

- Pemasaran susu segar berkualitas.
- Pengembangan merek produk susu khas Salatiga.
- Kemitraan dengan industri pengolahan dan sektor pariwisata.
- Integrasi dengan program pangan bergizi masyarakat.

Arah Kebijakan yang Lebih Terarah dan Berbasis Potensi

Berdasarkan kondisi dan tren perkembangan produksi susu, arah kebijakan pengembangan subsektor susu Kota Salatiga dapat difokuskan pada beberapa strategi berikut:

(a) Menjadikan sapi perah sebagai subsektor prioritas peternakan bernilai tambah tinggi

Fokus kebijakan diarahkan pada peningkatan produktivitas, kualitas susu, dan keberlanjutan usaha peternakan sapi perah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi peternakan daerah.

(b) Meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha peternakan sapi perah

Melalui:

- Penyediaan bibit unggul.
- Perbaikan manajemen pakan.
- Penguatan layanan kesehatan hewan.
- Penerapan teknologi peternakan modern.

(c) Memperkuat kelembagaan peternak dan koperasi susu

Kelembagaan yang kuat akan meningkatkan posisi tawar peternak dalam pemasaran, akses pembiayaan, serta adopsi inovasi teknologi.

(d) Mengembangkan hilirisasi dan diversifikasi produk susu

Kebijakan diarahkan untuk mendorong tumbuhnya industri pengolahan susu skala kecil dan menengah sehingga nilai tambah ekonomi dapat dinikmati di tingkat lokal.

(e) Membangun rantai pasok susu yang terintegrasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Mulai dari penyediaan pakan, produksi susu, pengumpulan, pengolahan, distribusi, hingga pemasaran produk sehingga tercipta sistem agribisnis susu yang efisien dan berkelanjutan.

Data produksi susu tahun 2021–2025 menunjukkan bahwa Kota Salatiga memiliki potensi kuat untuk mengembangkan subsektor sapi perah sebagai salah satu unggulan peternakan daerah. Meskipun sempat mengalami penurunan produksi pada tahun 2023, tren pemulihan yang terjadi pada tahun 2024–2025 menunjukkan bahwa kapasitas produksi masih sangat prospektif. Oleh karena itu, arah kebijakan pembangunan peternakan ke depan perlu difokuskan pada **penguatan produktivitas sapi perah, peningkatan kualitas susu, pengembangan industri pengolahan susu, serta penguatan kelembagaan peternak**, sehingga subsektor susu dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi daerah yang berdaya saing, berkelanjutan, dan memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat Kota Salatiga.

Tabel 2. 83. Populasi Ternak Ruminansia dan Non Ruminansia Kota Salatiga 2021-2025

No	Jenis Ternak	Tahun (Ekor)				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Sapi Perah	3.998	2.520	2550	3.035	3.036
2.	Sapi Potong	1.388	499	510	945	960
3.	Kerbau Potong	64	35	19	26	25
4.	Kuda	50	51	45	11	11
5.	Babi	-	294	450	277	284
6.	Kambing Potong	3.171	3,384	3,409	4,020	4,035
7.	Domba	818	897	908	631	650
8.	Ayam Ras Petelur Produktif	-	20,600	19,700	2,920	2,950
9.	Ayam Ras Pedaging	305.000	465,000	522,000	393,429	448,500
10.	Ayam Buras	89.023	32,601	31,345	56,102	54,585
11.	Itik	305.000	3,341	3,257	6,280	6,350
12.	Kelinci	3.604	1,261	1,202	195	190
13.	Burung Puyuh	7.200	12,132	8,472	8,450	8,385
14.	Entog	4.772	4,663	4,457	3,124	3,003
15.	Angsa	-	223	-	102	110
16.	Merpati	-	2,275	2,230	1,812	1,796
17.	Sapi Potong Eks Import (BX)	-	-	-	-	-
18.	Kerbau Perah	-	-	-	-	-
19	Kambing Perah	-	352	485	562	289

Sumber : Dinas Pangan dan Pertanian, Tahun 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Secara umum, kondisi penggunaan lahan pertanian tahun 2021-2025, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 84. Luas Penggunaan Lahan Pertanian Kota Salatiga 2021-2025

No	Tahun	Lahan Sawah (ha)	Bukan Sawah (ha)	Total Lahan Pertanian (ha)	Kenaikan /Penurunan (ha)
1	2021	626,70	1.737,00	2.363,70	(24,97)
2	2022	626,70	1.742,00	2.368,70	5,00
3	2023	514,75	1.843,00	2.357,75	(10,95)
4	2024	514,75	1.843,00	2.357,75	(10,95)
5	2025	503,90	1.842,4,00	2.346,25	(11,5)

Sumber : Dinas Pangan dan Pertanian, Tahun 2025

Peningkatan produktivitas tanaman hortikultura dengan target 10% dan realisasi -19,10% dengan capaian kinerja 1,91% dan target RPD Tahun 2026 sebesar 10% dengan status Belum tercapai. Kegagalan ini dikarenakan beberapa hal, yaitu :

1. Kurangnya keterampilan petani dalam melakukan budidaya vanili terutama pemeliharaan tanaman;
2. Anomali iklim, kemarau kering 2 tahun terakhir menyebabkan tanaman kering;
3. Adanya jamur penyebab penyakit busuk batang yang cepat menular;
4. Petani mengganti tanaman vanili menjadi komoditas lain;
5. Alih fungsi lahan.

Peningkatan produktivitas peternakan daging sapi yang ditargetkan 0.03% dan terealisasi 0,12% dan realisasi capaian 133,3% dan target terhadap RPD s.d tahun 2026 sebesar 0.04% dengan status tercapai. Faktor penyebab keberhasilan diantaranya adanya Penyediaan sarana prasarana yang memadai, RPH telah bersertifikasi halal dan NKV.

Produktivitas sapi perah ditargetkan 0,80% dan realisasi 3% dan capaian kinerja 375 % dan target RPD Tahun 2026 sebesar 0.52% dengan status tercapai . Faktor penyebab keberhasilan diantaranya adanya Dilaksanakan pelatihan pembuatan pakan konsentrat, pelatihan hijauan makanan ternak, pelatihan manajemen budidaya pedet, vaksinasi PMK, Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui surveilens secara masif.

Penurunan kejadian kematian hewan akibat zoonosis ditargetkan 100 % dan terealisasi 100% sehingga capaian kinerjanya 100% dan target RPD Tahun 2026 sebesar 100% sehingga status tercapai.

Data Capaian produksi Tanaman Pangan, untuk luas panen sudah sesuai dengan provinsi, karena input realisasi menggunakan aplikasi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

d. Perdagangan

Tabel 2. 85. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Perdagangan Tahun 2021-2025

NO	INDIKATOR Kinerja Daerah	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persen	5,36	5,53	4,48	4,89	4,33

Sumber : Dinas Perdagangan, Tahun 2025

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB target 4.81% dan realisasi tahun 2025 sebesar 4.89% (tahun 2025 belum dirilis BPS) dan capaian realisasi 101,66% dan target RPD tahun 2026 sebesar 4.89% dengan status tercapai.

Tabel 2. 86. Capaian SDGs Urusan Perdagangan

NO	INDIKATOR NASIONAL	INDIKATOR KOTA SALATIGA	SATUAN	TAHUN				
				2021	2022	2023	2024	2025
1	Laju pertumbuhan PDRB perkapita	Laju pertumbuhan PDRB perkapita	Persen	3,33	4,70	5,34	5,37	5,98
2	PDRB perkapita	PDRB perkapita	juta rupiah		78,99	54,89	89,93	95,23
3	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun	Laju pertumbuhan PDRB	Persen	3,33	5,53	5,34	5,37	5,98

Sumber : Dinas Perdagangan, Tahun 2025

e. Perindustrian

Tabel 2. 87. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Perindustrian

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPD-2023 2026	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPD s.d Tahun 2025	Realisasi Capaian Kinerja RPD s.d Tahun 2025 (%)	Kategori Status	Status
1	Persentase Pertumbuhan IKM (Industri Kecil Menengah)	%	0.49	0.43	0.55	0.55	120.33	Sangat tingg	tercapai
2	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	31.15	31.10	33.10	33.10	98.80	Sangat Tinggi	Tercapai

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Tahun 2025

Pada tahun 2025 target yang ditetapkan untuk persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah sebesar 0,43% dan terealisasi 0.55% dimana capaian kinerja sebesar 120.33 % dan target RPD tahun 2026 sebesar 0.46% tercapai. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB target yang ditetapkan di Tahun 2025 sebesar 31.10% terealisasi 33.10% dimana capaian kinerja sebesar 98.80% dan target RPD tahun 2026 sebesar 31.15%.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

f. Transmigrasi

Tabel 2. 88. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Transmigrasi

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPD-2023 2026	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPD s.d Tahun 2025	Realisasi Capaian Kinerja RPD s.d Tahun 2025 (%)	Kategori Status	Status
1	Prosentase Peningkatan Peminat Transmigrasi	%	4.60	4.07	88,89	24,07	591,40	Sangat Tinggi	Tercapai

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Tahun 2025

Pada tahun 2024 target persentase peminat transmigrasi sebesar 0.00 % dengan realisasi kinerja sebesar 0.00 dimana capaian kinerja sebesar 0% dan target RPD tahun 2026 sebesar 4.60 % maka status upaya keras. Kendala dalam capaian kinerja ini karena :

a) Ketidaksesuaian minat calon transmigran (Catran) dengan lokasi/ destinasi transmigrasi yang sediakan sehingga persentase peminat transmigrasi yang merupakan indikator keberhasilan kinerja urusan transmigrasi belum mencapai target yang telah ditetapkan.
b) Penentuan lokasi transmigrasi dan jumlah kuota oleh Pemerintah Pusat setelah Kegiatan penyuluhan/sosialisasi transmigrasi sehingga pada saat sosialisasi belum diketahui lokasinya dan jumlah kuotanya.

Solusinya dalam pencapaian kinerja adalah mengoptimalkan kegiatan fasilitasi program transmigrasi.

2.4.4 Fokus Layanan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Kinerja Daerah pada Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan terdiri dari Fungsi Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan; Keuangan; Kepegawaian dan Pengawasan.

a. Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Tabel 2. 89. Capaian Indikator Kinerja Daerah Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPD-2023 2026	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPD s.d Tahun 2025	Realisasi Capaian Kinerja RPD s.d Tahun 2025 (%)	Kategori Status	Status
1	Indeks Inovasi	%	46.36	46.34	48,88	48,88	105,43	Sangat Tinggi	tercapai
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dalam Perencanaan Pembangunan	%	46.67	42,86	73,68	73,68	157,87	Sangat Tinggi	tercapai
2	Penjabaran Konsistensi Program RPD ke dalam RKPD	%	90	85	97,67	96,67	107,41	Sangat Tinggi	Tercapai

Sumber : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Tahun 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pada tahun 2025 indeks inovasi target 46.34 dengan realisasi 48,88 dan capaian kinerja 105,43 serta target RPD tahun 2026 sebesar 46.34 dengan status tercapai, dengan ditetapkannya Perwali no 10 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan inovasi daerah menjadi salah satu landasan hukum dalam upaya meningkatkan indeks inovasi melalui tahapan – tahapan yang telah ditentukan sesuai peraturan.

Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dalam Perencanaan Pembangunan dengan target tahun 2025 sebesar 42,86% dan realisasi sebesar 73,68% dan capaian kinerja 157,87% serta target RPD Tahun 2026 sebesar 46.67% maka status tercapai.

Pemanfaatan kelitbangan menjadi salah satu pertimbangan awal dalam menentukan kebijakan dalam perencanaan pembangunan, serta penyusunan dokumen kelitbangan juga mengacu pada kebijakan nasional sebagai salah satu landasan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Terekamnya data usulan masyarakat dalam sistem maka pemantauan usulan menjadi lebih valid dan terukur. Selain itu dengan semakin sadarnya masyarakat dalam mengusulkan kegiatan yang disesuaikan dengan prioritas pembangunan tahun yang berkenaan menjadikan tingginya usulan yang terakomodasi dalam dokumen perencanaan.

Penjabaran konsistensi program RPD ke dalam RKPD target pada Tahun 2025 sebesar 85% terealisasi 96,67% dan capaian kinerja 107,41% dan target RPD tahun 2026 sebesar 90% maka status tercapai.

Berdasarkan capaian indikator daerah tersebut dapat disimpulkan bahwa semua target yang dituangkan dalam Perwali Nomor 10 Tahun 2022 tentang RPD Kota Salatiga 2023-2026 dapat dicapai sebelum tahun 2026.

Tabel 2. 90. Capaian Indikator Kinerja Daerah Fungsi Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Tahun 2021-2025

No	Indikator Kinerja Daerah	satuan	2021	2022	2023	2024	2025
A.	**Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan**						
1	Presentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	%	72,76	51,20	-	-	-
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	73,33	80,00	-	-	-
3	Persentase kesesuaian dokumen RPJMD dengan RKPD	%	100	100	-	-	-
4	Persentase kesesuaian Dokumen RKPD dengan APBD	%	100	100	-	-	-
5	Indeks Inovasi	n/a	n/a	n/a	44.55	51,10	48,88
6	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	n/a	n/a	n/a	20.00	58,33	73,68
7	Penjabaran Konsistensi Program RPD ke dalam RKPD	n/a	n/a	n/a	98.84	98.84	96,67

Sumber: Bappeda Kota Salatiga Tahun 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Berdasarkan Indikator Kinerja Daerah tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Kota Salatiga Tahun 2017-2022, sedangkan Indikator Kinerja Daerah Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2025 mempergunakan dasar Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2022 tentang RPD Kota Salatiga Tahun 2022-2026.

Capaian Indikator Kinerja Daerah dari Tahun 2023-2025 mengalami peningkatan cukup signifikan. Terkait dengan Indeks Inovasi dapat ditingkatkan karena telah ditetapkan Perwali no 10 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah, mana pada peraturan Wali Kota tersebut diamanatkan seluruh perangkat daerah dan masyarakat untuk mengembangkan inovasi baik dalam rangka peningkatan pelayanan publik bagi inovasi perangkat daerah dan pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat bagi inovasi yang dikembangkan oleh masyarakat. Regulasi tersebut juga mendorong capaian Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan karena dalam proses perencanaan saat ini harus berbasis pada riset dan kajian akademis baik dari sisi perencanaan maupun implementasinya.

Terkait dengan capaian Indikator Kinerja Daerah Penjabaran Konsistensi Program RPD ke dalam RKPD justru mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Tahun 2025, dimana capaian pada tahun 2024 sebesar 98,84% sedangkan Tahun 2025 sebesar 96,67%. Hal ini disebabkan karena terdapat pemutakhiran nomenklatur program kegiatan yang diwajibkan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, sementara itu pada saat penyusunan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2018 belum berpedoman pada peraturan menteri dalam negeri tersebut sehingga terdapat ketidak sesuai dengan nomenklatur yang baru. Langkah yang dilakukan untuk menyesuai regulasi yang baru adalah dengan penyusunan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029.

b. Keuangan

Target Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah pada tahun 2025 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan capaian kinerja untuk tahun 2025 masih dalam proses penilaian dan diharapkan memperoleh Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) karena sebelumnya memperoleh keempat kalinya mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang sebelumnya di raih di tahun 2020, 2021, 2022 , 2023 dan 2024.

Tabel 2. 91. Capaian Indikator Kinerja Daerah Fungsi Keuangan Tahun 2021-2025

No	Indikator Kinerja Daerah	satuan	2021	2022	2023	2024	2025
B.	**Keuangan**						
1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	Dalam Proses penilaian
2	Persentase peningkatan PAD terhadap pendapatan	%	n/a	n/a	2,57	1,42	1,23

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator Kinerja Daerah	satuan	2021	2022	2023	2024	2025
3	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	nilai				73,517	58.8
4	Indeks Kondisi Keuangan Daerah					5.23	8
5	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah					30.24	31.47
6	Persentase BMD yang dimanfaatkan/digunakan secara optimal (Utilisasi aset					100%	100

Sumber BPKPD Kota Salatiga, Tahun 2025

Pada Tahun 2025 Persentase peningkatan PAD terhadap pendapatan target 10% dan realisasi 2,77% dengan capaian realisasi 27,75 dan target RPD sebesar 10.00 maka status belum tercapai.

Tabel 2. 92. Capaian SDGs Urusan Keuangan

NO	INDIKATOR NASIONAL	INDIKATOR KOTA SALATIGA	SATUAN	TAHUN				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	Rupiah			639.492.055.476	502.920.730.466	
2	Prosentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini BPK atas Laporan Keuangan	Kategori	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber BPKPD Kota Salatiga, Tahun 2024

c. Kepegawaian

Indeks Profesionalitas ASN mengalami peningkatan pada tahun 2025 dengan nilai 82,14% dibandingkan tahun 2024 sebesar 78,84%.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 2. 93. Capaian Indikator Kinerja Daerah Fungsi Kepegawaian Tahun 2021-2025

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
C.	**Kepegawaian**						
1)	Indeks Profesionalitas ASN	%	52,04	54,74	74,01	78,84	82,14
2)	Nilai Sistem Merit	%	n/a	n/a	274.5	274.5	274.50

Sumber BKPSDM Kota Salatiga, Tahun 2025

Indeks Profesionalitas ASN yang ditargetkan 79.00 terealisasi sebesar 82.14. Target capaian kinerja RPD Tahun 2026 adalah 61.00 dan capaian kinerja sebesar 134.66 dengan status tercapai. Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah adanya peningkatan jumlah pelatihan pegawai dan perbaikan pelaporan setelah pelatihan.

Nilai sistem merit ditargetkan 275% dan realisasi 274.5% dan capain kinerja 99.82 dan target RPD tahun 2026 sebesar 326%.

Tabel 2. 94. Capaian SDGs Kepegawaian

NO	INDIKATOR NASIONAL	INDIKATOR KOTA SALATIGA	SATUAN	TAHUN				
				2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II)	Persentase perempuan pada jabatan eselon II,III, dan IV	%	44,87	44,24	44,24	43,06	42,17
2		Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (Eselon II)	%			23.2		21.43

Sumber BKPSDM Kota Salatiga, Tahun 2025

d. Pengawasan

Indikator QA IEPK (Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi) target 2.98 terealisasi 2.910 Kurang optimalnya hasil QA IEPK (Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi) dengan nilai 2,910 (level 2) menunjukkan pemerintah Kota Salatiga sudah ada perkembangan namun masih sistem dasar yang belum kuat sehingga masih diperlukan perbaikan tata kelola pengendalian korupsi, berdasarkan laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaran SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2025 Nomor : PE.09.03/LHPP-843/PW11/3.1/2025 tanggal 24 Desember 2025 hasil penilaian komponen, unsur dan sub unsur penilaian Indeks IEPK IP didapatkan capaian yang perlu di tingkatkan pada pilar kapabilitas pengelolaan Risiko korupsi, penerapan strategi pencegahan dan penanganan kejadian korupsi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 2. 95. Capaian Indikator Kinerja Daerah Fungsi Pengawasan Tahun 2021-2025

No	Indikator Kinerja Daerah	satuan	2021	2022	2023	2024	2025
A.	**Pengawasan**						
1	Meningkatnya level kapabilitas Inspektorat	level	3	3	3.04	-	-
2	Kapabilitas APIP	level	-	-	-	3.00	2.34
3	Tingkat Maturitas SPIP	level	3	3	3.00	-	-
4	QA SPIP	nilai	-	-	2.80	3.00	2.921
5	QA IEPK (Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	nilai	-	-	2.87	2.802	2.910
6	QA MRI (Manajemen Resiko Indeks	nilai	-	-	-	2.80	2.853

Sumber Irda Kota Salatiga, Tahun 2025

Kapabilitas APIP adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan dan kompetensi sumber daya manusia yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan perannya secara efektif. Penurunan capaian Kapabilitas APIP tahun 2025 dengan nilai 2,34 (level 2) dimana capaian tahun 2024 Inspektorat Daerah dengan nilai 3,00 (level 3). Penurunan dari target capaian 2025 di level 2 (Infrastructure) tersebut menunjukkan bahwa didalam pelaksanaan kegiatan pengawasannya proses audit dilakukan secara tetap, rutin dan berulang, sudah membangun infrastruktur namun baru sebagian yang telah selaras dengan standar audit, dengan outcome mampu memberikan keyakinan yang memadai proses sesuai dengan peraturan, mampu mendeteksi terjadinya korupsi.

Berdasarkan laporan Hasil Evaluasi dan Penjaminan Kualitas Kapabilitas APIP Daerah Tahun 2025 Nomor : PE.09.03/S-27/D404/2/2026 tanggal 20 Januari 2026 menyimpulkan bahwa Inspektorat Kota Salatiga berada pada “Level terstruktur” dengan Skor “2,34”. Hal ini menunjukkan Kapabilitas APIP pada Inspektorat Daerah Kota Salatiga telah mampu melaksanakan pengawasan assurance (penjaminan) dan consulting (konsultansi) dengan landasan struktur dan prosedur, namun kualitas serta konsistensi masih rendah. Penurunan capaian Kapabilitas APIP dikarenakan adanya perubahan kriteria penilaian dari BPKP yang semula ada 3 komponen, 6 elemen dan 18 topik menjadi 5 elemen dalam 23 topik.

Penurunan nilai Kapabilitas APIP perlu disikapi dengan evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan pengawasan APIP Kota Salatiga, dengan melaksanakan evaluasi dan perbakan dalam 5 elemen yang baru yaitu : kualitas peran dan layanan, profesionalisme penugasan, manajemen pengawasan, pengelolaan sumber daya serta budaya dan hubungan organisasi yang telah terbagi dalam 23 topik secara terperinci.

QA Manajemen Risiko Indeks (MRI) dengan target nilai 2,94 terealisasi dengan nilai 2,853. Kurang optimalnya hasil capaian QA MRI (Manajemen Risiko Indeks) dengan nilai 2,853 (level 2) menunjukkan pemerintah Kota Salatiga sudah ada perkembangan namun masih sistem dasar yang belum kuat sehingga masih diperlukan perbaikan tata kelola Manjemen

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Risiko Indeks (MRI), berdasarkan laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaran SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2025 Nomor : PE.09.03/LHPP-843/PW11/3.1/2025 tanggal 24 Desember 2025 hasil penilaian komponen, unsur dan sub unsur penilaian manajeman Risiko Indeks pada area / komponen MRI yang meliputi Perencanaan, Kapabilitas dan Hasil.

Hal tersebut disebabkan belum adanya kebijakan terkait Manajemen Risiko dan penerapan manajemen risiko belum dilakukan ke semua kemitraan yang memiliki peran penting dalam organisasi. Untuk mencapai level 3 pemerintah kota salatiga perlu memiliki strategi dan kebijakan terkait manajemen risiko serta telah dikomunikasikan, diimplementasikan dan manajemen organisasi juga telah menetapkan selera risiko. Tercapainya nilai QA MRI sesuai dengan target nilai yang ditetapkan merupakan salah satu bentuk komitmen jajaran APIP untuk melakukan upaya secara terus menerus guna meningkatkan keterampilan terkait manajemen risiko pada seluruh pimpinan dan pegawai terutama SDM yang menjadi unit pemilik risiko pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga.

Quality Assurance (QA) SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) adalah tingkat kematangan / kesempurnaan penyelenggaraan sisten pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. QA SPIP terintegrasi digunakan sebagai instrumen evaluatif, penyelenggaraan SPIP dan panduan generik untuk meningkatkan maturitas sistem pengendalian intern pemerintah. QA SPIP Terintregrasi Inspektorat Daerah Kota Salatiga mengalami penurunan dengan nilai 2,921 (level 2) pada tahun 2025 dengan kategori berhasil tetapi kurang memenuhi target nilai yang ditetapkan.

Penurunan capaian QA SPIP (Sistem Pengendalian Pemerintah) tahun 2025 dengan nilai 2,921 (level 2) dimana capaian tahun 2024 Inspektorat Daerah dengan nilai 3,00 (level 3). Penurunan dari target capaian 2025 di level 2 tersebut telah menunjukkan bahwa K/L/Pemda telah melaksanakan praktik pengendalian intern, namun tidak terdokumentasi dengan baik dan pelaksanaannya sangat tergantung pada individu dan belum melibatkan semua unit organisasi. Efektivitas pengendalian belum dievaluasi sehingga banyak terjadi kelemahan yang belum ditangani secara memadai.

Penurunan nilai QA SPIP Pemerintah Kota Salatiga perlu di sikapi dengan evaluasi menyeluruh dari pelaksanaan SPIP Terintegrasi di Kota Salatiga, berdasarkan laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2025 Nomor : PE.09.03/LHPP-843/PW11/3.1/2025 tanggal 24 Desember 2025 hasil penilaian komponen, unsur dan sub unsur penilaian maturitas Penyelenggaraan SPIP di dapatkan capaian yang masih kurang pada unsur struktur dan proses serta unsur pencapaian tujuan.

Dalam rangka meningkatkan capaian laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi diperlukan sinergi dan komitmen dari seluruh jajaran yang terlibat dalam menjadikan capaian level 2 sebagai early warning system atas pelaksanaan tata

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kelola pemerintah kota salatiga yang masih perlu perbaikan Area of Improvement (AoI) dengan di tetapkan rencana aksi penyelesaian AoI agar capaian dapat meningkat.

2.4.5 Fokus Layanan Fungsi Penunjang Lainnya

Kinerja Daerah pada Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan terdiri dari Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah, dan Kecamatan.

a. Sekretariat DPRD

Tabel 2. 96. Capaian Indikator Kinerja Daerah Sekretariat DPRD Tahun 2021-2025

No	Indikator Kinerja Daerah	satuan	2021	2022	2023	2024	2025
1	Prosentase jumlah produk yang didampingi oleh tenaga ahli DPRD	%	88	100		-	-
2	Prosentase fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	%	-	-	97.86	94,54	98,75

Sumber : Sekretariat DPRD, Tahun 2025

Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar 100% dengan realisasi sebesar 98,75 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan dalam rangka fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD telah terlaksana dengan baik.

Belum tercapainya target secara penuh disebabkan oleh adanya 1 (satu) sub kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan, sehingga mempengaruhi tingkat capaian indikator kinerja pada tahun berjalan. Terhadap kondisi tersebut, Sekretariat DPRD melakukan monitoring dan evaluasi sebagai bahan perbaikan dan optimalisasi pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

Secara keseluruhan, pelaksanaan program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD pada Tahun 2025 tetap berjalan dengan baik sehingga capaian kinerja berada pada kategori sangat baik dan mendekati target yang telah ditetapkan.

Tabel 2. 97. Capaian SDGs Setwan

NO	INDIKATOR NASIONAL	INDIKATOR KOTA SALATIGA	SATUAN	TAHUN				
				2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota	%	24	24	24,00	8	8

Sumber Setwan Kota Salatiga , Tahun 2025

b. Sekretariat Daerah

Rata-rata Skor Kepuasan Masyarakat (SKM) menunjukkan peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2021 nilai SKM sebesar 80,8%, kemudian sedikit menurun pada tahun 2022

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

menjadi 80,55%, namun kembali meningkat pada tahun 2023 sebesar 81,91%, tahun 2024 sebesar 83,47%, dan tahun 2025 mencapai 84,39%. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik yang diberikan perangkat daerah semakin baik serta mampu meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah.

Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik juga menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2023 nilai kepatuhan tercatat sebesar 90,09 dan meningkat menjadi 98,15 pada tahun 2024. Meskipun pada tahun 2025 tidak dilakukan penilaian oleh Ombudsman RI, target daerah sebesar 96 telah menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mempertahankan kualitas pelayanan publik. Selain itu, Pemerintah Daerah juga memperoleh opini "Kualitas Tinggi" dalam Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2025 dari Ombudsman RI. Predikat tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik telah berjalan dengan baik dan memiliki tingkat risiko maladministrasi yang rendah.

Indeks Kematangan Organisasi Daerah mengalami peningkatan dari nilai 32,93 pada tahun 2023 menjadi 36,16 pada tahun 2024. Pada tahun 2025 capaian indeks mencapai 37,16 atau melampaui target sebesar 36,5. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola organisasi perangkat daerah semakin matang dan efektif, baik dari sisi struktur organisasi, proses bisnis, maupun koordinasi kelembagaan dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik.

Pada aspek reformasi birokrasi, Indeks RB tahun 2021 tercatat sebesar 73,63 dan menjadi dasar penguatan reformasi birokrasi pada tahun-tahun berikutnya. Sementara itu, Indeks Reformasi Birokrasi (RB) mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dari nilai 68 pada tahun 2023 menjadi 80,21 pada tahun 2024. Pada tahun 2025 capaian meningkat menjadi 86,79 dan berhasil melampaui target sebesar 80,25. Peningkatan tersebut menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, pengawasan, akuntabilitas, manajemen ASN, dan kualitas pelayanan publik.

Nilai SAKIP juga menunjukkan perkembangan yang positif. Pada tahun 2023 nilai SAKIP sebesar 71,96, meningkat menjadi 72,85 pada tahun 2024, dan mencapai 73,75 pada tahun 2025 atau melampaui target sebesar 68. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas perencanaan, pengukuran, evaluasi, dan pelaporan kinerja organisasi semakin baik serta lebih berorientasi pada hasil dan efektivitas penggunaan anggaran.

Selain itu, Indeks Kepuasan Masyarakat terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022 nilai indeks sebesar 80,8, meningkat menjadi 84,95 pada tahun 2023, kemudian menjadi 85,67 pada tahun 2024, dan pada tahun 2025 mencapai 86,32. Adapun capaian akhir tahun 2025 sebesar 87,63 berhasil melampaui target sebesar 86. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelayanan publik yang diberikan pemerintah daerah semakin mampu memenuhi harapan masyarakat dari aspek kualitas layanan, kecepatan pelayanan, kemudahan prosedur, dan profesionalisme aparatur.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 2. 98. Realisasi Indikator Kinerja Daerah Sekretariat Daerah Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Daerah	satuan	2021	2022	2023	2024	2025
1	Rata-rata SKM (Skor Kepuasan Masyarakat)	%	80,8	80,55	81,91	83,47	84,39
2	Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Nilai	66,06	90,09	95,78	98.15	81,18
3	Opini Ombudsman RI : Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Tahun 20251	Opini	-	-	-	-	Kualitas Tinggi
4	Indeks Kematangan		34,37	32,93	32.93	36.16	37,16
5	Organisasi Daerah	Nilai	66	66,85	64,93	80,67	86,79
6	Indeks RB	Nilai	65,2	65,35	65.81	66.54	67,54

Sumber : Sekretariat Daerah, 2025

Capaian indikator yang berkiatan dengan SDGs yang diimplementasikan pada tingkat Kota Salatiga selama tahun 2021–2025 menunjukkan kinerja yang relatif stabil dan positif, khususnya pada aspek akuntabilitas pemerintahan, digitalisasi pengadaan barang dan jasa, serta kepatuhan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

Pada indikator Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP), Kota Salatiga secara konsisten memperoleh kategori “B” selama periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Konsistensi capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah telah berjalan dengan baik, terutama dalam aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi, serta pelaporan kinerja organisasi. Meskipun belum mengalami peningkatan kategori, capaian yang stabil menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kualitas tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi hasil.

Pada indikator persentase penggunaan E-Procurement terhadap belanja pengadaan, Kota Salatiga berhasil mempertahankan capaian sebesar 100% selama tahun 2021–2025. Capaian tersebut menunjukkan bahwa seluruh proses pengadaan barang dan jasa pemerintah telah dilaksanakan secara elektronik melalui sistem pengadaan yang transparan dan akuntabel. Implementasi E-Procurement secara penuh mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, serta meminimalkan potensi penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Sementara itu, pada indikator kepatuhan pelaksanaan Undang-Undang Pelayanan Publik, Kota Salatiga menunjukkan perkembangan yang baik. Pada tahun 2021 penilaian tidak dilakukan, kemudian pada tahun 2022 Kota Salatiga memperoleh predikat Zona Kuning. Selanjutnya pada tahun 2023 dan 2024 meningkat menjadi Zona Hijau, yang menunjukkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan. Peningkatan tersebut mencerminkan adanya perbaikan pada aspek pemenuhan standar pelayanan, sarana dan prasarana pelayanan, kompetensi penyelenggara layanan, serta pengelolaan pengaduan masyarakat. Pada tahun 2025 kembali masuk Zona Hijau sama seperti pada dua tahun sebelumnya menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik di Kota Salatiga telah berada pada kategori baik.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Secara keseluruhan, capaian indikator nasional di Kota Salatiga menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mampu menjaga konsistensi dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Ke depan, diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas implementasi reformasi birokrasi dan pelayanan publik agar capaian yang telah diperoleh dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan.

Tabel 2. 99. Capaian Indikator SDGs yang diampu Sekretariat Daerah

NO	INDIKATOR NASIONAL	INDIKATOR KOTA SALATIGA	SATUAN	TAHUN				
				2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota)	Nilai SAKIP	Kategori	B	B	B	B	B
2	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan	Persen	100	100	100	100	100
3	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Tingkat Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	Zona	Tidak dilakukan penghitungan	Zona Kuning	Zona Hijau	Zona Hijau	Zona Hijau

Sumber Setda Kota Salatiga , Tahun 2024

c. Kecamatan

Urusan Penunjang lainnya untuk Kecamatan, selain menjalankan tugas pada pelayanan publik di wilayah Kecamatan, juga menjalankan fungsinya sebagai koordinator urusan pemberdayaan masyarakat kelurahan, termasuk kegiatan PKK, Posyandu, serta bentuk-bentuk pemberdayaan masyarakat lainnya. Secara umum tingkat keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kota Salatiga termasuk tinggi, karena proses musrenbangkel telah melibatkan seluruh pemangku kepentingan di tingkat Kelurahan. Proses Musrenbang dimulai dari Rembug Warga yang melibatkan unsur terkecil di Kelurahan, yaitu RT dan RW, kemudian Pra Musrenbang yang melibatkan perwakilan tokoh RW untuk menyusun skala prioritas usulan untuk dibahas pada forum yang lebih besar yaitu Musrenbangkel.

Mekanisme inilah yang menyebabkan pencapaian indikator kinerja Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangkel bisa mencapai 100% atau sesuai dengan target yang ditetapkan. Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Musrenbangkel adalah prosentase usulan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

prioritas yang terealisasi ibagi dengan seluruh usulan prioritas yang disampaikan oleh masyarakat. Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang menggambarkan pemberdayaan masyarakat di kelurahan diukur dengan Indikator Prosentase PKK aktif, yang seluruh Kecamatan mencapai 100%.

1) Kecamatan Sidorejo

Tabel 2. 100. Capaian Indikator Kinerja Daerah Kecamatan Sidomukti Tahun 2021-2025

No	Indikator Kinerja Daerah	satuan	2021	2022	2023	2024	2025
	Kecamatan Sidomukti						
1	Tingkat ketepatan waktu penyampaian SPPT ke WP	%	84,96	90,14	-	-	-
2	Persentase realisasi wajib pajak yang membayar PBB P2	%	-	-	59.00	63.41	59,54
3	Presentase realisasi usulan hasil Musrenbang	%	79,91	78,78	97.94	97.01	96,10
4	Nilai survei kepuasan masyarakat	%	89,11	89,15	-	-	-
5	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	%	-			90.28	90,40
6	Persentase PKK Aktif Kecamatan	%		-	76.24	100	100

Sumber : Kecamatan Sidomukti, Tahun 2025

Persentase realisasi wajib pajak pada tahun 2025 yang membayar PBB P2 adalah sebesar 59,54%, dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 63,41% mengalami penurunan sebesar 3,87%. Salah satu faktor penyebab turunnya realisasi pajak adalah kesadaran masyarakat dalam membayar pajak PBB berkurang.

Presentase realisasi usulan hasil musrenbang Tahun 2025 sebesar 96,10%, dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar 97,01% mengalami penurunan sebesar 0,91%. Realisasi usulan hasil musrenbang turun dibanding tahun 2024 adalah dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran untuk efisiensi di tahun 2025

Nilai indeks kepuasan masyarakat tahun 2025 terealisasi 90.40 sehingga dibandingkan dengan target pada tahun 2025 adalah 90,285, sehingga realisasi capaian sebesar 100.13%, maka dengan ini status tercapai. Nilai indeks ini meningkat 0,12 dibandingkan pada tahun 2024. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan tingkat capaian kinerja antara lain adanya koordinasi yang baik antara Ketua RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan dan pelayanan prima yang dilakukan dengan setulus hati oleh petugas.

Presentase PKK aktif pada tahun 2025 terealisasi sebesar 100 % Pelaksanaan berhasil dengan baik karena ada partisipasi dan swadaya dari masyarakat dari tingkat RT sampai dengan RW terutama pada saat pelaksanaan pra musrenbang di tingkat RT dan RW.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2) Kecamatan Sidorejo

Tabel 2. 101. Capaian Indikator Kinerja Daerah Kecamatan Sidorejo Tahun 2021-2025

No	Indikator Kinerja Daerah	satuan	2021	2022	2023	2024	2025
	Kecamatan Sidorejo						
1	Tingkat ketepatan waktu penyampaian SPPT ke WP	%	93,51	91.97	-	-	-
2	Persentase realisasi wajib pajak yang membayar PBB P2	%	-	-	91.84	88.97	68,56
3	Presentase realisasi usulan hasil Musrenbang	%	41,23	53.83	53.49	64.96	94,34
4	Nilai survei kepuasan masyarakat	%	85,83	91.25	-	-	-
5	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	%	-	-	88.73	88.67	89,25
6	Persentase PKK Aktif Kecamatan	%	-	-	72.46	84,06	100

Sumber : Kecamatan Sidorejo, Tahun 2025

Persentase realisasi wajib pajak pada tahun 2025 yang membayar PBB P2 adalah sebesar 68,56% dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 88,97% mengalami penurunan sebesar 20,41% Salah satu faktor penyebab turunnya realisasi pajak adalah kesadaran masyarakat dalam membayar pajak PBB berkurang, SPPT PBB belum tersampaikan semua ke Wajib Pajak dikarenakan alamat dan data Wajib pajak belum sesuai dengan SPPT mengakibatkan tidak semua wajib pajak dapat membayarkan kewajiban pajaknya tepat waktu Presentase realisasi usulan hasil musrenbang Tahun 2025 sebesar 94,34%, dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar 64,96% mengalami kenaikan sebesar 29,38%.

Nilai indeks kepuasan masyarakat tahun 2025 terealisasi 89.25 sehingga dibandingkan dengan target pada tahun 2025 adalah 88, sehingga realisasi capaian sebesar 101.4%, maka dengan ini status tercapai. Nilai indeks ini meningkat 1,25 dibandingkan pada tahun 2024. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan tingkat capaian kinerja antara lain adanya koordinasi yang baik antara Ketua RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan dan pelayanan prima yang dilakukan dengan setulus hati oleh petugas.

Presentase PKK aktif pada tahun 2025 terealisasi sebesar 100 % lebih baik daripada tahun 2024 yang hanya sebesar 84,06%. Pelaksanaan berhasil dengan baik karena ada partisipasi dan swadaya dari masyarakat dari tingkat RT sampai dengan RW terutama pada saat pelaksanaan pra musrenbang di tingkat RT dan RW.

3) Kecamatan Tingkir

Tabel 2. 102. Capaian Indikator Kinerja Daerah Kecamatan Tingkir Tahun 2021-2025

No	Indikator Kinerja Daerah	satuan	2021	2022	2023	2024	2025
	Kecamatan Tingkir						
1	Tingkat ketepatan waktu penyampaian SPPT ke WP	%	95,62	91,76	-	-	-
2	Persentase realisasi wajib pajak yang membayar PBB P2	%	-	-	65,33	68,82	64,76

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator Kinerja Daerah	satuan	2021	2022	2023	2024	2025
3	Presentase realisasi usulan hasil Musrenbang	%	42,5	36,73	65,99	68,18	70,5
4	Nilai survei kepuasan masyarakat	%	85	85,94	-	-	-
5	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	%	-	-	91,72	91,45	91,64
6	Persentase PKK Aktif Kecamatan	%	-	-	100	100	100

Sumber : Kecamatan Tingkir, Tahun 2025

Persentase realisasi wajib pajak yang membayar PBB P2 pada tahun 2025 adalah 64,76% , dibanding tahun 2024 sebesar 68,82%, realisasi wajib pajak di tahun 2025 ini mengalami penurunan sebesar 4,06%. Hal- hal yang melatarbelakangi di antaranya adalah adanya SPPT yang beralamatkan tidak sesuai dengan pemiliknya atau kosong, WP yang mempunyai tanah dan bangunan di wilayah Kecamatan Tingkir tetapi tinggal di luar wilayah Kecamatan Tingkir sehingga tidak semua SPPT PBB dapat tersampaikan ke WP dan mengakibatkan tidak semua wajib pajak dapat membayarkan kewajiban pajaknya tepat waktu. Upaya yang akan dilakukan untuk mendukung tercapai di tahun mendatang dengan menyebarkan informasi ke media sosial yang ada dan dengan melakukan pelayanan terpadu (pelayanan dengan mendatangi masyarakat lebih dekat ke tingkat RT/RW).

Pada Tahun 2025 persentase realisasi usulan hasil musrenbang adalah 70,5% hal ini mengalami peningkatan sebesar 2,32% dibanding tahun 2024 yang hanya sebesar 68,18%.
Nilai indeks kepuasan masyarakat dengan target di tahun 2025 sebesar 91,46% terealisasi 91,64% dengan demikian realisasi capaian sebesar 100,2% dan status tercapai.
Prosentase PKK Aktif pada tahun 2025 terealisasi 100%.
Faktor -faktor yang menyebabkan keberhasilan capaian Persentase PKK Aktif adalah

- seluruh unsur yang masuk dalam PKK di kecamatan Tingkir aktif melakukan kegiatan rutin dalam rangka pemberdayaan masyarakat,
- Tim Penggerak PKK Kecamatan Tingkir rutin melakukan pembinaan rutin ke PKK yang ada di wilayah Kecamatan Tingkir,
- Sering diadakan lomba-lomba yang melibatkan PKK sehingga PKK menjadi lebih aktif dalam mendukung kegiatan tersebut.

d. Kecamatan Argomulyo

Tabel 2. 103. Capaian Indikator Kinerja Daerah Kecamatan Argomulyo Tahun 2021-2025

No	Indikator Kinerja Daerah	satuan	2021	2022	2023	2024	2025
	Kecamatan Argomulyo						
1	Tingkat ketepatan waktu penyampaian SPPT ke WP	%	60	59	-	-	-
2	Persentase realisasi wajib pajak yang membayar PBB P2	%	-	-	60,00	63,55	60,76
3	Presentase realisasi usulan hasil Musrenbang	%	77,97	93,32	90,48	90,60	72,75

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator Kinerja Daerah	satuan	2021	2022	2023	2024	2025
4	Nilai survei kepuasan masyarakat	%	80,60	81,38	-	-	-
5	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	%	-	-	84,02	85,26	90,56
6	Persentase PKK Aktif Kecamatan	%	-	-	100	100	100

Sumber : Kecamatan Argomulyo, Tahun 2025

Tahun 2025 persentase realisasi wajib pajak yang membayar PBB P2 sebesar 60,76% hal ini lebih menurun 2,79% dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 63,55%.

Faktor penyebab turunnya realisasi wajib pajak ini karena :

- ✓ kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak,
- ✓ kurangnya pengetahuan wajib pajak akan pentingnya membayar pajak
- ✓ tingkat penghasilan wajib pajak, kualitas pelayanan dan persepsi wajib pajak akan sanksi tidak taat pajak. Dalam usaha meraih keberhasilan pencapaian target, perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intens untuk mengedukasi wajib pajak yang belum membayar pajak supaya menjadi wajib pajak yang taat membayar pajak.

Persentase usulan hasil musrenbang Kecamatan tahun 2025 terealisasi sebesar 72,75%, dibandingkan tahun 2024 mengalami penurunan 17,85 %.

Persentase PKK aktif tahun 2025 terealisasi 100%. Kegiatan pendukung indikator kinerja terlaksana dikarenakan adanya semangat dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelaksanaan kegiatan PKK dalam memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Nilai indeks kepuasan masyarakat tahun 2025 terealisasi 90.44 sehingga dibandingkan dengan target pada tahun 2025 sebesar 80, realisasi capaian sebesar 113%, maka dengan ini status tercapai. Nilai indeks ini meningkat 5,18 dibandingkan pada tahun 2024 yang hanya 85,26.

2.5. Evaluasi Hasil Program RKPD Tahun 2025 dan Realisasi terhadap Target Akhir RPD Tahun 2023-2026

Evaluasi capaian indikator kinerja RKPD Tahun 2025 ditunjukkan dengan capaian indikator pembangunan Kota Salatiga Tahun 2025 yang terbagi atas Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Pemerintah Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Program kelompok urusan wajib, urusan pilihan, fungsi penunjang dan fungsi lainnya dalam RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026. Pada evaluasi tersebut, status pencapaian kinerja yang dijabarkan dalam Evaluasi Hasil RKPD terdiri dari beberapa kategori, yaitu:

1) Sangat Tinggi, untuk presentase capaian target akhir RPD sampai dengan tahun 2025 sebesar 91% ≤ 100%);
2) Tinggi, untuk presentase capaian target akhir RPD sampai dengan tahun 2025 sebesar 76% sampai dengan 90% (76% ≤ 90%);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3) Sedang, untuk presentase capaian target akhir RPD sampai dengan tahun 2025 sebesar capaian 66 % ≤ 75%
4) Rendah untuk presentase capaian target akhir RPD sampai dengan tahun 2025 sebesar capaian 51% ≤ 65%
5) Sangat Rendah untuk presentase capaian target akhir RPD sampai dengan tahun 2025 sebesar ≤ 50%.

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi,
   Gradasi ini menunjukkan pencapaian kinerja telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja
2) Hasil Sedang
   Gradasi ini menunjukkan pencapaian kinerja telah memenuhi minimal kelulusan penilaian kinerja (cukup)
3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah
   Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian memenuhi/masih di bawah persyaratan minimal pencapaian diharapkan.

2.5.1 Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah

Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah ditunjukkan dengan indiketor kinerja utama dan indikator kinerja daerah berdasrkan aspek pembangunan dan urusan pemerintah daerah, sebagai berikut :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 2. 104. Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kota Salatiga Tahun 2025 (Berdasarkan RPD Kota Salatiga Tahun 2023 – 2026)

No	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Target RPD 2023 – 2026	Target Penyesuaian Tahun 2025			Kategori	Realisasi Kinerja RPD s.d Tahun 2025	Realisasi Capaian Kinerja RPD s.d Tahun 2025 (%)	Status
				Target	Realisasi	Capaian				
1	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	10,70	11,48	11,49	100,09	Sangat Tinggi	22,97	200,09	Tercapai
2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,46	15,46	15,47	100,06	Sangat Tinggi	30,93	200,06	Tercapai
3	Indeks Literasi Masyarakat	Nilai	53,26	63,14	63,14	100,00	Sangat Tinggi	126,28	200,00	Tercapai
4	Cakupan cagar budaya, sejarah dan obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	%	52,00	52,76	63,14	119,67	Sangat Tinggi	100,96	224,46	Tercapai
5	Peningkatan Prestasi Olahraga	Jumlah Medali	16	16	76	475,00	Sangat Tinggi	108	675,00	Tercapai
6	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri, Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	%	21,00	23,00	18,53	80,57	Tinggi	41,49	180,39	Tercapai
7	Angka harapan Hidup	Tahun	77,98	78,30	78,75	100,57	Sangat Tinggi	157,02	200,54	Tercapai
8	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,30	1,18	1,13	102,34	Sangat Tinggi	2,42	205,08	Tercapai
9	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,86 - 5,44	5,40 – 6,10	5,98	100	Sangat Tinggi	10,91	189,74	Tercapai
10	Pendapatan per kapita *PDRB ADHK	Juta	59,16	57,90	61,02	105,39	Sangat Tinggi	144,00	248,70	Tercapai
11	Pertumbuhan Nilai Investasi	%	10,55	10,40	76,91	739,52	Sangat Tinggi	83,80	805,77	Tercapai
12	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,46 - 5,51	3,67 – 2,54	3,67	100	Sangat Tinggi	7,53	242,51	Tercapai
13	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	70,10	70,85 – 71,62	70,93	100	Sangat Tinggi	141,65	198,85	Tercapai
14	Cakupan penduduk memenuhi kriteria yang terdata dalam DTKS	%	96,00	97,03	97,89	100,89	Sangat Tinggi	194,90	200,87	Tercapai
15	Pola Pangan Harapan	Skor	97,00	96,60	92,73	95,99	Sangat Tinggi	187,13	193,72	Tercapai

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Target RPD 2023 – 2026	Target Penyesuaian Tahun 2025			Kategori	Realisasi Kinerja RPD s.d Tahun 2025	Realisasi Capaian Kinerja RPD s.d Tahun 2025 (%)	Status
				Target	Realisasi	Capaian				
16	Persentase Peminat Transmigrasi	%	4,60	4,07	88,89	2.184	Sangat Tinggi	24,07	591,40	Tercapai
17	Score Capaian KLA	Nilai	630	625	682,21	109,15	Sangat Tinggi	1.293,21	206,91	Tercapai
18	IDG	Nilai	81,50	81	65,05	80,31	Sangat Tinggi	158,96	196,25	Tercapai
19	IPG	Nilai	96,50	96	95,75	99,74	Sangat Tinggi	190,94	198,90	Tercapai
20	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	70,00	80,25	81,00	100,93	Sangat Tinggi	160,88	200,47	Tercapai
21	Cakupan Penanganan Ketentraman Kota	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	200,00	200,00	Tercapai
22	Penanggulangan Potensi Konflik	%	100	100	87,50	87,50	Sangat Tinggi	183,10	183,10	Tercapai
23	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) terhadap Bencana	Nilai	3,90	3,91	0,52	13,14	Sangat Rendah	4,40	112,53	Tercapai
24	Persentase Kawasan Wajah Kota yang Tertata Dengan Baik	%	60	61,80	61,80	100,00	Sangat Tinggi	123,60	200,00	Tercapai
25	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	56,80	69,93	68,70	98,24	Sangat Tinggi	130,15	186,11	Tercapai
26	Rasio Konektivitas Kota	%	0,71	0,88	0,88	100,00	Sangat Tinggi	1,76	200,00	Tercapai
27	Kinerja Lalu Lintas Kota	%	0,50	0,31	0,23	125,81	Sedang	0,54	174,19	Tercapai
28	Persentase Rumah yang di dukung oleh PSU	%	11,00	13	13,45	103,46	Sangat Tinggi	26,49	203,77	Tercapai
29	Pemukiman yang Tertata	%	6,49	6,62	6,87	103,78	Sangat Tinggi	13,49	203,78	Tercapai
	Rata-rata Capaian Kinerja					**201,17**				

Sumber : Data yang diolah Bappeda, Tahun 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Rata-rata tingkat capaian indikator kinerja tujuan tahun 2025 adalah 201,17. Rata-rata ini masuk dalam kategori Sangat Tinggi. Pencapaian ini didukung oleh beberapa hal :

1. Semakin tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan.
2. Adanya kebutuhan tenaga kerja terampil dalam lapangan pekerjaan bidang kejuruan dan teknologi.
3. Ketersediaan sarana prasarana literasi seperti taman literasi, perpustakaan di Taman Cerdas dan perluasan perpustakaan daerah.
4. Ketersediaan perpustakaan elektronik dalam bentuk *virtual library* dan bacaan dalam bentuk *e-book*.
5. Adanya dukungan pemerintah Kota Salatiga, kerja sama yang baik dengan para stakeholder, dan kepedulian masyarakat terhadap cagar budaya, peninggalan sejarah, dan objek pemajuan budaya.
6. Banyaknya kejuaraan yang diikuti sehingga meningkatkan prestasi dan perolehan penghargaan bidang olahraga.
7. Adanya kerja sama dengan semua kelurahan dalam pelaksanaan pendataan pemuda dan melibatkan organisasi kepemudaan yang ada.
8. Adanya peningkatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) dalam pelayanan Keluarga Berencana.
9. Adanya swalayan dan fasilitas perdagangan lainnya yang berkontribusi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi.
10. Adanya perusahaan di Kota Salatiga yang menyerap banyak tenaga kerja sehingga meningkatkan daya beli masyarakat dan aktivitas perdagangan.
11. Adanya pertumbuhan ekonomi yang kuat, sehingga menciptakan lebih banyak lapangan kerja.
12. Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi.
13. Perluasan kerja sama pemerintah dan pelaku industri, yang memberi peluang lebih besar dalam penempatan kerja.
14. Akses informasi pasar kerja yang lebih baik, termasuk penggunaan sistem digital dan job-portal.
15. Adanya pertumbuhan lapangan kerja yang menarik minat masyarakat untuk bekerja.
16. Pendidikan dan pelatihan yang lebih baik, sehingga meningkatkan kesiapan masyarakat untuk dapat masuk ke pasar kerja.
17. Adanya dukungan lintas sektor terkait pangan, seperti kegiatan pemanfaatan pekarangan, pengadaan pangan lokal, dan pengembangan komoditi non beras.
18. Adanya sosialisasi dan penyampaian informasi yang jelas mengenai peluang, manfaat, serta fasilitas di lokasi transmigrasi.
19. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai di kawasan transmigrasi, seperti rumah, lahan usaha, akses pendidikan, dan fasilitas kesehatan.
20. Telah dilakukan upaya dalam peningkatan pemenuhan hak-hak anak.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

21. Telah dilakukan upaya dalam peningkatan kualitas hidup perempuan dari berbagai aspek.
22. Adanya peningkatan kualitas air (IKA), dan kualitas tutupan lahan (IKL), dengan meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Salatiga dalam hal pembinaan, pengawasan ketaatan terhadap peraturan lingkungan hidup, peningkatan tutupan lahan (ruang terbuka hijau), dan program kegiatan pendukung lainnya.
23. Jumlah trayek transportasi umum yang dilayani masih memenuhi jumlah trayek yang dibutuhkan.
24. Adanya upaya peningkatan layanan angkutan dan rekayasa lalu lintas untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, pengelolaan terminal, uji layak kendaraan dan sosialisasi kepada masyarakat umum.

Walaupun tingkat capaian indikator kinerja tujuan masuk dalam kategori Sangat Tinggi, namun masih ada indikator kinerja tujuan yang masuk dalam kategori Sangat Rendah, yaitu Indeks Ketahanan Daerah (IKD) terhadap bencana. Hal ini disebabkan diantaranya karena :

1. Penilaian indikator kinerja dilakukan pada akhir tahun dan belum ada rilis data terbaru dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana Pusat.
2. Kurangnya koordinasi dan komunikasi dengan mitra kerja.
3. Perencanaan yang kurang matang.
4. Kurangnya sumber daya manusia yang kompeten.
5. Kejadian bencana yang tidak dapat diprediksi waktu terjadinya

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 2. 105. Capaian Indikator Kinerja Pemerintah Daerah Kota Salatiga Tahun 2025 (berdasarkan RPD 2023 - 2026)

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Kategori
A.	**Aspek Kesejahteraan Masyarakat**					
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	NIlai	86	86,32	100,37	Sangat Tinggi
2.	Cakupan linkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	%	55	56,29	102,35	Sangat Tinggi
3.	Rasio ketersediaan pangan sesuai kebutuhan	%	1,57	1,09	69,43	Sedang
4.	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	85,69	86,23	100,63	Sangat Tinggi
5.	Angka Kemiskinan	Angka	4,67-4,59	4,20	100,00	Sangat Rendah
6.	Prevalensi balita gizi buruk	%	0,07	0,0245	165	Sangat Rendah
B.	**Aspek Daya Saing Daerah**					
7.	Indeks SPBE	Nilai	3,26	4,11	126,07	Sangat Tinggi
8.	Wilayah dengan infrastruktur kondisi baik	%	98	94,32	96,24	Sangat Tinggi
C.	**Aspek Pelayanan Umum**					
	Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar					
	Pendidikan					
1.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD)	%	97,88	97,00	99,10	Sangat Tinggi
2.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI	%	99,34	99,30	99,96	Sangat Tinggi
3.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs	%	96,82	96,81	99,99	Sangat Tinggi
4.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Kesetaraan	%	71,05	71,31	108,82	Sangat Tinggi
	Kesehatan					
5.	Angka Kematian Ibu	/100.000 KH	129	50	38,76	Sangat Rendah
6.	Angka Kematian Bayi	/1.000 KH	11,17	12,50	91,92	Sangat Tinggi
7.	Prevalensi balita gizi buruk	%	0,01	0,02	40,81	Sangat Rendah
8.	Success Rate TB	%	94	78,96	84,00	Sangat Tinggi
9.	Prevalensi hipertensi penduduk usia diatas >15 tahun	%	38,61	100	100	Sangat Tinggi
10.	Persentase Akreditasi Puskesmas Strata Utama	%	100	100,00	100	Sangat Tinggi
11.	Peringkat Kelulusan Akreditasi RSUD	Predikat	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
12.	Tingkat ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	%	98	95,21	97,15	Sangat Tinggi
13.	Wilayah dengan infrastruktur kondisi baik	%	98	94,32	96,24	Sangat Tinggi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Kategori
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					
14.	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	%	2,08	0,35	183,17	Sangat Tinggi
15.	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	%	55	56,29	102,35	Sangat Tinggi
	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat					
16.	Persentase Penegakan Perda dan Gangguan Trantibum yang diselesaikan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
17.	Cakupan pelayanan kebakaran kabupaten/kota	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
18.	Prevalensi penyalahgunaan narkoba	%	1,65	0,4	24,24	Sangat Rendah
19.	Terselesaikannya kasus konflik horizontal secara damai dan adil baik terkait sosial, budaya maupun politik	%	100	25,00	25,00	Sangat Rendah
20.	Kelurahan Tangguh Bencana	%	52,17	0	0,00	Sangat Rendah
21.	Indeks Risiko Bencana	%	75,60	98,79	66,17	Sedang
	Sosial					
22.	Cakupan penduduk terdata DTKS yang ditangani	%	92,80	97,89	105,55	Sangat Tinggi
	Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar					
	Tenaga Kerja					
23.	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang memiliki izin	%	90	68	75,56	Sedang
24.	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	%	74,92	79,38	105,95	Sangat Tinggi
25.	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	110,18	104,30	94,66	Sangat Tinggi
26.	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak					
27.	Persentase kelembagaan forum anak tingkat Kota, Kecamatan, dan Kelurahan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
28.	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja	%	41,65	40,72	97,77	Sangat Tinggi
	Pangan					
29.	Ketersediaan beras (rasio cadangan beras setahun dibandingkan dengan target)	%	70	100	142,86	Sangat Tinggi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Kategori
30.	Ketersediaan energi per kapita	kkal/ kapita	2,487	2,8	112,59	Sangat Tinggi
31.	Ketersediaan protein per kapita	gram/ kapita	110	78,66	71,51	Sedang
32.	Rasio ketersediaan pangan sesuai kebutuhan	%	1,57	1,09	69,24	Sedang
	Pertanahan					
33.	Penyelesaian kasus tanah negara	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
34.	Persentase luas lahan bersertifikat	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
	Lingkungan Hidup					
35.	Indeks Kualitas Air	Nilai	71,03	73,76	103,84	Sangat Tinggi
36.	Indeks Kualitas Udara	Nilai	84,76	75,97	89,63	Tinggi
37.	Indeks Kualitas Lahan	Nilai	40,63	46,55	114,57	Sangat Tinggi
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
38.	Persentase cakupan akta kelahiran (0-18th)	%	99,46	99,53	100,64	Sangat Tinggi
39.	Persentase penduduk ber KTP elektronik	%	98	97,16	99,14	Sangat Tinggi
40.	Persentase anak 0-17th kurang dari 1 hari yang memiliki KIA	%	85,89	87,52	109,67	Sangat Tinggi
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
41.	TFR (Total Fertility Rate)	%	2,20	1,71	122,27	Sangat Tinggi
42.	Persentase perempuan yang menjadi anggota legislatif	%	24	8,00	33,33	Sangat Rendah
	Perhubungan					
43.	Rasio Izin Trayek	%	23,59	22,26	94,36	Sangat Tinggi
44.	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	%	22,79	19,49	85,52	Tinggi
45.	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	%	83	62,72	75,57	Tinggi
	Komunikasi dan Informatika					
46.	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	%	100	94,78	94,78	Sangat Tinggi
47.	Indeks SPBE	Nilai	3,26	4,11	126,07	Sangat Tinggi
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah					
48.	Persentase koperasi aktif	%	71,67	63,58	88,71	Sangat Tinggi
49.	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	99,78	99,87	100,09	Sangat Tinggi
	Penanaman Modal					
50.	Persentase kenaikan jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN)	%	41,8	24,93	59,64	Rendah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Kategori
51.	Persentase kenaikan nilai investasi PMDN	%	63,36	160,67	253,58	Sangat Tinggi
52.	Persentase kenaikan nilai investasi PMA	%	10,5	5,6	53,33	Rendah
	Kepemudaan dan Olahraga					
53.	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	%	4,38	1,03	23,52	Sangat Tinggi
54.	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	%	39,50	36,03	91,22	Sangat Tinggi
55.	Cakupan Pembinaan Olahraga	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
	Statistik					
56.	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	%	95	100	105,26	Rendah
	Persandian					
57.	Tingkat pengamanan informasi daerah	%	92	70,85	77,01	Sangat Tinggi
	Kebudayaan					
58.	Persentase objek pemajuan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	%	57,97	76,81	132,50	Sangat Tinggi
59.	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	%	38,57	46,38	120,25	Sangat Tinggi
	Perpustakaan					
60.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	21,01	21,01	100,00	Sangat Tinggi
	Kearsipan					
61.	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah, dan pertanggungjawaban nasional	%	89,10	90,16	101,19	Sangat Tinggi
	Urusan Pemerintahan Pilihan					
	Kelautan dan Perikanan					
62.	Peningkatan produksi perikanan (ikan konsumsi)	%	6,34	-4	-63,09	Sangat Rendah
63.	Peningkatan produksi perikanan (benih)	%	5	5	100,00	Sangat Tinggi
	Pariwisata					
64.	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara	%	113	113,52	100,46	Sangat Tinggi
65.	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	100	123,45	123,45	Sangat Tinggi
66.	Tingkat hunian akomodasi	%	51,42	52,20	101,52	Sangat Tinggi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Kategori
67.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	9,5	7,92	83,37	Tinggi
68.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	0,16	0,18	114,15	Sangat Tinggi
	Pertanian					
69.	Produktivitas padi	%	6,301	6,307	100,10	Sangat Tinggi
70.	Peningkatan produktivitas tanaman hortikultura	%	10	-0,4	-4,00	Sangat Rendah
71.	Peningkatan produktivitas peternakan daging sapi	%	0,04	0,12	300	Sangat Tinggi
72.	Produktivitas sapi perah	%	1,09	3	275	Sangat Tinggi
73.	Penurunan kejadian kematian hewan akibat penyakit zoonosis	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
	Perdagangan					
74.	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	4,89	4,89	100,00	Sangat Tinggi
	Perindustrian					
75.	Persentase pertumbuhan IKM (Industri Kecil Menengah)	%	0,46	0,55	119,57	Sangat Tinggi
76.	Kontribusi sektor industry terhadap PDRB	%	33,50	33,1	98,81	Sangat Tinggi
	Transmigrasi					
77.	Persentase peningkatan peminat transmigrasi	%	1	700	70.000,00	Sangat Tinggi
	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan					
	Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan					
78.	Indeks Inovasi	Nilai	51,10	48,88	95,66	Sangat Tinggi
79.	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	%	59	73,68	124,88	Sangat Tinggi
80.	Penjabaran konsistensi program RPD ke dalam RKPD	%	100	96,67	96,67	Sangat Tinggi
	Keuangan					
81.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Opini	100	100	100,00	Sangat Tinggi
82.	Persentase peningkatan PAD terhadap pendapatan	%	7,50	1,23	16,37	Sangat Rendah
	Kepegawaian					
83.	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	79	82,14	103,97	Sangat Tinggi
84.	Nilai Sistem Merit	Nilai	275	274,5	99,82	Sangat Tinggi
	Fungsi Penunjang Lainnya					
	Pengawasan					

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Kategori
85.	Kapabilitas APIP	Level	3	2,34	78,00	Tinggi
86.	QA SPIP	Nilai	3,08	2,921	94,84	Sangat Tinggi
87.	QA IEPK (Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi)	Nilai	2,98	2,853	95,74	Sangat Tinggi
88.	QA MRI (Manajemen Risiko Indeks)	Nilai	2,94	2,91	98,98	Sangat Tinggi
	Sekretariat DPRD					
89.	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	%	100	100	100	Sangat Tinggi
	Sekretariat Daerah					
90.	Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Nilai	96	98,15	102,24	Sangat Tinggi
91.	Indeks Kematangan Organisasi Daerah	Nilai	36,15	37,16	102,00	Sangat Tinggi
92.	Indeks PMPRB	Nilai	71	0,00	0,00	Sangat Rendah
93.	Nilai SAKIP	Angka	68	66,54	97,85	Sangat Tinggi
94.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	86	86,32	100,30	Sangat Tinggi
	Kecamatan					
	Kecamatan Sidomukti					
95.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	%	91	90,4	99,34	Sangat Tinggi
96.	Persentase realisasi wajib pajak yang membayar PBB P2	%	63,41	59,82	94,34	Sangat Tinggi
97.	Persentase realisasi usulan hasil musrenbang	%	97,01	96,1	99,06	Sangat Tinggi
98.	Persentase PKK Aktif	%	100	100	100	Sangat Tinggi
	Kecamatan Sidorejo					
99.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	%	88,7	89,225	100,59	Sangat Tinggi
100.	Persentase realisasi wajib pajak yang membayar PBB P2	%	93,54	68,57	73,31	Sedang
101.	Persentase realisasi usulan hasil musrenbang	%	65	94,35	145,15	Sangat Tinggi
102.	Persentase PKK Aktif	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
	Kecamatan Tingkir					
103.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	%	92,15	91,65	99,46	Sangat Tinggi
104.	Persentase realisasi wajib pajak yang membayar PBB P2	%	73	64,76	88,71	Tinggi
105.	Persentase realisasi usulan hasil musrenbang	%	68,18	70,5	103,40	Sangat Tinggi
106.	Persentase PKK Aktif	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
	Kecamatan Argomulyo					

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Kategori
107.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	%	86	90,4	105,12	Sangat Tinggi
108.	Persentase realisasi wajib pajak yang membayar PBB P2	%	63,66	93	146,09	Sangat TInggi
109.	Persentase realisasi usulan hasil musrenbang	%	90,6	53,66	59,23	Rendah
110.	Persentase PKK Aktif	%	100	99,7	99,70	Sangat Tinggi
	Rata-rata Capaian Kinerja				**158,13**	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Rata-rata tingkat capaian indikator kinerja pemerintah daerah Kota Salatiga tahun 2025 adalah 158,13. Rata-rata ini masuk dalam kategori Sangat Tinggi. Pencapaian ini didukung oleh beberapa hal :

1. Adanya peningkatan kesempatan memperoleh pendidikan dasar.
2. Adanya kerja sama yang baik dengan stakeholder pariwisata.
3. Masyarakat yang cepat memberikan laporan terkait adanya bencana, sehingga bencana dapat diatasi.
4. Adanya pendataan secara berkala terkait dengan penduduk yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
5. Adanya kesadaran lembaga pelaku industri terkait pentingnya legalitas untuk keberlangsungan usaha.
6. Adanya program pelatihan berbasis kebutuhan industri, bimbingan karier, dan peningkatan akses informasi lowongan kerja.
7. Koordinasi yang efektif antarunit kerja dalam memahami dan menerjemahkan rencana tenaga kerja ke dalam kegiatan operasional.
8. Sudah terbentuk kelembagaan terkait dengan forum anak secara keseluruhan, mulai dari tingkat kelurahan sampai ke tingkat kota.
9. Telah dilakukan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana kepada masyarakat, khususnya melalui organisasi wanita seperti PKK, GOW, dan DWP.
10. Koordinasi efektif dengan Bulog dan instansi terkait lainya dalam pengadaan, distribusi, dan penyaluran beras untuk mendukung stabilitas cadangan pangan.
11. Adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pola pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA).
12. Adanya peningkatan produksi pangan sumber protein seperti ikan, daging, telur, dan kacang-kacangan.
13. Produksi pangan strategis meningkat dan stabil, kenaikan produksi beras, jagung, sayur, buah, serta sumber protein hewani dan nabati, sehingga dapat menjaga rasio ketersediaan pangan sesuai kebutuhan masyarakat.
14. Adanya peningkatan kegiatan pengawasan dan pembinaan lingkungan hidup.
15. Adanya peningkatan kuantitas dan kualitas ruang terbuka hijau di Kota Salatiga.
16. Pendampingan dan pembinaan teknis dengan transfer teknologi budidaya dan manajemen pakan dari penyuluh perikanan untuk meningkatkan produktivitas perikanan.
17. Penerapan teknologi pembenihan yang baik (Good Hatchery Practices), pendederan benih yang benar, dan penerapan standar teknik pemijahan untuk meningkatkan hasil produksi benih.
18. Banyaknya potensi destinasi pariwisata, dukungan pemerintah, kerja sama yang baik dengan stakeholder, dan kepedulian masyarakat pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, serta banyak wisatawan yang berkunjung ke objek wisata.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

19. Penerapan manajemen pemeliharaan yang baik seperti pengaturan pakan, kebersihan kandang, dan jadwal pemerahan yang tepat untuk meningkatkan produksi dan kualitas susu dari sapi perah.
20. Penyediaan RPH Rumah Pemotongan Hewan yang telah bersertifikat halal dan memiliki NKV (Nomor Kontrol Veteriner).
21. Penyediaan vaksin untuk menekan kejadian kematian hewan akibat penyakit zoonosis.
22. Adanya swalayan dan fasilitas perdagangan lainnya yang berkontribusi dalam peningkatan PDRB sektor perdagangan.
23. Adanya akses permodalan yang lebih mudah, peningkatan kemampuan SDM, kemudahan perizinan, dan dukungan regulasi, mampu meningkatkan angka pertumbuhan industri kecil dan menengah.
24. Telah dilakukan sosialisasi dan penyampaian informasi yang jelas mengenai peluang, manfaat, dan fasilitas yang disediakan di lokasi transmigrasi.

Walaupun rata-rata tingkat capaian indikator kinerja sasaran masuk dalam kategori sangat tinggi, namun ada beberapa indikator yang masuk dalam kategori sangat rendah, yaitu:

1. Prevalensi balita gizi buruk
2. Kelurahan Tangguh Bencana.
3. Persentase perempuan yang menjadi anggota legislatif
4. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri.
5. Peningkatan produksi perikanan (benih).
6. Peningkatan produktivitas tanaman hortikultura.
7. Persentase peningkatan PAD terhadap pendapatan.
8. Indeks PMPRB.

Hal ini disebabkan karena :

1. Pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana baru dilaksanakan pada bulan Agustus tahun 2025.
2. Kondisi alam dan faktor cuaca yang tidak dapat diprediksi.
3. Ada indikator kinerja yang penilaiannya dilakukan pada akhir tahun dan memerlukan penetapan dari pemerintah pusat terkait penilaian capaian kinerjanya.
4. Masih adanya stereotip gender pada politisi perempuan.
5. Data yang digunakan untuk pendataan wirausaha muda terbatas pada wirausaha muda yang memiliki NIB.
6. Penurunan produksi benih perikanan disebabkan karena adanya peremajaan indukan (afkir), sementara induk baru belum optimal berproduksi.
7. Kurangnya keterampilan petani dalam melakukan budidaya vanili terutama dalam pemeliharaan tanaman.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

8. Kemarau kering yang berlangsung selama 2 tahun terakhir menyebabkan tanaman kering.
9. Penyakit jamur pada tanaman yang menyebabkan busuk batang dan cepat menular ke tanaman lain.
10. Penetapan target awal lain-lain PAD yang sah terlalu tinggi (RSUD belum masuk DKK).

Selain itu sebagai gambaran capaian kinerja berdasarkan dokumen RPJMD tahun 2025-2029 sebagai pijakan awal dalam penentuan kebijakan tahun 2027. Berikut disajikan realiasi indikator kinerja pemerintah daerah (IKD).

Tabel 2. 106. Capaian Indikator Kinerja Daerah Kota Salatiga Tahun 2025 (berdasarkan RPJMD 2025 – 2029)

No	Indikator	Satuan	Target tahun 2025	Realisasi	Keterangan
I	**INDIKATOR KINERJA DAERAH**				
	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI				
1	Wilayah dengan Infrastruktur Kondisi Baik	%	62,93	94,32	
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Angka	69,93	68,70	
3	Indeks Ketahanan Pangan	Nilai	94,34	79,33	
4	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	15	12,07	
5	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitasi Pengolahan Sampah	%	27,87	26,3	
6	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	%	4,02	4,67	
7	Kepadatan Penduduk	orang/km^2	3,863	3.618	
8	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,58	0,52	
9	Persentase Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	40,60	90,20	
10	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,3	1,20	
11	Konsumsi Listrik per Kapita	kwh/kapita	262.271.447	345.960.615,971	
12	Indeks Risiko Bencana	Angka	75,60	98,79	
13	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	%	63,83	97,31	
14	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	10	3,1	
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator	Satuan	Target tahun 2025	Realisasi	Keterangan
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	79	93,33	
2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,94	15,47	
3	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	%	21,20	8,18	
4	Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan	%	0,97	1,12	
5	Jumlah Kasus Kematian Ibu (kasus)	Kasus	2	1	
6	Angka Literasi	%	91,30	93,69	
7	Angka Numerasi	%	91,30	90,14	
8	Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,11	0,223	
9	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	100	21,01	
10	Indeks Pembangunan Gender	Angka	95,44	95,75	
11	Cakupan Kepersertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	51,76	66,49	
12	Indeks Gini	Angka	0,387	0,412	
13	Prevalensi Stunting	%	5,69	6,40	
14	Usia Harapan Hidup	Tahun	78,35	78,75	
15	Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir	%	18,26	19,53	
16	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	92,82	94,88	
17	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok Bahasa daerah/seni budaya yang mengarusutamakan kebudayaan	%	89,73	95,31	
18	Indeks Keluarga Sehat	Angka	0,40	TAD	
19	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	11,50	11,49	
	ASPEK DAYA SAING DAERAH				
1	Indeks Inovasi Daerah	Angka	51,50	48,88	
2	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	%	16,42-16,92	15,89	
3	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,68	0,532	
4	Angka Ketergantungan	%	49,48	43,60	
5	Tingkat Inflasi	%	2,05	2,89	
6	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Nilai	63,50-67,03	79,70	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator	Satuan	Target tahun 2025	Realisasi	Keterangan
7	Jumlah tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang)	Ribu orang	1,066	1.600	
8	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	2,83	5,35	
9	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	33,74	33,05	
10	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	70,85	70,93	
11	Indeks Zakat Nasional (IZN)	Angka	0,69	0,64	Data tahun 2024
12	Indeks Akses Keuangan Daerah	Angka	5,71	6,56	
13	Tingkat Kemantapan Jalan	%	95,52	86,62	
14	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	%	7,87	8,16	
15	Ekspor Barang dan Jasa	Rp	168.263.992	2.871.701.497.565	
16	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Persen	42,92	6,64	
17	Kapabilitas Inovasi	Nilai	3,8	4,05	
18	Jumlah Pengunjung Tempat Bersejarah	Orang	13.778	31.693	
19	Total Kredit pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB	%	42,03	110	
20	Return on Aset (ROA) BUMD	%	2,4	0,46	
21	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet	Angka	91,43	100	
22	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	65,18	62,30	
23	Disparitas Harga	Angka	10	-1,61	
24	Jumlah Kejadian Konflik SARA	Kali	0	83,10	
25	Total Dana Pihak Ketiga pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB	%	60,82	100	
26	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	1,79	0,8	
	ASPEK PELAYANAN UMUM				
1	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	4,65	4,42	
2	Indeks Integritas Nasional	Nilai	79,49	77,95	
3	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	3,69	4.11	
4	Indeks Pemerintahan Digital	Nilai	1	0,00	Belum ada penghitungan
5	Indeks Reformasi Hukum	Nilai	79,35	100	
II	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**				
	URUSAN PENDIDIKAN				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator	Satuan	Target tahun 2025	Realisasi	Keterangan
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	100	81.9	
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	100	87.4	
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	100	91.79	
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	100	71.79	
	URUSAN KESEHATAN				
1	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	76,26	
2	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100	68,88	
3	Persentase RS Rujukan Tingkat Kota yang terakreditasi	%	100	100	
4	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	66,67	
5	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	%	4,00	0,39	
6	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	73,95	
7	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	86,65	
8	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100	72,44	
9	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	85,25	
10	Persentase penderita Diabetes Mellitus yang	%	100	73,10	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator	Satuan	Target tahun 2025	Realisasi	Keterangan
	mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				
11	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	85,43	
12	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	76,64	
13	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100	69,7	
14	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100	52,53	
	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
1	Persentase luas daerah irigasi kewenangan Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	100	100	
2	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kota	%	100	97,31	
3	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	100	92,32	
4	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	%	87,93	73,91	
5	Rasio kemantapan jalan	%	86,62	86,62	
6	Rasio tenaga operator/teknis/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	21,85	21,85	
7	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100	100	
	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN				
1	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	%	10,13	36,47	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator	Satuan	Target tahun 2025	Realisasi	Keterangan
2	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	65,89	66,51	
3	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah Kota	%	100	100	
4	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kota	%	100	100	
5	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	5,15	4,47	
	URUSAN TRANTIBUM & LINMAS				
1	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100	
2	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	15	6,59	
3	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	
4	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	
6	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	
7	Persentase Cakupan Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana (Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana)	%	100	100	
	URUSAN SOSIAL				
1	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kota	%	100	100	
2	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi	%	100	100	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator	Satuan	Target tahun 2025	Realisasi	Keterangan
	kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)				
	URUSAN TENAGA KERJA				
1	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	100	100	
2	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Juta Rp/TK	110,38	104,297	
3	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah	%	71,26	79,38	
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar	%	93,51	46,47	
5	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	100	100	
	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	9,26	6	
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kota	%	100	100	
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	69,28	29,75	Jumlah kasus kekerasan perempuan tahun 2025 sebanyak 30 kasus
	URUSAN PANGAN				
1	Persentase cadangan pangan (tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	%	100	100	
	URUSAN PERTANAHAN				
	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	100	100	
	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	%	100	0	
	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	100	100	
	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya	%	100	0	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator	Satuan	Target tahun 2025	Realisasi	Keterangan
	diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan				
	Tersedianya tanah untuk masyarakat.	%	100	0	
	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	%	100	0	
	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP				
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota	%	69,93	68,70	
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kota	%	98,22	98,16	
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	%	9,9	9,23	
	URUSAN ADMINISTRASI PENDUDUK & CATATAN SIPIL				
1	Perekaman KTP Elektronik	%	98	98,27	
2	Persentase Penduduk usia 0 - 18 tahun yang mempunyai Akte Kelahiran	%	99,53	99,53	
3	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	100	100	
4	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	86,68	87,52	
	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA				
	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
1	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 tahun		2,2	2,02	
2	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	8,48	3,65	
3	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern	%	65,91	63,19	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator	Satuan	Target tahun 2025	Realisasi	Keterangan
	(Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)				
	URUSAN PERHUBUNGAN				
1	Rasio konektivitas Kota	Rasio	0,40	0,88	
2	Rasio Kinerja Lalu Lintas (VCR)	Rasio	0,35	0,23	
	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI				
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100	
2	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kota	%	100	100	
3	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	100	100	
	URUSAN KOPERASI DAN UMKM				
1	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	%	100	48,80	
2	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	71,78	71,88	
	URUSAN PENANAMAN MODAL				
1	Persentase peningkatan investasi di Kota	%	6,89	76,91	
	URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA				
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	1,96	1,03	
2	Peningkatan prestasi olahraga	Medali	33	76	
3	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	44,08	36,03	
	URUSAN STATISTIK				
1	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	
2	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun	%	100	100	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator	Satuan	Target tahun 2025	Realisasi	Keterangan
	perencanaan pembangunan daerah				
	URUSAN PERSANDIAN				
1	Tingkat keamananan informasi pemerintah	%	71,06	70,85	
	URUSAN KEBUDAYAAN				
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	38,69	100	
	URUSAN PERPUSTAKAAN				
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	27	21,01	
2	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Indeks	59,8	54,04	
	URUSAN KEARSIPAN				
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) (Pasal 40 dan Pasal 59 UU Nomor 43 Tahun tentang Kearsipan)	%	88,67	90,16	
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	30	66,67	
	URUSAN KELAUTAN PERIKANAN				
1	Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya = Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh Kota di wilayah kota (sumber data: one data KKP)	%	84,53	85,97	
	URUSAN PARIWISATA				
1	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	0,17	0,18	
2	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	0,50	110,11	
3	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kota	%	0,20	123,45	
4	Tingkat hunian akomodasi	%	53,99	52,20	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator	Satuan	Target tahun 2025	Realisasi	Keterangan
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	7,87	7,92	
	URUSAN PERTANIAN				
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	%	720,07	809,41	
2	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	100	100	
	URUSAN KEHUTANAN				
	URUSAN PERDAGANGAN				
1	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	71,73	19,54	
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	63,97	70,00	
3	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	100	100	
	URUSAN PERINDUSTRIAN				
1	Pertambahan jumlah industri Kecil dan Menengah di Kota	%	0,48	1,85	
2	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	100	100	
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100	9,54	
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100	0	
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI)	%	0	100	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator	Satuan	Target tahun 2025	Realisasi	Keterangan
	yang lokasinya di Daerah Kota				
6	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN (Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional) yang ditetapkan dalam RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kota	%	100	145,73	
	URUSAN TRANSMIGRASI				
	URUSAN SEKRETARIAT DAERAH				
1	Persentase Peningakatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Daerah		1	0,94	
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif		64,88	64,39	
3	Persentase Jumlah Total Proyek Konstruksi yang Dibawa ke tahun berikutnya, yang ditandatangani pada kuartal pertama		0	0	
4	Persentase Nilai Belanja yang dilakukan melalui Pengadaan		84	100	
	PERENCANAAN DAN KEUANGAN				
1	Persentase Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	%	19,35	28,11	
2	*Cash Management*: Persentase anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	9,58	12,00	
3	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (*Information on resources available to frontline service delivery units*)	%	96,19	91,70	
4	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (*Public access to fiscal information*)	%	100	100	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator	Satuan	Target tahun 2025	Realisasi	Keterangan
5	*Revenue mobilization*: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	22,42	82,00	
6	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	30,85	31,47	
7	*Budget execution*: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	4,35	62,10	
8	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	
9	*Assets management*	Jumlah	4	4	
	Apakah ada daftar aset tetap?	ada/tidak		ada	
	Apakah ada manual untuk menyusun daftar aset tetap?	ada/tidak		ada	
	Apakah ada proses inventarisasi aset tahunan?	ada/tidak		ada	
	Apakah nilai aset tercantum dalam laporan anggaran?	ada/tidak		ada	
10	Persentase Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	%	87,22	86,25	
	KEPEGAWAIAN				
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	74,44	76,33	
2	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	99,47	99,72	
3	Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	25,19	25,21	
	INSPEKTORAT DAERAH				
1	Nilai Level Kapabilitas APIP	Level	3	2,34	*Penurunan nilai kapabilitas APIP tahun 2025 di sebabkan oleh penerapan standar penilaian baru yang lebih ketat melalui Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2025. Dimana ada pergeseran fokus dari pemenuhan infrastruktur ke kualitas peran, profesionalisme,*

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator	Satuan	Target tahun 2025	Realisasi	Keterangan
					dan efektivitas pengawasan
2	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3,003	2,92	Penurunan nilai Maturitas SPIP tahun 2025 di sebabkan standar penilaian yang lebih ketat atau penyesuaian parameter mandiri (PM) yang terbaru dimana pemerintah daerah menghadapi tantangan akselerasi digitalisasi layanan, tekanan efisiensi anggaran, serta kebutuhan adaptasi terhadap risiko baru yang lebih dinamis

2.5.2 Realisasi pencapaian target kinerja program tahun 2025

Hasil Evaluasi Rata – Rata Capaian Kinerja Program per Urusan Tahun 2025 Kota Salatiga, tersaji pada tabel berikut ini :

Tabel 2. 107. Evaluasi Rata – Rata Capaian Kinerja per Urusan Tahun 2025 Kota Salatiga

URAIAN		CAPAIAN (%)				
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR						
1.	PENDIDIKAN					104,38
2.	KESEHATAN					104,62
3.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					99,66
4.	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (PERMUKIMAN)					97,67
5.	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SATPOL PP)					104,29
6.	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (BPBD)					100,11
7.	SOSIAL					100,13
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR						
1.	TENAGA KERJA					96,16

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

URAIAN		CAPAIAN (%)				
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
2.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK				89,06	
3.	PANGAN					201,40
4.	PERTANAHAN					262,96
5.	LINGKUNGAN HIDUP					99,39
6.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					102,09
7.	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB					98,83
8.	PERHUBUNGAN					101,30
9.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				77,98	
10.	KOPERASI DAN UKM					111,24
11.	PENANAMAN MODAL					111,02
12.	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				79,54	
13.	STATISTIK					100,00
14.	PERSANDIAN					97,05
15.	KEBUDAYAAN					102,43
16.	PERPUSTAKAAN			71,75		
17.	KEARSIPAN					486,94
URUSAN PILIHAN						
1.	KELAUTAN DAN PERIKANAN					100,00
2.	PARIWISATA					100,00
3.	PERTANIAN					94,10
4.	PERDAGANGAN				83,99	
5.	PERINDUSTRIAN		63,61			
6.	TRANSMIGRASI	40,00				
URUSAN PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
1.	SEKRETARIAT DAERAH					288,20
2.	SEKRETARIAT DPRD					100,11
URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
1.	PERENCANAAN					102,91
2.	KEUANGAN					93,34
3.	KEPEGAWAIAN					114,95
4.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					121,02
5.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					366,21
URUSAN PENGAWAS URUSAN PEMERINTAHAN						
1.	PENGAWASAN					99,50
1.	KECAMATAN SIDOREJO					120,05
2.	KECAMATAN ARGOMULYO					162,83
3.	KECAMATAN TINGKIR					80,41
4.	KECAMATAN SIDOMUKTI					88,79
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						
1.	KESBANGPOL					119,15
RATA – RATA CAPAIAN KINERJA		**124,07**				

Sumber : diolah Bappeda 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Keterangan : (Target Tahun 2025)

Sangat Rendah	:	Capaian	≤ 50%	
Rendah	:	Capaian	> 50%	N ≤ 65%
Sedang	:	Capaian	> 65%	N ≤ 75%
Tinggi	:	Capaian	> 75%	N ≤ 90%
Sangat Tinggi	:	Capaian	> 90%	

Adapun hasil Evaluasi Capaian Kinerja per Urusan tahun 2025 Kota Salatiga, tersaji pada tabel berikut ini.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 2. 108. Evaluasi Capaian Kinerja Program per Urusan Tahun 2025 Kota Salatiga

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2025	Status Capaian	OPD
I	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						
A	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**Dinas Pendidikan**
	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100,00	100,00	100,00		
2	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						
	APK (Angka Partisipasi Kasar) SD/MI/Paket A	%	100,00	117,02	117,02		
	APK (Angka Partisipasi Kasar) SMP/MTs/Paket B	%	100,00	135,55	135,55		
	Angka Putus Sekolah SD/MI	%	0,01	0,00	100,01		
	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	%	0,06	0,04	100,02		
	Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik SD/MI	%	88,44	85,11	96,23		
	Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik SMP/MTs	%	97,73	84,45	96,21		
	Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	%	2,81	2,78	98,93		
	Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	%	2,55	2,66	104,31		
	Rata-rata kompetensi literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	%	2,84	2,85	100,35		
	Rata-rata kompetensi numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	%	2,73	2,75	100,73		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2025	Status Capaian	OPD
	Persentase jumlah sekolah yang memenuhi kriteria minimum AKM jenjang SD/MI	%	97,85	97,85	100,00		
	Persentase jumlah sekolah yang memenuhi kriteria minimum jenjang SMP/MTs	%	91,67	100,00	109,09		
	APK PAUD	%	46,60	50,97	109,38		
	Persentase sekolah TK yang memenuhi standar Holistik Integratif dengan kategori sedang	%	78,07	78,07	100,00		
	Persentase kondisi kelas PAUD dalam kondisi baik	%	87,43	89,42	102,28		
	Kondisi Sarpras Pendidikan Kesetaraan Baik	%	95,45	94,74	99,26		
3	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**						
	Persentase sekolah yang telah menerapkan kegiatan yang dapat dikembangkan menjadi kurikulum mulok jenjang SD/MI	%	74,19	74,19	100,00		
	Persentase sekolah yang telah menerapkan kegiatan yang dapat dikembangkan menjadi kurikulum mulok jenjang SMP/MTs	%	63,89	63,89	100,00		
	Persentase sekolah yang menerapkan kegiatan yang dapat dikembangkan menjadi kurikulum mulok jenjang PKBM	%	75	75,00	100,00		
4	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**						
	Persentase Guru bersertifikat pendidik jenjang TK/RA	%	36,84	44,78	121,55		
	Persentase Guru bersertigikat pendidik jenjang SD	%	49,31	60,06	121,80		
	Persentase Guru bersertifikat pendidik jenjang SMP	%	58,65	66,85	113,98		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2025	Status Capaian	OPD
	Persentase Pendidik yang telah memenuhi kualifikasi minimal S1 jenjang PAUD	%	87,80	88,26	100,52		
	Persentase Pendidik yang telah memenuhi kualifikasi minimal S1 jenjang MI	%	97,15	95,72	98,53		
	Persentase Pendidik yang telah memenuhi kualifikasi minimal S1 jenjang SMP	%	99,10	99,33	100,23		
5	**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**						
	Persentase TK/RA yang terakreditasi	%	90,36	89,57	99,14		
	Persentase Pusat Kegiatan dan Belajar Masyarakat (PKBM) yang terakreditasi	%	83,33	100,00	120,00		
	Persentase Lembaga Kursus dan Pelatihan yang berizin	%	92,86	92,86	100,00		
	Persentase Sekolah yang memiliki izin operasional jenjang SD/MI	%	100,00	100,00	100,00		
	Persentase Sekolah yang memiliki izin operasional jenjang SMP/MTs	%	100,00	100,00	100,00		
6	**PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA**						
	Persentase sekolah yang mengembangkan model pembelajaran Bahasa Jawa jenjang SD/MI	%	20,43	20,43	100,00		
	Persentase sekolah yang mengembangkan model pembelajaran Bahasa Jawa jenjang SMP/MTs	%	42,86	42,86	100,00		
	Persentase PKBM yang sudah memasukkan pembelajaran Bahasa Jawa pada mata Pelajaran yang diberikan ke siswa	%	66,67	66,67	100,01		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2025	Status Capaian	OPD
B	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**Dinas Kesehatan**
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dasar dengan tingkat kepuasan masyarakat baik	%	100,00	100,00	100,00	●	
	Nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan Rumah Sakit	%	88,57	88,70	103,14	●	
	Cost Recovery	%	100,00	28,94	28,94	▼	
	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100,00	50,00	50,00	▼	
2	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						
	Angka Kematian Balita (AKABA)	Per 1.000 KH	10,00	14,49	144,90	●	
	Angka penemuan kasus baru TBC/Case Notifikasi Rate (CNR)	/100.000 pddk	145,00	291,92	201,32	●	
	Angka penemuan Pneumonia Balita	%	57,00	95,83	168,12	●	
	Annual Parasite Incidence (API) per 1.000 penduduk	1.000 penduduk	<1	0,24	26,67	▼	
	Cakupan kelurahan yang melaksanakan STBM dengan 5 pilar	%	39,10	13,04	33,35	▼	
	Cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan	%	78,00	76,00	97,44	●	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2025	Status Capaian	OPD
	Cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan	%	100,00	100,00	100,00		
	Cakupan bayi baru lahir yang mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD)	%	88,00	76,36	86,77		
	Cakupan Bayi Usia Kurang 6 Bulan mendapat ASI eksklusif	%	80,00	82,07	102,59		
	Cakupan BIAS Campak Rubela	%	98,00	98,90	100,92		
	Cakupan BIAS DT/Td	%	98,00	99,00	101,02		
	Cakupan Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapat makanan tambahan	%	100,00	100,00	100,00		
	Cakupan Ibu Hamil yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan	%	99,00	100,00	101,01		
	Cakupan ibu nifas mendapat kapsul Vitamin A	%	100,00	100,00	100,00		
	Cakupan kepesertaan JKN	%	100,00	100,28	100,28		
	Cakupan pelayanan kesehatan balita	%	100,00	100,00	100,00		
	Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100,00	100,00	100,00		
	Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin	%	100,00	100,00	100,00		
	Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100,00	100,00	100,00		
	Cakupan pelayanan kesehatan ibu nifas (KF3)	%	100,00	100,00	100,00		
	Cakupan pelayanan kesehatan Lansia	%	100,00	100,00	100,00		
	Cakupan pelayanan kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	%	100,00	100,00	100,00		
	Cakupan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	%	100,00	100,00	100,00		
	Cakupan pelayanan kesehatan Orang Terduga TB	%	100,00	100,00	100,00		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2025	Status Capaian	OPD
	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	%	100,00	100,00	100,00		
	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia produktif	%	100,00	100,00	100,00		
	Cakupan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	%	100,00	100,00	100,00		
	Cakupan pelayanan kesehatn penderita Hipertensi	%	100,00	100,00	100,00		
	Cakupan pembinaan remaja di sekolah	%	100,00	100,00	100,00		
	Cakupan Puskesmas yang melaksanakan intervensi lanjut PIS PK	%	100,00	100,00	100,00		
	Cakupan Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional	%	100,00	100,00	100,00		
	Cakupan Puskesmas yang melaksanakan Perkesmas	%	100,00	100,00	100,00		
	Cakupan remaja putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)	%	99,84	99,00	99,16		
	Cakupan TTU yang memenuhi syarat higiene sanitasi	%	99,44	99,44	100,00		
	Cakupan UCI kelurahan	%	100,00	100	100,00		
	Deteksi Dini Hepatitis	%	82,00	92,09	112,30		
	Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	%	100,00	96,77	96,77		
	Incident Rate DBD per 100.000 penduduk	100rb penduduk	<7	3,49	50,58		
	Kasus HIV/AIDS baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV	%	100,00	92,05	92,05		
	Nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan Dinas Kesehatan	%	86,90	84,79	97,57		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2025	Status Capaian	OPD
	Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	%	95,68	74,53	77,90		
	Pembentukan Posyandu Remaja	unit	30,00	0	0,00		
	Penemuan kasus AFP (Acute Flaccid Paralysis)	kasus	5,00	7,00	140,00		
	Persentase Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (Berat Badan kurang dari 2500 gram)	%	4,00	8	200,00		
	Persentase Ibu Hamil KEK	%	6,00	11,31	188,50		
	Persentase Ibu Hamil yang Anemia	%	7,43	5,77	77,66		
	Persentase Puskesmas yang melaksanakan SIMPUS	%	100,00	100	100,00		
	Prevalensi Stunting pada Balita	%	6,51	6,4	98,31		
	Proporsi jamaah haji Kota Salatiga yang mendapat pemeriksaan dan pembinaan kesehatan sesuai standar	%	100,00	100	100,00		
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100,00	100	100,00		
	Persentase ketersediaan BHP di Puskesmas dan KPM	%	87,00	107,73	123,83		
	Persentase ketersediaan obat esensial di Puskesmas dan KPM	%	85,00	116,00	136,47		
	Persentase Puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja	%	100,00	100	100,00		
	Persentase RS rujukan yang terakreditasi	%	100,00	100	100,00		
	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	%	1,65	0,459	27,82		
	Tertanganinya KLB/Bencana dalam 1x24 jam	%	100,00	100	100,00		
3	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2025	Status Capaian	OPD
	Persentase tenaga kesehatan yang sudah mengikuti pelatihan sesuai kompetensinya	%	73,04	68,14	93,29		
4	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**						
	Persentase sarana produksi IRTP yang memenuhi ketentuan	%	59,00	57,77	97,92		
	Persentase pangan IRT yang memenuhi syarat	%	88,00	87,88	99,86		
	Persentase SPP-IRT yang diterbitkan sesuai ketentuan	%	84,00	100	119,05		
	Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian (apotek, toko obat) yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan	%	99,67	86,36	86,65		
	Cakupan TPM yang memenuhi syarat higiene sanitasi	%	90,00	90,87	100,97		
5	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**						
	Cakupan desa siaga strata mandiri	%	100	100	100,00		
	Cakupan PHBS tatanan rumah tangga strata paripurna	%	98,11	98,11	100,57		
	Cakupan PHBS tatanan institusi pendidikan strata paripurna	%	99,35	99,35	102,00		
	Cakupan PHBS tatanan institusi kesehatan sehat	%	100	100	100,00		
	Cakupan PHBS tatanan tempat kerja sehat	%	96,83	96,83	99,63		
	Cakupan PHBS tatanan tempat umum sehat	%	94,92	94,92	100,61		
C	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**DPUPR**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2025	Status Capaian	OPD
	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	86,00	88,75	103,20		
2	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**						
	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	100,00	100,00	100,00		
3	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**						
	Persentase rumah tangga dengan akses air minum	%	94,00	97.31	99,15		
4	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**						
	Persentase rumah tangga dengan akses layanan pengolahan air limbah domestik	%	95,68	92,32	96,16		
5	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**						
	Persentase jaringan drainase kondisi baik	%	97,00	96,35	99,47		
6	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**						
	Rasio kepatuhan IMB	%	88,00	90.91	99,63		
7	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**						
	Persentase penataan bangunan dan lingkungan	%	100,00	100,00	100,00		
8	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**						
	Persentase jalan yang menjadi kewenangan dalam SK jalan kondisi mantap	%	92,00	86.62	99,97		
	Persentase jumlah jembatan kabupaten/kota dalam kondisi baik	%	20,00	19,73	98,65		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2025	Status Capaian	OPD
9	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**						
	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	94,00	100	106,38	●	
10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**						
	Tingkat ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	%	94,00	95.21	101,28	●	
D	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**						**Dinas PKP**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						
	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	90,00	95,41	96,01	●	
2	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**						
	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni korban bencana/relokasi kab/kota	%	66,67	15,00	22,50	▼	
	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kab/kota	%	75,00	0,00	0,00	▼	
	Persentase peningkatan dokumen pengembangan perumahan	%	75,00	100,00	133,33	●	
3	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**						
	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	%	10,13	36,47	360,02	●	
	Terfasilitasinya terbentuknya masyarakat atau kelompok pemelihara dan pemanfaat (KPP)	%	0,00	0,00	0,00	▼	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2025	Status Capaian	OPD
	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	7,18	4,45	61,98	▼	
4	**PROGRAM PENINGAKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**						
	Cakupan lingkungan perumahan yang sehat dan aman yang didukung PSU yang berkelanjutan	%	55,00	56,29	102,35	●	
	Terfasilitasinya pengembangan atau perluasan TPU dan meningkatnya kapasitas TPU	%	18,34	20,00	109,05	●	
	Cakupan lingkungan permukiman yang sehat didukung PSU	%	8,00	10,23	127,88	●	
E	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**SATPOL PP**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Satpol PP	%	88,00	89,25	101,42	●	
2	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						
	Persentase penegakan Perda dan Per Ka Da	%	100,00	100,00	100,00	●	
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	100,00	100,00	100,00	●	
3	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**						

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2025	Status Capaian	OPD
	Persentase ketersediaan sarana prasarana Damkar yang memadai	%	75,00	80,00	106,67		
	Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Kebakaran	%	85,00	100,00	117,65		
	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100,00	100,00	100,00		
F	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**BPBD**
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BPBD	%	87,00	88,15	101,32		
2	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**						
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (SPM)	%	100,00	100,00	100,00		
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (SPM)	%	100,00	100,00	100,00		
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (SPM)	%	100,00	100,00	100,00		
	Persentase kecukupan sarana dan prasaana, peralatan pendukung penanggulangan bencana dan logistik	%	38,30	38,00	99,22		
G	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						**Dinas Sosial**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2025	Status Capaian	OPD
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						
	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	90,00	90,49	100,54		
2	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**						
	Persentase terbentuknya Lembaga Puskesos	%	100,00	100,00	100,00		
	Persentase LKS/LKSA yang telah mengikuti Assesment	%	100,00	100,00	100,00		
	Persentase PSKS yang dibina	%	98,87	100,00	101,14		
3	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**						
	Persentase warga negara penyandang disabilitas telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	100,00	100,00	100,00		
	Persentase anak telantar yang mempeoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	100,00	100,00	100,00		
	Persentase warga negara lanjut usia telantar yang memperoleh rehabiitasi sosial di luar panti	%	100,00	100,00	100,00		
	Persentase warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	100,00	100,00	100,00		
4	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**						
	Persentase penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lansia telantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100,00	100,00	100,00		
	Persentase data fakir miskin yang divalidasi	%	97,70	97,69	99,99		
5	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**						

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2025	Status Capaian	OPD
	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100,00	100,00	100,00		
	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100,00	100,00	100,00		
6	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**						
	Cakupan pengeloalaan Taman Makam Pahlawan	%	100,00	100,00	100,00		
II	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						
A	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**						**Disperinaker**
1	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**						
	Persentase pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	%	100,00	205,00	205,00		
	Perentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi	%	100,00	1,02	1,02		
2	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**						
	Persentase realisasi kegiatan Bursa Tenaga Kerja	%	100,00	103,33	103,33		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2025	Status Capaian	OPD
3	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**						
	Persentase penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial	%	100,00	73,68	73,68		
	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	93,66	91,71	97,92		
B	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK**						**DP3APPKB**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						
	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	89,00	89,32	100,36		
2	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**						
	Persentase kelembagaan PUG aktif	%	100,00	100,00	100,00		
	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	9,24	6,00	64,94		
	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG	%	100,00	100,00	100,00		
	Persentase perempuan di legislatif	%	24,00	8,00	33,33		
3	**PROGRAM PELINDUNGAN PEREMPUAN**						
	Persentase perempuan korban kekerasan yang ditangani sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00		
	Rasio kekerasan terhadap perempuan	%	44,00	69,63	158,25		
4	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**						

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2025	Status Capaian	OPD
	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan	%	25,00	25,00	100,00		
5	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**						
	Persentase Perangkat Daerah yang berkontribusi dalam sistem gender dan anak	%	100,00	100,00	100,00		
6	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**						
	Persentase anak yang terlibat dalam kegiatan anak	%	6,80	1,55	22,79		
7	**PROGRAM PELINDUNGAN KHUSUS ANAK**						
	Persentase anak korban kekerasan	%	0,06	0,06	100,00		
C	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**						**DISPANGTAN**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	88,89	89,13	100,27		
2	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN**						
	Penyediaan infrastruktur pangan	%	92,69	93,02	100,36		
3	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**						
	Ketersediaan dan penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya	%	94,11	90,95	96,64		
	Proporsi populasi yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan di bawah kebutuhan minimum energi (MDER)	Skor PoU	5,02	4,67	93,03		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2025	Status Capaian	OPD
4	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**						
	Persentase penanganan rumah tangga rawan pangan	%	10,20	74,37	729,12		
5	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**						
	Persentase pangan segar aman	%	98,00	87,18	88,96		
D	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**						**DINAS PKP**
1	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**						
	Persentase penyelesaian sengketa tanah	%	100.00	100,00	100,00		
2	**PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH**						
	Persentase bidang tanah yang terdata dan terpetakan	%	0,00	0,00	0,00		
	Persentase data rupa bumi yang tersedia	%	75,00	100,00	133,33		
	Persentase penyertifikatan tanah hasil pengadaan, PSU, dan TPU	%	100,00	100,00	100,00		
3	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**						
	Cakupan ketersediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	%	9,00	100,00	1.111,11		
	Persentase peningkatan penggunaan dan pemanfaatan tanah	%	75,00	100,00	133,33		
E	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**DINAS LH**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2025	Status Capaian	OPD
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						
	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	84,00	84,17	100,20		
2	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**						
	IKPLHD	Dokumen	1	1	100,00		
	KLHS	Dokumen	0	0	0,00		
3	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**						
	Pemantauan Status Mutu Air	%	100,00	100,00	100,00		
	Persentase peningkatan sarana prasarana laboratorium	%	100,00	100,00	100,00		
	Persentase Konservasi Lahan	%	15,00	15,00	100,00		
	Persentase Konservasi Sumber Mata Air	%	30,00	30,00	100,00		
4	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**						
	Persentase ruang terbuka hijau	%	17,40	17,40	100,00		
5	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)**						
	Persentase penyimpanan dan atau pengangkutan limbah B3 sesuai dengan ketentuan	%	30,00	30,00	100,00		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2025	Status Capaian	OPD
6	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PELINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**						
	Persentase kegiatan penegakan hukum lingkungan	%	100,00	82,14	82,14		
	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap persetujuan	%	32,00	69,42	216,94		
	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100,00	100,00	100,00		
	Persentase tersusunnya dokumen IGRK	%	100,00	100,00	100,00		
7	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**						
	Persentase penghargaan lingkungan tingkat kabupaten/kota	%	100,00	100,00	100,00		
	Persentase penerima penghargaan tingkat kabupaten/kota yang difasilitasi untuk penghargaan tingkat provinsi	%	100,00	100,00	100,00		
	Peningkatan kapasitas Pemahaman Lingkungan Hidup	%	40,00	40,00	100,00		
8	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**						
	Persentase pengurangan sampah	%	30,00	22,81	76,03		
	Persentase penanganan sampah	%	71,00	75,63	106,52		
	Persentase pengangkutan sampah	%	71,00	75,63	106,52		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2025	Status Capaian	OPD
F	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**						**DINAS DUKCAPIL**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						
	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	90,85	91,44	100,51		
2	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**						
	Cakupan penduduk perekaman KTP-el	%	98,00	97,69	101,55		
	Persentase penerbitan KIA 0-5 th	%	86,00	87,46	109,60		
3	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**						
	Persentase penerbitan akta kelahiran 0-5 th	%	99,76	99,79	100,90		
	Persentase Akta Perkawinan non muslim	%	100,00	100,00	100,00		
4	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**						
	Ketersediaan database kependudukan	%	100,00	100,00	100,00		
G	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**						**DP3APPKB**
1	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**						
	Cakupan pembinaan kebijakan dan strategi pengendalian penduduk (penyusunan Grand Design, Profil/Parameter dan Proyeksi Penduduk)	%	100,00	100,00	100,00		
	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 thn) per 1000 perempuan usia 15-19 thn (ASVFR)	%	0,63	0,63	100,00		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2025	Status Capaian	OPD
	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan	%	100,00	100,00	100,00		
	Cakupan PUS yang istrinya di bawah 20 tahun	%	0,07	0,07	100,00		
	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	tahun	23,00	23,00	100,00		
2	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA**						
	Rasio akseptor KB baru	%	14,31	14,31	100,00		
	Cakupan peserta KB aktif	%	67,70	67,70	100,00		
	Rasio Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)	rasio	1:2,3	1:2,5	108,00		
	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 thn	%	67,70	67,70	100,00		
	Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmetneed)	%	8,51	8,51	100,00		
	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	26,65	27,57	103,45		
	Persentase Fasilitas Kesehatan yang siap melayani KB MKJP	%	100,00	100,00	100,00		
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**						
	Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD)	rasio	1:2	1:1,9	94,74		
	Cakupan Balita/Anak dengan Tumbuh Kembang sesuai dengan Kartu Kembang Anak (KKA)	%	100,00	99,66	99,66		
	Cakupan perkawinan usia di bawah 21 tahun	%	0,39	0,39	100,00		
	Cakupan kader BKB yang terlatih	%	75,00	53,69	71,59		
	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber-KB	%	96,00	97,47	101,53		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2025	Status Capaian	OPD
	Persentase Baduta Stunting	%	5,75	5,75	100,00		
H	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**						**DINAS PERHUBUNGAN**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA**						
	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	87,82	95,70	108,97		
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**						
	Persentase rambu-rambu terpasang	%	89,00	89,00	100,00		
	Persentase layanan angkutan darat	%	29,00	27,53	94,93		
I	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**						
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	85,00	81,08	95,39		
2	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**						
	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	%	100,00	100,00	100,00		
3	**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**						
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100,00	100,00	100,00		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2025	Status Capaian	OPD
	Persentase pelayanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	100,00	16,52	16,52		
J	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**						**DINAS KOPERASI UKM**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						
	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	85,43	86,66	101,44		
2	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**						
	Persentasi koperasi yang berkualitas	%	73,96	71,88	97,19		
3	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**						
	Persentase koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan	%	53,12	53,53	100,77		
4	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**						
	Persentase pengelola koperasi yang mengikuti pelatihan	%	83,91	85,07	101,38		
5	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PELINDUNGAN KOPERASI**						
	Persentase akses pasar anggota koperasi	%	75,00	87,50	116,67		
6	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**						
	Persentase UMKM yang mendapatkan akses pembiayaan	%	24,90	25,93	104,14		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2025	Status Capaian	OPD
7	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**						
	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	%	48,32	48,80	157,12	●	
K	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**						**DPMPTSP**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						
	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	89,50	92,18	103,57	●	
2	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**						
	Nilai investasi berskala nasional PMA dan PMDN	Rupiah (Milyar)	635,00	1.123,13	191,39	●	
3	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**						
	Persentase kenaikan jumlah minat investasi berskala nasional (PMA dan PMDN)	%	10,00	10,53	105,26	●	
4	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**						
	Persentase perizinan dan non perizinan yang dikeluarkan	%	98,30	99,94	101,66	●	
5	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**						
	Persentase kenaikan jumlah LKPM yang masuk	%	54,16	8,15	15,04	▼	
6	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**						
	Persentase kenaikan perizinan dan non perizinan yang dikelola	%	10,00	14,92	149,19	●	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2025	Status Capaian	OPD
L	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**						**DISPORA**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						
	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	80,00	82,78	103,48		
2	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**						
	Persentase pemuda yang mengikuti pengembangan kapasitas Daya Saing Kepemudaan	%	5,44	3,00	55,15		
3	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**						
	Persentase atlet yang mengikuti pengembangan kapasitas Daya Saing Olahraga	%	27,00	18,00	66,67		
4	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**						
	Persentase fasilitasi pengembangan kapasitas kepramukaan	%	70,00	65,00	92,86		
M	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**						**DISKOMINFO**
1	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**						
	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100,00	100,00	100,00		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2025	Status Capaian	OPD
	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daearah	%	100,00	100,00	100,00		
N	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**						**DISKOMINFO**
1	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**						
	Persentase tingkat kematangan daerah dalam penyelenggaraan keamanan informasi	%	73,00	70,85	97,05		
O	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**DISBUDPAR**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						
	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	86,85	88,70	102,13		
2	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**						
	Persentase obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan	%	57,97	76,81	132,50		
3	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**						
	Persentase SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi serta peningkatan kapasitas tata kelola	%	100,00	100,00	100,00		
4	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**						

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2025	Status Capaian	OPD
	Persentase kajian sejarah	%	75,00	50,00	66,67		
5	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**						
	Persentae penetapan cagar budaya	%	38,57	46,38	120,25		
6	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**						
	Persentase penambahan jumlah koleksi museum	%	38,18	35,53	93,06		
P	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**						**DINPERSIP**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						
	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	83,21	85,38	102,61		
2	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**						
	Nilai tingkat kegemaran membaca	%	85,83	75,23	87,65		
3	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**						
	Persentasi koleksi nasional dan kuno yang dilestarikan	%	100,00	25,00	25,00		
Q	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**						**DINPERSIP**
1	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**						
	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	%	100,00	100,00	100,00		
2	**PROGRAM PELINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**						
	Persentase jumalh arsip yang diselamatkan	%	100,00	45,67	45,67		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2025	Status Capaian	OPD
3	**PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP**						
	Persentase peningkatan pengguna atau pengunjung arsip	%	100,00	1.315,16	1.315,16		
III	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						
A	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**DISPANGTAN**
1	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**						
	Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan	%	100,00	100,00	100,00		
	Persentase Kelompok Pembudidaya Ikan yang telah menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)	%	35,00	35,00	100,00		
2	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**						
	Cakupan bina kelompok pengolah dan pemasar ikan	%	100,00	100,00	100,00		
	Persentase kelompok-kelompok pengolah dan pemaaar ikan yang telah menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)	%	35,00	35,00	100,00		
B	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**						**DISBUDPAR**
1	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**						
	Persentase obyek wisata yang ditingkatkan	%	100,00	100,00	100,00		
2	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**						
	Persentase fasilitasi pemasaran pariwisata	%	100,00	100,00	100,00		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2025	Status Capaian	OPD
3	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PELINDUNGAN HAK KEKAYAAAN INTELEKTUAL**						
	Persentase pengelolaan ekonomi kreatif	%	100,00	100,00	100,00		
4	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**						
	Persentase peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif	%	100,00	100,00	100,00		
C	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						
1	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**						
	Pemenuhan kebutuhan sarana pertanian	%	75,00	75,00	100,00		
2	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**						
	Pemenuhan kebutuhan prasarana pertanian	%	75,00	75,00	100,00		
3	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHAAN MASYARAKAT VETERINER**						
	Mortalitas hewan/ternak akibat penyakit zoonosis	%	0,00	0,00	100,00		
4	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**						
	Persentase kejadian bencana pertanian	%	0,00	0,00	100,00		
5	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**						
	Persentase Cakupan Bina Kelompok Tani						
	- Pemula	%	58,56	60,00	102,46		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2025	Status Capaian	OPD
	- Lanjut	%	58,56	74,00	126,37		
	- Madya	%	15,31	22,00	124,01		
	- Utama	%	2,60	0,00	0,00		
D	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**						**DINAS PERDAGANGAN**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						
	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	84,15	85,96	102,15		
2	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**						
	Persentase jumlah perizinan yang dilegalitas terhadap jumlah pelaku usaha perdagangan	%	20,00	20,00	100,00		
3	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PEDAGANGAN**						
	Persentase pasar tradisional yang memenuhi standar	%	95,00	95,00	100,00		
	Persentase kelompok pedagang (formal dan informal) yang dibina	%	85,00	85,00	100,00		
	Persentase kelompok PKL yang dibina	%	51,00	51,00	100,00		
	Persentase PKL yang ditata terhadap jumalh total PKL	%	34,00	34,00	100,00		
	Persentase PKL yang menempati Lokasi peruntukan terhadap jumlah PKL	%	36,00	36,00	100,00		
4	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**						

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2025	Status Capaian	OPD
	Persentase penerima pupuk bersubsidi terhadap pengguna pupuk	%	100,00	100,00	100,00		
	Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan daerah	%	26,00	26,00	100,00		
5	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**						
	Persentase produk unggulan terhadap jumlah produk di Kota Salatiga	%	90,00	0,00	0,00		
6	**PROGRAM STANDARISASI DAN PELINDUNGAN KONSUMEN**						
	Persentase alat UTTP dan perlengkapannya di wilayah Kota Salatiga yang ditera ulang dan bertanda tera sah	%	90,00	19,54	21,71		
E	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**						**DISPERINAKER**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA**						
	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	88,88	88,31	99,36		
1	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**						
	Persentase industri Kota Salatiga yang berkembang	%	0,38	0,31	82,31		
2	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA**						
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan denagn jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100	9,54	9,54		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2025	Status Capaian	OPD
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	1,41	0,00	0,00	▼	
3	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**						
	Persentase usaha industri yang memiliki akun SIINAS dan melaporkan data industri	%	13,30	16,87	126,86	●	
F	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**						**DISPERINAKER**
1	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**						
	Persentase pelaksanaan proses transmigrasi	%	100,00	40,00	40,00	▼	
IV	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						
A	**SEKRETARIAT DAERAH**						
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						
	Cakupan koordinasi dan fasilitasi bidang keprotokolan dan kehumasan yang berkualitas	%	100,00	97,89	97,89	●	**Bagian Prokompin**
	Persentase kegiatan Administrasi Umum yang berhasil dikoordinasikan dan difasilitasi	%	100,00	100	100,00	●	**Bagian Umum**
	Cakupan penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	%	100,00	100	100,00	●	**Bagian Pembangunan**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2025	Status Capaian	OPD
2	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**						
	Cakupan Koordinasi Administrasi Pemerintahan	%	100,00	99,6	99,60		**Bagian Pemerintahan**
	Cakupan Koordinasi Bidang Administrasi Kewilayahan	%	100,00	89,47	89,47		
	Cakupan Fasilitasi Kerjasama Daerah	%	100	100	100,00		
	Skor LPPD	Nilai	3,10	100	3.225,81		
	Ketepatan waktu penyampaian LKPJ (30 Maret)	%	100,00	100	100,00		
	Persentase pelaksanaan kebijakan bidang hukum	%	100,00	100	100,00		**Bagian Hukum**
	Persentase pelaksanaan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat	%	100,00	100	100,00		**Bagian Kesra**
3	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**						
	Cakupan koordinasi program perekonomian dan pembangunan	%	100,00	74,58	74,58		**Bagian Perekonomian**
	Cakupan koordinasi OPD pengampu DBHCHT	%	100,00	90,47	90,47		
	Cakupan koordinasi dan pembinaan BMUD/BLUD	%	100,00	23,75	23,75		
	Cakupan koordinasi bidang lingkungan hidup dan SDA	%	100,00	90,57	90,57		
	Cakupan koordinasi POK	%	100,00	100	100,00		**Bagian Pembangunan**
	Persentase nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	84,00	100	119,05		**Bagian PBJ**
B	**SEKRETARIAT DPRD**						

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2025	Status Capaian	OPD
1	**PROGRAM ADMINISITRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN/KOTA**						
	Tingkat kepuasan DPRD dalam fasilitasi pelayanan kesekretariatan	%	94,85	100,00	105,43		
2	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI**						
	Cakupan fasilitasi fungsi Legislasi	%	100,00	100,00	100,00		
	Cakupan fasilitasi fungsi Penganggaran	%	100,00	100,00	100,00		
	Cakupan fasilitasi fungsi Pengawasan	%	100,00	95,00	95,00		
V	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						
A	**PERENCANAAN**						**BAPPEDA**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						
	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	83,00	82,60	99,52		
2	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**						
	Rata-rata capaian kinerja sasaran pembangunan daerah	%	98,00	98,24	100,24		
3	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**						
	Penjabaran konsistensi kegiatan RENSTRA ke dalam RENJA Bidang Perencanaan Kesra	%	98,00	100,00	102,04		
	Penjabaran konsistensi kegiatan RENSTRA ke dalam RENJA Bidang Perencanaan Ekbang	%	90,00	98,86	109,84		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2025	Status Capaian	OPD
B	**KEUANGAN**						**BPKPD**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						
	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	82,73	82,73	100,00		
2	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**						
	Persentase belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%	20,20	20,00	99,01		
	Persentase belanja urusan pemerintahan umum (dikurangi transfer expenditures)	%	86,36	86,25	99,87		
	Budget execution : deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	4,50	6,01	133,56		
	Cash management (Persentase anggaran)	%	15,07	11,99	79,56		
	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	%	100,00	91,69	91,69		
	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	%	100,00	100,00	100,00		
3	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**						
	Asset management	Laporan	4,00	4,00	100,00		
4	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**						
	Revenue mobilization : deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	22,48	8,18	36,39		
C	**KEPEGAWAIAN**						**BKPSDM**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2025	Status Capaian	OPD
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**						
	Indeks Kepuasan Masyrakat	Nilai	83,50	83,60	100,12		
2	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**						
	Persentase PNS yang melanjutkan pendidikan	%	1,47	3,66	248,98		
	Persentase PNS yang mengikuti assessment	%	8,00	3,06	38,25		
	Rasio pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	75,00	76,33	101,77		
	Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	25,00	25,21	100,84		
	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	100,00	99,72	99,72		
D	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**						**BKPSDM**
1	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**						
	Persentase ASN yang mengikuti Pelatihan Teknis	%	4,38	48,19	559,70		
	Persentase ASN yang mengikuti Pelatihan Manajerial dan Fungsional	%	6,24	58,00	172,72		
E	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**						
1	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**						
	Persentase terfasilitasinya inovasi masyarakat daerah	%	37,50	53,61	121,02		**BAPPEDA**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2025	Status Capaian	OPD
VI	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**						**INSPEKTORAT DAERAH**
A	**INSPEKTORAT DAERAH**						
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						
	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	81,30	80,61	99,15		
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**						
	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal	%	90,00	90,91	101,01		
	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI	%	94,00	95,74	101,85		
	Persentase jumlah OPD meningkat Nilai Evaluasi SAKIP	%	60,00	60,00	100,00		
3	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**						
	Nilai MCP Korsupgah KPK	%	94,58	90,30	95,47		
VII	**UNSUR KEWILAYAHAN**						
	KECAMATAN						
A	**KECAMATAN SIDOREJO**						**KECAMATAN SIDOREJO**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						
	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100,00	100,00	100,00		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2025	Status Capaian	OPD
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						
	Persentase peningkatan skor IKM	%	0,4	0,60	150,00		
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						
	Tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbangkel	%	65,00	100,00	153,85		
4	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						
	Persentase upaya peningkatan ketenteraman dan ketertiban di tingkat wilayah	%	100,00	100,00	100,00		
	Persentase terlaksananya tugas Forum Koordinasi Pimpinan di kecamatan	%	100,00	100,00	100,00		
5	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						
	Persentase penyampaian SPPT PBB pada WP Kecamatan Sidorejo	%	69,00	80,37	116,47		
B	**KECAMATAN ARGOMULYO**						**KECAMATAN ARGOMULYO**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						
	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100,00	100,00	100,00		
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						
	Persentase peningkatan skor IKM	%	1,40	6,60	471,43		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2025	Status Capaian	OPD
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						
	Tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbangkel	%	90,60	53,66	59,23	▼	
4	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						
	Persentase upaya peningkatan ketenteraman dan ketertiban di tingkat wilayah	%	100,00	100,00	100,00	●	
	Persentase terlaksananya tugas Forum Koordinasi Pimpinan di kecamatan	%	100,00	100,00	100,00	●	
5	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						
	Persentase penyampaian SPPT PBB pada WP Kecamatan Argomulyo	%	63,55	93,00	146,34	●	
C	**KECAMATAN TINGKIR**						**KECAMATAN TINGKIR**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						
	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100,00	100,00	100,00	●	
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						
	Persentase peningkatan skor IKM	%	2,05	0,10	4,88	▼	
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2025	Status Capaian	OPD
	Tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbangkel	%	100,00	100,00	100,00		
4	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						
	Persentase upaya peningkatan ketenteraman dan ketertiban di tingkat wilayah	%	100,00	100,00	100,00		
	Persentase terlaksananya tugas Forum Koordinasi Pimpinan di kecamatan	%	100,00	100,00	100,00		
5	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						
	Persentase penyampaian SPPT PBB pada WP Kecamatan Tingkir	%	83,48	64,76	77,58		
D	**KECAMATAN SIDOMUKTI**						**KECAMATAN SIDOMUKTI**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						
	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100,00	100,00	100,00		
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						
	Persentase peningkatan skor IKM	%	1,22	0,26	21,31		
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						
	Tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbangkel	%	100,00	100,00	100,00		
4	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2025	Status Capaian	OPD
	Persentase upaya peningkatan ketenteraman dan ketertiban di tingkat wilayah	%	100,00	100,00	100,00		
	Persentase terlaksananya tugas Forum Koordinasi Pimpinan di kecamatan	%	100,00	100,00	100,00		
5	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						
	Persentase penyampaian SPPT PBB pada WP Kecamatan Sidomukti	%	89,73	100,00	111,45		
VIII	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**						
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						**KESBANGPOL**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor	85,49	87,16	101,95		
2	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**						
	Persentase pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila	%	84,38	95,56	113,25		
3	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**						
	Persentase pendidikan politik yang dilaksanakan	%	100,00	98,19	98,19		
4	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWAASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**						

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2025	Status Capaian	OPD
	Persentase Ormas yang berperan aktif dalam pembangunan	%	62,16	99,50	160,07		
5	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**						
	Prosentase penurunan penyalahgunaan narkoba	%	8,00	0,40	5,00		
	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Nilai	78,98	93,33	118,17		
6	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**						
	Persentase penurunan kejadian atau konflik sosial	%	35,00	83,10	237,43		

Keterangan :
Skala Nilai Peringkat Kinerja (Target tahun 2025)

- : N > 90% Sangat Tinggi
- : > 75% N ≤ 90% Tinggi
- : > 65% N ≤ 75% Sedang
- : > 50% N ≤ 65% Rendah
- : N ≤ 50% Sangat Rendah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2.6. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan Pembangunan tahun 2025 yang menjadi dasar penentuan isu strategis adalah hasil analisis pada berbagai permasalahan pembangunan pada setiap urusan pemerintah daerah serta berdasarkan prioritas pembangunan tahun 2025, dirumuskan sebagai berikut :

Tabel 2. 109. Rumusan Permasalahan RKPD Kota Salatiga Tahun 2027

Aspek / Urusan	Akar Masalah	Data Dukung	Statement Permasalahan
Kemiskinan	• Penentuan status desil merupakan kebijakan mutlak Kementerian Sosial	Angka kemiskinan kota salatiga tahun 2025 sebesar 4,20	Masih adanya angka kemiskinan sebesar 4,20%, sedangkan target SDGs pada tahun 2030 adalah nol persen
Ketimpangan	• Ketimpangan Kota Salatiga masih tinggi	Anngka ketimpangan Kota Salatiga masih tinggi 0,407	Tingginya tingkat ketimpangan pendapatan penduduk, termasuk 3 besar di Jawa Tengah
Demografi	• Penduduk usia semakin meningkat, belum optimal dalam pemenuhan pelayanan publik untuk penduduk usia tua	Penduduk usia lebih dari 60 tahun : Tahun 2021 : 23.442 Tahun 2022 : 24.282 Tahun 2023 : 25.296 Tahun 2024 : 25.383 Tahun 2025 : 26.542	Meningkatnya jumlah penduduk lansia seiring dengan Usia Harapan Hidup yang terus naik, pada tahun 2025 pada angka 78,75 tahun
Geografis	• Kota Salatiga yang berada di persimpangan jalur utama Semarang–Solo, belum optimal dalam memanfaatkan peranannya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional	Pertumbuhan Ekonomi tahun 2025 : 5,98	Kota Salatiga yang berada di persimpangan jalur utama Semarang–Solo, belum optimal dalam memanfaatkan peranannya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional dengan kondisi sumberdaya yang dimiliki saat ini, pertumbuhan ekonomi belum mencapai target pesimis tahun 2025 yaitu 6,10%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Aspek / Urusan	Akar Masalah	Data Dukung	Statement Permasalahan
Pendidikan	• Masih ditemukan anak putus sekolah pada satuan pendidikan dasar • Anak Berkebutuhan Khusus belum terlayani secara optimal • Kualitas sarana dan prasarana belajar untuk pendidikan dasar belum optimal • Pencapaian literasi dan numerasi siswa pada jenjang pendidikan dasar belum optimal • Angka Partisipasi Kasar PAUD masih rendah • Kualitas sarana dan prasarana belajar untuk PAUD dan Pendidikan Kesetaraan belum optimal • Pengembangan Kurikulum mulok belum optimal	• Angka putus sekolah SMP/MTs mencapai 0,04% • Angka Partisipasi Kasar PAUD 47,27% • Ketersediaan Guru Pembimbing Khusus, Shadow Teacher, alat peraga edukatif, mebel, alat terapi masih kurang • Rata-rata kemampuan literasi SD 2,78% • Rata-rata kempuan numerasi SD 2,66% • Rata-rata kemampuan literasi SMP 2,85% • Rata-rata kemampuan numerasi SMP 2,75% • Sarana komputer untuk Tes Kompetensi Akademi belum memadai • Partisipasi masyarakat untuk menyekolahkan anak di jenjang PAUD masih rendah	Angka Partisipasi Sekolah belum mencapai 100%
Kesehatan	• Angka kematian bayi masih tinggi • Angka Success Rate TBC kurang optimal	• Tingkat capaian angka kematian bayi adalah 89,36% • Success Rate TB mencapai 78,96% • Prevalensi Stunting pada Balita mencapai 6,4%	Belum optimalnya pencapaian Tingkat kesehatan keluarga dengan masih adanya kasus gizi buruk dan stunting pada anak, kasus kematian balita, dan kematian ibu
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	• Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan IMB • Belum tersedia revisi SK Jalan, sehingga belum semua jalan dapat ditangani • Partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap infrastruktur masih rendah • Pendataan kondisi jembatan baru dilaksanakan pada tahun 2023 yang menghasilkan data riil kondisi jembatan saat ini, yang mempengaruhi kinerja kondisi jembatan dalam kondisi bagus masih sangat rendah.	• Realisasi kepatuhan IMB mencapai 87,67% • realisasi jalan yang menjadi kewenangan dalam SK jalan mencapai 91,97% • Realisasi jumlah jembatan kota dalam kondisi baik mencapai 19,73%	Belum optimalnya upaya peningkatan dan pemerataan insfrastruktur daerah dalam menunjang pelayanan
Ketenteraman, Ketertiban Umum	• Mitigasi bencana yang kurang optimal	Nilai Indeks Ketahanan Daerah terhadap	Kualitas sumber daya aparatur, pemanfaatan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Aspek / Urusan	Akar Masalah	Data Dukung	Statement Permasalahan
dan Perlindungan Masyarakat	• Koordinasi lintas perangkat daerah kurang optimal	Bencana (IKD) tahun 2024 adalah 0,5	teknologi dalam pelayanan, penerapan standar pelayanan yang jelas dan terukur, pengembangan birokrasi dan penguatan sistem pengawasan dalam pelayanan public masih belum optimal
Tenaga Kerja	• Kesenjangan antara keterampilan pencari kerja dan kebutuhan industri • Terbatasnya informasi lowongan kerja yang akurat dan mudah diakses oleh pencari kerja	Realisasi tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi tahun 2025 adalah 1,02%	Pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya menciptakan pemerataan kesejahteraan dengan masih didominasi oleh sektor industri pengolahan dan konsumsi rumah tangga
Permberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	• Keterbatasan personil di lapangan dan sarpras • Masyarakat yang merasa malu dan memilih untuk tidak melaporkan terjadinya kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	• Rasio kekerasan terhadap perempuan mencapai 69,63% • Persentase anak yang menjadi korban kekerasan 0.06%	Belum optimalnya pencapaian perlindungan perempuan dan anak, masih adanya anak korban kekerasan dan kekerasan terhadap perempuan
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	• Masih kuatnya resistensi sosiokultural, khususnya pandangan bahwa penggunaan kontrasepsi merupakan bentuk intervensi terkait kelahiran anak	• Angka pemakaian kontrasepsi bagi perempuan menikah usia 15-49 mencapai 67,46% • Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi mencapai 8,51% • Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang mencapai 27,57% • Rasio akseptor KB baru mencapai 14,31%	Belum optimalnya pencapaian Tingkat kesehatan keluarga dengan masih adanya kasus gizi buruk dan stunting pada anak, kasus kematian balita, dan kematian ibu
Lingkungan Hidup	• Meningkatnya pembangunan yang mengakibatkan peningkatan jumlah timbunan limbah yang berpottensi terhadap penurunan kualitas air • Berkurangnya area hijau pada turus jalan • Masih kurangnya Ruang Terbuka Hijau yang berkualitas (diisi dengan mayoritas pepohonan berkayu dengan tajuk terlihat dari citra satelit	• Persentase konservasi lahan mencapai 15% • Persentase konservasi sumber mata air mencapai 30% • Perentase ruang terbuka hijau mencapai 17,4%	Daya dukung lahan tidak mampu memenuhi kebutuhan standar hidup layak penduduk, dan penurunan kualitas air
Pangan	• Penurunan produksi pangan akibat cuaca ekstrem atau serangan	• Persentase ketersediaan dan penyaluran pangan	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Aspek / Urusan	Akar Masalah	Data Dukung	Statement Permasalahan
	hama/penyakit tanaman yang mengakibatkan gagal panen • Kurangnya koordinasi antar perangkat daerah di bidang pangan dan pertanian yang menghambat proses pengendalian dan evaluasi ketersediaan energi pangan	pokok dan pangan lainnya mencapai 90,95% • Persentase pangan segar dan aman mencapai 87,18%	
Pertanahan	Ada indikator kinerja program yang sudah tidak dianggarkan dalam kegiatan pendataan tanah. Indikator program ini berkaitan dengan program Trisula yang selesai dikerjakan pada tahun 2024.	Persentase bidang tanah yang terdata dan terpetakan mencapai 0%	Belum optimalnya upaya peningkatan dan pemerataan insfrastruktur daerah dalam menunjang pelayanan
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai regulasi yang terkait dengan administrasi kependudukan	• Cakupan penduduk yang melakukan perekaman KTP-el mencapai 97,69% • Persentase penerbitan KIA 0-5 th mencapai 87,46% • Persentase penerbitan akta kelahiran 0-5 th mencapai 99,79%	Kualitas sumber daya aparatur, pemanfaatan teknologi dalam pelayanan, penerapan standar pelayanan yang jelas dan terukur, pengembangan birokrasi dan penguatan sistem pengawasan dalam pelayanan public masih belum optimal
Komunikasi dan Informatika	• Sarana dan prasarana komunikasi yang kurang memadai • Kurangnya SDM yang berkompeten dalam penyebarluasan informasi • Perangkat daerah yang kurang komitmen dalam pengamanan dan pengelolaan sistem informasi	• Persentase pelayanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi mencapai 16,52% • Persentase tingkat kematangan daerah dalam penyelenggaraan keamanan informasi mencapai 70,85%	Infrastruktur digital yang merata, literasi digital aparatur, serta sistem informasi antar-perangkat daerah yang masih belum optimal.
Penanaman Modal	Peta potensi investasi dan masterplan investasi Kota Salatiga belum tersedia secara lengkap dan belum dipromosikan secara luas, sehingga calon investor kesulitan menilai kelayakan lokasi.	• Realisasi kenaikan jumlah minat investasi berskala nasional (PMA dan PMDN) mencapai 10,53% • Realisasi kenaikan jumlah perizinan dan non perizinan yagn dikelola mencapai 14,92%	Keterbatasan investasi dan belum optimalnya pemanfaatan potensi sektor unggulan daerah
Kepemudaan dan Olahraga	Kegiatan olahraga banyak yang dilaksanakan dengan sistem berjenjang, sehingga apabila di jenjang atasnya tidak dilaksanakan maka untuk jenjang dibawahnya otomatis tidak dapat dilaksanakan.	• Persentase pemuda yang mengikuti pengembangan kapasitas Daya Saing Kepemudaan mencapai 55,15%. • Persentase atlet yang mengikuti pengembangan	Masih rendahnya Daya Saing Olahraga

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Aspek / Urusan	Akar Masalah	Data Dukung	Statement Permasalahan
		kapasitas Daya Saing Olahraga mencapai 66,67%. • Persentase fasilitasi pengembangan Kapasitas Kepramukaan mencapai 92,86%.	
Pariwisata	• Belum optimalnya koordinasi antarstakeholder pelaku pariwisata, pelaku ekonomi kreatif, masyarakat umum, dan perangkat daerah lintas sektor terkait dalam pengembangan lingkungan pariwisata dan ekonomi kreatif • Terbatasnya daya tarik wisata baru atau event berskala besar yang mampu meningkatkan kunjungan • Persaingan dengan DTW (Daya Tarik Wisata) di daerah sekitar yang memiliki atraksi lebih beragam • Minimnya objek wisata, terbatasnya fasilitas pemasaran dan sarana prasarana pendukung pariwisata serta ekonomi kreatif	• Realisasi kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku mencapai 7,92% • Realisasi kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD mencapai 0,18%	Belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya alam terutama dalam pengembangan teknologi pertanian dan pengelolaan potensi wisata dalam mendukung perkembangan ekonomi masyarakat Kota Salatiga
Perpustakaan	• Kurangnya sarana dan prasarana pengolahan, penyimpanan, dan display koleksi naskah kuno	Realisasi koleksi nasional dan kuno yang dilestarikan adalah 25%	Masih rendahnya koleksi nasional dan kuno yang dilestarikan, tahun 2025 baru 25 %, dan prosentase pemajuan kebudayaan baru 76,81%
Kebudayaan	• Belum optimalnya pengelolaan, pelestarian budaya, perlindungan, penyelamatan, pengamanan cagar budaya dan peninggalan sejarah • Standarisasi gedung museum dan gedung kesenian daerah sebagai tempat untuk berkreasi belum dapat dipenuhi • Terbatasnya SDM pengelola/tim ahli yang memiliki kompetensi di cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan	Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan adalah 76,81%	Masih rendahnya koleksi nasional dan kuno yang dilestarikan, tahun 2025 baru 25 %, dan prosentase pemajuan kebudayaan baru 76,81%
Pertanian	• Fluktuasi harga gabah dan biaya produksi yang tinggi • Serangan hama dan penyakit tanaman holtikultura • Kasus penyakit hewan menular (zoonosis) yang	• Realisasi produktivitas padi adalah 6,307% • Realisasi peningkatan produktivitas	Belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya alam terutama dalam pengembangan teknologi pertanian dan pengelolaan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Aspek / Urusan	Akar Masalah	Data Dukung	Statement Permasalahan
	dapat menurunkan produktivitas serta menyebabkan kerugian ekonomi • Produktivitas sapi perah yang mengalami penurunan akibat wabah penyakit mulut dan kuku • Cakupan vaksinasi hewan yang belum optimal	tanaman holtikultura adalah -0,4% • Realisasi peningkatan produktivitas peternakan daging sapi adalah 0,12% • Realisasi produktivitas sapi perah adalah 3%	potensi wisata dalam mendukung perkembangan ekonomi masyarakat Kota Salatiga
Penelitian dan Pengembangan	Indeks Inovasi diperoleh melalui pengisian Aplikasi IGA dengan berbagai pengaturan di dalamnya serta masih kurangnya inovasi yang tertib administrasi sehingga inovasi yang dikirimkan pada penilaian Indeks Inovasi terlalu sedikit Proses penyusunan Dokumen Perencanaan menggunakan dokumen hasil kelitbangan yang telah disusun, akan tetapi ada beberapa hasil kelitbangan yang belum bisa dimanfaatkan karena perbedaan prioritas perencanaan pada tahun bersangkutan	Nilai Indeks Inovasi Daerah : 2021 : 46,26 2022 : 47,11 2023 : 44,55 2024 : 51,10 2025 : 48,88 Pemanfaatan Kelitbangan : 2024 : 58,33 2025 : 73,68	Penurunan Indeks Inovasi Daerah (51,10 turun menjadi 48,88) dan masih belum optimalnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan (73,68)
Pengawasan	• Pemerintah Daerah belum sepenuhnya menerapkan manajemen risiko sebagai indikator kinerja pada dokumen perencanaan OPD baik ditingkat strategis maupun tingkat operasional secara tepat dan terukur, lemahnya pemantauan berkelanjutan dan kurangnya koordinasi dalam implementasi SPIP terintegrasi. • Belum adanya kebijakan manajemen risiko yang secara spesifik mengatur terkait risiko fraud, pembelajaran anti korupsi masih bersifat insidentil, serta belum adanya kebijakan terkait Audit Investigasi/PKKN secara spesifik sampai dengan upaya atau tindakan korektif pasca audit. • Pemda belum mengalokasikan sumber daya memadai penyelenggaraan manajemen risiko masih bersifat administratif dan didominasi oleh unit perencanaan sehingga keterlibatan bidang teknis selaku pemilik risiko belum	• Nilai QA SPIP adalah 2,921 • Nilai Q IEPK(Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi) adalah 2,910 • NIlai QA MRI (Manajemen Risiko Indeks)	Infrastruktur digital yang merata, literasi digital aparatur, serta sistem informasi antar-perangkat daerah yang masih belum optimal

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Aspek / Urusan	Akar Masalah	Data Dukung	Statement Permasalahan
	memadai di tahap identifikasi dan analisis risiko serta risiko kemitraan belum teridentifikasi dan terkelola dengan memadai		
Kewilayahan	• Makin berkurangnya tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar PBB. • Pelayanan penerimaan pajak yang kurang maksimal • Belum optimalnya sarsana dan prasarana untuk fasilitasi pengaduan masyarakat. • Belum optimalnya sarana dan prasarana pelayanan • Belum optimalnya sarana/kanal aduan pelayanan • Masih kecilnya prosentase Kelurahan Tangguh Bencana • Masih kecilnya prosentase Kelurahan Tangguh Bencana • Persentase usulan Musrenbang belum optimal	• Persentase realisasi wajib pajak yang membayar PBB P2 di Kecamatan Sidomukti adalah 59,28% • Persentase realisasi wajib pajak yang membayar PBB P2 di Kecamatan Tingkir adalah 68,57% • Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat adalah 89 - 92 • Persentase realisasi wajib pajak yang membayar PBB P2 di Kecamatan Tingkir adalah 64,76% • Persentase realisasi wajib pajak yang membayar PBB P2 di Kecamatan Tingkir adalah 60,76% • Kelurahan Tangguh Bencana 21,73 • Persentase realisasi usulan hasil musrenbang : 70 – 94 %	Peran dan dukungan kelembagaan di Tingkat Kelurahan dan Kecamatan belum optimal

Berdasarkan rumusan tersebut, permasalahan pembangunan yang akan diintervensi pada tahun 2027 adalah sebagai berikut :

1. Masih adanya angka kemiskinan sebesar 4,20%, sedangkan target SDGs pada tahun 2030 adalah nol persen
2. Tingginya tingkat ketimpangan pendapatan penduduk, termasuk 3 besar di Jawa Tengah
3. Tingkat Pengangguran Terbuka masih relative cukup besar, pada angka 3,67%
4. Meningkatnya jumlah penduduk lansia seiring dengan Usia Harapan Hidup yang terus naik, pada tahun 2025 pada angka 78,75 tahun
5. Angka Partisipasi Sekolah belum mencapai 100%
6. Belum optimalnya pencapaian Tingkat kesehatan keluarga dengan masih adanya kasus gizi buruk dan stunting pada anak, kasus kematian balita, dan kematian ibu
7. Masih rendahnya Daya Saing Olahraga
8. Masih rendahnya koleksi nasional dan kuno yang dilestarikan, tahun 2025 baru 25 %, dan prosentase pemajuan kebudayaan baru 76,81%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

9. Belum optimalnya pencapaian perlindungan perempuan dan anak, masih adanya anak korban kekerasan dan kekerasan terhadap perempuan
10. Kota Salatiga yang berada di persimpangan jalur utama Semarang–Solo, belum optimal dalam memanfaatkan peranannya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional dengan kondisi sumberdaya yang dimiliki saat ini, pertumbuhan ekonomi belum mencapai target pesimis tahun 2025 yaitu 6,10%
11. Belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya alam terutama dalam pengembangan teknologi pertanian dan pengelolaan potensi wisata dalam mendukung perkembangan ekonomi masyarakat Kota Salatiga
12. Pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya menciptakan pemerataan kesejahteraan dengan masih didominasi oleh sektor industri pengolahan dan konsumsi rumah tangga
13. Keterbatasan investasi dan belum optimalnya pemanfaatan potensi sektor unggulan daerah
14. Daya dukung lahan tidak mampu memenuhi kebutuhan standar hidup layak penduduk, dan penurunan kualitas air
15. Penurunan Indeks Inovasi Daerah (51,10 turun menjadi 48,88) dan masih belum optimalnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan (73,68)
16. Belum optimalnya upaya peningkatan dan pemerataan insfrastruktur daerah dalam menunjang pelayanan
17. Kualitas sumber daya aparatur, pemanfaatan teknologi dalam pelayanan, penerapan standar pelayanan yang jelas dan terukur, pengembangan birokrasi dan penguatan sistem pengawasan dalam pelayanan public masih belum optimal
18. Infrastruktur digital yang merata, literasi digital aparatur, serta sistem informasi antar-perangkat daerah yang masih belum optimal.
19. Peran dan dukungan kelembagaan di Tingkat Kelurahan dan Kecamatan belum optimal

2.7. Permasalahan Pembangunan dan Isu Strategis

Isu strategis dalam tahun 2027 merupakan isu yang diambil dari RPJMD Kota Salatiga tahun 2025-2029 yang secara tahapan akan diintervensi dengan kebijakan dan tema pembangunan tahun 2027. Secara umum isu strategis tersebut merupakan permasalahan atau tantangan penting yang berdampak besar pada keberhasilan atau kegagalan tujuan jangka menengah daerah yang akan ditangani pada tahun 2027. Isu strategis pembangunan daerah bersifat kompleks, meliputi berbagai faktor, dan memerlukan perhatian serta tindakan dari berbagai pemangku kepentingan pembangunan daerah dalam menetapkan kebijakan dan program upaya dalam penyelesaiannya. Selain itu permasalahan pembangunan yang dianalisis berdasarkan capaian kinerja pembangunan tahun 2025, juga menjadi dasar penentuan isu strategis yang akan diselesaikan pada tahun 2027 yang mempertajam arah kebijakan dan pengalokasian sumber daya dalam pelaksanaan tahun tersebut. Persandingan permasalahan dan isu strategis tahun 2027 adalah sebagaimana tabel berikut :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 2. 110. Persandingan Permasalahan dan Isu Strategis Tahun 2027

No	Permasalahan	Isu Strategis
1	Masih adanya angka kemiskinan sebesar 4,20%, sedangkan target SDGs pada tahun 2030 adalah nol persen	Kemiskinan dan kesenjangan
2	Tingginya tingkat ketimpangan pendapatan penduduk, termasuk 3 besar di Jawa Tengah	
3	Tingkat Pengangguran Terbuka masih relative cukup besar, pada angka 3,67%	
4	Meningkatnya jumlah penduduk lansia seiring dengan Usia Harapan Hidup yang terus naik, pada tahun 2025 pada angka 78, 75 tahun	
5	Angka Partisipasi Sekolah belum mencapai 100%	Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia
6	Belum optimalnya pencapaian Tingkat kesehatan keluarga dengan masih adanya kasus gizi buruk dan stunting pada anak, kasus kematian balita, dan kematian ibu	
7	Masih rendahnya Daya Saing Olahraga	
8	Masih rendahnya koleksi nasional dan kuno yang dilestarikan, tahun 2025 baru 25 %, dan prosentase pemajuan kebudayaan baru 76,81%	Pengelolaan dan pelestarian budaya daerah
9	Belum optimalnya pencapaian perlindungan perempuan dan anak, masih adanya anak korban kekerasan dan kekerasan terhadap perempuan	Kesenjangan gender, perlindungan anak dan perempuan
10	Kota Salatiga yang berada di persimpangan jalur utama Semarang–Solo, belum optimal dalam memanfaatkan peranannya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional dengan kondisi sumberdaya yang dimiliki saat ini, pertumbuhan ekonomi belum mencapai target pesimis tahun 2025 yaitu 6,10%	Pertumbuhan ekonomi yang merata didukung investasi dan produk unggulan yang berdaya saing
11	Belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya alam terutama dalam pengembangan teknologi pertanian dan pengelolaan potensi wisata dalam mendukung perkembangan ekonomi masyarakat Kota Salatiga	
12	Pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya menciptakan pemerataan kesejahteraan dengan masih didominasi oleh sektor industri pengolahan dan konsumsi rumah tangga	
13	Keterbatasan investasi dan belum optimalnya pemanfaatan potensi sektor unggulan daerah	
14	Daya dukung lahan tidak mampu memenuhi kebutuhan standar hidup layak penduduk, dan penurunan kualitas air	Pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan
15	Penurunan Indeks Inovasi Daerah (51,10 turun menjadi 48,88) dan masih belum optimalnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan (73,68)	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Permasalahan	Isu Strategis
16	Belum optimalnya upaya peningkatan dan pemerataan insfrastruktur daerah dalam menunjang pelayanan	Pemenuhan kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur
17	Kualitas sumber daya aparatur, pemanfaatan teknologi dalam pelayanan, penerapan standar pelayanan yang jelas dan terukur, pengembangan birokrasi dan penguatan sistem pengawasan dalam pelayanan public masih belum optimal	Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis dan Kolaboratif
18	Infrastruktur digital yang merata, literasi digital aparatur, serta sistem informasi antar-perangkat daerah yang masih belum optimal.	
19	Peran dan dukungan kelembagaan di Tingkat Kelurahan dan Kecamatan belum optimal	

2.8. Inovasi Daerah

Permasalahan Pembangunan tahun 2025 yang menjadi dasar penentuan isu strategis adalah hasil analisis pada berbagai permasalahan pembangunan pada setiap urusan pemerintah daerah serta berdasarkan prioritas pembangunan tahun 2025, dirumuskan sebagai berikut :

Inovasi daerah merupakan upaya sistematis yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menciptakan, mengembangkan, dan menerapkan ide-ide baru guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, efisiensi pemerintahan, serta daya saing ekonomi dan sosial. Inovasi ini mencakup berbagai bidang, seperti teknologi, kebijakan publik, tata kelola pemerintahan, serta pembangunan ekonomi dan sosial. Dengan menerapkan inovasi, pemerintah daerah dapat menyederhanakan proses birokrasi, meningkatkan transparansi, dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Inovasi daerah juga dapat menciptakan peluang usaha baru, menarik investasi, serta meningkatkan daya saing sektor industri dan ekonomi kreatif. Inovasi dalam bidang pelayanan publik dan sosial dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang lebih baik. Penerapan teknologi dalam pemerintahan dan layanan publik dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses informasi dan berinteraksi dengan pemerintah. Dengan inovasi, pemerintah daerah dapat lebih mudah menjalin kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil.

Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Inovasi Daerah oleh Kementerian Dalam Negeri, nilai Indeks Inovasi Daerah Kota Salatiga dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 sebagaimana tabel berikut :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 2. 111. Hasil Pengukuran Indeks Inovasi Daerah Kota Salatiga Tahun 2021-2025

Tahun	Nilai Indeks Inovasi Daerah	Kategori
2021	46,26	Inovatif
2022	47,11	Inovatif
2023	44,55	Inovatif
2024	51,10	Inovatif
2025	48,88	Inovatif

Pada tahun 2025 indeks inovasi target 46.34 dengan realisasi 48,88 dan capaian kinerja 105,43 serta target RPD tahun 2026 sebesar 46.34 dengan status tercapai, dengan ditetapkannya Perwali no 10 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan inovasi daerah menjadi salah satu landasan hukum dalam upaya meningkatkan indeks inovasi melalui tahapan – tahapan yang telah ditentukan sesuai peraturan

Indeks Inovasi Daerah merupakan indikator penting dalam menilai kapasitas dan efektivitas pemerintah daerah dalam mendorong inovasi dalam berbagai sektor. Kota Salatiga menunjukkan tren yang fluktuatif dalam indeks ini. Kondisi ini mencerminkan adanya tantangan dan hambatan dalam penguatan ekosistem inovasi, baik dari aspek kebijakan, sumber daya manusia, maupun pemanfaatan teknologi. Pada tahun 2025, nilai indeks inovasi Kota Salatiga mengalami penurunan yang yaitu yang sebellumnya di tahun 2024 sebesar 51,10 menjadi 48,88 di tahun 2025, masuk dalam kategori kota inovatif. Hasil penginputan data inovasi daerah Kota Salatiga Tahun 2025 di aplikasi IID Kemendagri, dari 48 inovasi yang diusulkan oleh unit kerja, terpilih 22 inovasi yang dikirim untuk mengikuti Lomba Inovation Goverment Award tahun 2025, dengan perincian kematangan antara lain: kematangan lebih besar atau sama dengan 100 sejumlah 22 inovasi. Meskipun mengalami penurunan, Kota Salatiga masih memiliki peluang untuk bisa lebih mengoptimalkan inovasi di berbagai bidang guna mencapai peringkat yang lebih tinggi dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Beberapa tantangan yang masih dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya, kesiapan teknologi, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Strategi yang akan dilakukan untuk lebih mengoptimalkan nilai indeks inovasi daerah Kota Salatiga antara lain:

1) Berkolaborasi secara Penthahelix terutama Perguruan Tinggi yaitu melibatkan mahasiswa magang untuk pendampingan inovasi daerah Kota Salatiga.
2) Mengeksplore jumlah inovator yang ada di pemerintah Kota Salatig terutama di sekolah SD dan SMP melalui Dinas Pendidikan Kota Salatiga.
3) Menjadi bagian dari nilai capaian kinerja OPD dalam aspek inovasi.
4) Melakukan desk setiap periode sesuai dengan target inovasi.
5) Memberikan reward and punichment bagi para inovator yang berkontribusi bagi kemajuan Kota Salatiga terutama untuk perangkat daerah dan BUMD di Kota Salatiga.

Kota Salatiga telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendorong inovasi daerah sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

berkelanjutan. Beberapa inisiatif program dan kegiatan yang mendukung penciptaan ekosistem inovasi dan budaya inovasi di kalangan masyarakat, Aparatur Sipil Negara, Organisasi Perangkat Daerah dan BUMD Kota Salatiga antara lain:

1) Penyelenggaraan Lomba Kreativitas dan Inovasi (Krenova) Masyarakat Kota Salatiga. Pemenang lomba Krenova mendapatkan fasilitas berupa uang pembinaan, piagam, piala dan fasilitasi pengiriman lomba serupa di tingkat Provinsi Jawa Tengah;
2) Mendampingi inovator Kota Salatiga untuk ikut serta dalam Lomba Kreativitas dan Inovasi (Krenova) Tingkat Provinsi Jawa Tengah.
3) Penyelenggaraan Lomba Krenova Kategori Perangkat Daerah. Lomba ini diikuti oleh semua Organisasi Perangkat daerah dan BUMD di Kota Salatiga.

Dengan penguatan ekosistem inovasi yang lebih inklusif, berkelanjutan dan berdaya saing tinggi melalui kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam inovasi dan teknologi; optimalisasi digitalisasi layanan publik; serta penerapan kebijakan yang mendukung inovasi di tingkat lokal, Kota Salatiga berpotensi untuk menjadi salah satu kota inovatif terdepan di Indonesia

Pada tahun 2025, inovasi-inovasi yang telah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 112. Inovasi Perangkat Daerah di Kota Salatiga Tahun 2025

NO	JUDUL INOVASI	URAIAN	PERANGKAT DAERAH
1	Brita Daring Viral (Briket Alternatif Daun Kering Inovasi Ramah Lingkungan)	Inovasi Briket Daun Kering hadir sebagai jawaban atas tantangan tersebut. Projek ini bertujuan mengubah limbah daun kering menjadi sumber energi alternatif yang efisien (memiliki nilai kalor tinggi) dan ramah lingkungan, sekaligus menjadi sarana pembelajaran terapan bagi siswa di bidang Sains, Kewirausahaan, dan Ekonomi Sirkular. Kami berharap, briket ini tidak hanya mengatasi masalah sampah daun kering, tetapi juga menjadi demonstrasi nyata bahwa limbah dapat diubah menjadi komoditas berharga	Dinas Pendidikan
2	“Pemanfaatan Limbah Menjadi Pupuk Cair” (PELIPUR)	Karya inovatif dengan judul “Pemanfaatan Limbah Menjadi Pupuk Cair” (PELIPUR) di SDN Salatiga 06. Karya inovatif ini disusun sebagai bentuk inovasi sekolah dalam mendukung gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah. Kegiatan ini berangkat dari kepedulian terhadap meningkatnya volume sampah dan limbah di lingkungan sekolah serta perlunya upaya nyata dalam pengelolaan limbah. Limbah seperti sayuran, air cucian beras, daunan, limbah MBG, dan lain sebagainya agar memiliki nilai guna yang bermanfaat. Maka melalui inovasi PELIPUR, limbah yang semula dianggap tidak bernilai diolah menjadi pupuk cair alami yang dapat digunakan untuk menyuburkan tanaman di lingkungan sekolah. Tujuan inovasi ini adalah	Dinas Pendidikan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JUDUL INOVASI	URAIAN	PERANGKAT DAERAH
		mengurangi volume limbah organik, menyediakan pupuk ekonomis, meningkatkan kesadaran lingkungan, mewujudkan SDN Salatiga 06 sebagai sekolah berwawasan lingkungan, menyediakan pupuk organik, konstektual. Metode yang dipergunakan adalah demonstrasi dan deskriptif kualitatif. Hasil inovasi menghasilkan pupuk organik cair yang bernilai tinggi dan mudah pengaplikasian."	
3	Pupuk Cair Organik (PCO)	"Produk utama inovasi ini adalah Pupuk Cair Organik (PCO) Eco Enzyme yang diproduksi melalui proses fermentasi limbah organik sekolah. Adapun bahan baku yang digunakan adalah limbah potongan sayuran dan kulit buah segar dengan gula merah sebagai molase sumber karbonnya. Sementara itu,penyimpanan pupuk cair ini dalam wadah tertutup rapat minimal 3 bulan dalam ruang yang gelap dan sejuk akan membantu proses fermentasi anaerob yang dapat menghasilkan pupuk cair organik Eco Enzym yang berkualitas. Tujuan dari inovasi sekolah yang kami kembangkan ini adalah menciptakan sistem pengolahan limbah organik (kulit buah dan sayur) di lingkungan sekolah yang efektif, mandiri, dan berkelanjutan , menghasilkan Pupuk Cair Organik (PCO) Eco Enzyme sebagai produk ramah lingkungan untuk mendukung program penghijauan dan pertanian mini di sekolah, meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif seluruh warga sekolah (guru dan tenaga kependidikan , murid dan orang tua) dalam praktik daur ulang dan konservasi lingkungan. Adapun manfaat dari inovasi pengelolaan kulit buah sayur ini adalah mengurangi volume sampah organik di sekolah ,memberikan pengetahuan dan keterampilan praktis dalam pembuatan eco enzyme, serta menumbuhkan budaya bertanggung jawab terhadap lingkungan yang harapan kami dapat menjadi model sekolah berwawasan lingkungan yang mengintegrasikan pengelolaan sampah dalam kurikulum di SD Negeri Tegalrejo 05 Salatiga. "	Dinas Pendidikan
4	Xaverius Green Cycle 78	"Xaverius Green Cycle 78 merupakan inovasi pengelolaan sampah organik berbasis budaya sekolah yang bertujuan menanamkan sikap cinta lingkungan sejak dini melalui pembiasaan dan praktik nyata. Program ini berangkat dari pengelolaan spesifik sampah daun yang dihasilkan setiap hari di lingkungan sekolah dan dikembangkan sebagai sarana pendidikan karakter bagi peserta didik. Melalui keterlibatan langsung siswa dalam kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengomposan, hingga pemanfaatan hasil kompos, sekolah membangun kesadaran ekologis, tanggung jawab, disiplin, serta kepedulian terhadap lingkungan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari warga sekolah. Inovasi ini mengintegrasikan penggunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk meningkatkan efisiensi pengolahan	Dinas Pendidikan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JUDUL INOVASI	URAIAN	PERANGKAT DAERAH
		sampah sekaligus memperkuat pembelajaran kontekstual tentang keberlanjutan dan ekonomi sirkular. Secara nilai, Xaverius Green Cycle 78 mengimplementasikan semangat ensiklik Paus Fransiskus Laudato Si': Merawat Bumi, Rumah Kita Bersama, yang menegaskan bahwa merawat lingkungan adalah panggilan moral dan spiritual. Dengan berlandaskan nilai inti KADER (Karakter, Disiplin, dan Religius), inovasi ini membentuk budaya sekolah minim sampah yang berkelanjutan serta menumbuhkan generasi yang beriman, berkarakter, dan bertanggung jawab terhadap bumi sebagai rumah bersama."	
5	SAPU UNGU	"menjaga KEBERSIHAN & KERAPIHAN sejalan dengan merawat KECERDASAN SOSIAL EMOSIONAL. Bukan pada kurangnya tempat sampah, atau aturan yang ketat. Akar masalahnya berada jauh di dalam: pada rendahnya kesadaran diri dan rasa tanggung jawab sosial. Sebelum kami menyapu sampah, kami harus terlebih dahulu ""menyapu"" kebiasaan lama untuk tidak peduli. Fase ""Wake-Up Call"" dirancang bukan untuk menyalahkan, tetapi untuk membangunkan kesadaran kolektif dengan pendekatan Pembelajaran SosialEmosional (PSE) yang mendalam. Kami percaya, perubahan perilaku yang langgeng harus dimulai dari perubahan perspektif dan hati. Kami memulai dengan sebuah kegiatan sederhana namun powerful: ""Tur Pemotretan Diam"". Setiap kelas diajak berkeliling sekolah selama 15 menit dalam keheningan. Tugas mereka hanya satu: mengamati dan mencatat (dalam hati atau di buku) setiap titik 10 sampah yang mereka lihat, seolah-olah mereka adalah seorang fotografer yang sedang mendokumentasikan sebuah krisis. Setelah tur selesai, kami kembali ke kelas dan melakukan kegiatan inti: Mengisi ""Empathy Map"" Bersama. Untuk memperdalam empati, kami mengajak siswa melakukan perspectivetaking yang lebih menantang: ""Bayangkan kamu adalah..."". Program SAPU UNGU telah membuktikan bahwa ketika kita mempercayai anakanak dengan tanggung jawab dan membimbingnya dengan pendekatan sosial-emosional, hasilnya sungguh menakjubkan. Kami tidak hanya menciptakan lingkungan sekolah yang lebih bersih dan sehat, tetapi juga ""lingkungan hati"" yang lebih empatik, proaktif, dan penuh tanggung jawab. SAPU UNGU adalah bukti bahwa benih-benih kebaikan itu ada dalam diri setiap anak. Tugas kitalah untuk menyiraminya dengan kepercayaan dan memupuknya dengan keteladanan. Sekolah kami kini bukan hanya tempat untuk belajar membaca dan berhitung, tetapi juga tempat di mana kami belajar menjadi manusia yang peduli—pada	Dinas Pendidikan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JUDUL INOVASI	URAIAN	PERANGKAT DAERAH
		lingkungan, pada sesama, dan pada masa depan bersama."	
6	"Sampah Jadi Suara, Poster Jadi Aksi ""Inovasi Poster 3D dari Sampah Sekolah dengan Pesan Digital Peduli Lingkungan"""	Karya ini mengembangkan poster 3D dari bahan sampah sekolah yang dipadukan dengan pesan digital berupa kode QR. Kode tersebut menampilkan video pendek tentang proses pembuatan karya dan pesan agar menjaga lingkungan. Inovasi ini menghadirkan perpaduan antara seni, teknologi, pemanfaatan sampah dan edukasi lingkungan dalam satu karya nyata. Produk ini diharapkan dapat menjadi media yang menarik, meningkatkan kesadaran lingkungan, serta menjadi inspirasi bagi sekolah lain dalam mengolah sampah secara kreatif.	Dinas Pendidikan
7	KOTAK KARE SAJI (Kotak Karya Reuse, Sampah Aman Jadi Insentif)	Inovasi KOTAK KARE SAJI (Kotak Karya Reuse, Sampah Aman Jadi Insentif) dikembangkan untuk mengatasi rendahnya kesadaran memilah dan menumpuknya sampah plastik di lingkungan sekolah, khususnya pada siswa kelas 4. Inovasi ini bertujuan meningkatkan kesadaran, mengintegrasikan literasi dengan isu lingkungan, dan menguatkan karakter peduli lingkungan melalui tanggung jawab individu. Inovasi ini bersifat Novelty (Kebaruan) karena menggabungkan tiga elemen kunci: Kotak KaRe (kotak sampah sementara individu), Jurnal Literasi Sampah Plastik (alat pencatatan harian untuk menumbuhkan kesadaran), dan SAJI (Sampah Aman Jadi Insentif) melalui mekanisme ATM Sampah Plastik Mini yang memberikan reward instan. Strategi implementasi menggunakan "Kemitraan 3M: Media, Model, dan Motivasi", di mana guru menjadi model, Media berupa Kotak KaRe dan Jurnal dibuat menarik, dan Motivasi diberikan melalui sistem penukaran insentif.	Dinas Pendidikan
8	Stiker - C "Paper Mural" (Setiap Kertas Bercerita"	"Pembuatan karya inovatif Stiker -C “Paper Mural” di SD Muhammadiyah Plus 1 Salatiga merupakan langkah kreatif sekaligus strategis dalam mendukung program Green School dan pengelolaan sampah berkelanjutan. Dengan memanfaatkan kertas bekas dokumen sekolah yang sudah kedaluwarsa dan tidak boleh dijual, kegiatan ini mampu menghadirkan solusi ramah lingkungan yang menerapkan prinsip ekologi (pengurangan sampah), ekonomi (pemanfaatan bahan tanpa biaya besar), edukasi (pembelajaran langsung Dinas Pendidikan tentang daur ulang), dan estetika (menghasilkan karya seni yang memperindah sekolah). Meskipun menghadapi berbagai tantangan seperti ketahanan bahan, keterbatasan anggaran, serta konsistensi kualitas visual, kegiatan ini tetap memberikan nilai tambah bagi siswa, guru, dan lingkungan sekolah. Stiker - C “Paper mural” tidak hanya menjadi karya seni, tetapi juga media pembelajaran karakter, kreativitas, dan kepedulian lingkungan."	Dinas Pendidikan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JUDUL INOVASI	URAIAN	PERANGKAT DAERAH
9	ECOLEAF: Inovasi Kokurikuler Pembelajaran Mendalam Dalam Mengolah Sampah Daun Menjadi Pupuk Organik Untuk Mewujudkan Lingkungan Sehat	ECOLEAF merupakan inovasi kokurikuler pembelajaran mendalam yang dirancang untuk mengatasi permasalahan sampah daun di lingkungan sekolah melalui kegiatan pengolahan menjadi pupuk organik. Inovasi ini melibatkan siswa kelas 3 SD Muhammadiyah Plus Salatiga dalam pembelajaran berbasis proyek (Project Based Learning) yang menumbuhkan penalaran kritis, kolaborasi, dan kesadaran kesehatan lingkungan. Melalui proses pengamatan, pengolahan, dan pemanfaatan pupuk organik, EcoLeaf tidak hanya menghasilkan produk yang bermanfaat, tetapi juga membentuk karakter peduli lingkungan serta kebiasaan hidup bersih dan sehat sejak dini.	Dinas Pendidikan
10	ECO CPOINT SCHOOL: Pogram Penilaian Berbasis Poin untuk Meningkatkan Kepedulian Siswa Kelas III Terhadap Pengelolaan Sampah di SD Integral Hidayatullah Salatiga	Produk inovasi ECO POINT SCHOOL merupakan sistem penghargaan berbasis poin (Point Reward System) untuk mengembangkan pembiasaan karakter peduli lingkungan di sekolah dasar. Program ini didesain agar siswa belajar melalui pengalaman langsung dalam menjaga kebersihan, menanam tanaman, dan mengurangi penggunaan plastik. Konsep pembelajaran berbasis aksi nyata ini sesuai dengan pendekatan Dinas Pendidikan Experiental Learning yang menekankan pada keterlibatan aktif peserta didik.	Dinas Pendidikan
11	Eco-Smart Permaculture	Eco-Smart Permaculture adalah sebuah sistem pertanian berkelanjutan yang mengintegrasikan pengelolaan limbah, budidaya mandiri, dan teknologi digital. Proyek ini menciptakan ekosistem "Zero Waste" di mana sampah tidak lagi dibuang, melainkan diputar kembali menjadi sumber daya baru yang bernilai ekonomi tinggi. Komponen Utama Inovasi: Biokonversi BSF (Black Soldier Fly): Sampah organik dari sisa makanan (MBG) diolah menggunakan larva lalat tentara hitam (maggot). Maggot ini bertugas mengurai sampah dengan cepat dan mengubahnya menjadi pakan protein tinggi. Sistem Akuaponik Pintar: Pakan dari maggot tersebut digunakan untuk budidaya ikan lele. Air kolam lele yang kaya nutrisi kemudian dialirkan ke instalasi sayuran segar. Tanaman bertindak sebagai filter alami yang membersihkan air sebelum kembali ke kolam ikan. Integrasi STEM & IoT (Internet of Things): Sistem ini tidak dijalankan secara manual, melainkan dipantau oleh sensor pintar. Teknologi IoT memungkinkan pemantauan suhu, kualitas air, dan pemberian pakan secara otomatis, sementara pendekatan STEM memastikan seluruh proses memiliki dasar ilmiah dan teknis yang presisi. Nilai Tambah: Ekonomis: Menekan biaya pakan ikan dan pupuk tanaman secara signifikan. Dinas Pendidikan Lingkungan: Menyelesaikan masalah sampah organik di hulu agar tidak menumpuk di TPA. Edukasi: Menjadi sarana belajar nyata bagi siswa mengenai teknologi	Dinas Pendidikan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JUDUL INOVASI	URAIAN	PERANGKAT DAERAH
		pertanian modern dan ekologi.	
12	KRISDUSA SMART: Smart Monitoring And Recycling Technology	Merupakan aplikasi berbasis mobile & web yang bertujuan mengedukasi, memanajemen pengelolaan sampah dan pengolahan sampah habis di tempat, serta penjualan sampah organik dan anorganik di lingkungan SMP Kr. 2 Salatiga. Aplikasi one stop solution dalam pengelolaan dan pengolahan sampah sekolah yang terintegrasi dengan Learning Management System (LMS) milik SMP Kr. 2 Salatiga bernama K-Learn. Alat	Dinas Pendidikan
13	Wise Waste Bot	Merupakan alat pengelolaan sampah Organik sisa MBG dimana manfaat Hasil olahannya berupa pelet kering dapat sebagai olahan untuk pakan ikan dan ayam. Alat ini merupakan smartbot yang dikendalikan dengan sistem android. Alat ini dibuat dengan menggunakan barang-barang bekas	Dinas Pendidikan
14	SILISA (Sistem Informasi Limbah dan Sampah): Model Rapid Deployment Ekosistem Pengelolaan Sampah Sekolah Berbasis "Zero-Cost Technology" dan Gamifikasi Data	Di tengah dinamika pendidikan abad 21, tantangan terbesar dalam mengadopsi inovasi lingkungan di sekolah bukanlah ketiadaan teknologi canggih, melainkan kerumitan implementasi, hambatan biaya, dan resistensi pengguna. Banyak sekolah menunda program digitalisasi pengelolaan sampah karena terjebak dalam paradigma bahwa inovasi membutuhkan waktu persiapan berbulan-bulan dan anggaran besar untuk pengadaan aplikasi khusus. Merespons urgensi permasalahan sampah plastik dan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) yang terus meningkat, SMP Negeri 9 Salatiga menghadirkan terobosan baru bernama SILISA (Sistem Informasi Limbah dan Sampah). SILISA adalah sebuah ekosistem digital terintegrasi yang dirancang dengan filosofi Rapid Deployment (Penerapan Cepat) dan Zero Cost (Biaya Nol). Inovasi ini merekayasa fitur-fitur yang tersedia dalam akun pembelajaran nasional (belajar.id)—yakni Google Sites, Forms, Sheets, dan Looker Studio—menjadi satu kesatuan sistem cerdas yang mampu memantau volume sampah secara real-time. Keunikan utama SILISA terletak pada arsitekturnya yang berbasis web (no-install), sehingga menghilangkan hambatan memori perangkat murid dan memungkinkan partisipasi massal secara instan. Laporan ini menyoroti keberhasilan fase perintisan (pilot project) SILISA dalam menciptakan efisiensi anggaran sekolah hingga 100% dibandingkan solusi berbasis pengadaan alat fisik. Melalui strategi gamifikasi EcoLeaderboard dan edukasi digital interaktif, SILISA berhasil mengubah perilaku murid dalam memilah sampah dan mengumpulkan limbah B3 hanya dalam waktu singkat. Temuan ini membuktikan bahwa transformasi manajemen sampah sekolah dapat dilakukan secara cepat, murah, dan massal tanpa	Dinas Pendidikan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JUDUL INOVASI	URAIAN	PERANGKAT DAERAH
		menunggu birokrasi anggaran yang rumit. SILISA menawarkan cetak biru (blueprint) bagi sekolah manapun di Indonesia untuk menduplikasi sistem pengelolaan sampah digital yang adaptif dan berkelanjutan. Kesimpulannya, integrasi teknologi dalam edukasi lingkungan terbukti efektif mengatasi keterbatasan lahan dan biaya serta relevan dengan karakteristik murid sebagai digital native. Direkomendasikan agar inovasi ini direplikasi oleh sekolah dengan keterbatasan lahan serupa dan dikembangkan lebih lanjut menjadi aplikasi mobile yang terintegrasi dengan rapor karakter murid dalam 8 Dimensi Profil Lulusan.	
15	Aero Clean 3in1	Produk barang bekas dari botol air mineral bekas menjadi vacum cleaner, pengharum ruangan dan lampu tidur	Dinas Pendidikan
16	BOSS KUPAT (Bimbingan OSS Kegiatan Usaha On The Spot)	Inovasi ini merupakan bentuk layanan jemput bola berupa pendampingan langsung kepada pelaku usaha dalam proses pendaftaran dan pengurusan perizinan berusaha serta pelaporan kegiatan penanaman modal melalui sistem Online Single Submission (OSS), khususnya bagi pelaku usaha mikro yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan digital. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas, kecepatan, dan kemudahan layanan perizinan berusaha berbasis risiko.	DPMPTSP
17	**Jempol Pintar (Jemput Bola Perizinan Industri Rumah Tangga Pangan)** 	Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) merupakan salah satu sektor strategis yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan pendapatan masyarakat, serta pemenuhan kebutuhan pangan yang aman dan bermutu. Namun dalam pelaksanaannya, masih banyak pelaku IRTP yang belum memiliki legalitas usaha dan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Masih rendahnya kepemilikan izin dan SPP-IRT pada pelaku Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) menjadi tantangan dalam upaya menjamin keamanan pangan dan meningkatkan daya saing produk lokal. Kendala pemahaman prosedur, keterbatasan akses layanan, serta persepsi rumitnya perizinan menyebabkan banyak pelaku usaha belum mengurus legalitas usahanya. Menjawab permasalahan tersebut, lahirlah inovasi **Jempol Pintar (Jemput Bola Perizinan Industri Rumah Tangga Pangan)** sebagai upaya mendekatkan layanan perizinan kepada masyarakat. Melalui pendekatan jemput bola, petugas memberikan pendampingan langsung kepada pelaku IRTP mulai dari sosialisasi, pembinaan, hingga fasilitasi perizinan. Inovasi Jempol Pintar bertujuan untuk mempermudah proses perizinan, meningkatkan	DINAS KESEHATAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JUDUL INOVASI	URAIAN	PERANGKAT DAERAH
		kesadaran keamanan pangan, serta mendorong peningkatan jumlah IRTP yang berizin guna mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat dan perlindungan konsumen. Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) merupakan salah satu penggerak ekonomi masyarakat yang berperan penting dalam penyediaan pangan serta peningkatan kesejahteraan keluarga. Namun demikian, masih banyak pelaku IRTP yang belum memiliki legalitas usaha dan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Kondisi ini disebabkan oleh berbagai kendala, antara lain rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap regulasi perizinan, prosedur yang dianggap rumit, keterbatasan waktu dan akses pelayanan, serta rendahnya literasi administrasi dan digital. Pelayanan perizinan yang selama ini bersifat pasif, dengan menunggu masyarakat datang ke kantor, belum mampu menjangkau seluruh pelaku IRTP secara optimal. Akibatnya, tingkat kepatuhan perizinan masih rendah, pengawasan keamanan pangan belum maksimal, serta daya saing produk IRTP menjadi terbatas karena tidak memenuhi persyaratan legalitas untuk mengakses pasar yang lebih luas. Menjawab permasalahan tersebut, dikembangkan inovasi **Jempol Pintar (Jemput Bola Perizinan Industri Rumah Tangga Pangan)** sebagai bentuk terobosan pelayanan publik yang proaktif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Inovasi ini mengusung pendekatan jemput bola, di mana petugas secara langsung mendatangi pelaku IRTP untuk memberikan edukasi, pendampingan, pemeriksaan sarana produksi, serta fasilitasi pengurusan perizinan secara terpadu dan berbasis teknologi. Kebaruan dari inovasi Jempol Pintar terletak pada integrasi antara pelayanan perizinan, pembinaan keamanan pangan, dan pendampingan administrasi yang dilakukan secara langsung di lokasi usaha. Pendekatan ini tidak hanya mempercepat proses perizinan, tetapi juga meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya keamanan pangan dan legalitas usaha. Melalui inovasi Jempol Pintar, diharapkan terjadi peningkatan jumlah IRTP yang berizin, terjaminnya keamanan pangan bagi masyarakat, serta meningkatnya daya saing produk pangan lokal. Inovasi ini sekaligus menjadi wujud komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan publik yang inovatif, mudah diakses, inklusif, dan berdampak langsung bagi masyarakat.	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JUDUL INOVASI	URAIAN	PERANGKAT DAERAH
18	**SI AKI CEKATAN** (**S**trateg**I** **A**dvokasi dan **K**omunikas**I** **CE**k **K**esehatan gr**AT**is puskesm**A**s cebonga**N**)	Berdasarkan hasil evaluasi cakupan Cek Kesehatan Gratis di 6 Wilayah Puskesmas di Kota Salatiga pada bulan Februari tahun 2025 dimana Puskesmas Cebongan menempati urutan terendah yaitu cakupan masih nol. Sementara lima puskesmas yang lain dengan cakupan sebagai berikut : 1) Puskesmas kalicacing 1 orang, 2) Puskesmas Tegalrejo 9 orang, 3) Puskesmas Mangunsari 7 orang, 4) Puskesmas Sidorejo Lor 7 orang, dan 5) Puskesmas Sidorejo Kidul sebanyak 15 orang. Berdasarkan masalah di atas Puskesmas Cebongan tertarik untuk mencari terobosan dalam rangka meningkatkan Cakupan Cek Kesehatan Gratis. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengioptimalkan upaya Advokasi dan komunikasi kepada stake holder antara lain dengan Perusahaan-perusahaan yang ada di Wilayah Puskesmas Cebongan, Advokasi dan komunikasi dengan hotel, supermarket, institusi-institusi yang ada di wilayah Puskesmas Cebongan. Bentuk startegi advokasi dan komunikasi yang dilakukan adalah dengan cara pendekatan langsung di lapangan maupun pendekatan tidak langsung lewat sarana komunikasi. Hasil yang diperoleh yaitu pada Bulan Juni sampai dengan Bulan Agustus Tahun 2025, Puskesmas menempati urutan tertinggi terkait cakupan CKG diantara 6 Puskesmas yang ada di Wilayah Kota Salatiga.	PUSKESMAS CEBONGAN PADA DINAS KESEHATAN
19	**RONGGA** (Rontgen Dalam Genggaman Anda)	PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL (WHATSAPP) DALAM PENGIRIMAN HASIL RONTGEN DI UPTD KLINIK PARU MASYARAKAT Prosedur konvensional dalam pengambilan hasil rontgen yang mengharuskan pasien kembali ke klinik atau menunggu lama sering menjadi hambatan bagi efisiensi dan kenyamanan layanan, padahal di era digitalisasi saat ini pelayanan kesehatan dituntut untuk terus berinovasi menghadirkan layanan yang lebih cepat, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan pasien. Oleh karena itu, diperlukan metode baru yang dapat mempercepat pengiriman hasil, mudah dijangkau pasien, namun tetap menjaga keamanan dan kerahasiaan data medis. Salah satunya melalui pengiriman hasil rontgen dalam format digital langsung ke WhatsApp pasien, sehingga UPTD Klinik Paru Masyarakat dapat memangkas waktu tunggu dan memberikan pelayanan yang lebih responsif. Selain itu juga dapat memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi tanpa harus berkunjung ke UPTD Klinik Paru Masyarakat, menghemat BMHP, mengurangi kontak dengan pasien serta mengurangi limbah.	KLINIK PARU MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JUDUL INOVASI	URAIAN	PERANGKAT DAERAH
20	PANDU SIRANTING Pelayanan terpadu balita resiko stunting	Kegiatan pokok = 1. Deteksi dini oleh kader dengan pengukuran antropometri serta rujukan 2. Pelayanan terpadu dipuskesmas yang terdiri dari lintas program terkait yaitu pemeriksaan gigi, pemeriksaan dokter dan nakes, lab (indikasi) , konseling(gizi, sanitasi, promkes) dan tata laksana 3. Pemantauan secara berkelanjutan oleh tim puskesmas setiap 2 minggu sekali dan 1 bulan sekali oleh kader dan koordinasi lintas sektoral untuk kebutuhan bahan pangan	PUSKESMAS CEBONGAN PADA DINAS KESEHATAN
21	MAS TEJO DI HATI (Puskesmas Tegalrejo Deteksi Diabetes Melitus dan Hipertensi)	MAS TEJO DI HARI merupakan Pendekatan Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) yang dikemas dalam sebuah kegiatan yang terjadual, jemput bola dan keterpaduan lintas sector. Tujuan inovasi MAS TEJO DI HATI adalah untuk deteksi dii penyakit hipertensi dan DM di masyarakat sehingga selanjutnya dapat dilakukan penanganan secara dini dalam hal pengobatan dalam rangka menurunkan angka kesakitan dan kematian. Kegiatannya: - Skrining factor resiko penyakit tidak menular - Pemeriksaan IMT, TD, dan GDS - Rujukan masyarakat dengan tekanan darah tinggi dan gula darah tinggi ke fasilitas kesehatan - Pengelolaan penderita hipertensi dan diabetes mellitus (pengobatan, pemantauan factor resiko secara berkala, rujukan FKTRL, konsultasi Gizi - Kunungan rumah bagi masyarakat yang tidak bisa akses fasilitas kesehatan - Pertemuan pembinaan kader	PUSKESMAS TEGALREJO PADA DINAS KESEHATAN
22	Cendana Emas (Cegah Penularan DBD dengan Partisipasi Masyarakat	Inovasi Cendana Emas (Cegah Penularan DBD dengan Partisipasi Masyarakat) adalah program yang dikembangkan oleh Puskesmas Sidorejo Lor untuk mengatasi tingginya kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) dan rendahnya Angka Bebas Jentik (ABJ) masyarakat yang pada tahun 2023 masih di bawah target 95%. Inovasi yang dimulai pada Februari 2023 ini berfokus pada pendekatan partisipatif berbasis masyarakat yang melibatkan kegiatan Grebeg Jentik (pemeriksaan jentik dari rumah ke rumah), edukasi, dan penyampaian hasil ABJ kepada perangkat wilayah (RW, RT, PKK). Tujuannya adalah untuk mendeteksi dini dan memutus mata rantai perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti, sekaligus meningkatkan kesadaran, memperkuat peran juru pemantau jentik, dan menumbuhkan budaya hidup bersih dan sehat di tengah masyarakat.	PUSKESMAS SIDOREJO LOR PADA DINAS KESEHATAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JUDUL INOVASI	URAIAN	PERANGKAT DAERAH
23	**GENDIS LEGI** (Gula Darah Di Cek Selalu Lengkap Terintegrasi)	Diabetes melitus (DM) saat ini menjadi salah satu ancaman kesehatan global dengan kecenderungan peningkatan angka insidensi dan prevalensi DM di berbagai penjuru dunia. Komplikasi yang terjadi berupa gangguan pada pembuluh darah baik makrovaskular maupun mikrovaskular, serta gangguan pada sistem saraf, akan memberikan dampak signifikan terhadap kualitas sumber daya manusia dan peningkatan biaya kesehatan. Pengelolaan penyakit DM memerlukan peran serta dokter, perawat, ahli gizi, dan tenaga kesehatan lainnya. Pasien DM dengan kadar glukosa darah yang tidak terkontrol perlu tata laksana secara komprehensif sebagai upaya pencegahan komplikasi. "GENDIS LEGI", Gula Darah Di Cek Selalu Lengkap Terintegrasi merupakan pelayanan terintegrasi yang diberikan pada pasien dengan hasil pengukuran GDS di posyandu/posbindu PTM beresiko DM. Pelayanan diberikan dalam bentuk integrasi lintas program, yaitu pelayanan gizi, pelayanan dokter/ dokter gigi, pelayanan laboratorium, pelayanan farmasi, pelayanan gizi dan promosi kesehatan. Implementasi program ini di posyandu berupa skrining kadar gula darah pada masyarakat usia ≥ 15 tahun, sedangkan di Puskesmas berupa senam, penyuluhan kesehatan, pemeriksaan laboratorium rutin, pemberian obat-obatan, pertemuan keluarga pasien, dan rujukan bagi pasien. Oleh karena itu, program ini didukung dengan penyiapan kader yang berkompeten di posyandu dan dukungan dari stake holder terkait meliputi Kelurahan, Kecamatan, Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan seluruh layanan kesehatah yang ada di wilayah Kecamatan Tingkir	PUSKESMAS SIDOREJO KIDUL PADA DINAS KESEHATAN
24	PELANGI (Pelayanan Balita dengan Permasalahan gizi)	Pelangi merupakan kegiatan inovasi Puskesmas Kalicacing yaitu Pelayanan Balita dengan Permasalahan Gizi. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan gizi yang ada di wilayah Puskesmas Kalicacing khususnya Kelurahan Dukuh dan Kalicacing. Adapun permasalahan gizi yang diatasi adalah balita yang mempunyai berat badan atau tinggi badan kurang, berat badan berlebih dan berat badan yang tidak naik.	PUSKESMAS KALICACING PADA DINAS KESEHATAN
25	Merajut Asa (Pemeriksaan Terpadu Lanjut Usia dan Disabilitas)	Merajut Asa adalah kegiatan inovasi Puskesmas Kalicacing dalam memberikan pelayanan kepada lansia dan disabilitas. Kegiatan ini dilakukan dengan memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan, pelayanan laboratorium dan pelayanan farmasi di dalam satu tempat pelayanan.	PUSKESMAS KALICACING PADA DINAS KESEHATAN
26	Ketan Giling (Cek Kesehatan Gratis Keliling)	Dalam rangka peningkatan cakupan Cek Kesehatan Gratis (CKG) di wilayah Puskesmas MAngunsari, maka muncul ide untuk melakukan pemeriksaan Cek Kesehatan Gratis yang tidak hanya dilakukan di dalam	PUSKESMAS MANGUNSARI PADA DINAS KESEHATAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JUDUL INOVASI	URAIAN	PERANGKAT DAERAH
		gedung, tapi juga di luar gedung. Adapun focus pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis di wilayah Puskesmas Mangusari yaitu dengan melakukan pemeriksaan keliling yang dilakukan oleh tenaga kesehatan ke tempat-tempat pusat keramaian seperti pasar, perusahaan, dan sebagainya.	
27	PIKTOP (Pendampingan, Investigasi Kontak Tuberkulosis secara Optimal dan resPonsif)	**PIKTOP** (Pendampingan, Investigasi Kontak Tuberkulosis secara Optimal dan resPonsif) merupakan kegiatan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Tuberkulosis (TB). Tuberkulosis masih menjadi salah satu masalah kesehatan utama di Indonesia dengan angka insidensi yang tinggi dan tantangan dalam menemukan kasus secara dini. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 menekankan pentingnya penemuan kasus aktif, pemutusan rantai penularan serta penguatan peran masyarakat dan tenaga kesehatan dalam penanggulangan Tuberkulosis.Investigasi Kontak merupakan salah satu strategi kunci.**PIKTOP** (Pendampingan, Investigasi Kontak Tuberkulosis secara Optimal dan resPonsif sebagai salah satu upaya pendekatan inovatif dalam upaya pengendalian Tuberkulosis yang berfokus pada peningkatan kwalitas investigasi kontak pasien TB. Inovasi ini dirancang untuk memastikan setiap individu yang memiliki riwayat kontak erat dengan pasien TB dapat terdeteksi, diperiksa, dan mendapatkan tindaklanjut secara cepat, tepat, serta berkesinambungan. Pada pelaksanaan investigasi kontak sering menghadapi tantangan yang meliputi : pelacakan kasus yang belum optimal, keterbatasan tenaga kesehatan dan sumber daya, stigma masyarakat terhadap TB yang menghambat keterbukaan informasi, dan kurangnya sistem pendampingan yang responsif dan berkesinambungan. Inovasi **PIKTOP** menjadi langkah strategis dalam mendukung target eliminasi TB, dengan menekankan pada kecepatan, ketepatan dan berkelanjutan pendampingan pasien TB dan kegiatan Investigasi Kontak.Inovasi PIKTOP menggabungkan pendampingan terstruktur, teknologi digital, kolaborasi lintas sektor, dan pendekatan humanis serta memperkuat investigasi kontak secara optimal dan responsif.	Dinas Kesehatan
28	LINCAH (Lengkapi Imunisasi Cek dari Rumah ke Rumah)	Imunisasi telah diakui sebagai upaya yang efektif mencegah kematian dan kecacatan akibat penyakit penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I). Namun, saat ini masih diperlukan upaya untuk mengejar kesenjangan imunisasi dibandingkan negara maju sehingga dapat menunjang sustainable development goals (SGDs) ketiga, yaitu kehidupan yang sehat dan sejahtera.	Dinas Kesehatan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JUDUL INOVASI	URAIAN	PERANGKAT DAERAH
		Imunisasi adalah proses pembentukan zat antibodi secara aktif atau buatan melalui pemberian vaksin. Selain itu imunisasi juga dapat menurunkan angka kejadian penyakit, kecacatan, hilangnya nyawa seseorang yang disebabkan oleh penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I), dan mencegah penyakit epidemi pada generasi mendatang. Untuk mencapai kadar perlindungan tersebut, imunisasi harus diberikan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Jadwal imunisasi tersebut dibuat berdasarkan rekomendasi WHO dan organisasi profesi (IDAI) setelah melalui uji klinis. Oleh karena itu, jika ada imunisasi yang belum diberikan sesuai jadwal yang seharusnya, atau imunisasi tertunda, imunisasi harus secepatnya diberikan atau dikejar dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku Untuk memastikan semua anak mendapatkan imunisasi sesui jadwal yang seharusnya diperlukan beberapa upaya seperti pemantauan cakupan secara berkala, memastikan semua bayi terimunisasi, penelusuran langsung sasaran, dan pemantauan rantai dingin vaksin. Untuk itu program imunisasi Kota Salatiga membuat inovasi LINCAH dengan 2 program utama yaitu: 1. Memastikan semua bayi mendapatkan imunisasi dengan metode RCA (Rapid Convenience Assesment) 2. Mencari dan melengkapi imunisasi bagi bayi dan balita yang belum mendapatkan imunisasi langsung dari rumah ke rumah LINCAH merupakan inovasi yang tidak hanya berfokus pada capaian imunisasi namun memastikan semua anak diwilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Salatiga mendapatkan imunisasi lengkap dan berkualitas.	
29	BERSAHABAT	HIV-AIDS saat ini masih menjadi masalah kesehatan dimana kasus HIV-AIDS semakin bertambah seiring berjalannya waktu dikarenakan penularan yang tidak terkendali, kasus yang tidak terdeteksi serta upaya pengendalian yang belum optimal. Untuk itu butuh penanggulangan yang komprehensif dan terpadu dengan aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang pelaksanaanya melibatkan lintas sektor, masyarakat, keluarga, komunitas, LSM dan tenaga kesehatan. Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Kesehatan Kota Salatiga merumuskan inovasi program **SAHABAT ODHIV** yaitu : - **S**krining kepada masyarakat berisiko untuk menemukan kasus secara dini (Deteksi dini untuk penemuan kasus dengan cepat melalui skrining orang yang berisiko dengan melakukan konseling dan testing) - **A**jak penderita untuk berobat ke fasilitas	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JUDUL INOVASI	URAIAN	PERANGKAT DAERAH
		kesehatan (Pemberian obat ARV untuk menekan jumlah virus agar tidak berkembang menjadi AIDS dan mencegah penularan dengan prinsip U=U Undetectable = Untransmittable.) - **H**ibur dan dampingi penderita untuk meminum obat seumur hidup (Dukungan psikososial dan pendampingan ODHIV agar patuh minum obat dan tidak putus berobat.) - **A**khiri derita dengan berkumpul bersama beraktivitas hidup sehat dan produktif (Menciptakan lingkungan yang lebih menerima ODHIV, meningkatkan kualitas hidup, membantu ODHIV hidup lebih sehat dan panjang usia) - **B**ersama bahu membahu mendukung program. (Dukungan dari berbagai pihak dalam menuju upaya pencegahan, perawatan dan pengobatan). - **AT**asi stigma dan diskriminasi kepada orang dengan HIV (**ODHIV**) (Menunjukkan empati, komunikasi terbuka, mendengarkan tanpa menghakimi serta secara aktif mengoreksi pandangan sikap dan tindakan diskriminatif di lingkungannya.)	
30	Vaksin Internasional	Vaksin Internasional adalah tindakan mendapatkan vaksinasi internasional yang diberikan berupa sertifikat vaksinasi atau profilaksis internasional (ICVP). Sertifikat vaksinasi internasional adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa seseorang telah mendapatkan vaksinasi dan/atau profilaksis yang diperlukan untuk perjalanan internasional tertentu, seperti untuk ibadah umroh atau haji, atau perjalanan ke luar negeri lainnya. RSUD Kota Salatiga melayani : a. Vaksin Meningitis b. Vaksin Influenza c. Vaksin Poliomyelitis IPV Paket Vaksin Polio & Meningitis	RSUD Kota Salatiga
31	SIKEREN KOTA SALATIGA	**Sisten Informasi Kota Salatiga dalam Penataan Ruang** Maksud dari pekerjaan pengembangan sistem informasi tata ruang Kota Salatiga ini adalah untuk membangun sistem informasi geospasial yang dapat diakses oleh masyarakat luas agar sosialisasi informasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Salatiga dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Salatiga dilakukan secara efektif dan efisien. Serta menjadi alat bantu bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tata ruang (ITR) yang dapat dilakukan tanpa harus melakukan tatap muka	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
32	SALATIGA SAKTI	SALATIGA SAKTI (Sanitasi Aman Kelurahan Terintegrasi dan Inklusif) adalah Strategi Akselerasi Untuk Percepatan Peningkatan Capaian Sanitasi Aman Di Kota Salatiga. Laporan Implementasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JUDUL INOVASI	URAIAN	PERANGKAT DAERAH
		Proyek Perubahan ini, didasari oleh masih rendahnya capaian sanitasi aman di Kota Salatiga. Berdasarkan data bahwa peningkatan capaian sanitasi aman 5 tahun terakhir mempunyai tren positif tetapi masih jauh dari target yang ditetapkan. Tujuan utama program ini adalah menaikan angka capaian sanitasi aman secara signifikan, membangun kesadaran dan menaikan partisipasi masyarakat agar berperilaku sehat dan membangun komitmen lembaga diluar pemerintah dan sektor swasta untuk berperan aktif dalam mendukung percepatan peningkatan angka capaian sanitasi aman. SALATIGA SAKTI menghadirkan terobosan inovasi seperti pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), penguatan regulasi dengan menyusun Peraturan Wali Kota Salatiga tentang Layanan Lumpur Tinja (LLT), menjalin kemitraan dengan lembaga eksternal dan sektor swasta, dan program sedot tinja. Harapannya semoga Implementasi Proyek Perubahan ini dapat diimplementasikan dengan lancar sesuai jadwal yang telah disusun, sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap tercapainya Visi, Misi dan Program Prioritas Daerah Kota Salatiga	
33	SI CUPU (Sistem Cara Mudah Perhitungan PSU)	Prototype Penyediaan PSU Perumahan adalah sebuah sarana yang digunakan sebagai acuan dan alat untuk mempermudah pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam pembangunan hingga pemeliharaan PSU perumahan baik bagi pelaku penyedia PSU maupun pemangku kepentingan lainnya. Prototype ini dapat digunakan sebagai alat simulasi perhitungan kebutuhan PSU di Perumahan.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga
34	QR Code	Kegiatan Pelayanan aduan Menggunakan QR CODE pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga menekankan pada penerapan nilai-nilai dasar Core Values BerAKHLAK Beriorientasi, Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Royal, Adaktif, Kolaboraktif. Oleh karena itu dirumuskan kegiatan dalam mendukung Inovasi "Pelayanan Aduan Menggunakan QR Code di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga" direncanakan 5 (Lima) kegiatan yang dilaksanakan mulai tanggal Juni sampai dengan 26 Oktober 2023.Lima kegiatan tersebut meliputi: (1) Membuat rencana kegiatan pelayanan aduan,(2) Membuat Layanan Link Linkree .(3) Membuat media layanan dengan menggunakan QR Code.(4) Mensosialisasikan dan Edukasi Penggunaan QR Code.(5) Mengevaluasi kegiatan dengan memonitoring.5 (Lima) kegiatan dilaksanakan untuk memperoleh hasil atau Output sesuai yang diharapkan dan memberikan manfaat bagi Satuan Polisi Pamong Praja serta memberikan kontribusi pada pencapaian visi,misi tujuan dan memberikan penguatan pencapaian nilai nilai budaya organisasi	Satuan Polisi Pamong Praja

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JUDUL INOVASI	URAIAN	PERANGKAT DAERAH
		Kota Salatiga.Selanjutnnya, Penulis berkomitmen untuk melanjutkan Aktualisasi habituasi nilai dasar Cover Value BerAKHLAK sebagaimana telah tertuang pada lembar komitmen.	
35	**PUBLIKASI RUMAH SINGGAH NEGARA DINAS SOSIAL KOTA SALATIGA** ***Untuk Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Layanan Rehabilitasi Sosial***	**1. VIDEO ALUR PELAYANAN RUMAH SINGGAH NEGARA** Video diupload di Youtube dan Instagram Dinas Sosial Kota Salatiga Instagram: @dinsossalatiga Youtube: Dinas Sosial Kota Salatiga **2. LEAFLET RUMAH SINGGAH NEGARA** *Sosialisasi leaflet kepada beberapa stakehoder terkait kepada Sospermas Kelurahan, Satpol PP, Polres Salatiga dan Pendamping PKH.*	***Dinas Sosial***
36	10 Pintar Deteksi Dini Alergi Baduta Stunting	10PINTAR merupakan sebuah aplikasi berbasis web yang dikembangkan untuk mendukung Program GENTING (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting) di Kota Salatiga. Latar belakang inovasi ini adalah masih tingginya angka stunting, khususnya di Jawa Tengah, serta ditemukannya berbagai kendala dalam pelaksanaan bantuan nutrisi GENTING, seperti penolakan makanan oleh baduta, munculnya gejala alergi, dan rendahnya komitmen sebagian orang tua selama program enam bulan berjalan. 10PINTAR dirancang sebagai alat deteksi dini alergi makanan pada baduta stunting sekaligus sarana penguatan komitmen orang tua. Aplikasi ini memuat 9 pertanyaan inti berbasis literatur gizi untuk mengidentifikasi riwayat alergi makanan serta dilengkapi informed consent digital sebagai bentuk persetujuan dan komitmen orang tua dalam mengikuti program GENTING. Pengembangan instrumen dilakukan melalui kolaborasi dengan akademisi gizi, kemudian didigitalisasi agar dapat diakses melalui gawai. Hasil screening diklasifikasikan ke dalam kategori kondisi alergi yang menjadi dasar penentuan menu bantuan nutrisi. Implementasi 10PINTAR melibatkan berbagai pihak, seperti OPD KB, Tim Pendamping Keluarga (TPK), akademisi, dan Orang Tua Asuh, serta disertai kegiatan sosialisasi, edukasi, monitoring, dan evaluasi. Hasil penggunaan 10PINTAR diharapkan dapat meningkatkan ketepatan intervensi gizi, meminimalkan risiko alergi, serta meningkatkan keterlibatan dan komitmen orang tua	DP3APPKB
37	Rapat Lima Menit	**Gerak Cepat Pengendalian Hama dan Penyakit** Inovasi Ini Adalah Strategi Responsif Terhadap Laporan Serangan OPT – Organisme Pengganggu Tanaman (Baik Langsung / Tidak Langsung) , Sehingga Menunda Serangan Yang Semakin Meluas. Gerakan Pengendalian In Imelibatkan Petani , Peluluh, POPT Dan Pihak Dinas Pangan Dan Pertanian Agar Serangan OPT Teratasi .	Dinas Pangan dan Pertanian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JUDUL INOVASI	URAIAN	PERANGKAT DAERAH
38	Duta Boros Pangan	**Pemilihan Gen Z Sebagai Duta Anti Boros Pangan ,** Dengan Melakukan Kampanye Dan Aplikasi Nyata Di Lapangan Untuk Mencegah Boros Pangan Di Lingkungan Gen Z, Di Sekolah Dan Rumah.	Dinas Pangan Dan Pertanian
39	SAHABAT KIA TIRTO ARUM	Sinergi Akses Hiburan dan Wisata Berbasis KIA dengan Agro Wisata Tirto Arum Kendal berupa penggunaan KIA untuk potongan sebesar 10% untuk tiket masuk kolam renang dan wahana wisata	DISDUKCAPIL
40	SAHABAT KIA SALOKA	Sinergi Akses Hiburan dan Wisata Berbasis KIA dengan Saloka Theme Park berupa pemanfaatan KIA Kota Salatiga untuk mendapatkan potongan harga tiket terusan non rombongan senilai Rp20.000,-/tiket	DISDUKCAPIL
41	SIAP LAHIR RSUD	Sistem Administrasi Penduduk sejak Lahir RSUD adalah Kerjasama untuk penerbitan dokumen administrasi kependudukan bagi bayi warga Kota Salatiga yang lahir di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga, antara lain Akta Kelahiran, perubahan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Identitas Anak (KIA)	DISDUKCAPIL
42	SIAP LAHIR RSI TUNAS HARAPAN	Sistem Administrasi Penduduk sejak Lahir RSI Tunas Harapan adalah Kerjasama untuk penerbitan dokumen administrasi kependudukan bagi bayi warga Kota Salatiga yang lahir di RSI Tunas Harapan Salatiga, antara lain Akta Kelahiran, perubahan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Identitas Anak (KIA)	DISDUKCAPIL
43	Transformer (Transformasi Ekonomi Kerakyatan)	Transformer (Transformasi Ekonomi Kerakyatan) merupakan inovasi strategis Pemerintah Kota Salatiga dalam hal ini Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah dalam memperkuat fondasi ekonomi lokal melalui penguatan peran koperasi sebagai aggregator digital. Inisiatif ini hadir sebagai jawaban atas tantangan utama pelaku UMKM, yaitu lemahnya sinergi antar pelaku usaha, keterbatasan akses pasar, rendahnya daya saing dan minimnya nilai tambah produk lokal. Melalui pendekatan kolaboratif lintas sektor (hexahelix) yang melibatkan pemerintah daerah, Masyarakat, LSM/ Lembaga kemasyarakatan, dunia usaha (koperasi dan UMKM), Perguruan Tinggi, Media Massa, serta perbankan. Kolaborasi ini bertujuan mendukung pengembangan rantai pasok lokal, peningkatan kapasitas usaha, pengemasan dan mutu produk, serta penetrasi pasar digital yang lebih luas. Transformer berhasil menciptakan ekosistem ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Koperasi kini tidak lagi hanya berfungsi sebagai Lembaga simpan pinjam, tetapi telah bertransformasi menjadi pusat konsolidasi produksi, logistik, dan pemasaran kolektif berbasis teknologi digital.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JUDUL INOVASI	URAIAN	PERANGKAT DAERAH
44	Virtual Library Tour	Virtual Library Tour merupakan sebuah aplikasi berbasis web yang memiliki fungsi untuk memudahkan siapa saja bagi para penggunanya agar dapat mengakses secara jarak jauh setiap informasi pengetahuan yang akan disajikan dengan berbagai format seperti animasi, video, foto dan audio secara bersamaan sehingga memiliki kesan yang menarik dan dapat lebih mudah dipahami bagi para penggunanya. Virtual Library Tour merupakan entitas digital yang mengacu pada karakteristik perpustakaan, untuk melengkapi, meningkatkan atau menambah pengalaman perpustakaan melalui personalisasi, interaktivitas dan kekayaan konten bermuatan lokal terutama yang berhubungan dengan sejarah dan budaya Salatiga.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
45	PINTAR TULIS - Program inklusi dan literasi untuk Sahabat Tuli Salatiga	Program Kelas Literasi yang dikhususkan untuk Komunitas Tuli. Kelas Literasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya inklusi. Dengan adanya PINTAR TULIS diharapkan dapat meningkatan kualitas dan taraf hidupnya karena memiliki keterampilan untuk mendapatkan penghasilan sendiri tanpa bergantung kepada saudaranya.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
46	Galeri Arsip Salatiga	Wadah yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan arsip, tetapi juga sebagai sarana edukasi, rekreasi, dan literasi sejarah. **Galeri Arsip Salatiga** diharapkan menjadi ruang publik yang informatif dan interaktif untuk menyajikan arsip-arsip bernilai sejarah dalam bentuk pameran yang menarik, naratif, dan mudah dipahami oleh berbagai lapisan masyarakat, termasuk pelajar, mahasiswa, peneliti, dan wisatawan. Pembangunan **Galeri Arsip Salatiga** juga sejalan dengan upaya pelestarian arsip statis serta penguatan identitas dan jati diri daerah. Melalui galeri arsip, masyarakat dapat mengenal lebih dekat sejarah pemerintahan, sosial, budaya, dan pembangunan Kota Salatiga, sehingga tumbuh rasa memiliki, kebanggaan, dan tanggung jawab bersama dalam menjaga warisan dokumenter daerah. Dengan demikian, **Galeri Arsip Salatiga** diharapkan mampu berperan strategis sebagai pusat informasi sejarah sekaligus media pembelajaran dan kebudayaan yang berkelanjutan. Arsip Salatiga.. Melestarikan Masa Lalu, Mempersiapkan Masa Depan, dan Melindungi Saat Ini.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JUDUL INOVASI	URAIAN	PERANGKAT DAERAH
47	BayarPas	Program Pemutakhiran e-retribusi pasar berbasis QRIS. Dengan adanya Bayar Retribusi Pasar Berbasis QRIS diharapkan pembayaran retribusi pasar menjadi cepat, mudah, transparan, dan akuntabel, dengan memanfaatkan QR Code sebagi penganti ID billing untuk menerbitkan QRIS yang bisa dipindai di lapak pedagang. Selain itu inovasi ini bertujuan untuk modernisasi pasar dan meningkatkan perekonomian rakyat. E-retribusi pasar berbasis QRIS ini akan di terapkan di beberapa pasar di Kota Salatiga yang masih manual.	Dinas Perdagangan
48	JDIH DPRD Kota SALAtiga	Profil inovasi daerah tentang Rumah Perda untuk mendukung pembangunan hukum menuju tata kelola pemerintahan yang baik bagi Kota Salatiga. Kebaharuan rancang bangun JDIH DPRD Kota Salatiga dalam konstelasi JDIH nasional, DPRD Provinsi, serta DPRD Kabupaten/Kota se Indonesia terletak pada sistem back office yang mampu digunakan sebagai sarana pengarsipan secara online serta menunjang transparansi dan partispasi masyarakat sebagaimana dapat dilihat dalam tampilan JDIH DPRD Kota Salatiga	Sekretariat DPRD
49	Warung inspirasi kutowinangun lor	Integrasi layanan umum secara online, warga masyarakat tidak perlu mengambil form pelayaman ke kelurahan	Kecamatan Tingkir/Kalibening
50	SI PANDU : Digitalisasi Pengelolaan Data Usulan Perencanaan Pembangunan Terpadu Di Kelurahan Tingkir Tengah	Database usulan perencanaan pembangunan melalui musrenbang yang menjadi repositori (pusat pengelola data) usulan pembangunan masyarakat dan ditambahkan kanal pengajuan usulan perencanaan yang terbuka bagi seluruh masyarakat yang bisa diakses melalui tautan: https://tinyurl.com/TingTengSIPANDU	Kecamatan Tingkir / Tingkir Tengah
51	SIAP KERJO (Digitalisasi Informasi Pelayanan Kelurahan Kumpulrejo	Platform digital berbasis Linktree dan Google Drive yang memudahkan warga mengakses informasi syarat permohonan surat pengantar dan surat keterangan, leaflet Adminduk Disdukcapil, serta layanan konsultasi WhatsApp admin di Kelurahan Kumpulrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota salatiga https://linktr.ee/kumpulrejosiapkerjo	Kumpulrejo
52	SIAP KINERJA	Sistem Informasi Akuntabilitas Pengukuran Kinerja sebagai aplikasi yang menghubungkan dari proses perencanaan hingga proses pelaporan dan monev	BAPPEDA
53	OPTIMALISASI PEMANTAUAN TINDAK LANJUT KERUGIAN DAERAH MENGGUNAKAN MEDIA *SPREADSHEET* DAN *GOOGLE DRIVE*	OPTIMALISASI PEMANTAUAN TINDAK LANJUT KERUGIAN DAERAH MENGGUNAKAN MEDIA *SPREADSHEET* DAN *GOOGLE DRIVE* Program ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemantauan kerugian daerah yang berkelanjutan berupa matriks pemantauan dalam bentuk spreadsheet yang terintegrasi dengan media arsip digital google drive dan buku pembantu pemantauan	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SALATIGA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JUDUL INOVASI	URAIAN	PERANGKAT DAERAH
		kerugian daerah sehingga tim pengelola kerugian daerah dapat langsung mengakses link matriks dan melakukan updating data tanpa harus mengirim file secara berulang-ulang serta bisa dilakukan pemantauan secara realtime apabila ada kasus yang sedang berjalan. Pemanfaatan buku pembantu pemantauan kerugian daerah dapat mempermudah koordinasi dengan pihak yang bersangkutan dikarenakan mereka bisa mengisi secara mandiri apabila terdapat bukti dukung terbaru dan memudahkan tim pengelola tindak lanjut kerugian daerah untuk melakukan rekap kasus kerugian setiap bulannya.	

Berdasarkan Inovasi yang dilaksanakan Perangkat Daerah tahun 2025, untuk mendukung Prioritas Pembangunan tahun 2027, yang diarahkan pada tahap ***"Pengembangan SDM yang sehat dan cerdas dan perekonomian daerah yang unggul, didukung pelayanan publik bermutu dan infrastruktur wilayah yang sesuai daya dukung lingkungan hidup"***. Tahun kedua ini difokuskan pada ***"Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif didukung dengan SDM Unggul"***, maka perlu penguatan pada pelaksanaan inovasi pada tahun 2027. Penerapan inovasi merupakan instrumen strategis dalam mendukung target dan agenda pembangunan daerah tahun 2027. Adapun Inovasi yang mendukung prioritas pembangunan tahun 2027 adalah :

1. **BOSS KUPAT (Bimbingan OSS Kegiatan Usaha On The Spot)**

   Inovasi ini merupakan bentuk layanan jemput bola berupa pendampingan langsung kepada pelaku usaha dalam proses pendaftaran dan pengurusan perizinan berusaha serta pelaporan kegiatan penanaman modal melalui sistem Online Single Submission (OSS), khususnya bagi pelaku usaha mikro yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan digital. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas, kecepatan, dan kemudahan layanan perizinan berusaha berbasis risiko.

2. **Jempol Pintar (Jemput Bola Perizinan Industri Rumah Tangga Pangan)**

   Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) merupakan salah satu sektor strategis yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan pendapatan masyarakat, serta pemenuhan kebutuhan pangan yang aman dan bermutu. Namun dalam pelaksanaannya, masih banyak pelaku IRTP yang belum memiliki legalitas usaha dan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT).

   Masih rendahnya kepemilikan izin dan SPP-IRT pada pelaku Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) menjadi tantangan dalam upaya menjamin keamanan pangan dan meningkatkan daya saing produk lokal. Kendala pemahaman prosedur, keterbatasan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

akses layanan, serta persepsi rumitnya perizinan menyebabkan banyak pelaku usaha belum mengurus legalitas usahanya.

Menjawab permasalahan tersebut, lahirlah inovasi Jempol Pintar (Jemput Bola Perizinan Industri Rumah Tangga Pangan) sebagai upaya mendekatkan layanan perizinan kepada masyarakat. Melalui pendekatan jemput bola, petugas memberikan pendampingan langsung kepada pelaku IRTP mulai dari sosialisasi, pembinaan, hingga fasilitasi perizinan.

Inovasi Jempol Pintar bertujuan untuk mempermudah proses perizinan, meningkatkan kesadaran keamanan pangan, serta mendorong peningkatan jumlah IRTP yang berizin guna mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat dan perlindungan konsumen.

Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) merupakan salah satu penggerak ekonomi masyarakat yang berperan penting dalam penyediaan pangan serta peningkatan kesejahteraan keluarga. Namun demikian, masih banyak pelaku IRTP yang belum memiliki legalitas usaha dan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Kondisi ini disebabkan oleh berbagai kendala, antara lain rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap regulasi perizinan, prosedur yang dianggap rumit, keterbatasan waktu dan akses pelayanan, serta rendahnya literasi administrasi dan digital.

Pelayanan perizinan yang selama ini bersifat pasif, dengan menunggu masyarakat datang ke kantor, belum mampu menjangkau seluruh pelaku IRTP secara optimal. Akibatnya, tingkat kepatuhan perizinan masih rendah, pengawasan keamanan pangan belum maksimal, serta daya saing produk IRTP menjadi terbatas karena tidak memenuhi persyaratan legalitas untuk mengakses pasar yang lebih luas.

Menjawab permasalahan tersebut, dikembangkan inovasi Jempol Pintar (Jemput Bola Perizinan Industri Rumah Tangga Pangan) sebagai bentuk terobosan pelayanan publik yang proaktif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Inovasi ini mengusung pendekatan jemput bola, di mana petugas secara langsung mendatangi pelaku IRTP untuk memberikan edukasi, pendampingan, pemeriksaan sarana produksi, serta fasilitasi pengurusan perizinan secara terpadu dan berbasis teknologi.

Kebaruan dari inovasi Jempol Pintar terletak pada integrasi antara pelayanan perizinan, pembinaan keamanan pangan, dan pendampingan administrasi yang dilakukan secara langsung di lokasi usaha. Pendekatan ini tidak hanya mempercepat proses perizinan, tetapi juga meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya keamanan pangan dan legalitas usaha.

Melalui inovasi Jempol Pintar, diharapkan terjadi peningkatan jumlah IRTP yang berizin, terjaminnya keamanan pangan bagi masyarakat, serta meningkatnya daya saing produk pangan lokal. Inovasi ini sekaligus menjadi wujud komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan publik yang inovatif, mudah diakses, inklusif, dan berdampak langsung bagi masyarakat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. SALATIGA SAKTI (Sanitasi Aman Kelurahan Terintegrasi dan Inklusif)

Salatiga Sakti adalah Strategi Akselerasi Untuk Percepatan Peningkatan Capaian Sanitasi Aman Di Kota Salatiga. Laporan Implementasi Proyek Perubahan ini, didasari oleh masih rendahnya capaian sanitasi aman di Kota Salatiga. Berdasarkan data bahwa peningkatan capaian sanitasi aman 5 tahun terakhir mempunyai tren positif tetapi masih jauh dari target yang ditetapkan. Tujuan utama program ini adalah menaikan angka capaian sanitasi aman secara signifikan, membangun kesadaran dan menaikan partisipasi masyarakat agar berperilaku sehat dan membangun komitmen lembaga diluar pemerintah dan sektor swasta untuk berperan aktif dalam mendukung percepatan peningkatan angka capaian sanitasi aman. SALATIGA SAKTI menghadirkan terobosan inovasi seperti pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), penguatan regulasi dengan menyusun Peraturan Wali Kota Salatiga tentang Layanan Lumpur Tinja (LLT), menjalin kemitraan dengan lembaga eksternal dan sektor swasta, dan program sedot tinja. Harapannya semoga Implementasi Proyek Perubahan ini dapat diimplementasikan dengan lancar sesuai jadwal yang telah disusun, sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap tercapainya Visi, Misi dan Program Prioritas Daerah Kota Salatiga

4. Transformer (Transformasi Ekonomi Kerakyatan)

Transformer (Transformasi Ekonomi Kerakyatan) merupakan inovasi strategis Pemerintah Kota Salatiga dalam hal ini Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah dalam memperkuat fondasi ekonomi lokal melalui penguatan peran koperasi sebagai aggregator digital. Inisiatif ini hadir sebagai jawaban atas tantangan utama pelaku UMKM, yaitu lemahnya sinergi antar pelaku usaha, keterbatasan akses pasar, rendahnya daya saing dan minimnya nilai tambah produk lokal.

Melalui pendekatan kolaboratif lintas sektor (hexahelix) yang melibatkan pemerintah daerah, Masyarakat, LSM/ Lembaga kemasyarakatan, dunia usaha (koperasi dan UMKM), Perguruan Tinggi, Media Massa, serta perbankan. Kolaborasi ini bertujuan mendukung pengembangan rantai pasok lokal, peningkatan kapasitas usaha, pengemasan dan mutu produk, serta penetrasi pasar digital yang lebih luas. Transformer berhasil menciptakan ekosistem ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Koperasi kini tidak lagi hanya berfungsi sebagai Lembaga simpan pinjam, tetapi telah bertransformasi menjadi pusat konsolidasi produksi, logistik, dan pemasaran kolektif berbasis teknologi digital

2.9. Penghargaan Daerah

Pada tahun 2025 sebanyak 66 penghargaan baik tingkat Nasional, Provinsi maupun eks karisidenan. Pencapaian penghargaan belum sampai ke tingkat internasional yang selanjutnya menjadi tantangan untuk mewujudkan Kota Salatiga mendunia. Berikut data penghargaan Kota Salatiga Tahun 2025.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 2. 113. Data Penghargaan Kota Salatiga di Tingkat Nasional, Provinsi dan Eks Karisidenan Tahun 2025

NO	NAMA PRESTASI / PENGHARGAAN/NOMINASI	TINGKAT	KEMENTERIAN / LEMBAGA YANG MENGELUARKAN	PERANGKAT DAERAH
1	Juara 3 Olimpiade SAINS Nasional OSN Mapel IPA jenjang SD Tahun 2025	Nasional	Kemendikdasmen	Dinas Pendidikan
2	Juara Umum Lomba Mata Pelajaran Agama Kristen Jenjang SD	Provinsi Jawa Tengah	MGMP Agama Kristen Prov Jateng	Dinas Pendidikan
3	Juara I Macapat Rohani Lomba Mata Pelajajaran Agama Kristen Jenjang SD Tahun 2025	Provinsi Jawa Tengah	MGMP Agama Kristen Prov Jateng	Dinas Pendidikan
4	Juara I Cerita Alkitab Lomba Mata Pelajajaran Agama Kristen Jenjang SD Tahun 2025	Provinsi Jawa Tengah	MGMP Agama Kristen Prov Jateng	Dinas Pendidikan
5	Juara 1 Komedi Tunggal Putra Lomba Festival Tunas Bahasa Ibu Jenjang SD Tahun 2025	Provinsi Jawa Tengah	Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah	Dinas Pendidikan
6	Juara 1 Macapat Putra Lomba Festival Tunas Bahasa Ibu Jenjang SD Tahun 2025	Provinsi Jawa Tengah	Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah	Dinas Pendidikan
7	Juara III Komputer Islami Lomba Mata Pelajaran Agama Islam Jenjang SD Tahun 2025	Provinsi Jawa Tengah	MGMP Agama Kristen Prov Jateng	Dinas Pendidikan
8	Juara Harapan I Macapat Islami Putri Lomba Mata Pelajaran Agama Islam Jenjang SD Tahun 2025	Provinsi Jawa Tengah	MGMP Agama Kristen Prov Jateng	Dinas Pendidikan
9	Juara III Membaca Geguritan Putri Lomba Festival Tunas Bahasa Ibu Jenjang SMP Tahun 2025	Provinsi Jawa Tengah	Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah	Dinas Pendidikan
10	Juara Harapan II Maca Nulis Aksara Jawa Putra Lomba Festival Tunas Bahasa Ibu jenjang SMP Tahun 2025	Provinsi Jawa Tengah	Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah	Dinas Pendidikan
11	Meraih Penghargaan Pada Pemeringkatan Badan Publik (Keterbukaan Informasi) Oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Berpredikat “Informatif”	Provinsi	Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah	RSUD Kota Salatiga
12	ANUGERAH BAPPETEN 2025 DALAM BIDANG KESELAMATAN DAN KEAMANAN NUKLIR KEGIATAN RADIOLOGI DIAGNOSTIK DAN	NASIONAL	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	BLU PUSKESMAS CEBONGAN SALATIGA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	NAMA PRESTASI / PENGHARGAAN/NOMINASI	TINGKAT	KEMENTERIAN / LEMBAGA YANG MENGELUARKAN	PERANGKAT DAERAH
	INTERVENSIONAL (NON-RUMAH SAKIT)			
13	Stand Terbaik Sektor Perumahan dan Kawasan Permukiman	Nasional	PT. PANCA WIRA KREASINDO	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga
14	Badan Publik Informatif	Provinsi	KIP Prov Jateng	Diskominfo
15	JUARA I PENGHARGAAN KABUPATEN/ KOTA DENGAN SKRINING BAYI BARU LAHIR TERBAIK WILAYAH REGIONAL I	NASIONAL	KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA	PEMERINTAH KOTA SALATIGA
16	PENGHARGAAN SWASTI SABA PADAPA, ATAS KEBERHASILAN DALAM MENYELENGGARAKAN KABUPATEN/KOTA SEHAT	NASIONAL	KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA	PEMERINTAH KOTA SALATIGA
17	Penghargaan Tentang Simulasi Penanggulangan Bencana Serentak di Sekolah Terbanyak dengan peserta terbanyak	NASIONAL	Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar & Menengah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
18	Pelaksanaan Pemutakhiran PK 2025 / Terbaik II	Provinsi Jawa Tengah	KEMENDUKBANGGA/ BKKBN	DP3APPKB
19	Evaluasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas Tk. Provinsi Jawa Tengah / Juara II	Provinsi Jawa Tengah	KEMENDUKBANGGA/ BKKBN	DP3APPKB
20	Apresiasi Rumah Dataku Tk. Provinsi / Juara I	Provinsi Jawa Tengah	KEMENDUKBANGGA/ BKKBN	DP3APPKB
21	Lomba Sekolah Siaga Kependudukan Paripurna Dan Penghargaan Pengelola Program SSK Terbaik Tahun 2025/ Juara I	Provinsi Jawa Tengah	KEMENDUKBANGGA/ BKKBN	DP3APPKB
22	Apresiasi Duta Genre Jawa Tengah/ Juara III	Provinsi Jawa Tengah	KEMENDUKBANGGA/ BKKBN	DP3APPKB
23	Apresiasi Duta Genre Jawa Tengah/Juara Favorit	Provinsi Jawa Tengah	KEMENDUKBANGGA/ BKKBN	DP3APPKB
24	Lomba Jingle Gelari Pelangi 2025/ Juara Harapan I	Provinsi Jawa Tengah	PKK Provinsi Jawa Tengah	DP3APPKB
25	Sekolah Adiwiyata	Provinsi	DLHK Provinsi Jawa tengah	Dinas Lingkungan Hidup
26	Kampung Wisata Ledok Gelar Desa Wisata Jawa Tengah	Juara 2 Tingkat Jateng 2025	Disporapar Prov. Jateng 2025	Disbudpar Salatiga
27	Stifen Listiato Risman W - Mas Intelegensia Jawa Tengah 2025	Juara Favorite	Disporapar Prov. Jateng 2025	Disbudpar Salatiga
28	Pokdarwis Argobinagun Ledok - Juara	Juara Harapan 1	Disporapar Prov. Jateng 2025	Disbudpar Salatiga

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	NAMA PRESTASI / PENGHARGAAN/NOMINASI	TINGKAT	KEMENTERIAN / LEMBAGA YANG MENGELUARKAN	PERANGKAT DAERAH
	Harapan 1 Jambore Pokdarwis Jateng 2025			
29	Sanggar Hasthasawanda – Penampil Kostum Terbaik Parade Seni Budaya Jateng 2025	Juara Favorite	Disporapar Prov. Jateng 2025	Disbudpar Salatiga
30	Kawulo Alit - Lomba Keroncong Tingkat Nasional	Juara Harapan 1	Tingkat Nasional	Disbudpar Salatiga
31	Piyu Rizky KK - The Best Player Ukulele Lomba Keroncong Tingkat Nasional	The Best Player Ukulele	Tingkat Nasional	Disbudpar Salatiga
32	Ilham Budi Prasetya - Piagam Pelestari Kebudayaan atas penyerahan cagar budaya Antefiks Candi ke Museum Salatiga	Penerima Piagam Pelestari Kebudayaan	Wali Kota Salatiga	Disbudpar Salatiga
33	Kenzie Lintang Trenggono - Juara 1 Kategori A Festival Dalang Anak	Juara 1 Kategori A	Tingkat Karesidenan Semarang	Disbudpar Salatiga
34	Javas Adaby - Juara 1 Kategori B Festival Dalang Anak	Juara 3	Tingkat Karesidenan Semarang	Disbudpar Salatiga
35	Kenzie Lintang Trenggono - Peringkat 5 Kategori A Festival Dalang Anak	Peringkat 5 Kategori A	Tingkat Nasional	Disbudpar Salatiga
36	Sanggar Kridho Bekso Wandawa - Penyaji Unggulan Pentas Duta Seni TMII 2025	Penyaji Unggulan	Provinsi Jawa Tengah	Disbudpar Salatiga
37	Salatiga Costum – Juara 1 Kategori Dewasa	Juara 1	Pemerintah Kabupaten Semarang	Disbudpar Salatiga
38	Salatiga Iconic Costum – Juara Harapan 3 Kategori Dewasa	Juara Harapan 3	Pemerintah Kabupaten Semarang	Disbudpar Salatiga
39	Rekor Bunda Membacakan Buku Cerita untuk Anak Secara Serentak dengan Peserta Terbanyak, 1.275 Ibu kepada 1.275 Anak (Dalam Rangka Hari Jadi Kota Salatiga ke- 1275)	Nasional	Lembaga Prestasi Indonesia – Dunia (LEPRID)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
40	Piagam Penghargaan sebagai Terbaik IV Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Terbaik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Kategori Sekretariat DPRD Kabupaten /Kota Terbaik, Tanggal 22 April 2025	Provinsi	Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol (P) Drs. AHMAD LUTHFI, S.H., S.St.M.K	Sekretariat DPRD
41	Kota/Kabupaten Paling Berkelanjutan Ke-6 di Indonesia pada UI	Nasional	UI GreenMetric	BAPPEDA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	NAMA PRESTASI / PENGHARGAAN/NOMINASI	TINGKAT	KEMENTERIAN / LEMBAGA YANG MENGELUARKAN	PERANGKAT DAERAH
	GreenCityMetric Ranking tahun 2025			
42	Kota/Kabupaten Paling Berkelanjutan dalam Bidang Tata Pamong Ke-3 di Indonesia pada UI GreenCityMetric Ranking tahun 2025	Nasional	UI GreenMetric	BAPPEDA
43	Peringkat III Diklat Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan V Tahun 2025	Provinsi Jawa Tengah	BPSDMD Provinsi Jawa Tengah	Kecamatan Tingkir (Agung Setiawan, S.Kom.,M.M.)
44	Peringkat II Diklat Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan VIII Tahun 2025	Provinsi Jawa Tengah	BPSDMD Provinsi Jawa Tengah	Kecamatan Tingkir (Hanyk Setiyani, S.Sos)
45	Juara II lomba senam CTPS dalam rangja HKG PKK ke 53	Kota Salatiga	PKK Kota Salatiga	PKK Kelurahan Sidorejo Kidul
46	Juara III Lomba Administrasi 10 Program Pokok PKK	Kota Salatiga	PKK Kota Salatiga	PKK Kelurahan Kalibening
47	Juara III Lomba Aku Hatinya PKK	Kota Salatiga	PKK Kota Salatiga	PKK Kelurahan Kalibening
48	Juara III Lomba Video PKK	Kota Salatiga	PKK Kota Salatiga	PKK Kelurahan Kalibening
49	Juara Harapan 1 Lomba Administrasi 10 Program Pokok PKK kategori RW	Kota Salatiga	PKK Kota Salatiga	PKK RW 03 Kalibening
50	Juara III lomba cerdas cermat dalam rangka peringatan HKG PKK ke-53	Kota Salatiga	PKK Kota Salatiga	PKK Kelurahan Tingkir Lor
51	Juara I Lomba Video PKK	Kota Salatiga	PKK Kota Salatiga	TP PKK Kelurahan Tingkir Tengah
52	Juara Harapan I lomba paduan suara dalam rangka HKG PKK ke 53	Kota salatiga	PKK Kota Salatiga	PKK Kelurahan Kutowinangun Lor
53	Peringkat Harapan II Penghargaan Gelar Pokdarwis Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025	Provinsi Jawa Tengah Tahun 202	Pemprov Jateng	Ledok
54	Juara II Penganugerahan Gelar Desa Wisata Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025	Provinsi Jawa Tengah 25Tahun 202	Pemprov Jateng	Ledok
55	Peningkat 2 Kategori Kota Lomba Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kebijakan Kampung Keluarga Berkualitas Tk Prov Jateng tahun 2025	Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025	Pemprov Jateng	Tegalrejo

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	NAMA PRESTASI / PENGHARGAAN/NOMINASI	TINGKAT	KEMENTERIAN / LEMBAGA YANG MENGELUARKAN	PERANGKAT DAERAH
56	Juara II Lomba Lomba Apresiasi Rumah Dataku (Katagori Digital)	Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025	Pemprov Jateng	Randuacir
57	Piagam Penghargaan Peace Maker Justice (Anubhawa Sasan Jagaddhita)	Nasional Tahun 2025	Kementerian Hukum Republik Indonesia	Randuacir
58	Penghargaan predikat Anubhawa Sasana Jagaddhita	Nasional Tahun 2025	Kementerian Hukum Republik Indonesia	Randuacir
59	Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan keuangan Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2024	Provinsi	Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Tengah	BPKPD
60	Peringkat 3 dalam Audit Sistem Kearsipan Internal (ASKI) Pemkot Salatiga Tahun 2025	Kota Salatiga	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga	BKPSDM
61	Top UPG Kategori Kementerian/Lembaga	Nasional	Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia	Inspektorat Daerah Kota Salatiga
62	Peringkat I Indeks Kota Toleran	Nasional	SETARA	Badan Kesbangpol
63	Peringkat III Blangkon Jateng Awards Tahun 2025 Kategori Pemerintah Kabupaten/Kota Terbaik Yang Bergabung Pada Program Blangkon Jateng	Provinsi	Gubernur Jawa Tengah	Bagian PBJ Setda Kota Salatiga
64	Peringkat 6 Penilaian Indeks Reformasi Hukum	Nasional	Kementerian Hukum	Bagian Hukum Setda Kota Salatiga
65	Mendukung Pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan Kota Salatiga	Nasional	Kementerian Hukum	Bagian Hukum Setda Kota Salatiga
66	Penghargaan Kota Layak Anak Kategori Madya	Nasional	Kementerian PPPA	DP3APPKB

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi dan keuangan daerah dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Salatiga Tahun 2027, menggambarkan kebijakan perekonomian daerah sebagai dasar pencapaian sasaran indikator ekonomi makro daerah. Kerangka ekonomi daerah memberikan gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kota Salatiga yang dipengaruhi oleh perekonomian regional, nasional maupun global. Sedangkan kerangka pendanaan daerah memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan kemampuan pembelanjaan dan pembiayaan untuk pembangunan daerah tahun 2027.

Secara garis besar, bab ini memuat arah kebijakan ekonomi daerah yang menjelaskan tentang perkembangan ekonomi Global, Nasional, kondisi ekonomi Jawa Tengah, serta tantangan dan prospek perekonomian daerah, termasuk di dalamnya asumsi-asumsi yang digunakan sebagai dasar perhitungan RKPD tahun 2027. Selanjutnya dijelaskan pula arah kebijakan keuangan daerah yang memuat proyeksi keuangan dan kerangka pendanaan daerah, serta arah kebijakan keuangan daerah dari segi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kerangka ekonomi daerah memberikan gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kota Salatiga yang dipengaruhi oleh perekonomian regional, nasional maupun global. Dalam perumusan arah kebijakan ekonomi daerah perlu dilakukan telaah terhadap kondisi perekonomian berdasarkan perkembangan kebijakan ekonomi Global, nasional dan Provinsi Jawa Tengah yang dapat mempengaruhi kondisi dan kebijakan ekonomi Kota Salatiga. Kerangka ekonomi daerah menguraikan perkembangan ekonomi global dan domestik beberapa tahun serta perkiraan dan prospek ekonomi domestik dan global ke depan, khususnya untuk tahun 2027. Gambaran dan perkiraan ekonomi tersebut selanjutnya dijadikan asumsi dasar ekonomi makro 2027 yang menjadi landasan dalam penyusunan pokok-pokok dan arah kebijakan fiskal ke depan dalam RKPD Kota Salatiga Tahun 2027.

3.1.1. Kondisi Perekonomian Global

Perkembangan ekonomi dunia pada 2025 menunjukkan gambaran yang kompleks : pertumbuhan mulai melambat, ketidakpastian meningkat, tetapi masih ada ruang harapan terutama di negara berkembang dan kawasan Asia. Dengan kebijakan yang tepat, negara-negara berkembang memiliki kesempatan untuk menjadi pusat pertumbuhan baru. Kolaborasi internasional, reformasi domestik, dan manajemen fiskal yang hati-hati menjadi kunci

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

menghadapi tantangan jangka menengah. Secara keseluruhan, kondisi perekonomian global saat ini dapat digambarkan sebagai fase pertumbuhan moderat namun rentan, dengan prospek yang sangat bergantung pada stabilitas kebijakan, koordinasi perdagangan internasional, dan kemampuan negara-negara menyesuaikan diri terhadap perubahan struktural pascapandemi.

Perekonomian global pada akhir 2025 berada dalam kondisi tumbuh namun tidak stabil. Menurut *International Monetary Fund* (IMF), laju ekspansi ekonomi dunia diperkirakan sekitar 3,0% pada 2025 dan 3,1% pada 2026, mencerminkan pertumbuhan yang positif tetapi tidak sekuat periode sebelum pandemi. Kebangkitan ekonomi berlangsung tidak merata. Amerika Serikat menghadapi perlambatan, kawasan Eropa bergerak lebih lambat dari rata-rata global, sementara Tiongkok dan negara-negara berkembang masih menjadi motor pertumbuhan meskipun juga mengalami tekanan struktural dan penurunan momentum investasi.

Memasuki 2026, ekonomi global diproyeksikan bergerak dalam jalur moderasi. Secara umum, inflasi global diperkirakan menurun. Perdagangan global menghadapi tekanan dari fragmentasi. Kenaikan tarif efektif dan hambatan non-tarif mengurangi efisiensi rantai pasok, sehingga menekan volume perdagangan dan investasi lintas negara. Selain itu, proteksionisme yang meningkat bukan hanya berdampak pada ekspor, tetapi juga pada aliran modal dan biaya produksi, terutama bagi negara berkembang yang bergantung pada integrasi global. Prospek regional menunjukkan pola moderasi yang berbeda antar zona. Risiko global tetap signifikan dan perlu diwaspadai. Indonesia diproyeksikan akan melanjutkan pertumbuhan positif, namun tetap perlu mewaspadai risiko global.

3.1.2. Proyeksi dan Arah Pembangunan Ekonomi Nasional

Pada 2025, Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,11%, lebih tinggi dibandingkan peer *countries* seperti Singapura (4,3%), Arab Saudi (4,4%), dan Malaysia (4,8%). Perekonomian Indonesia sepanjang tahun 2025 mampu tumbuh sebesar 5,01% melambat dibanding capaian 2024 yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,03 persen (*c-to-c*). Capaian ini didorong oleh peningkatan aktivitas investasi dan manufaktur, serta didukung permintaan domestik yang terjaga dan permintaan global yang mulai pulih. Kinerja ekonomi Indonesia tetap solid dan lebih baik dibandingkan beberapa negara maju maupun berkembang lainnya di tengah ketidakpastian global.

Pertumbuhan ekonomi dari sisi produksi terutama didorong oleh kinerja **Industri Pengolahan** sebagai kontributor utama PDB yang didukung oleh penguatan permintaan domestik, hilirisasi sumber daya alam, serta peningkatan kapasitas produksi. Selain itu, sektor **Perdagangan Besar dan Eceran** tumbuh seiring membaiknya daya beli masyarakat dan stabilitas harga, sementara sektor **Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan** tetap berperan sebagai penopang ekonomi melalui peningkatan produksi pangan. Pertumbuhan juga ditopang oleh sektor **Konstruksi** melalui percepatan pembangunan infrastruktur dan perumahan, serta sektor **Transportasi dan Pergudangan** yang meningkat sejalan dengan pemulihan mobilitas

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

masyarakat dan aktivitas logistik, sehingga secara keseluruhan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan pada Tahun 2025.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi didorong oleh Konsumsi Rumah Tangga sebagai komponen terbesar PDB yang tumbuh seiring terjaganya daya beli masyarakat, stabilitas inflasi, dan peningkatan aktivitas ekonomi. Selain itu, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) memberikan kontribusi signifikan melalui peningkatan investasi pemerintah dan swasta, khususnya pada sektor infrastruktur, industri pengolahan, dan properti. Konsumsi Pemerintah turut menopang pertumbuhan melalui realisasi belanja barang, jasa, dan belanja modal, sementara kinerja Ekspor Barang dan Jasa yang tetap positif, meskipun menghadapi dinamika global, serta terkendalinya Impor, berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang relatif stabil dan berkelanjutan pada Tahun 2025. Sementara itu, **Konsumsi LNPRT (Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga)** mengalami **pertumbuhan positif** seiring meningkatnya aktivitas organisasi sosial, keagamaan, dan kemasyarakatan, serta dukungan pendanaan dan partisipasi masyarakat yang relatif terjaga, sehingga turut memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Tahun 2025 meskipun dengan porsi yang relatif kecil dibandingkan komponen pengeluaran lainnya.

Sepanjang tahun 2025, wilayah **Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, serta Maluku dan Papua** tumbuh **lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional**, didorong oleh pemulihan dan penguatan sektor pariwisata, peningkatan aktivitas pertambangan dan hilirisasi sumber daya alam, pengembangan industri berbasis kawasan, serta percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah, sehingga menjadi motor pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa.

K**onsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 4,98 persen pada Kuartal IV Tahun 2025** dan **secara keseluruhan mencapai 4,94 persen sepanjang tahun 2025**, didorong oleh terjaganya daya beli masyarakat, stabilitas inflasi, serta meningkatnya aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat, sehingga tetap menjadi kontributor utama dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Peningkatan konsumsi rumah tangga tercermin dari **menguatnya daya beli masyarakat**, **meningkatnya mobilitas dan aktivitas ekonomi**, **pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa**, serta **stabilnya inflasi dan harga kebutuhan pokok**, yang mendorong belanja masyarakat baik untuk kebutuhan dasar maupun non-primer sepanjang Tahun 2025.

Dari sisi pengeluaran, **Konsumsi Rumah Tangga** sebagai kontributor utama tumbuh 5,11% (yoy) pada kuartal IV dan 4,98% sepanjang tahun, mencerminkan daya beli yang kuat didukung peningkatan mobilitas masyarakat dan inflasi yang terkendali. Kinerja positif Konsumsi Rumah Tangga tercermin dari pertumbuhan Indeks Penjualan Riil dan peningkatan transaksi online. Berbagai insentif dan stimulus Pemerintah diberikan, seperti bantuan sosial, Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS), serta program magang. Momentum Natal dan Tahun Baru (Nataru) dan kebijakan diskon transportasi turut meningkatkan mobilitas masarakat. Jumlah penumpang berbagai moda transportasi meningkat, konsumsi pada restoran dan hotel tumbuh 6,38% serta transportasi dan komunikasi tumbuh 6,32% pada 2025.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Penguatan Konsumsi Rumah Tangga turut didukung perbaikan ekonomi dan kondisi ketenagakerjaan yang kondusif.

Pertumbuhan **Konsumsi Pemerintah** pada kuartal IV mencapai 4,55% (yoy) dan sepanjang tahun tumbuh 2,5%. Belanja negara menjadi shock absorber menjaga daya beli rumah tangga, termasuk menjalankan agenda prioritas. Belanja negara memberikan efek pengganda yang luas bagi ekonomi, tidak hanya menggerakkan aktivitas dunia usaha, tetapi juga memperkuat konsumsi masyarakat. Sebesar Rp805,4 triliun digunakan untuk belanja program prioritas, di antaranya untuk penguatan dan proteksi daya beli, stabilisasi harga, dan peningkatan produktivitas. Di samping itu, Pemerintah telah membelanjakan Rp110,7 triliun untuk stimulus rumah tangga dan dunia usaha.

Pertumbuhan Investasi (PMTB) pada kuartal IV tumbuh 6,12% (yoy) dan sepanjang tahun mencapai 5,09%. Kinerja impresif ini didorong investasi Mesin dan Perlengkapan yang tumbuh 17,99% pada 2025, mengindikasikan penguatan aktivitas industri. Sementara itu, investasi kendaraan tumbuh 5,16% seiring peningkatan aktivitas impor pendukung logistik. Stabilitas makroekonomi dan sinergi kebijakan fiskal-moneter meningkatkan kepercayaan investor, tercermin dari realisasi investasi PMA dan PMDN yang tumbuh 12,66% pada 2025. Peran belanja modal Pemerintah dan BUMN mengungkit investasi swasta, khususnya dengan operasional Danantara. Secara keseluruhan, kinerja ini memperkuat struktur modal nasional untuk mendukung keberlanjutan momentum pertumbuhan ekonomi tinggi.

Kinerja **Ekspor** barang dan jasa riil pada kuartal IV tumbuh 3,25% (yoy), meningkat 7,03% secara tahunan. Peningkatan ekspor terutama bersumber dari ekspor minyak hewan dan nabati, besi dan baja, serta mesin dan peralatan elektronik. Ekspor jasa turut menguat seiring meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia yang tumbuh 12,5%. Di sisi lain, impor barang dan jasa riil tumbuh 3,96% pada kuartal IV (yoy) dan 4,77% secara tahunan, terutama untuk kebutuhan bahan baku dan barang modal pendukung aktivitas produksi.

Dari sisi produksi, **Sektor Manufaktur** ekspansif dengan pertumbuhan 5,40% (yoy) pada kuartal IV dan tumbuh kuat 5,30% sepanjang 2025. Kinerja tersebut selaras dengan Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur yang terus ekspansif. Selain permintaan domestik yang kuat, pulihnya permintaan global turut berkontribusi, terutama pada subsektor strategis berbasis hilirisasi dan penguatan daya saing industri. **Industri Makanan dan Minuman tumbuh** 6,38% di 2025, seiring meningkatnya produksi CPO dan produk turunannya. Sementara itu, **Industri Logam Dasar** tumbuh 15,71% didukung tingginya permintaan ekspor produk besi dan baja. **Industri Mesin dan Perlengkapan** tumbuh 13,98%, sejalan dengan meningkatnya permintaan domestik dan global. **Sektor Perdagangan** sebagai kontributor terbesar kedua tumbuh 6,07% pada kuartal IV dan mencapai 5,49% full year, didorong pasokan barang domestik dan impor untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan dunia usaha.

Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mencatat pertumbuhan hingga 5,14% (yoy) pada kuartal IV dan tumbuh 5,33% sepanjang 2025, terutama didorong oleh kinerja

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

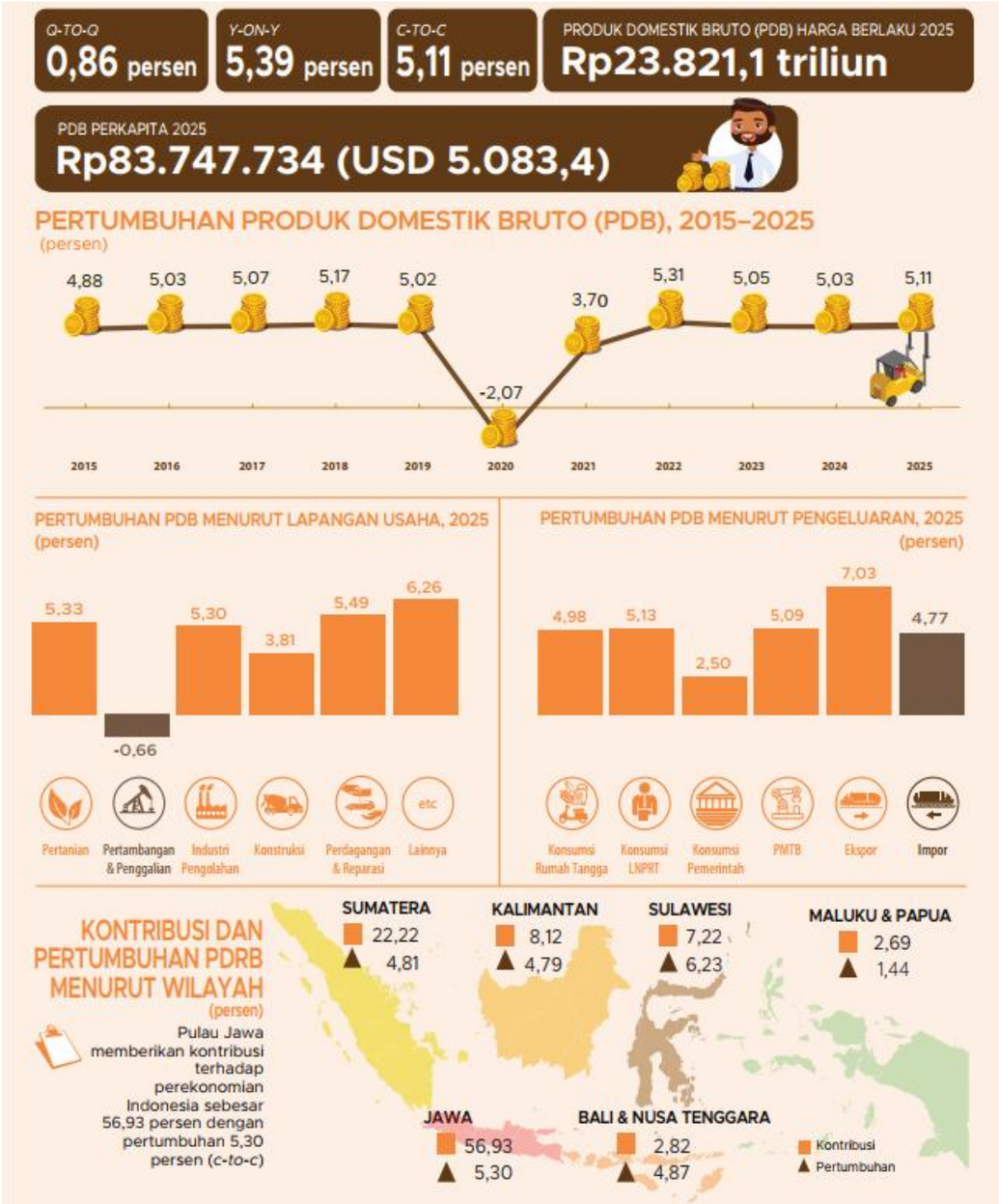
subsektor tanaman pangan (9,94% di 2025) didukung peningkatan produksi padi dan jagung. Sementara meningkatnya sektor peternakan (7,78%) didorong peningkatan produksi telur dan daging ayam antara lain untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2025. Kinerja sektor ini turut didukung pemangkasan 145 regulasi distribusi pupuk.

Sektor terkait mobilitas masyarakat menunjukkan kinerja yang kuat. **Sektor Transportasi** mencatatkan pertumbuhan tinggi 8,98% (yoy) pada kuartal IV dan 8,78% full year, sementara **sektor Akomodasi dan Makan Minum** tumbuh tinggi 7,15% pada kuartal IV dan 7,41% sepanjang tahun. Penguatan kinerja tersebut sejalan dengan meningkatnya mobilitas masyarakat, khususnya pada libur Nataru yang turut didukung stimulus diskon tarif angkutan serta peningkatan jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara. **Sektor Informasi dan Komunikasi** tumbuh 8,09% (yoy) pada kuartal IV dan 8,35% sepanjang tahun, didorong peningkatan trafik komunikasi data untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan bisnis, serta kenaikan penetrasi internet di Indonesia. Sementara itu, **Sektor Pertambangan** menjadi satu-satunya sektor yang terkontraksi di kuartal IV sebesar 1,31% (yoy) dan 0,66% sepanjang 2025. Kontraksi dipengaruhi beberapa faktor, antara lain keberlanjutan kebijakan hilirisasi dan penurunan harga komoditas.

Secara spasial, aktivitas ekonomi di seluruh wilayah Indonesia tumbuh positif sepanjang tahun 2025. Wilayah Sulawesi mencatatkan pertumbuhan tertinggi di 6,23%, didorong aktivitas hilirisasi mineral yang terus ekspansif. Pulau Jawa, sebagai pusat aktivitas ekonomi, mencatat pertumbuhan 5,30%; ditopang kuatnya kinerja sektor manufaktur, perdagangan, dan infokom. Sementara itu, wilayah Sumatera dan Kalimantan tumbuh moderat, masing-masing 4,81% dan 4,79% ditunjang oleh industri manufaktur dan pertanian. Di sisi lain, Bali dan Nusa Tenggara tumbuh 4,87%, sejalan dengan perbaikan sektor pariwisata dan meningkatnya kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara. Wilayah Maluku dan Papua mengalami pertumbuhan 1,44% dipengaruhi kinerja sektor pertambangan.

Dengan kinerja ekonomi 2025, Pemerintah optimis ekonomi di 2026 tumbuh 5,4%. Konsumsi rumah tangga yang kuat, belanja berkualitas, kinerja eksternal yang kompetitif, serta investasi lebih tinggi dengan kontribusi swasta lebih besar menjadi basis. "Pemerintah terus mencermati dinamika ke depan dan memastikan kebijakan fiskal tetap dikelola secara hati-hati dan kredibel. Kebijakan fiskal terus diselaraskan dengan kebijakan sektor keuangan dan meningkatkan peran swasta. Seluruh mesin pertumbuhan harus bergerak selaras mendukung pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



Gambar 3. 1. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2025

Dalam rangka mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, maka kebijakan fiskal akan terus didorong agar lebih sehat, kredibel dan berkesinambungan dalam jangka menengah–panjang. Hal tersebut ditempuh dengan mengakselerasi transformasi ekonomi-sosial antara lain melalui: (i) penguatan SDM; (ii) hilirisasi dan transformasi ekonomi hijau; (iii) melanjutkan pembangunan infrastruktur; dan (iv) penguatan institusional serta simplifikasi regulasi. Agar transformasi ekonomi-sosial dapat berjalan efektif, perlu disertai reformasi fiskal yang komprehensif dalam rangka optimalisasi penerimaan negara, peningkatan kualitas belanja, dan mendorong pembiayaan inovatif.

Tabel 3. 1. Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM) Tahun 2027

No	Indikator	Satuan	Target 2027
1.	Pertumbuhan Ekonomi	%, (yoy)	5,6 – 6,1
2.	Inflasi	%, (yoy)	1,5 – 3,5
3.	Nilai Tukar Rupiah	Rp/USD	15.700 – 16.900

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator	Satuan	Target 2027
4.	*Yield* SBN 10 Tahun	%	6,3 – 7,3
5.	Harga Minyak Mentah Indonesia/ICP	USD/barel	60 – 80
6.	Lifting Minyak	rbph	568 - 696
7.	Lifting Gas	rbsmph	904 – 1.118

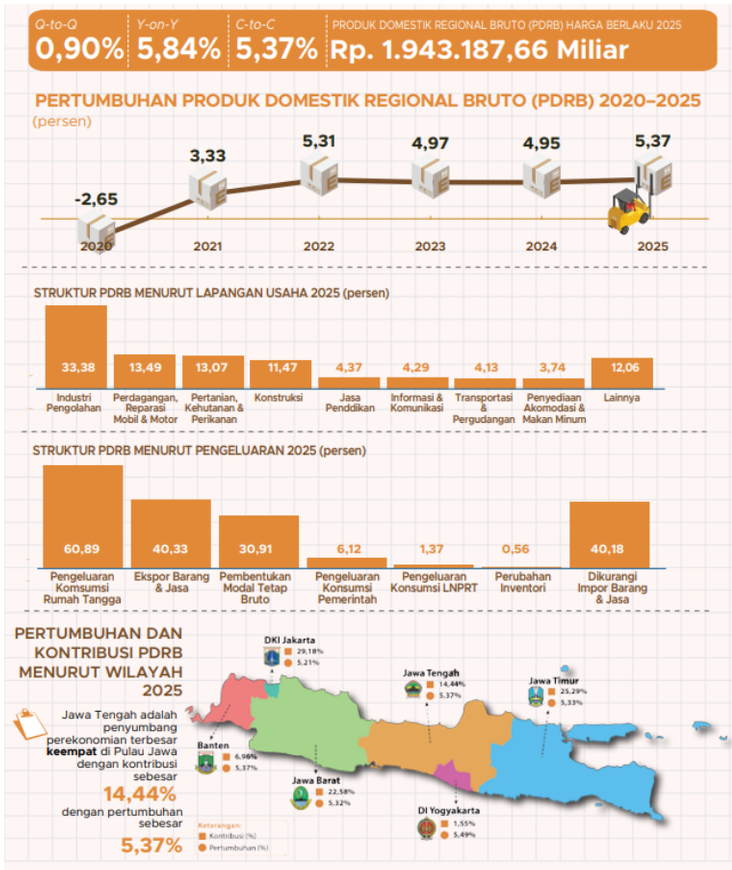
Sumber: KEM PPKF tanggal 21 Mei 2025

3.1.3. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Tengah

3.1.3.1. Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2025

Perekonomian Jawa Tengah pada tahun 2025 tercatat mengalami pertumbuhan positif, yaitu sebesar 5,37 persen, meningkat dibandingkan capaian pada tahun 2024 yang tumbuh 4,95 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yaitu sebesar 10,60 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, kenaikan tertinggi dicatat oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa (termasuk Ekspor Antar Daerah) yaitu sebesar 10,04 persen.

Gambar 3. 2. Pertumbuhan PDRB Jawa Tengah Tahun 2025



Sumber : Berita Resmi Statistik No. 11/02/33/Th.XX, BPS

Secara struktur, lapangan usaha Industri Pengolahan mendominasi struktur ekonomi Jawa Tengah pada tahun 2025 dengan kontribusi sebesar 33,38 persen, sedangkan dari sisi pengeluaran didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) dengan kontribusi sebesar 60,89 persen.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Laju pertumbuhan ini sedikit lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional pada periode yang sama (sekitar 5,11 %), yang menandakan performa ekonomi Jawa Tengah cukup baik dibandingkan rata-rata Indonesia.

Proyeksi Pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2027 diarahkan pada *"Mengembangkan pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi"*. Pembangunan perekonomian Jawa Tengah tahun 2027 diarahkan pada penguatan daya saing dan ketahanan ekonomi daerah, menciptakan pertumbuhan yang inklusif, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata, dengan fokus pada :

a. **Penguatan sektor unggulan daerah**, terutama **industri pengolahan, pertanian bernilai tambah, perdagangan, dan jasa**, sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi.
b. **Pengembangan pariwisata berkelanjutan dan ekonomi kreatif** sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru yang inklusif dan berbasis potensi lokal.
c. **Pemberdayaan dan penguatan UMKM** melalui peningkatan akses pembiayaan, pemasaran, digitalisasi, dan integrasi ke dalam rantai pasok industri.
d. **Peningkatan investasi dan iklim usaha** dengan mendorong kemudahan berusaha, pengembangan kawasan industri, serta kepastian regulasi.
e. **Peningkatan nilai tambah dan hilirisasi produk daerah** agar hasil pertanian, industri, dan sumber daya lokal memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.
f. **Pemerataan pertumbuhan ekonomi antarwilayah** melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan penguatan konektivitas wilayah.
g. **Penguatan ekonomi hijau dan ketahanan ekonomi daerah** untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan adaptif terhadap dinamika ekonomi global

3.1.4. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Kota Salatiga

Pertumbuhan Ekonomi ekonomi Kota Salatiga tahun 2025 mengalami pertumbuhan sebesar 5,98%. Pertumbuhan terbesar terjadi pada sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 10,56 persen sedangkan kontraksi tertinggi terjadi pada sektor Pertambangan dan Penggalian yakni sebesar -45,82 persen. Sektor Industri Pengolahan memberikan sumbangan tertinggi terhadap ekonomi Kota Salatiga yaitu sebesar 33,05 persen, dengan laju pertumbuhan sebesar 5,71 persen. Sektor Konstruksi dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor merupakan sektor yang memberikan sumbangan yang cukup signifikan yaitu masing-masing sebesar 13,51% dan 15,54% dengan pertumbuhan sebesar 5,53 dan 4,33%.

Arah kebijakan ekonomi daerah Kota Salatiga Tahun 2027 difokuskan pada penguatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan, melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan sektor unggulan perkotaan, serta perluasan kesempatan kerja. Kebijakan diarahkan untuk mengoptimalkan peran sektor perdagangan, jasa, UMKM, ekonomi kreatif, dan pariwisata perkotaan, sebagai motor penggerak utama perekonomian daerah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Selain itu, Pemerintah Kota Salatiga mendorong penguatan iklim investasi dan kemudahan berusaha, khususnya bagi usaha mikro dan kecil, melalui penyederhanaan perizinan, pendampingan usaha, serta penguatan akses pembiayaan dan pemasaran. Pengembangan ekonomi berbasis inovasi dan digitalisasi juga menjadi prioritas untuk meningkatkan produktivitas pelaku usaha dan daya saing ekonomi lokal.

Dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi daerah, kebijakan ekonomi Tahun 2027 juga diarahkan pada pengendalian inflasi daerah, penguatan ketahanan pangan perkotaan, serta peningkatan keterpaduan rantai distribusi barang dan jasa. Selanjutnya, arah kebijakan ekonomi diarahkan untuk mendorong penciptaan lapangan kerja dan penurunan tingkat pengangguran, melalui pengembangan kewirausahaan, peningkatan keterampilan tenaga kerja, dan sinergi dengan dunia usaha dan dunia pendidikan.

Arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan, peningkatan kualitas lingkungan perkotaan, serta penguatan kolaborasi antar pemangku kepentingan guna memastikan pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga yang merata dan berkeadilan pada Tahun 2027.

Dengan melihat kondisi perekonomian tahun 2025, dan target pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga tahun 2026, maka perekonomian Kota Salatiga Tahun 2027 masih akan menghadapi sejumlah tantangan akibat dari pengaruh melemahnya ekonomi global. Tantangan yang akan dihadapi :

1) Kinerja perdagangan dan aktivitas usaha di daerah yang dipengaruhi oleh permintaan terhadap produk industri dan jasa.
2) Ketidakpastian global dan volatilitas harga (energi, pangan, dan komoditas), yang dapat meningkatkan biaya produksi serta menimbulkan tekanan inflasi daerah.
3) Terbatasnya arus investasi dan pembiayaan usaha, terutama akibat kondisi keuangan global yang ketat, sehingga dapat menghambat ekspansi usaha dan penciptaan lapangan kerja.
4) Ketahanan daya beli masyarakat yang masih rentan, khususnya pada kelompok menengah ke bawah, seiring potensi kenaikan harga kebutuhan pokok.
5) Kesenjangan keterampilan tenaga kerja, terutama dalam sektor jasa modern dan ekonomi digital, yang berpotensi menahan peningkatan produktivitas dan daya saing daerah.
6) Keterbatasan kapasitas fiskal daerah, yang membatasi ruang fiskal pemerintah daerah dalam memberikan stimulus ekonomi dan mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung pertumbuhan.
7) Persaingan antar daerah yang semakin ketat dalam menarik investasi, wisatawan, dan talenta, khususnya di wilayah perkotaan dan kawasan strategis.
8) Kerentanan sektor pertanian dan pangan perkotaan terhadap perubahan iklim, yang berpotensi mengganggu pasokan dan stabilitas harga pangan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Berdasarkan kondisi perekonomian saat ini, serta memperhatikan tantangan dan peluang ke depan, maka perekonomian Kota Salatiga dapat digambarkan capaian pada tahun 2022, 2023, 2024, 2025, proyeksi 2026 dan Target 2027 sebagaimana tertuang dalam Tabel 3.3. berikut.

Tabel 3. 2. Capaian Perkembangan Ekonomi tahun 2023, 2024, 2025 dan Target Perkembangan Ekonomi Tahun 2026 dan proyeksi tahun 2027

No	Indikator	CAPAIAN 2023	CAPAIAN 2024	CAPAIAN 2025	PROYEKSI 2026	TARGET 2027
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,34	5,37	5,98	5,56-6,56	6,10-7,95
2	Tingkat Kemiskinan (%)	4,66	4,57	4,20	4,34-4,20	3,87-3,52
3	TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) (%)	4,57	3,86	3,67	3,84-3,54	3,82-3,52
4	Indeks Pembangunan Manusia	84,99	85,72	86,23	86,43	87,63

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan daerah adalah pedoman untuk mengelola seluruh hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, hingga pengawasan keuangan untuk mencapai tujuan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Kebijakan ini memastikan pengelolaan dana daerah berjalan baik dan bermanfaat maksimal bagi publik sesuai undang-undang yang berlaku. Kebijakan keuangan daerah tidak lepas dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat. Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disusun setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Secara umum kebijakan keuangan daerah difokuskan pada pembiayaan pembangunan yang bersifat investasi dan strategis serta pembiayaan pembangunan dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang program-program yang didasarkan pada kebutuhan riil dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan memegang prinsip-prinsip akuntabilitas, maka arah kebijakan keuangan daerah dijabarkan dalam kebijakan pendapatan, kebijakan belanja dan kebijakan pembiayaan

3.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang meliputi komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pendapatan yang Sah. Pendapatan daerah merupakan unsur penting dalam mendukung penyediaan kebutuhan belanja daerah yang diharapkan dapat memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi yang akan memberikan konsekuensi logis bagi peningkatan potensi penerimaan daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2025 tentang Peta kapasitas Fiskal Daerah, Kota Salatiga masuk kategori kapasitas fiskal daerah tinggi. Sesuai dengan data realisasi APBD, realisasi pendapatan Kota Salatiga pada tahun 2024 (*audited)* sebesar Rp1.038.143.488.453,00 (101,59%); realisasi tahun 2025 sebesar Rp1.057.809.883.405,00 (101,68%); proyeksi pendapatan tahun 2026 sebesar Rp865.843.871.878,00, serta proyeksi pendapatan tahun 2027 adalah sebesar Rp777.074.654.529,00. Berdasarkan realisasi pada tahun 2025, pendapatan daerah Kota Salatiga masih bertumpu pada pendapatan transfer pusat sebesar 60,70%, sedangkan PAD hanya menyumbang sekitar 33,02%. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Salatiga masih sangat tergantung pada Pemerintah Pusat dalam membiayai pembangunannya. Oleh karena itu, dalam merumuskan kebijakan yang terkait dengan Pendapatan untuk APBD Tahun Anggaran 2027 perlu benar-benar memperhatikan arah kebijakan Pemerintah pusat berkaitan dengan dana transfer dan upaya-upaya yang akan ditempuh sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

3.2.1.1 Kebijakan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dalam penyusunan RKPD Tahun 2027, perencanaan pendapatan daerah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

a) PAD dihitung dengan memperhatikan pendapatan selama 2 tahun terakhir dan perkiraan masing-masing potensi jenis pendapatan daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta mempertimbangkan potensi riil.
b) Kebijakan opsen pajak, menjadi salah satu komponen pendapatan daerah yang diproyeksikan dalam perencanaan pendapatan;
c) Asumsi Pendapatan Transfer untuk Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada Dana Perimbangan tidak memproyeksikan DAK dan Insentif Fiskal, sedangkan Pendapatan Transfer Antar Daerah tidak memproyeksikan Bantuan Keuangan Provinsi.

Sumber pendapatan daerah yang merupakan cerminan kemandirian daerah dalam melakukan pembiayaan pembangunan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Proporsi target Pendapatan Asli Daerah terhadap total target Pendapatan Daerah Kota Salatiga menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah Kota Salatiga dalam penyelenggaraan otonomi daerah masih belum dapat berjalan optimal dilihat dari sisi pendapatan asli daerah. Oleh karena itu pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah daerah yang dipisahkan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

harus terus digali potensinya, tanpa harus memberatkan dunia usaha, dengan berbagai regulasi dan kebijakan daerah.

Secara keseluruhan, pada tahun 2025 realisasi pendapatan asli daerah melebihi target yang telah ditetapkan, dengan capaian 104,68%, dengan proporsi terbesar pada Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dengan kontribusi sebesar 114,35%. Gambaran target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Salatiga tahun 2025, Target Pendapatan Asli Daerah tahun 2026 dan Proyeksi Pendapatan Asli Daerah tahun 2027 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut

Tabel 3. 3. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025, Target Pendapatan Tahun 2026 dan Proyeksi Pendapatan Tahun 2027

Kode	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Anggaran 2026	Proyeksi Anggaran 2027
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**333.657.921.500**	**349.261.106.811**	**104,68%**	**324.861.630.878**	**322.417.267.529**
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	114.000.000.000	124.494.504.885	109,21%	111.820.000.000	107.030.000.000
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	181.688.836.367	183.381.306.904	100,93%	179.031.738.900	184.145.031.052
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	23.891.948.700	27.320.556.073	114,35%	24.866.077.000	24.289.634.192
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	14.077.136.433	14.064.738.949	99,91%	9.143.814.978	6.952.602.285

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa :

1. Proyeksi pendapatan asli daerah yang bersumber dari pendapatan retribusi daerah direncanakan meningkat pada tahun 2027 seiring dengan naiknya pendapatan BLUD Rumah Sakit yang merupakan komponen utama restribusi pelayanan kesehatan;
2. Proyeksi untuk pendapatan pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah direncanakan turun, disebabkan oleh :
   a. Pajak

      Pada Tahun 2027 Pemerintah Kota Salatiga memproyeksikan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pajak daerah tetap menunjukkan tren positif, meskipun terdapat beberapa jenis pajak yang diperkirakan mengalami perlambatan pertumbuhan maupun penyesuaian target dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh dinamika pertumbuhan ekonomi daerah, perubahan pola konsumsi masyarakat, perkembangan digitalisasi usaha, serta fluktuasi aktivitas sektor jasa dan properti.

      Berdasarkan proyeksi Tahun 2027, beberapa jenis pajak daerah yang diperkirakan mengalami perlambatan atau penurunan target antara lain Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sektor jasa perhotelan yang diproyeksikan tetap sebesar Rp5 miliar, dipengaruhi oleh tingkat hunian hotel dan dinamika sektor pariwisata. Selain itu Pajak Parkir diproyeksikan tetap sebesar Rp200 juta, sedangkan PBJT jasa kesenian dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

hiburan diproyeksikan menurun dari Rp870 juta menjadi Rp830 juta seiring penyesuaian aktivitas hiburan dan daya beli masyarakat.

Pada sektor pajak terkait kendaraan bermotor, Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) diproyeksikan mengalami penyesuaian dari Rp10 miliar menjadi Rp8,5 miliar yang dipengaruhi oleh fluktuasi transaksi kendaraan bermotor baru maupun bekas. Sementara itu beberapa jenis pajak lainnya diproyeksikan mengalami pertumbuhan moderat, seperti Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, PBB-P2, serta PBJT makanan dan minuman dan tenaga listrik

b. Pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (Deviden) diproyeksikan turun dari APBD tahun 2026 karena Bank Jateng, PDAU dan PDAM belum bisa menganalisa secara utuh akan proyeksi 2027. Adapun hasil perhitungan atas proyeksi 2027 nantinya dituangkan dalam kertas kerja yang akan digunakan pada proses pembahasan rancangan akhir RKPD maupun KUA PPAS.

c. Lain-lain PAD

Lain-Lain PAD yang Sah jika dibandingkan dengan APBD 2026 turun ada pada rincian antara lain:

1) Sewa BMD dengan skenario perikatan lebih dari 1 tahun maka perhitungan proyeksi 2027 tdk akan sama dengan 2026 karena pembayaran untuk perikatannya akan terjadi di tahun 2026 dan 2028.
2) Jasa Giro, melihat trend pendapatan transfer yang turun makan di proyeksikan uang yang mengalir di setiap bulannya di daerah pun juga akan mengalami penurunan sehingga mempengaruhi besaran bunga giro kasda yang akan diperoleh
3) Pendapatan Bunga deposito, dengan melihat trend pendapatan transfer yang selalu turun maka akan mempengaruhi arus kas yang idle sebagai bagian atas celah atau sisa dari serapan anggaran di setiap bulannya pada kas daerah, maka posisi perhitungan proyeksi penerimaan bunga deposito pun juga akan memiliki implikasi terhadap penurunan.
4) Pendapatan BLUD yang ada di PUSKESMAS, KPM dan RSUD khususnya pelayanan Kesehatan sekarang sudah menjadi pencatatan pendapatan pada Retribusi Daerah, Retribusi Jasa Umum, Retribusi Pelayanan Kesehatan. Tertinggal sebagai pendapatan BLUD adalah Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain, Pendapatan BLUD dari Jasa Giro, Pendapatan BLUD dari Pendapatan Bunga dan Pendapatan BLUD dari Komisi, Potongan ataupun Bentuk Lain sebagai Akibat dari Penjualan dan/atau Pengadaan Barang dan/atau Jasa oleh BLUD

Rencana kebijakan pendapatan asli daerah tahun 2027 antara lain sebagai berikut :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1) Penguatan sistem pelayanan perpajakan berbasis digital, peningkatan kepatuhan wajib pajak, penguatan pengawasan dan validasi data perpajakan, serta intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah secara berkelanjutan;
2) Pengoptimalkan pelayanan pajak melalui digitalisasi dan inovasi, memperbaiki akurasi data wajib pajak, serta memperkuat basis pajak menjadi salah satu kebijakan yang perlu dilaksanakan untuk optimalisasi PAD
3) Optimalisai pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4) Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah;
5) Melakukan evaluasi terhadap perkembangan realisasi pendapatan daerah secara berkala agar target pendapatan daerah tetap realistis, adaptif terhadap kondisi ekonomi, serta mampu menjaga stabilitas kapasitas fiskal daerah dalam mendukung prioritas pembangunan daerah Tahun 2027
6) Peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
7) Mengembangkan alternatif-alternatif pembiayaan pembangunan selain dari APBD, yaitu melalui mekanisme Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR);
8) Penguatan sinergi pemungutan Opsen PKB dan BBNKB antara Provinsi dan Kabupaten/Kota, hal ini untuk memberikan kepastian penerimaan kepada pemerintah kabupaten/kota dengan tidak menambah beban Wajib Pajak, antara lain :
    a) Melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak, pemanfaatan digitalisasi pelayanan perpajakan daerah, peningkatan koordinasi lintas instansi, serta optimalisasi pendataan objek dan subjek pajak kendaraan bermotor
    b) Pemerintah Kota Salatiga berkomitmen melaksanakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan dukungan penganggaran sinergitas sebesar 1% dari realisasi penerimaan opsen pajak daerah sesuai kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan

        Penganggaran sinergitas tersebut diarahkan untuk mendukung program pembangunan bersama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah daerah lainnya, khususnya dalam penguatan konektivitas wilayah, pengembangan ekonomi regional, peningkatan pelayanan publik, penguatan infrastruktur, serta dukungan terhadap program strategis nasional dan prioritas pembangunan provinsi.

        Peningkatan efektivitas pelaksanaan program sinergitas melalui penguatan koordinasi, sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, percepatan pelaksanaan kegiatan, serta penguatan komitmen seluruh pihak dalam pelaksanaan PKS secara optimal dan berkelanjutan
9) *Law enforcement*/penegakan hukum dalam proses penagihan piutang dan *cleansing* data piutang pajak daerah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3.2.1.2 Kebijakan Pendapatan Transfer

Komponen Pendapatan Daerah yang berasal dari Pendapatan transfer antar daerah dari komponen bantuan keuangan provinsi diproyeksikan menurut usulan belanja bantuan keuangan, yang nantinya apabila alokasi bantuan keuangan Provinsi Jawa Tengah telah ditetapkan maka proyeksi pendapatan akan dikoreksi dan disesuaikan dengan ketetapan alokasinya. Demikian halnya untuk komponen dana alokasi khusus, DBHCHT dan dana insentif fiskal akan menyesuaikan dengan ketetapan alokasinya.

Pemerintah daerah menganggarkan pendapatan yang bersumber dari Transfer Ke Daerah (TKD) berdasarkan alokasi yang ditetapkan setiap tahunnya dalam Undang-undang mengenai APBN dengan rincian alokasi TKD menurut provinsi dan kabupaten/kota yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden dan juga berdasarkan informasi resmi yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam ketentuan tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun sebelumnya. Hal ini dilakukan agar terdapat sinkronisasi dalam melaksanakan proyeksi pendapatan yang tercantum dalam dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran. Namun mengingat belum terdapat penetapan alokasi Transfer Ke Daerah (TKD) untuk tahun anggaran 2027, maka sesuai dengan kaedah penyusunan anggaran seperti halnya dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026, maka dalam merencanakan besaran alokasi pendapatan transfer dengan berdasarkan alokasi dana transfer tahun sebelumnya, dengan tetap memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan Negara tahun sebelumnya.

Tabel 3. 4. Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2025, Target Tahun 2026 dan Proyeksi Tahun 2027

Kode	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Anggaran 2026	Proyeksi Anggaran 2027
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**704.804.248.000**	**705.334.018.585**	**100,08%**	**540.982.241.000**	**454.657.387.000**
4.2.01	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	645.991.430.000	651.030.414.525	100,78%	494.778.301.000	411.687.356.000
4.2.01.06	Insentif Fiskal	8.989.406.000	8.989.406.000	100%	0	0
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	35.089.157.000	34.009.365.300	96,92%	15.956.096.000	15.956.096.000
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	482.599.097.000	490.663.970.136	101,67%	395.731.260.000	395.731.260.000
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	119.313.770.000	117.367.673.089	99,37%	83.090.945.000	0
4.2.02	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	58.812.818.000	54.303.604.060	92,33%	44.590.940.000	42.970.031.000
4.2.02.01	Dana Bagi Hasil	47.886.318.000	44.234.941.060	92.37%	44.590.940.000	42.970.031.000
4.2.01.02	Bantuan Keuangan	10.926.500.000	10.068.663.000	92.15%	0	0

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1. Pada rencana atau target pendapatan transfer pemerintah pusat Tahun 2027, disusun dengan mempertimbangkan hal-hal antara lain :
   a) Insentif fiskal pada tahapan penyusunan RKPD 2027 tidak direncanakan
   b) Dana bagi hasil direncanakan sama dengan alokasi tahun 2026 yaitu sebesar Rp16.519.286.000,00
   c) Dana Alokasi Umum (DAU) direncanakan sama dengan tahun 2025 dengan alokasi sebesar Rp395.731.260.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
      - DAU yang tidak ditentukan penggunaannya Rp380.800.510.000,00
      - DAU yang ditentukan penggunaannya Rp4.600.000.000,00 untuk Pendanaan Kelurahan
      - DAU untuk Dana Kelurahan Rp10.330.750.000,00
   d) Dana Alokasi Khusus (DAK) belum dialokasikan rencana anggarannya
2. Pada pendapatan transfer antar daerah sesuai ketentuan yang berlaku hanya menganggarkan Dana Bagi hasil dengan mengacu kepada penganggaran tahun 2026, sedangkan Bantuan Keuangan belum direncanakan.

3.2.1.3 Kebijakan Pendapatan Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, terdiri dari pendapatan hibah, Pendapatan Darurat dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Kota Salatiga pada tahun 2027 tidak memproyeksikan pendapatan yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan yang Sah, karena Pemerintah Kota Salatiga belum mendapatkan alokasi pendapatan hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan kebijakan pendapatan baik pendapatan asli daerah, pendapatan transfer maupun lain-lain pendapatan yang sah, maka secara keseluruhan Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Salatiga Tahun 2027 sebagaimana tersaji dalam di bawah ini.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 3. 5. Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Salatiga Tahun 2027

Kode	Uraian	Pendapatan		
		Realisasi 2025	Target 2026	Proyeksi 2027
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**349.261.106.811**	**324.861.630.878**	**322.417.267.529**
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	124.494.504.885	111.820.000.000	107.030.000.000
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	183.381.306.904	179.031.738.900	184.145.031.052
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	27.320.556.073	24.866.077.000	24.289.634.192
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	14.064.738.949	9.143.814.978	6.952.602.285
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**705.334.018.585**	**539.932.431.000**	**454.657.387.000**
4.2.01	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	642.041.008.525	495.341.491.000	411.687.356.000
4.2.01.06	Insentif Fiskal	8.989.406.000	0	0
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	33.051.578.300	16.098.890.000	15.956.096.000
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	490.663.970.136	395.731.260.000	395.731.260.000
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	117.367.673.089	83.090.945.000	0
4.2.02	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	54.303.604.060	44.590.940.000	42.970.031.000
4.2.02.01	Dana Bagi Hasil	54.303.604.060	44.590.940.000	42.970.031.000
4.2.01.02	Bantuan Keuangan	0	0	0
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**3.214.758.009**	**0**	**0**
4.3.01	Pendapatan Hibah	1.373.591.671	0	0
4.3.02	Pendapatan Dana Darurat	1.841.166.338	0	0
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0
Jumlah Pendapatan Daerah		**1.057.809.883.405**	**864.794.061.878**	**777.074.654.529**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3.2.2. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan (Permendagri Nomor 86 tahun 2017 Pasal 1 ayat 40). Analisis Belanja Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Klasifikasi belanja daerah berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

Kebijakan belanja daerah disusun untuk mencapai visi, misi, sasaran dan tujuan pembangunan daerah yang difokuskan pada program dan kegiatan yang didanai dari penerimaan daerah. Belanja daerah pada tahun anggaran 2027, dialokasikan pada setiap perangkat daerah yang besarannya ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan yang difokuskan pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan serta tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah.

Alokasi belanja daerah RKPD Tahun 2027 diarahkan pada pengelolaan belanja daerah yang dilaksanakan secara proporsional, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel dalam rangka pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Arah kebijakan pengelolaan belanja daerah tahun 2027 diarahkan pada prioritas sebagai berikut :

1) Pemenuhan belanja yang bersifat *mandatory spending* antara lain : pendidikan (20%), kesehatan (10%), infrastruktur pelayanan publik (40%), dan Pengawasan (1%);
2) Pemenuhan belanja pegawai yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maksimal 30% pada tahun 2027 melalui penguatan kinerja pegawai dengan memaksimalkan potensi SDM pegawai sesuai dengan analisa jabatan dan analisa beban kerja;
3) Pemenuhan belanja untuk Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah diatur dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, yang terdiri dari 6 urusan yaitu Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
4) Pemenuhan program prioritas Wali kota yang tertuang dalam penjabaran visi dan misi RPJMD Tahun 2025-2029;
5) Penyelesaian permasalahan dan isu strategis daerah;
6) Dukungan terhadap prioritas nasional dan arahan presiden.

Berdasarkan kemampuan keuangan daerah tahun 2027 serta prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2027, maka kebijakan belanja daerah yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

a) Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Peningkatan Belanja Daerah yang Produktif, Efektif dan Efisien dengan memprioritaskan belanja daerah untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang memiliki daya ungkit tinggi dalam pencapaian indikator pembangunan daerah. Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

b) Prioritas

Penggunaan anggaran tahun 2027 diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang menjadi isu strategis pembangunan daerah. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat mengacu Standar Pelayanan Minimal, mengalokasikan belanja yang bersifat wajib dan mengikat guna menjamin kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat dan memenuhi alokasi minimal *mandatory spending* yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan diantaranya fungsi pendidikan dan fungsi kesehatan serta memenuhi alokasi minimal untuk belanja infrastruktur daerah.

c) Tolok Ukur dan target Kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sehingga alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur

d) Optimalisasi Belanja Modal

Belanja modal diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja modal disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja modal untuk pembangunan infrastruktur publik yang memungkinkan dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta.

e) Transparan dan Akuntabel

Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pertanggung jawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasilnya. Pelaksanaan tertib administrasi pencatatan keuangan yang diatur dalam kebijakan akuntansi untuk memperoleh laporan keuangan yang memenuhi prinsip transparansi dan akuntabel serta sesuai dengan SAP.

f) Kesesuaian Kegiatan dengan Sumber Pembiayaan

Alokasi anggaran belanja untuk kegiatan-kegiatan yang sudah jelas sumber pembiayaannya seperti dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCHT), Dana Insentif Fiskal dan Dana Hibah harus sudah seimbang dengan target penerimaannya dan sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan dana tersebut.

g) Kesesuaian dengan Peraturan perundang-undangan

Mengimplementasikan ketentuan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Dalam mekanisme implementasi belanja daerah memanfaatkan sistem informasi dalam mengimplementasikannya sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja dan /atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Peningkatan sinergitas kebijakan fiskal pusat dan daerah serta harmonisasi belanja pusat dan daerah.

Mengalokasikan belanja daerah yang telah ditentukan penggunaannya, dianggarkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

h) Keselarasan dan sinkronisasi

Memperhatikan dan melaksanakan sinkronisasi program prioritas Daerah dengan prioritas provinsi dan prioritas nasional.

Selanjutnya, dengan memperhatikan target pendapatan daerah, realisasi belanja tahun 2025, target belanja tahun 2026 serta berpedoman pada prioritas pembangunan untuk mendukung pencapaian target-target kinerja dalam perencanaan, maka proyeksi belanja tahun 2027 sebagaimana tersaji pada tabel sebagai berikut :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 3. 6. Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2025, Target Tahun 2026 dan Proyeksi Tahun 2027

Kode	Uraian	Tahun 2025			Target Belanja 2026	Proyeksi Belanja 2027
		Anggaran	Realisasi	%		
5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.001.171.576.349**	**914.179.929.481**	**91,31%**	**828.631.007.411**	**807.984.522.346**
5.1.01	Belanja Pegawai	468.476.794.553	436.075.782.480	93,08%	435.035.571.465	392.328.260.841
5.1.02	Belanja Barang	505.351.816.580	451.061.630.446	89,26%	364.918.447.730	408.748.761.505
5.1.03	Belanja Bunga	-	-	0,00%	-	-
5.1.04	Belanja Subsidi	165.000.000	147.815.000	89,58%	150.000.000	-
5.1.05	Belanja Hibah	26.748.915.216	26.618.601.555	99,51%	28.272.488.216	6.662.000.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	429.050.000	276.100.000	64,35%	254.500.000	245.500.000
5.2	**BELANJA MODAL**	**132.677.816.439**	**114.551.947.840**	**86,34%**	**59.163.054.467**	**45.916.480.938**
5.2.01	Belanja Tanah	1.664.899.115	1.299.823.380	78,07%	25.606.000.305	50.000.000
5.2.02	Belanja Peralatan dan Mesin	44.806.937.280	31.064.296.680	69,33%	15.304.156.640	8.111.219.897
5.2.03	Belanja Gedung dan Bangunan	38.480.934.733	37.375.988.955	97,13%	3.169.905.422	16.166.300.000
5.2.04	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	44.960.880.888	42.392.857.840	94,29%	12.834.111.500	20.237.500.341
5.2.05	Belanja Aset Tetap Lainnya	2.674.762.071	2.361.563.299	88,29%	1.687.888.300	1.351.460.700
5.2.06	Belanja Aset Lainnya	89.402.352	57.417.686	64,22%	560.992.300	-
5.3	**BELANJA TAK TERDUGA**	**1.000.000.000**	**288.090.000**	28,81%	**3.000.000.000**	**3.000.000.000**
5.3.01	Belanja Tak Terduga	1.000.000.000	288.090.000	28,81%	3.000.000.000	3.000.000.000
5.4	**BELANJA TRANSFER**	-	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	**1.134.849.392.788**	**1.029.019.967.321**	**90,67%**	**890.794.061.878**	**856.901.003.284**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3.2.3. Kebijakan Pembiayaaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah ini terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dan dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, jenis objek, dan rincian objek pembiayaan daerah.

Arah kebijakan pembiayaan daerah meliputi kebijakan penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan Penerimaan pembiayaan daerah yanga akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan penerimaan yang bersumber dari :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA);
b. pencairan dana cadangan;
c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
d. penerimaan pinjaman daerah;
e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah dan/atau;
f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Sementara itu, kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pengeluaran untuk pembiayaan :

a. pembayaran cicilan pokok piutang yang jatuh tempo;
b. penyertaan modal daerah;
c. pembentukan dana cadangan;
d. pemberian pinjaman daerah;
e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembiayaan neto merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan neto digunakan untuk menutup defisit anggaran.

Kebijakan defisit masih menggunakan kebijakan pemberian ruang pengalokasian program dan kegiatan yang diusulkan oleh Masyarakat melaui Musrenbang dan Anggota Dewan melalui Pokir serta alokasi Hibah yang sudah disesuaikan dengan arah kebijakan pembangunan tahun 2027. Selanjutnya pengalokasian anggaran disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang dituangkan dalam KUA PPAS serta analisis kemampuan fiskal oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. Untuk SILPA pada Struktur APBD dibuat sama dengan Defisit Belanja.

Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi kebijakan- kebijakan yang akan berdampak pada pos Penerimaan Pembiayaan Daerah, sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos Pengeluaran Pembiayaan Daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal.

Adapun Kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah di Kota Salatiga adalah sebagai berikut :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

   Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah di Kota Salatiga dilakukan sesuai regulasi dan memperhitungkan secara cermat dan rasional dan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun sebelumnya dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SILPA yang direncanakan. Perluasan akses terhadap alternatif pembiayaan untuk akselerasi pembangunan, memulai memanfaatkan alternatif pembiayaan seperti Pinjaman Daerah, KPBU, Sukuk Daerah.

   Penerimaan Pembiayaan antara lain:

   a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.
   b. Pencairan dana cadangan.
   c. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan.
   d. Pinjaman daerah.
   e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman.
   f. dan lainnya

2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

   Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah di Kota Salatiga diarahkan untuk meningkatkan kinerja Perusahaan Umum Milik Daerah (BUMD) yang bergerak pada sektor pelayanan kebutuhan dasar masyarakat dalam bentuk penyertaan modal daerah. Penyertaan modal kepada BUMD (Perusda) dilakukan secara bertahap. Penyertaan modal diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal. Kebijakan penyertaan modal di Kota Salatiga didasarkan pada analisis investasi dan kemampuan keuangan daerah sehingga dana publik yang diinvestasikan tidak memiliki risiko tinggi. Selain itu penyertaan modal perlu sejalan dengan rencana bisnis dan rencana pembangunan pemerintah daerah sehingga sinkron dengan concern pemerintah pusat untuk mendorong peran strategis BUMD dalam transformasi ekonomi sebagai *value creator* maupun *agent development*.

   Pengeluaran Pembiayaan antara lain :

   a. Pembentukan dana cadangan.
   b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah.
   c. Pembayaran pokok utang daerah.
   d. Pemberian pinjaman daerah
   e. dan lainnya

Perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah didasarkan pada realisasi dan pencapaian sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam 2 (dua) tahun terakhir, sehingga perkiraan/proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah untuk tahun rencana serta 1 (satu) tahun setelah tahun rencana adalah sebagaimana terinci pada tabel berikut ini.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 3. 7. Realisasi Anggaran Penerimaan Pembiayaan Tahun 2025, Target Tahun 2026 dan Proyeksi Tahun 2027

Kode	Uraian	Tahun 2025			Target Tahun 2026	Proyeksi 2027
		Anggaran	Realisasi	%		
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**94.546.057.288**	**94.546.057.288**		**26.000.000.000**	**0**
6.1.1	Penggunaan SILPA	94.546.057.288	94.546.057.288		26.000.000.000	0
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0	0			0
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0			0
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0			0
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemerian Pinjaman Daerah	0	0			0
6.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0	0			0
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**0**	**0**			**0**
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0	0			0
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0	0			0
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0	0			0
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0			0
6.2.5	Pemberian Dana Bergulir	0	0			0
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETO	**94.546.057.288**	**94.546.057.288**		**26.000.000.000**	**0**

Dengan memperhatikan target pendapatan daerah, proyeksi belanja daerah dan pembiayaan daerah, maka struktur APBD Kota Salatiga Tahun Anggaran 2026 digambarkan sebagaimana tabel berikut di bawah ini.

Tabel 3. 8. Struktur APBD Kota Salatiga Tahun 2027

Kode	Uraian	Proyeksi Anggaran 2027	Perkiraan Maju Tahun 2028
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**322.417.267.529**	**339.612.224.500**
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	107.030.000.000	116.930.275.000
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	184.145.031.052	185.894.408.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	24.289.634.192	27.787.541.500
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	6.952.602.285	9.000.000.000
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**454.657.387.000**	**457.250.546.000**
4.2.01	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	411.687.356.000	412.250.546.000
4.2.02	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	44.970.031.000	45.000.000.000
	JUMLAH PENDAPATAN	**777.074.654.529**	**796.862.770.500**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**807.984.522.346**	**868.321.191.370**
5.1.01	Belanja Pegawai	392.328.260.841	425.310.793.290
5.1.02	Belanja Barang	408.748.761.505	434.491.799.864
5.1.03	Belanja Bunga	0	0

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kode	Uraian	Proyeksi Anggaran 2027	Perkiraan Maju Tahun 2028
5.1.04	Belanja Subsidi	0	0
5.1.05	Belanja Hibah	6.662.000.000	8.251.548.216
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	245.500.000	267.050.000
5.2	**BELANJA MODAL**	**45.916.480.938**	**51.152.111.919**
5.2.01	Belanja Tanah	50.000.000	3.000.000.000
5.2.02	Belanja Peralatan dan Mesin	8.111.219.897	9.246.430.635
5.2.03	Belanja Gedung dan Bangunan	16.166.300.000	3.752.500.000
5.2.04	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	20.237.500.341	34.082.647.200
5.2.05	Belanja Aset Tetap Lainnya	1.351.460.700	1.070.534.084
5.2.06	Belanja Aset Lainnya	0	0
5.3	**BELANJA TAK TERDUGA**	**3.000.000.000**	**3.000.000.000**
5.3.01	Belanja Tak Terduga	3.000.000.000	3.000.000.000
5.4	**BELANJA TRANSFER**	0	0
	JUMLAH BELANJA	**856.901.003.284**	**922.473.303.289**
	Surplus/Defisit	**-79.826.348.755**	**-125.610.532.789**
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**0**	**0**
6.1.1	Penggunaan SILPA	0	0
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan		
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah		
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemerian Pinjaman Daerah		
6.1.6	Penerimaan Piutang Daerah		
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**		
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan		
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang		
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah		
6.2.5	Pemberian Dana Bergulir		
73	**JUMLAH PEMBIAYAAN NETO**	**0**	**0**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	**-79.826.348.755**	**-125.610.532.789**

Sedangkan komposisi dan persentase alokasi pagu indikatif anggaran Perangkat Daerah pada RKPD tahun 2027 adalah sebagaimana tabel ini.

Tabel 3. 9. Alokasi Pagu Perangkat Daerah Tahun 2027

No	Perangkat Daerah	PAGU OPD RKPD 2027
1	Dinas Pendidikan	118.629.834.105
2	Dinas Kesehatan	137.987.781.839
	Rumah Sakit Umum Daerah	156.000.000.000
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	49.680.239.149
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	21.171.297.914
5	Satuan Polisi Pamong Praja	11.886.681.517
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.763.004.678

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Perangkat Daerah	PAGU OPD RKPD 2027
7	Dinas Sosial	6.450.894.634
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	8.290.418.405
9	Dinas Pangan dan Pertanian	10.318.111.103
10	Dinas Lingkungan Hidup	33.098.401.899
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.117.924.211
12	Dinas Perhubungan	21.612.178.041
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	10.954.553.853
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	5.707.219.484
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.578.012.240
16	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	26.279.593.752
17	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	6.557.632.501
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6.768.413.395
19	Dinas Perdagangan	11.113.434.655
20	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	6.083.143.204
21	Sekretariat Daerah	40.182.047.525
22	Sekretariat DPRD	35.271.218.458
23	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	6.230.028.068
24	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	31.209.281.758
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	10.074.358.235
26	Inspektorat	7.780.927.359
27	Kecamatan Argomulyo	14.062.115.885
28	Kecamatan Sidomukti	11.423.896.665
29	Kecamatan Sidorejo	14.513.891.881
30	Kecamatan Tingkir	16.402.409.268
31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.702.057.603
	JUMLAH	**856.901.003.284**

Selain itu, untuk mendukung pemberdayaan masyarakat kelurahan baik secara pemenuhan sarana dan prasana fisik, kegiatan sosial, ekonomi dan kemasyarakatan dengan mengacu pada peraturan yang berlaku, Pemerintah Kota Salatiga pada RKPD 2027 mengalokasikan Dana Kelurahan. Adapun proyeksi Dana Kelurahan tahun 2026 sebagaimana Tabel alokasi Dana Kelurahan berikut di bawah ini.

Tabel 3. 10. Alokasi Pagu Dana Kelurahan Tahun 2027

NO	KELURAHAN	RKPD 2026	RAPBD 2026	PAGU 2027
A	**SIDOREJO**			
1	Blotongan	1.794.000.000	795.885.700	**905.250.000**
2	Sidorejo Lor	1.702.000.000	891.676.200	**858.750.000**
3	Salatiga	1.541.000.000	791.677.700	**858.750.000**
4	Bugel	644.000.000	408.454.600	**471.250.000**
5	Kauman Kidul	644.000.000	424.360.040	**471.250.000**
6	Pulutan	805.000.000	439.611.700	**517.750.000**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	KELURAHAN	RKPD 2026	RAPBD 2026	PAGU 2027
B	**TINGKIR**			
1	Kutowinangun Lor	1.932.000.000	941.701.044	**820.000.000**
2	Kutowinangun Kidul	1.288.000.000	714.410.170	**618.500.000**
3	Gendongan	667.000.000	490.200.450	**471.250.000**
4	Sidorejo Kidul	1.610.000.000	687.464.780	**672.750.000**
5	Kalibening	621.000.000	368.601.640	**401.500.000**
6	Tingkir Lor	989.000.000	509.856.460	**471.250.000**
7	Tingkir Tengah	667.000.000	475.579.800	**471.250.000**
C	**ARGOMULYO**			
1	Noborejo	1.334.000.000	647.952.760	**641.750.000**
2	Ledok	1.403.000.000	770.131.600	**734.750.000**
3	Tegalrejo	1.357.000.000	721.618.900	**742.500.000**
4	Kumpulrejo	1.564.000.000	732.601.080	**789.000.000**
5	Randuacir	1.219.000.000	636.511.030	**665.000.000**
6	Cebongan	828.000.000	469.953.620	**517.750.000**
D	**SIDOMUKTI**			
1	Kecandran	1.288.000.000	541.046.600	**680.500.000**
2	Dukuh	1.702.000.000	782.961.000	**820.000.000**
3	Mangunsari	1.863.000.000	872.802.700	**858.750.000**
4	Kalicacing	667.000.000	440.403.400	**471.250.000**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

RKPD Kota Salatiga Tahun 2027 merupakan perencanaan tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tahun 2027. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Salatiga di susun berdasarkan pada : (1) visi dan misi RPJMD beserta tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, tema dan prioritas pembangunan; (2) hasil evaluasi RKPD tahun 2025; (3) Isu Strategis Daerah; (4) Prioritas dan sasaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027; (5) Prioritas dan sasaran RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027.

Substansi yang akan diuraikan dalam bab ini secara garis besar terdiri dari :

1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2027;
3. Permasalahan dan Isu Strategis yang diprioritaskan untuk ditangani pada tahun 2027
4. Pokok-Pokok Pikiran DPRD untuk Perencanaan 2027;
5. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Kebijakan Nasional
    a. Pencapaian Target SDG's Kota Salatiga;
    b. Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Inklusi Sosial;
    c. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM); dan
    d. Penanggulangan Kemiskinan.

Secara detail diuraikan sebagai berikut :

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.1.1 Visi Pembangunan Daerah

Visi menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan. Adapun visi pembangunan daerah adalah visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah dan menjadi arah pembangunan yang ingin dicapai dalam periode masa jabatannya. Visi pembangunan daerah Kota Salatiga sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Salatiga tahun 2025-2029 serta menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Tahun 2027 yaitu:

"Terwujudnya Kota Salatiga Sebagai
Kota BEDA: Bergerak, Energik, Dinamis dan Adaptif
menuju Salatiga yang Mendunia"

Makna dari visi Pembangunan Jangka Menengah Kota Salatiga tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1. **Bergerak**

   Kata "Bergerak" dalam rumusan visi pembangunan Kota Salatiga bermakna bahwa pembangunan Kota Salatiga bertujuan untuk mewujudkan transformasi sosial dan ekonomi yang inklusif, mewujudkan kota yang produktif, sejahtera, harmonis dan berkemajuan, bergeraknya pembangunan Kota Salatiga secara adil dan merata

2. **Energik**

   "Energik" dalam rumusan visi pembangunan Kota Salatiga bermakna Kota Salatiga dapat mewujudkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni dalam menggerakkan kemajuan daerah, meningkatkan kesejahteraan, karakter kerja, dan mewujudkan indeks pembangunan manusia yang tinggi, seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada paradigma pembangunan yang inklusif - adil dan merata dengan optimalisasi sektor potensial perdagangan dan jasa, serta didukung sektor strategis ekonomi kreatif, koperasi, Usaha Mikro dan pariwisata.

3. **Dinamis**

   "Dinamis" dalam rumusan visi pembangunan Kota Salatiga bermakna untuk mewujudkan keberadaan pemerintah kota yang mampu mengurus dan memecahkan setiap masalah yang timbul, dengan mengoptimalkan segala sumber daya pemerintahan yang dimiliki, dengan trus aktif mendayagunakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi untuk memaksimalkan pelayanan publik serta berjalannya prinsip kolaborasi pemerintahan Pentahelix (pemerintah, masyarakat, akademisi, swasta dan media), dalam mewujudkan pemerintahan kota yang partisipatif, akuntabel, transparan dan berkelanjutan.

4. **Adaptif**

   "Adaptif" dalam rumusan visi pembangunan Kota Salatiga bermakna untuk mewujudkan Pemerintah dan masyarakat Kota Salatiga yang selalu mampu menyesuaikan diri dengan situasi yang berbeda, khususnya di tengah arus perubahan sosial, lingkungan dan distrupsi teknologi. Kualitas infrastruktur yang merata dan berkelanjutan melalui pembangunan infrastruktur daerah yang merata dan upaya peningkatan kualitas lingkungan perkotaan yang didukung dengan masyarakat yang adaptif dan inovatif.

   Perwujudan Kapasitas inovasi yang tinggi sebagai upaya memperkuat daya saing Kota Salatiga dalam interaksi sosial dan ekonomi di Tingkat nasional bahkan internasional Lingkungan hidup Kota Salatiga harus dibangun untuk mampu menjadi lahan bertumbuhnya insan-insan berkualitas, agile terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karakteristik adaptif karenanya juga ditanamkan khususnya pada pemuda, utamanya Generasi Z dan generasi millenial agar dapat mengembangkan diri serta berkontribusi optimal dalam pembangunan daerah secara produktif dan berkelanjutan

5. **Salatiga yang Mendunia**

   Salatiga Kota "mendunia" berarti dikenal luas di seluruh dunia, atau menjadi salah satu kota yang berperan dalam interaksi hubungan internasional. Salatiga kota "mendunia" juga bisa merujuk pada sikap mental, perilaku, dan cara pandang pemerintah dan warga Kota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Salatiga yang mencerminkan semakin luasnya pergaulan dan persaingan dunia. Pada saat yang sama, Kota Salatiga juga memiliki strategi pembangunan dan pemerintahan yang selaras dengan kondisi globalisasi di mana jarak ruang dan batas waktu antara satu komunitas dengan komunitas dunia lainnya juga semakin tidak berbatas (*borderless*).

4.1.2 Misi Pembangunan Daerah

Dalam rangka menuju pencapaian Pembangunan Jangka Menengah Kota Salatiga tahun 2025-2029, ditetapkan melalui 5 (lima) misi pembangunan yaitu:

1. **Mewujudkan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan berdaya saing melalui peningkatan Pendidikan, keterampilan dan kesehatan.**

   Fondasi pembangunan Kota Salatiga adalah sumber daya manusia yang memiliki daya saing tinggi dengan didukung pemenuhan aksesibilitas sarana pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, berstandar internasional. Idealitas tersebut didukung dengan pembentukan profil Kota Salatiga sebagai pusat keunggulan pelayanan pendidikan dan Kesehatan. Kota yang mampu menyediakan ekosistem bagi warganya untuk mengaktualisasikan pengetahuan, keterampilan, dan keahliannya untuk mencapai kualitas hidup yang dicita-citakan.

2. **Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif berbasis sektor unggulan daerah melalui kolaborasi investasi daerah dan permodalan UMKM.**

   Bonus demografi yang telah terjadi di Kota Salatiga menjadi peluang dan tantangan dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Namun demikian, inklusivitas laju pertumbuhan ekonomi akan dijaga melalui titik berat kebijakan ekonomi daerah yang lebih memperkuat hilirisasi komoditas unggulan daerah dan peningkatan kualitas tenaga kerja. Diharapkan melalui kolaborasi bersama investasi sektor swasta dan perluasan akses layanan permodalan UMKM akan menurunkan angka pengangguran dan angka penduduk miskin.

3. **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan responsif terhadap pelayanan publik yang berkualitas melalui peningkatan teknologi informasi dan kompetensi sumber daya aparatur.**

   Upaya mendorong pemerataan pelayanan publik yang berkualitas memerlukan kompetensi Sumber Daya Aparatur (*supply side*) dan adopsi atau pemanfaatan teknologi informasi. Seiring itu, Upaya peningkatan partisipasi masyarakat Kota Salatiga (*demand side*) dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dapat ditempuh melalui keterbukaan informasi pemerintah yang lebih besar ke data dan dokumen pemerintah. Sinergi kedua sisi (*side*) pelayanan publik tersebut diharapkan memperkuat akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah daerah, koordinasi antar sektor/instansi dalam meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. **Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berorientasi pemanfaatan tata ruang yang inklusif dan berkualitas melalui peningkatan kesadaran Masyarakat, pemanfaatan teknologi dan penegakan hukum.**

   Upaya mewujudkan profil Kota Salatiga sebagai Kota inklusif, kota yang mampu yang menjamin hak — hak warganya secara setara, khususnya dalam dimensi ketersediaan layanan publik yang nyaman untuk semua. Hal ini memerlukan kualitas tata ruang lingkungan kota sesuai RTRW yang telah disepakati bersama, pengelolaan persampahan, akses air bersih dan sanitasi rumah tangga merata.

5. **Mewujudkan infrastruktur perkotaan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan melalui pemerataan dan peningkatan kualitas.**

   Pembangunan infrastruktur pelayanan publik dasar di Kota Salatiga diarahkan untuk meningkatkan akses rumah tangga pada kawasan hunian yang sehat, air bersih dan akses sanitasi. Sekaligus dalam misi ke 5 ini adalah kebijakan revitalisasi sarana-sarana publik, termasuk rehabilitasi jalan lingkungan kelurahan dan jalan antar kecamatan untuk mobilisasi orang dan barang.

4.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Sasaran dan prioritas pembangunan merupakan fokus pembangunan pemerintah daerah Kota Salatiga untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfungsi sebagai milestone pembangunan di Kota Salatiga. Penyusunan rumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kota Salatiga Tahun 2027 dilaksanakan dengan mengacu dan memperhatikan : (1) Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029; (2) Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Salatiga yang tertuang pada dokumen RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029; (3) RTRW Kota Salatiga Tahun 2023-2043; (4) Sasaran Pokok RPJPD 2025-2045 Tahap ke-1 (5) Hasil evaluasi kinerja RKPD tahun sebelumnya; dan (6) Prioritas pembangunan Nasional dan prioritas pembangunan Jawa Tengah guna menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga tingkat daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 merupakan penjabaran tahun kedua dari RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029. Target tahun kedua dalam RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029 diupayakan akan tercapai melalui penyusunan RKPD Kota Salatiga Tahun 2027 yang diarahkan pada tahap "***Pengembangan SDM yang sehat dan cerdas dan perekonomian daerah yang unggul, didukung pelayanan publik bermutu dan infrastruktur wilayah yang sesuai daya dukung lingkungan hidup***". Tahun kedua ini difokuskan pada ***"Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif didukung dengan SDM Unggul"***.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dalam upaya pencapaian tema pembangunan Kota Salatiga sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029, maka Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam RKPD Kota Salatiga Tahun 2027 adalah sebagaimana tabel 4.1.

Tabel 4. 1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Salatiga beserta target kinerja Tahun 2027 berdasarkan hasil capaian tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Capaian	Target	Urusan
				2025	2027	
Mewujudkan Kota Salatiga yang Bergerak, Energik, Dinamis dan Adaptif menuju Salatiga Mendunia		Angka Kemiskinan	Persen	4,20	3,87 – 3,52	
		PDRB Perkapita	Juta Rp	95,23	112,68-117,68	
		Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	81,00	82,66	
		Penurunan emisi GRK kumulatif	TonCO2eq	19.134,02	127,239.68	
		Indeks Daya saing Daerah	Angka	4,08	5,15	
	Meningkatnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan unggul	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	86,23	87,63	Pendidikan, Kesehatan, Perpustakaan, Kebudayaan
		Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,67	3,82 – 3,52	Kepemudaan dan Olahraga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Tenaga Kerja
	Terwujudnya transformasi sosial dan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan	Pertumbuhan ekonomi	Persen	5,55	6,10 – 7,95	Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal, Investasi, Perdagangan, Pariwisata
		Indeks Ketahanan Pangan Daerah (IKP)	Nilai	79,33	82,55	Pangan, Pertanian, Sosial
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berbasis Digital	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	4,42	4,7	Sekretariat Daerah, Ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat, Kesbangpol, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Indeks Integritas Nasional	Nilai	77,95	80,65	Inspektorat, Kepegawaian, Keuangan
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis	Nilai	4,11	4.15	Statistik, Persandian, Komunikasi dan Informasika,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Capaian	Target	Urusan
				2025	2027	
		Elektronik (SPBE)				Perencanaan, Kearsipan
	Meningkatnya kualitas infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	Wilayah dengan Infrastruktur Kondisi Baik	Nilai	Tidak Ada Data	66,04	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, Perhubungan
		Indeks kualitas lingkungan Hidup	Nilai	68,70	70,03	Lingkungan Hidup, Trantibunlinmas, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Indeks Inovasi Daerah	Nilai	48,88	53	Penelitian dan Pengembangan

Adapun strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk tahun 2027 adalah sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 4. 2. Strategi dan Arah Kebijakan dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2027

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan
Mewujudkan Kota Salatiga yang Bergerak, Energik, Dinamis dan Adaptif menuju Salatiga Mendunia	I. Meningkatnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan unggul	I.1. Peningkatan kualitas pendidikan dan literasi masyarakat secara merata	I.1.a Mengembangkan komunitas pembelajaran bahasa dan keterampilan komunikasi internasional (Bahasa Inggris, Bahasa Arab dan Bahasa Cina)	Urusan Pendidikan
			I.1.b Meningkatkan dukungan kelembagaan dan operasional pada pendidikan kesetaraan dan lembaga keterampilan dalam pembelajaran kewirauwsahaan berorentasi global	Urusan Pendidikan
			I.1.c Meningkatkan kualitas dan pemerataan sarana prasarana, tenaga pendidik, dan kurikulum berbasis digital pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah menuju Pendidikan Salatiga Standar Internasional	Urusan Pendidikan
		I.2. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat	I.2.a Meningkatkan kualitas SDM dan fasilitas puskesmas, rumah sakit daerah berstandar internasional, dan klinik kesehatan daerah yang berkualitas dan modern didukung dengan sistem layanan terintegrasi	Urusan Kesehatan
			I.2.a Meningkatkan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat secara keseluruhan	Urusan Kesehatan
		I.3. Peningkatan kebugaran masyarakat dan Daya Saing Olahraga	I.3.a. Mengembangkan infrastruktur dan fasilitas pendukung olahraga yang terjangkau dan lebih mudah diakses masyarakat	Urusan Kepemudaan Dan Olahraga, Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
			I.3.b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam olahraga dan pengembangan potensi atlet lokal	Urusan Kepemudaan Dan Olahraga
		I.4. Peningkatan apresiasi, pengembangan dan pelestarian seni dan budaya daerah	I.4.a Melestarikan nilai-nilai budaya lokal, pemberdayaan pelaku seni dan budaya, serta pemanfaatan teknologi dan kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat identitas dan keberlangsungan budaya daerah	Urusan Kebudayaan
			I.4.b Meningkatkan fasilitas, koleksi dan aksesibilitas museum, serta pembinaan sejarah daerah	Urusan Kebudayaan, Urusan Perpustajaan Dan Kearsipan
		I.5. Peningkatan kualitas perlindungan perempuan dan anak serta kesejahteraan keluarga	I.5.a Penguatan regulasi dan kebijakan perlindungan perempuan dan anak serta kesejahteraan keluarga	Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
			I.5.b Penguatan pencegahan dan sistem layanan perlindungan terhadap pencegahan kekerasan dan diskriminasi	Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
			I.5.c Meningkatkan kualitas pengendalian penduduk dan keluarga berkualitas	Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan
	II. Terwujudnya transformasi sosial dan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan	II.1. Pengembangan potensi sektor unggulan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi	II.1.a Meningkatkan investasi dalam mendukung kapasitas produksi daerah didukung peningkatan kondisi iklim investasi yang kondusif dengan pengembangan SDM, teknologi dan promosi potensi daerah secara masif	Urusan Penanaman Modal
			II.1.b Meningkatkan kontribusi sektor pariwsata dan perdagangan dalam perekonomian daerah	Urusan Pariwisata
			II.1.c Meningkatkan kapasitas tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri dan pasar kerja	Urusan Tenaga Kerja
			II.1.d Mengembangkan infrastruktur industri yang memadai, penyediaan wilayah peruntukan industri yang terintegrasi, peningkatan inovasi dengan memberikan insentif untuk adopsi teknologi terbaru dalam proses produksi.	Urusan Perindustrian, Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
			II.1.e Memastikan pelaku usaha melakukan analisis kajian dampak lingkungan pada kegiatan usaha dan mendorong inovasi teknologi ramah lingkungan dalam mendukung penerapan ekonomi hijau di daerah	Urusan Lingkungan Hidup, Urusan Perijinan
		II.2. Peningkatkan pelayanan sosial dan pangan masyarakat yang memenuhi standar untuk hidup sehat, aktif dan produktif	II.2.a Meningkatkan cakupan perlindungan, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan ekonomi PPKS	Urusan Sosial
			II.2.b Meningkatkan infrastruktur dan teknologi pertanian guna mempercepat hilirisasi produk pertanian yang didukung dengan pemberdayaan kelompok dalam meningkatkan produksi pertanian	Urusan Pertanian, Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
			II.2.c Meningkatkan produksi peternakan dan perikanan budidaya lokal didukung pelatihan, teknologi, dan akses terhadap bibit unggul dan akses pasar.	Urusan Pertanian, Urusan Perikanan
		II.3. Pengembangan program upaya lintas sektor dalam pengurangan beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan masyarakat serta sinergitas program dalam mengurangi kantong kemiskinan	II.3.a Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan penguatan aktivitas usaha dalam mendukung peningkatan pendapatan	Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
			II.3.b Melakukan sinergitas kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin	Urusan Sosial, Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
		II.4. Peningkatan kondusivitas wilayah dalam mendukung aktivitas sosial ekonomi	II.4.a Penguatan kerukunan sosial, agama, ras maupun kelompok masyarakat melalui peningkatan pendidikan politik dan wawasan kebangsaan dalam berbagai kegiatan guna meningkatkan cinta tanah air, nilai-nilai toleransi dan saling menghormati dalam pendidikan dan kehidupan sehari-hari	Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan
	III. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berbasis Digital	III.1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital	III.1.a Meningkatkan kualitas dan budaya kerja ASN yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pelayanan masyarakat	Urusan Kepegawaian
			III.1.b Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, pengembangan aset produktif dan mengembangkan sumber pendapatan daerah yang memiliki potensi jangka panjang	Urusan Keuangan
			III.1.C Meningkatkan sistem pengelolaan kemananan informasi daerah	Urusan Komunikasi Dan Informatika
		III.2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima	III.2.a Meningkatkan kualitas kelembagaan dan pengembangan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat	Urusan Sekretariat Daerah
			III.2.b Perluasan jaringan internet broadband dan penyediaan akses WiFi publik di fasilitas layanan umum	Urusan Komunikasi Dan Informatika
			III.2.c Pengembangan aplikasi layanan publik berbasis web dan mobile serta pengembangan konten.	Urusan Komunikasi Dan Informatika
			III.2.d Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana pelayanan serta jangkauan layanan kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat	Urusan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
			III.2.e Meningkatkan peran kelembagaan ditingkat kecamatan dan kelurahan (PKK, LPMK dll) dalam pelaksanaan pemberdayaan, monitoring dan evaluasi pembangunan terutama dalam mendukung tercapainya kecamatan berdaya.	Urusan Kecamatan
			III.2.f Meningkatkan kualitas pengelolaan arsip daerah yang didukung pemanfaatan tekonologi informasi	Urusan Kearsipan
			III.2.g Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang efektif dan efisien	Urusan Sekretariat Dewan
	IV. Meningkatnya kualitas infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	IV.1. Meningkatnya pembangunan infrastruktur daerah yang merata	IV.1.a Meningkatkan pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar (air minum, sanitasi dan rumah layak) bagi masyarakat.	Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
			IV.1.b Mengembangkan sistem manajemen transportasi cerdas guna meningkatkan efisiensi, keselamatan dan kenyamanan sistem transportasi	Urusan Perhubungan
		IV.2. Meningkatnya kualitas lingkungan perkotaan yang didukung dengan masyarakat yang adaptif dan inovatif	IV.2.a Meningkatkan pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan secara konsisten yang didukung dengan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat	Urusan Lingkungan Hidup

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan
			IV.2.b Meningkatkan sistem peringatan dini dan koordinasi antar instansi terkait dalam pencegahan dan penanggulangan bencana maupun peristiwa kebakaran	Urusan Kebencanaan
			IV.2.c Mengembangkan riset dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang mampu meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat.	Urusan Kelitbangan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2027

Prioritas Pembangunan Daerah pada dasarnya merupakan penajaman, perluasan cakupan, dan lanjutan prioritas pembangunan tahun sebelumnya serta merupakan jawaban atas permasalahan yang berkembang saat ini dengan memperhatikan tantangan dan kendala yang akan terjadi. Prioritas pembangunan ditetapkan dengan memperhatikan pemenuhan target kinerja penyelenggaraan pembangunan daerah dan penuntasan permasalahan pembangunan daerah dengan memperhatikan isu strategis yang relevan, melalui kolaborasi semua Perangkat Daerah dan stakeholder.

RKPD tahun 2027 merupakan penjabaran tahun kedua RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029. Penyusunan RKPD tahun 2027 memperhatikan keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan RKPD Provinsi Jawa Tengah tahun 2027. Penyusunan prioritas pembangunan RKPD Kota Salatiga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pendekatan yang didasarkan pada kriteria-kriteria antara lain :

a. Kesesuaian dengan dokumen perencanaan;
b. Urgensitas penanganan permasalahan pembangunan; dan
c. Kemanfaatan pada hajat hidup masyarakat.

Perumusan prioritas pembangunan daerah dilakukan dengan mengevaluasi permasalahan pembangunan di setiap urusan sehingga terlihat upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Prioritas pembangunan tersebut dirumuskan ke dalam fokus prioritas tahun rencana yang berisi program-program unggulan yang paling tinggi daya dukungnya untuk mengatasi permasalahan yang ada atau untuk mencapai target sasaran pembangunan daerah. Fokus prioritas pembangunan pada tahun rencana tersebut, mendukung tema pembangunan yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan benang merah menuju sasaran pembangunan.

Tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan daerah menyangkut keterbatasan anggaran dan identifikasi masalah. Suatu prioritas pembangunan di tahun sebelumnya yang telah berhasil dicapai tidak lagi diprioritaskan di masa berikutnya, akan tetapi tetap dijaga kesinambungannya. Suatu prioritas pembangunan dapat dikategorikan sebagai operasionalisasi dari tujuan strategik daerah mengingat urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunan.

4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2027

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 merupakan perencanaan tahunan di yang menjadi tahap pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2025, evaluasi kebijakan tahun 2025, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, isu strategis yang menjadi perhatian, serta kesinambungan pembangunan, disosialisasikan bahwa tema RKP Tahun 2027 adalah **"Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri"**.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pada tahun 2027 terdapat 11 fokus pembangunan yang terbagi menjadi 3 sub tema yaitu :

1. Produktivitas, yang mencakup 4 fokus pembangunan :
    a. Kualitas SDM, Tenaga Kerja Produktif, Inovasi :
        - Makan Bergisi Gratis
        - Revitalisasi Sekolah
        - Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul
        - Layanan Berkualitas dan Akses Kesehatan Gratis
        - Digitalisasi Pendidikan dan IPTEKIN Unggul
        - Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
    b. Stimulus untuk Produktivitas dan Daya Beli Masyarakat :
        - Kartu Kesejahteraan dan jaminan Sosial Nasional
        - Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
        - Pembiayaan Perumahan dan Penanganan Permukiman Kumuh (Gentengisasi)
    c. Digitalisasi dan Efisensi Tata Kelola :
        - Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)
        - Layanan Digital Optimal dan Terintegrasi di Sektor Strategis
        - Pemerintahan Digital yang Merata
    d. Regulasi dan Kelembagaan :
        - Diplomasi Tangguh (Perlindungan, Ekonomi, Budaya, Kepemimpinan, Pertahanan dan Kedaulatan)
        - Integritas Tata Kelola Pemerintahan
2. Investasi, yang mencakup 4 fokus pembangunan :
    a. Efisiensi dan Efektivitas Investasi :
        - Pengelolaan Sampah (Instalasi PSEL)
        - Investasi Hijau Berkelanjutan
        - Kemudahan Perizinan
    b. Infrastruktur dan Konektivitas Ekonomi :
        - Infrastruktur Dasar
        - Konektivitas Logistik
        - Pembangunan Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan
    c. Inovasi Pembiayaan Pembangunan :
        - Optimalisasi Danantara dan Peran BUMN
        - Pembiayaan Pembangunan Berbasis Konvensional dan Syariah
3. Industri, yang mencakup 4 fokus pembangunan :
    a. Industri Nasional :
        - Pengelolaan Sampah
        - Industri Pertahanan
        - Pengembangan Mobil Nasional

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- Industri Strategis Nasional

b. Hilirisasi SDA Strategis :
   - Hilirisasi Kelautan dan Perikanan (Pengembangan Industri Garam dan Produksi Hasil Laut)
   - Hilirisasi Perkebunan dan Kehutanan (Hilirisasi Kelapa Sawit)
   - Hilirisasi Mineral dan Migas

c. Swasembada Pangan, Energi dan Air :
   - Swasembadan Pangan (KSPP)
   - Swasembada Energi
   - Swasembada Air

Sedangkan fokus prioritas pembangunan kewilayahan tahun 2027 adalah pada :

1. Pembangunan Wilayah Papua
2. Pembangunan Perdesaan, Daerah Afirmasi, dan Transmigrasi
3. Pembangunan Prasarana Dasar Kota Terpadu
4. Pembangunan Khusus Provinsi Wilayah Kepuluan
5. Pemulihan Wilayah Pascabencana

Sasaran makro pembangunan tahun 2027 berdasarkan hasil Rakortekrenbang tahun 2026 adalah sebagi berikut :

Tabel 4. 3. Target Indikator sasaran pembangunan tahun 2027

No	Indikator	Satuan	Target 2027
1.	Pertumbuhan Ekonomi	%	6,10 – 7,95
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,82 – 3,52
3.	Tingkat Kemiskinan	%	3,87 – 3,52
4.	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	87,63

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2027, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut :

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial

Untuk mengawal keberhasilan proses Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia, telah dirumuskan sasaran pembangunan yaitu terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia dengan indikator Indeks Demokrasi Indonesia dan Indeks Hak Asasi Manusia.

Sedangkan Arah Kebijakan yang dilaksanakan untuk mewujudkan sasaran pembangunan tersebut adalah :

a. Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional;
b. Penguatan Komunikasi Publik dan Media;
c. Penguatan Lembaga Demokrasi;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

d. Penguatan Kesetaraan Masyarakat Sipil

2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru

Untuk mendukung prioritas pembangunan ke – 2 tersebut telah dirumuskan dalam 6 (enam) sasaran pembangunan, sebagi berikut :

a. Terjaganya kedaulatan negara dan penguatan stabilitas keamanan nasional sebagai fondasi pelaksanaan pembangunan, dengan indikator :
   1) *Asia Power Index* (*Military Capability*)
   2) *Asia Power Index* (*Diplomatic Influence*)
   3) Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya
   4) *Global Cybersecurity Index*
   5) Indeks Keamanan Laut Nasional

   Arah Kebijakan :
   1) Pembangunan postur pertahanan
   2) Pembangunan dan pengembangan industri pertahanan
   3) Komponen cadangan dan komponen pendukung
   4) Intelijen dan keamanan dalam negeri
   5) Keamanan siber, sandi dan sinyal
   6) Keamanan laut dan hidro-oseanografi
   7) Keamanan dan ketertiban masyarakat
   8) Profesionalisme pelayanan kepolisian
   9) Diplomasi asta cita dan diplomasi ekonomi

b. Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan yang berkualitas secara berketanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (*FEW Nexus*), dengan indikator :
   1) Indeks Ketahanan Pangan;
   2) Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

   Arah Kebijakan :
   1) Swasembada pangan

c. Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan energi secara berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (*FEW Nexus*), dengan indikator :
   1) Indeks Ketahanan Energi
   2) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)

   Arah Kebijakan :
   1) Swasembada energi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

d. Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan air secara bcrkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (*FEW Nexus*), dengan indikator :

1) Indeks Ketahanan Air Nasional
2) Kapasitas tampungan air (m^3/kapita)
3) Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)
4) Rumah tangga dengan akses sanitasi Aman (%)

Arah Kebijakan :

1) Swasembada air

e. Terwujudnya perekonomian nasional yang progresif, inklusif, dan berkelanjutan, dengan indikator :

1) Posisi ekonomi syariah Indonesia di tingkat global (peringkat)
2) *Indonesia Blue economy Index* (IBEI)
3) Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global (peringkat)

Arah Kebijakan :

1) Ekonomi syariah
2) Ekonomi digital
3) Pengembangan ekonomi biru sebagai sumber pertumbuhan baru

f. Terwujudnya Transformasi Ekonomi Hijau, dengan indikator :

1) Indeks Ekonomi Hijau
2) Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)
3) Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kumulatif (%)
4) Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Tahunan (%)
5) Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
6) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
7) Indeks Kualitas Udara
8) Indeks Kualitas Air
9) Indeks Kualitas Lahan

Arah Kebijakan :

1) Ekosistem ekonomi sirkular
2) Pengelolaan keanekaragaman hayati ekosistem, spesies, dan genetik
3) Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang
4) Reformasi pengelolaan sampah terintergrasi dari hulu ke hilir
5) Pembangunan rendah karbon
6) Pekerjaan hijau/green jobs
7) Pengelolaan hutan lestari

Selain intervensi kebijakan tersebut, terdapat juga dukungan program yang menjadi penekanan dan memiliki daya ungkit tinggi. Dalam merespons hal tersebut, pencapaian Prioritas Nasional 2 didukung oleh Program Hasil Terbaik Cepat: Mencetak

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional.

3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi

Sasaran pembangunan untuk prioritas nasional adalah sebagai berikut :

a. Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur yang Berkelanjutan, dengan indikator:
   1) Stok Infrastruktur terhadap PDB (%)

   Arah Kebijakan:
   1) Pengembangan Konektivitas dan Layanan Transportasi Multimodal
   2) Peningkatan Konektivitas Digital dan Transisi Energi Listrik

b. Meningkatnya Total Aset Sektor Keuangan terhadap PDB
   1) Total Aset Sektor Keuangan/PDB (%)
   2) Aset Perbankan/PDB (%)
   3) Aset Dana Pensiun/PDB (%)
   4) Aset Asuransi/PDB (%)
   5) Kapitalisasi Pasar Modal/ PDB (%)
   6) Total Kredit/PDB (%)
   7) Inklusi Keuangan (%)

   Arah Kebijakan:
   1) Pendalaman Sektor Keuangan

c. Meningkatnya Lapangan Pekerjaan yang Berkualitas
   1) Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)
   2) Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDB (%)
   3) Proporci Jumlah Usaha Kecil den Menengah (%)
   4) Rasio Kewirausahaan (%)

   Arah Kebijakan:
   1) Peningkatan Produktivitas UMKM dan Koperasi

d. Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata
   1) Rasio PDB Pariwisata (%)
   2) Dcvisa Pariwisata (Miliar USD)

   Arah Kebijakan:
   1) Pembangunan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan

e. Meningkatnya Proporsi PDB Ekonomi Kreatif
   1) Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)

   Arah Kebijakan:
   1) Penguatan Ekosisten Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. **Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas**

   Terdapat lima sasaran pembangunan yang difokuskan untuk melaksanakan amanat Prioritas Nasional 4 sebagai berikut :

   a. Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang Merata, dengan indikator:
      1) Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)
      2) Harapan lama sekolah (tahun)
      3) Rata-rata nilai PISA
      4) Rata-rata Nilai Asesmen Tingkat Nasional
      5) Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi (%)
      6) Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi (%)
      7) Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)

      Arah Kebijakan :
      1) Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah)
      2) Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran
      3) Pemenuhan layanan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang berkualitas
      4) Penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas
      5) Penguatan sistem tata kelola pendidikan
      6) Penguatan pendidikan tinggi berkualitas yang merata dan pengembangan *Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematic* (STEAM)

   b. Terwujudnya Kesehatan untuk Semua, dengan indikator:
      1) Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)
      2) Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate*) (Rata-rata kelahiran per wanita usia subur 15-49 tahun)
      3) Angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran hidup)
      4) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)
      5) Insidensi Turbekulosis (per 100.000 penduduk)
      6) Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)

      Arah Kebijakan:
      1) Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat
      2) Pemberian makan gratis untuk pemenuhan gizi
      3) Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat
      4) Penguatan kapasitas ketahanan kesehatan
      5) Penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola

   c. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif, dengan indikator:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1) Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga
2) Indeks Perlindungan Anak
3) Indeks Pembangunan Pemuda
4) Indeks ketimbangan Gender
5) Indeks Pembangunan Gender
6) Mobilitas Penduduk Lanjut Usia (%)
7) Mobilitas Penduduk Penyandang Disabilitas (%)

Arah Kebijakan:

1) Peningkatan Ketangguhan keluarga
2) Peningkatan kualitas perlindungan anak
3) Peningkatan kualitas pemuda
4) Peningkatan Kesetaraan Gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan
5) Peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia

d. Menguatnya Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Tenaga Kerja, dengan indikator:
   1) Peringkat Indeks Inovasi Global
   2) Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
   3) Pengeluaran Iptek dan Inovasi (% PDB)
   4) Tingkat Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)

   Arah Kebijakan:

   1) Peningkatan kontribusi iptek dan inovasi dalam pembangunan nasional
   2) Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi dan produktivitas tenaga kerja
   3) Pengembangan Manajemen Talenta Nasional
e. Meningkatnya Prestasi Olahraga Indonesia di Tingkat Dunia dan Budaya Berolahraga di Masyarakat, dengan indikator:
   1) Jumlah perolehan medali emas pada *Olimpic Games*
   2) Jumlah perolehan medali emas pada *Paralimpic Games*
   3) Peringkat pada *Asian Games*
   4) Peringkat pada *Asian Paragames*
   5) Peringkat pada *SEA Games*
   6) Peringat pada *ASEAN Paragames*
   7) Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang aktif berolahraga (%)

   Arah Kebijakan:

   1) Peningkatan pembinaan prestasi olahraga
   2) Pengembangan pembudayaan olahraga yang inklusif

Berdasarkan perspektif siklus hidup manusia, dimensi kesehatan dan pendidikan merupakan kunci tumbuh kembang dan produktivitas manusia. Dalam merespons isu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

tersebut, pencapaian Prioritas Nasional 4 juga didukung oleh Program Hasil Terbaik Cepat:

1) Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pcsantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil;
2) Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di kabupaten; dan
3) Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di s€tiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang pcrlu renovasi.

Implementasi Program Hasil Terbaik Cepat dilakukan melalui Kegiatan Prioritas berupa Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita serta Penguatan Ekosistem Pendukung Pemberian Makan Bergizi.

5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri

Terdapat 2 (dua) sasaran utama pembangunan yang difokuskan untuk melaksanakan amanat Prioritas Nasional sebagai berikut :

a. Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah, Produktivitas dan Daya Saing Industri Pengolahan, dengan indikator:
   1) Rasio PDB Industri Pengolahan (%)

   Arah Kebijakan:
   1) Percepatan hilirisasi industri berbasis SDA unggulan serta penguatan industri padat karya terampi, padat teknologi inovasi, dan berorientasi ekspor
   2) Aglomerasi industri melalui peningkatan investasi di kawasan industi/kawasan ekonomi khusus prioritas sebagai pusat pertumbuhan baru dan mendukung percepatan hilirisasi

b. Terwujudnya Peningkatan Integrasi Ekonomi Domestik dan Global, dengan indikator:
   1) Biaya Logistik (% PDB)
   2) Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB)
   3) Ekspor Barang dan Jasa (% PDB)

   Arah Kebijakan:
   1) Optimalisasi *backbone* integrasi ekonomi dan perkuatan sistem logistik nasional
   2) Peningkatan investasi untuk integrasi ekonomi domestik dan global
   3) Peningkatan perdagangan domestik, antarwilayah, dan ekspor serta peningkatan partisipasi dalam rantai nilai global
   4) Optimalisasi investasi strategis negara

6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan

Sasaran pembangunan untuk Prioritas Nasional 6 adalah sebagai berikut :

a. Mempercepat pengurangan kemiskinan dan peningkatan pemerataan, dengan indikator:
   1) Tingkat kemiskinan (%)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2) Tingkat kemiskinan ekstrem (%)
3) Proporsi penduduk kelas menengah (%)
4) Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%)
5) Penyandang disabilitas yang berkerha di sektor formal (%)

Arah Kebijakan

1) Sistem pendataan sosial ekonomi terintegrasi
2) Perlindungan sosial adaptif dan inklusif
3) Peningkatan akses lapangan kerja dan penumbuhan usaha berkelanjutan dan inovatif

b. Meningkatkan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan

1) Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan (%)

Arah Kebijakan:

1) Percepatan penyediaan perumahan dan permukiman

c. Mewujudkan pembangunan kemandirian perdesaan dari bawah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

1) Peresntase desa mandiri (%)

Arah Kebijakan:

1) Peningkatan kemandirian perdesaan yang berkelanjutan

d. Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi

1) Proporsi PDRB perkotaan terhadap PDB nasional (%)
2) Proporsi kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap nasional (%)

Arah Kebijakan:

1) Pembangunan Perkotaan berkelanjutan
2) Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Dalam memastikan keberhasilan pembangunan dari desa dan dari bawah dan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, pemerataan pembangunan, serta pengentasan kemiskinan, maka dirumuskan Program Hasil Terbaik Cepat yang memiliki daya ungkit terhadap keberhasilan pcncapaian sasaran Prioritas Nasional 6 yaitu :

(1) Melanjutkan dan Menambahkan Program Kartu-Kartu Kesejahteraan Sosial serta Kartu Usaha untuk Menghilangkan Kemiskinan Absolut dan
(2) Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Desa dan Kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Menjamin Penyediaan Rumah Murah Bersanitasi Baik untuk yang Membutuhkan, terutama Generasi Milenial, Generasi Z, dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Implementasi Program Hasil Terbaik Cepat dilakukan melalui Kegiatan Prioritas Melanjutkan dan Menambahkan Program Kartu-Kartu Kesejahteraan Sosial serta Kartu Usaha untuk Menghilangkan Kemiskinan Absolut.

7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sasaran pembangunan untuk Prioritas Nasional 7 adalah sebagai berikut :

a. Terwujudnya supermasi hukum yang transparan, adil, tidak memihak serta sistem politik yang fungsional, dengan indikator:
   1) Indeks Pembangunan Hukum
   2) Indeks Persepsi Korupsi
   3) Indeks Materi Hukum
   4) Indeks Integritas Nasional
   5) Indeks Integritas Partai Politik

   Arah Kebijakan:
   1) Reformasi Politik dan Tata Kelola Pemilo
   2) Reformasi Hukum
   3) Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta Tindak Pidanda Pencucian Uang (TPPU)
   4) Penguatan Kelembagaan, Pelayanan, dan Penegakan Hukum
   5) Transformasi Sistem Penuntutan dan *Advocaat Generaal*

b. Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani, dengan indikator:
   1) Indeks Reformasi Birokrasi Nasional
   2) Indek Pelayanan Publik
   3) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
   4) Indeks Pelayanan dan Perlindungan WNI di Luar Negeri

   Arah Kebijakan:
   1) Penerapan Prinsip Meritokrasi dan Reformasi Manajamen ASN
   2) Pemerintah Digital
   3) Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pembangunan
   4) Penataan Desentralisasi dan Otonomi Daerah
   5) Perlindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri, termasuk Pekerja Migran Indonesia

c. Terwujudnya masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba, dengan indikator:
   1) Angka Prevalensi Penyalahguna Narkotika

   Arah Kebijakan:
   1) Pencegahan, Pemberantasan Penyelenggaraan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)

d. Terwujudnya tata kelola BUMN yang baik untuk meningkatkan kontribusi Badan Usaha Milik Negara sebagai agem pembangunan, dengan indikator:
   1) *Return on Asset* (ROA) BUMN

   Arah Kebijakan:
   1) Peningkatan Produktivitas Badan Usaha Milik Negara

e. Tercapainya peningkatan pendapatan negara yang optimal sesuai potensi perekonomian dengan tetap menjaga iklim investasi, didukung upaya untuk

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

mewujudkan reformasi fiskal secara komprehensif melalui optimatisasi belanja negara, serta perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan, dengan indikator:

1) Rasio Pendapatan Negara terhadap PDB
2) Rasio Penerimaan Perpajakan terhadap PDB

Arah Kebijakan:

1) Optimalisasi Pendapatan Negara
2) Optimalisasi Belanja Negara
3) Perluasan Sumber dan Pengembangan Inovasi Pembiayaan

f. Tercapainya tingkat inflasi yang rendah dan stabil untuk mendukung stabilitas serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dengan indikator:

1) Tingkat Inflasi

Arah Kebijakan:

1) Pengendalian Inflasi

Pencapaian Prioritas Nasional 7 juga didukung oleh Program Hasil Terbaik Cepat:

(1) menaikkan gaji aparatur sipil negara (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Republik Indonesia, dan pejabat negara; dan
(2) mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto ke 23 persen.

Implementasi Program Hasil Terbaik Cepat dilakukan melalui kegiatan prioritas Peningkatan Kesejahteraan ASN Melalui Penerapan Konsep Total Reward Berbasis Kinerja ASN

8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur

Sasaran pembangunan untuk Prioritas Nasional 8 adalah sebagai berikut :

a. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju, dengan indikator:

1) Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)
2) Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)
3) Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)

Arah Kebijakan:

1) Penguatan kerukunan umat beragama dan layanan keagamanaan transformatif untuk mewujudkan kehidupan beragama maslahat
2) Pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta penguatan karakter bangsa

b. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim, dengan indikator:

1) Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB (%)

Arah Kebijakan:

1) Pembangunan berketahanan iklim

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2) Pengelolaan risiko bencana yang efisien dan tepat guna

Selain delapan misi Asta Cita tersebut, terdapat 17 Program Prioritas Presiden yang harus didukung oleh kebijakan daerah, yaitu :

1. Mencapai swasembada pangan, energi, dan air.
2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara
3. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi.
4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi
5. Pemberantasan kemiskinan
6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba
7. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, peningkatan BPJS kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat
8. Penguatan pendidikan, sains, dan teknologi, serta digitalisasi.
9. Penguatan pertahanan dan keamanaan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif
10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas
11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup
12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani
13. Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau, bersanitasi baik untuk masyarakat
14. Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif, karateristik-mandiri lainnya
15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan Sumber Daya Alam (SDA), termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi
16. Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah
17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif dan peningkatan prestasi olahraga

4.2.2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027

Berdasarkan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, tahun 2027 merupakan tahap "***Peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah***", dengan fokus pada tema pembangunan yaitu "***Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi***". Strategi yang dilakukan dalam rangka mewujudkan tema pembangunan daerah tersebut antara lain :

1. pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dan berkelanjutan;
2. penguatan promosi pariwisata berbasis digital;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. peningkatan kualitas destinasi wisata berbasis klaster dengan perbaikan prasarana sarana destinasi wisata;
4. penguatan diversifikasi daya tarik pariwisata sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah seperti pemanfaatan keragaman sumber daya alam, budaya, kreativitas, dan olahraga berbasis digital;
5. peningkatan infrastruktur konektivitas antar destinasi wisata;
6. penguatan integrasi antar destinasi wisata;
7. penguatan kapasitas SDM pelaku pariwisata termasuk pelaku UMKM pariwisata;
8. penguatan fasilitasi kemitraan untuk pengembangan destinasi pariwisata;
9. city beautification dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism, terutama pada kawasan perkotaan;
10. pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, ancillary services, aktivitas, available packages) pada kawasan megapolitan/metropolitan (urban tourism), serta kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif Magelang- Yogyakarta-Surakarta;
11. penguatan ekonomi dan keuangan syariah melalui penguatan halal value chain, penguatan keuangan syariah, penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan penguatan ekonomi digital;
12. penguatan kelembagaan pariwisata dan ekonomi syariah agar lebih efektif;
13. peningkatan pemenuhan sarana prasarana pendukung pariwisata desa;
14. peningkatan pengembangan perekonomian desa berbasis potensi pariwisata berkelanjutan;
15. peningkatan peran BUMDes dan lembaga ekonomi desa lainnya dalam mendukung pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah;
16. peningkatan kerja sama pengembangan potensi pariwisata desa dan peningkatan pengembangan kawasan perdesaan;
17. penguatan kapasitas dan kompetensi guru serta siswa SMA, SLB dan SMK bidang keahlian layanan pariwisata, seni, kriya, kuliner, tata boga, busana, perhotelan, dan perbankan syariah termasuk ekonomi kreatif dan kewirausahaan halal;
18. revitalisasi kurikulum SMK seni, kriya, kuliner, tata boga, busana, perhotelan, layanan pariwisata dan perbankan syariah selaras dengan kebutuhan usaha dan industri;
19. penguatan integrasi tema pariwisata, budaya, ekonomi kreatif dan syariah dalam kurikulum SMA dan SLB berbasis project integratif dan lintas;
20. penguatan kemitraan DUDI melalui sinkronisasi kompetensi dan penyusunan Memorandum of Agreement (MoA) untuk kegiatan spesifik antara lain dengan perusahaan atau hotel syariah, restoran halal, biro perjalanan haji-umrah, bank syariah, UMKM kriya lokal, desa wisata halal, serta perguruan tinggi termasuk dukungan program magang dan sertifikasi halal;
21. peningkatan upaya pelestarian dan pemanfaatan karya budaya dan cagar budaya sebagai salah satu daya tarik wisata melalui pemetaan karya budaya dan cagar budaya potensial,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

pemeliharaan prasarana sarana kebudayaan, peningkatan upaya diplomasi budaya tingkat nasional/internasional, serta penguatan SDM/lembaga/komunitas kebudayaan sebagai agen diplomasi budaya;

22. penguatan event olahraga pariwisata ramah lingkungan dan berkelanjutan;
23. perluasan literasi berwawasan lingkungan hidup berkelanjutan dan literasi ekonomi berbasis syariah melalui pelibatan pemangku kepentingan;
24. mengoptimalkan fungsi kearsipan dalam melestarikan memori kolektif berbasis kelestarian lingkungan hidup berkelanjutan;
25. peningkatan partisipasi pemuda dalam bidang pariwisata, wisata kreatif, membangun startup berbasis syariah.

Selanjutnya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada tahap kedua **"Peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah"** ini diarahkan pada prioritas daerah dengan fokus strategi sebagai berikut:

PP1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah

- SP1.1 peningkatan kinerja pelayanan publik berteknologi tinggi dan integratif;
- SP1.2 peningkatan kapabilitas teknologi penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi infrastruktur, sumber daya manusia, dan regulasi guna mendukung transformasi digital
- SP1.3 pengembangan kualitas perencanaan berbasis data terintegrasi, riset dan risiko serta berorientasi kinerja
- SP1.4 peningkatan kinerja tata kelola data terintegrasi berbasis sistem informasi
- SP1.5 pengembangan ekosistem riset dan inovasi, integrasi IPTEK dalam sektor-sektor prioritas daerah, peningkatan hilirisasi hasil riset, penguatan kolaborasidalam pengembangan riset dan inovasi;
- SP1.6 peningkatan kualitas manajemen ASN dengan pengembangan manajemen kinerja dan talenta disertai reward and punishment yang berkeadilan
- SP1.7 pengembangan kompetensi berbasis analisis kesenjangan kinerja dan kompetensi disertai dengan penguatan nilai integritas
- SP1.8 peningkatan nilai-nilai anti korupsi dan budaya integritas penyelenggara pemerintahan
- SP1.9 peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian berbasis risiko, serta integrasi penguatan integritas dan pencegahan korupsi
- SP1.10 peningkatan kualitas analisis evaluasi dan pengawasan produk hukum, jaringan dokumentasi hukum, serta kapasitas penyusunan produk hukum
- SP1.11 peningkatan layanan bantuan hukum dan peningkatan fasilitasi penyelesaian perrmasalahan hukum
- SP1.12 peningkatan kualitas pengelolaan digitalisasi manajemen kearsipan
- SP1.13 penguatan kelembagaan agar lebih efektif
- SP1.14 peningkatan sinergi pelaksanaan reforma agraria
- SP1.15 penguatan koordinasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta peningkatan pemanfaatan data administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dalam perencanaan pembangunan daerah
- SP1.16 peningkatan kapasitas SDM, penguatan pemetaan daerah rawan, penegakan produk hukum daerah serta pelibatan aktif masyarakat dalam menjaga trantibum

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SP1.17 peningkatan pemenuhan hak asasi manusia bagi kelompok rentan terkait layanan dasar serta penjaminan kesetaraan dan kebebasan sipil

SP1.18 pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat

SP1.19 peningkatan integritas dan peran partai politik dalam pemajuan demokrasi

SP1.20 pembentukan jejaring global dalam peningkatan perekonomian dan ketahanan regional

SP1.21 penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat dengan berasaskan kepada Pancasila

SP1.22 penguatan mitigasi ekstremisme, terorisme, radikalisme, dan kriminalisme

SP1.23 peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah dan peningkatan kualitas belanja daerah

SP1.24 penguatan potensi pembiayaan alternatif dan kreatif daerah

SP1.25 sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional

SP1.26 perluasan pemanfaatan layanan jasa keuangan masyarakat untuk menumbuhkan perekonomian yang merata dan berkualitas

PP2. Peningkatan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan

SP2.1 peningkatan produktivitas sektor industri pengolahan dan pemberdayaan pelaku industri lokal

SP2.2 peningkatan kontribusi sektor perdagangan dengan efisiensi distribusi dan stabilitas harga

SP2.3 peningkatan kontribusi sektor pariwisata pada PDRB dan nilai tambah ekonomi kreatif berbasis inovasi

SP2.4 peningkatan daya saing koperasi dan usaha kecil menengah (UKM)

SP2.5 peningkatan produksi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan

SP2.6 peningkatan pembinaan pertambangan dengan penerapan *Good Mining Practice*

SP2.7 peningkatan pertumbuhan penanaman modal

SP2.8 pengembangan ekosistem halal, industri halal dan penguatan keuangan syariah

SP2.9 peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa, dan penumpang, serta keterhubungan antar daerah (utamanya konektivitas antar destinasi wisata unggulan) dan kewilayahan

SP2.10 peningkatan pengembangan perekonomian desa berbasis potensi pariwisata berkelanjutan

SP2.11 peningkatan peran BUMDes dan lembaga ekonomi desa lainnya dalam mendukung pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah

SP2.12 peningkatan kerja sama pengembangan potensi pariwisata desa dan peningkatan
pengembangan kawasan perdesaan

SP2.13 peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan termasuk integrasi kegiatan posyandu untuk mendukung SPM dan penguatan peran lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan serta lembaga adat desa

SP2.14 peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa

SP2.15 peningkatan upaya pengendalian inflasi daerah

SP2.16 pemulihan ekosistem dan pelestarian keanekaragaman hayati

SP2.17 peningkatan produktivitas komoditi sumber daya alam dan jasa lingkungan dengan prinsip keberlanjutan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SP2.18 peningkatan penerapan inisiatif skema insentif/disinsentif bagi pelaku usaha serta apresiasi untuk masyarakat yang menerapkan praktik berkelanjutan

SP2.19 peningkatan upaya dan inisiatif konservasi berbasis masyarakat dengan pendekatan keterpaduan/ integrasi pengelolaan lanskap darat dan laut

SP2.20 penguatan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air guna meningkatkan ketersediaan air baku

SP2.21 peningkatan pengelolaan air tanah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan

SP2.22 inisiasi penerapan pendanaan hijau untuk mendukung kelestarian lingkungan hidup

SP2.23 peningkatan ketahanan energi berbasis potensi lokal (utamanya mendukung kawasan pariwisata)

SP2.24 akselerasi dan sinergi antar pemerintah, swasta dan masyarakat dalam implementasi kebijakan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim

SP2.25 peningkatan pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir yang mencakup seluruh rantai layanan yang disertai dengan penguatan serta penegakan hukum dan peraturan

SP2.26 peningkatan kualitas air melalui pengelolaan limbah industri UMKM

SP2.27 peningkatan infrastruktur sanitasi air limbah domestik

SP2.28 peningkatan akses air minum yang dikelola secara aman dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya air

SP2.29 peningkatan aksesibilitas dan kualitas kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan

SP2.30 penguatan infrastruktur hijau dan penerapan zero waste tourism dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan

SP2.31 peningkatan integrasi rencana tata ruang dan rencana sektoral melalui penyusunan dokumen Sinkronisasi Program Penataan Ruang (SPPR)

SP2.32 penguatan kelembagaan dan kapasitas institusi penanggulangan bencana

SP2.33 peningkatan kesiapsiagaan dan respon tanggap darurat bencana

SP2.34 pemberdayaan sosial dan ekonomi untuk membangun ketahanan masyarakat

SP2.35 pengelolaan data dan informasi untuk pengambilan keputusan

SP2.36 pengembangan literasi kebencanaan, pemberdayaan masyarakat, dan inklusi sosial dalam penanggulangan bencana

SP2.37 perluasan jejaring kemitraan serta pendanaan alternatif

SP2.38 pengembangan riset dan inovasi kebencanaan serta pemanfaatan teknologi

PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter

SP3.1 peningkatan kompetensi siswa SMK, keahlian guru SMK berbasis industri serta revitalisasi alat praktik kejuruan

SP3.2 peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan secara bertahap dengan penyediaan layanan pendidikan pada wilayah blankspot, penguatan kerja sama pemerintah-swasta, serta evaluasi strategi penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS)

SP3.3 peningkatan mutu pendidikan berbasis literasi-numerasi dan digital, STEAM, kualitas pengajaran guru dan pembelajaran siswa, serta pengelolaan SMK Boarding dan Semi Boarding

SP3.4 peningkatan pendidikan karakter melalui penanaman nilai agama dan budaya, implementasi kurikulum yang adaptif serta penguatan sekolah inklusi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SP3.5 penguatan tata kelola pendidikan berorientasi kepemimpinan instruksional dan berbasis telaah/analisis;
SP3.6 pengembangan prasarana sarana layanan kesehatan primer dan lanjutan
SP3.7 pengembangan kompetensi SDM kesehatan untuk mendukung layanan rujukan berbasis kompetensi
SP3.8 pengembangan keterampilan kader kesehatan
SP3.9 peningkatan cakupan kepesertaan aktif
SP3.10 pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi kesehatan terintegrasi;
SP3.11 pemerataan sumber daya kesehatan daerah serta tenaga cadangan kesehatan
SP3.12 peningkatan dan penguatan literasi masyarakat di bidang kesehatan
SP3.13 peningkatan jejaring pelayanan dengan berbagai pemangku kepentingan di tingkat daerah dan nasional
SP3.14 peningkatan kualitas data dan informasi kebudayaan
SP3.15 peningkatan pengembangan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya yang berkelanjutan
SP3.16 peningkatan kualitas SDM dan lembaga kebudayaan untuk mewujudkan talenta nasional seni budaya
SP3.17 pengembangan kerja sama lintas sektor dan kemitraan dalam pemajuan kebudayaan
SP3.18 peningkatan kualitas prasarana sarana kebudayaan
SP3.19 peningkatan literasi masyarakat dalam berolahraga, peningkatan penyadaran masyarakat dalam berolahraga, peningkatan kualitas dan kuantitas SDM keolahragaan, pembinaan atlet potensial, pembinaan cabang olahraga unggulan, peningkatan prasarana sarana olahraga masyarakat, peningkatan prasarana sarana olahraga cabor unggulan
SP3.20 perluasan literasi melalui pelibatan pemangku kepentingan
SP3.21 mengoptimalkan akuisisi arsip secara tematis
SP3.22 peningkatan partisipasi pemuda melalui wirausaha muda kreatif dan inovatif
SP3.23 peningkatan pemerataan perlindungan dan pemberdayaan sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial
SP3.24 peningkatan pembangunan berbasis gender
SP3.25 peningkatan ketahanan keluarga
SP3.26 pelatihan peningkatan produktivitas, sertifikasi kompetensi dan perluasan kemitraan dengan dunia industri dan dunia usaha

Target indikator makro pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027 yang akan dicapai antara lain meliputi :

1) Angka Kemiskinan sebesar 8,51 – 8,17%;
2) Indeks Modal Manusia sebesar 0,63;
3) Pertumbuhan Ekonomi antara 5,30 – 7,00%;
4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,65– 4,08 %;
5) Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 92,50;
6) Indeks Integritas Nasional sebesar 82,25;
7) Indeks Demokrasi Indonesia sebesar 86,80 – 90,22;
8) Otonomi Fiskal Daerah sebesar 66,80%
9) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 75,78;
10) Inflasi pada angka 1,5 – 3,5%;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

11) PDRB per kapita sebesar 56,0 – 59,8 juta rupiah.

Keterangan :

*Perubahan metode perhitungan IKLH berdasarkan Surat Sekditjen PPKL KLHK Nomor S.135/SETPPKL/PEHKT/PKL.1.2/B/02/2024 yang berlaku mulai tahun 2025

4.2.3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Salatiga Tahun 2027

Tahapan pelaksanaan pembangunan merupakan sebuah mekanisme pemilihan fokus dan tema pembangunan pada masing-masing tahun perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Salatiga. Pembangunan Kota Salatiga tahun 2027 berdasarkan tahapan RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029 adalah pada tahap "***Pengembangan SDM yang sehat dan cerdas dan perekonomian daerah yang unggul, didukung pelayanan publik bermutu dan infrastruktur wilayah yang sesuai daya dukung lingkungan hidup***". Kebijakan tahun 2027 diarahkan pada **"pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif didukung dengan SDM Unggul"** yang difokuskan pada meningkatkan kontribusi sektor pariwisata dan perdagangan dalam perekonomian daerah; mengembangkan komunitas pembelajaran bahasa dan keterampilan komunikasi internasional; meningkatkan dukungan kelembagaan dan operasional pada pendidikan kesetaraan dan lembaga keterampilan; meningkatkan kualitas SDM dan fasilitasi kesehatan; serta meningkatkan kualitas dan pemerataan Pendidikan.

Memperhatikan prioritas pembangunan nasional dan provinsi serta berdasarkan tahapan RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029 maka pada tahun 2027 Pembangunan Kota Salatiga diprioritaskan pada :

1. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berkarakter, dengan arah kebijakan pada :
   a. Mengembangkan pembelajaran inklusif pada setiap sekolah untuk menjamin pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dan memberikan kesetaraan
   b. Meningkatkan kualitas pengelolaan perpustakaan dan naskah kuno serta pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan di Kota Salatiga
   c. Meningkatkan pengetahuan kesehatan masyarakat untuk mendukung promotif dan preventif terutama dalam edukasi gaya hidup sehat, kesehatan mental, pencegahan penyakit menular dan tidak menular
   d. Meningkatkan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat secara keseluruhan
2. Pengembangan potensi perekonomian daerah yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif, dengan arah kebijakan pada:
   a. Meningkatkan investasi dalam mendukung kapasitas produksi daerah didukung peningkatan kondisi iklim investasi yang kondusif dengan pengembangan SDM, teknologi dan promosi potensi daerah secara masif
   b. Meningkatkan kapasitas tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri dan pasar kerja

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

c. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perdagangan dan mendorong digitalisasi serta kemitraan/kolaborasi antara pedagang dan UMKM untuk menghasilkan produk kualitas ekspor
d. Meningkatkan cakupan perlindungan, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan ekonomi PPKS
e. Mengembangkan ketahanan pangan berbasis komunitas, pengembangan urban farming, memperluas kerjasama antara petani, pedagang, dan konsumen untuk menciptakan sistem pangan yang lebih efisien dan berkelanjutan
f. Meningkatkan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat

3. Pengembangan Pelayanan publik yang bermutu dan berorientasi pada kepuasan masyarakat, dengan arah kebijakan pada:
   a. Penguatan kerukunan sosial, agama, ras maupun kelompok masyarakat melalui peningkatan pendidikan politik dan wawasan kebangsaan dalam berbagai kegiatan guna meningkatkan cinta tanah air, nilai-nilai toleransi dan saling menghormati dalam pendidikan dan kehidupan sehari-hari
   b. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, pengembangan aset produktif dan mengembangkan sumber pendapatan daerah yang memiliki potensi jangka panjang
   c. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan pengembangan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat
   d. Perluasan jaringan internet broadband dan penyediaan akses WiFi publik di fasilitas layanan umum
   e. Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana pelayanan serta jangkauan layanan kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat
   f. Meningkatkan peran kelembagaan ditingkat kecamatan dan kelurahan (PKK, LPMK dll) dalam pelaksanaan pemberdayaan, monitoring dan evaluasi pembangunan terutama dalam mendukung tercapainya kecamatan berdaya
   g. Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang efektif dan efisien
4. Integrasi rencana tata ruang dengan instrumen pengelolaan lingkungan hidup, dengan arah kebijakan pada:
   a. Meningkatkan pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan secara konsisten yang didukung dengan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat
   b. Mengembangkan riset dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang mampu meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat
5. Pengembangan infrastruktur kewilayahan sesuai arah pengembangan wilayah, dengan arah kebijakan pada:
   a. Mengembangkan infrastruktur dan fasilitas pendukung olahraga yang terjangkau dan lebih mudah diakses masyarakat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

b. Mengembangkan infrastruktur industri yang memadai, penyediaan wilayah peruntukan industri yang terintegrasi, peningkatan inovasi dengan memberikan insentif untuk adopsi teknologi terbaru dalam proses produksi

Sasaran pembangunan pada tahun 2027 berdasarkan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Salatiga Tahun 2025-2029 dan hasil rapat koordinasi teknis perencanaan pembangunan (Rakortekbang) Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Angka Kemiskinan antara 3,87% - 3,52%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka antara 3,82% - 3,52%
3. Pertumbuhan Ekonomi antara 6,10% - 7,95%
4. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 87,63

Prioritas pembangunan Kota salatiga tahun 2027 yang disusun berdasarkan RPJMD 2025-2029 juga memperhatikan :

1. Prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi.
   Persandingan prioritas pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Tengah serta prioritas pembangunan Kota Salatiga sebagaimana dalam tabel 4.3;
2. Upaya penanganan permasalahan dan isu strategis
   Sinkronisasi permasalahan, isu strategis dan program prioritas sebagaimana tersaji dalam tabel 4.4;
3. Upaya mendukung kebijakan Nasional antara lain Penerapan SPM, Pembangunan Berkelanjutan, penanggulangan kemiskinan dan Stunting yang akan dilaksanakan tahun 2027 .

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 4. 4. Keterkaitan Tema Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Tengah, dan Kota Salatiga Tahun 2027

TEMA RKP	Provinsi		Kota Salatiga	
	Tahapan Pembangunan	Fokus Tematik	Tahapan Pembangunan	Fokus Tematik
Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas Investasi, dan Industri	*Peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah*	*Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah Sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi*	*Pengembangan SDM yang sehat dan cerdas dan perekonomian daerah yang unggul, didukung pelayanan publik bermutu dan infrastruktur wilayah yang sesuai daya dukung lingkungan hidup*	*Pengembangan Kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif didukung dengan SDM Unggul*

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 4. 5. Keterkaitan Arah kebijakan dan Strategi Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kota Salatiga Tahun 2027

No	Nasional	Arah Kebijakan dan Strategi		Fokus Tematik	
		Provinsi	Kota Salatiga	Provinsi	Kota Salatiga
	Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas Investasi, dan Industri	***Peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah***	**Pengembangan SDM yang sehat dan cerdas dan perekonomian daerah yang unggul, didukung pelayanan publik bermutu dan infrastruktur wilayah yang sesuai daya dukung lingkungan hidup**	***Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah Sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi***	***Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif didukung dengan SDM Unggul***
1	PN1 : Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	PP1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah	PD16. Perluasan jaringan internet broadband dan penyediaan akses WiFi publik di fasilitas layanan umum		
		SP1.1 peningkatan kinerja pelayanan publik berteknologi tinggi dan integratif;			
		SP1.2 peningkatan kapabilitas teknologi penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi infrastruktur, sumber daya manusia, dan regulasi guna mendukung transformasi digital			
		SP1.3 pengembangan kualitas perencanaan berbasis data terintegrasi, riset dan risiko serta berorientasi kinerja			
		SP1.4 peningkatan kinerja tata kelola data terintegrasi berbasis sistem informasi			
		SP1.5 pengembangan ekosistem riset dan inovasi, integrasi IPTEK dalam sektor-sektor prioritas daerah, peningkatan hilirisasi hasil			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Nasional	Arah Kebijakan dan Strategi		Fokus Tematik	
		Provinsi	Kota Salatiga	Provinsi	Kota Salatiga
	Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas Investasi, dan Industri	***Peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah***	**Pengembangan SDM yang sehat dan cerdas dan perekonomian daerah yang unggul, didukung pelayanan publik bermutu dan infrastruktur wilayah yang sesuai daya dukung lingkungan hidup**	***Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah Sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi***	***Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif didukung dengan SDM Unggul***
			riset, penguatan kolaborasidalam pengembangan riset dan inovasi;		
		SP1.6	peningkatan kualitas manajemen ASN dengan pengembangan manajemen kinerja dan talenta disertai reward and punishment yang berkeadilan		
		SP1.7	pengembangan kompetensi berbasis analisis kesenjangan kinerja dan kompetensi disertai dengan penguatan nilai integritas		
		SP1.8	peningkatan nilai-nilai anti korupsi dan budaya integritas penyelenggara pemerintahan		
		SP1.9	peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian berbasis risiko, serta integrasi penguatan integritas dan pencegahan korupsi		
		SP1.10	peningkatan kualitas analisis evaluasi dan		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Nasional	Arah Kebijakan dan Strategi		Fokus Tematik	
		Provinsi	Kota Salatiga	Provinsi	Kota Salatiga
	Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas Investasi, dan Industri	***Peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah***	**Pengembangan SDM yang sehat dan cerdas dan perekonomian daerah yang unggul, didukung pelayanan publik bermutu dan infrastruktur wilayah yang sesuai daya dukung lingkungan hidup**	***Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah Sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi***	***Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif didukung dengan SDM Unggul***
		pengawasan produk hukum, jaringan dokumentasi hukum, serta kapasitas penyusunan produk hukum			
		SP1.11 peningkatan layanan bantuan hukum dan peningkatan fasilitasi penyelesaian perrmasalahan hukum			
		SP1.12 peningkatan kualitas pengelolaan digitalisasi manajemen kearsipan			
		SP1.13 penguatan kelembagaan agar lebih efektif			
		SP1.14 peningkatan sinergi pelaksanaan reforma agraria			
		SP1.15 penguatan koordinasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta peningkatan pemanfaatan data administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dalam perencanaan pembangunan daerah			
		SP1.16 peningkatan kapasitas SDM, penguatan pemetaan			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Nasional	Arah Kebijakan dan Strategi		Fokus Tematik	
		Provinsi	Kota Salatiga	Provinsi	Kota Salatiga
	Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas Investasi, dan Industri	***Peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah***	**Pengembangan SDM yang sehat dan cerdas dan perekonomian daerah yang unggul, didukung pelayanan publik bermutu dan infrastruktur wilayah yang sesuai daya dukung lingkungan hidup**	***Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah Sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi***	***Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif didukung dengan SDM Unggul***
		daerah rawan, penegakan produk hukum daerah serta pelibatan aktif masyarakat dalam menjaga trantibum			
		SP1.17 peningkatan pemenuhan hak asasi manusia bagi kelompok rentan terkait layanan dasar serta penjaminan kesetaraan dan kebebasan sipil			
		SP1.18 pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat			
		SP1.19 peningkatan integritas dan peran partai politik dalam pemajuan demokrasi			
		SP1.20 pembentukan jejaring global dalam peningkatan perekonomian dan ketahanan regional			
		SP1.21 penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat dengan berasaskan kepada Pancasila			
		SP1.22 penguatan mitigasi ekstremisme, terorisme,			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Nasional	Arah Kebijakan dan Strategi		Fokus Tematik	
		Provinsi	Kota Salatiga	Provinsi	Kota Salatiga
	Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas Investasi, dan Industri	***Peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah***	**Pengembangan SDM yang sehat dan cerdas dan perekonomian daerah yang unggul, didukung pelayanan publik bermutu dan infrastruktur wilayah yang sesuai daya dukung lingkungan hidup**	***Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah Sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi***	***Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif didukung dengan SDM Unggul***
		radikalisme, dan kriminalisme			
		SP1.23 peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah dan peningkatan kualitas belanja daerah			
		SP1.24 penguatan potensi pembiayaan alternatif dan kreatif daerah			
		SP1.25 sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional			
		SP1.26 perluasan pemanfaatan layanan jasa keuangan masyarakat untuk menumbuhkan perekonomian yang merata dan berkualitas			
2	PN2 : Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,	PP2. Peningkatan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan	PD11. Mengembangkan ketahanan pangan berbasis komunitas, pengembangan urban farming, memperluas kerjasama antara petani, pedagang, dan konsumen untuk menciptakan sistem		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Nasional	Arah Kebijakan dan Strategi		Fokus Tematik	
		Provinsi	Kota Salatiga	Provinsi	Kota Salatiga
	Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas Investasi, dan Industri	***Peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah***	**Pengembangan SDM yang sehat dan cerdas dan perekonomian daerah yang unggul, didukung pelayanan publik bermutu dan infrastruktur wilayah yang sesuai daya dukung lingkungan hidup**	***Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah Sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi***	***Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif didukung dengan SDM Unggul***
	Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru		pangan yang lebih efisien dan berkelanjutan		
3	PN 3 : Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PP2. Peningkatan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan	PD5. Mengembangkan infrastruktur dan fasilitas pendukung olahraga yang terjangkau dan lebih mudah diakses masyarakat		
		SP2.1 peningkatan produktivitas sektor industri pengolahan dan pemberdayaan pelaku industri lokal	PD10. Meningkatkan cakupan perlindungan, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan ekonomi PPKS		
		SP2.2 peningkatan kontribusi sektor perdagangan dengan efisiensi distribusi dan stabilitas harga	PD12. Meningkatkan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat		
		SP2.3 peningkatan kontribusi sektor pariwisata pada PDRB dan nilai tambah ekonomi kreatif berbasis inovasi	PD20. Meningkatkan pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan secara konsisten yang didukung dengan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat		
		SP2.4 peningkatan daya saing koperasi dan usaha kecil menengah (UKM)			
		SP2.5 peningkatan produksi sektor pertanian,			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Nasional	Arah Kebijakan dan Strategi		Fokus Tematik	
		Provinsi	Kota Salatiga	Provinsi	Kota Salatiga
	Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas Investasi, dan Industri	***Peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah***	**Pengembangan SDM yang sehat dan cerdas dan perekonomian daerah yang unggul, didukung pelayanan publik bermutu dan infrastruktur wilayah yang sesuai daya dukung lingkungan hidup**	***Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah Sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi***	***Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif didukung dengan SDM Unggul***
		perkebunan, peternakan, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan			
		SP2.6 peningkatan pembinaan pertambangan dengan penerapan *Good Mining Practice*			
		SP2.7 peningkatan pertumbuhan penanaman modal			
		SP2.8 pengembangan ekosistem halal, industri halal dan penguatan keuangan syariah			
		SP2.9 peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa, dan penumpang, serta keterhubungan antar daerah (utamanya konektivitas antar destinasi wisata unggulan) dan kewilayahan			
		SP2.10 peningkatan pengembangan perekonomian desa berbasis potensi pariwisata berkelanjutan			
		SP2.11 peningkatan peran BUMDes dan lembaga			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Nasional	Arah Kebijakan dan Strategi		Fokus Tematik	
		Provinsi	Kota Salatiga	Provinsi	Kota Salatiga
	Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas Investasi, dan Industri	***Peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah***	**Pengembangan SDM yang sehat dan cerdas dan perekonomian daerah yang unggul, didukung pelayanan publik bermutu dan infrastruktur wilayah yang sesuai daya dukung lingkungan hidup**	***Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah Sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi***	***Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif didukung dengan SDM Unggul***
		ekonomi desa lainnya dalam mendukung pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah			
		SP2.12 peningkatan kerja sama pengembangan potensi pariwisata desa dan peningkatan pengembangan kawasan perdesaan			
		SP2.13 peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan termasuk integrasi kegiatan posyandu untuk mendukung SPM dan penguatan peran lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan serta lembaga adat desa			
		SP2.14 peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa			
		SP2.15 peningkatan upaya pengendalian inflasi daerah			
		SP2.16 pemulihan ekosistem dan pelestarian keanekaragaman hayati			
		SP2.17 peningkatan produktivitas komoditi sumber daya			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Nasional	Arah Kebijakan dan Strategi		Fokus Tematik	
		Provinsi	Kota Salatiga	Provinsi	Kota Salatiga
	Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas Investasi, dan Industri	***Peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah***	**Pengembangan SDM yang sehat dan cerdas dan perekonomian daerah yang unggul, didukung pelayanan publik bermutu dan infrastruktur wilayah yang sesuai daya dukung lingkungan hidup**	***Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah Sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi***	***Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif didukung dengan SDM Unggul***
		alam dan jasa lingkungan dengan prinsip keberlanjutan			
		SP2.18 peningkatan penerapan inisiatif skema insentif/disinsentif bagi pelaku usaha serta apresiasi untuk masyarakat yang menerapkan praktik berkelanjutan			
		SP2.19 peningkatan upaya dan inisiatif konservasi berbasis masyarakat dengan pendekatan keterpaduan/ integrasi pengelolaan lanskap darat dan laut			
		SP2.20 penguatan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air guna meningkatkan ketersediaan air baku			
		SP2.21 peningkatan pengelolaan air tanah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan			
		SP2.22 inisiasi penerapan pendanaan hijau untuk			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Nasional	Arah Kebijakan dan Strategi		Fokus Tematik	
		Provinsi	Kota Salatiga	Provinsi	Kota Salatiga
	Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas Investasi, dan Industri	***Peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah***	**Pengembangan SDM yang sehat dan cerdas dan perekonomian daerah yang unggul, didukung pelayanan publik bermutu dan infrastruktur wilayah yang sesuai daya dukung lingkungan hidup**	***Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah Sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi***	***Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif didukung dengan SDM Unggul***
		mendukung kelestarian lingkungan hidup			
		SP2.23 peningkatan ketahanan energi berbasis potensi lokal (utamanya mendukung kawasan pariwisata)			
		SP2.24 akselerasi dan sinergi antar pemerintah, swasta dan masyarakat dalam implementasi kebijakan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim			
		SP2.25 peningkatan pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir yang mencakup seluruh rantai layanan yang disertai dengan penguatan serta penegakan hukum dan peraturan			
		SP2.26 peningkatan kualitas air melalui pengelolaan limbah industri UMKM			
		SP2.27 peningkatan infrastruktur sanitasi air limbah domestik			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Nasional	Arah Kebijakan dan Strategi		Fokus Tematik	
		Provinsi	Kota Salatiga	Provinsi	Kota Salatiga
	Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas Investasi, dan Industri	***Peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah***	**Pengembangan SDM yang sehat dan cerdas dan perekonomian daerah yang unggul, didukung pelayanan publik bermutu dan infrastruktur wilayah yang sesuai daya dukung lingkungan hidup**	***Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah Sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi***	***Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif didukung dengan SDM Unggul***
		SP2.28 peningkatan akses air minum yang dikelola secara aman dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya air			
		SP2.29 peningkatan aksesibilitas dan kualitas kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan			
		SP2.30 penguatan infrastruktur hijau dan penerapan zero waste tourism dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan			
		SP2.31 peningkatan integrasi rencana tata ruang dan rencana sektoral melalui penyusunan dokumen Sinkronisasi Program Penataan Ruang (SPPR)			
		SP2.32 penguatan kelembagaan dan kapasitas institusi penanggulangan bencana			
		SP2.33 peningkatan kesiapsiagaan dan respon tanggap darurat bencana			
		SP2.34 pemberdayaan sosial dan ekonomi untuk			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Nasional	Arah Kebijakan dan Strategi		Fokus Tematik	
		Provinsi	Kota Salatiga	Provinsi	Kota Salatiga
	Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas Investasi, dan Industri	***Peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah***	**Pengembangan SDM yang sehat dan cerdas dan perekonomian daerah yang unggul, didukung pelayanan publik bermutu dan infrastruktur wilayah yang sesuai daya dukung lingkungan hidup**	***Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah Sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi***	***Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif didukung dengan SDM Unggul***
		membangun ketahanan masyarakat			
		SP2.35 pengelolaan data dan informasi untuk pengambilan keputusan			
		SP2.36 pengembangan literasi kebencanaan, pemberdayaan masyarakat, dan inklusi sosial dalam penanggulangan bencana			
		SP2.37 perluasan jejaring kemitraan serta pendanaan alternatif			
		SP2.38 pengembangan riset dan inovasi kebencanaan serta pemanfaatan teknologi			
4	PN 4 : Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda,	PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	PD1. Mengembangkan pembelajaran inklusif pada setiap sekolah untuk menjamin pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dan memberikan kesetaraan	FP17. penguatan kapasitas dan kompetensi guru serta siswa SMA, SLB dan SMK bidang keahlian layanan pariwisata, seni, kriya, kuliner, tata boga, busana, perhotelan, dan perbankan syariah termasuk ekonomi kreatif dan kewirausahaan halal	FD2. Mengembangkan komunitas pembelajaran bahasa dan keterampilan komunikasi internasional (Bahasa Inggris, Bahasa Arab dan Bahasa Cina)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Nasional	Arah Kebijakan dan Strategi		Fokus Tematik	
		Provinsi	Kota Salatiga	Provinsi	Kota Salatiga
	Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas Investasi, dan Industri	***Peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah***	**Pengembangan SDM yang sehat dan cerdas dan perekonomian daerah yang unggul, didukung pelayanan publik bermutu dan infrastruktur wilayah yang sesuai daya dukung lingkungan hidup**	***Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah Sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi***	***Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif didukung dengan SDM Unggul***
	dan Penyandang Disabilitas	SP3.1 peningkatan kompetensi siswa SMK, keahlian guru SMK berbasis industri serta revitalisasi alat praktik kejuruan		FP18. revitalisasi kurikulum SMK seni, kriya, kuliner, tata boga, busana, perhotelan, layanan pariwisata dan perbankan syariah selaras dengan kebutuhan usaha dan industri	FD5. Meningkatkan kualitas dan pemerataan sarana prasarana, tenaga pendidik, dan kurikulum berbasis digital pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah menuju Pendidikan Salatiga Standar Internasional
		SP3.2 peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan secara bertahap dengan penyediaan layanan pendidikan pada wilayah blankspot, penguatan kerja sama pemerintah-swasta, serta evaluasi strategi penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS)		FP19. penguatan integrasi tema pariwisata, budaya, ekonomi kreatif dan syariah dalam kurikulum SMA dan SLB berbasis project integratif dan lintas;	
		SP3.3 peningkatan mutu pendidikan berbasis literasi-numerasi dan digital, STEAM, kualitas		FP20. penguatan kemitraan DUDI melalui sinkronisasi kompetensi dan penyusunan	FD3. Meningkatkan dukungan kelembagaan dan operasional pada

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Nasional	Arah Kebijakan dan Strategi		Fokus Tematik	
		Provinsi	Kota Salatiga	Provinsi	Kota Salatiga
	Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas Investasi, dan Industri	***Peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah***	**Pengembangan SDM yang sehat dan cerdas dan perekonomian daerah yang unggul, didukung pelayanan publik bermutu dan infrastruktur wilayah yang sesuai daya dukung lingkungan hidup**	***Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah Sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi***	***Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif didukung dengan SDM Unggul***
		pengajaran guru dan pembelajaran siswa, serta pengelolaan SMK Boarding dan Semi Boarding		Memorandum of Agreement (MoA) untuk kegiatan spesifik antara lain dengan perusahaan atau hotel syariah, restoran halal, biro perjalanan haji-umrah, bank syariah, UMKM kriya lokal, desa wisata halal, serta perguruan tinggi termasuk dukungan program magang dan sertifikasi halal	pendidikan kesetaraan dan lembaga keterampilan dalam pembelajaran kewirausahaan berorentasi global
		SP3.4 peningkatan pendidikan karakter melalui penanaman nilai agama dan budaya, implementasi kurikulum yang adaptif serta penguatan sekolah inklusi		FP21. peningkatan upaya pelestarian dan pemanfaatan karya budaya dan cagar budaya sebagai salah satu daya tarik wisata melalui pemetaan karya budaya dan cagar budaya potensial, pemeliharaan prasarana sarana kebudayaan, peningkatan upaya diplomasi budaya tingkat nasional/internasional, serta penguatan	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Nasional	Arah Kebijakan dan Strategi		Fokus Tematik	
		Provinsi	Kota Salatiga	Provinsi	Kota Salatiga
	Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas Investasi, dan Industri	***Peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah***	**Pengembangan SDM yang sehat dan cerdas dan perekonomian daerah yang unggul, didukung pelayanan publik bermutu dan infrastruktur wilayah yang sesuai daya dukung lingkungan hidup**	***Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah Sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi***	***Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif didukung dengan SDM Unggul***
					SDM/lembaga/komunitas kebudayaan sebagai agen diplomasi budaya	
		SP3.5 penguatan tata kelola pendidikan berorientasi kepemimpinan instruksional dan berbasis telaah/analisis;		FP23. perluasan literasi berwawasan lingkungan hidup berkelanjutan dan literasi ekonomi berbasis syariah melalui pelibatan pemangku kepentingan	
		SP3.6 pengembangan prasarana sarana layanan kesehatan primer dan lanjutan		FP25. peningkatan partisipasi pemuda dalam bidang pariwisata, wisata kreatif, membangun startup berbasis syariah	
		SP3.7 pengembangan kompetensi SDM kesehatan untuk mendukung layanan rujukan berbasis kompetensi	PD2. Meningkatkan kualitas pengelolaan perpustakaan dan naskah kuno serta pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan di Kota Salatiga	FP24. mengoptimalkan fungsi kearsipan dalam melestarikan memori kolektif berbasis kelestarian lingkungan hidup berkelanjutan	
		SP3.8 pengembangan keterampilan kader kesehatan	PD3. Meningkatkan pengetahuan kesehatan masyarakat untuk mendukung promotif dan preventif terutama dalam edukasi gaya hidup sehat, kesehatan mental,	FP22. penguatan event olahraga pariwisata ramah lingkungan dan berkelanjutan	FD4. Meningkatkan kualitas SDM dan fasilitas puskesmas, rumah sakit daerah berstandar internasional, dan klinik kesehatan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Nasional	Arah Kebijakan dan Strategi		Fokus Tematik	
		Provinsi	Kota Salatiga	Provinsi	Kota Salatiga
	Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas Investasi, dan Industri	***Peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah***	**Pengembangan SDM yang sehat dan cerdas dan perekonomian daerah yang unggul, didukung pelayanan publik bermutu dan infrastruktur wilayah yang sesuai daya dukung lingkungan hidup**	***Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah Sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi***	***Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif didukung dengan SDM Unggul***
			pencegahan penyakit menular dan tidak menular		daerah yang berkualitas dan modern didukung dengan sistem layanan terintegrasi
		SP3.9 peningkatan cakupan kepesertaan aktif	PD4. Meningkatkan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat secara keseluruhan		
		SP3.10 pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi kesehatan terintegrasi;			
		SP3.11 pemerataan sumber daya kesehatan daerah serta tenaga cadangan kesehatan			
		SP3.12 peningkatan dan penguatan literasi masyarakat di bidang kesehatan			
		SP3.13 peningkatan jejaring pelayanan dengan berbagai pemangku kepentingan di tingkat daerah dan nasional			
		SP3.14 peningkatan kualitas data dan informasi kebudayaan			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Nasional	Arah Kebijakan dan Strategi		Fokus Tematik	
		Provinsi	Kota Salatiga	Provinsi	Kota Salatiga
	Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas Investasi, dan Industri	***Peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah***	**Pengembangan SDM yang sehat dan cerdas dan perekonomian daerah yang unggul, didukung pelayanan publik bermutu dan infrastruktur wilayah yang sesuai daya dukung lingkungan hidup**	***Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah Sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi***	***Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif didukung dengan SDM Unggul***
		SP3.15 peningkatan pengembangan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya yang berkelanjutan			
		SP3.16 peningkatan kualitas SDM dan lembaga kebudayaan untuk mewujudkan talenta nasional seni budaya			
		SP3.17 pengembangan kerja sama lintas sektor dan kemitraan dalam pemajuan kebudayaan			
		SP3.18 peningkatan kualitas prasarana sarana kebudayaan			
		SP3.19 peningkatan literasi masyarakat dalam berolahraga, peningkatan penyadaran masyarakat dalam berolahraga, peningkatan kualitas dan kuantitas SDM keolahragaan, pembinaan atlet potensial, pembinaan cabang olahraga unggulan, peningkatan prasarana sarana olahraga masyarakat, peningkatan			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Nasional	Arah Kebijakan dan Strategi		Fokus Tematik	
		Provinsi	Kota Salatiga	Provinsi	Kota Salatiga
	Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas Investasi, dan Industri	***Peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah***	**Pengembangan SDM yang sehat dan cerdas dan perekonomian daerah yang unggul, didukung pelayanan publik bermutu dan infrastruktur wilayah yang sesuai daya dukung lingkungan hidup**	***Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah Sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi***	***Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif didukung dengan SDM Unggul***
		prasarana sarana olahraga cabor unggulan			
		SP3.20 erluasan literasi melalui pelibatan pemangku kepentingan			
		SP3.21 mengoptimalkan akuisisi arsip secara tematis			
		SP3.22 peningkatan partisipasi pemuda melalui wirausaha muda kreatif dan inovatif			
		SP3.23 peningkatan pemerataan perlindungan dan pemberdayaan sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial			
		SP3.24 peningkatan pembangunan berbasis gender			
		SP3.25 peningkatan ketahanan keluarga			
		SP3.26 pelatihan peningkatan produktivitas, sertifikasi kompetensi dan perluasan kemitraan dengan dunia industri dan dunia usaha			
5	PN 5 : Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam	PP2. Peningkatan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan	PD6. Meningkatkan investasi dalam mendukung kapasitas produksi daerah didukung peningkatan kondisi iklim investasi yang	FP1. pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dan berkelanjutan	FD1. Meningkatkan kontribusi sektor pariwsata dan perdagangan dalam

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Nasional	Arah Kebijakan dan Strategi		Fokus Tematik	
		Provinsi	Kota Salatiga	Provinsi	Kota Salatiga
	Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas Investasi, dan Industri	***Peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah***	**Pengembangan SDM yang sehat dan cerdas dan perekonomian daerah yang unggul, didukung pelayanan publik bermutu dan infrastruktur wilayah yang sesuai daya dukung lingkungan hidup**	***Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah Sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi***	***Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif didukung dengan SDM Unggul***
	untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri		kondusif dengan pengembangan SDM, teknologi dan promosi potensi daerah secara masif		perekonomian daerah
			PD8. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perdagangan dan mendorong digitalisasi serta kemitraan/kolaborasi antara pedagang dan UMKM untuk menghasilkan produk kualitas ekspor	FP2. penguatan promosi pariwisata berbasis digital	
			PD.9 Mengembangkan infrastruktur industri yang memadai, penyediaan wilayah peruntukan industri yang terintegrasi, peningkatan inovasi dengan memberikan insentif untuk adopsi teknologi terbaru dalam proses produksi	FP3. peningkatan kualitas destinasi wisata berbasis klaster dengan perbaikan prasarana sarana destinasi wisata	
				FP4. penguatan diversifikasi daya tarik pariwisata sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah seperti pemanfaatan keragaman	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Nasional	Arah Kebijakan dan Strategi		Fokus Tematik	
		Provinsi	Kota Salatiga	Provinsi	Kota Salatiga
	Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas Investasi, dan Industri	***Peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah***	**Pengembangan SDM yang sehat dan cerdas dan perekonomian daerah yang unggul, didukung pelayanan publik bermutu dan infrastruktur wilayah yang sesuai daya dukung lingkungan hidup**	***Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah Sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi***	***Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif didukung dengan SDM Unggul***
				sumber daya alam, budaya, kreativitas, dan olahraga berbasis digita	
				FP5. peningkatan infrastruktur konektivitas antar destinasi wisata	
				FP6. penguatan integrasi antar destinasi wisata	
				FP7. penguatan kapasitas SDM pelaku pariwisata termasuk pelaku UMKM pariwisata	
				FP8. penguatan fasilitasi kemitraan untuk pengembangan destinasi pariwisata	
				FP9. city beautification dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism, terutama pada kawasan perkotaan	
				FP10. pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Nasional	Arah Kebijakan dan Strategi		Fokus Tematik	
		Provinsi	Kota Salatiga	Provinsi	Kota Salatiga
	Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas Investasi, dan Industri	***Peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah***	**Pengembangan SDM yang sehat dan cerdas dan perekonomian daerah yang unggul, didukung pelayanan publik bermutu dan infrastruktur wilayah yang sesuai daya dukung lingkungan hidup**	***Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah Sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi***	***Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif didukung dengan SDM Unggul***
				dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, ancillary services, aktivitas, available packages) pada kawasan megapolitan/metropolitan (urban tourism), serta kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif Magelang-Yogyakarta-Surakarta	
				FP11. penguatan ekonomi dan keuangan syariah melalui penguatan halal value chain, penguatan keuangan syariah, penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan penguatan ekonomi digital	
				FP12. penguatan kelembagaan pariwisata dan ekonomi syariah agar lebih efektif	
				FP13. peningkatan pemenuhan sarana prasarana pendukung pariwisata desa	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Nasional	Arah Kebijakan dan Strategi		Fokus Tematik	
		Provinsi	Kota Salatiga	Provinsi	Kota Salatiga
	Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas Investasi, dan Industri	***Peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah***	**Pengembangan SDM yang sehat dan cerdas dan perekonomian daerah yang unggul, didukung pelayanan publik bermutu dan infrastruktur wilayah yang sesuai daya dukung lingkungan hidup**	***Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah Sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi***	***Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif didukung dengan SDM Unggul***
				FP14. peningkatan pengembangan perekonomian desa berbasis potensi pariwisata berkelanjutan	
				FP15. peningkatan peran BUMDes dan lembaga ekonomi desa lainnya dalam mendukung pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah	
				FP16. peningkatan kerja sama pengembangan potensi pariwisata desa dan peningkatan pengembangan kawasan perdesaan	
6	PN 6 : Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	PP2. Peningkatan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan	PD7. Meningkatkan kapasitas tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri dan pasar kerja		
			PD18. Meningkatkan peran kelembagaan ditingkat kecamatan dan kelurahan (PKK, LPMK dll) dalam pelaksanaan pemberdayaan, monitoring dan evaluasi pembangunan terutama dalam		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Nasional	Arah Kebijakan dan Strategi		Fokus Tematik	
		Provinsi	Kota Salatiga	Provinsi	Kota Salatiga
	Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas Investasi, dan Industri	***Peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah***	**Pengembangan SDM yang sehat dan cerdas dan perekonomian daerah yang unggul, didukung pelayanan publik bermutu dan infrastruktur wilayah yang sesuai daya dukung lingkungan hidup**	***Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah Sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi***	***Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif didukung dengan SDM Unggul***
			mendukung tercapainya kecamatan berdaya		
7	PN 7 : Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	PP1. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	PD14. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, pengembangan aset produktif dan mengembangkan sumber pendapatan daerah yang memiliki potensi jangka panjang		
			PD15. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan pengembangan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat		
			PD17. Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana pelayanan serta jangkauan layanan kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat		
			PD19. Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang efektif dan efisien		
			PD21. Mengembangkan riset dan inovasi dalam penyelenggaraan		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Nasional	Arah Kebijakan dan Strategi		Fokus Tematik	
		Provinsi	Kota Salatiga	Provinsi	Kota Salatiga
	Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas Investasi, dan Industri	***Peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah***	**Pengembangan SDM yang sehat dan cerdas dan perekonomian daerah yang unggul, didukung pelayanan publik bermutu dan infrastruktur wilayah yang sesuai daya dukung lingkungan hidup**	***Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah Sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi***	***Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif didukung dengan SDM Unggul***
			pemerintahan dan pembangunan daerah yang mampu meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat		
8	PN 8 : Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	PP2. Peningkatan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan	PD13. Penguatan kerukunan sosial, agama, ras maupun kelompok masyarakat melalui peningkatan pendidikan politik dan wawasan kebangsaan dalam berbagai kegiatan guna meningkatkan cinta tanah air, nilai-nilai toleransi dan saling menghormati dalam pendidikan dan kehidupan sehari-hari		
		PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter			
		PP1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kota Salatiga melakukan dukungan dan penyelarasan dengan 136 program prioritas Provinsi Jawa Tengah, yang di dalamnya termasuk 35 program delegatif, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4. 6. Dukungan Kegiatan Kota Salatiga terhadap Program Prioritas Delegasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027

No	Program Delegasi	Dukungan Kegiatan Kabupaten/Kota
1	Melahirkan Pemerintahan yang *Good Clear Government* dan *Collaborative Governance* melalui peningkatan kesejahteraan, Profesionalitas dan kualitas ASN dan Perangkat Desa	Peningkatan Profesionalitas ASN dengan menerapkan Manajemen ASN berdasarkan Sistem Merit
		Pembinaan Kelurahan dan LPMK (bagian Pemerintahan)
2	Melahirkan ekosistem ekonomi syariah melalui penguatan regulasi dan pengembangan wisata ramah muslim	Pembinaan kepada Pelaku Usaha Pariwisata terkait Program Pengembangan Wisata Ramah Muslim
3	Desa maju dan berdaya melalui pembangunan lumbung kesejahteraan, produk unggulan go internasional, Sistem Informasi Desa (SID), dan Tim Tanggap Bencana	
4	Pembangunan Infrastruktur melalui Permukiman Layak Huni melalui 1 KK 1 rumah layak huni, Pengembangan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan, dan Gelanggang Olah Raga Internasional	Renovasi Lintasan Sintetik Atletik Stadion Kridanggo KOTA SALATIGA
		"Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota : - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha - Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru"
5	Moderasi Beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi, pendidikan dan pelatihan	- Sosialisasi Peningkatan Rasa Solidaritas - Antisipasi Kerawanan Sosial Hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru - Sosialisasi Pencegahan Ekstrimisme dan Radikalisme
6	Taruna karya mandiri melalui program kartu zilenial untuk membuka lapangan kerja	Penumbuhan wirausaha muda
7	Pembentukan Kecamatan Berdaya (Pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas, perempuan, pelaku ekonomi kreatif dan sport center)	Menerbitkan SK Wali Kota yang mengatur Penggunaan Dana Kelurahan untuk Pemberdayaan Masyarakat
8	Membangun 1.000 desa/Kampung wisata baru	Sosialisasi dan Penetapan Desa Wisata
9	Mengembangkan 10 Titik Aglomerasi menjadi Episentrum Pertumbuhan Ekonomi Baru	-
10	Pelatihan dan Pendidikan Anti Korupsi berbasis ISO 37001 untuk ASN dan Penyelenggara Pemerintah Desa bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum, OMBUDSMAN, Kepolisian, Kejaksanaan, BPK & KPK	Peningkatan kapasitas APIP dengan penyediaan anggaran 1% dari APBD di luar Gaji
11	Spesialis keliling, puskesmas pembantu dan pelayanan kesehatan di setiap desa	Posyandu ILP (Integrasi Layanan Primer) : 213 Posyandu, Rehab (Revitalisasi) Puskesmas Pembantu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Program Delegasi	Dukungan Kegiatan Kabupaten/Kota
12	Mendorong Pengembangan SMA/SMK Unggulan di setiap Kecamatan bekerjasama dengan Pihak Sekolah Swasta	-
13	Mendorong pembentukan Rumah Perlindungan Anak, Perempuan dan disabilitas di setiap Kecamatan	Penyediaan anggaran sewa Rumah Aman untuk korban kekerasan
14	Mendorong penyediaan 1 Dokter, 1 Bidan setiap Puskesmas Pembantu	Penerapan Puskesmas dengan Integrasi Layanan Primer (ILP)
15	Memberikan bantuan hukum bagi guru, disabilitas, perempuan dan anak	UPTD Pelindungan Perempuan Anak, pelaporan dan penanganan kasus kekerasan pada perempuan dan anak. (tahap pembentukan UPTD PPA di tahun 2025)
16	Pendampingan Sertifikasi Halal, HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) secara Gratis	Fasilitasi Sertifikasi Halal bagi Produk UKM berbahan daging (Program Reguler) dan rekomendasi HAKI secara gratis.
		Penyelenggaraan Bimtek Keamanan pangan bagi pelaku usaha P-IRT.
17	Meningkatkan pelatihan untuk sertifikasi juru sembelih halal dan standar rumah pemotongan hewan	Pelatihan Juleha dan Sertifikasi Juru Sembelih Halal, Perbaikan Sarana Prasarana Rumah Potong Hewan
18	Pelatihan 1000 konten kreator desa wisata	Pelatihan bagi Pengelola Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata)
19	Subsidi Modal dan Pendampingan UMKM 1 RT 1 Kelompok UMKM	Subsidi Kredit bagi UMKM melalui BPR Salatiga sebesar Rp 6 Milyar dan tanpa jaminan serta Pemdampingan bagi Kelompok UMKM agar mempunyai Legalilitas usaha (berbadan hukum)
20	Mendorong pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik di Kawasan Perkotaan maupun Wilayah Desa	Pemeliharaan taman (RTH) se Kota Salatiga, Belanja bibit tanaman
21	Penguatan dan pemberdayaan koperasi untuk pengembangan perekonomian desa	Peningkatan SDM bagi Pengurus dan pengawas Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) bagi 23 Kelurahan
22	Meningkatkan Kesejahteraan Atlet, Pelatih, dan Manajemen Olahraga	Pemberian penghargaan bagi atlet dan pelatih di popda provinsi, uang saku bagi atlet dan pelatih pplopd
23	Pengembangan Sekolah Inklusif di setiap Kecamatan	Layanan konseling pendidikan inklusi, Pelatihan Guru Pembimbing Khusus dan Shadow Teacher, Psikotest Inklusi, Parenting Anak Berkebutuhan Khusus, Sosialisasi Hasil Asesmen Anak Berkebutuhan Khusus
24	Monitoring dan sistem peringatan dini bencana berbasis teknologi seluruh wilayah rawan bencana	Pemasangan alat Early Warning Sistem (EWS) di wilayah rawan banjir/luapan air dan longsor
25	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Tambak Ikan Nila	-
26	BUMDES Berdaya (Kepastian Hukum dan Bantuan Modal Usaha setiap Bumdes di Jateng)	-
27	Penguatan BPBD dan Tagana dalam Penanganan Bencana berbasis Kelompok Masyarakat	Sosialisasi Kegiatan Pencegahan dan mitigasi bencana di setiap kecamatan di Salatiga yang salah satunya ada praktik Dapur Umum (DU)
28	Cek Kesehatan Gratis	Pemenuhan BMHP (Bahan Medis Habis Pakai), Penyiapan sarana dan prasarana di puskesmas, Sosialisasi, Promosi Media sosial
29	Pelindungan dan pemberdayaan anak terlantar dan fakir miskin	Fasilitasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Pelatihan PRSE (Perempuan Rawan Sosial Ekonomi), Pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Bintek Peningkatan Kapasitas 7 Pilar PSKS, Fasilitasi Adopsi, Visit dan Pendampingan Anak Terlantar, Anak Berhadapan dengan Hukum dan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus, Fasilitasi Program Bantuan Yapi (Yatim Piatu), Fasilitiasi Rujukan LKSA, Pelatihan Kemandirian Anak Terlantar,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Program Delegasi	Dukungan Kegiatan Kabupaten/Kota
		Porseni/Jambore Anak Terlantar, Fasilitasi Bantuan Kewirausahaan Orang Tua Anak Terlantar, Fasilitasi Akses SPMB Jalur Afirmasi Panti Dikdas dan Dikmen
30	Peningkatan desa mandiri energi melalui Pengembangan bio gas, hydro, maupun tenaga surya	
31	Pelatihan pengolahan dan manajemen keuangan bagi perempuan pesisir dan petani perempuan	Pelatihan pasaca panen bagi KWT / Poktan penerima program Pekarangan Pangan Lesatari
32	Menyusun peraturan daerah dan Rencana Aksi Daerah tentang Ekonomi Hijau	-
33	Mendorong Penguatan forum kerukunan antar umat beragama dan forum pembauran Kebangsaan	- Audiens Walikota dan Forkopimda dengan ormas - Fasilitasi Ormas - Hibah Ormas
34	Peningkatan operasional kader Posyandu	Honor petugas kesehatan Kader Posyandu ILP, Honor petugas kesehatan Kader Puskesmas Pembantu ILP
35	Peningkatan kualitas hidup lansia	Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi lansia melalui pemeriksaan / skrining kesehatan lansia sesuai standar, Puskesmas santun lansia dan lansia dengan ketergantungan sedang, berat dan total mendapatkan perawatan jangka panjang (PJP)
		Sekolah Lansia (Bina Keluarga Lansia /BKL)

Sedangkan Dukungan Program pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2027 untuk Prirotas Nasional adalah terkait dengan Asta Cita, 17 Prioritas Presiden dan Program Strategis Nasional serta Tematik Pembangunan 2027 adalah sebagaimana tabel berikut ini.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 4. 7. Dukungan Program Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2027 terhadap Program Prioritas Nasional Tahun 2027

No	PRIORITAS NASIONAL Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri	PROGRAM PRIORITAS DAERAH		RENCANA KERJA
1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	1	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Program ini di arahkan pada peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada; Peningkatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum
		2	Program Penanggulangan Bencana	Program ini di arahkan pada peningkatan kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; peningkatan penanganan bencana pada saat pasca bencana
		3	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Program ini di arahkan pada Peningkatan pelayanan penyelematan dan evakuasi korban kebakaran
		4	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Program ini di arah kan padan Peningkatan etika dan budaya politik
		5	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Program ini diarahkan pada Peningkatan keteriban organisasi kemasyarakatan
		6	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Program ini di arahkan pada peningkatan jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah
		7	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Program ini di arahkan pada peningkatan kualitas pengelolaan aplikasi informatika
2	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,	1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Program ini di arahkan pada peningkatan perlindungan masyarakat terhadap banjir dan peningkatan akses mayarakat terhadap irigasi
		2	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Program ini di arahkan pada peningkatan akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	PRIORITAS NASIONAL Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri	PROGRAM PRIORITAS DAERAH		RENCANA KERJA
	Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Program ini di arahkan pada peningkatan kualitas penyelenggaraan penataan ruang
		4	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Program ini di arahkan pada peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
		5	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Program ini di arahkan pada peningkatan penanganan kerawanan pangan
		6	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Program ini di arahkan pada penurunan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup
		7	Program Pengelolaan Persampahan	Program ini di arahkan pada peningkatan tata kelola persampahan
		8	Program penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Program ini di arahkan pada peningkatan keamanan siber dan sandi di lingkungan pemerintah daerah
		9	Program Penyuluhan Pertanian	Program ini di arahkan pada peningkatan kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian
		10	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Program ini di arahkan pada peningkatan produksi perikanan budidaya
		11	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Program ini di arahkan pada peningkatan konsumsi ikan oleh masyarkat
		12	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Program ini di arahkan pada peningkatan distribusi dan kualitas sarana pertanian
		13	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Program ini di arahkan pada peningkatan distribusi dan kualitas prasarana pertanian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	PRIORITAS NASIONAL Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri	PROGRAM PRIORITAS DAERAH		RENCANA KERJA
3	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1	Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Program ini di arahkan pada peningkatan akses masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)
		2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Program ini di arahkan pada peningkatan kualitas layanan transportasi darat
		3	Program Penyelenggaraan Jalan	Program ini di arahkan pada peningkatan masyarakat yang nyaman dan aman
		4	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Program ini di arahkan pada peningkatan produktivitas koperasi
		5	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Program ini di arahkan pada peningkatan kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri
		6	Program Pengembangan Kebudayaan	Program ini di arahkan pada peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan
		7	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Program ini di arahkan pada peningkatan warisan budaya yang dilestarikan
		8	Program Pemasaran Pariwisata	Program ini di arahkan pada peningkatan jangkauan pemasaran pariwisata
		9	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Program ini di arahkan pada peningkatan daya tarik destinasi pariwisata
		10	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Program ini di arahkan pada peningkatan kualitas ekosistem kreatif
4	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi,	1	Program Pengelolaan Pendidikan	Program ini di arahkan pada peningkatan partisipasi anak usia sekolah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	PRIORITAS NASIONAL Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri	PROGRAM PRIORITAS DAERAH		RENCANA KERJA
	Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Program ini di arahkan pada peningkatan kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat
		3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Program ini di arahkan pada peningkatan mutu dan distribusi tenaga kesehatan
		4	Program Pemberdayaan Sosial	Program ini di arahkan pada peningkatan pemberdayaan sosial
		5	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Program ini di arahkan pada peningkatan perlindungan dan jaminan sosial
		6	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Program ini di arahkan pada peningkatan produktivitas tenaga kerja
		7	Program Hubungan Industrial	Program ini di arahkan pada peningkatan pekerja Indonesia yang terlindungi
		8	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Program ini di arahkan pada peningkatan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan
		9	Program Perlindungan Khusus Anak	Program ini di arahkan pada peningkatan pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak
		10	Program Pendaftaran Penduduk	Program ini di arahkan pada peningkatan kualitas layanan pendaftaran penduduk
		11	Program Pencatatan Sipil	Program ini di arahkan pada peningkatan kualitas layanan pencatatan sipil

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	PRIORITAS NASIONAL Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri	PROGRAM PRIORITAS DAERAH		RENCANA KERJA
		12	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Program ini di arahkan pada peningkatan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)
		13	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Program ini di arahkan pada peningkatan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera
		14	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Program ini di arahkan pada peningkatan daya saing kepemudaan
		15	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Program ini di arahkan pada peningkatan pembudayaan dan prestasi olah raga
		16	Program Pembinaan Perpustakaan	Program ini di arahkan pada peningkatan layanan perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan
		17	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Program ini di arahkan pada peningkatan pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno
5	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Program ini di arahkan pada peningkatan perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi
		2	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Program ini di arahkan pada peningkatan akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum
		3	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Program ini di arahkan pada peningkatan kualitas penyelenggaraan penataan ruang
		4	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Program ini di arahkan pada peningkatan kualitas layanan transportasi darat
		5	Program Promosi Penanaman Modal	Program ini di arahkan pada peningkatan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	PRIORITAS NASIONAL Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri	PROGRAM PRIORITAS DAERAH		RENCANA KERJA
		6	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Program ini di arahkan pada peningkatan
		7	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Program ini di arahkan pada peningkatan kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha
		8	Program Pengembangan Ekspor	Program ini di arahkan pada peningkatan pelaku usaha yang berorientasi ekspor
		9	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Program ini di arahkan pada peningkatan realisasi pembangunan industri
		10	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Program ini di arahkan pada peningkatan kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian
6	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	1	Program Kawasan Permukiman	Program ini di arahkan pada peningkatan kualitas kawasan permukiman
		2	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Program ini di arahkan pada peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman kumuh
		3	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Program ini di arahkan pada peningkatan penyediaan PSU Permukiman
		4	Program Pemberdayaan Sosial	Program ini di arahkan pada peningkatan pemberdayaan sosial
		5	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Program ini di arahkan pada peningkatan perlindungan dan jaminan sosial
		6	Program Pelatihan Kerja Tenaga Kerja Dan Produktivitas	Program ini di arahkan pada peningkatan produktivitas tenaga kerja
		7	Program Hubungan Industrial	Program ini di arahkan pada peningkatan pekerja Indonesia yang terlindungi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	PRIORITAS NASIONAL Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri	PROGRAM PRIORITAS DAERAH		RENCANA KERJA
		8	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Program ini di arahkan pada peningkatan kualitas pembangunan kawasan transmigrasi
		9	Program Pemberdayan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Program ini di arahkan pada peningkatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	1	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Program ini di arahkan pada peningkatan jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah
		2	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Program ini di arahkan pada peningkatan kualitas pengelolaan aplikasi informatika
		3	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Program ini di arahkan pada pencapaian kolaborasi, integrasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)
		4	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Program ini di arahkan pada peningkatan keamanan siber dan sandi di lingkungan pemerintah daerah
		5	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Program ini di arahkan pada peningkatan etika dan budaya politik
		6	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Program ini di arahkan pada peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
		7	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Program ini di arahkan pada peningkatan ketertiban organisasi kemasyarakatan
8	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi	1	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Program ini di arahkan pada peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada dan Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	PRIORITAS NASIONAL Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri	PROGRAM PRIORITAS DAERAH		RENCANA KERJA
	Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	2	Program Penanggulangan Bencana	Program ini di arahkan pada peningkatan kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
		3	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Program ini di arahkan pada peningkatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
		4	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Program ini di arahkan pada penurunan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
		5	Program Pengelolaan Persampahan	Program ini di arahkan pada peningkatan tata kelola persampahan
		6	Program Pengembangan Kebudayaan	Program ini di arahkan pada peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan
		7	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Program ini di arahkan pada peningkatan warisan budaya yang dilestarikan
		8	Program Pembinaan Perpustakaan	Program ini di arahkan pada peningkatan layanan perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan
		9	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Program ini di arahkan pada peningkatan pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno
		10	Program Pengelolaan Arsip	Program ini di arahkan pada peningkatan tata kelola arsip dinamis dan statis
		11	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Program ini di arahkan pada peningkatan etika dan budaya politik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	PRIORITAS NASIONAL Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	RENCANA KERJA
		12 Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Program ini di arahkan pada peningkatan ketertiban organisasi kemasyarakatan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 4. 8. Dukungan Pemerintah Kota Salatiga terhadap 17 Program Prioritas Presiden

No	Program Prioritas	Program RKPD 2027	Rencana Kerja
1	Mencapai swasembada pangan, energi, dan air.	1 Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Program ini di arahkan pada peningkatan distribusi dan kualitas sarana pertanian
		2 Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Program ini di arahkan pada peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
		3 Program Penanganan Kerawanan Pangan	Program ini di arahkan pada peningkatan penanganan kerawanan pangan
		4 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Program ini di arahkan pada peningkatan perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi
		5 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Program ini di arahkan pada peningkatan akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum
2	Penyempurnaan sistem penerimaan negara	1 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Program ini di arahkan pada peningkatan penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital
3	Reformasi politik, hukum, dan birokrasi.	2 Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Program ini di arahkan pada peningkatan kualitas kebijakan pengelolaan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat
		3 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Program ini di arahkan pada peningkatan dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah
		4 Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Program ini di arahkan pada peningkatan etika dan budaya politik
4	Pencegahan dan pemberantasan korupsi	1 Program Penyelenggaraan Pengawasan	Program ini di arahkan pada penurunan terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Program Prioritas	Program RKPD 2027	Rencana Kerja
5	Pemberantasan kemiskinan.	1 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Program ini di arahkan pada peningkatan perlindungan dan jaminan sosial
		2 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Program ini di arahkan pada peningkatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
6	Pencegahan dan pemberantasan narkoba	1 Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Program ini di arahkan pada peningkatan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat
7	Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, peningkatan BPJS kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat	1 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Program ini di arahkan pada peningkatan kualitas dan distribusi sediaan farmasi alat kesehatan
		2 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Program ini di arahkan pada peningkatan kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat
8	Penguatan pendidikan, sains, dan teknologi, serta digitalisasi.	1 Program Pengelolaan Pendidikan	Program ini di arahkan pada peningkatan partisipasi anak usia sekolah
		2 Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Program ini di arahkan pada peningkatan mutu dan distribusi institusi pendidikan
		3 Program Aplikasi Informatika	Program ini di arahkan pada peningkatan kualitas pengelolaan aplikasi informatika
9	Penguatan pertahanan dan keamanaan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif		
10	Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas	1 Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Program ini di arahkan pada peningkatan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan
		2 Program Perlindungan Perempuan	Program ini di arahkan pada penurunan kekerasan terhadap perempuan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Program Prioritas	Program RKPD 2027	Rencana Kerja
		3 Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Program ini di arahkan pada peningkatan kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak
11	Menjamin pelestarian lingkungan hidup	1 Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Program ini di arahkan pada penurunan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
12	Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani.	2 Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Program ini di arahkan pada peningkatan distribusi dan kualitas prasarana pertanian
13	Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau, bersanitasi baik untuk masyarakat	1 Program Kawasan Permukiman	Program ini di arahkan pada peningkatan kualitas kawasan permukiman
		2 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Program ini di arahkan pada peningkatan akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah
		3 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Program ini di arahkan pada peningkatan kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat
14	Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif, karateristik-mandiri lainnya	1 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Program ini di arahkan pada peningkatan kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri
		2 Program Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Program ini di arahkan pada peningkatan daya saing UMKM
15	Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan Sumber Daya Alam (SDA), termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Program Prioritas	Program RKPD 2027	Rencana Kerja
16	Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah	1 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Program ini di arahkan pada peningkatan penanganan konflik sosial yang diselesaikan
		2 Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Program ini di arahkan pada peningkatan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat
17	Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif dan peningkatan prestasi olahraga	1 Program Pengembangan Kebudayaan	Program ini di arahkan pada peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan
		2 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Program ini di arahkan pada peningkatan kualitas ekosistem kreatif
		3 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Program ini di arahkan pada peningkatan kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif
		4 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Program ini di arahkan pada peningkatan pembudayaan dan prestasi olah raga

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 4. 9. Dukungan Pemerintah Kota Salatiga terhadap Program Strategis Nasional (ProSN) Tahun 2027

NO	ProSN	PROYEK/KEGIATAN	Dukungan Program Daerah	Rencana Kerja
1	Pengentasan Kemiskinan	1. Penanggulangan Kemiskinan	1 Program Pemberdayaan Sosial	Program ini di arahkan pada peningkatan pemberdayaan sosial
			2 Program Rehabilitasi Sosial	Program ini di arahkan pada peningkatan rehabilitasi sosial
			3 Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Program ini di arahkan pada peningkatan perlindungan dan jaminan sosial
			4 Program Penanggulangan Bencana	Program ini di arahkan pada peningkatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
			5 Program Hubungan Industrial	Program ini di arahkan pada peningkatan pekerja Indonesia yang terlindungi
			6 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Program ini di arahkan pada peningkatan kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat
			7 Program Pendaftaran Penduduk	Program ini di arahkan pada peningkatan kualitas layanan pendaftaran penduduk
			8 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Program ini di arahkan pada peningkatan pemanfaatan informasi kependudukan
			9 Program Pengelolaan Pendidikan	Program ini di arahkan pada peningkatan partisipasi anak usia sekolah
			10 Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Program ini di arahkan pada peningkatan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	ProSN	PROYEK/KEGIATAN	Dukungan Program Daerah	Rencana Kerja
			11 Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Program ini di arahkan pada peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
			12 Program Pengembangan UMKM	Program ini di arahkan pada peningkatan daya saing UMKM
			13 Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Program ini di arahkan pada peningkatan produktivitas tenaga kerja
			14 Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Program ini di arahkan pada peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional
			15 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Program ini di arahkan pada peningkatan produksi perikanan budidaya
			16 Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Program ini di arahkan pada peningkatan produksi perikanan budidaya
			17 Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Program ini di arahkan pada peningkatan distribusi dan kualitas sarana pertanian
			18 Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Program ini di arahkan pada peningkatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
			19 Program Penyuluhan Pertanian	Program ini di arahkan pada peningkatan kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian
			20 Program Kawasan Permukiman	Program ini di arahkan pada peningkatan kualitas kawasan permukiman

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	ProSN	PROYEK/KEGIATAN	Dukungan Program Daerah	Rencana Kerja
			21 Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Program ini di arahkan pada peningkatan penyediaan PSU Permukiman
			22 Program Pengelolaan Pendidikan	Program ini di arahkan pada peningkatan partisipasi anak usia sekolah
			23 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Program ini di arahkan pada peningkatan perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi
			24 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Program ini di arahkan pada peningkatan akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum
			25 Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Program ini di arahkan pada peningkatan pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan
			26 Program Penanganan Kerawanan Pangan	Program ini di arahkan pada peningkatan penanganan kerawanan pangan
			27 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Program ini di arahkan pada peningkatan distribusi dan kualitas prasarana pertanian
			28 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Program ini di arahkan pada peningkatan kualitas layanan transportasi darat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	ProSN	PROYEK/KEGIATAN	Dukungan Program Daerah	Rencana Kerja
		2. Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	1 Program Pemberdayaan Sosial	Program ini di arahkan pada peningkatan pemberdayaan sosial
			2 Program Rehabilitasi Sosial	Program ini di arahkan pada peningkatan rehabilitasi sosial
			3 Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Program ini di arahkan pada peningkatan perlindungan dan jaminan sosial
			4 Program Penanggulangan Bencana	Program ini di arahkan pada peningkatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
			5 Program Hubungan Industrial	Program ini di arahkan pada peningkatan pekerja Indonesia yang terlindungi
			6 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Program ini di arahkan pada peningkatan kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat
			7 Program Pendaftaran Penduduk	Program ini di arahkan pada peningkatan kualitas layanan pendaftaran penduduk
			8 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Program ini di arahkan pada peningkatan kualitas layanan pendaftaran penduduk. Arah kebijakan daerah pada peningkatan kualitas dan cakupan layanan. Pelaksanaan sosialisasi mengenai pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat, sehingga kesadaran dan kepatuhan administrasi kependudukan dapat meningkat serta mendukung kualitas perencanaan dan pelayanan publik secara keseluruhan
			9 Program Pengelolaan Pendidikan	Program ini di arahkan pada peningkatan partisipasi anak usia sekolah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	ProSN	PROYEK/KEGIATAN	Dukungan Program Daerah	Rencana Kerja
			10 Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Program ini di arahkan pada peningkatan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera
			11 Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Program ini di arahkan pada peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
			12 Program Pengembangan UMKM	Program ini di arahkan pada peningkatan daya saing UMKM
			13 Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Program ini di arahkan pada peningkatan produktivitas tenaga kerja
			14 Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Program ini di arahkan pada peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional
			15 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Program ini di arahkan pada peningkatan produksi perikanan budidaya
			16 Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Program ini di arahkan pada peningkatan produksi perikanan budidaya
			17 Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Program ini di arahkan pada peningkatan distribusi dan kualitas sarana pertanian
			18 Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Program ini di arahkan pada peningkatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
			19 Program Penyuluhan Pertanian	Program ini di arahkan pada peningkatan kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	ProSN	PROYEK/KEGIATAN	Dukungan Program Daerah	Rencana Kerja
			20 Program Kawasan Permukiman	Program ini di arahkan pada peningkatan kualitas kawasan permukiman
			21 Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Program ini di arahkan pada peningkatan penyediaan PSU Permukiman
			22 Program Pengelolaan Pendidikan	Program ini di arahkan pada peningkatan partisipasi anak usia sekolah
			23 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Program ini di arahkan pada peningkatan perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi
			24 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Program ini di arahkan pada peningkatan akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum
			25 Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Program ini di arahkan pada peningkatan pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan
			26 Program Penanganan Kerawanan Pangan	Program ini di arahkan pada peningkatan penanganan kerawanan pangan
			27 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Program ini di arahkan pada peningkatan distribusi dan kualitas prasarana pertanian
			28 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Program ini di arahkan pada peningkatan kualitas layanan transportasi darat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	ProSN	PROYEK/KEGIATAN	Dukungan Program Daerah	Rencana Kerja
		3. Sekolah Rakyat		
		4. Pembangunan 3 Juta Rumah	1 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Program ini di arahkan pada peningkatan kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
			2 Program Kawasan Permukiman	Program ini di arahkan pada peningkatan kualitas kawasan permukiman
2	Ketahanan Pangan	1. Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah	1 Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Program ini di arahkan pada peningkatan kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
			2 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Program ini di arahkan pada peningkatan kualitas layanan transportasi darat
			3 Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program ini di arahkan pada peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada dan Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum
			4 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Program ini di arahkan pada peningkatan distribusi dan kualitas prasarana pertanian
			5 Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Program ini di arahkan pada peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
			6 Program Penanganan Kerawanan Pangan	Program ini di arahkan pada peningkatan penanganan kerawanan pangan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	ProSN	PROYEK/KEGIATAN	Dukungan Program Daerah	Rencana Kerja
			7 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Program ini di arahkan pada peningkatan produksi perikanan budidaya
			8 Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Program ini di arahkan pada peningkatan produksi perikanan budidaya
			9 Program Rehabilitasi Sosial	Program ini di arahkan pada peningkatan rehabilitasi sosial
3	Kesehatan untuk semua	1. Jaminan Kesehatan Nasional	1 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Program ini di arahkan pada peningkatan kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat
			2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Program ini di arahkan pada peningkatan mutu dan distribusi tenaga kesehatan
			3 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Program ini di arahkan pada peningkatan kualitas dan distribusi sediaan farmasi alat kesehatan, dan makanan minuman
			4 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Program ini di arahkan pada peningkatan kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
			5 Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Program ini di arahkan pada peningkatan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)
		2. Makan Bergizi Gratis	. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Program ini diarahkan pada kegiatan administrasi tata pemerintahan, fasilitasi dan koordinasi hukum, fasilitasi kerjasama daerah dan Pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	ProSN	PROYEK/KEGIATAN	Dukungan Program Daerah		Rencana Kerja
					Untuk mendukung MBG Program ini diarahkan langkah kolaboratif lintas sektor, antara lain pembentukan Satgas SPPG di Kabupaten/kota sebagai wadah koordinasi pelaksanaan program, pembinaan dan pengawasan keamanan pangan bahan baku pangan, serta pembinaan dan pengawasan keamanan pangan olahan siap saji termasuk fasilitasi Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Selain itu, melalui program ini, dilaksanakan upaya koordinasi dalam mendukung penanganan dan investigasi Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan melalui Tim Gerak Cepat (TGC), pelaksanaan edukasi dan sosialisasi terkait gizi seimbang, pola konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA), serta gerakan stop pemborosan pangan. Dukungan lainnya dapat diwujudkan melalui monitoring kecukupan pasokan bahan baku pangan guna memastikan keberlanjutan dan kelancaran pelaksanaan program MBG di Kota Salatiga
4	Perluasan Akses Pendidikan	1. Pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan Dasar dan Menengah	1	Program Pengelolaan Pendidikan	Program ini di arahkan pada peningkatan partisipasi anak usia sekolah
5	Pertumbuhan Ekonomi	1. Pengendalian Inflasi	1	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Program ini di arahkan pada peningkatan kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri
			2	Program Pengembangan UMKM	Program ini di arahkan pada peningkatan daya saing UMKM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	ProSN	PROYEK/KEGIATAN	Dukungan Program Daerah		Rencana Kerja
			3	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Program ini di arahkan pada peningkatan kualitas penyelenggaraan penataan ruang
			4	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Program ini di arahkan pada peningkatan pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan
			5	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Program ini di arahkan pada peningkata n diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
			6	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Program ini di arahkan pada peningkatan jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah
			7	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Program ini di arahkan pada peningkatan kemudahan berinvestasi
			8	Program Promosi Penanaman Modal	Program ini di arahkan pada peningkatan jangkauan promosi penanaman modal
			9	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Program ini di arahkan pada peningkatan perizinan berusaha berbasis risiko
			10	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Program ini di arahkan pada peningkatan daya tarik destinasi pariwisata
			11	Program Pemasaran Pariwisata	Program ini di arahkan pada peningkatan jangkauan pemasaran pariwisata
			12	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Program ini di arahkan pada peningkatan kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi
			13	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Program ini di arahkan pada peningkatan kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
			14	Program Pengembangan Ekspor	Program ini di arahkan pada peningkatan pelaku usaha yang berorientasi ekspor

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	ProSN	PROYEK/KEGIATAN		Dukungan Program Daerah		Rencana Kerja
				15	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Program ini di arahkan pada peningkatan tertib niaga dan mutu produk
				16	Program Penempatan Tenaga Kerja	Program ini di arahkan pada peningkatan penempatan tenaga kerja
		2.	Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	1	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Program ini di arahkan pada peningkatan pembinaan dan pengawasan koperasi
				2	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Program ini di arahkan pada peningkatan kinerja pengelolaan koperasi
				3	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Program ini di arahkan pada peningkatan kualitas SDM Perkoperasian
				4	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Program ini di arahkan pada peningkatan produktivitas koperasi
		3.	Kemudahan Perizinan	1	Program Penataan Bangunan Gedung	Program ini di arahkan pada peningkatan kualitas bangunan gedung
				2	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Program ini di arahkan pada peningkatan kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan
				3	Program Pelayanan Penanaman Modal	Program ini di arahkan pada peningkatan perizinan berusaha berbasis risiko
				4	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Program ini di arahkan pada peningkatan kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha
				5	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Program ini di arahkan pada peningkatan kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	ProSN	PROYEK/KEGIATAN	Dukungan Program Daerah		Rencana Kerja
			6	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Program ini di arahkan pada peningkatan kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 4. 10. Keterkaitan Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah, Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas pada RKPD Kota Salatiga Tahun 2027

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2027	Prioritas Kota Salatiga Tahun 2027		Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Perangkat Daerah
			Pengembangan SDM yang sehat dan cerdas dan perekonomian daerah yang unggul, didukung pelayanan publik bermutu dan infrastruktur wilayah yang sesuai daya dukung lingkungan hidup	***Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif didukung dengan SDM Unggul***			
1 Meningkatnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan unggul	1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	87,63	PD1. Mengembangkan pembelajaran inklusif pada setiap sekolah untuk menjamin pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dan memberikan kesetaraan	FD2. Mengembangkan komunitas pembelajaran bahasa dan keterampilan komunikasi internasional (Bahasa Inggris, Bahasa Arab dan Bahasa Cina)	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1 Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs (Tingkat partisipasi warga negara usia 13–15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama)	Dinas Pendidikan
				FD3. Meningkatkan dukungan kelembagaan dan operasional pada pendidikan kesetaraan dan lembaga keterampilan dalam pembelajaran kewirausahaan berorentasi global		2 Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Kesetaraan (Tingkat partisipasi warga negara usia 7–18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan)	
						3 Angka Putus Sekolah SD/MI	
						4 Angka Putus Sekolah SMP/MTs	
						5 Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik SD/MI	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2027	Prioritas Kota Salatiga Tahun 2027		*Program Prioritas*	*Indikator Kinerja Program*	*Perangkat Daerah*
			Pengembangan SDM yang sehat dan cerdas dan perekonomian daerah yang unggul, didukung pelayanan publik bermutu dan infrastruktur wilayah yang sesuai daya dukung lingkungan hidup	***Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif didukung dengan SDM Unggul***			
						6 Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik SMP/MTs	
						7 Persentase sekolah TK yang memenuhi standar Holistik Integratif dengan kategori sedang	
						8 Persentase Kondisi Kelas PAUD dalam Kondisi Baik	
						9 Kondisi Sarpras Pendidikan Kesetaraan baik	
						10 Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	
						11 Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	
						12 Rata-rata kemampuan literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	
						13 Rata-rata kemampuan numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2027	Prioritas Kota Salatiga Tahun 2027		Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Perangkat Daerah
			Pengembangan SDM yang sehat dan cerdas dan perekonomian daerah yang unggul, didukung pelayanan publik bermutu dan infrastruktur wilayah yang sesuai daya dukung lingkungan hidup	***Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif didukung dengan SDM Unggul***	***Program Prioritas***	***Indikator Kinerja Program***	***Perangkat Daerah***
						14 Iklim Kebhinekaan SD	
						15 Iklim Kebhinekaan SMP	
						16 Iklim Keamanan SD	
						17 Iklim Keamanan SMP	
						18 Iklim Inklusivitas SD	
						19 Iklim Inklusivitas SMP	
	1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka	3,82 - 3,52		FD5. Meningkatkan kualitas dan pemerataan sarana prasarana, tenaga pendidik, dan kurikulum berbasis digital pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah menuju Pendidikan Salatiga Standar Internasional	1.01.04 Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	1 Persentase Guru bersertifikat pendidik Jenjang TK/RA	
						2 Persentase Guru bersertifikat pendidik Jenjang SD	
						3 Persentase Guru bersertifikat pendidik jenjang SMP	
						4 Persentase Pendidik yang telah memenuhi kualifikasi Minimal S1 jenjang PAUD	
						5 Persentase Pendidik yang telah memenuhi kualifikasi Minimal S1 jenjang SD	
						6 Persentase Pendidik yang telah memenuhi kualifikasi Minimal S1 jenjang SMP	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2027	Prioritas Kota Salatiga Tahun 2027		Program Prioritas		Indikator Kinerja Program		Perangkat Daerah
			Pengembangan SDM yang sehat dan cerdas dan perekonomian daerah yang unggul, didukung pelayanan publik bermutu dan infrastruktur wilayah yang sesuai daya dukung lingkungan hidup	***Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif didukung dengan SDM Unggul***	***Program Prioritas***		***Indikator Kinerja Program***		***Perangkat Daerah***
			PD2. Meningkatkan kualitas pengelolaan perpustakaan dan naskah kuno serta pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan di Kota Salatiga		2.23.02	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	1	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki	
					2.22.02	Program Pengembangan Kebudayaan	1	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dikembangkan	
			PD3. Meningkatkan pengetahuan kesehatan masyarakat untuk mendukung promotif dan preventif terutama dalam edukasi gaya hidup sehat, kesehatan mental, pencegahan penyakit menular dan tidak menular	FD4. Meningkatkan kualitas SDM dan fasilitas puskesmas, rumah sakit daerah berstandar internasional, dan klinik kesehatan daerah yang berkualitas dan modern didukung dengan sistem layanan terintegrasi	1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1	*Angka Kematian balita (AKABA)*	Dinas Kesehatan
			PD4. Meningkatkan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat secara keseluruhan				2	Capaian penemuan kasus TB (Notifikasi kasus TB)	
			PD5. Mengembangkan infrastruktur dan fasilitas pendukung olahraga yang				3	Prosentase pasien TBC yang memulai pengobatan (Enrrollment TBC)	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2027	Prioritas Kota Salatiga Tahun 2027		Program Prioritas	Indikator Kinerja Program		Perangkat Daerah
			Pengembangan SDM yang sehat dan cerdas dan perekonomian daerah yang unggul, didukung pelayanan publik bermutu dan infrastruktur wilayah yang sesuai daya dukung lingkungan hidup	***Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif didukung dengan SDM Unggul***				
			terjangkau dan lebih mudah diakses masyarakat			4	Cakupan pemberian terapi pencegahan pada orang kontak serumah	
						5	*Annual Parasite Incidence (API) per 1.000 penduduk*	
						6	Jumlah Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	
						7	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan KKS (SK Forkom kec, SK Pokja Kel, Sekretariat, Rencana Kegiatan, Anggaran)	
						8	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan pengawasan kualitas udara dalam ruang memenuhi syarat	
						9	Persentase Puskesmas Yang memfasilitasi Kelurahan Sehat Iklim	
						10	Persentase rumah tangga dengan kualitas air minum memenuhi syarat	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2027	Prioritas Kota Salatiga Tahun 2027		Program Prioritas	Indikator Kinerja Program		Perangkat Daerah
			Pengembangan SDM yang sehat dan cerdas dan perekonomian daerah yang unggul, didukung pelayanan publik bermutu dan infrastruktur wilayah yang sesuai daya dukung lingkungan hidup	*Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif didukung dengan SDM Unggul*				
						11	Persentase sarana air minum yang memenuhi syarat	
						12	*Cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan*	
						13	Cakupan bayi baru lahir yang mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD)	
						14	Cakupan Bayi Usia Kurang 6 Bulan Mendapat ASI Eksklusif	
						15	Cakupan imunisasi di usia sekolah dasar	
						16	Cakupan Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang Mendapat Makanan Tambahan	
						17	Cakupan Ibu Hamil yang Mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) Minimal 90 Tablet Selama Masa Kehamilan	
						18	Cakupan ibu nifas mendapat kapsul Vitamin A	
						19	Cakupan kepesertaan JKN	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2027	Prioritas Kota Salatiga Tahun 2027		Program Prioritas	Indikator Kinerja Program		Perangkat Daerah
			Pengembangan SDM yang sehat dan cerdas dan perekonomian daerah yang unggul, didukung pelayanan publik bermutu dan infrastruktur wilayah yang sesuai daya dukung lingkungan hidup	*Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif didukung dengan SDM Unggul*				
						20	Cakupan kepesertaan JKN Aktif	
						21	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	
						22	Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	
						23	Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin	
						24	Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil	
						25	Cakupan Pelayanan kesehatan Ibu Nifas (KF3)	
						26	Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia	
						27	Persentase lanjut usia yang mandiri	
						28	Persentase Depresi yang mendapatkan layanan	
						29	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	
						30	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TB	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2027	Prioritas Kota Salatiga Tahun 2027		*Program Prioritas*	*Indikator Kinerja Program*		*Perangkat Daerah*
			Pengembangan SDM yang sehat dan cerdas dan perekonomian daerah yang unggul, didukung pelayanan publik bermutu dan infrastruktur wilayah yang sesuai daya dukung lingkungan hidup	***Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif didukung dengan SDM Unggul***				
						31	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	
						32	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	
						33	Prevalensi Obesitas > 18 tahun	
						34	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	
						35	Persentase merokok penduduk 10-21 tahun	
						36	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	
						37	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	
						38	Cakupan pembinaan remaja di sekolah	
						39	Cakupan Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional	
						40	Cakupan Puskesmas yang melaksanakan Perkesmas	
						41	Cakupan Remaja Putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2027	Prioritas Kota Salatiga Tahun 2027		*Program Prioritas*	*Indikator Kinerja Program*		*Perangkat Daerah*
			Pengembangan SDM yang sehat dan cerdas dan perekonomian daerah yang unggul, didukung pelayanan publik bermutu dan infrastruktur wilayah yang sesuai daya dukung lingkungan hidup	***Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif didukung dengan SDM Unggul***				
						42	Persentase Puskesmas dengan Tempat Fasilitas Umum (TFU) memenuhi syarat	
						43	Deteksi Dini Triple Eliminasi Ibu Hamil	
						44	Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	
						45	Incident Rate DBD per 100.000 penduduk	
						46	Kasus HIV/ AIDS baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV	
						47	Nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan Dinas Kesehatan	
						48	Presentase penduduk dengan aktivitas fisik cukup	
						49	Persentase tempat kerja formal yang melaksanakan kesehatan kerja	
						50	Persentase tempat kerja informal yang melaksanakan kesehatan kerja	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2027	Prioritas Kota Salatiga Tahun 2027		*Program Prioritas*	*Indikator Kinerja Program*		*Perangkat Daerah*
			Pengembangan SDM yang sehat dan cerdas dan perekonomian daerah yang unggul, didukung pelayanan publik bermutu dan infrastruktur wilayah yang sesuai daya dukung lingkungan hidup	***Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif didukung dengan SDM Unggul***				
						51	Penemuan kasus AFP (Acute Flaccid Paralysis)	
						52	Persentase Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (Berat Badan kurang dari 2500 gram)	
						53	Persentase Ibu hamil KEK	
						54	Persentase Ibu Hamil yang Anemia	
						55	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	
						56	Proporsi jamaah haji Kota Salatiga yang mendapat pemeriksaaan dan pembinaan kesehatan sesuai standar	
						57	Persentase Pustu, Puskesmas, dan RSUD yang memenuhi standar Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan (SPA) dan Sumber Daya Manusia Kesehatan	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2027	Prioritas Kota Salatiga Tahun 2027		Program Prioritas	Indikator Kinerja Program		Perangkat Daerah
			Pengembangan SDM yang sehat dan cerdas dan perekonomian daerah yang unggul, didukung pelayanan publik bermutu dan infrastruktur wilayah yang sesuai daya dukung lingkungan hidup	***Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif didukung dengan SDM Unggul***				
						58	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	
						59	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	
						60	Tertanganinya KLB/Bencana dalam 1 x 24 jam	
						61	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi	
2 Terwujudnya transformasi sosial dan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan	2.1 Pertumbuhan ekonomi	6,10-7,95	PD6. Meningkatkan investasi dalam mendukung kapasitas produksi daerah didukung peningkatan kondisi iklim investasi yang kondusif dengan pengembangan SDM, teknologi dan promosi potensi daerah secara masif	FD1. Meningkatkan kontribusi sektor pariwasata dan perdagangan dalam perekonomian daerah	3.26.02 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
						2	Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara yang Datang ke Kabupaten / Kota	
						3	Tingkat Hunian Akomodasi	
	2.2 Indeks Ketahanan	82,55			3.26.05 Program Pengembangan	1	Persentase Pelaku Pariwisata dan	Dinas Kebudayaan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2027	Prioritas Kota Salatiga Tahun 2027		*Program Prioritas*	*Indikator Kinerja Program*	*Perangkat Daerah*
			Pengembangan SDM yang sehat dan cerdas dan perekonomian daerah yang unggul, didukung pelayanan publik bermutu dan infrastruktur wilayah yang sesuai daya dukung lingkungan hidup	***Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif didukung dengan SDM Unggul***			
	Pangan Daerah (IKP)				Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	dan Pariwisata
					2.18.02 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1 Nilai Realisasi PMA dan PMDN	DPMPTSP
			PD7. Meningkatkan kapasitas tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri dan pasar kerja		2.07.03 Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	1 Persentase Tenaga Kerja yang terlatih	Disperinaker
			PD8. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perdagangan dan mendorong digitalisasi serta kemitraan/kolaborasi antara pedagang dan UMKM untuk menghasilkan produk kualitas ekspor		2.17.07 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	1 Prosentase usaha mikro yang mendapatkan legalitas usaha	Dinkop UMKM
					2.17.06 Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	1 Persentase Koperasi Aktif	Dinkop UMKM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2027	Prioritas Kota Salatiga Tahun 2027		*Program Prioritas*	*Indikator Kinerja Program*	*Perangkat Daerah*
			Pengembangan SDM yang sehat dan cerdas dan perekonomian daerah yang unggul, didukung pelayanan publik bermutu dan infrastruktur wilayah yang sesuai daya dukung lingkungan hidup	***Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif didukung dengan SDM Unggul***			
			PD.9 Mengembangkan infrastruktur industri yang memadai, penyediaan wilayah peruntukan industri yang terintegrasi, peningkatan inovasi dengan memberikan insentif untuk adopsi teknologi terbaru dalam proses produksi		3.30.03 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1 Prosentase fasilitasi pedagang pasar rakyat yang menggunakan platform digital	Dinas Perdagangan
			PD10. Meningkatkan cakupan perlindungan, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan ekonomi PPKS		3.31.02 Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	1 Persentase industri Kota Salatiga yang berkembang	Disperinaker
			PD11. Mengembangkan ketahanan pangan berbasis komunitas, pengembangan urban farming, memperluas kerjasama antara petani, pedagang, dan konsumen untuk menciptakan sistem pangan yang lebih efisien dan berkelanjutan		2.09.03 Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1 Rasio jumlah cadangan beras pemerintah daerah (CBPD) terhadap target jumlah CBPD berdasarkan Perbadan 15/2023	Dispangtan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2027	Prioritas Kota Salatiga Tahun 2027		*Program Prioritas*	*Indikator Kinerja Program*	*Perangkat Daerah*
			Pengembangan SDM yang sehat dan cerdas dan perekonomian daerah yang unggul, didukung pelayanan publik bermutu dan infrastruktur wilayah yang sesuai daya dukung lingkungan hidup	***Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif didukung dengan SDM Unggul***			
					3.27.02 Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1 Pemenuhan kebutuhan sarana pertanian	Dispangtan
						2 Produtivitas tanaman pangan (Padi dan Jagung)	
					3.27.04 Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1 Mortalitas hewan/ternak akibat penyakit zoonosis	Dispangtan
			PD12. Meningkatkan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat		1.06.02 Program Pemberdayaan Sosial	1 Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan sosial yang Meningkat Kulaitasnya dalam pelayanan sosial	Dinas Sosial
			PD13. Penguatan kerukunan sosial, agama, ras maupun kelompok masyarakat melalui peningkatan pendidikan politik dan wawasan kebangsaan dalam berbagai kegiatan guna meningkatkan cinta tanah air, nilai-nilai toleransi dan saling menghormati dalam		8.01.02 Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1 Cakupan penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Badan Kesbangpol

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2027	Prioritas Kota Salatiga Tahun 2027		Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Perangkat Daerah
			Pengembangan SDM yang sehat dan cerdas dan perekonomian daerah yang unggul, didukung pelayanan publik bermutu dan infrastruktur wilayah yang sesuai daya dukung lingkungan hidup	***Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif didukung dengan SDM Unggul***			
			pendidikan dan kehidupan sehari-hari				
3 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berbasis Digital	3.1 Indeks Pelayanan Publik	4,70	PD14. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, pengembangan aset produktif dan mengembangkan sumber pendapatan daerah yang memiliki potensi jangka panjang		5.02.02 Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1 Persentase belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan	BPKPD
						2 Cash managenent (Persentase anggaran)	
						3 Persentase laporan keuangan tepat waktu	
					5.02.03 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	
					5.02.04 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1 Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2027	Prioritas Kota Salatiga Tahun 2027		Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Perangkat Daerah
			Pengembangan SDM yang sehat dan cerdas dan perekonomian daerah yang unggul, didukung pelayanan publik bermutu dan infrastruktur wilayah yang sesuai daya dukung lingkungan hidup	***Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif didukung dengan SDM Unggul***			
	3.2 Indeks Integritas Nasional	80,65	PD15. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan pengembangan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat				
	3.3 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,81	PD16. Perluasan jaringan internet broadband dan penyediaan akses WiFi publik di fasilitas layanan umum		2.16.02 Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	1 Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	Diskominfo
	3.4 Indeks Pemerintahan Digital (Pemdi)	1,2	PD17. Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana pelayanan serta jangkauan layanan kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat		2.12.02 Program Pendaftaran Penduduk	1 Perekaman KTP-Elektronik	Disdukcapil
						2 Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2027	Prioritas Kota Salatiga Tahun 2027		*Program Prioritas*	*Indikator Kinerja Program*	*Perangkat Daerah*
			Pengembangan SDM yang sehat dan cerdas dan perekonomian daerah yang unggul, didukung pelayanan publik bermutu dan infrastruktur wilayah yang sesuai daya dukung lingkungan hidup	***Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif didukung dengan SDM Unggul***			
			PD18. Meningkatkan peran kelembagaan ditingkat kecamatan dan kelurahan (PKK, LPMK dll) dalam pelaksanaan pemberdayaan, monitoring dan evaluasi pembangunan terutama dalam mendukung tercapainya kecamatan berdaya		7.01.03 Program Pemberdayan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1 Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangkel	Kecamatan
			PD19. Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang efektif dan efisien		4.02.02 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	1 Tingkat capaian kinerja dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Setwan
			PD21. Mengembangkan riset dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang mampu meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat		5.05.02 Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	1 Persentase terfasilitasinya inovasi masyarakat daerah	Bappeda

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2027	Prioritas Kota Salatiga Tahun 2027		Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Perangkat Daerah
			Pengembangan SDM yang sehat dan cerdas dan perekonomian daerah yang unggul, didukung pelayanan publik bermutu dan infrastruktur wilayah yang sesuai daya dukung lingkungan hidup	***Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif didukung dengan SDM Unggul***			
4 Meningkatnya kualitas infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	4.1 Wilayah dengan Infrastruktur Kondisi Baik	66,04	PD5. Mengembangkan infrastruktur dan fasilitas pendukung olahraga yang terjangkau dan lebih mudah diakses masyarakat		1.03.09 Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	1 Persentase penataan bangunan dan lingkungan	DPUPR
	4.2 Indeks kualitas lingkungan Hidup	70,03	PD.9 Mengembangkan infrastruktur industri yang memadai, penyediaan wilayah peruntukan industri yang terintegrasi, peningkatan inovasi dengan memberikan insentif untuk adopsi teknologi terbaru dalam proses produksi		1.03.12 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1 Jumlah KKPR yang diterbitkan	DPUPR
	4.3 Indeks Inovasi Daerah	53	PD20. Meningkatkan pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan secara konsisten yang didukung dengan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat		2.11.03 Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1 Persentase pemantauan status mutu air	DLH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2027	Prioritas Kota Salatiga Tahun 2027		*Program Prioritas*	*Indikator Kinerja Program*	*Perangkat Daerah*
			Pengembangan SDM yang sehat dan cerdas dan perekonomian daerah yang unggul, didukung pelayanan publik bermutu dan infrastruktur wilayah yang sesuai daya dukung lingkungan hidup	***Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif didukung dengan SDM Unggul***			
						2 Persentase pemeliharaan sarana prasarana laboratorium	DLH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 4. 11. Dukungan Pencapaian Indikator Tematik Provinsi Jawa Tengah dengan RKPD Kota Salatiga Tahun 2027

No.	Indikator Tematik Pembangunan Provinsi Jawa Tengah	Satuan	Target Kota Salatiga Tahun 2027	Dukungan Aktivitas Kota Salatiga	Penanggung Jawab Pelaksanaan
1	Jumlah DTW Alam yang Dikembangkan	Unit	2	Pemanfaatan akses Tol Transjawa dengan memanfaatkan exit Tol Pattimura yang langsung menuju pusat Kota dan berbatasan langsung dengan Kab Semarang 1. Pelaksanaan edukasi, pelatihan dan workshop terkait peyusunan SOP Pelayanan dan Manajemen Risiko kepada SDM pengelola DTW termasuk wisata **Ramah Muslim**; 2. Melaksanakan pemetaan dan pemenuhan sarana/prasarana dan **infrastruktur penunjang** keamanan dan keselamatan di destinasi pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	610.000	Pemanfaatan potensi Kota Salatiga sebagai pusat wisata gastronomi dan aglomerasi Borobudur Kopeng Rawa pening serta tren kunjungan selalu meningkat 1. Event pariwisata 2. Pameran Pariwisata Daerah; 3. Penguatan Paket Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	Jumlah Desa/Kampung Wisata Baru yang Dicanangkan	Unit	8	1. Melaksanakan pemetaan calon Desa Wisata/Kampung Wisata menjadi longlist database; 2. Melakukan penilaian skala prioritas calon Desa Wisata sesuai potensi masing-masing desa menjadi **shortlist database**	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Indikator Tematik Pembangunan Provinsi Jawa Tengah	Satuan	Target Kota Salatiga Tahun 2027	Dukungan Aktivitas Kota Salatiga	Penanggung Jawab Pelaksanaan
4	Jumlah Konten Kreator yang dilatih	Orang	15	Digitalisasi Pemasaran Pariwisata - **pemanfaatan konten** untuk promosi wisata dan pengembangan ekonomi daerah. konten digital terbukti efektif untuk promosi, branding, mengenalkan produk lokal dan menginformasikan program pemerintah - kebutuhan komunikasi publik yg efektif sehingga diharapkan **konten kreator** membantu menghasilkan konten yg informatif, edukatif dan mudah dipahami masyarakat	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Dinas Kominfo
5	Jumlah Usaha Pariwisata Ramah Muslim yang ditetapkan	Unit	5	Pelaksanakan edukasi, pelatihan dan workshop terkait peyusunan SOP Pelayanan dan Manajemen Risiko kepada SDM pengelola DTW termasuk wisata **Ramah Muslim**	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
6	Jumlah Produk Tersertifikasi Halal	Produk	9.837	Peningkatan literasi terkait produk tersertifikasi halal kepada UMKM melalui sosialisasi dan dan fasilitasi bekerjasama dengan BPJPH	
7	Jumlah Penyaluran Pembiayaan Syariah	Rupiah	192.000.000.000	Koordinasi dengan Baznas dan Bank Jateng Syariah	Sekretariat Daerah
8	Jumlah RPH/RPU yang Tersertifikasi Halal	Unit	1	Pengelolaan RPH Kota Salatiga	Dispangtan
9	Jumlah Tukang Jagal yang Tersertifikat Halal	Orang	2	Pelaksanaan pelatihan Juleha dan sertifikasi Juru Sembelih oleh Dispngatn	Dispangtan
10	Jumlah Dana Zakat, Infaq, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya yang Dihimpun	Rupiah	6.250.000.000	Pengoptimalan Baznas	Sekretariat Daerah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 4. 12. Keselarasan Prioritas Pembangunan dan Prioritas Tahun 2027 sesuai Rancangan RPJMD dengan Program Unggulan Kepala Daerah

NO	PRIORITAS SESUAI RPJMD	PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH
1	Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berkarakter	**PROGRAM SALATIGA CERDAS**
		Meningkatkan kualitas sarana prasarana, tenaga pendidik, dan bahan ajar pendidikan dasar dan menengah menuju Pendidikan Salatiga Standar Internasional
		Mengembangkan pendidikan dan pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri (Bahasa Inggris, Bahasa Arab dan Bahasa Cina).
		Menyediakan bantuan pembiayaan pada lembaga Pendidikan non formal (kursus, Bimbingan belajar, BLK, PKBM) untuk menyediakan pembelajaran kewirausahaan berorientasi global.
		PROGRAM SEHATI : Salatiga Sehat dan Terlindungi
		Layanan pendampingan tenaga medis di saat khamilan, kelahiran dan nifas.
		Layanan Kesehatan Ibu bebas Anemia dan Terpenuhi Nutrisi
		Layanan Jaminan Kesehatan bayi periode 1000 HPK menuju Salatiga Zerro stunting.
		Pembiayaan Jaminan Kesehatan Daerah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
		Meningkatkan fasilitas Kesehatan dan Menyiapkan Tenaga Medis Profesional untuk RSUD berstandar Internasional.
		PROGRAM KOMIK : Kolaborasi Minelial Kreatif
		Pengembangan ruang ekspresi gaya hidup positif, seni dan budaya bagi Gen-Z, pemuda dan pelaku seni
2	Pengembangan potensi perekonomian daerah yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif	**PROGRAM SEKAR : SALATIGA BERKARYA**
		Optimalisasi aset Pemerintah Kota Salatiga dan revitalisasi BUMD menjadi lebih produktif berkolaborasi dengan investasi swasta.
		Pengembangan ekonomi kreatif dengan mengutamakan komoditas unggulan lokal melalui pendampingan UMKM
		pemberdayaan kewirausahaan melalui akses pendanaan dan pengembangan UMKM
		PROGRAM JARKOM MABAR
		Jaringan Komunitas Mahasiswa dan Anak Muda berwirausaha
3	Pengembangan pelayanan publik yang bermutu dan berorientasi pada kepuasan masyarakat	**PROGRAM SI AKAS : Salatiga Akuntabel, Kolaboratif, Adaptif dan Sigap**
		Memperkuat Satu Data Salatiga sebagai rujukan terpadu dalam satu portal dan dapat diakses oleh semua, untuk menciptakan transparansi tata kelola pemerintahan Kota Salatiga.
		Memperkuat digitalisasi pelayanan kependudukan, catatan sipil dan Perijinan UMKM agar tuntas di tingkat kecamatan.
		Membangun sistem pengaduan pelayanan publik terpadu sampai tingkat RT (Rukun Tetangga), Melalui Aplikasi Android dan memberikan jaminan respon cepat dalam hari yang sama.
4	Integrasi rencana tata ruang dengan instrumen pengelolaan lingkungan hidup	**PROGRAM SARI : Salatiga Lestari**
		Revitalisasi Taman Kota dan Ekowisata yang mengedepankan keunggulan kompetitif tiap wilayah (kelurahan/kecamatan).
		Penataan sarana prasarana publik, khususnya Gedung pemerintah, pedestarian, jalan sehingga berstandar pelayanan inklusif.
		Penegakan regulasi daerah untuk pencegahan/penindakan pencemaran lingkungan dan pelanggaran RTRW.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PRIORITAS SESUAI RPJMD	PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH
		Membangun sistem pengelolaan sampah terpadu ditingkat kelurahan/kecamatan.
		Mendorong terciptanya kawasan industri yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
5	Pengembangan Infrastruktur Kewilayahan sesuai arah pengembangan wilayah	**PROGRAM BIRULAH** (Bangun Rumah Layak Huni)
		Program bantuan sosial untuk pemugaran rumah tangga miskin untuk mendapatkan rumah yang sehat.
		PROGRAM STBM (Sanitasi total Berbasis Masyarakat)
		Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) adalah pemberian bantuan keuangan kelurahan/RW untuk merubah perilaku higiene dan membangun sarana sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat.
		PROGRAM SOS : Salatiga Online System
		Program SOS bertujuan membangun infrastruktur jaringan online terpadu untuk pengawasan infrastruktur, lingkungan hidup, dan mobilitas masyarakat, yang berpusat pada Command Center tingkat kecamatan dan Kota.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 4. 13. Keterkaitan Permasalahan, Isu Strategis dan Strategi sesuai Prioritas Pembangunan Kota Salatiga Tahun 2027

Permasalahan Pembangunan		Isu Strategis Kota Salatiga Tahun 2025 -2029	Prioritas Pembangunan		Arah Kebijakan
1	Masih adanya angka kemiskinan sebesar 4,20%, sedangkan target SDGs pada tahun 2030 adalah nol persen	Kemiskinan dan kesenjangan	PD10.	Meningkatkan cakupan perlindungan, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan ekonomi PPKS	Pengembangan potensi perekonomian daerah yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif
2	Tingginya tingkat ketimpangan pendapatan penduduk, termasuk 3 besar di Jawa Tengah		PD12.	Meningkatkan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat	
3	Tingkat Pengangguran Terbuka masih relative cukup besar, pada angka 3,67%				
4	Meningkatnya jumlah penduduk lansia seiring dengan Usia Harapan Hidup yang terus naik, pada tahun 2025 pada angka 78, 75 tahun				
5	Angka Partisipasi Sekolah belum mencapai 100%	Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia	PD1.	Mengembangkan pembelajaran inklusif pada setiap sekolah untuk menjamin pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dan memberikan kesetaraan	Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berkarakter
6	Belum optimalnya pencapaian Tingkat kesehatan keluarga dengan masih adanya kasus gizi buruk dan stunting pada anak, kasus kematian balita, dan kematian ibu		PD2.	Meningkatkan kualitas pengelolaan perpustakaan dan naskah kuno serta pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan di Kota Salatiga	
			PD3.	Meningkatkan pengetahuan kesehatan masyarakat untuk mendukung promotif dan preventif terutama dalam edukasi gaya hidup sehat, kesehatan mental, pencegahan penyakit menular dan tidak menular	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Permasalahan Pembangunan		Isu Strategis Kota Salatiga Tahun 2025 -2029	Prioritas Pembangunan		Arah Kebijakan
			FD4.	Meningkatkan kualitas SDM dan fasilitas puskesmas, rumah sakit daerah berstandar internasional, dan klinik kesehatan daerah yang berkualitas dan modern didukung dengan sistem layanan terintegrasi	
			FD2.	Mengembangkan komunitas pembelajaran bahasa dan keterampilan komunikasi internasional (Bahasa Inggris, Bahasa Arab dan Bahasa Cina)	
			FD3.	Meningkatkan dukungan kelembagaan dan operasional pada pendidikan kesetaraan dan lembaga keterampilan dalam pembelajaran kewirausahaan berorentasi global	
			FD5.	Meningkatkan kualitas dan pemerataan sarana prasarana, tenaga pendidik, dan kurikulum berbasis digital pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah menuju Pendidikan Salatiga Standar Internasional	
7	Masih rendahnya Daya Saing Olahraga		PD5.	Mengembangkan infrastruktur dan fasilitas pendukung olahraga yang terjangkau dan lebih mudah diakses masyarakat	
8	Masih rendahnya koleksi nasional dan kuno yang dilestarikan, tahun 2025 baru 25 %, dan prosentase pemajuan kebudayaan baru 76,81%	Pengelolaan dan pelestarian budaya daerah	PD2.	Meningkatkan kualitas pengelolaan perpustakaan dan naskah kuno serta pengembangan koleksi budaya etnis	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Permasalahan Pembangunan		Isu Strategis Kota Salatiga Tahun 2025 -2029	Prioritas Pembangunan		Arah Kebijakan
				nusantara yang ditemukan di Kota Salatiga	
9	Belum optimalnya pencapaian perlindungan perempuan dan anak, masih adanya anak korban kekerasan dan kekerasan terhadap perempuan	Kesenjangan gender, perlindungan anak dan perempuan	PD1.	Mengembangkan pembelajaran inklusif pada setiap sekolah untuk menjamin pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dan memberikan kesetaraan	
10	Kota Salatiga yang berada di persimpangan jalur utama Semarang–Solo, belum optimal dalam memanfaatkan peranannya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional dengan kondisi sumberdaya yang dimiliki saat ini, pertumbuhan ekonomi belum mencapai target pesimis tahun 2025 yaitu 6,10%	Pertumbuhan ekonomi yang merata didukung investasi dan produk unggulan yang berdaya saing	PD6.	Meningkatkan investasi dalam mendukung kapasitas produksi daerah didukung peningkatan kondisi iklim investasi yang kondusif dengan pengembangan SDM, teknologi dan promosi potensi daerah secara masif	Pengembangan potensi perekonomian daerah yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif Untuk ketahan pangan khususnya ketersediaan hasil peternakan didukung dengan surveilans penyakit hewan yang terintegrasi, vaksinasi ternak, penguatan biosekuriti kandang, pengawasan distribusi ternak, serta langkah mitigasi jangka panjang terhadap risiko wabah penyakit hewan
11	Belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya alam terutama dalam pengembangan teknologi pertanian dan pengelolaan potensi wisata dalam mendukung perkembangan ekonomi masyarakat Kota Salatiga		PD7.	Meningkatkan kapasitas tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri dan pasar kerja	
12	Pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya menciptakan pemerataan kesejahteraan dengan masih didominasi oleh sektor industri pengolahan dan konsumsi rumah tangga		PD8.	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perdagangan dan mendorong digitalisasi serta kemitraan/kolaborasi antara pedagang dan UMKM untuk menghasilkan produk kualitas ekspor	
13	Keterbatasan investasi dan belum optimalnya pemanfaatan potensi sektor unggulan daerah		PD.9	Mengembangkan infrastruktur industri yang memadai, penyediaan wilayah peruntukan industri yang terintegrasi, peningkatan inovasi dengan memberikan insentif untuk adopsi	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Permasalahan Pembangunan		Isu Strategis Kota Salatiga Tahun 2025 -2029	Prioritas Pembangunan		Arah Kebijakan
				teknologi terbaru dalam proses produksi	
			PD11.	Mengembangkan ketahanan pangan berbasis komunitas, pengembangan urban farming, memperluas kerjasama antara petani, pedagang, dan konsumen untuk menciptakan sistem pangan yang lebih efisien dan berkelanjutan	
			PD12.	Meningkatkan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat	
			PD13.	Penguatan kerukunan sosial, agama, ras maupun kelompok masyarakat melalui peningkatan pendidikan politik dan wawasan kebangsaan dalam berbagai kegiatan guna meningkatkan cinta tanah air, nilai-nilai toleransi dan saling menghormati dalam pendidikan dan kehidupan sehari-hari	
14	Daya dukung lahan tidak mampu memenuhi kebutuhan standar hidup layak penduduk, dan penurunan kualitas air	Pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan	PD20.	Meningkatkan pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan secara konsisten yang didukung dengan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat	Integrasi rencana tata ruang dengan instrumen pengelolaan lingkungan hidup
15	Penurunan Indeks Inovasi Daerah (51,10 turun menjadi 48,88) dan masih belum optimalnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan (73,68)		PD21.	Mengembangkan riset dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang mampu meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Permasalahan Pembangunan		Isu Strategis Kota Salatiga Tahun 2025 -2029	Prioritas Pembangunan		Arah Kebijakan
16	Belum optimalnya upaya peningkatan dan pemerataan insfrastruktur daerah dalam menunjang pelayanan	Pemenuhan kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur	PD5.	Mengembangkan infrastruktur dan fasilitas pendukung olahraga yang terjangkau dan lebih mudah diakses masyarakat	Pengembangan Infrastruktur Kewilayahan sesuai arah pengembangan wilayah
			PD.9	Mengembangkan infrastruktur industri yang memadai, penyediaan wilayah peruntukan industri yang terintegrasi, peningkatan inovasi dengan memberikan insentif untuk adopsi teknologi terbaru dalam proses produksi	
17	Kualitas sumber daya aparatur, pemanfaatan teknologi dalam pelayanan, penerapan standar pelayanan yang jelas dan terukur, pengembangan birokrasi dan penguatan sistem pengawasan dalam pelayanan public masih belum optimal	Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis dan Kolaboratif	PD14.	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, pengembangan aset produktif dan mengembangkan sumber pendapatan daerah yang memiliki potensi jangka panjang	Pengembangan pelayanan publik yang bermutu dan berorientasi pada kepuasan masyarakat
18	Infrastruktur digital yang merata, literasi digital aparatur, serta sistem informasi antar-perangkat daerah yang masih belum optimal.		PD15.	Meningkatkan kualitas kelembagaan dan pengembangan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat	
19	Peran dan dukungan kelembagaan di Tingkat Kelurahan dan Kecamatan belum optimal		PD16.	Perluasan jaringan internet broadband dan penyediaan akses WiFi publik di fasilitas layanan umum	
			PD17.	Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana pelayanan serta jangkauan layanan kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Permasalahan Pembangunan		Isu Strategis Kota Salatiga Tahun 2025 -2029	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan
			PD18. Meningkatkan peran kelembagaan ditingkat kecamatan dan kelurahan (PKK, LPMK dll) dalam pelaksanaan pemberdayaan, monitoring dan evaluasi pembangunan terutama dalam mendukung tercapainya kecamatan berdaya	
			PD19. Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang efektif dan efisien	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4.3 Pokok – Pokok Pikiran DPRD

Dalam penyusunan rancangan RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Pokok-pokok pikiran DPRD tersebut terangkum ke dalam berbagai urusan kewenangan pemerintah tingkat Kota. Dengan demikian, dokumen pokok-pokok pikiran DPRD Kota Salatiga, merupakan dokumen yang sangat penting dan strategis untuk mendasari dan mengarahkan pelaksanaan pembangunan agar tidak lepas terhadap perwujudan tujuan dan sasaran Kota Salatiga.

Pokok-pokok pikiran DPRD Salatiga tahun 2027 merupakan wujud akumulasi dan representasi masyarakat Salatiga, melalui kegiatan reses dan kunjungan kerja yang dilakukan pimpinan dan anggota DPRD di 4 daerah pemilihan yang meliputi 4 kecamatan. Kegiatan reses ini telah berhasil merangkum banyak aspirasi dari masyarakat, setiap anggota DPRD membawa aspirasi warga dari dapilnya masing-masing, untuk ditindaklanjuti Pemerintah Salatiga lewat mekanisme perencanaan pembangunan dan penganggaran tahunan daerah, dalam hal ini penyusunan RKPD tahun 2027, KUA-PPAS dan APBD tahun 2027.

Hasil indentifikasi dan analisa usulan dari aspirasi masyarakat berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah, selanjutnya dirumuskan dalam tema pokok-pokok pikiran DPRD yang dituangkan dalam Dokumen RKPD tahun 2027. Pokok-pokok pikiran DPRD dirinci dalam beberapa bidang yang selanjutnya diterjemahkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2027. Pokok-pokok pikiran DPRD dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) sesuai dengan kamus usulan aspirasi oleh anggota DPRD yang selanjutnya diverifikasi oleh Sekretariat Dewan, Mitra Bappeda dan secara teknis dikaji oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan memasukkan rencana pendanaan untuk usulan pokok pikiran DPRD tersebut. Selanjutnya Tim Pembahas RKPD melaksanakan penelaahan dan pembahasan pokok-pokok pikiran DPRD untuk disesuaikan dengan sasaran dan prioritas pembangunan, serta ketersediaan anggaran. Pokok-pokok pikiran DPRD yang telah melalui pembahasan, menjadi salah satu substansi yang direviu oleh APIP melalui e-reviu yang akhirnya menjadi bagian dari dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Salatiga Tahun 2027.

Adapun kamus usulan berdasarkan permasalahan serta perangkat daerah yang menjadi prioritas pada tahun 2027 adalah sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 4. 14. Kamus Usulan Aspirasi Kota Salatiga Tahun 2027

No	OPD Tujuan		Permasalahan	Bidang Urusan
1	Dinas Sosial	1	Pelatihan Bidang Sosial (keluarga miskin)	Sosial
		2	Pelatihan Rehabilitasi Sosial (tuna sosial, anak jalanan, disabilitas)	
2	Dispangtan	1	Pelatihan Diversivikasi dan Ketahanan Pangan (B2SA, Urban Farming, dll)	Pangan dan Pertanian
		2	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian (Pelatihan kelompok Ternak, bantuan bibit hewan ternak, bantuan bibit tanaman)	
		3	Pengelolaan Perikanan Budidaya (Pengadaan Sarpras bagi Kelompok Pembudidaya Ikan, Bantuan Bibit Ikan)	
		4	Pengadaan Sarana Prasarana bagi Kelompok Pemasar Ikan	
		5	Pengadaan sarana prasarana pendukung pertanian (JUT, Alat Mesin Pertanian)	
3	BPBD	1	Pelatihan Penanggulangan Bencana, Penyediaan Peralatan Perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Trantibumlinmas
4	Disperinaker	1	Bimtek / Pelatihan / Sosialisasi / Seminar Ketenagakerjaan, UMSK, LKS	Perindustrian dan Tenaga Kerja
5	DINKES	1	Rehab Pustu	Kesehatan
		2	Pemberian Makanan Tambahan (PMT Bumil & Balita, Pasien TB, ODHIV & anak)	
		3	Pengadaan Alkes TB	
		4	Sosialisasi kesehatan	
		5	Stimulan BMHP Posyandu ILP	
6	DISHUB	1	Pengadaan dan Pemasangan APILL, rambu-rambu, marka jalan, cermin tikungan	Perhubungan
		2	Penyediaan Perlengkapan Jalan	
7	KESBANGPOL	1	Penguatan Kapasitas Kader Partai Politik	Pemerintahan Umum
8	Dinkop UKM	1	Sertifikasi halal bagi UMKM	Koperasi dan UKM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	OPD Tujuan		Permasalahan	Bidang Urusan
		2	Pelatihan Bidang Koperasi dan UKM	
		3	Pengembangan UMKM (sosialisasi, pelatihan, seminar)	
9	SATPOL PP	1	Pelatihan Penanganan Kebakaran	Trantibumlinmas
		2	Pelatihan dan lomba kader (SPM Posyandu, lomba PBB, lomba poskamling)	
10	Disbudpar	1	Pelatihan Konten Promosi Pariwisata & ekonomi	Kebudayaan dan Pariwisata
		2	Event Kebudayaan / Kesenian / Pariwisata tingkat Kota	
		3	Pelatihan Pemasaran Pariwisata, Pendampingan POKDARWIS	
		4	Parade budaya dan gelar seni	
		5	Kajian tokoh sejarah Kota Salatiga	
11	Dispora	1	Pelatihan / Workshop / Festival / Lomba untuk organisasi / komunitas kepemudaan	Pemuda dan Olaharaga
		2	Pelatihan / Workshop / Festival / Lomba Olahraga Masyarakat	
		3	Pengadaan/ Rehabilitasi Sarana & Prasarana Olahraga Masyarakat	
		4	Pembinaan Atlet	
12	Disperkim	1	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh	Perumahan dan Kawasan Permukiman
		2	RTLH	
		3	Penataan Prasarana, Sarana dan Utilitas Taman Pemakaman Umum (TPU)/ Taman Pemakaman Bukan Umum (TPBU)/ Tempat Pemakaman Khusus (TPK)	
		4	Prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan	
13	DPU PR	1	Pembangunan tanggul sungai / irigasi	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		2	Perluasan SPAM Perpipaan	
		3	Penyediaan Sub-SPALD Setempat, Pembangunan SPALD berbasis Permukiman	
		4	Rehab / Pembangunan Drainase	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	OPD Tujuan		Permasalahan	Bidang Urusan
		5	Pemeliharaan Jalan dan jembatan	
14	Kecamatan	1	Pelatihan / Workshop Kaderkes, bidang Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan
		2	Pengadaan Sarana Prasarana RT/RW (balai, sound system, dsb)	
15	DLH	1	Penyediaan Jaring Pengaman Sungai pada Crossing point (Titik jembatan yang melintasi sungai/ saluran)	Lingkungan Hidup
		2	Sosialisasi Pencegahan pencemaran &/atau kerusakan LH dengan penerapan penegakan hukum terhadap pelanggaran ketertiban umum	
		3	Pembangunan Sumur Resapan, Bio Gas	
		4	Pembangunan Taman Kelurahan, Taman Edukasi Biodiversity & Biosecurity	
		5	Sosialisasi pengelolaan, pengumpumpulan & pemilahan limbah B3	
		6	Penyediaan Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah (Gerobak Sampah, Mesin Pengolah Sampah, Tempat Sampah Terpilah, Kendaraan Roda Tiga, Mesin Biopori, komposter, Sosialisasi Pengelolaan Sampah Organik dan Anorganik)	
		7	Pelatihan Pengolahan Sampah	
		8	Alat Berat dan Alat Mesin Pengelolaan Sampah untuk TPA dan TPS3R	
		9	Armada Pengangkut Sampah (Roda Tiga, Minidump, Dum Truck, Armroll)	
16	DP3APPKB	1	Satgas anti kekerasan perempuan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		2	Satgas anti kekerasan anak	
		3	Pelatihan bagi perempuan	
		4	Sarpras ruang ramah anak	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4.4 Prioritas Pembangunan Daerah dalam mendukung Kebijakan Nasional

4.4.1 Sustainable Development Goals (SDGs)

Tabel 4. 15. Keterkaitan Sasaran, Prioritas terhadap Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2027 Kota Salatiga

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Sasaran Kota Salatiga	Prioritas Tahun 2027	TBP	Indikator	Program	Perangkat Daerah
Mewujudkan Kota Salatiga yang bergerak, Energi, Dinamis dan Adaptif menuju Salatiga Mendunia	- Meningkatnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan unggul	PD1 Mengembangkan pembelajaran inklusif pada setiap sekolah untuk menjamin pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dan memberikan kesetaraan	TBP2 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	- Angka Kematian Ibu (AKI) - Angka Kematian Balita - (AKaBa) per 1000 kelahiran hidup - Prevalensi Hipertensi - Penduduk Usai >18 tahun - Proporsi penduduk yang terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obat-obatan anti retroviral - Persentase eks penyandang penyakit sosial (eks. Narapidana, PSK, Narkoba dan penyakit Sosial Lainnya) yang telah terbina (%) - CPR/ Peserta KB Aktif - Total Fertility Rate (TFR) - UN MEET NEED - Persentase cakupan kepesertaan JKN	- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Program Rehabilitasi Sosial - Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	- Dinas Kesehatan - Dinas Sosial - DP3APPKB

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Sasaran Kota Salatiga	Prioritas Tahun 2027	TBP	Indikator	Program	Perangkat Daerah
		PD2 Meningkatkan kualitas pengelolaan perpustakaan dan naskah kuno serta pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan di Kota Salatiga	TBP6 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yg Insklusif Dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja Yg Produktif & Menyeluruh, Serta Pekerjaan Yg Layak Untuk Semua	- Laju Pertumbuhan PDRB per kapita (laju pertumbuhan PDB per kapita) - Presentase Tenaga kerja formal (Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis kelamin) - Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur (Idem) Jumlah wisatawan mancanegara Jumlah wisatawan nusantara	- Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan - Program Pengelolaan Pendapatan Daerah - Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting - Program Pengembangan Ekspor - Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri - Program Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata - Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif - Program Pemasaran Pariwisata	- Dinas Perdagangan - BPKPD - Dinas Perdagangan - Dinas Perinaker - Dinas Budpar - Dinas Budpar

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Sasaran Kota Salatiga	Prioritas Tahun 2027	TBP	Indikator	Program	Perangkat Daerah
					- Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja - Program Penempatan Tenaga Kerja	- Dinas Perinaker

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Sasaran Kota Salatiga	Prioritas Tahun 2027	TBP	Indikator	Program	Perangkat Daerah
		PD3 Meningkatkan pengetahuan kesehatan masyarakat untuk mendukung promotif dan preventif terutama dalam edukasi gaya hidup sehat, kesehatan mental, pencegahan penyakit menular dan tidak menular	TBP3 Menjamin Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Mempromosikan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat bagi Semua	- Angka Partisipasi Kasar (APK) - Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat	- Program Pengelolaan Pendidikan	- Dinas Pendidikan
		PD4 Meningkatkan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat secara keseluruhan	TBP4 Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	- Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG - Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penagananan Sesuai Standart	- Program 1: Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan - Program 1: Program Perlindungan Perempuan	- DP3APPKB

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Sasaran Kota Salatiga	Prioritas Tahun 2027	TBP	Indikator	Program	Perangkat Daerah
	Terwujudnya transformasi sosial dan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan	PD6 Meningkatkan investasi dalam mendukung kapasitas produksi daerah didukung peningkatan kondisi iklim investasi yang kondusif dengan pengembangan SDM, teknologi dan promosi potensi daerah secara masif	TBP7 Membangun Infrastruktur Yg Tangguh , Meningkatkan Industri Inklusif Dan Berkelanjutan Serta Mendorong Inovasi	- Presentase jalan kabupaten/kota dalam kondisi - baik Rasio emisi co2/ emisi gas rumah kaca dengan nilai - tambah sektor industri manufaktur Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca (Penurunan emisi gas rumah kaca sektor industri)	- Program Penyelenggaraan Jalan - Program Perencanaan Lingkungan Hidup - Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup - Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) - Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah - B3) Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	- Dinas PUPR - Dinas Lingkungan Hidup

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Sasaran Kota Salatiga		Prioritas Tahun 2027	TBP	Indikator	Program	Perangkat Daerah
						- Program Pengelolaan Persampahan	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Sasaran Kota Salatiga		Prioritas Tahun 2027	TBP	Indikator	Program	Perangkat Daerah
			PD7 Meningkatkan kapasitas tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri dan pasar kerja				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Sasaran Kota Salatiga	Prioritas Tahun 2027	TBP	Indikator	Program	Perangkat Daerah
		PD8 Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perdagangan dan mendorong digitalisasi serta kemitraan/kolaborasi antara pedagang dan UMKM untuk menghasilkan produk kualitas ekspor	TBP7 Membangun Infrastruktur Yg Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif Dan Berkelanjutan Serta Mendorong Inovasi	- Presentase jalan kabupaten/kota dalam kondisi baik - Rasio emisi co2/ emisi gas rumah kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur - Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca (Penurunan emisi gas rumah kaca sektor industri)	- Program Penyelenggaraan Jalan - Program Perencanaan Lingkungan Hidup - Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup - Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) - Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) - Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	- Dinas PUPR - Dinas Lingkungan Hidup

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Sasaran Kota Salatiga		Prioritas Tahun 2027	TBP	Indikator	Program	Perangkat Daerah
						- Program Pengelolaan Persampahan	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Sasaran Kota Salatiga	Prioritas Tahun 2027	TBP	Indikator	Program	Perangkat Daerah
		PD9 Mengembangkan infrastruktur industri yang memadai, penyediaan wilayah peruntukan industri yang terintegrasi, peningkatan inovasi dengan memberikan insentif untuk adopsi teknologi terbaru dalam proses produksi	TBP9 Menjadikan Kota dan Permukiman yang Inklusif, Aman Tangguh dan Berkelanjutan	- Cakupan ketersediaan rumah layak huni - Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan - Persentase Penanganan Sampah - Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) - Kelurahan Siaga Bencana	- Program Pengembangan Perumahan - Program 5: Program Kawasan Permukiman - Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya - Program Pembinaan Sejarah - Program Pengelolaan Persampahan - Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) - Program Penanggulangan Bencana - Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata - Dinas Lingkungan Hidup - BPBD - Satpol PP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Sasaran Kota Salatiga	Prioritas Tahun 2027	TBP	Indikator	Program	Perangkat Daerah
		PD10 Meningkatkan cakupan perlindungan, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan ekonomi PPKS	TBP8 Mengurangi Kesenjangan Intra Dan Antar Negara	- Koefisien Gini (Indeks Gini atau Rasio Gini)	- Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	- Dinas Perdagangan
					- Program Pengelolaan Pendapatan	- BPKPD
					- Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	- Dinas Perdagangan
					- Program Pengembangan Ekspor	- Dinas Perindustrian dan Ketenaga kerjaan
					- Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	- Disbudpar
					- Program Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	
					- Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	
					- Program Pemasaran Pariwisata	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Sasaran Kota Salatiga	Prioritas Tahun 2027	TBP	Indikator	Program	Perangkat Daerah
		PD11 Mengembangkan ketahanan pangan berbasis komunitas, pengembangan urban farming, memperluas kerjasama antara petani, pedagang, dan konsumen untuk menciptakan sistem pangan yang lebih efisien dan berkelanjutan	TBP10 Menjadikan Kota dan Permukiman yang Inklusif, Aman Tangguh dan Berkelanjutan	- Cakupan ketersediaan rumah layak huni	- Program Pengembangan Perumahan - Program 5: Program Kawasan Permukiman - Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya - Program Pembinaan Sejarah - Program Pengelolaan Persampahan - Program Pengelolaan Keanekaragaman	- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata - Dinas Lingkungan Hidup
		PD12 Meningkatkan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat		- Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Sasaran Kota Salatiga	Prioritas Tahun 2027	TBP	Indikator	Program	Perangkat Daerah
		PD13 Penguatan kerukunan sosial, agama, ras maupun kelompok masyarakat melalui peningkatan pendidikan politik dan wawasan kebangsaan dalam berbagai kegiatan guna meningkatkan cinta tanah air, nilai-nilai toleransi dan saling menghormati dalam pendidikan dan kehidupan sehari-hari		- Persentase Penanganan Sampah	Hayati (Kehati) - Program Penanggulangan Bencana - Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	- BPBD - Satpol PP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Sasaran Kota Salatiga	Prioritas Tahun 2027	TBP	Indikator	Program	Perangkat Daerah
	- Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan berbasis digital	PD14 Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, pengembangan aset produktif dan mengembangkan sumber pendapatan daerah yang memiliki potensi jangka panjang	TBP7 Membangun Infrastruktur Yg Tangguh , Meningkatkan Industri Inklusif Dan Berkelanjutan Serta Mendorong Inovasi	- Presentase jalan kabupaten/kota dalam kondisi - baik Rasio emisi co2/ emisi gas rumah kaca dengan nilai - tambah sektor industri manufaktur Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca (Penurunan emisi gas rumah kaca sektor industri)	- Program Penyelenggaraan Jalan - Program Perencanaan Lingkungan Hidup - Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup - Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) - Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah - B3 Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan - Lingkungan Hidup (PPPLH)	- Dinas PUPR - Dinas Lingkungan Hidup

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Sasaran Kota Salatiga	Prioritas Tahun 2027	TBP	Indikator	Program	Perangkat Daerah
					Program Pengelolaan - Persampahan Program Perencanaan - Lingkungan Hidup Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Sasaran Kota Salatiga	Prioritas Tahun 2027	TBP	Indikator	Program	Perangkat Daerah
		PD15 Meningkatkan kualitas kelembagaan dan pengembangan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat		- Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH)		
		PD16 Perluasan jaringan internet broadband dan penyediaan akses WiFi publik di fasilitas layanan umum	TBP12 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Kokoh	- Indeks Kriminalitas - Cakupan Akta Kelahiran anak usia 0-18 tahun (Persentase anak yang memiliki akta kelahiran) - Opini BPK Atas Laporan Keuangan - Nilai SAKIP - Indeks Refomasi Birokrasi (Indeks RB)	- Program : Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum - Program: Program Pendaftaran Penduduk - Program Pencatatan Sipil - Program : Program	- Satpol PP - Disdukcapil - Badan Pengelolaan
		PD17 Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana pelayanan serta jangkauan layanan kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Sasaran Kota Salatiga	Prioritas Tahun 2027	TBP	Indikator	Program	Perangkat Daerah
		PD18 Meningkatkan peran kelembagaan ditingkat kecamatan dan kelurahan (PKK, LPMK dll) dalam pelaksanaan pemberdayaan, monitoring dan evaluasi pembangunan terutama dalam mendukung tercapainya kecamatan berdaya		- Tingkat Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik	Pengelolaan Keuangan Daerah - Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Program : Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Keuangan dan Sekretariat Daerah - Sekretariat Daerah - Dinas Komunikasi dan Informatika
		PD19 Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang efektif dan efisien				
		PD21 Mengembangkan riset dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang mampu meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Sasaran Kota Salatiga	Prioritas Tahun 2027	TBP	Indikator	Program	Perangkat Daerah
	- Meningkatnya kualitas infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	PD5 Mengembangkan infrastruktur dan fasilitas pendukung olahraga yang terjangkau dan lebih mudah diakses masyarakat	TBP7 Membangun Infrastruktur Yg Tangguh , Meningkatkan Industri Inklusif Dan Berkelanjutan Serta Mendorong Inovasi	- Presentase jalan kabupaten/kota dalam kondisi baik - Rasio emisi co2/ emisi gas rumah kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur - Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca (Penurunan emisi gas rumah kaca sektor industri)	- Program Penyelenggaraan Jalan - Program Perencanaan - Lingkungan Hidup Program Pengendalian - Pencemaran Dan/Atau - Kerusakan Lingkungan Hidup Program Pengelolaan - Keanekaragaman Hayati (Kehati) Program Pengendalian - Bahan Berbahaya - Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan - Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3 - Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Program Pengelolaan Persampahan Program	- Dinas PUPR - Dinas Lingkungan Hidup

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Sasaran Kota Salatiga	Prioritas Tahun 2027	TBP	Indikator	Program	Perangkat Daerah
					Perencanaan Lingkungan Hidup Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Sasaran Kota Salatiga	Prioritas Tahun 2027	TBP	Indikator	Program	Perangkat Daerah
		PD9 Mengembangkan infrastruktur industri yang memadai, penyediaan wilayah peruntukan industri yang terintegrasi, peningkatan inovasi dengan memberikan insentif untuk adopsi teknologi terbaru dalam proses produksi	TBP9 Menjadikan Kota dan Permukiman yang Inklusif, Aman Tangguh dan Berkelanjutan	- Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni - Persentase Cagar Budaya Yang Dilestarikan - Persentase Penanganan Sampah - Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kelurahan Siaga Bencana	- Program Pengembangan Perumahan - Program 5: Program Kawasan Permukiman - Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya - Program Pembinaan Sejarah - Program Pengelolaan Persampahan - Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) - Program Penanggulangan Bencana - Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata - Dinas Lingkungan Hidup - BPBD - Satpol PP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Sasaran Kota Salatiga	Prioritas Tahun 2027	TBP	Indikator	Program	Perangkat Daerah
		PD20 Meningkatkan pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan secara konsisten yang didukung dengan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat	TBP5 Menjamin Ketersediaan Serta Pengelolaan Air Bersih Dan Sanitasi Yang Berkelanjutan Untuk Semua	- Persentase penduduk berakses air minum (Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap - layanan sumber air minum - layak) Persentase Pemenuhan Air - Baku Persentase Rumah Tangga - dengan Akses Air Sanitasi Layak Persentase Desa Kelurahan - yang melaksanakan STBM Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) Persentase rumah tangga yang terlayani limbah sistem komunal	- Program: Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum - Program: Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum - Program: Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah - Program: Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah - Program: Pemenuhan Upaya Kesehatan - Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Program: Pemenuhan Upaya Kesehatan - Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program: Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program:	- Dinas PUPR - Dinas Kesehatan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Sasaran Kota Salatiga	Prioritas Tahun 2027	TBP	Indikator	Program	Perangkat Daerah
					Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4.4.2 Pengarus Utamaan Gender (PUG) dan Iklusi Sosial

Tabel 4. 16. Cascading Tujuan dan Sasaran Pembangunan terhadap Pengarus Utamaan Gender (PUG) Tahun 2027 Kota Salatiga

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga	Prioritas Tahun 2027	Indikator	Program	Perangkat Daerah
Mewujudkan Kota Salatiga yang bergerak, Energi, Dinamis dan Adaptif menuju Salatiga Mendunia	- Meningkatnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan unggul	PD1 Mengembangkan pembelajaran inklusif pada setiap sekolah untuk menjamin pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dan memberikan kesetaraan	- Indeks Pembangunan Gender	- Program Pengelolaan Pendidikan	- Dinas Pendidikan
		PD2 Meningkatkan kualitas pengelolaan perpustakaan dan naskah kuno serta pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan di Kota Salatiga		- Program Pembinaan Perpustakaan	- Dinpersip
		PD3 Meningkatkan pengetahuan kesehatan masyarakat untuk mendukung promotif dan preventif terutama dalam edukasi gaya hidup sehat, kesehatan mental, pencegahan penyakit menular dan tidak menular		- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	- Dinas Kesehatan
		PD4 Meningkatkan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat secara keseluruhan		- Program Rehabilitasi Sosial	- Dinas Sosial
				- Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	- Dinas Sosial

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga	Prioritas Tahun 2027	Indikator	Program	Perangkat Daerah
				- Program perencanaan Tenaga kerja	- Disnakertrans
				- Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	- Disnakertrans
				- Program Penempatan Tenaga Kerja	- Disnakertrans
		PD5 Mengembangkan infrastruktur dan fasilitas pendukung olahraga yang terjangkau dan lebih mudah diakses masyarakat		- Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	- Dispora
				- Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	- Dispora
				- Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	- Dinas Perhubungan
				- Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	- DPUPR

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga	Prioritas Tahun 2027	Indikator	Program	Perangkat Daerah
	- Terwujudnya transformasi sosial dan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan	PD6 Meningkatkan investasi dalam mendukung kapasitas produksi daerah didukung peningkatan kondisi iklim investasi yang kondusif dengan pengembangan SDM, teknologi dan promosi potensi daerah secara masif		- Program Pembinaan Perpustakaan	Dinpersip
		PD7 Meningkatkan kapasitas tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri dan pasar kerja		- Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	- DP3APKB
				- Program Perlindungan Perempuan	- DP3APKB
				- Program Peningkatan Kualitas Keluarga	- DP3APKB
				- Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	- DP3APKB
				- Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	- DP3APKB
				- Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	- DP3APKB

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga	Prioritas Tahun 2027	Indikator	Program	Perangkat Daerah
		PD8 Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perdagangan dan mendorong digitalisasi serta kemitraan/kolaborasi antara pedagang dan UMKM untuk menghasilkan produk kualitas ekspor		- Program Pengembangan Perumahan	- DPKP
				- Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	- Dinkop UKM
				- Program Pengembangan UMKM	- Dinkop UKM
		PD9 Mengembangkan infrastruktur industri yang memadai, penyediaan wilayah peruntukan industri yang terintegrasi, peningkatan inovasi dengan memberikan insentif untuk adopsi teknologi terbaru dalam proses produksi			
		PD10 Meningkatkan cakupan perlindungan, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan ekonomi PPKS		- Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	- Satpol PP
		PD11 Mengembangkan ketahanan pangan berbasis komunitas, pengembangan urban farming, memperluas kerjasama antara petani,		- Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	- Dispangtan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga	Prioritas Tahun 2027	Indikator	Program	Perangkat Daerah
		pedagang, dan konsumen untuk menciptakan sistem pangan yang lebih efisien dan berkelanjutan		- Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	- Dispangtan
				- Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	- Dispora
				- Program Penyuluhan Pertanian	- Dispangtan
				- Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	- Dispangtan
		PD12 Meningkatkan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat		- Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	- DP3AP2KB
		PD13 Penguatan kerukunan sosial, agama, ras maupun kelompok masyarakat melalui peningkatan pendidikan politik dan wawasan kebangsaan dalam berbagai kegiatan guna meningkatkan cinta tanah air, nilai-nilai toleransi		- Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	- DP3AP2KB
				- Program Pengembangan Kebudayaan	- Disbudpar

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga		Prioritas Tahun 2027		Indikator	Program	Perangkat Daerah
				dan saling menghormati dalam pendidikan dan kehidupan sehari-hari		- Program Pengembangan KesenianTradisional	- Disbudpar
						- Program Penanganan Bencana	- Dinas Sosial
						- Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	- Dinas Lingkungan Hidup
	-	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan berbasis digital	PD14	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, pengembangan aset produktif dan mengembangkan sumber pendapatan daerah yang memiliki potensi jangka panjang			
			PD15	Meningkatkan kualitas kelembagaan dan pengembangan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat			
			PD16	Perluasan jaringan internet broadband dan penyediaan akses WiFi publik di fasilitas layanan umum		- Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	- Diskominfo
						- Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	- Diskominfo

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga	Prioritas Tahun 2027	Indikator	Program	Perangkat Daerah
		PD17 Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana pelayanan serta jangkauan layanan kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat		- Program Pendaftaran Penduduk	- Disdukcapil
				- Program Pencatatan Sipil	- Disdukcapil
				- Program Pengendalian Penduduk	- DP3AP2KB
		PD18 Meningkatkan peran kelembagaan ditingkat kecamatan dan kelurahan (PKK, LPMK dll) dalam pelaksanaan pemberdayaan, monitoring dan evaluasi pembangunan terutama dalam mendukung tercapainya kecamatan berdaya			
		PD19 Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang efektif dan efisien			
		PD21 Mengembangkan riset dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang mampu meningkatkan daya saing			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga		Prioritas Tahun 2027		Indikator	Program	Perangkat Daerah
				dan kesejahteraan masyarakat			
	-	Meningkatnya kualitas infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	PD5	Mengembangkan infrastruktur dan fasilitas pendukung olahraga yang terjangkau dan lebih mudah diakses masyarakat		- Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	- Dispora
						- Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	- Dispora
						- Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	- Dinas Perhubungan
						- Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	- DPUPR
			PD9	Mengembangkan infrastruktur industri yang memadai, penyediaan wilayah peruntukan industri yang terintegrasi, peningkatan inovasi dengan memberikan insentif untuk adopsi teknologi terbaru dalam proses produksi			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga		Prioritas Tahun 2027	Indikator	Program	Perangkat Daerah
			PD20 Meningkatkan pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan secara konsisten yang didukung dengan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat		- Program Penanganan Bencana	- Dinas Sosial
					- Program Penanggulangan Bencana	- BPBD
					- Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	- Satpol PP
					- Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	- DPUPR
					- Program Pengelolaan Persampahan	- Dinas Lingkungan Hidup

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4.4.3 Pengarusutamaan Kerentanan Bencana dan Perubahan

Tabel 4. 17. Sasaran dan Prioritas dalam mendukung Pengarusutamaan Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga	Prioritas Tahun 2027	Indikator	Program	Perangkat Daerah
Mewujudkan Kota Salatiga yang bergerak, Energi, Dinamis dan Adaptif menuju Salatiga Mendunia	- Meningkatnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan unggul	PD1 Mengembangkan pembelajaran inklusif pada setiap sekolah untuk menjamin pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dan memberikan kesetaraan	- Indeks Ketahanan Daerah		
		PD2. Meningkatkan kualitas pengelolaan perpustakaan dan naskah kuno serta pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan di Kota Salatiga			
		PD3 Meningkatkan pengetahuan kesehatan masyarakat untuk mendukung promotif dan preventif terutama dalam edukasi gaya hidup sehat, kesehatan mental, pencegahan penyakit menular dan tidak menular			
		PD4 Meningkatkan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat secara keseluruhan			
		PD5 Mengembangkan infrastruktur dan fasilitas pendukung olahraga yang terjangkau dan lebih mudah diakses masyarakat			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga	Prioritas Tahun 2027	Indikator	Program	Perangkat Daerah
		PD7 Meningkatkan kapasitas tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri dan pasar kerja			
	- Terwujudnya transformasi sosial dan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan	PD6 Meningkatkan investasi dalam mendukung kapasitas produksi daerah didukung peningkatan kondisi iklim investasi yang kondusif dengan pengembangan SDM, teknologi dan promosi potensi daerah secara masif			
		PD7 Meningkatkan kapasitas tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri dan pasar kerja			
		PD8 Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perdagangan dan mendorong digitalisasi serta kemitraan/kolaborasi antara pedagang dan UMKM untuk menghasilkan produk kualitas ekspor			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga	Prioritas Tahun 2027	Indikator	Program	Perangkat Daerah
		PD.9 Mengembangkan infrastruktur industri yang memadai, penyediaan wilayah peruntukan industri yang terintegrasi, peningkatan inovasi dengan memberikan insentif untuk adopsi teknologi terbaru dalam proses produksi			
		PD10 Meningkatkan cakupan perlindungan, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan ekonomi PPKS			
		PD11 Mengembangkan ketahanan pangan berbasis komunitas, pengembangan urban farming, memperluas kerjasama antara petani, pedagang, dan konsumen untuk menciptakan sistem pangan yang lebih efisien dan berkelanjutan			
		PD12 Meningkatkan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat			
		PD13 Penguatan kerukunan sosial, agama, ras maupun kelompok masyarakat melalui peningkatan pendidikan politik dan wawasan kebangsaan dalam berbagai kegiatan guna meningkatkan cinta tanah air, nilai-nilai			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga	Prioritas Tahun 2027		Indikator	Program	Perangkat Daerah
			toleransi dan saling menghormati dalam pendidikan dan kehidupan sehari-hari			
	- Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan berbasis digital	PD14	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, pengembangan aset produktif dan mengembangkan sumber pendapatan daerah yang memiliki potensi jangka panjang			
		PD15	Meningkatkan kualitas kelembagaan dan pengembangan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat			
		PD16	Perluasan jaringan internet broadband dan penyediaan akses WiFi publik di fasilitas layanan umum			
		PD17	Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana pelayanan serta jangkauan layanan kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat			
		PD18.	Meningkatkan peran kelembagaan ditingkat kecamatan dan kelurahan (PKK, LPMK dll) dalam pelaksanaan pemberdayaan, monitoring dan evaluasi pembangunan terutama dalam mendukung tercapainya kecamatan berdaya			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga	Prioritas Tahun 2027	Indikator	Program	Perangkat Daerah
		PD19 Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang efektif dan efisien			
		PD21 Mengembangkan riset dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang mampu meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat			
	- Meningkatnya kualitas infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	PD5. Mengembangkan infrastruktur dan fasilitas pendukung olahraga yang terjangkau dan lebih mudah diakses masyarakat			
		PD9 Mengembangkan infrastruktur industri yang memadai, penyediaan wilayah peruntukan industri yang terintegrasi, peningkatan inovasi dengan memberikan insentif untuk adopsi teknologi terbaru dalam proses produksi		- Program Penataan Bangunan Gedung	- DPUPR
				- Program Pengembangan Jasa Konstruksi	- DPUPR
				- Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	- DPUPR
				- Program Pengembangan Perumahan	- Dinas Perkim
				- Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	- Dinas Perkim

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga	Prioritas Tahun 2027	Indikator	Program	Perangkat Daerah
		PD20 Meningkatkan pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan secara konsisten yang didukung dengan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat		- Program Penanggulangan Bencana	- BPBD
				- Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	- Satpol PP
				- Program Penanganan Bencana	- Dinas Sosial
				- Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	- DLH
				- Program Pengelolaan Persampahan	- DLH
				- Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	- DLH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4.4.4 Standar Pelayanan Minimal

Tabel 4. 18. Sasaran dan Prioritas dalam Mendukung Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga	Prioritas Tahun 2027	SPM	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Program	Indikator Program	Perangkat Daerah
Mewujudkan Kota Salatiga yang bergerak, Energi, Dinamis dan Adaptif menuju Salatiga Mendunia	- Meningkatnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan unggul	PD1 Mengembangkan pembelajaran inklusif pada setiap sekolah untuk menjamin pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dan memberikan kesetaraan	- SPM BIDANG PENDIDIKAN	- Pendidikan Dasar	- Jumlah Warga Negara usia 7 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	- PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	- Angka Partisipasi Sekolah PAUD (Tingkat parsipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD)	- Dinas Pendidikan
		PD2. Meningkatkan kualitas pengelolaan perpustakaan dan naskah kuno serta pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan di Kota Salatiga			- Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil A*sesmen Nasional*		- Angka Partisipasi Sekolah SD/MI (Tingkat partisipasi warga negara usia 7–12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar)	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga	Prioritas Tahun 2027	SPM	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Program	Indikator Program	Perangkat Daerah
				- Pendidikan Kesetaraan	- Jumlah Warga Negara usia 7 - 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan		- Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs (Tingkat partisipasi warga negara usia 13–15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama)	
					- Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional		- Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Kesetaraan (Tingkat partisipasi warga negara usia 7–18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan)	
				- Pendidikan Anak Usia Dini	- Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam		- Angka Putus Sekolah SD/MI	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga	Prioritas Tahun 2027	SPM	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Program	Indikator Program	Perangkat Daerah
					pendidikan PAUD			
							- Angka Putus Sekolah SMP/MTs	
							- Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik SD/MI	
							- Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik SMP/MTs	
							- Persentase sekolah TK yang memenuhi standar Holistik Integratif dengan kategori sedang	
							- Persentase Kondisi Kelas PAUD dalam Kondisi Baik	
							- Kondisi Sarpras Pendidikan Kesetaraan baik	
							- Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga	Prioritas Tahun 2027	SPM	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Program	Indikator Program	Perangkat Daerah
							- Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	
							- Rata-rata kemampuan literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	
							- Rata-rata kemampuan numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	
							- Iklim Kebhinekaan SD	
							- Iklim Kebhinekaan SMP	
							- Iklim Keamanan SD	
							- Iklim Keamanan SMP	
							- Iklim Inklusivitas SD	
							- Iklim Inklusivitas SMP	
						- PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	- Persentase Guru bersertifikat pendidik Jenjang TK/RA	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga	Prioritas Tahun 2027	SPM	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Program	Indikator Program	Perangkat Daerah
							- Persentase Guru bersertifikat pendidik Jenjang SD	
							- Persentase Guru bersertifikat pendidik jenjang SMP	
							- Persentase Pendidik yang telah memenuhi kualifikasi Minimal S1 jenjang PAUD	
							- Persentase Pendidik yang telah memenuhi kualifikasi Minimal S1 jenjang SD	
							- Persentase Pendidik yang telah memenuhi kualifikasi Minimal S1 jenjang SMP	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga	Prioritas Tahun 2027	SPM	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Program	Indikator Program	Perangkat Daerah
		PD3 Meningkatkan pengetahuan kesehatan masyarakat untuk mendukung promotif dan preventif terutama dalam edukasi gaya hidup sehat, kesehatan mental, pencegahan penyakit menular dan tidak menular	- SPM BIDANG KESEHATAN	1 Pelayanan Kesehatan ibu hamil	- Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	- PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	- Angka Kematian balita (AKABA)	- Dinas Kesehatan
		PD4 Meningkatkan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat secara keseluruhan		2 Pelayanan Kesehatan ibu bersalin	- Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan		- Capaian penemuan kasus TB (Notifikasi kasus TB)	
		PD5 Mengembangkan infrastruktur dan fasilitas pendukung olahraga yang terjangkau dan lebih mudah diakses masyarakat		3 Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	- Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan		- Prosentase pasien TBC yang memulai pengobatan (Enrrollment TBC)	
				4 Pelayanan Kesehatan balita	- Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan		- Cakupan pemberian terapi pencegahan pada orang kontak serumah	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga	Prioritas Tahun 2027	SPM	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Program	Indikator Program	Perangkat Daerah
				5 Pelayanan Kesehatan pada anak usia pendidikan dasar	- Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan		- Annual Parasite Incidence (API) per 1.000 penduduk	
				6 Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	- Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan		- Jumlah Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	
				7 Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	- Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan		- Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan KKS (SK Forkom kec, SK Pokja Kel, Sekretariat, Rencana Kegiatan, Anggaran)	
				8 Pelayanan Kesehatan hipertensi	- Jumlah warga Neraga penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan		- Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan pengawasan kualitas udara dalam ruang memenuhi syarat	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga	Prioritas Tahun 2027	SPM	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Program	Indikator Program	Perangkat Daerah
				9 Pelayanan Kesehatan penderita diabetes melitus	- Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan		- Persentase Puskesmas Yang memfasilitasi Kelurahan Sehat Iklim	
				10 Pelayanan Kesehatan pada orang dengan gangguan jiwa berat	- Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan		- Persentase rumah tangga dengan kualitas air minum memenuhi syarat	
				11 Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkulosis	- Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan		- Persentase sarana air minum yang memenuhi syarat	
				12 Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodefecie ncy virus)	- jumlah warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodefecie ncy virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan		- Cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga	Prioritas Tahun 2027	SPM	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Program	Indikator Program	Perangkat Daerah
							- Cakupan bayi baru lahir yang mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD)	
							- Cakupan Bayi Usia Kurang 6 Bulan Mendapat ASI Eksklusif	
							- Cakupan imunisasi di usia sekolah dasar	
							- Cakupan Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang Mendapat Makanan Tambahan	
							- Cakupan Ibu Hamil yang Mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) Minimal 90 Tablet Selama Masa Kehamilan	
							- Cakupan ibu nifas mendapat kapsul Vitamin A	
							- Cakupan kepesertaan JKN	
							- Cakupan kepesertaan JKN Aktif	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga	Prioritas Tahun 2027	SPM	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Program	Indikator Program	Perangkat Daerah
							- Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	
							- Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	
							- Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin	
							- Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil	
							- Cakupan Pelayanan kesehatan Ibu Nifas (KF3)	
							- Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia	
							- Persentase lanjut usia yang mandiri	
							- Persentase Depresi yang mendapatkan layanan	
							- Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga	Prioritas Tahun 2027	SPM	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Program	Indikator Program	Perangkat Daerah
							- Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TB	
							- Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	
							- Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	
							- Prevalensi Obesitas > 18 tahun	
							- Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	
							- Persentase merokok penduduk 10-21 tahun	
							- Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	
							- Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	
							- Cakupan pembinaan	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga	Prioritas Tahun 2027	SPM	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Program	Indikator Program	Perangkat Daerah
							remaja di sekolah	
							- Cakupan Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional	
							- Cakupan Puskesmas yang melaksanakan Perkesmas	
							- Cakupan Remaja Putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)	
							- Persentase Puskesmas dengan Tempat Fasilitas Umum (TFU) memenuhi syarat	
							- Deteksi Dini Triple Eliminasi Ibu Hamil	
							- Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	
							- Incident Rate DBD per 100.000 penduduk	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga	Prioritas Tahun 2027	SPM	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Program	Indikator Program	Perangkat Daerah
							- Kasus HIV/ AIDS baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV	
							- Nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan Dinas Kesehatan	
							- Presentase penduduk dengan aktivitas fisik cukup	
							- Persentase tempat kerja formal yang melaksanakan kesehatan kerja	
							- Persentase tempat kerja informal yang melaksanakan kesehatan kerja	
							- Penemuan kasus AFP (Acute Flaccid Paralysis)	
							- Persentase Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (Berat Badan kurang dari 2500 gram)	
							- Persentase Ibu hamil KEK	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga	Prioritas Tahun 2027	SPM	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Program	Indikator Program	Perangkat Daerah
							- Persentase Ibu Hamil yang Anemia	
							- Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	
							- Proporsi jamaah haji Kota Salatiga yang mendapat pemeriksaaan dan pembinaan kesehatan sesuai standar	
							- Persentase Pustu, Puskesmas, dan RSUD yang memenuhi standar Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan (SPA) dan Sumber Daya Manusia Kesehatan	
							- Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga	Prioritas Tahun 2027	SPM	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Program	Indikator Program	Perangkat Daerah
							kesehatan sesuai standar	
							- Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	
							- Tertanganinya KLB/Bencana dalam 1 x 24 jam	
							- Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi	
	- Terwujudnya transformasi sosial dan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan	PD6. Meningkatkan investasi dalam mendukung kapasitas produksi daerah didukung peningkatan kondisi iklim investasi yang kondusif dengan pengembangan SDM, teknologi dan promosi potensi	- SPM BIDANG SOSIAL	1 Rehabilitasi sosial ar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	- Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	- PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	- Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni korban bencana atau relokasi kabupaten/kota	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga	Prioritas Tahun 2027	SPM	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Program	Indikator Program	Perangkat Daerah
		daerah secara masif						
		PD7. Meningkatkan kapasitas tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri dan pasar kerja		2 Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	- Jumlah Anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti		- Persentase fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	
		PD8. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perdagangan dan mendorong digitalisasi serta kemitraan/kolaborasi antara pedagang dan UMKM untuk		3 Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	- Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga	Prioritas Tahun 2027	SPM	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Program	Indikator Program	Perangkat Daerah
		menghasilkan produk kualitas ekspor						
		PD.9 Mengembangkan infrastruktur industri yang memadai, penyediaan wilayah peruntukan industri yang terintegrasi, peningkatan inovasi dengan memberikan insentif untuk adopsi teknologi terbaru dalam proses produksi		4 Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	- Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga	Prioritas Tahun 2027	SPM	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Program	Indikator Program	Perangkat Daerah
		PD10 Meningkatkan cakupan perlindungan, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan ekonomi PPKS		5 Perlindungan dan jaminan sosial pada tanggap saat bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota	- Jumlah Warga Negara korban bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota	- PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	- Presentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	- Dinas Sosial
		PD11. Mengembangkan ketahanan pangan berbasis komunitas, pengembangan urban farming, memperluas kerjasama antara petani, pedagang, dan konsumen untuk menciptakan sistem pangan yang lebih efisien dan berkelanjutan					- Presentase lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga	Prioritas Tahun 2027	SPM	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Program	Indikator Program	Perangkat Daerah
		PD12 Meningkatkan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat					- Presentase gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	
	- Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan berbasis digital	PD13 Penguatan kerukunan sosial, agama, ras maupun kelompok masyarakat melalui peningkatan pendidikan politik dan wawasan kebangsaan dalam berbagai kegiatan guna meningkatkan cinta tanah air, nilai-nilai toleransi dan saling menghormati dalam pendidikan dan kehidupan sehari-hari	- SPM BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1 Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	- Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten/Kota	- PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	- Persentase Penegakan Perda dan Per Ka Da (Prosentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada)	- Satuan Polisi Pamong Praja
							- Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (prosentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran)	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga	Prioritas Tahun 2027	SPM	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Program	Indikator Program	Perangkat Daerah
		PD14. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, pengembangan aset produktif dan mengembangkan sumber pendapatan daerah yang memiliki potensi jangka panjang		2 Pelayanan informasi rawan bencana	- Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	- PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	- Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana)	- Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		PD15. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan pengembangan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat		3 Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	- Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		- Persentase Cakupan Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana (Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana)	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga	Prioritas Tahun 2027	SPM	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Program	Indikator Program	Perangkat Daerah
		PD16. Perluasan jaringan internet broadband dan penyediaan akses WiFi publik di fasilitas layanan umum		4 Pelayanan enyelamatan danevakuasi korban bencana	- Jumlah Warga Negara yang Memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana			
		PD17. Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana pelayanan serta jangkauan layanan kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat		5 Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	- Jumlah Warga Negara yang Memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	- PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	- Presentase ketersediaan Sarana Prasarana Damkar yang memadai	- Satuan Polisi Pamong Praja
		PD18. Meningkatkan peran kelembagaan ditingkat kecamatan dan kelurahan (PKK, LPMK dll) dalam pelaksanaan pemberdayaan, monitoring dan evaluasi pembangunan terutama						

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga	Prioritas Tahun 2027	SPM	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Program	Indikator Program	Perangkat Daerah
		dalam mendukung tercapainya kecamatan berdaya						
		PD19. Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang efektif dan efisien						
		PD21. Mengembangkan riset dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang mampu meningkatkan daya saing dan						

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga	Prioritas Tahun 2027	SPM	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Program	Indikator Program	Perangkat Daerah
		kesejahteraan masyarakat						
	- Meningkatnya kualitas infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	PD20 Meningkatkan pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan secara konsisten yang didukung dengan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat	- SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1 Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	- Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	- PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	- Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				2 Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	- Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	- PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	- Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		PD12 Meningkatkan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat	SPM BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1 Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	- Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	- PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	- Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni korban bencana atau relokasi kabupaten/kota	- Dinas Perkim

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga	Prioritas Tahun 2027	SPM	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Program	Indikator Program	Perangkat Daerah
				2 Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota	- Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang lauyak huni		- Persentase fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4.4.5 Penanggulangan Kemiskinan

Tabel 4. 19 Sasaran dan Prioritas dalam Mendukung Penanggulangan Kemiskinan

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga	Prioritas Tahun 2027	Strategi	Program	Indikator Program	Perangkat Daerah
Mewujudkan Kota Salatiga yang bergerak, Energi, Dinamis dan Adaptif menuju Salatiga Mendunia	- Meningkatnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan unggul	PD1 Mengembangkan pembelajaran inklusif pada setiap sekolah untuk menjamin pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dan memberikan kesetaraan	- Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan - Pengurangan beban pengeluaran masyarakat	- PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	- Angka Partisipasi Sekolah PAUD (Tingkat parsipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD) - Angka Partisipasi Sekolah SD/MI (Tingkat partisipasi warga negara usia 7–12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar) - Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs (Tingkat partisipasi warga negara usia 13–15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama) - Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Kesetaraan (Tingkat partisipasi warga negara usia 7–18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan) - Angka Putus Sekolah SD/MI - Angka Putus Sekolah SMP/MTs	- Dinas Pendidikan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga	Prioritas Tahun 2027	Strategi	Program	Indikator Program		Perangkat Daerah
					-	Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik SD/MI	
					-	Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik SMP/MTs	
					-	Persentase sekolah TK yang memenuhi standar Holistik Integratif dengan kategori sedang	
					-	Persentase Kondisi Kelas PAUD dalam Kondisi Baik	
					-	Kondisi Sarpras Pendidikan Kesetaraan baik	
					-	Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	
					-	Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	
					-	Rata-rata kemampuan literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	
					-	Rata-rata kemampuan numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	
					-	Iklim Kebhinekaan SD	
					-	Iklim Kebhinekaan SMP	
					-	Iklim Keamanan SD	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga	Prioritas Tahun 2027		Strategi		Program		Indikator Program		Perangkat Daerah	
								-	Iklim Keamanan SMP		
								-	Iklim Inklusivitas SD		
								-	Iklim Inklusivitas SMP		
		PD2	Meningkatkan kualitas pengelolaan perpustakaan dan naskah kuno serta pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan di Kota Salatiga	-	Peningkatan pendapatan masyarakat	-	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	-	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	-	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		PD3	Meningkatkan pengetahuan kesehatan masyarakat untuk mendukung promotif dan preventif terutama dalam edukasi gaya hidup sehat, kesehatan mental, pencegahan penyakit menular dan tidak menular	-	Pengurangan beban pengeluaran masyarakat	-	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	Angka Kematian balita (AKABA)	-	Dinas Kesehatan
		PD4	Meningkatkan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat secara keseluruhan					-	Capaian penemuan kasus TB (Notifikasi kasus TB)		
								-	Prosentase pasien TBC yang memulai pengobatan (Enrrollment TBC)		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga	Prioritas Tahun 2027	Strategi	Program	Indikator Program	Perangkat Daerah
					- Cakupan pemberian terapi pencegahan pada orang kontak serumah	
					- Annual Parasite Incidence (API) per 1.000 penduduk	
					- Jumlah Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	
					- Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan KKS (SK Forkom kec, SK Pokja Kel, Sekretariat, Rencana Kegiatan, Anggaran)	
					- Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan pengawasan kualitas udara dalam ruang memenuhi syarat	
					- Persentase Puskesmas Yang memfasilitasi Kelurahan Sehat Iklim	
					- Persentase rumah tangga dengan kualitas air minum memenuhi syarat	
					- Persentase sarana air minum yang memenuhi syarat	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga	Prioritas Tahun 2027	Strategi	Program	Indikator Program	Perangkat Daerah
					- Cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan	
					- Cakupan bayi baru lahir yang mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD)	
					- Cakupan Bayi Usia Kurang 6 Bulan Mendapat ASI Eksklusif	
					- Cakupan imunisasi di usia sekolah dasar	
					- Cakupan Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang Mendapat Makanan Tambahan	
					- Cakupan Ibu Hamil yang Mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) Minimal 90 Tablet Selama Masa Kehamilan	
					- Cakupan ibu nifas mendapat kapsul Vitamin A	
					- Cakupan kepesertaan JKN	
					- Cakupan kepesertaan JKN Aktif	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga	Prioritas Tahun 2027	Strategi	Program	Indikator Program	Perangkat Daerah
					- Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	
					- Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	
					- Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin	
					- Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil	
					- Cakupan Pelayanan kesehatan Ibu Nifas (KF3)	
					- Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia	
					- Persentase lanjut usia yang mandiri	
					- Persentase Depresi yang mendapatkan layanan	
					- Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	
					- Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TB	
					- Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga	Prioritas Tahun 2027	Strategi	Program	Indikator Program	Perangkat Daerah
					- Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	
					- Prevalensi Obesitas > 18 tahun	
					- Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	
					- Persentase merokok penduduk 10-21 tahun	
					- Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	
					- Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	
					- Cakupan pembinaan remaja di sekolah	
					- Cakupan Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional	
					- Cakupan Puskesmas yang melaksanakan Perkesmas	
					- Cakupan Remaja Putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga	Prioritas Tahun 2027	Strategi	Program	Indikator Program	Perangkat Daerah
					- Persentase Puskesmas dengan Tempat Fasilitas Umum (TFU) memenuhi syarat	
					- Deteksi Dini Triple Eliminasi Ibu Hamil	
					- Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	
					- Incident Rate DBD per 100.000 penduduk	
					- Kasus HIV/ AIDS baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV	
					- Nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan Dinas Kesehatan	
					- Presentase penduduk dengan aktivitas fisik cukup	
					- Persentase tempat kerja formal yang melaksanakan kesehatan kerja	
					- Persentase tempat kerja informal yang melaksanakan kesehatan kerja	
					- Penemuan kasus AFP (Acute Flaccid Paralysis)	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga	Prioritas Tahun 2027	Strategi	Program	Indikator Program	Perangkat Daerah
					- Persentase Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (Berat Badan kurang dari 2500 gram)	
					- Persentase Ibu hamil KEK	
					- Persentase Ibu Hamil yang Anemia	
					- Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	
					- Proporsi jamaah haji Kota Salatiga yang mendapat pemeriksaaan dan pembinaan kesehatan sesuai standar	
					- Persentase Pustu, Puskesmas, dan RSUD yang memenuhi standar Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan (SPA) dan Sumber Daya Manusia Kesehatan	
					- Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga	Prioritas Tahun 2027	Strategi	Program	Indikator Program	Perangkat Daerah
					- Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	
					- Tertanganinya KLB/Bencana dalam 1 x 24 jam	
					- Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi	
		PD5 Mengembangkan infrastruktur dan fasilitas pendukung olahraga yang terjangkau dan lebih mudah diakses masyarakat				
	- Meningkatnya kualitas infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	PD20 Meningkatkan pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan secara konsisten yang didukung dengan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat	- Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan	- PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	- Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
				- PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	- Presentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/ kota yang ditangani	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga		Prioritas Tahun 2027		Strategi		Program		Indikator Program		Perangkat Daerah	
							-	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	-	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni korban bencana atau relokasi kabupaten/kota		
									-	Persentase fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota		
			PD5	Mengembangkan infrastruktur dan fasilitas pendukung olahraga yang terjangkau dan lebih mudah diakses masyarakat	-	Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan	-	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	-	Rasio konektivitas kabupaten/kota	-	Dinas Perhubungan
									-	Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Kabupaten/Kota		
									-	Rasio Kinerja Lalu Lintas (VCR)		
			PD9	Mengembangkan infrastruktur industri yang memadai, penyediaan wilayah peruntukan industri yang terintegrasi, peningkatan inovasi dengan memberikan insentif untuk adopsi teknologi terbaru	-	Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan	-	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	-	Persentase pelaksanaan proses transmigrasi	-	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga		Prioritas Tahun 2027		Strategi		Program		Indikator Program		Perangkat Daerah	
				dalam proses produksi	-	Pengurangan beban pengeluaran masyarakat	-	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	-	Persentase Tenaga Kerja yang terlatih		
							-	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	-	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)		
					-	Peningkatan pendapatan masyarakat	-	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	-	Prosentase UMKM yang mengakses pembiayaan	-	Dinas Koperasi dan UKM
	-	Terwujudnya transformasi sosial dan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan	PD10	Meningkatkan cakupan perlindungan, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan ekonomi PPKS	-	Pengurangan beban pengeluaran masyarakat	-	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	-	Presentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	-	Dinas Sosial
			PD12	Meningkatkan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat					-	Presentase lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga		Prioritas Tahun 2027		Strategi		Program		Indikator Program		Perangkat Daerah	
			PD9	Mengembangkan infrastruktur industri yang memadai, penyediaan wilayah peruntukan industri yang terintegrasi, peningkatan inovasi dengan memberikan insentif untuk adopsi teknologi terbaru dalam proses produksi					-	Presentase gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti		
									-	Presentase penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti		
							-	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	-	Persentase Data Fakir Miskin yang divalidasi		
							-	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	-	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan sosial yang Meningkat Kulaitasnya dalam pelayanan sosial		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga		Prioritas Tahun 2027		Strategi		Program		Indikator Program		Perangkat Daerah	
			PD11	Mengembangkan ketahanan pangan berbasis komunitas, pengembangan urban farming, memperluas kerjasama antara petani, pedagang, dan konsumen untuk menciptakan sistem pangan yang lebih efisien dan berkelanjutan	-	Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan	-	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	-	Presentase Peningkatan Indeks ketahanan Pangan	-	Dinas Pangan dan Pertanian
			PD6	Meningkatkan investasi dalam mendukung kapasitas produksi daerah didukung peningkatan kondisi iklim investasi yang kondusif dengan pengembangan SDM, teknologi dan promosi potensi daerah secara masif	-	Pengurangan beban pengeluaran masyarakat	-	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	-	Rasio jumlah cadangan beras pemerintah daerah (CBPD) terhadap target jumlah CBPD berdasarkan Perbadan 15/2023		
			PD8	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perdagangan dan mendorong digitalisasi serta kemitraan/kolaborasi antara pedagang dan UMKM untuk menghasilkan produk kualitas ekspor	-	Peningkatan pendapatan masyarakat						

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga		Prioritas Tahun 2027		Strategi		Program		Indikator Program		Perangkat Daerah	
			PD7.	Meningkatkan kapasitas tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri dan pasar kerja			-	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	-	Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan		
									-	Persentase Kelompok Pembudidaya Ikan yang telah menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)		
									-	Produksi perikanan budidaya		
							-	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	-	Pemenuhan kebutuhan sarana pertanian		
									-	Produtivitas tanaman pangan (Padi dan Jagung)		
							-	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	-	Persentase Cakupan Bina Kelompok Tani		
									-	Pemula		
									-	Lanjut		
									-	Madya		
									-	Utama		
							-	PROGRAM PENGOLAHAN	-	Cakupan bina kelompok pengolah dan pemasar ikan		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga	Prioritas Tahun 2027	Strategi	Program	Indikator Program	Perangkat Daerah
				DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	- Persentase kelompok pengolah dan pemasar ikan yang telah menerapkan Cara Budidaya ikan yang Baik (CBIB)	
				- PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	- Pemenuhan kebutuhan prasarana pertanian	
				- PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	- Persentase penanganan bencana pertanian	
				- PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	- Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga	Prioritas Tahun 2027	Strategi	Program	Indikator Program	Perangkat Daerah
			- Pengurangan beban pengeluaran masyarakat	- PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	- Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD)	- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			- Peningkatan pendapatan masyarakat		- Cakupan Balita/ Anak dengan Tumbuh Kembang sesuai dengan Kartu Kembang Anak (KKA)	
					- Cakupan Kader BKB yang Terlatih	
					- Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber-KB	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga	Prioritas Tahun 2027	Strategi	Program	Indikator Program	Perangkat Daerah
					- Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	
					- Indeks Lansia Berdaya	
					- Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja	
				- PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	- Persentase Perangkat Daerah yang berkontribusi dalam sistem data gender dan anak	
			- Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan	- PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	- Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				- PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	- Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga		Prioritas Tahun 2027		Strategi		Program		Indikator Program		Perangkat Daerah	
							-	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	-	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota		
					-	Peningkatan pendapatan masyarakat	-	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	-	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	-	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			PD13	Penguatan kerukunan sosial, agama, ras maupun kelompok masyarakat melalui peningkatan pendidikan politik dan wawasan kebangsaan dalam berbagai kegiatan guna meningkatkan cinta tanah air, nilai-nilai toleransi dan saling menghormati dalam pendidikan dan kehidupan sehari-hari							
	-	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan berbasis digital	PD15.	Meningkatkan kualitas kelembagaan dan pengembangan kebijakan yang responsif terhadap	-	Pengurangan beban pengeluaran masyarakat	-	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	-	Perekaman KTP-Elektronik	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
									-	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga		Prioritas Tahun 2027		Strategi		Program		Indikator Program		Perangkat Daerah	
				kebutuhan masyarakat			-	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	-	Persentase PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama		
			PD17.	Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana pelayanan serta jangkauan layanan kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat	-	Pengurangan beban pengeluaran masyarakat	-	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	-	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana)	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			PD18.	Meningkatkan peran kelembagaan ditingkat kecamatan dan kelurahan (PKK, LPMK dll) dalam pelaksanaan pemberdayaan, monitoring dan evaluasi pembangunan terutama dalam mendukung					-	Persentase Cakupan Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana (Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana)		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga	Prioritas Tahun 2027	Strategi	Program	Indikator Program	Perangkat Daerah
		tercapainya kecamatan berdaya			- Persentase Cakupan Layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana)	
		PD14 Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, pengembangan aset produktif dan mengembangkan sumber pendapatan daerah yang memiliki potensi jangka panjang				
		PD16 Perluasan jaringan internet broadband dan penyediaan akses WiFi publik di fasilitas layanan umum				
		PD19 Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang efektif dan efisien				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga		Prioritas Tahun 2027		Strategi		Program		Indikator Program		Perangkat Daerah	
			PD21	Mengembangkan riset dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang mampu meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat								

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4.4.6 Percepatan Penurunan Stunting

Tabel 4. 20. Sasaran dan Prioritas dalam Mendukung Percepatan Penurunan Stunting

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga		Prioritas Tahun 2027		Program		Indikator Program		Perangkat Daerah	
Mewujudkan Kota Salatiga yang bergerak, Energi, Dinamis dan Adaptif menuju Salatiga Mendunia	-	Meningkatnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan unggul	PD1	Mengembangkan pembelajaran inklusif pada setiap sekolah untuk menjamin pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dan memberikan kesetaraan	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	-	Dinas Pendidikan
			PD2.	Meningkatkan kualitas pengelolaan perpustakaan dan naskah kuno serta pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan di Kota Salatiga			-	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah		
							-	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
					-	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	Angka Partisipasi Sekolah PAUD (Tingkat parsipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD)		
							-	Angka Partisipasi Sekolah SD/MI (Tingkat partisipasi warga negara usia 7–12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar)		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga		Prioritas Tahun 2027		Program		Indikator Program		Perangkat Daerah	
							-	Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs (Tingkat partisipasi warga negara usia 13–15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama)		
							-	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Kesetaraan (Tingkat partisipasi warga negara usia 7–18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan)		
							-	Angka Putus Sekolah SD/MI		
							-	Angka Putus Sekolah SMP/MTs		
							-	Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik SD/MI		
							-	Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik SMP/MTs		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga		Prioritas Tahun 2027		Program		Indikator Program		Perangkat Daerah	
							-	Persentase sekolah TK yang memenuhi standar Holistik Integratif dengan kategori sedang		
							-	Persentase Kondisi Kelas PAUD dalam Kondisi Baik		
							-	Kondisi Sarpras Pendidikan Kesetaraan baik		
							-	Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional		
							-	Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional		
							-	Rata-rata kemampuan literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional		
							-	Rata-rata kemampuan numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional		
							-	Iklim Kebhinekaan SD		
							-	Iklim Kebhinekaan SMP		
							-	Iklim Keamanan SD		
							-	Iklim Keamanan SMP		
							-	Iklim Inklusivitas SD		
							-	Iklim Inklusivitas SMP		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga		Prioritas Tahun 2027		Program		Indikator Program		Perangkat Daerah	
			PD3	Meningkatkan pengetahuan kesehatan masyarakat untuk mendukung promotif dan preventif terutama dalam edukasi gaya hidup sehat, kesehatan mental, pencegahan penyakit menular dan tidak menular	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	-	Dinas Kesehatan
			PD4	Meningkatkan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat secara keseluruhan			-	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
							-	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah		
					-	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	Angka Kematian balita (AKABA)		
							-	Capaian penemuan kasus TB (Notifikasi kasus TB)		
							-	Prosentase pasien TBC yang memulai pengobatan (Enrrollment TBC)		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga		Prioritas Tahun 2027		Program		Indikator Program		Perangkat Daerah	
							-	Cakupan pemberian terapi pencegahan pada orang kontak serumah		
							-	Annual Parasite Incidence (API) per 1.000 penduduk		
							-	Jumlah Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat		
							-	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan KKS (SK Forkom kec, SK Pokja Kel, Sekretariat, Rencana Kegiatan, Anggaran)		
							-	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan pengawasan kualitas udara dalam ruang memenuhi syarat		
							-	Persentase Puskesmas Yang memfasilitasi Kelurahan Sehat Iklim		
							-	Persentase rumah tangga dengan kualitas air minum memenuhi syarat		
							-	Persentase sarana air minum yang memenuhi syarat		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga		Prioritas Tahun 2027		Program		Indikator Program		Perangkat Daerah	
							-	Cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan		
							-	Cakupan bayi baru lahir yang mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD)		
							-	Cakupan Bayi Usia Kurang 6 Bulan Mendapat ASI Eksklusif		
							-	Cakupan imunisasi di usia sekolah dasar		
							-	Cakupan Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang Mendapat Makanan Tambahan		
							-	Cakupan Ibu Hamil yang Mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) Minimal 90 Tablet Selama Masa Kehamilan		
							-	Cakupan ibu nifas mendapat kapsul Vitamin A		
							-	Cakupan kepesertaan JKN		
							-	Cakupan kepesertaan JKN Aktif		
							-	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga		Prioritas Tahun 2027		Program		Indikator Program		Perangkat Daerah	
							-	Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir		
							-	Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin		
							-	Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil		
							-	Cakupan Pelayanan kesehatan Ibu Nifas (KF3)		
							-	Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia		
							-	Persentase lanjut usia yang mandiri		
							-	Persentase Depresi yang mendapatkan layanan		
							-	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV		
							-	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TB		
							-	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		
							-	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga		Prioritas Tahun 2027		Program		Indikator Program		Perangkat Daerah	
							-	Prevalensi Obesitas > 18 tahun		
							-	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis		
							-	Persentase merokok penduduk 10-21 tahun		
							-	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		
							-	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		
							-	Cakupan pembinaan remaja di sekolah		
							-	Cakupan Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional		
							-	Cakupan Puskesmas yang melaksanakan Perkesmas		
							-	Cakupan Remaja Putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)		
							-	Persentase Puskesmas dengan Tempat Fasilitas Umum (TFU) memenuhi syarat		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga		Prioritas Tahun 2027		Program		Indikator Program		Perangkat Daerah	
							-	Deteksi Dini Triple Eliminasi Ibu Hamil		
							-	Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)		
							-	Incident Rate DBD per 100.000 penduduk		
							-	Kasus HIV/ AIDS baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV		
							-	Nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan Dinas Kesehatan		
							-	Presentase penduduk dengan aktivitas fisik cukup		
							-	Persentase tempat kerja formal yang melaksanakan kesehatan kerja		
							-	Persentase tempat kerja informal yang melaksanakan kesehatan kerja		
							-	Penemuan kasus AFP (Acute Flaccid Paralysis)		
							-	Persentase Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (Berat Badan kurang dari 2500 gram)		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga		Prioritas Tahun 2027		Program		Indikator Program		Perangkat Daerah	
							-	Persentase Ibu hamil KEK		
							-	Persentase Ibu Hamil yang Anemia		
							-	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional		
							-	Proporsi jamaah haji Kota Salatiga yang mendapat pemeriksaaan dan pembinaan kesehatan sesuai standar		
							-	Persentase Pustu, Puskesmas, dan RSUD yang memenuhi standar Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan (SPA) dan Sumber Daya Manusia Kesehatan		
							-	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar		
							-	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk		
							-	Tertanganinya KLB/Bencana dalam 1 x 24 jam		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga		Prioritas Tahun 2027		Program		Indikator Program		Perangkat Daerah	
							-	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi		
					-	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	Cakupan desa siaga strata mandiri		
							-	Cakupan PHBS tatanan rumah tangga strata paripurna		
							-	Cakupan PHBS tatanan institusi pendidikan strata paripurna		
							-	Cakupan PHBS tatanan institusi kesehatan sehat		
							-	Cakupan PHBS tatanan tempat kerja sehat		
							-	Cakupan PHBS tatanan tempat umum sehat		
							-	Cakupan sosialisasi dan edukasi Kawasan Tanpa Rokok		
			PD5.	Mengembangkan infrastruktur dan fasilitas pendukung olahraga yang terjangkau dan lebih mudah diakses masyarakat	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	-	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga		Prioritas Tahun 2027		Program		Indikator Program		Perangkat Daerah	
							-	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
							-	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
					-	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	-	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum		
					-	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	-	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman		
	-	Meningkatnya kualitas infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	PD5.	Mengembangkan infrastruktur dan fasilitas pendukung olahraga yang terjangkau dan lebih mudah diakses masyarakat	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	-	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga		Prioritas Tahun 2027		Program		Indikator Program		Perangkat Daerah	
			PD.9	Mengembangkan infrastruktur industri yang memadai, penyediaan wilayah peruntukan industri yang terintegrasi, peningkatan inovasi dengan memberikan insentif untuk adopsi teknologi terbaru dalam proses produksi			-	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah		
			PD20.	Meningkatkan pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan secara konsisten yang didukung dengan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat			-	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
					-	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	-	Presentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/ kota yang ditangani		
					-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	-	Satuan Polisi Pamong Praja

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga		Prioritas Tahun 2027		Program		Indikator Program		Perangkat Daerah	
							-	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah		
							-	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
					-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	Prosentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
							-	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah		
							-	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
					-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	Prosentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	-	Dinas Sosial
							-	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah		
							-	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga		Prioritas Tahun 2027		Program		Indikator Program		Perangkat Daerah	
					-	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan sosial yang Meningkat Kulaitasnya dalam pelayanan sosial		
					-	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	-	Presentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti		
							-	Presentase lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti		
							-	Presentase gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti		
							-	Presentase penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga		Prioritas Tahun 2027		Program		Indikator Program		Perangkat Daerah	
					-	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	-	Persentase Data Fakir Miskin yang divalidasi		
					-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	-	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
							-	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah		
							-	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
					-	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	-	Persentese OPD yang mengintegrasikan dokumen GDPK 5 pilar ke dalam dokumen Perencanaan daerah		
							-	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga		Prioritas Tahun 2027		Program		Indikator Program		Perangkat Daerah	
							-	Cakupan PUS yang istrinya di bawah 20 tahun		
							-	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)		
					-	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	-	Rasio akseptor KB baru		
							-	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49		
							-	Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmetneed)		
							-	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		
							-	Persentase Modern Contraceptive Prevelance Rate (mCPR)		
							-	Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD)		
							-	Demand Satisfied (Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi)		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga		Prioritas Tahun 2027		Program		Indikator Program		Perangkat Daerah	
					-	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	-	Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD)		
							-	Cakupan Balita/ Anak dengan Tumbuh Kembang sesuai dengan Kartu Kembang Anak (KKA)		
							-	Cakupan Kader BKB yang Terlatih		
							-	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber-KB		
							-	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri		
							-	Indeks Lansia Berdaya		
							-	Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja		
	-	Terwujudnya transformasi sosial dan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan	PD11	Mengembangkan ketahanan pangan berbasis komunitas, pengembangan urban farming, memperluas kerjasama antara petani, pedagang, dan konsumen untuk menciptakan sistem	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	Prosentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	-	Dinas Pangan dan Pertanian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga		Prioritas Tahun 2027		Program		Indikator Program		Perangkat Daerah	
				pangan yang lebih efisien dan berkelanjutan			-	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah		
							-	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
			PD6.	Meningkatkan investasi dalam mendukung kapasitas produksi daerah didukung peningkatan kondisi iklim investasi yang kondusif dengan pengembangan SDM, teknologi dan promosi potensi daerah secara masif	-	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	-	Rasio jumlah cadangan beras pemerintah daerah (CBPD) terhadap target jumlah CBPD berdasarkan Perbadan 15/2023		
					-	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	-	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan		
					-	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	-	Cakupan bina kelompok pengolah dan pemasar ikan		
			PD7.	Meningkatkan kapasitas tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri dan pasar kerja			-	Persentase kelompok pengolah dan pemasar ikan yang telah menerapkan Cara Budidaya ikan yang Baik (CBIB)		
					-	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	-	Persentase Cakupan Bina Kelompok Tani		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga		Prioritas Tahun 2027		Program		Indikator Program		Perangkat Daerah	
							-	Pemula		
							-	Lanjut		
							-	Madya		
							-	Utama		
			PD8.	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perdagangan dan mendorong digitalisasi serta kemitraan/kolaborasi antara pedagang dan UMKM untuk menghasilkan produk kualitas ekspor	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	Prosentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	-	Dinas Lingkungan Hidup
							-	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah		
							-	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
			PD.9	Mengembangkan infrastruktur industri yang memadai, penyediaan wilayah peruntukan industri yang terintegrasi, peningkatan inovasi dengan memberikan insentif untuk adopsi teknologi terbaru dalam proses produksi	-	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	-	Persentase penanganan sampah		
							-	Persentase pengurangan sampah perkotaan		
					-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga		Prioritas Tahun 2027		Program		Indikator Program		Perangkat Daerah	
							-	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah		
			PD10.	Meningkatkan cakupan perlindungan, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan ekonomi PPKS			-	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
			PD12.	Meningkatkan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	Prosentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	-	Dinas Perhubungan
							-	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga		Prioritas Tahun 2027		Program		Indikator Program		Perangkat Daerah	
			PD13.	Penguatan kerukunan sosial, agama, ras maupun kelompok masyarakat melalui peningkatan pendidikan politik dan wawasan kebangsaan dalam berbagai kegiatan guna meningkatkan cinta tanah air, nilai-nilai toleransi dan saling menghormati dalam pendidikan dan kehidupan sehari-hari			-	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
	-	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan berbasis digital	PD16	Perluasan jaringan internet broadband dan penyediaan akses WiFi publik di fasilitas layanan umum	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	Prosentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
							-	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah		
							-	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga		Prioritas Tahun 2027		Program		Indikator Program		Perangkat Daerah	
					-	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	-	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah		
			PD6	Meningkatkan investasi dalam mendukung kapasitas produksi daerah didukung peningkatan kondisi iklim investasi yang kondusif dengan pengembangan SDM, teknologi dan promosi potensi daerah secara masif	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	-	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			PD7	Meningkatkan kapasitas tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri dan pasar kerja			-	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah		
			PD8	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perdagangan dan mendorong digitalisasi serta kemitraan/kolaborasi antara pedagang dan UMKM untuk menghasilkan produk kualitas ekspor			-	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga		Prioritas Tahun 2027		Program		Indikator Program		Perangkat Daerah	
					-	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	-	Persentase Koperasi Aktif		
					-	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	-	Prosentase usaha mikro yang mendapatkan legalitas usaha		
					-	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	-	Prosentase UMKM yang mengakses pembiayaan		
			PD6	Meningkatkan investasi dalam mendukung kapasitas produksi daerah didukung peningkatan kondisi iklim investasi yang kondusif dengan pengembangan SDM, teknologi dan promosi potensi daerah secara masif	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	Prosentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
							-	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah		
							-	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
					-	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	-	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga		Prioritas Tahun 2027		Program		Indikator Program		Perangkat Daerah	
					-	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	-	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha		
			PD5	Mengembangkan infrastruktur dan fasilitas pendukung olahraga yang terjangkau dan lebih mudah diakses masyarakat	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
							-	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah		
							-	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
			PD2	Meningkatkan kualitas pengelolaan perpustakaan dan naskah kuno serta pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan di Kota Salatiga	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	-	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
							-	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah		
							-	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga		Prioritas Tahun 2027		Program		Indikator Program		Perangkat Daerah	
			PD2	Meningkatkan kualitas pengelolaan perpustakaan dan naskah kuno serta pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan di Kota Salatiga	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
							-	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah		
							-	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
			PD8	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perdagangan dan mendorong digitalisasi serta kemitraan/kolaborasi antara pedagang dan UMKM untuk menghasilkan produk kualitas ekspor	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	-	Dinas Perdagangan
							-	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah		
							-	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
			PD9	Mengembangkan infrastruktur industri yang memadai, penyediaan wilayah peruntukan industri yang terintegrasi, peningkatan inovasi dengan memberikan insentif untuk	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	-	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga		Prioritas Tahun 2027		Program		Indikator Program		Perangkat Daerah	
				adopsi teknologi terbaru dalam proses produksi			-	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah		
							-	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
					-	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	-	Persentase industri Kota Salatiga yang berkembang		
			PD15	Meningkatkan kualitas kelembagaan dan pengembangan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	-	Sekretariat Daerah
							-	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah		
							-	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
					-	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	Cakupan Koordinasi Administrasi Pemerintahan		
							-	Cakupan Koordinasi Bidang Administrasi Kewilayahan		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga		Prioritas Tahun 2027		Program		Indikator Program		Perangkat Daerah	
							-	Cakupan Fasilitasi Kerjasama Daerah		
							-	Ketepatan waktu penyampaian LKPJ (30 maret)		
							-	Prosentase Pelaksanaan Kebijakan Bidang Hukum		
							-	Prosentase Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat		
			PD19	Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang efektif dan efisien	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	-	Sekretariat DPRD
							-	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah		
							-	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
			PD14	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, pengembangan aset produktif dan mengembangkan sumber pendapatan daerah yang memiliki potensi jangka panjang	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	-	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga		Prioritas Tahun 2027		Program		Indikator Program		Perangkat Daerah	
			PD21	Mengembangkan riset dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang mampu meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat			-	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah		
							-	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
					-	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	-	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah		
							-	Indeks Manajemen Risiko		
					-	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	Penjabaran Konsistensi kegiatan RENSTRA ke dalam RENJA Bidang Perencanaan Kesra		
							-	Penjabaran Konsistensi kegiatan RENSTRA ke dalam RENJA Bidang Perencanaan Ekbang		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga		Prioritas Tahun 2027		Program		Indikator Program		Perangkat Daerah	
			PD14	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, pengembangan aset produktif dan mengembangkan sumber pendapatan daerah yang memiliki potensi jangka panjang	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
							-	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah		
							-	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
					-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	-	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
							-	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah		
							-	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
					-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	-	Inspektorat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga		Prioritas Tahun 2027		Program		Indikator Program		Perangkat Daerah	
							-	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah		
							-	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
			PD18	Meningkatkan peran kelembagaan ditingkat kecamatan dan kelurahan (PKK, LPMK dll) dalam pelaksanaan pemberdayaan, monitoring dan evaluasi pembangunan terutama dalam mendukung tercapainya kecamatan berdaya	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	-	Kecamatan Argomulyo
							-	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah		
							-	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
					-	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	Persentase penyampaian SPPT PBB pada WP		
					-	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangkel		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga		Prioritas Tahun 2027		Program		Indikator Program		Perangkat Daerah	
					-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan		Kecamatan Sidomukti
							-	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah		
							-	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
					-	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	Persentase penyampaian SPPT PBB pada WP		
					-	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangkel		
					-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	-	Kecamatan Sidorejo
							-	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah		
							-	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga		Prioritas Tahun 2027		Program		Indikator Program		Perangkat Daerah	
					-	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	Persentase penyampaian SPPT PBB pada WP		
					-	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangkel		
					-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	-	Kecamatan Tingkir
							-	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah		
							-	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
					-	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	Persentase penyampaian SPPT PBB pada WP		
					-	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangkel		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga		Prioritas Tahun 2027		Program		Indikator Program		Perangkat Daerah	
					-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
							-	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah		
							-	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4.5 Pemanfaatan Kelitbangan dalam Pencapaian Prirotitas Pembangunan dukungan Program Unggulan Wali Kota

Pemanfaatan kelitbangan menjadi salah satu pertimbangan awal dalam menentukan kebijakan dalam perencanaan pembangunan, serta penyusunan dokumen kelitbangan juga mengacu pada kebijakan nasional sebagai salah satu landasan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Hasil-hasil kelitbangan yang telah disusun Bappeda maupun Perangkat Daerah menjadi dasar dalam pencapaian program unggulan Wali Kota Salatiga.

Tabel 4. 21. Rekomendasi Perencanaan dalam Pencapaian Program Unggulan Wali Kota

Program Unggulan Wali Kota	Kajian yang relevan	Rekomendasi dalam Perencanaan
SALATIGA CERDAS : Meningkatkan kualitas sarana prasarana, tenaga pendidik, dan bahan ajar pendidikan dasar dan menengah menuju Pendidikan Salatiga Standar Internasional Mengembangkan pendidikan dan pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri (Bahasa Inggris, Bahasa Arab dan Bahasa Cina). Menyediakan bantuan pembiayaan pada lembaga Pendidikan non formal (kursus, Bimbingan belajar, BLK, PKBM) untuk menyediakan pembelajaran kewirausahaan berorientasi global		
SEHATI : Salatiga Sehat dan Terlindungi Layanan pendampingan tenaga medis di saat khamilan, kelahiran dan nifas. Layanan Kesehatan Ibu bebas Anemia dan Terpenuhi Nutrisi Layanan Jaminan Kesehatan bayi periode 1000 HPK menuju Salatiga Zerro stunting Pembiayaan Jaminan Kesehatan Daerah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Meningkatkan fasilitas Kesehatan dan Menyiapkan Tenaga Medis Profesional untuk RSUD berstandar Internasional		
KOMIK : Kolaborasi Milenial Kreatif Pengembangan ruang ekspresi gaya hidup positif, seni dan budaya bagi Gen-Z, pemuda dan pelaku seni	a) Kajian Dampak Sosial Ekonomi Program KOMIK (Kolaborasi Milenial Kreatif) dan Program Sekar (Salatiga Berkarya)	a) Pemetaan peran stakeholder dalam kerjasama hexahelix sesuai dengan roadmap; dan kerjasama hexalix yang dikuatkan dalam bentuk formal

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Program Unggulan Wali Kota	Kajian yang relevan	Rekomendasi dalam Perencanaan
	b) Studi Kelayakan Creative Hub untuk Transformasi Gedung Non-Aktif menjadi Ruang Kerja Kolaboratif	b) Pemanfaatan aset GPD menjadi *creative hub* dan pengembangannya (seni budaya, *digital creative, co working space*, UMKM)
SEKAR : Salatiga Berkarya Optimalisasi aset Pemerintah Kota Salatiga dan revitalisasi BUMD menjadi lebih produktif berkolaborasi dengan investasi swasta Pengembangan ekonomi kreatif dengan mengutamakan komoditas unggulan lokal melalui pendampingan UMKM pemberdayaan kewirausahaan melalui akses pendanaan dan pengembangan UMKM	a) Kajian Dampak Sosial Ekonomi Program KOMIK (Kolaborasi Milenial Kreatif) dan Program Sekar (Salatiga Berkarya) b) Studi Kelayakan Revitalisasi Pasar Untuk Modernisasi Pusat Ekonomi Rakyat c) Potensi Ekonomi Sirkular	a) Pemetaan peran stakeholder dalam kerjasama hexahelix sesuai dengan roadmap; dan kerjasama hexalix yang dikuatkan dalam bentuk formal b) Memberikan rekomendasi OPD dalam melaksanakan revitalisasi pasar tematik di Kota Salatiga c) Regulasi, sosial, manajemen pemasaran, sarana prasarana
JARKOM MABAR : Jaringan Komunikasi dan Anak Muda Berwiraswasta		
SI AKAS : Salatiga Akuntabel, Kolaboratif, Adaptif dan Sigap Memperkuat Satu Data Salatiga sebagai rujukan terpadu dalam satu portal dan dapat diakses oleh semua, untuk menciptakan transparansi tata kelola pemerintahan Kota Salatiga Memperkuat digitalisasi pelayanan kependudukan, catatan sipil dan Perijinan UMKM agar tuntas di tingkat kecamatan. Membangun sistem pengaduan pelayanan publik terpadu sampai tingkat RT (Rukun Tetangga), Melalui Aplikasi Android dan memberikan jaminan respon cepat dalam hari yang sama		
SARI : Salatiga Lestari Revitalisasi Taman Kota dan Ekowisata yang mengedepankan keunggulan kompetitif tiap wilayah (kelurahan/kecamatan Penataan sarana prasarana publik, khususnya Gedung pemerintah, pedestarian, jalan sehingga berstandar pelayanan inklusif. Penegakan regulasi daerah untuk pencegahan/penindakan pencemaran lingkungan dan pelanggaran RTRW Membangun sistem pengelolaan sampah terpadu ditingkat kelurahan/kecamatan	a) Review Rencana Induk Persampahan b) Kajian Pengolahan Lindi TPA	a) Menjadi roadmap pengelolaan persampahan di OPD terkait selama minimal 5 tahun sampai 20 tahun, dan bisa direview apabila diperlukan b) Untuk dilaksanakan di OPD terkait dalam melakukan perbaikan IPAL Lindi TPA, yang saat ini tidak efektif

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Program Unggulan Wali Kota	Kajian yang relevan	Rekomendasi dalam Perencanaan
Mendorong terciptanya kawasan industri yang ramah lingkungan dan berkelanjutan		
BIRULAH : Bangun Rumah Layak Huni Program bantuan sosial untuk pemugaran rumah tangga miskin untuk mendapatkan rumah yang sehat	a) Pendampingan Perencanaan DAK Tematik PPKT 2026 b) Pendampingan Konsolidasi Tanah DAKT PPKT 2025	a) Sebagai dasar usulan program DAKT PPKT selanjutnya b) Mendukung OPD terkait dalam menangani permasalahan kawasan kumuh
STBM : Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) adalah pemberian bantuan keuangan kelurahan/RW untuk merubah perilaku higiene dan membangun sarana sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat	a) Baseline Strategi Sanitasi Kota (SSK) Salatiga b) Masterplan Pembangunan IPLT c) Kajian Kebutuhan Sanitasi Dasar untuk Pemetaan Akses MCK Layak di Permukiman d) Review RISPAM	a) Sebagai acuan dasar penyusunan kebijakan dalam pemutakhiran SSK tahun 2026-2030, sebagai dasar OPD melaksanakan roadmap pembangunan di bidang sanitasi b) Sebagai dasar OPD terkait untuk melakukan pembangunan atau pengembangan IPLT dalam rangka memenuhi target sanitasi aman 2045 sebesar 95% c) Sebagai dasar OPD terkait dalam menentukan prioritas lokasi penerima bantuan MCK/*septic tank* layak dan aman d) Sebagai roadmap OPD terkait melaksanakan pembangunan infrastruktur air minum selama minimal 5 tahun sampai 20 tahun dalam rangka memenuhi target air minum siap minum perpipaan tahun 2045 sebesar 100%, bisa dilakukan review apabila diperlukan. Air minum siap minum perpipaan mendukung suksesnya program STBM.
SOS : Salatiga Online System Program SOS bertujuan membangun infrastruktur jaringan online terpadu untuk pengawasan infrastruktur, lingkungan hidup, dan mobilitas masyarakat, yang berpusat pada Command Center tingkat kecamatan dan Kota	a) Kajian Infrastruktur Inklusif untuk Meningkatkan Aksesibilitas Fasilitas Publik	a) Sebagai rekomendasi teknis, kebijakan dan strategi pembangunan infrastruktur oleh OPD terkait yang inklusi dan ramah untuk semua kalangan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan daerah merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program/kegiatan/sub kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan, tahun rencana yang meliputi lokasi, target capaian kinerja dan kebutuhan dana/pagu indikatif, klasifikasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang dituangkan secara lengkap dalam lampiran matrik rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah Kota Salatiga. Tahapan penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan analisis dan metodologi perumusan sasaran pembangunan daerah. Rencana kerja disusun untuk menjabarkan sasaran pembangunan daerah dan dalam rangka pencapaian indikator sasaran serta dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2027 berisi program, kegiatan dan sub kegiatan dari pemerintah Kota Salatiga sebagai jawaban atas permasalahan pembangunan daerah yang berkembang saat ini. Program dan kegiatan dalam rencana kerja ditetapkan dengan memperhatikan visi, misi, tujuan dan sasaran daerah, isu strategis, korelasi terhadap Standar Pelayanan Minimal, *Suistainable Development Goal's* (SDG's), pengentasan kemiskinan dan stunting serta aspirasi masyarakat yang telah disepakati dalam Musrenbang. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Salatiga Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dalam rangka mencapai target RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Salatiga Tahun 2027 memuat program-program prioritas yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang berfungsi sebagai pelaksana urusan daerah yang meliputi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan pilihan, serta urusan pendukung urusan pemerintahan.

Program prioritas pembangunan Kota Salatiga Tahun 2027 diselaraskan dengan pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan amanat dari Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pelaksanaannya didukung dengan pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang merupakan unsur pendukung dan unsur penunjang urusan pemerintahan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5.1. Rencana Kerja

Implementasi program, kegiatan, dan sub kegiatan memperhatikan urgensi dan kapasitas kemampuan keuangan daerah, sehingga penjabaran program dibedakan menjadi dua prioritas, yaitu :

1. Prioritas I, merupakan program prioritas pembangunan daerah tahun 2027 sesuai dengan pentahapan perencanaan tahun kedua RPJMD 2025-2029, program Intervensi yang bersifat kebijakan, isu global, isu Nasional, isu Provinsi, Prioritas pembangunan, isu strategis, SDGs dan SPM;
2. Prioritas II, merupakan prioritas program yang dilaksanakan Perangkat Daerah yang berhubungan dengan permasalahan pelayanan tugas fungsi sesuai urusan, bidang urusannya, atau sebagai unsur pendukung atau unsur penunjang pelaksanaan pemerintahan.

5.1.1. Rencana Kerja Prioritas Pertama

5.1.1.1. Rencana Kerja Dukungan untuk Prioritas Nasional

Tabel 5. 1 Dukungan Program Pembangunan Daerah Kota Salatiga terhadap Prioritas Nasional Tahun 2027

No	Prioritas Nasional	PROGRAM		Rencana Kerja	Pagu Anggaran (Rp)
1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Program ini diarahkan pada Peningkatan SDM PPNS	1.491.060.084
		2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Program ini diarahkan pada peningkatan penanganan bencanan pada saat tanggap darurat dan peningkatan penanganan bencana pada saat pasca bencana	882.500.000
		3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Program ini diarahkan pada peningkatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	110.730.800
		4	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Program ini diarahkan pada peningkatan etika dan budaya politik	794.328.216

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Prioritas Nasional	PROGRAM		Rencana Kerja	Pagu Anggaran (Rp)
		5	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Program ini diarahkan pada peningkatan ketertiban organisasi kemasyarakatan	1.339.176.000
2	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Program ini diarahkan pada peningkatan perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	3.012.444.000
		2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Program ini diarahkan pada peningkatan akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	25.001.000
		3	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas penyelenggaraan penataan ruang	375.000.000
		4	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Program ini diarahkan pada peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	195.536.000
		5	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Program ini diarahkan pada peningkatan penanganan kerawanan pangan	8.500.000
		6	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Program ini diarahkan pada penurunan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	990.000.000
		7	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Program ini diarahkan pada peningkatan tata kelola persampahan	9.178.277.500
		8	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	15.000.000
		9	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Program ini diarahkan pada	115.000.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Prioritas Nasional	PROGRAM		Rencana Kerja	Pagu Anggaran (Rp)
				peningkatan produksi perikanan budidaya	
		10	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Program ini diarahkan pada peningkatan produksi perikanan budidaya	30.000.000
		11	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Program ini diarahkan pada peningkatan distribusi dan kualitas sarana pertanian	307.126.000
		12	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Program ini diarahkan pada peningkatan distribusi dan kualitas prasarana pertanian	46.362.000
3	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Program ini diarahkan pada peningkatan akses masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	69.400.000
		2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas layanan transportasi darat	12.946.695.163
		3	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Program ini diarahkan pada peningkatan aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	18.132.036.341
		4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Program ini diarahkan pada peningkatan produktivitas koperasi	280.000.000
		5	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	621.000.000
		6	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Program ini diarahkan pada peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	623.991.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Prioritas Nasional	PROGRAM		Rencana Kerja	Pagu Anggaran (Rp)
		7	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Program ini diarahkan pada peningkatan warisan budaya yang dilestarikan	14.300.000
		8	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Program ini diarahkan pada peningkatan jangkauan pemasaran pariwisata	780.000.000
		9	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Program ini diarahkan pada peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	124.070.000
		10	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Program ini diarahkan pada peningkatan	9.971.000
4	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Program ini diarahkan pada peningkatan partisipasi anak usia sekolah	977.104.291
		2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	42.735.325.999
		3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Program ini diarahkan pada peningkatan mutu dan distribusi tenaga kesehatan	37.310.000
		4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Program ini diarahkan pada peningkatan daya saing kepemudaan	1.421.822.300
		5	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Program ini diarahkan pada peningkatan pembudayaan dan prestasi olahraga	16.739.249.100
		6	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Program ini diarahkan pada peningkatan pemberdayaan sosial	80.000.000
		7	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Program ini diarahkan pada peningkatan	771.000.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Prioritas Nasional	PROGRAM		Rencana Kerja	Pagu Anggaran (Rp)
				perlindungan dan jaminan sosial	
		8	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Program ini diarahkan pada peningkatan produktivitas tenaga kerja	340.070.691
		9	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Program ini diarahkan pada peningkatan penempatan tenaga kerja	180.000.000
		10	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Program ini diarahkan pada peningkatan pekerja Indonesia yang terlindungi	461.000.000
		11	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas layanan pendaftaran penduduk	5.159.000
		12	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas layanan pencatatan sipil	42.454.000
		13	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Program ini diarahkan pada peningkatan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	298.705.000
		14	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Program ini diarahkan pada peningkatan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera	35.000.000
5	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Program ini diarahkan pada peningkatan perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	3.012.444.000
		2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN	Program ini diarahkan pada	25.001.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Prioritas Nasional	PROGRAM		Rencana Kerja	Pagu Anggaran (Rp)
			SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	peningkatan akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	
		3	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas penyelenggaraan penataan ruang	375.000.000
		4	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas layanan transportasi darat	12.946.695.163
		5	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Program ini diarahkan pada peningkatan aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	18.132.036.341
		6	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Program ini diarahkan pada peningkatan kemudahan berinvestasi	95.000.000
		7	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Program ini diarahkan pada peningkatan kemudahan berinvestasi	20.000.000
		8	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Program ini diarahkan pada peningkatan kemudahan berinvestasi	65.500.000
		9	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Program ini diarahkan pada terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	49.100.000
		10	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Program ini diarahkan pada peningkatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	17.243.727.362
		11	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Program ini diarahkan pada peningkatan kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	5.016.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Prioritas Nasional	PROGRAM		Rencana Kerja	Pagu Anggaran (Rp)
		12	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Program ini diarahkan pada peningkatan pelaku usaha yang berorientasi ekspor	-
		13	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Program ini diarahkan pada peningkatan realisasi pembangunan industri	235.000.000
		14	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	18.000.000
		15	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	340.000.000
		16	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Program ini diarahkan pada peningkatan tertib niaga dan mutu produk	-
	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	1	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman kumuh	1.047.990.000
		2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Program ini diarahkan pada peningkatan pemberdayaan sosial	80.000.000
		3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Program ini diarahkan pada peningkatan perlindungan dan jaminan sosial	771.000.000
		4	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Program ini diarahkan pada peningkatan produktivitas tenaga kerja	340.070.691
		5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Program ini diarahkan pada peningkatan pekerja Indonesia yang terlindungi	461.000.000
		6	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Program ini diarahkan pada	55.000.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Prioritas Nasional	PROGRAM		Rencana Kerja	Pagu Anggaran (Rp)
				peningkatan kualitas pembangunan kawasan transmigrasi	
		7	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Program ini diarahkan pada peningkatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	17.243.727.362
7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	1	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Program ini diarahkan pada peningkatan etika dan budaya politik	794.328.216
		2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Program ini diarahkan pada peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	189.600.000
		3	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Program ini diarahkan pada peningkatan ketertiban organisasi kemasyarakatan	1.339.176.000
8	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas SDM PPNS	1.491.060.084
		2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Program ini diarahkan pada peningkatan penanganan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan bencana pada saat pasca bencana	882.500.000
		3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Program ini diarahkan pada peningkatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	110.730.800
		4	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Program ini diarahkan pada penurunan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	990.000.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Prioritas Nasional	PROGRAM		Rencana Kerja	Pagu Anggaran (Rp)
		5	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Program ini diarahkan pada peningkatan tata kelola persampahan	9.178.277.500
		6	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Program ini diarahkan pada peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	623.991.000
		7	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Program ini diarahkan pada peningkatan warisan budaya yang dilestarikan	14.300.000
		8	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Program ini diarahkan pada peningkatan tata kelola arsip dinamis dan statis	27.000.000
		9	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Program ini diarahkan pada peningkatan etika dan budaya politik	794.328.216
		10	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Program ini diarahkan pada peningkatan ketertiban organisasi kemasyarakatan	1.339.176.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 5. 2 Dukungan Program Pembangunan Daerah Kota Salatiga terhadap Prioritas Presiden Tahun 2027

Program RKPD 2027		Rencana Kerja	Pagu RKPD 2027
1	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Program ini diarahkan pada peningkatan distribusi dan kualitas sarana pertanian	307.126.000
2	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Program ini diarahkan pada peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	195.536.000
3	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Program ini diarahkan pada peningkatan kerawanan pangan	8.500.000
4	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Program ini diarahkan pada peningkatan perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	3.012.444.000
5	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Program ini diarahkan pada peningkatan akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	25.001.000
6	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Program ini diarahkan pada peningkatan upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	865.000.000
7	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas kebijakan pengelolaan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	2.370.469.000
8	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program ini diarahkan pada peningkatan dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah	640.294.769.588
9	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Program ini diarahkan pada peningkatan etika dan budaya politik	794.328.216
10	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Program ini diarahkan pada penurunan terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran proses dan kewenangan	114.000.000
11	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Program ini diarahkan pada peningkatan perlindungan dan jaminan sosial	771.000.000
12	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Program ini diarahkan pada peningkatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	17.243.727.362
13	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Program ini diarahkan pada peningkatan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat	116.699.996
14	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas dan distribusi sediaan farmasi alat kesehatan, dan makanan minuman	320.254.395
15	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	42.735.325.999
16	Program Pengelolaan Pendidikan	Program ini diarahkan pada peningkatan partisipasi anak usia sekolah	977.104.291
17	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Program ini diarahkan pada peningkatan mutu dan distribusi institusi pendidikan	8.758.946.600
18	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas pengelolaan aplikasi informatika	2.857.745.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Program RKPD 2027		Rencana Kerja	Pagu RKPD 2027
19	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	105.000.000
20	Program Perlindungan Perempuan	Program ini diarahkan pada penurunan kekerasan terhadap perempuan	70.000.000
21	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	25.000.000
22	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Program ini diarahkan pada penurunan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	990.000.000
23	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Program ini diarahkan pada peningkatan distribusi dan kualitas prasarana pertanian	46.362.000
24	Program Kawasan Permukiman	Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas kawasan permukiman	4.340.000.000
25	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Program ini diarahkan pada peningkatan akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	290.001.000
26	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	621.000.000
27	Program Pengembangan UMKM	Program ini diarahkan pada peningkatan daya saing UMKM	450.000.000
28	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Program ini diarahkan pada peningkatan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat	424.393.612
29	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Program ini diarahkan pada peningkatan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat	116.699.996
30	Program Pengembangan Kebudayaan	Program ini diarahkan pada peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	623.991.000
31	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas ekosistem kreatif	9.971.000
32	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	11.000.000
32	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Program ini diarahkan pada peningkatan pembudayaan dan prestasi olah raga	16.739.249.100

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 5. 3 Dukungan Program Pembangunan Daerah Kota Salatiga terhadap Program Strategis Nasional Tahun 2027

NO	ProSN	PROYEK/KEGIATAN	Dukungan Program Daerah	Rencana Kerja	Pagu RKPD 2027
1	Pengentasan Kemiskinan	1. Penanggulangan Kemiskinan	1 Program Pemberdayaan Sosial	Program ini diarahkan pada peningkatan pemberdayaan sosial	80.000.000,00
			2 Program Rehabilitasi Sosial	Program ini diarahkan pada peningkatan rehabilitasi sosial	100.000.000,00
			3 Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Program ini diarahkan pada peningkatan perlindungan dan jaminan sosial	771.000.000,00
			4 Program Penanggulangan Bencana	Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat, dan Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	882.500.000,00
			5 Program Hubungan Industrial	Program ini diarahkan pada peningkatan pekerja Indonesia yang terlindungi	461.000.000,00
			6 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	42.735.325.999,00
			7 Program Pendaftaran Penduduk	Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas layanan pendaftaran penduduk	5.159.000,00
			8 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Program ini diarahkan pada peningkatan pemanfaatan informasi kependudukan	10.650.000,00
			9 Program Pengelolaan Pendidikan	Program ini diarahkan pada peningkatan partisipasi anak usia sekolah	977.104.291,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	ProSN	PROYEK/KEGIATAN	Dukungan Program Daerah	Rencana Kerja	Pagu RKPD 2027
			10 Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Program ini diarahkan pada peningkatan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera	35.000.000,00
			11 Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Program ini diarahkan pada peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	195.536.000,00
			12 Program Pengembangan UMKM	Program ini diarahkan pada peningkatan daya saing UMKM	450.000.000,00
			13 Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Program ini diarahkan pada peningkatan produktivitas tenaga kerja	340.070.691,00
			14 Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Program ini diarahkan pada peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	6.500.000,00
			15 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Program ini diarahkan pada peningkatan produksi perikanan budidaya	115.000.000,00
			16 Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Program ini diarahkan pada peningkatan produksi perikanan budidaya	30.000.000,00
			17 Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Program ini diarahkan pada peningkatan distribusi dan kualitas sarana pertanian	307.126.000,00
			18 Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Program ini diarahkan pada peningkatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	60.000.000,00
			19 Program Penyuluhan Pertanian	Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	15.000.000,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	ProSN	PROYEK/KEGIATAN	Dukungan Program Daerah	Rencana Kerja	Pagu RKPD 2027
			20 Program Kawasan Permukiman	Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas kawasan permukiman	4.340.000.000,00
			21 Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Program ini diarahkan pada peningkatan penyediaan PSU Permukiman	5.976.887.793,00
			22 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Program ini diarahkan pada peningkatan perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	3.012.444.000,00
			23 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Program ini diarahkan pada peningkatan akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	25.001.000,00
			24 Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Program ini diarahkan pada peningkatan pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	3.219.000,00
			25 Program Penanganan Kerawanan Pangan	Program ini diarahkan pada peningkatan penanganan kerawanan pangan	8.500.000,00
			26 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Program ini diarahkan pada peningkatan distribusi dan kualitas prasarana pertanian	46.362.000,00
			27 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas layanan transportasi darat	12.946.695.163,00
		2. Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	1 Program Pemberdayaan Sosial	Program ini diarahkan pada peningkatan pemberdayaan sosial	80.000.000,00
			2 Program Rehabilitasi Sosial	Program ini diarahkan pada peningkatan rehabilitasi sosial	100.000.000,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	ProSN	PROYEK/KEGIATAN	Dukungan Program Daerah	Rencana Kerja	Pagu RKPD 2027
			3 Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Program ini diarahkan pada peningkatan perlindungan dan jaminan sosial	771.000.000,00
			4 Program Penanggulangan Bencana	Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat, dan Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	882.500.000,00
			5 Program Hubungan Industrial	Program ini diarahkan pada peningkatan pekerja Indonesia yang terlindungi	461.000.000,00
			6 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	42.735.325.999,00
			7 Program Pendaftaran Penduduk	Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas layanan pendaftaran penduduk	5.159.000,00
			8 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Program ini diarahkan pada peningkatan pemanfaatan informasi kependudukan	10.650.000,00
			9 Program Pengelolaan Pendidikan	Program ini diarahkan pada peningkatan partisipasi anak usia sekolah	977.104.291,00
			10 Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Program ini diarahkan pada peningkatan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera	35.000.000,00
			11 Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan	Program ini diarahkan pada peningkatan diversifikasi dan ketahanan	195.536.000,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	ProSN	PROYEK/KEGIATAN	Dukungan Program Daerah	Rencana Kerja	Pagu RKPD 2027
			Pangan Masyarakat	pangan masyarakat	
			12 Program Pengembangan UMKM	Program ini diarahkan pada peningkatan daya saing UMKM	450.000.000,00
			13 Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Program ini diarahkan pada peningkatan produktivitas tenaga kerja	340.070.691,00
			14 Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Program ini diarahkan pada peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	6.500.000,00
			15 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Program ini diarahkan pada peningkatan produksi perikanan budidaya	115.000.000,00
			16 Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Program ini diarahkan pada peningkatan produksi perikanan budidaya	30.000.000,00
			17 Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Program ini diarahkan pada peningkatan distribusi dan kualitas sarana pertanian	307.126.000,00
			18 Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Program ini diarahkan pada peningkatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	60.000.000,00
			19 Program Penyuluhan Pertanian	Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	15.000.000,00
			20 Program Kawasan Permukiman	Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas kawasan permukiman	4.340.000.000,00
			21 Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Program ini diarahkan pada peningkatan penyediaan PSU Permukiman	5.976.887.793,00
			22 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Program ini diarahkan pada peningkatan perlindungan masyarakat	3.012.444.000,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	ProSN	PROYEK/KEGIATAN	Dukungan Program Daerah	Rencana Kerja	Pagu RKPD 2027
				terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	
			23 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Program ini diarahkan pada peningkatan akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	25.001.000,00
			24 Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Program ini diarahkan pada peningkatan pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	3.219.000,00
			25 Program Penanganan Kerawanan Pangan	Program ini diarahkan pada peningkatan penanganan kerawanan pangan	8.500.000,00
			26 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Program ini diarahkan pada peningkatan distribusi dan kualitas prasarana pertanian	46.362.000,00
			27 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas layanan transportasi darat	12.946.695.163,00
		3. Sekolah Rakyat			
		4. Pembangunan 3 Juta Rumah	1 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Program ini diarahkan pada peningkatan Kualitas perumahan dan kawasan permukiman kumuh	1.047.990.000,00
			2 Program Kawasan Permukiman	Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas kawasan permukiman	4.340.000.000,00
			3 Program Penataan Bangunan Gedung	Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas bangunan gedung	4.205.001.000,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	ProSN	PROYEK/KEGIATAN	Dukungan Program Daerah	Rencana Kerja	Pagu RKPD 2027
2	Ketahanan Pangan	1. Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah	1 Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Program ini diarahkan pada peningkatan kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	16.266.000,00
			2 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas layanan transportasi darat	12.946.695.163,00
			3 Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas SDM PPNS	1.491.060.084,00
			4 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Program ini diarahkan pada peningkatan distribusi dan kualitas prasarana pertanian	46.362.000,00
			5 Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Program ini diarahkan pada peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	195.536.000,00
			6 Program Penanganan Kerawanan Pangan	Program ini diarahkan pada peningkatan penanganan kerawanan pangan	8.500.000,00
			7 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Program ini diarahkan pada peningkatan produksi perikanan budidaya	115.000.000,00
			8 Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Program ini diarahkan pada peningkatan produksi perikanan budidaya	30.000.000,00
			9 Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Program ini diarahkan pada peningkatan distribusi dan kualitas sarana pertanian	307.126.000,00
			10 Program Rehabilitasi Sosial	Program ini diarahkan pada peningkatan Rehabilitasi sosial	100.000.000,00
			11 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Program ini diarahkan pada peningkatan perlindungan masyarakat terhadap banjir	3.012.444.000,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	ProSN	PROYEK/KEGIATAN	Dukungan Program Daerah	Rencana Kerja	Pagu RKPD 2027
				dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	
			12 Program Penyuluhan Pertanian	Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	15.000.000,00
3	Kesehatan untuk semua	1. Jaminan Kesehatan Nasional	1 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	42.735.325.999,00
			2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Program ini diarahkan pada peningkatan mutu dan distribusi tenaga kesehatan	37.310.000,00
			3 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas dan distribusi sediaan farmasi alat kesehatan, dan makanan minuman	320.254.395,00
			4 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Program ini diarahkan pada peningkatan meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	5.725.322.410,00
			5 Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Program ini diarahkan pada peningkatan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	298.705.000,00
			6 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Program ini diarahkan pada peningkatan perlindungan dan jaminan sosial	771.000.000,00
		2. Makan Bergizi Gratis	1 Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas kebijakan pengelolaan pemerintahan dan	2.370.469.000,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	ProSN	PROYEK/KEGIATAN	Dukungan Program Daerah		Rencana Kerja	Pagu RKPD 2027
					kesejahteraan rakyat	
4	Perluasan Akses Pendidikan	1. Pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan Dasar dan Menengah	1	Program Pengelolaan Pendidikan	Program ini diarahkan pada peningkatan partisipasi anak usia sekolah	977.104.291,00
5	Pertumbuhan Ekonomi	1. Pengendalian Inflasi	1	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	621.000.000,00
			2	Program Pengembangan UMKM	Program ini diarahkan pada peningkatan daya saing UMKM	450.000.000,00
			3	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas penyelenggaraan penataan ruang	375.000.000,00
			4	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Program ini diarahkan pada peningkatan pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	3.219.000,00
			5	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Program ini diarahkan pada peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	195.536.000,00
			6	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Program ini diarahkan pada peningkatan jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	148.700.000,00
			7	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	621.000.000,00
			8	Program Pengembangan UMKM	Program ini diarahkan pada peningkatan daya saing UMKM	450.000.000,00
			9	Program Pengembangan Iklim	Program ini diarahkan pada peningkatan	20.000.000,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	ProSN	PROYEK/KEGIATAN	Dukungan Program Daerah		Rencana Kerja	Pagu RKPD 2027
				Penanaman Modal	kemudahan berinvestasi	
			10	Program Promosi Penanaman Modal	Program ini diarahkan pada peningkatan kemudahan berinvestasi	95.000.000,00
			11	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Program ini diarahkan pada terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	49.100.000,00
			12	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Program ini diarahkan pada peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	124.070.000,00
			13	Program Pemasaran Pariwisata	Program ini diarahkan pada peningkatan jangkauan pemasaran pariwisata	780.000.000,00
			14	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	340.000.000,00
			15	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Program ini diarahkan pada peningkatan kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	16.266.000,00
			16	Program Pengembangan Ekspor	Program ini diarahkan pada peningkatan pelaku usaha yang berorientasi ekspor	-
			17	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Program ini diarahkan pada peningkatan tertib niaga dan mutu produk	19.422.000,00
			18	Program Penempatan Tenaga Kerja	Program ini diarahkan pada peningkatan penempatan tenaga kerja	180.000.000,00
		2. Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	1	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Program ini diarahkan pada peningkatan pembinaan dan pengawasan koperasi	111.368.800,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	ProSN	PROYEK/KEGIATAN		Dukungan Program Daerah		Rencana Kerja	Pagu RKPD 2027
				2	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Program ini diarahkan pada peningkatan kinerja pengelolaan koperasi	75.000.000,00
				3	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas SDM perkoperasian	71.242.200,00
				4	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Program ini diarahkan pada peningkatan produktivitas koperasi	280.000.000,00
		3.	Kemudahan Perizinan	1	Program Penataan Bangunan Gedung	Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas bangunan gedung	4.205.001.000,00
				2	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Program ini diarahkan pada peningkatan kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	29.850.000,00
				3	Program Pelayanan Penanaman Modal	Program ini diarahkan pada peningkatan kemudahan berinvestasi	65.500.000,00
				4	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Program ini diarahkan pada peningkatan kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	5.016.000,00
				5	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	621.000.000,00
				6	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	18.000.000,00

5.1.1.2. Rencana Kerja Prioritas RPJMD untuk Tahun 2027

Pelaksanaan prioritas Pembangunan yang merupakan penerjemahan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029 harus direncanakan secara utuh dalam RKPD Kota Salatiga sesuai dengan pentahapan Tahun 2027 untuk mewujudkan Pengembangan SDM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

yang sehat dan cerdas dan perekonomian daerah yang unggul, didukung pelayanan publik bermutu dan infrastruktur wilayah yang sesuai daya dukung lingkungan hidup. Penentuan prioritas Pembangunan tidak terlepas dari penyelesaian permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis yang dirumuskan berdasarkan evaluasi kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Pada RKPD tahun 2027, permasalahan dan isu strategis berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2025. Prioritas Pembangunan tersebut dilaksanakan dengan berpedoman pada nomenklatur perencanaan Pembangunan dan ketentuan regulasi yang terkait. Tidak semua program yang dilaksanakan Perangkat Daerah dijadikan program prioritas. Pemilihan program prioritas juga memperhatikan kemampuan keuangan daerah pada tahun rencana.

Hasil penyelarasan prioritas Pembangunan Kota Salatiga tahun 2027 dengan nomenklatur program sesuai ketentuan tersaji dalam tabel sebagai berikut :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 5. 4 Rekapitulasi Dukungan Program pada Prioritas Pembangunan Kota Salatiga tahun 2027

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM NOMENKLATUR	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH	RENCANA KERJA	PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH
1	Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berkarakter : a. Mengembangkan pembelajaran inklusif pada setiap sekolah untuk menjamin pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dan memberikan kesetaraan b. Meningkatkan kualitas pengelolaan perpustakaan dan naskah kuno serta pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan di Kota Salatiga c. Meningkatkan pengetahuan kesehatan masyarakat untuk mendukung promotif dan	53.529.692.110	1 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	977.104.291	DISDIK	Program ini ditujukan untuk meningkatnya partisipasi anak usia sekolah, yang didukung dengan peningkatan kualitas sarana prasarana serta tenaga pengajar.	SALATIGA CERDAS Peningkatan kualitas sarana prasarana, tenaga pendidik, dan bahan ajar pendidikan dasar dan menengah menuju Pendidikan Salatiga Standar Internasional Pengembangan pendidikan dan pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri
			2 PROGRAM PENDIDIK dan TENAGA KEPENDIDIKAN	8.758.946.600	DISDIK	Program ini diarahkan pada penjaminan kualitas tenaga pendidik yang sudah bersertifikat dan telah memenuhi kualifikasi minimal S1.	
			3 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	434.324.220	DINPERSIP	Program ini diarahkan pada peningkatan pengelolaan data dan informasi perpustakaan, pembinaan dan peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan serta layanan perpustakaan	
			3 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	-	DINPERSIP	Program ini diarahkan pada peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno, Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki Oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan, Seleksi dan Pengadaan serta Pengolahan dan Penyiangan, Koleksi Budaya Etnis Nusantara Oleh Perpustakaan	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM NOMENKLATUR	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH	RENCANA KERJA	PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH
	preventif terutama dalam edukasi gaya hidup sehat, kesehatan mental, pencegahan penyakit menular dan tidak menular a. Meningkatkan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat secara keseluruhan					Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	
			4 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	623.991.000	DISBUDPAR	Program ini diarahkan pada Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan, Pemajuan Tradisi Budaya, Pembinaan Sumber Daya Manusia bidang kebudayaan, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	
			5 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	42.735.325.999	DINKES	Program ini diarahkan pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal urusan kesehatan serta meningkatkan kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	SALATIGA SEHATI : Salatiga Sehat dan Terlindungi Layanan pendampingan tenaga medis di saat kehamilan, kelahiran dan Nifas Layanan kesehatan ibu bebas anemia dan terpenuhi nutrisi Layanan jaminan kesehatan bayi periode 1000 HPK menuju Salatiga zero stunting Pembiayaan Jaminan Kesehatan Daerah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Meningkatkan fasilitas kesehatan dan menyiapkan tenaga medis profesional untuk RSUD berstandar Internasional

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM NOMENKLATUR	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH	RENCANA KERJA	PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH
2	Pengembangan potensi perekonomian daerah yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif a. Meningkatkan investasi dalam mendukung kapasitas produksi daerah didukung peningkatan kondisi iklim investasi yang kondusif dengan pengembangan SDM, teknologi dan promosi potensi daerah secara masif b. Meningkatkan kapasitas tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri dan pasar kerja c. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perdagangan dan mendorong	3.162.313.624	1 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	124.070.000	DISBUDPAR	Program ini diarahkan pada Pengembangan, Peningkatan Kapasitas, Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan, Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan serta Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	SEKAR : SALATIGA BERKARYA Pengembangan ekonomi kreatif dengan mengutamakan komoditas unggulan lokal melalui pendampingan UMKM pemberdayaan kewirausahaan melalui akses pendanaan dan pengembangan UMKM
			2 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	11.000.000		Program ini diarahkan pada terfasilitasinya Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif, Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif dan Kemampuan dan Pengetahuan Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	
			3 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	20.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Program ini diarahkan pada tersusunnya Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten/Kota, data potensi investasi daerah yang termutakhirkan dan terlaksananya kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM NOMENKLATUR	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH	RENCANA KERJA	PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH
	digitalisasi serta kemitraan/kolaborasi antara pedagang dan UMKM untuk menghasilkan produk kualitas ekspor d. Meningkatkan cakupan perlindungan, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan ekonomi PPKS e. Mengembangkan ketahanan pangan berbasis komunitas, pengembangan urban farming, memperluas kerjasama antara petani, pedagang, dan konsumen untuk menciptakan sistem pangan yang lebih efisien dan berkelanjutan Meningkatkan pemenuhan hak dasar, pengurangan		4 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	340.070.691	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Program ini diarahkan pada penyediaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota, pengembangan prasarana dan sarana pelatihan vokasi, Proses Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi serta Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	
			5 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	621.000.000	DINKOP UKM	Program ini diarahkan pada Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri didukung dengan Persentase usaha mikro yang mendapatkan legalitas usaha	
			6 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	280.000.000	DINKOP UKM	Program ini diarahkan pada peningkatan iklim usaha Koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, dan inovasi teknologi bagi Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	
			7 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	340.000.000	DISDAG	Program ini diarahkan pada Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi didukung dengan pertumbuhan pasar rakyat yang terdigitalisasi	
			8 PROGRAM PERENCANAAN	235.000.000	DISPERINAKER	Program ini diarahkan pada terselenggaranya Koordinasi,	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM NOMENKLATUR	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH	RENCANA KERJA	PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH
	beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat		DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri serta Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	
			9 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	195.536.000	DISPANGTAN	Program ini diarahkan pada Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota, pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota serta Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	JARKOM MABAR : Jaringan Komunitas Mahasiswa dan Anak Muda berwirausaha Jaringan Komunitas Mahasiswa dan Anak Muda berwirausaha
			10 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	307.126.000	DISPANGTAN	Program ini diarahkan pada peningkatan distribusi dan kualitas prasarana pertanian didukung dengan pemenuhan kebutuhan prasarana pertanian, stimulan bantuan benih padi, pengendalian OPT dan DPI, mempertahankan luas lahan pertanian yang ada	SMART URBAN FARMING Pengelolaan budidaya pangan yang berkelanjutan dengan mengoptimalkan pertanian on farm dan off farm untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan pengembangan sektor unggulan daerah
			11 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	75.000.000	DISPANGTAN	Program ini diarahkan pada terlaksananya surveilans penyakit hewan dan zoonosis pada Hewan, tersedianya Pelayanan Jasa Medik Veteriner dan terawasinya Peredaran Hewan dan Produk Hewan	
			12 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	80.000.000	DINSOS	Program ini diarahkan pada peningkatan Kapasitas Keluarga	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM NOMENKLATUR	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH	RENCANA KERJA	PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH
3	Pengembangan Pelayanan publik yang bermutu dan berorientasi pada kepuasan masyarakat a. Penguatan kerukunan sosial, agama, ras maupun kelompok masyarakat melalui peningkatan pendidikan politik dan wawasan kebangsaan dalam berbagai kegiatan guna meningkatkan cinta tanah air, nilai-nilai toleransi dan saling menghormati dalam pendidikan dan kehidupan sehari-hari b. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, pengembangan aset produktif dan	38.250.317.266	1 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	733.100.933	KESBANGPOL	Program ini diarahkan pada terlaksananya Kebijakan, koordinasi dan monev di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	SI AKAS : Salatiga Akuntabel, Kolaboratif, Adaptif dan Sigap Pemerintahan yang berintegritas akan memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan, serta memfasilitasi kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan
			2 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	4.930.120.000	BPKPD	Program ini diarahkan pada peningkatan tata kelola anggaran, meningkatnya tata kelola perbendaharaan, dan meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	
			3 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.347.000.000	BPKPD	Program ini diarahkan pada peningkatan tata kelola tata kelola aset daerah	
			4 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	865.000.000	BPKPD	Program ini diarahkan pada peningkatan upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan, meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan, dan meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	
			5 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	148.700.000	DISKOMINFO	Program ini diarahkan pada penguatan Satu Data Salatiga sebagai rujukan terpadu dalam satu portal dan dapat diakses oleh semua, untuk menciptakan transparansi tata kelola pemerintahan Kota Salatiga, serta penyebaran informasi publik, mengetahui	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM NOMENKLATUR	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH	RENCANA KERJA	PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH
	mengembangkan sumber pendapatan daerah yang memiliki potensi jangka panjang c. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan pengembangan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat d. Perluasan jaringan internet broadband dan penyediaan akses WiFi publik di fasilitas layanan umum e. Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana pelayanan serta jangkauan layanan kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat f. Meningkatkan peran kelembagaan					kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	
			6 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	5.159.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program ini diarahkan pada peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
			7 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	17.243.727.362	4 Kelurahan di Salatiga	Program ini diarahkan pada terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan dan terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
			8 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	10.414.135.848	Sekretariat DPRD	Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas kinerja pelayanan sekretariat DPRD yang efektif dan efisien pada kualitas penganggaran dan pengawasan dan meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	
			9 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	158.308.900	BAPPEDA	Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah di dukung dengan rata-rata capaian kinerja sasaran pembangunan daerah	
			10 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	2.370.469.000	SEKRETARIAT DAERAH	Program ini akan diarahkan pada peningkatan kualitas kebijakan kesejahteraan masyarakat yang didukung pengembangan kebijakan berbasis data dan bukti (evidence base policy) yang	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM NOMENKLATUR	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH	RENCANA KERJA	PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH
	ditingkat kecamatan dan kelurahan (PKK, LPMK dll) dalam pelaksanaan pemberdayaan, monitoring dan evaluasi pembangunan terutama dalam mendukung tercapainya kecamatan berdaya Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang efektif dan efisien					relevan dan responsif terhadap kebutuhan nyata masyarakat	
			11 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	669.835.000	SEKRETARIAT DAERAH	Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan di dukung dengan cakupan koordinasi dari berbagai sektor	
			12 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	465.054.500	BKPSDM	Program ini akan diarahkan pada peningkatan kualitas layanan administrasi kepegawaian yang didukung dengan nilai Indeks NSPK Manajemen ASN	
			13 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2.957.232.379	BKPSDM	Program ini diarahkan pada peningkatan pengembangan sumber daya manusia dengan didukung dengan Persentase PNS yang mengikuti pengembangan kompetensi	
			14 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	114.000.000	INSPEKTORAT DAERAH	Program ini diarahkan pada peningkatan cakupan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah didukung dengan tindak lanjut rekomendasi BPK dan juga hasil pengawasan internal	
4	Integrasi rencana tata ruang dengan instrumen pengelolaan lingkungan hidup,	47.321.133.138	1 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA	42.735.325.999	DINKES	Program ini diarahkan pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal urusan kesehatan serta meningkatkan kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	STBM : Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Upaya perubahan perilaku higiene Penyediaan sarana sanitasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM NOMENKLATUR	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH	RENCANA KERJA	PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH
	dengan arah kebijakan pada a. Meningkatkan pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan secara konsisten yang didukung dengan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat b. Mengembangkan riset dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang mampu meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat		KESEHATAN MASYARAKAT				melalui pemberdayaan masyarakat
			2 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	290.001.000	DPU PR	Program ini diarahkan peningkatan akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah didukung dengan Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik dan dilakukan penyedotan secara berkala	
			3 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	990.000.000	DLH	Program ini diarahkan pada penurunan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dengan didukung oleh pemantauan status mutu air dan peningkatan sarana prasarana laboratorium	PROGRAM SARI : Salatiga Lestari Penegakan regulasi daerah untuk pencegahan/penindakan pencemaran lingkungan dan pelanggaran RTRW untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan
			4 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	700.000.000	DLH	Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati dengan dukungan RTH publik dan RTH privat terhadap peningkatan Persentase RTH tingkat kota	
			5 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	9.178.277.500	DLH	Program ini diarahkan pada peningkatan tata kelola persampahan dengan dukungan penanganan sampah, pengurangan sampah serta fasilitasi pengolahan sampah	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM NOMENKLATUR	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH	RENCANA KERJA	PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH
			6 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	375.000.000	DPU PR	Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas penyelenggaraan penataan ruang, dengan dukungan tingkat ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	
			7 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	3.500.000.000	DPU PR	Program ini diarahkan pada penjaminan kualitas bangunan gedung serta rasio ijin PBG	
5	Pengembangan infrastruktur kewilayahan sesuai arah pengembangan wilayah, dengan arah kebijakan pada: a. Mengembangkan infrastruktur dan fasilitas pendukung olahraga yang terjangkau dan lebih mudah diakses masyarakat a. Mengembangkan infrastruktur industri yang memadai, penyediaan wilayah peruntukan industri yang terintegrasi,	24.868.424.134	1 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	610.357.040	Dinas PKP	Program ini diarahkan pada pengembangan perumahan	PROGRAM BIRULAH : Bangun Rumah Layak Huni Bantuan sosial untuk pemenuhan rumah yang layak dan sehat bagi rumah tangga miskin
			2 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	4.340.000.000	Dinas PKP	Program ini diarahkan pada peningkatan lingkungan permukiman kumuh kawasan permukiman	
			3 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	5.976.887.793	DINAS PKP	Program ini diarahkan pada pemberian bantuan keuangan kelurahan/RW untuk merubah perilaku higiene dan membangun sarana sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan tujuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	
			4 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	148.700.000	Diskominfo	Program ini diarahkan pada penguatan Satu Data Salatiga sebagai rujukan terpadu dalam satu portal dan dapat diakses oleh semua, untuk menciptakan transparansi tata kelola pemerintahan Kota Salatiga, serta penyebaran	PROGRAM SOS : Salatiga Online System Membangun infrastruktur jaringan online untuk pengawasan infrastruktur lingkungan hidup dan mobilitas masyarakat yang berpusat pada Command

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM NOMENKLATUR	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH	RENCANA KERJA	PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH
	peningkatan inovasi dengan memberikan insentif untuk adopsi teknologi terbaru dalam proses produksi					informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	Center Peningkatan infrastruktur yang berkualitas untuk mempermudah akses pasar dan distribusi
			5 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.857.745.000	Diskominfo	Program ini diarahkan pada peningkatan akses internet oleh diskominfo kepada Organisasi Perangkat Daerah serta pelayanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	
			6 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	18.132.036.341	DPU PR	Program ini diarahkan pada peningkatan aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman serta dapat diukur dengan rasio kemantapan jalan	
			7 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	340.000.000	DISDAG	Program ini diarahkan pada Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi didukung dengan pertumbuhan pasar rakyat yang terdigitalisasi	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 5. 5 Keterkaitan Program Unggulan dengan Penyelesaian Permasalahan Pembangunan dqan Isu Strategis

Permasalahan Pembangunan		Isu Strategis Kota Salatiga Tahun 2025 -2029	Arah Kebijakan	Program Unggulan Kepala Daerah
1	Masih adanya angka kemiskinan sebesar 4,20%, sedangkan target SDGs pada tahun 2030 adalah nol persen	Kemiskinan dan kesenjangan	Pengembangan potensi perekonomian daerah yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif	SEKAR : SALATIGA BERKARYA Pengembangan ekonomi kreatif dengan mengutamakan komoditas unggulan lokal melalui pendampingan UMKM pemberdayaan kewirausahaan melalui akses pendanaan dan pengembangan UMKM
2	Tingginya tingkat ketimpangan pendapatan penduduk, termasuk 3 besar di Jawa Tengah			
3	Tingkat Pengangguran Terbuka masih relative cukup besar, pada angka 3,67%			
4	Meningkatnya jumlah penduduk lansia seiring dengan Usia Harapan Hidup yang terus naik, pada tahun 2025 pada angka 78, 75 tahun			
5	Angka Partisipasi Sekolah belum mencapai 100%	Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia	Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berkarakter	SALATIGA CERDAS Peningkatan kualitas sarana prasarana, tenaga pendidik, dan bahan ajar pendidikan dasar dan menengah menuju Pendidikan Salatiga Standar Internasional Pengembangan pendidikan dan pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri
6	Belum optimalnya pencapaian Tingkat kesehatan keluarga dengan masih adanya kasus gizi buruk dan stunting pada anak, kasus kematian balita, dan kematian ibu			SALATIGA SEHATI : Salatiga Sehat dan Terlindungi Layanan pendampingan tenaga medis di saat kehamilan, kelahiran dan Nifas Layanan kesehatan ibu bebas anemia dan terpenuhi nutrisi Layanan jaminan kesehatan bayi periode 1000 HPK menuju Salatiga zero stunting Pembiayaan Jaminan Kesehatan Daerah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
7	Masih rendahnya Daya Saing Olahraga			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Permasalahan Pembangunan		Isu Strategis Kota Salatiga Tahun 2025 -2029	Arah Kebijakan	Program Unggulan Kepala Daerah
8	Masih rendahnya koleksi nasional dan kuno yang dilestarikan, tahun 2025 baru 25 %, dan prosentase pemajuan kebudayaan baru 76,81%	Pengelolaan dan pelestarian budaya daerah		Meningkatkan asilitas kesehatan dan menyiapkan tenaga medis profesional untuk RSUD berstandar Internasional
9	Belum optimalnya pencapaian perlindungan perempuan dan anak, masih adanya anak korban kekerasan dan kekerasan terhadap perempuan	Kesenjangan gender, perlindungan anak dan perempuan		
10	Kota Salatiga yang berada di persimpangan jalur utama Semarang–Solo, belum optimal dalam memanfaatkan peranannya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional dengan kondisi sumberdaya yang dimiliki saat ini, pertumbuhan ekonomi belum mencapai target pesimis tahun 2025 yaitu 6,10%	Pertumbuhan ekonomi yang merata didukung investasi dan produk unggulan yang berdaya saing	Pengembangan potensi perekonomian daerah yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif	JARKOM MABAR : Jaringan Komunitas Mahasiswa dan Anak Muda berwirausaha Jaringan Komunitas Mahasiswa dan Anak Muda berwirausaha
11	Belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya alam terutama dalam pengembangan teknologi pertanian dan pengelolaan potensi wisata dalam mendukung perkembangan ekonomi masyarakat Kota Salatiga			SMART URBAN FARMING Pengelolaan budidaya pangan yang berkelanjutan dengan mengoptimalkan pertanian on farm dan off farm untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan pengembangan sektor unggulan daerah
12	Pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya menciptakan pemerataan kesejahteraan dengan masih didominasi oleh sektor industri pengolahan dan konsumsi rumah tangga			
13	Keterbatasan investasi dan belum optimalnya pemanfaatan potensi sektor unggulan daerah			
14	Daya dukung lahan tidak mampu memenuhi kebutuhan standar hidup layak penduduk, dan penurunan kualitas air	Pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan	Integrasi rencana tata ruang dengan instrumen pengelolaan lingkungan hidup	PROGRAM BIRULAH : Bangun Rumah Layak Huni Bantuan sosial untuk pemenuhan rumah yang layak dan sehat bagi rumah tangga miskin

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Permasalahan Pembangunan		Isu Strategis Kota Salatiga Tahun 2025 -2029	Arah Kebijakan	Program Unggulan Kepala Daerah
15	Penurunan Indeks Inovasi Daerah (51,10 turun menjadi 48,88) dan masih belum optimalnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan (73,68)			SI AKAS : Salatiga Akuntabel, Kolaboratif, Adaptif dan Sigap Pemerintahan yang berintegritas akan memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan, serta memfasilitasi kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan
16	Belum optimalnya upaya peningkatan dan pemerataan insfrastruktur daerah dalam menunjang pelayanan	Pemenuhan kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur	Pengembangan Infrastruktur Kewilayahan sesuai arah pengembangan wilayah	STBM : Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Upaya perubahan perilaku higiene Penyediaan sarana sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat
				PROGRAM SARI : Salatiga Lestari Penegakan regulasi daerah untuk pencegahan/penindakan pencemaran lingkungan dan pelanggaran RTRW untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan
17	Kualitas sumber daya aparatur, pemanfaatan teknologi dalam pelayanan, penerapan standar pelayanan yang jelas dan terukur, pengembangan birokrasi dan penguatan sistem pengawasan dalam pelayanan public masih belum optimal	Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis dan Kolaboratif	Pengembangan pelayanan publik yang bermutu dan berorientasi pada kepuasan masyarakat	SI AKAS : Salatiga Akuntabel, Kolaboratif, Adaptif dan Sigap Pemerintahan yang berintegritas akan memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan, serta memfasilitasi kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan
18	Infrastruktur digital yang merata, literasi digital aparatur, serta sistem informasi antar-perangkat daerah yang masih belum optimal.			PROGRAM SOS : Salatiga Online System Membangun infrastruktur jaringan online untuk pengawasan infrastruktur lingkungan hidup dan mobilitas masyarakat yang berpusat pada Command Center

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Permasalahan Pembangunan		Isu Strategis Kota Salatiga Tahun 2025 -2029	Arah Kebijakan	Program Unggulan Kepala Daerah
19	Peran dan dukungan kelembagaan di Tingkat Kelurahan dan Kecamatan belum optimal			Peningkatan infrastruktur yang berkualitas untuk mempermudah akses pasar dan distribusi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5.1.1.3. Rencana Kerja Dukungan Program RKPD 2027 yang menerapkan Konsep Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS)

Dalam upaya memaksimalkan efektivitas kolaboratif pencapaian target prioritas pembangunan daerah, Pemerintah Kota Salatiga menerapkan konsep tematik, holistik, integratif dan spasial dalam setiap kebijakan pembangunan daerah.

5.1.1.3.1. Konsep Tematik

Dalam perencanaan pembangunan, konsep tematik diskenariokan secara lima tahunan dan di*breakdown* tiap tahunnya. Lebih lanjut dijabarkan dalam kerangka prioritas pembangunan daerah setiap tahunnya dan sesuai dengan arah kebijakan daerah. Konsep tematik dalam arah kebijakan pembangunan dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Konsep tematik diwujudkan dalam penetapan prioritas pembangunan daerah di Kota Salatiga pada tahun 2027 adalah :

a. Pengembangan Kepariwisataan dan Ekosistem Ekonomi Kreatif
b. Pengembangan SDM Unggul yang Sehat, Cerdas dan Berkarakter
c. Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan
d. Pengembangan pelayanan publik yang bermutu dan berorientasi pada Kepuasan Masyarakat

5.1.1.3.2. Konsep Holistik

Dalam perencanaan pembangunan daerah, Pemerintah Kota Salatiga menerapkan konsep holistik yaitu perencanaan yang komprehensif dari hulu ke hilir, antara lain pelaksanaan program penanganan kemiskinan dan penurunan stunting

5.1.1.3.3. Konsep Integratif

Penerapan konsep integratif juga dilakukan baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah. Hal ini dilakukan secara kolaboratif yang melibatkan semua perangkat daerah, antara lain penanganan kemiskinan stunting dan dalam upaya mengatasi kekumuhan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Selain itu perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah juga dilaksanakan Pemerintah Kota Salatiga berkolaborasi dengan aktor non pemerintah baik dari sisi anggaran, sumber daya manusia dan pelaksanaan kegiatan, yaitu kegiatan penanganan kemiskinan, pembangunan berkelanjutan (SDGs), penanganan stunting, penanganan anak usia sekolah tidak sekolah dan sebagainya. Dari sisi pentahelix non pemerintah yang dilibatkan adalah akademisi, tim penggerak PKK, BAZNAS, Mitra Perangkat Daerah, kelompok masyarakat, media massa, Forum CSR dan lainnya

5.1.1.3.4. Konsep Spasial

Konsep Spasial juga diterapkan dalam kebijakan pembangunan daerah di Kota Salatiga. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kegiatan penanganan stunting, kemiskinan dan infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 5. 6 Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2027 yang menerapkan Konsesp Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS)

No	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RKPD 2027	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	Anggaran	Perangkat Daerah
1	**1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**			977.104.291	
	Outcome : **Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah**	Angka Partisipasi Sekolah PAUD (Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD)	100 %		
		Angka Partisipasi Sekolah SD/MI (Tingkat partisipasi warga negara usia 7–12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar)	100 %		
		Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs (Tingkat partisipasi warga negara usia 13–15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama)	100 %		
		Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Kesetaraan (Tingkat partisipasi warga negara usia 7–18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan)	100 %		
		Angka Putus Sekolah SD/MI	0,003 %		
		Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0,056 %		
		Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik SD/MI	88,46 %		
		Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik SMP/MTs	87,79 %		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RKPD 2027	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN		Anggaran	Perangkat Daerah
		Persentase sekolah TK yang memenuhi standar Holistik Integratif dengan kategori sedang	78,09	%		
		Persentase Kondisi Kelas PAUD dalam Kondisi Baik	87,45	%		
		Kondisi Sarpras Pendidikan Kesetaraan baik	95,47	%		
		Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	93,8	%		
		Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	85,08	%		
		Rata-rata kemampuan literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	94,77	%		
		Rata-rata kemampuan numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	90,94	%		
		Iklim Kebhinekaan SD	69,06	Nilai		
		Iklim Kebhinekaan SMP	74,59	Nilai		
		Iklim Keamanan SD	73,71	Nilai		
		Iklim Keamanan SMP	74,41	Nilai		
		Iklim Inklusivitas SD	61	Nilai		
		Iklim Inklusivitas SMP	64	Nilai		
2	**1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**				42.735.325.999	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RKPD 2027	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	Anggaran	Perangkat Daerah
	***Outcome :*Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat**	*Angka Kematian balita (AKABA)*	11,49 per 1.000 KH		
		Capaian penemuan kasus TB (Notifikasi kasus TB)	135 kasus		
		Persentase pasien TBC yang memulai pengobatan (Enrollment TBC)	92 %		
		Cakupan pemberian terapi pencegahan pada orang kontak serumah	35 %		
		Annual Parasite Incidence (API) per 1.000 penduduk	0,74 1.000 penduduk		
		Jumlah Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	8 kelurahan		
		Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan KKS (SK Forkom kec, SK Pokja Kel, Sekretariat, Rencana Kegiatan, Anggaran)	100 Puskesmas		
		Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan pengawasan kualitas udara dalam ruang memenuhi syarat	50 %		
		Persentase Puskesmas Yang memfasilitasi Kelurahan Sehat Iklim	66,67 %		
		Persentase rumah tangga dengan kualitas air minum memenuhi syarat	31 %		
		Persentase sarana air minum yang memenuhi syarat	71 %		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RKPD 2027	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	Anggaran	Perangkat Daerah
		Cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan	100 %		
		Cakupan bayi baru lahir yang mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD)	85 %		
		Cakupan Bayi Usia Kurang 6 Bulan Mendapat ASI Eksklusif	83 %		
		Cakupan imunisasi di usia sekolah dasar	99 %		
		Cakupan Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang Mendapat Makanan Tambahan	100 %		
		Cakupan Ibu Hamil yang Mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) Minimal 90 Tablet Selama Masa Kehamilan	100 %		
		Cakupan ibu nifas mendapat kapsul Vitamin A	99,6 %		
		Cakupan kepesertaan JKN	100 %		
		Cakupan kepesertaan JKN Aktif	82 %		
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100 %		
		Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100 %		
		Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin	100 %		
		Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil	100 %		
		Cakupan Pelayanan kesehatan Ibu Nifas (KF3)	99,55 %		
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia	100 %		
		Persentase lanjut usia yang mandiri	93 %		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RKPD 2027	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	Anggaran	Perangkat Daerah
		Persentase Depresi yang mendapatkan layanan	1,5 %		
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	100 %		
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TB	100 %		
		Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	100 %		
		Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100 %		
		Prevalensi Obesitas > 18 tahun	60 %		
		Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	50 %		
		Persentase merokok penduduk 10-21 tahun	14,7 %		
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100 %		
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100 %		
		Cakupan pembinaan remaja di sekolah	100 %		
		Cakupan Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional	100 %		
		Cakupan Puskesmas yang melaksanakan Perkesmas	100 %		
		Cakupan Remaja Putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)	99,73 %		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RKPD 2027	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	Anggaran	Perangkat Daerah
		Persentase Puskesmas dengan Tempat Fasilitas Umum (TFU) memenuhi syarat	66,67 %		
		Deteksi Dini Triple Eliminasi Ibu Hamil	75,85 %		
		Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	98 %		
		Incident Rate DBD per 100.000 penduduk	9,1 / 100rb penduduk		
		Kasus HIV/ AIDS baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV	62 kasus		
		Nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan Dinas Kesehatan	85 %		
		Persentase penduduk dengan aktivitas fisik cukup	20 %		
		Persentase tempat kerja formal yang melaksanakan kesehatan kerja	60 %		
		Persentase tempat kerja informal yang melaksanakan kesehatan kerja	100 %		
		Penemuan kasus AFP (Acute Flaccid Paralysis)	6 kasus		
		Persentase Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (Berat Badan kurang dari 2500 gram)	7,24 %		
		Persentase Ibu hamil KEK	13,81 %		
		Persentase Ibu Hamil yang Anemia	7,46 %		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RKPD 2027	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	Anggaran	Perangkat Daerah
		Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	60 %		
		Proporsi jamaah haji Kota Salatiga yang mendapat pemeriksaan dan pembinaan kesehatan sesuai standar	100 %		
		Persentase Pustu, Puskesmas, dan RSUD yang memenuhi standar Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan (SPA) dan Sumber Daya Manusia Kesehatan	100 %		
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	88 %		
		Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	4 /1000 penduduk		
		Tertanganinya KLB/Bencana dalam 1 x 24 jam	100 %		
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi	82,03 %		
3	**1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			5.725.322.410	
	***Outcome :* Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan**	Cakupan desa siaga strata mandiri	100 %		
		Cakupan PHBS tatanan rumah tangga strata paripurna	97,75 %		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RKPD 2027	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	Anggaran	Perangkat Daerah
		Cakupan PHBS tatanan institusi pendidikan strata paripurna	95,85 %		
		Cakupan PHBS tatanan institusi kesehatan sehat	100 %		
		Cakupan PHBS tatanan tempat kerja sehat	90,56 %		
		Cakupan PHBS tatanan tempat umum sehat	94,56 %		
		Cakupan sosialisasi dan edukasi Kawasan Tanpa Rokok	62,5 %		
4	**1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**			18.132.036.341	
	***Outcome :*Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman**	Rasio kemantapan jalan	95,54 %		
5	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**			290.001.000	
	***Outcome :* Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah**	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	23,8 %		
6	**1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**			25.001.000	
	***Outcome :* Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum**	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	68,35 %		
7	**1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**			610.357.040	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RKPD 2027	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	Anggaran	Perangkat Daerah
	Outcome : **Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat pemerintah**	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni korban bencana atau relokasi kabupaten/kota	100 %		
		Persentase fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	100 %		
8	**1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**			4.340.000.000	
	Outcome : **Meningkatnya kualitas kawasan permukiman**	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/ kota yang ditangani	23,25 %		
9	**1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**			1.047.990.000	
	Outcome : **Meningkatnya kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh**	Persentase rumah tidak layak huni yang diperbaiki	5,25 %		
10	**1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**			5.976.887.793	
	Outcome : Meningkatnya penyediaan PSU Permukiman	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	70 %		
11	**1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**			80.000.000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RKPD 2027	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	Anggaran	Perangkat Daerah
	Outcome : **Meningkatnya pemberdayaan sosial**	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan sosial yang Meningkat Kualitasnya dalam pelayanan sosial	60 %		
12	**1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**			100.000.000	
	Outcome : **Meningkatnya rehabilitasi sosial**	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100 %		
		Persentase lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100 %		
		Persentase gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100 %		
		Persentase penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100 %		
13	**1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**			771.000.000	
	Outcome : **Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial**	Persentase Data Fakir Miskin yang divalidasi	98 %		
14	**1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA**			20.300.000	
	Outcome : **Meningkatnya perlindungan sosial korban dan bencana**	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota	100 %		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RKPD 2027	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	Anggaran	Perangkat Daerah
15	**2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**			340.070.691	
	***Outcome :* Meningkatnya produktivitas tenaga kerja**	Persentase Tenaga Kerja yang terlatih	0,34 %		
16	**2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**			180.000.000	
	***Outcome :* Meningkatnya penempatan tenaga kerja**	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah	71,91 %		
17	**2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**			105.000.000	
	***Outcome :* Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan**	Persentase Kelembagaan PUG Aktif	100 %		
		Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG	100 %		
18	**2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**			650.000.000	
	***Outcome :* Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak**	Persentase PKK aktif	100 %		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RKPD 2027	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	Anggaran	Perangkat Daerah
19	**2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**			298.705.000	
	Outcome : **Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)**	Rasio akseptor KB baru	14,5 %		
		Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15- 49	68,77 %		
		Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmetneed)	8,45 %		
		Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	27,05 %		
		Persentase Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)	70 %		
		Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD)	11,2 %		
		Demand Satisfied (Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi)	83,5 %		
20	**2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**			35.000.000	
	Outcome : **Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera**	Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD)	46:23 rasio		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RKPD 2027	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	Anggaran	Perangkat Daerah
		Cakupan Balita/ Anak dengan Tumbuh Kembang sesuai dengan Kartu Kembang Anak (KKA)	100 %		
		Cakupan Kader BKB yang Terlatih	75,97 %		
		Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber-KB	96,93 %		
		Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	57,7 %		
		Indeks Lansia Berdaya	57,1 Indeks		
		Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja	93,6 Indeks		
21	**2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**			195.536.000	
	***Outcome :* Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat**	Rasio jumlah cadangan beras pemerintah daerah (CBPD) terhadap target jumlah CBPD berdasarkan Perbadan 15/2023	1,77 Rasio		
22	**2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**			8.500.000	
	***Outcome :* Meningkatnya penanganan kerawanan pangan**	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	88,04 %		
23	**2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**			25.000.000	
	***Outcome :* Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan**	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	91,05 %		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RKPD 2027	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	Anggaran	Perangkat Daerah
24	**3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**			307.126.000	
	Outcome : **Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian**	Pemenuhan kebutuhan sarana pertanian	75,38 %		
		Produktivitas tanaman pangan (Padi dan Jagung)	6.980 ton/ha		
25	**3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**			115.000.000	
	Outcome : **Meningkatnya produksi perikanan budidaya**	Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan	100 %		
		Persentase Kelompok Pembudidaya Ikan yang telah menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)	35,18 %		
		Produksi perikanan budidaya	719,187 ton		
26	**2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**			990.000.000	
	Outcome : **Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup**	Persentase pemantauan status mutu air	100 %		
		Persentase pemeliharaan sarana prasarana laboratorium	100 %		
27	**2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**			35.000.000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RKPD 2027	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN		Anggaran	Perangkat Daerah
	Outcome : **Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup**	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100	%		
28	**2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**				9.178.277.500	
	Outcome : **Meningkatnya tata kelola persampahan**	Persentase penanganan sampah	73	%		
		Persentase pengurangan sampah perkotaan	26	%		
29	**2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**				12.946.695.163	
	Outcome : **Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat**	Rasio konektivitas kabupaten/kota	0,50	Rasio		
		Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Kabupaten/Kota	9,26	%		
		Rasio Kinerja Lalu Lintas (VCR)	0,44	V/C		
30	**2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**				2.857.745.000	
	Outcome : **Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika**	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100	%		
		Persentase pelayanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	70	%		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RKPD 2027	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	Anggaran	Perangkat Daerah
31	**2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**			280.000.000	
	Outcome : **Meningkatnya produktivitas koperasi**	Persentase Koperasi Aktif	62,42 %		
32	**2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**			621.000.000	
	Outcome : **Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri**	Persentase usaha mikro yang mendapatkan legalitas usaha	48,64 %		
33	**2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**			450.000.000	
	Outcome : **Meningkatnya daya saing UMKM**	Persentase UMKM yang mengakses pembiayaan	25,93 %		
34	**2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**			1.421.822.300	
	Outcome : **Meningkatnya daya saing kepemudaan**	persentase Pemuda yang mengikuti pengembangan kapasitas Daya Saing Kepemudaan	5 %		
35	**2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**			16.739.249.100	
	Outcome : **Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga**	persentase Atlet yang mengikuti pengembangan kapasitas Daya Saing Olahraga	17 %		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RKPD 2027	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	Anggaran	Perangkat Daerah
36	**3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**			124.070.000	
	Outcome : Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara	5 %		
		Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara yang Datang ke Kabupaten / Kota	5 %		
		Tingkat Hunian Akomodasi	58,92 %		
37	**3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**			780.000.000	
	***Outcome :* Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata**	Persentase Fasilitasi Pemasaran Pariwisata	100 %		
38	**3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**			340.000.000	
	***Outcome :* Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi**	Persentase fasilitasi pedagang pasar rakyat yang menggunakan platform digital	40 %		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5.1.1.4. Program Prioritas untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Isu Pembangunan berkelanjutan atau *Suistainable Developmen Goal's* (SDGs) adalah isu global yang harus dipastikan prinsip-pronsip Pembangunan berkelanjutan sudah diintegrasikan dalam dokumen perencanaan dalam bentuk Program dan Kegiatan dalam rangka mencapai target tahunan menuju target di tahun 2030. Pada Dokumen RKPD Kota Salatiga Tahun 2027, program prioritas untuk mendukung pencapaian SDGs menjadi salah satu prioritas program untuk rencana kerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2027, dengan rencana program tersaji pada tabel berikut.

Tabel 5. 7 Akomodasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kota Salatiga Tahun 2027

PROGRAM/KEGIATAN		PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
TUJUAN : 1 Mengakhiri Kemiskinan Dalam segala Bentuk Dimanapun			
INDIKATOR SDGs: ANGKA KEMISKINAN			
INDIKATOR SDGs: Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial			
PROGRAM 1: Program Pemberdayaan Sosial			
	Kegiatan 1 : Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	80.000.000	Dinas Sosial
PROGRAM 2: Program Rehabilitasi Sosial			
	Kegiatan 1 : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	85.000.000	Dinas Sosial
	Kegiatan 2 : Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan NAPZA di Luar Panti Sosial	15.000.000	
PROGRAM 3: Program Perlindungan dan Jaminan Sosial			
	Kegiatan 1 : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	771.000.000	Dinas Sosial
PROGRAM 4: PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			
	Kegiatan 1 : Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	530.357.040	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
PROGRAM 5: PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			
	Kegiatan 1 : Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	4.340.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
PROGRAM 6: PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			
	Kegiatan 1 : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	25.001.000	Dinas PUPR

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PROGRAM/KEGIATAN		PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
PROGRAM 7: PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			Dinas PUPR
	Kegiatan 1 : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	290.001.000	
PROGRAM 8: PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			Dinas Kesehatan
	Kegiatan 1 : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	26.945.174.014	
PROGRAM 9: PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			Dinas pangan dan Pertanian
	Kegiatan 1 : Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	45.000.000	
	Kegiatan 2 : Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	28.281.000	
PROGRAM 10: PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			Dinas pangan dan Pertanian
	Kegiatan 1 : Pembangunan Prasarana Pertanian	46.362.000	
PROGRAM 11: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			DINAS KOPERASI DAN UKM
	Kegiatan 1 : Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	280.000.000	
PROGRAM 12: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			DINAS KOPERASI DAN UKM
	Kegiatan: Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	621.000.000	
PROGRAM 13: PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			DINAS KOPERASI DAN UKM
	Kegiatan 1: Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	450.000.000	
PROGRAM 14: PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			BAPPEDA
	Kegiatan 1 : Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	182.500.000	
PROGRAM 15: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			DP3APPKB

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PROGRAM/KEGIATAN		PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
	Kegiatan 1 : Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	35.000.000	
PROGRAM 16: PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			DP3APPKB
	Kegiatan 1 : Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	63.125.000	
PROGRAM 17: PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			DP3APPKB
	Kegiatan 1 : Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	83.600.000	
	Kegiatan 2 : Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	145.105.000	
PROGRAM 18: PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			DISDIK
	Kegiatan 1 : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	411.442.600	
	Kegiatan 2 : Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	88.871.800	
	Kegiatan 3 : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	358.119.244	
	Kegiatan 4: Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	118.670.647	
PROGRAM 19: PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			Dinas Perdagangan
	Kegiatan 1 : Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	35.000.000	
PROGRAM 20: PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			Dinas Perdagangan
	Kegiatan 1 : Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	16.266.000	
PROGRAM 21: PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			Dinas Perinaker
	Kegiatan 1 : Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	340.070.691	
PROGRAM 22: PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			Dinas Perinaker
	Kegiatan 1 : Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	235.000.000	
PROGRAM 23: PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			DISBUDPAR
	Kegiatan 1 : Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	9.750.000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PROGRAM/KEGIATAN		PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
	Kegiatan 2: Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	14.320.000	
PROGRAM 24: PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			DISBUDPAR
	Kegiatan 1 : Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	11.000.000	
PROGRAM 25: PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			BPBD
	Kegiatan 1 : Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	135.000.000	
	Kegiatan 2 : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	605.000.000	
PROGRAM 26: PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			KECAMATAN
	Kegiatan 1: Pemberdayaan Kelurahan (di 4 Kecamatan)	16.291.204.344	
	Kegiatan 2: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa (di 4 Kecamatan)	943.523.018	
TUJUAN 2 : Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan			
INDIKATOR SDGs: Ketersediaan Pangan Utama Beras			
PROGRAM 1: PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			Dinas pangan dan Pertanian
	Kegiatan 1: Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	28.281.000	
INDIKATOR SDGs: Penanganan Rumah tangga Rawan Pangan			
PROGRAM 1: PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			
	Kegiatan 1: Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	28.281.000	Dinas Pangan dan Pertanian
	Kegiatan 2: Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	45.000.000	
	Kegiatan 3: Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	122.255.000	
INDIKATOR SDGs :Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/ kapita/hari			
PROGRAM 1: PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			
	Kegiatan 1: Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	28.281.000	Dinas Pangan dan Pertanian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PROGRAM/KEGIATAN		PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
Indikator SDGs Persentase Kasus Stunting di Salatiga			
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			Dinas Kesehatan
	Kegiatan 1 : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	26.945.174.014	
INDIKATOR SDGs: Prevalensi balita Gizi Buruk			
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			Dinas Kesehatan
	Kegiatan 1 : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	26.945.174.014	
INDIKATOR SDGs : Persentase Ibu hamil yang anemia			
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			Dinas Kesehatan
	Kegiatan 1 : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	26.945.174.014	
INDIKATOR SDGS : Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif			
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			Dinas Kesehatan
	Kegiatan 1 : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	26.945.174.014	
INDIKATOR SDGs : Pola Pangan Harapan (Skor PPH)			
PROGRAM 1: PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			Dinas Pangan dan Pertanian
	Kegiatan 1: Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	28.281.000	
	Kegiatan 2: Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	45.000.000	
	Kegiatan 3: Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	122.255.000	
TUJUAN 3: Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia			
Indikator SDGs: Angka Kematian Ibu (AKI).			
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			Dinas Kesehatan
	Kegiatan 1 : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	26.945.174.014	
INDIKATOR SDGs: Angka Kematian Balita (AKaBa) per 1000 kelahiran hidup.			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PROGRAM/KEGIATAN		PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			Dinas Kesehatan
	Kegiatan 1 : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	26.945.174.014	
INDIKATOR SDGs: Prevalensi Hipertensi Penduduk Usai >18 tahun			
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			Dinas Kesehatan
	Kegiatan 1 : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	26.945.174.014	
INDIKATOR SDGs: Proporsi penduduk yang terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obat-obatan antiretroviral			
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			Dinas Kesehatan
	Kegiatan 1 : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	26.945.174.014	
INDIKATOR SDGs: Persentase eks penyandang penyakit sosial (eks. Narapidana, PSK, Narkoba dan penyakit Sosial Lainnya) yang telah terbina (%)			
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			Dinas Sosial
	Kegiatan 1 : Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	15.000.000	
INDIKATOR SDGs : Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba			
PROGRAM: PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			
INDIKATOR SDGs : CPR/ Peserta KB Aktif			
PROGRAM : PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			DP3APPKB
	Kegiatan 1 : Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	83.600.000	
	Kegiatan 2 : Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	145.105.000	
INDIKATOR SDGs : Total Fertility Rate (TFR)			
PROGRAM : PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			DP3APPKB
	Kegiatan 1 : Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	83.600.000	
	Kegiatan 2 : Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	145.105.000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PROGRAM/KEGIATAN		PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
INDIKATOR SDGs : UNMEET NEED			
PROGRAM : PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			DP3APPKB
	Kegiatan 1 : Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	83.600.000	
	Kegiatan 2 : Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	145.105.000	
	Kegiatan 3: Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB	70.000.000	
INDIKATOR SDGs : Persentase cakupan kepesertaan JKN			
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			Dinas Kesehatan
	Kegiatan 1 : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	26.945.174.014	
TUJUAN 4 : Menjamin Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Mempromosikan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat bagi Semua			
Indikator SDGs : Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			Dinas Pendidikan
	Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	88.871.800	
Indikator SDGs :Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat			
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			Dinas Pendidikan
	Kegiatan 1 : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	358.119.244	
Indikator SDGs: Persentase guru layak mengajar SD/ MI, SMP/MTs			
PROGRAM PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN			Dinas Pendidikan
	Kegiatan 1 : Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	8.758.946.600	
INDIKATOR SDGs : Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik			
PROGRAM : PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			Dinas Pendidikan
	Kegiatan 1 : Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	88.871.800	
	Kegiatan 2 : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	411.442.600	
	Kegiatan 3 : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	358.119.244	
TUJUAN 5 : Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan			
Indikator SDGs : Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PROGRAM/KEGIATAN		PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
PROGRAM 1: PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			DP3APPKB
	Kegiatan 1: Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	36.976.000	
	Kegiatan 2: Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten Kota	-	
	Kegiatan 3: Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	68.024.000	
Indikator SDGs : Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Sesuai Standar			
PROGRAM 1: PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			DP3APPKB
	Kegiatan 1: Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	22.065.200	
TUJUAN 6 : Menjamin Ketersediaan Serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua			
INDIKATOR SDGs :Persentase penduduk berakses air minum (Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak)			
PROGRAM: PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR MINUM			Dinas PUPR
	Kegiatan: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	25.001.000	
INDIKATOR SDGs : Persentase Pemenuhan Air Baku			
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum			Dinas PUPR
	Kegiatan 1 : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	25.001.000	
PROGRAM: PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			
	Kegiatan 1 : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	290.001.000	
INDIKATOR SDGs : Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Sanitasi Layak			
PROGRAM: PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			DPUPR
	Kegiatan 1 : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	290.001.000	
INDIKATOR SDGs : Persentase Desa Kelurahan yang melaksanakan STBM			
PROGRAM: PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			Dinas Kesehatan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PROGRAM/KEGIATAN		PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
	Kegiatan 1 : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	26.945.174.014	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	158.375.000	
INDIKATOR SDGs : Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)			
PROGRAM: PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			Dinas Kesehatan
	Kegiatan 1 : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	26.945.174.014	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	158.375.000	
INDIKATOR SDGs : Persentase rumah tangga yang terlayani limbah sistem komunal			
PROGRAM: PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			DPUPR
	Kegiatan 1 : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	290.001.000	
TUJUAN 7 : Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua			
TUJUAN 8 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh serta Layak untuk Semua			
INDIKATOR SDGs : Laju Pertumbuhan PDRB per kapita (laju pertumbuhan PDB per kapita)			
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			Dinas Perdagangan
	Kegiatan 1 : Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	35.000.000	
	Kegiatan 2 : Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	70.000.000	
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			BPKPD
	Kegiatan: Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	3.200.000.000	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			
	Kegiatan 1: Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	865.000.000	
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			Dinas Perdagangan
	Kegiatan 1 : Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	16.266.000	
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN			
	Kegiatan: Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	1.392.000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PROGRAM/KEGIATAN		PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			
	Kegiatan: Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			Dinas Perinaker
	Kegiatan 1 : Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	235.000.000	
PROGRAM PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			Dinas Budpar
	Kegiatan 1 : Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	9.750.000	
	Kegiatan 2: Pengelolaan Destinasi Pariwisata Pariwisata Kabupaten/Kota	14.320.000	
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			
	Kegiatan : Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	780.000.000	
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			
	Kegiatan 1 : Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	11.000.000	
INDIKATOR SDGs :Persentase Tenaga kerja formal (Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis kelamin)			
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	Kegiatan 1 : Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	340.070.691	
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			
	Kegiatan 1: Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	
	Kegiatan 2: Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	180.000.000	
INDIKATOR SDGs :Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur (Idem)			
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	Kegiatan 1 : Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	340.070.691	
INDIKATOR SDGs : Jumlah wisatawan mancanegara			
PROGRAM PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			Dinas Budpar
	Kegiatan 1 : Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	9.750.000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PROGRAM/KEGIATAN		PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
	Kegiatan 2: Pengelolaan Destinasi Pariwisata Pariwisata Kabupaten/Kota	14.320.000	
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			
	Kegiatan 1 : Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	11.000.000	
INDIKATOR SDGs : Jumlah wisatawan nusantara			
PROGRAM PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			Dinas Budpar
	Kegiatan 1 : Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	9.750.000	
	Kegiatan 2: Pengelolaan Destinasi Pariwisata Pariwisata Kabupaten/Kota	14.320.000	
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			
	Kegiatan 1 : Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	11.000.000	
TUJUAN 9 : Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan serta Mendorong Inovasi			
INDIKATOR SDGs : Persentase jalan kabupaten/kota dalam kondisi baik			
Program Penyelenggaraan Jalan			Dinas PUPR
Kegiatan: Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		18.132.036.341	
INDIKATOR SDGs : Rasio emisi co2/ emisi gas rumah kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur			
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			Dinas Lingkungan Hidup
	Kegiatan: Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	58.672.000	
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			
Kegiatan: Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		990.000.000	
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			
Kegiatan: Pengelolaan Kehati Kabupaten/Kota		700.000.000	
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA dan BERACUN (B3) dan LIMBAH BAHAN BERBAHAYA dan BERACUN (LIMBAH B3)			
	Kegiatan 1: Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	33.000.000	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN dan IZIN PERLINDUNGAN dan PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			
	Kegiatan: Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang	29.850.000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PROGRAM/KEGIATAN		PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
	Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			
	Kegiatan: Pengelolaan Sampah	9.138.277.500	
	Kegiatan : Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	40.000.000	
INDIKATOR SDGs : Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca (Penurunan emisi gas rumah kaca sektor industri)			
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			Dinas Lingkungan Hidup
	Kegiatan: Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	58.672.000	
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			
	Kegiatan: Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	990.000.000	
TUJUAN 10 : Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara			
INDIKATOR SDGs: Koefisien Gini (Indeks Gini atau Rasio Gini)			
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			Dinas Perdagangan
	Kegiatan 1 : Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	75.000.000	
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			BPKPD
	Kegiatan: Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	3.200.000.000	
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			Dinas Perdagangan
	Kegiatan 1 : Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	16.266.000,00	
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan
	Kegiatan 1 : Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	235.000.000,00	
PROGRAM PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			Disbudpar
	Kegiatan 1 : Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	9.750.000,00	
	Kegiatan 2: Pengelolaan Destinasi Pariwisata Pariwisata Kabupaten/Kota	14.320.000,00	
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			
	Kegiatan 1 : Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	11.000.000,00	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PROGRAM/KEGIATAN		PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
INDIKATOR SDGs: Tingkat kemiskinan (Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur)			
PROGRAM 1: Program Pemberdayaan Sosial			Dinas Sosial
	Kegiatan 1 : Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	80.000.000,00	
PROGRAM 2: Program Rehabilitasi Sosial			
	Kegiatan 1 : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	85.000.000,00	
	Kegiatan 2 : Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	15.000.000,00	
PROGRAM 3: Program Perlindungan dan Jaminan Sosial			
	Kegiatan 1 : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	771.000.000,00	
TUJUAN 11: Menjadikan Kota dan Permukiman yang Inklusif, Aman Tangguh dan Berkelanjutan			
Indikator SDGs: Cakupan ketersediaan rumah layak huni			
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kegiatan 1 : Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		4.340.000.000,00	
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			
Kegiatan 1 : Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus		530.357.040,00	
INDIKATOR SDGs : Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan			
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Kegiatan: Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	9.440.000,00	
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH			
	Kegiatan: Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.500.000,00	
INDIKATOR SDGs : Persentase Penanganan Sampah			
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			Dinas Lingkungan Hidup
	Kegiatan: Pengelolaan Sampah	9.138.277.500,00	
	Kegiatan : Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	40.000.000,00	
INDIKATOR SDGs : PERSENTASE RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)			
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			Dinas Lingkungan Hidup
Kegiatan: Pengelolaan Kehati Kabupaten/Kota		700.000.000,00	
INDIKATOR SDGs : KELURAHAN SIAGA BENCANA			
PROGRAM: PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			BPBD

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PROGRAM/KEGIATAN		PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
	Kegiatan 1 : Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	135.000.000,00	
	Kegiatan 2 : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	605.000.000,00	
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			
	Kegiatan 1: Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	90.730.800,00	SATPOL PP
	Kegiatan 2: Pemberdayaan masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran		
TUJUAN 12: Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan			
INDIKATOR SDGs : Jumlah peserta PROPER yang mencapai minimal ranking BIRU			
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			
Kegiatan: Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		990.000.000,00	
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA dan BERACUN (B3) dan LIMBAH BAHAN BERBAHAYA dan BERACUN (LIMBAH B3)			
	Kegiatan: Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	33.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN dan IZIN PERLINDUNGAN dan PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			
	Kegiatan: Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	29.850.000,00	
INDIKATOR SDGs : Persentase penyimpanan limbah B3 sesuai dengan ketentuan (Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan).			
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA dan BERACUN (B3) dan LIMBAH BAHAN BERBAHAYA dan BERACUN (LIMBAH B3)			
	Kegiatan 1: Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	33.000.000,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan		Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN dan IZIN PERLINDUNGAN dan PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			
	Kegiatan: Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang	29.850.000,00	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PROGRAM/KEGIATAN		PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
	Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
INDIKATOR SDGs : Persentase Penanganan Sampah (Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang)			
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			Dinas Lingkungan Hidup
	Kegiatan: Pengelolaan Sampah	9.138.277.500,00	
	Kegiatan : Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	40.000.000,00	
TUJUAN 13: Mengatasi langkah segera untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya			
INDIKATOR SDGs : Tersusunnya Profil Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)			
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			Dinas Lingkungan Hidup
	Kegiatan: Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	58.672.000,00	
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			
	Kegiatan: Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	990.000.000,00	
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			
	Kegiatan: Pengelolaan Kehati Kabupaten/Kota	700.000.000,00	
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA dan BERACUN (B3) dan LIMBAH BAHAN BERBAHAYA dan BERACUN (LIMBAH B3			
	Kegiatan 1: Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	33.000.000,00	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN dan IZIN PERLINDUNGAN dan PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			
	Kegiatan: Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	29.850.000,00	
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			
	Kegiatan: Pengelolaan Sampah	9.138.277.500,00	
	Kegiatan : Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	40.000.000,00	
TUJUAN 14: Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan			
TUJUAN 15: Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati			
TUJUAN 16: Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Kokoh			
INDIKATOR SDGs: INDEKS KRIMINALITAS			
PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN dan KETERTIBAN UMUM			SATPOL PP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PROGRAM/KEGIATAN		PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
	Kegiatan 1:Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.387.236.084,00	
	Kegiatan 2 :Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	98.824.000,00	
INDIKATOR SDGs: Cakupan Akta Kelahiran anak usia 0-18 tahun (Persentase anak yang memiliki akta kelahiran)			
Program: PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	Kegiatan 1: Pelayanan Pendaftaran Penduduk	3.000.000,00	
	Kegiatan 2: Penataan Pendaftaran Penduduk	9.000,00	
PROGRAM PENCATATAN SIPIL			
	Kegiatan: Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	42.454.000,00	
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			
	Kegiatan 1: Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	10.650.000,00	
	Kegiatan 2: Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		
INDIKATOR SDGs : Opini BPK Atas Laporan Keuangan			
PROGRAM : PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Kegiatan 1 : Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	727.000.000,00	
	Kegiatan 2: Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	378.120.000,00	
	Kegiatan 3: Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	425.000.000,00	
	Kegiatan 5: Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	3.200.000.000,00	
	Kegiatan 6: Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	200.000.000,00	
INDIKATOR SDGs : Nilai SAKIP			
PROGRAM : PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			Inspektorat
	Kegiatan 1: Penyelenggaraan Pengawasan Internal	80.000.000,00	
INDIKATOR SDGs : Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks RB)			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PROGRAM/KEGIATAN		PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			Sekretariat Daerah
	Kegiatan 1: Penataan Organisasi	161.200.000,00	
PROGRAM : PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			Dinas Komunikasi dan Informatika
	Kegiatan 1: Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	148.700.000,00	Informatika
INDIKATOR SDGs: Tingkat Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik			
PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			Sekretariat Daerah
	Kegiatan 1: Penataan Organisasi	161.200.000,00	
TUJUAN 17: Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan			
INDIKATOR SDGs: Rasio Penerimaan Pajak Pemerintah Daerah terhadap PDRB			
PROGRAM : PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Kegiatan 1: Pengelolaan Pendapatan Daerah	865.000.000,00	

5.1.1.5. Program prioritas pendukung Penerapan SPM

Penentuan dan pemetaan program pelaksana penerapan SPM Tahun 2027 dalam RKPD Kota Salatiga Tahun 2027 adalah sebagai berikut

Tabel 5. 8 Akomodasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kota Salatiga Tahun 2027

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JENIS LAYANAN DASAR	PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
JENIS SPM : SPM BIDANG PENDIDIKAN			
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			Dinas Pendidikan
Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	1.500.000	
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Sekolah	135.000.000	
Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Literasi dan Numerasi	2.700.000	
Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Literasi dan Numerasi	1.700.000	
Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Literasi dan Numerasi	1.800.000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JENIS LAYANAN DASAR	PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Literasi dan Numerasi	4.000.000	
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Literasi dan Numerasi	5.400.000	
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Literasi dan Numerasi	89.682.800	
Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Angka Partisipasi Sekolah	5.000.000	
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Kekhususan PAUD	8.250.000	
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Kekhususan PAUD	1.305.300	
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Kekhususan PAUD	4.000.000	
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Kekhususan PAUD	2.919.600	
Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Angka Partisipasi Sekolah	16.000.000	
Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	2.935.000	
Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	1.475.000	
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	15.502.000	
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Angka Partisipasi Sekolah	1.280.000	
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	3.360.000	
Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Keamanan, Kebhinekaan, dan Inklusivitas	71.027.044	
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			
Kegiatan : Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JENIS LAYANAN DASAR	PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Literasi dan Numerasi	8.552.076.600	
Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Literasi dan Numerasi	206.870.000	
JENIS SPM : SPM BIDANG KESEHATAN			
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			Dinas Kesehatan
Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Pelayanan Kesehatan Balita	33.899.360	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	13.086.150	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	32.540.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	216.819.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	16.335.800	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	346.300.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Pelayanan Kesehatan orang terduga Tuberkulosis	92.656.812	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	15.275.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	5.000.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	16.006.200	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	25.650.000	
JENIS SPM : SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			Dinas Pekerjaan Umum dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JENIS LAYANAN DASAR	PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
			Penataan Ruang
Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	290.000.000	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			
Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000	
JENIS SPM : SPM BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kegiatan : Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			
Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	
Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota	-	
Kegiatan : Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			
Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	
JENIS SPM : SPM BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			Satuan Polisi Pamong Praja

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JENIS LAYANAN DASAR	PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
Kegiatan : Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota	288.094.084	
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kegiatan : Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	40.000.000	
Kegiatan : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			
Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	40.000.000	
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	500.000.000	
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	25.000.000	
Kegiatan : Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Pelayanan dan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	75.000.000	
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Pelayanan dan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	25.000.000	
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Pelayanan dan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	20.000.000	
Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Pelayanan dan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	15.000.000	
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			Satuan Polisi Pamong Praja
Kegiatan : Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JENIS LAYANAN DASAR	PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	76.030.800	
Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	14.700.000	
JENIS SPM : SPM BIDANG SOSIAL			
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			Dinas Sosial
Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			
Penyediaan Permakanan	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	45.000.000	
Penyediaan Alat Bantu	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	10.000.000	
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	15.000.000	
Pemberian Layanan Kedaruratan	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	15.000.000	

5.1.1.6. Program prioritas pendukung Kebijakan Nasional untuk Penurunan Stunting

Perwujudan peran pemerintah daerah dalam mendukung penurunan stunting adalah berupa sinkronisasi program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan. Kebijakan Pemerintah pusat berupa “Antisipasi Generasi Stunting Guna Mencapai Indonesia Emas 2045”, merupakan salah satu kebijakan yang diadopsi pada perencanaan pembangunan pada tahun 2027. Pada RKPD tahun 2027 dilakukan penentuan dan pemetaan program pelaksana penerapan Penurunan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Stunting. Penentuan dan pemetaan program pelaksana penerapan Penurunan Stunting Tahun 2026 dalam RKPD Kota Salatiga tahun 2027 adalah sebagai berikut.

Tabel 5. 9 Akomodasi untuk Kebijakan Penurunan Stunting Tahun 2027

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	URUSAN	PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pendidikan		Dinas Pendidikan
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100.000.000	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pendidikan		
Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		1.500.000	
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan		2.700.000	
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik		89.682.800	
Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		5.000.000	
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan		-	
Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD		5.000.000	
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD		-	
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD		8.250.000	
Pengelolaan Dana BOP PAUD		-	
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		41.349.700	
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan		1.305.300	
Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD		6.318.800	
Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		15.502.000	
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan		-	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kesehatan		Dinas Kesehatan
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	URUSAN	PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		200.000.000	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kesehatan		
Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		2.032.791.380	
Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan		7.013.725.500	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga		-	
Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		216.819.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		32.540.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		13.086.150	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		33.899.360	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		5.000.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		16.006.200	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		198.378.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		158.375.000	
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		38.640.000	
Pengelolaan Surveilans Kesehatan		33.425.000	
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		-	
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		24.723.952.481	
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		30.400.000	
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak		900.000	
Kegiatan : Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat		109.212.960	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	URUSAN	PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			
Kegiatan : Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)			
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		44.475.000	
Kegiatan : Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga			
Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan		157.296.435	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Kesehatan		
Kegiatan : Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		5.123.340.160	
Kegiatan : Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat		601.982.250	
Kegiatan : Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		-	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		250.000.000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	URUSAN	PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		-	
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		25.000.000	
Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		1.000	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman		-	
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)		290.000.000	
Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat		1.000	
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)		-	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perumahan dan Kawasan Permukiman		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		150.000.000	
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Perumahan dan Kawasan Permukiman		
Kegiatan : Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			
Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh		4.340.000.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta		Satuan Polisi Pamong Praja

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	URUSAN	PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
	Perlindungan Masyarakat		
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		54.000.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		25.000.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sosial		Dinas Sosial
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		90.000.000	
Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		5.000.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Sosial		
Kegiatan : Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			
Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan		37.225.000	
Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial		17.775.000	
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		25.000.000	
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Sosial		
Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			
Penyediaan Permakanan		45.000.000	
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Sosial		
Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		730.000.000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	URUSAN	PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		103.000.000	
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
Kegiatan : Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			
Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga		36.725.000	
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
Kegiatan : Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota			
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		25.105.000	
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		-	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
Kegiatan : Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))		35.000.000	
Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)		-	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	URUSAN	PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
Kegiatan : Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			
Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)		-	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pangan		Dinas Pangan dan Pertanian
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		90.029.664	
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pangan		
Kegiatan : Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			
Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		-	
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		-	
Kegiatan : Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi			
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		122.255.000	
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pangan		
Kegiatan : Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota			
Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota		25.000.000	
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Kelautan dan Perikanan		
Kegiatan : Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota			
Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		15.000.000	
Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		-	
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pertanian		
Kegiatan : Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian			
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa		15.000.000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	URUSAN	PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Lingkungan Hidup		Dinas Lingkungan Hidup
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		86.705.000	
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Lingkungan Hidup		
Kegiatan : Pengelolaan Sampah			
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan		116.000.000	
Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan		1.782.277.500	
Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional		7.200.000.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		115.500.000	
Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		300.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perhubungan		Dinas Perhubungan
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		205.366.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Komunikasi dan Informatika		Dinas Komunikasi dan Informatika
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		70.002.000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	URUSAN	PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Komunikasi dan Informatika		
Kegiatan : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
Sosialisasi/Diseminasi Informasi serta Pengelolaan Media Komunikasi Publik		37.200.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		190.000.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
Kegiatan : Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha		280.000.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
Kegiatan : Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan			
Pembinaan dan Fasilitasi Perizinan Berusaha bagi UMKM		150.000.000	
Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/Pelaku Usaha		471.000.000	
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
Kegiatan : Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil			
Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi		-	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	URUSAN	PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penanaman Modal		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		75.000.000	
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Penanaman Modal		
Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			
Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		52.000.000	
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Penanaman Modal		
Kegiatan : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha		16.600.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kepemudaan dan Olahraga		Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		202.420.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kebudayaan		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		50.000.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perpustakaan		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		20.000.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perdagangan		Dinas Perdagangan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	URUSAN	PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		80.000.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perindustrian		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		155.000.000	
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Perindustrian		
Kegiatan : Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		200.000.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sekretariat Daerah		Sekretariat Daerah
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1.907.260.262	
Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		7.845.000	
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Sekretariat Daerah		
Kegiatan : Fasilitasi dan Koordinasi Hukum			
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah		35.216.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sekretariat DPRD		Sekretariat DPRD
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1.000.000.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan		Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		289.612.279	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	URUSAN	PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Perencanaan		
Kegiatan : Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		17.386.400	
Kegiatan : Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		30.432.000	
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Perencanaan		
Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		7.000.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Keuangan		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		250.000.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kepegawaian		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		145.765.500	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Inspektorat		Inspektorat
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		300.000.000	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		5.000.000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	URUSAN	PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan		Kecamatan Argomulyo
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100.000.000	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan		
Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		72.379.500	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan		
Kegiatan : Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		2.050.569.100	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan		Kecamatan Sidomukti
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		85.546.365	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan		
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		98.200.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan		
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		1.497.262.200	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan		Kecamatan Sidorejo
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		120.000.000	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan		
Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		55.000.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan		
Kegiatan : Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		2.148.428.100	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	URUSAN	PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan		Kecamatan Tingkir
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		70.000.000	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan		
Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		61.924.323	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan		
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		2.262.529.540	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kesatuan Bangsa dan Politik		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		125.479.000	

5.1.1.7. Program prioritas pendukung Kebijakan Nasional untuk Penurunan Kemiskinan

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Kota Salatiga mendukung strategis nasional dalam melaksanakan optimalisasi pelaksanan pengentasa kemisikinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran melalui strategi kebijakan yang meliputi :

1. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat, diselenggarakan melalui program bantuan sosial, jaminan sosial, subsidi, program stabilitas harga, dan/atau program lainnya yang dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat;
2. Peningkatan pendapatan masyarakat, diselenggarakan melalui peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat;
3. Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Untuk pelaksanaan tahun 2027 diarahkan sebagai berikut :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 5. 10 Akomodasi untuk Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Tahun 2027

No	Strategi	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
1	Mengurangi Beban Pengeluaran	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	977.104.291	DINAS PENDIDIKAN
		Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	411.442.600	
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	
		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	89.682.800	
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	135.000.000	
		Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	358.119.244	
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	64.500.000	
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	-	
		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	133.975.300	
		Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	88.871.800	
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	12.000.000	
		Pengelolaan Dana BOP PAUD	-	
		Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	118.670.647	
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	16.000.000	
		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	-	
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	-	
		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	-	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	42.735.325.999	DINAS KESEHATAN
		Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	15.685.282.265	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	-	
		Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	26.945.174.014	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Strategi	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	216.819.000	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	32.540.000	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	13.086.150	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	33.899.360	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	5.000.000	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	16.006.200	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	25.650.000	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	92.656.812	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	346.300.000	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	198.378.000	
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	24.723.952.481	
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	882.500.000	BPBD
		Kegiatan : Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	40.000.000	
		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	40.000.000	
		Kegiatan : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	605.000.000	
		Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	20.000.000	
		Kegiatan : Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	135.000.000	
		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	25.000.000	
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	20.000.000	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	80.000.000	DINAS SOSIAL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Strategi	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
		Kegiatan : Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	80.000.000	
		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	-	
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	25.000.000	
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	-	
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	100.000.000	DINAS SOSIAL
		Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	85.000.000	
		Penyediaan Permakanan	45.000.000	
		Penyediaan Alat Bantu	10.000.000	
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	15.000.000	
		Pemberian Layanan Kedaruratan	15.000.000	
		Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	15.000.000	
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	-	
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	771.000.000	DINAS SOSIAL
		Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	771.000.000	
		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	41.000.000	
		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	730.000.000	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	35.000.000	DP3APPKB
		Kegiatan : Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga	-	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Strategi	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
		Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		
		Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	-	
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	198.755.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
		Kegiatan : Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	45.000.000	
		Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	-	
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	5.159.000	DISDUKCAPIL
		Kegiatan : Penataan Pendaftaran Penduduk	9.000	
		Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	9.000	
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	10,650,000	DISDUKCAPIL
		Kegiatan : Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	10.650.000	
		Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	9.000.000	
		Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	1.650.000	
		Kegiatan : Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	
		Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	
		Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	-	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Strategi	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	461,000,000	DISPERINAKER
		Kegiatan : Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	37.000.000	
		Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	37.000.000	
		Kegiatan : Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	424.000.000	
		Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	200.000.000	
2	Meningkatkan Pendapatan	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	25.000.000	DP3APPKB
		Kegiatan : Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000	
		Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	25.000.000	
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
		Kegiatan : Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	122.255.000	
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	122.255.000	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	115.000.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
		Kegiatan : Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	35.000.000	
		Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	35.000.000	
		Kegiatan : Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	80.000.000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Strategi	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	65.000.000	
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	30.000.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
		Kegiatan : Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	15.000.000	
		Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000	
		Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	307.126.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
		Kegiatan : Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	20.000.000	
		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	20.000.000	
		Kegiatan : Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	-	
		Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	-	
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	60.000.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
		Kegiatan : Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	60.000.000	
		Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	60.000.000	
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	15.000.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
		Kegiatan : Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	15.000.000	
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	15.000.000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Strategi	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	450.000.000	DINKOP UKM
		Kegiatan : Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	450.000.000	
		Pembinaan dan Fasilitasi Perkuatan Produk UMKM Pasar Dalam Negeri	450.000.000	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	6.500.000	DISBUDPAR
		Kegiatan : Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	6.500.000	
		Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	6.500.000	
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	340.070.691	DISPERINAKER
		Kegiatan : Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	340.070.691	
		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	340.070.691	
		Kegiatan : Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	-	
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	-	
3	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	977.104.291	DINAS PENDIDIKAN
		Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	411.442.600	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	-	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	-	
		Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	358.119.244	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	-	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	-	
		Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	118.670.647	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	-	
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	3.012.444.000	DPU PR

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Strategi	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
		Kegiatan : Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.361.944.000	
		Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	300.000.000	
		Pembangunan Tanggul Sungai	2.061.944.000	
		Kegiatan : Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	650.500.000	
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	450.500.000	
		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	200.000.000	
		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	-	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	25.001.000	DPU PR
		Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	25.001.000	
		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	25.000.000	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	290.001.000	DPU PR
		Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	290.001.000	
		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	290.000.000	
		Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	1.000	
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	-	
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	610.357.040	DINAS PKP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Strategi	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
		Kegiatan : Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	
		Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	-	
		Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	-	
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	4.340.000.000	DINAS PKP
		Kegiatan : Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	4.340.000.000	
		Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	4.340.000.000	
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	5.976.887.793	DINAS PKP
		Kegiatan : Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	5.976.887.793	
		Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	100.000.000	
		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	3.115.187.793	
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	3.219.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
		Kegiatan : Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	3.219.000	
		Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	3.219.000	
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	195.536.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
		Kegiatan : Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	45.000.000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Strategi	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
		Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	45.000.000	
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	8.500.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
		Kegiatan : Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	8.500.000	
		Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	8.500.000	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	46.362.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
		Kegiatan : Pembangunan Prasarana Pertanian	46.362.000	
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	-	
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	46.362.000	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	12.946.695.163	DINAS PERHUBUNGAN
		Kegiatan : Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	40.000.000	
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	40.000.000	
		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	55.000.000	DISPERINAKER
		Kegiatan : Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	55.000.000	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	55.000.000	

5.1.2. Rencana Kerja Prioritas Kedua

Rencana program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan tahun 2027 dijabarkan dalam 6 (enam) urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, 17 (tujuh belas) urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan, 2 (dua) unsur pendukung

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

urusan pemerintahan, 6 (enam) unsur penunjang urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur pengawasan urusan pemerintahan, dan 1 (satu) unsur pemerintahan umum.

5.1.2.1. Urusan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar

5.1.2.1.1. Pendidikan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1) Program Pengelolaan Pendidikan

Program ini diarahkan pada peningkatan partisipasi anak usia sekolah dengan kegiatan pada pengelolaan pendidikan SD, pengelolaan pendidikan SMP dan pengelolaan pendidikan PAUD, serta pengelolaan pendidikan non formal/kesetaraan meiputi Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik; Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah; Kapasitas Tenaga Pengelola Dana BOS; Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan; konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan; pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan; Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan; sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan; Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi; pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi; Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan; penyediaan Biaya Personil Peserta Didik; Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan. Ukuran keberhasilan pelaksanaan program ditunjukkan dengan 21 indikator, yaitu : Angka Partisipasi Sekolah PAUD - SD/MI - SMP/MTs - Pendidikan Kesetaraan; Angka Putus Sekolah SD/MI - SMP/MTs; Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik SD/MI- SMP/MTs; Persentase sekolah TK yang memenuhi standar Holistik Integratif dengan kategori sedang; Persentase Kondisi Kelas PAUD dalam Kondisi Baik; Kondisi Sarpras Pendidikan Kesetaraan baik; Rata-rata kemampuan literasi / Numerasi SD-SMP berdasarkan Asesmen Nasional; Iklim Kebhinekaan SD-SMP; Iklim Keamanan SD-SMP; Iklim Inklusivitas SD-SMP

2) Program Pengembangan Kurikulum

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas kurikulum pendidikan ditandai dengan 3 indikator. Pertama, persentase sekolah yang telah menerapkan kegiatan yang dapat dikembangkan menjadi kurikulum mulok jenjang SD/MI, Kedua, persentase Sekolah yang telah menerapkan kegiatan yang dapat dikembangkan menjadi kurikulum mulok jenjang SMP/MTs, Ketiga, persentase sekolah yang menerapkan kegiatan yang dapat dikembangkan menjadi kurikulum mulok jenjang PKBM.

3) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program ini diarahkan pada peningkatan mutu dan distribusi institusi pendidikan ditandai dengan 6 indikator yaitu : Persentase Guru bersertifikat pendidik Jenjang TK/RA – SD – SMP; Persentase Pendidik yang telah memenuhi kualifikasi Minimal S1 jenjang PAUD – SD – SMP.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4) Program Pengendalian dan Perizinan Pendidikan

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas dan distribusi institusi pendidikan yang ditandai dengan 5 indikator, yaitu : Persentase TK/RA - PKBM yang terakreditasi; Persentase lembaga Kursus dan Pelatihan yang berijin; Persentase Sekolah yang memiliki ijin operasional jenjang SD/MI – SMP/MTs.

5) Program Pengembangan Bahasa dan Sastra

Program ini diarahkan pada terlestarikannya bahasa dan sastra daerah ditandai dengan 3 indikator, yaitu persentase Sekolah yang mengembangkan model pembelajaran bahasa jawa jenjang SD/MI, persentase Sekolah yang mengembangkan model pembelajaran bahasa jawa jenjang SMP/MTs, persentase PKBM yang sudah memasukkan pembelajaran Bahasa Jawa pada mata pelajaran yang diberikan ke siswa.

5.1.2.1.2. Kesehatan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.

Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat Kota, penyediaan fasilitas pelayanan, sarana prasarana dan alat kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat Kota, penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi, penerbitan izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Kota. Program ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat yang ditandai denngan 60 indikator kinerja. Pengukuran kinerja program tersebut diukur melalui :

- Angka Kematian balita (AKABA) per 1000KH.
- Capaian penemuan kasus TB (Notifikasi kasus TB).
- Prosentase pasien TBC yang memulai pengobatan (Errollment TBC
- Cakupan pemberian terapi pencegahan pada orang kontak serumah,
- Annual Parasite Incidence (API) per 1.000 penduduk.
- Jumlah Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
- Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan KKS (SK Forkom kec, SK Pokja Kel, Sekretariat, Rencana Kegiatan, Anggaran).
- Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan pengawasan kualitas udara dalam ruang memenuhi syarat.
- Persentase Puskesmas Yang memfasilitasi Kelurahan Sehat Iklim
- Persentase rumah tangga dengan kualitas air minum memenuhi syarat,
- Persentase sarana air minum yang memenuhi syarat.
- Cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan,
- Cakupan bayi baru lahir yang mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD),
- Cakupan Bayi Usia Kurang 6 Bulan Mendapat ASI Eksklusif,
- Cakupan imunisasi di usia sekolah dasar.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- Cakupan Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang Mendapat Makanan Tambahan.
- Cakupan Ibu Hamil yang Mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) Minimal 90 Tablet Selama Masa Kehamilan
- Cakupan ibu nifas mendapat kapsul Vitamin A.
- Cakupan kepesertaan JKN.
- Cakupan kepesertaan JKN Aktif
- Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar.
- Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir
- Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin
- Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil
- Cakupan Pelayanan kesehatan Ibu Nifas (KF3)
- Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia.
- Persentase lanjut usia yang mandiri.
- Persentase depresi yang mendapatkan layanan.
- Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV.
- Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TB.
- Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar.
- Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif.
- Prevalensi Obesitas > 18 tahun.
- Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis.
- Persentase merokok penduduk 10-21 tahun.
- Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus.
- Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi.
- Cakupan pembinaan remaja di sekolah.
- Cakupan Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional.
- Cakupan Puskesmas yang melaksanakan Perkesmas.
- Cakupan Remaja Putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD).
- Cakupan Tempat Fasilitas Umum (TFU) yang memenuhi syarat higiene sanitasi.
- Deteksi Dini Triple Eliminasi Ibu Hamil.
- Imunisasi Dasar Lengkap (IDL.
- Incident Rate DBD per 100.000 penduduk.
- Kasus HIV/ AIDS baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV.
- Nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan Dinas Kesehatan.
- Persentase penduduk dengan aktivitas fisik cukup .
- Persentase tempat kerja formal yang melaksanakan kesehatan kerja.
- Persentase tempat kerja informal yang melaksanakan kesehatan kerja.
- Penemuan kasus AFP (Acute Flaccid Paralysis)
- Persentase Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (Berat Badan kurang dari 2500 gram)
- Persentase Ibu hamil KEK.
- Persentase Ibu Hamil yang Anemia.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional.
- Proporsi jamaah haji Kota Salatiga yang mendapat pemeriksaan dan pembinaan kesehatan sesuai standar.
- Persentase Pustu, Puskesmas, dan RSUD yang memenuhi standar Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan (SPA) dan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar.
- Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk per 1000 penduduk.
- Tertanganinya KLB/Bencana dalam 1 x 24 jam.
- Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi.

2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Program ini diarahkan pada kegiatan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat Kota serta distribusi tenaga kesehatan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai 4 indikator kinerja yaitu persentase tenaga kesehatan yang sudah mengikuti pelatihan sesuai kompetensinya; Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi; Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar; dan Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar.

3) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

Program ini diarahkan pada kegiatan pemberian izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), penerbitan sertifikat produksi Pangan industri rumah tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin produksi untuk produk makanan dan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga serta penerbitan sertifikat laik hygiene, sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum. Program ini dilaksanakan dengan sasaran meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi alat kesehatan, dan makanan minuman, ditandai dengan 5 indikator yang yaitu : Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan; Persentase pangan Industri Rumah Tangga aman dan bermutu; Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP-IRT; Persentase apotek dan toko obat yg mampu memelihara persyaratan perijinan; dan Cakupan TPM yang memenuhi syarat higiene sanitasi.

4) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Program ini diarahkan pada kegiatan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat Kota. Program ini dilaksanakan untuk mencapai meningkatnya meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan, ditandai dengan 7 indikator, yaitu : Cakupan desa siaga strata mandiri; Cakupan PHBS tatanan rumah tangga strata paripurna; Cakupan PHBS tatanan institusi pendidikan strata paripurna; Cakupan PHBS tatanan institusi kesehatan sehat; Cakupan PHBS tatanan tempat kerja sehat; Cakupan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PHBS tatanan tempat umum sehat; dan Cakupan sosialisasi dan edukasi Kawasan Tanpa Rokok.

5) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini diarahkan pada pencapaian sasaran meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan, Nilai SAKIP Perangkat Daerah, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Rumah Sakit dan seluruh Puskesmas serta Cost Recovery Rumah Sakit.

5.1.2.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai (WS) dalam 1 (satu) Kota, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Kota. Program ini dilaksanakan dengan sasaran meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi dengan indikator kinerja Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota.

2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kota. Program ini dilaksanakan dengan sasaran meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum, ditandai dengan indikator Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan.

3) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dengan sasaran meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah, ditandai dengan indikator Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman.

4) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dengan sasaran meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan, ditandai dengan indikator persentase jaringan drainase kondisi baik.

5) Program Penataan Bangunan Gedung

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Kota, pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bangunan gedung melalui perencanaan, pembangunan, pengawasan, dan pemanfaatan bangunan gedung melalui pemberian rekomendasi teknis IMB dan SLF. Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas bangunan gedung, dengan indikator kinerja Persentase Bangunan Gedung Negara milik Pemerintah Kota dalam Kondisi Baik.

6) Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya dengan sasaran meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata, yang ditandai dengan indikator kineja Persentase penataan bangunan dan lingkungan.

7) Program Penyelenggaraan Jalan

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan jalan Kota melalui perencanaan, pembangunan jalan dan jembatan, updating kondisi jalan dan jembatan, peningkatan struktur jalan serta melakukan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan untuk mencapai sasaran meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman dengan indikator Rasio kemantapan jalan.

8) Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi, dengan sasaran pada meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi, yang ditandai dengan indikator kinerja jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi analis/teknisi operator terlatih dan tersertifikasi.

9) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Program ini diarahkan pada kegiatan penetapan RTRW dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR), koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah, koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah, dengan sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang yang ditandai dengan indikator kinerja jumlah KKPR yang diterbitkan.

5.1.2.1.4. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) Program Pengembangan Perumahan

Program ini diarahkan melalui kegiatan penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai sasaran terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat pemerintah, ditandai dengan 2 indikator, yaitu persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni korban bencana atau relokasi kabupaten/kota dan persentase fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota.

2) Program Kawasan Permukiman

Program ini diarahkan dalam rangka meningkatkan kualitas kawasan permukiman melalui peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ha. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani.

3) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Program ini diarahkan pada kegiatan urusan penyelenggaraan prasarana sarana utilitas perumahan dalam rangka untuk mencapai sasaran meningkatnya penyediaan PSU Permukiman ditandai dengan indikator kinerja cakupan perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum).

4) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Program ini diarahkan pada kegiatan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah Kabupaten/Kota dalam rangka mencapai target indikator kinerja cakupan rumah tidak layak huni yang diperbaiki.

5.1.2.1.5. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1) Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Program ini diarahkan pada kegiatan Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Perda dan Perwali dan juga Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk mencapai sasaran meningkatnya kapasitas SDM PPNS dengan indikator kinerja indikator Persentase Penegakan Perda dan Per Ka Da (Prosentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada) dan Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (prosentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran).

2) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Program ini diarahkan pada kegiatan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran, dan kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran untuk mencapai sasaran sasaran meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dengan indikator kinerja Persentase ketersediaan Sarana Prasarana Damkar, Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Kebakaran (Waktu tanggap (respone time) penanganan kebakaran, dan Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

3) Program Penanggulangan Bencana

Program ini diarahkan pada kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana, Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan, Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban dan penataan sistem dasar penanggulangan bencana. Program ini dilaksanakan untuk mencapai sasaran Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat yang ditandai dengan indikator Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana) dan sasaran meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana, ditandai dengan 2 indikator, yaitu Persentase Cakupan Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana (Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana) dan Persentase Cakupan Layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana).

5.1.2.1.6. Sosial

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) Program Pemberdayaan Sosial

Program ini diarahkan pada kegiatan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial untuk mencapai sasaran meningkatnya pemberdayaan sosial dengan indikator kinerja

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan sosial yang meningkat Kualitasnya dalam pelayanan sosial.

2) Program Rehabilitasi Sosial

Program ini diarahkan pada kegiatan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial, dan Rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar Panti Sosial. Program ini dilaksanakan untuk mencapai peningkatan rehabilitasi sosial yang ditandai dengan 4 indikator kinerja yaitu Presentase Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti, Presentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti, Presentase Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti, Presentase Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti.

3) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kota untuk mencapai sasaran program meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial dengan indikator kinerja persentase Data Fakir Miskin yang divalidasi.

4) Program Penanganan Bencana

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kota untuk mencapai sasaran program meningkatnya perlindungan sosial korban dan bencana dengan indikator kinerja Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota.

5) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Program ini diarahkan pada kegiatan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kota dengan sasaran meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan, ditandai dengan indikator persentase TMP yang terkelola dengan baik.

5.1.2.2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

5.1.2.2.1. Tenaga Kerja

1) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan pelatihan kerja berdasarkan unit kompetensi. Program ini dilaksanakan untuk mencapai sasaran meningkatnya produktivitas tenaga kerja indikator kinerja dengan indikator Persentase Tenaga Kerja yang bersertifikat kompetensi.

2) Program Penempatan Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan informasi pasar kerja. Program ini dilaksanakan untuk mencapai sasaran meningkatnya penempatan tenaga kerja, dengan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

indikator Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah.

3) Program Hubungan Industrial

Program ini diarahkan pada kegiatan pengesahan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan dan kegiatan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai sasaran meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi dengan indikator kinerja Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).

5.1.2.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Program ini diarahkan pada kegiatan Pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/kota dan Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota, dengan sasaran meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan. Target kinerja dari program ini adalah Persentase Kelembagaan PUG Aktif dan Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG.

2) Program Perlindungan Perempuan

Program ini diarahkan pada kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, Penyediaan layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan Kabupaten/kota, dan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota untuk mewujudkan sasaran program menurunnya kekerasan terhadap perempuan. Target kinerja ditunjukkan dengan indikator Persentase perempuan korban kekerasan yang ditangani sesuai standar dan Persentase UPTD PPA sesuai standar layanan.

3) Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Program ini diarahkan pada kegiatan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat daerah kabupaten/kota dengan target kinerja Persentase PKK aktif.

4) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Program ini diarahkan pada kegiatan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/kota untuk mencapai sasaran program meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak dengan target kinerja Persentase Perangkat Daerah yang berkontribusi dalam sistem data gender dan anak.

5) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Program ini diarahkan pada kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota. Program ini dilaksanakan untuk mencapai sasaran program meningkatnya

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

pemanfaatan data gender dan anak dengan target indikator kinerja Persentase kelembagaan forum anak yang aktif.

6) Program Perlindungan Khusus Anak

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Program ini dilaksanakan untuk mencapai sasaran program terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif dengan target indikator kinerja Persentase korban kekerasan anak yang mendapat layanan komprehensif.

5.1.2.2.3. Pangan

1) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan; pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan kabupaten/kota dan pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi. Program ini direncanakan untuk mencapai sasaran program meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat dengan target kinerja Rasio jumlah cadangan beras pemerintah daerah (CBPD) terhadap target jumlah CBPD berdasarkan Perbadan 15/2023.

2) Program Penanganan Kerawanan Pangan

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan untuk mencapai sasaran program meningkatnya penanganan kerawanan pangan dengan target kinerja Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan.

3) Program Pengawasan Keamanan Pangan

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar daerah kabupaten/kota untuk mencapai sasaran program meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan dengan target kinerja Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan.

5.1.2.2.4. Pertanahan

1) Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi.

2) Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk mencapai sasaran meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

ditandai dengan indikator persentase peningkatan penggunaan dan pemanfaatan tanah.

3) Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee

Program ini diarahkan pada kegiatan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan sasaran meningkatnya akses masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), ditandai dengan indikator Persentase bidang tanah yang diretribusi.

4) Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah

Program ini diarahkan pada kegiatan Penerbitan Izin Membuka Tanah dengan indikator persentase luas lahan bersertifikat.

5.1.2.2.5. Lingkungan Hidup

1) Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan pada peningkatan efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP, yang ditandai dengan indikator Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan LH.

2) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan pada kegiatan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota dengan sasaran program menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dengan kinerja pada Persentase pemantauan status mutu air dan Persentase pemeliharaan sarana prasarana laboratorium.

3) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten/kota dengan sasaran program meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati. Target kinerja program Persentase Ruang Terbuka Hijau Tingkat Kota.

4) Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)

Program ini diarahkan pada kegiatan pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota dengan target capaian persentase kelompok masyarakat yang memahami rencana aksi pengurangan dan penghapusan peralatan bermerkuri dan indikator Persentase sampah spesifik yang mengandung bahan berbahaya beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya beracun (limbah B3) yang terkumpul. Sedangkan sasaran program pada meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3).

5) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Program ini diarahkan pada kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan. Indikator capaian program ini adalah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Persentase kegiatan penegakan hukum lingkungan dengan sasaran meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan.

6) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan dengan sasaran meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup. Indikator capaian program ini adalah Persentase kelompok masyarakat yang memperoleh penyuluhan, kampanye dan pelatihan lingkungan hidup.

7) Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk masyarakat

Program ini diarahkan pada kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan sasaran meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Indikator capaian program ini adalah persentase penghargaan lingkungan hidup yang terfasilitasi.

8) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota dengan sasaran meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup. Indikator capaian program ini adalah Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti.

9) Program Pengelolaan Persampahan

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan persampahan dan pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak Swasta, dengan sasaran program meningkatnya tata kelola persampahan. Indikator kinerja untuk program ini adalah Persentase penanganan sampah dan Persentase pengurangan sampah perkotaan.

5.1.2.2.6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1) Program Pendaftaran Penduduk

Program ini diarahkan pada kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Penataan Pendaftaran Penduduk, dan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, dengan sasaran program meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk. Indikator yang ditargetkan untuk dicapai melalui pelaksanaan program ini adalah Perekaman KTP-Elektronik dan Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA.

2) Program Pencatatan Sipil

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan pencatatan sipil, dengan sasaran program meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil. Target capaian program adalah Persentase Penduduk usia 0 - 18 tahun yang mempunyai Akte Kelahiran.

3) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Program ini diarahkan pada kegiatan pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dengan sasaran program meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan. Indikator kinerja program adalah Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama.

5.1.2.2.7. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1) Program Pengendalian Penduduk

Program ini diarahkan pada kegiatan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk dan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten/kota. Capaian indikator program ini yaitu Persentase OPD yang mengintegrasikan dokumen GDPK 5 pilar ke dalam dokumen Perencanaan daerah, Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan, Cakupan PUS yang istrinya di bawah 20 tahun dan Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP), dengan sasaran program meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak.

2) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal dan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah kabupaten/kota dengan sasaran program pada meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB). Capaian program ditunjukkan dengan indikatror kinerja : Rasio akseptor KB baru, Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49, Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmetneed), Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), Persentase Modern Contraceptive Prevelance Rate (mCPR), Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) dan Demand Satisfied (Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi).

3) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dan pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/ kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dengan sasaran program meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera. Capaian program ditunjukkan dengan indikator kinerja : Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD), Cakupan Balita/ Anak dengan Tumbuh Kembang sesuai dengan Kartu Kembang Anak (KKA), Cakupan Kader BKB yang Terlatih, Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber-KB, Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri, Indeks Lansia Berdaya dan Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja.

5.1.2.2.8. Perhubungan

1) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota, Pengelolaan teminal penumpang Tipe C, pengujian berkala kendaraan bermotor, dan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota dengan sasaran program pada meningkatnya kualitas layanan transportasi darat. Capaian program ditunjukkan dengan indikator kinerja Rasio konektivitas kabupaten/kota, Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Kabupaten/Kota dan Kinerja Lalu Lintas.

5.1.2.2.9. Komunikasi dan Informatika

1) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota guna mencapai sasaran meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah, ditandai dengan indikator persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah.

2) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota dan pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota guna mencapai sasaran program meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika dengan indikator kinerja Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo dan Persentase pelayanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi.

5.1.2.2.10. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

1) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Program ini diarahkan pada kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sasaran meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi, ditandai dengan indikator presentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi.

2) Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Program ini diarahkan pada kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan sasaran meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi, ditunjukkan dengan indikator persentase koperasi yang berkualitas.

3) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Program ini diarahkan pada kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian progam persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan untuk mewujudkan sasaran program meningkatnya kualitas SDM perkoperasian.

4) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Program ini diarahkan pada kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota, dengan sasaran program meningkatnya produktivitas koperasi. Capaian program diukur dengan indikator kinerja persentase koperasi aktif.

5) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)

Program ini diarahkan pada kegiatan pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan yang dilakukan untuk mencapai indikator program prosentase usaha mikro yang mendapatkan legalitas usaha. Sedangkan sasaran program adalah meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri.

6) Program Pengembangan UMKM

Program ini diarahkan pada kegiatan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil dengan sasaran meningkatnya daya saing UMKM yang diukur dengan indikator prosentase UMKM yang mengakses pembiayaan.

5.1.2.2.11. Penanaman Modal

1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan Penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal dan pembuatan peta potensi investasi kabupaten/kota dengan sasaran meningkatnya kemudahan berinvestasi yang pengukuran kinerjanya menggunakan indikator nilai investasi berskala nasional PMA dan PMDN.

2) Program Promosi Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota dengan sasaran meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal yang pengukuran kinerjanya menggunakan dengan sasaran meningkatnya kemudahan berinvestasi yang pengukuran kinerjanya menggunakan indikator jumlah investor berskala nasional (Pelaku Usaha).

3) Program Pelayanan Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota dengan sasaran meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko yang pengukuran kinerjanya menggunakan indikator Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan.

4) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota dengan sasaran program terkendalinya pelaksanaan penanaman modal. Capaian program diukur dengan indikator kinerja persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha.

5) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Program ini diarahkan untuk mewujudkan sasaran program meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal, ditandai dengan indikator persentase ketepatan dalam proses pemenuhan permohonan data.

5.1.2.2.12. Kepemudaan dan Olahraga

1) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Program ini diarahkan pada kegiatan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota, dan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah kabupaten/kota, dengan capaian program Persentase pemuda yang mengikuti pengembangan kapasitas Daya Saing Kepemudaan. Sasaran program tersebut adalah meningkatnya daya saing kepemudaan.

2) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Program ini diarahkan pada kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota, penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah kabupaten/kota, pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi dan pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi. Capaian program adalah Persentase Atlet yang mengikuti pengembangan kapasitas Daya Saing Olahraga. Sedangkan sasaran program tersebut adalah meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga.

3) Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Program ini diarahkan pada kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan dengan capaian program Persentase fasilitasi pengembangan kapasitas kepramukaan. Sedangkan sasaran program tersebut adalah meningkatnya kualitas kepramukaan.

5.1.2.2.13. Statistik

1) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten/kota untuk mencapai sasaran program tercapainya kolaborasi, integrasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN), dengan kinerja yang ditunjukkan pada Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dan Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah.

5.1.2.2.14. Persandian

1) Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk mencapai sasaran program meningkatnya keamanan siber dan sandi di lingkungan pemerintah daerah dengan kinerja yang ditunjukkan dengan indikator Persentase tingkat kematangan daerah dalam penyelenggaraan keamanan informasi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5.1.2.2.15. Kebudayaan

1) Program Pengembangan Kebudayaan

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota, dan pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota dengan capaian program persentase objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan. Sedangkan sasaran program tersebut adalah meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan.

2) Program Pembinaan Sejarah

Program ini diarahkan untuk mewujudkan sasaran peningkatan akses masyarakat terhadap informasi sejarah, ditandai dengan indikator persentase sejarah yang dilestarikan dan dikembangkan.

3) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Program ini diarahkan untuk mewujudkan sasaran peningkatan warisan budaya yang dilestarikan, ditandai dengan indikator persentase warisan budaya yang dilestarikan.

4) Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Program ini diarahkan untuk mewujudkan sasaran peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional, ditandai dengan 1 indikator. Indikator tersebut adalah persentase kesenian tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan.

5) Program Pengelolaan Permuseuman

Program ini diarahkan untuk mewujudkan sasaran peningkatan tata kelola museum, ditandai dengan indikator persentase penambahan jumlah koleksi museum.

5.1.2.2.16. Perpustakaan

1) Program Pembinaan Perpustakaan

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota dan pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten/kota dengan sasaran program meningkatnya layanan perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan, ditandai dengan capaian program nilai tingkat kegemaran membaca.

2) Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno

Program ini untuk mewujudkan sasaran program meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno, ditandai dengan indikator persentase koleksi nasional dan kuno yang dimiliki.

5.1.2.2.17. Kearsipan

1) Program Pengelolaan Arsip

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota dengan sasaran program untuk meningkatkan tata kelola arsip dinamis dan statis dengan capaian program ditunjukkan dengan Tingkat ketersediaan Arsip.

2) Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

Program ini diarahkan untuk mewujudkan sasaran meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK, ditandai dengan indikator tingkat keberadaan dan keutuhan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

3) Program Perizinan Penggunanaan Arsip

Program ini diarahkan untuk mewujudkan sasaran meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup ditandai dengan indikator Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup.

5.1.2.3. Urusan Pilihan

5.1.2.3.1 Kelautan dan Perikanan

1) Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program ini diarahkan pada kegiatan pemberdayaan pembudi daya ikan kecil, dan pengelolaan pembudidayaan ikan dengan sasaran untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya. Capaian program ditunjukkan dengan Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan, Persentase Kelompok Pembudidaya Ikan yang telah menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan Produksi Perikanan Budidaya.

2) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program ini diarahkan pada kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil dan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota, dengan sasaran program untuk meningkatkan konsumsi ikan oleh masyarakat dengan capain program ditunjukkan melalui indikator Cakupan bina kelompok pengolah

5.1.2.3.2 Pariwisata

1) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota dan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota dengan sasaran meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata. Capaian program ditunjukkan dengan indikator kinerja Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara, Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara yang Datang ke Kabupaten / Kota dan Tingkat Hunian Akomodasi.

2) Program Pemasaran Pariwisata

Program ini diarahkan pada kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota dengan sasaran program untuk meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata. Capaian program ditunjukkan dengan indikator kinerja persentase fasilitasi pemasaran pariwisata.

3) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindunggan Hak Kekayaan Intelektual

Program ini diarahkan pada pada sasaran meningkatnya kualitas ekosistem kreatif yang ditandai dengan indikator persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Program ini diarahkan pada sasaran meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang ditandai dengan indikator persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi.

5.1.2.3.3 Pertanian

1) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program ini diarahkan pada kegiatan pengawasan penggunaan sarana pertanian, Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro organisme dan Peningkatan Mutu dan peredaran benih/bibit ternak, dengan sasaran program pada meningktanya distribusi dan kualitas sarana pertanian. Capaian program diukur dengan indikator kinerja Produktivitas tanaman pangan dan pemenuhan kebutuhan sarana pertanian.

2) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian, Pembangunan Prasarana Pertanian dengan sasaran pada meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian. Capaian program diukur dengan indikator kinerja persentase pemenuhan kebutuhan prasarana pertanian.

3) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Program ini diarahkan pada kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan sasaran pada meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. Capaian program diukur dengan indikator kinerja mortalitas Hewan/ternak akibat penyakit zoonosis.

4) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Program ini diarahkan pada kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota dengan capaian program prosentase penanganan bencana pertanian. Sasaran program tersebut adalah untuk meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian.

5) Program penyuluhan pertanian

Program ini diarahkan pada kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian dengan sasaran program untuk meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian. Capaian program diukur dengan indikator kinerja persentase cakupan bina kelompok tani Pemula, cakupan bina kelompok tani lanjut, cakupan bina kelompok tani madya dan cakupan bina kelompok tani utama.

5.1.2.3.4 Perdagangan

1) Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Program ini diarahkan pada kegiatan penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin usaha toko swalayan, **Penerbitan Tanda Daftar Gudang,** penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri dan penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat. Sasaran program tersebut adalah meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha, sedangkan capaian program diukur melalui indikator persentase persentase izin usaha perdagangan yang difasilitasi.

2) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Program ini diarahkan pada kegiatan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan dan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya. Sasaran program tersebut adalah meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi, ditandai dengan indikator prosentase fasilitasi pedagang pasar rakyat yang menggunakan platform digital.

3) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Program ini diarahkan pada kegiatan pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota dengan sasaran program meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting. Capaian program diukur melalui indikator persentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting dan disparitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting.

4) Program Pengembangan Ekspor

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota dengan sasaran program meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor. Capaian program diukur melalui indikator Persentase Fasilitasi Pelaku Usaha Ekspor Barang dan Jasa.

5) Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, tera ulang, dan pengawasan guna mencapai sasaran program meningkatnya tertib niaga dan mutu produk. Capaian program diukur melalui indikator persentase alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku.

5.1.2.3.5 Perindustrian

1) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota. Program ini dilaksanakan dengan sasaran meningkatnya realisasi pembangunan industri dengan capaian program diukur dengan Persentase industri Kota Salatiga yang berkembang.

2) Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Program ini diarahkan pada kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota. Program ini dilaksanakan dengan sasaran meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian, ditandai dengan indikator persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait dan persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait.

3) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota. Program ini dilaksanakan dengan sasaran meningkatnya pemanfaatan informasi industri, ditandai dengan prosentase tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini.

5.1.2.3.6 Transmigrasi

1) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Program ini diarahkan pada kegiatan penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dengan sasaran pada meningkatnya kualitas pembangunan kawasan transmigrasi, ditandai dengan indikator Persentase pelaksanaan proses transmigrasi.

5.1.2.4. Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan

5.1.2.4.1. Sekretariat Daerah

1) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Program ini diarahkan pada kegiatan administrasi tata pemerintahan, fasilitasi dan koordinasi hukum, fasilitasi kerjasama daerah dan Pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat.

Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat dengan sasaran meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, ditandai dengan indikator :

- Cakupan Koordinasi Administrasi Pemerintahan
- Cakupan Koordinasi Bidang Administrasi Kewilayahan
- Cakupan Fasilitasi Kerjasama Daerah
- Skor LPPD.
- Ketepatan waktu penyampaian LKPJ (30 maret)
- Prosentase Pelaksanaan Kebijakan Bidang Hukum
- Prosentase Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat

2) Program Perekonomian dan Pembangunan

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan kebijakan perekonomian; pemantauan kebijakan sumber daya alam; Pengelolaan Pengadaan barang dan jasa, Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian; Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam; Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa; Pelaksanaan Administrasi Pembangunan. Program Perekonomian dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pembangunan dengan sasaran meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan, ditandai dengan indikator :

- Cakupan Koordinasi Program Perekonomian dan Pembangunan;
- Cakupan Koordinasi OPD Pengampu DBHCHT;
- Cakupan Koordinasi dan Pembinaan BUMD/BLUD;
- Cakupan Koordinasi bidang Lingkungan Hidup dan SDA;
- Cakupan Koordinasi POK.

3) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini diarahkan kegiatan pada Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah; Penataan Organisasi; Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan sasaran meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah, ditandai dengan 3 indikator, yaitu persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah, dan Nilai SAKIP Perangkat Daerah

5.1.2.4.2. Sekretariat DPRD

1) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Program ini diarahkan kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD, Pembahasan Kebijakan Anggaran, Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, Peningkatan Kapasitas DPRD, Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD dan Fasilitasi Tugas DPRD dengan sasaran meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan dan meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan. Capaian program ini adalah Tingkat capaian kinerja dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

5.1.2.5. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

5.1.2.5.1. Perencanaan

1) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program ini diarahkan kegiatan penyusunan perencanaan dan pendanaan; analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah; pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah, dengan sasaran meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah. Capaian program ini adalah Rata-rata capaian kinerja sasaran pembangunan daerah.

2) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Program ini diarahkan kegiatan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA (sumber daya alam); koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan dengan sasaran dengan sasaran meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan, dan meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang Perekonomian dan SDA. Capaian program ini yaitu Penjabaran Konsistensi kegiatan RENSTRA ke dalam RENJA Bidang Perencanaan Kesra dan Penjabaran Konsistensi kegiatan RENSTRA ke dalam RENJA Bidang Perencanaan Ekbang.

5.1.2.5.2. Keuangan

1) Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini diarahkan kegiatan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah; koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah; koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah; pengelolaan data dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah dengan sasaran meningkatnya tata kelola anggaran, meningkatnya tata kelola perbendaharaan, dan meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan. Capaian program ini yaitu Persentase belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan, Cash managenent (Persentase anggaran), dan Persentase laporan keuangan tepat waktu.

2) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan sasaran meningkatnya tata kelola aset daerah untuk mencapai indikator kinerja program persentase penambahan nilai aset tetap.

3) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan sasaran meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan, meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan, dan meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital. Capaian program ini diukur dengan indikator persentase penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital.

5.1.2.5.3. Kepegawaian

1) Program Kepegawaian Daerah

Program ini diarahkan kegiatan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN; mutasi dan promosi ASN; pengembangan kompetensi ASN dan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur dengan sasaran meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian, meningkatnya pengembangan kompetensi ASN, meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN dan meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN. Capaian dari program ini adalah nilai indeks NSPK manajemen ASN.

5.1.2.5.4. Pendidikan dan Pelatihan

1) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Program ini diarahkan kegiatan pengembangan kompetensi teknis dan Sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional. Capaian program ini yaitu persentase PNS yang mengikuti pengembangan kompetensi.

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai sasaran sebagai berikut :

- Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional;
- Meningkatnya kualitas analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan dan evaluasi;
- Meningkatnya layanan penjaminan mutu, pengelolaan tugas belajar, serta sertifikasi kompetensi;
- Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis.

5.1.2.5.5. Penelitian dan Pengembangan

1) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Program ini diarahkan kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi dengan capaian program diukur dengan indikator persentase terfasilitasinya inovasi masyarakat daerah.

Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah mempunyai sasaran sebagai berikut :

- Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan;
- Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan;
- Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijajan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah;
- Meningkatnya fasilitasi pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah.

5.1.2.5.6. Kecamatan

Program yang diselenggarakan oleh kecamatan di Kota Salatiga dilaksanakan oleh 4 kecamatan yaitu: Kecamatan Sidorejo, Tingkir, Argomulyo dan Sidomukti.

1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini diarahkan kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan dengan sasaran meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Capaian program ini diukur dengan indikator tingkat pencapaian pembangunan kelurahan.

2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini diarahkan kegiatan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa, kegiatan pemberdayaan kelurahan dengan sasaran meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Capaian program ini diukur dengan indikator tingkat partisipasi masyarakat dalam musrenbangkel.

3) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Program ini diarahkan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah dengan sasaran meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. Capaian program diukur dengan indikator presentase terlaksananya tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan.

4) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dengan sasaran meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Capaian program diukur dengan indikator persentase penyampaian SPPT PBB pada WP.

5.1.2.6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

5.1.2.6.1. Inspektorat Daerah

1) Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan pengawasan internal, penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu dengan sasaran menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan baik yang bersifat anggaran atapun proses dan kewenangan. Capaian program ini yaitu Persentase Tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan internal tahun anggaran N-1 dan Persentase indaklanjut rekomendasi BPK tahun anggaran N-1.

2) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Program ini diarahkan pada kegiatan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan dan kegiatan pendampingan dan asistensi. Capaian program ini yaitu Tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan internal tahun anggaran N-1 Nilai Monitoring Controlling Surveillance For Prevention (MCSP), dan Prosentase Penyelesaian Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat (DUMAS).

5.1.2.7. Urusan Pemerintahan Umum

5.1.2.7.1. Kesatuan Bangsa Dan Politik

1) Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan

Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan dengan sasaran meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaaan, ditandai dengan 1 indikator. Indikator tersebut adalah cakupan penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan.

2) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik dengan sasaran meningkatnya etika dan budaya politik, ditandai dengan indikator prosentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik.

3) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan sasaran meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan, ditandai dengan 1 indikator. Indikator

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

tersebut adalah prosentase organisasi kemasyarakatan yang aktif, target pada tahun 2025 sebesar 60% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 64%.

4) Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya dengan sasaran meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat, ditandai indikator Prosentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, sosial, budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan.

5) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial dengan sasaran meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat, ditandai dengan indikator prosentase konflik sosial yang yang diselesaikan.

5.2. Pendanaan Daerah

Program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan Kota Salatiga tahun 2027, didukung dengan pembiayaan yang berasal dari berbagai sumber dana. Kebutuhan penganggaran untuk membiayai pelaksanaan program hingga sub kegiatan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah, upaya pencapaian target capaian kinerja yang merupakan rangkaian upaya penerjemahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pemerintah yang dilaksanakan secara bertahap. Pada tahun 2027, secara terperinci dipersiapkan kebutuhan anggaran per sub kegiatan yang nantinya sebagai pedoman dalam penggunaan belanja untuk menerjemahkan indikator kinerja yang akan dicapai.

Pencapaian kinerja Pembangunan daerah tahun 2027 tersebut didukung dengan rencana pendanaan yang dapat memenuhi kebutuhan akan belanja dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah tahun 2027 diproyeksikan sebesar Rp777.074.654.529,-, belanja daerah sebesar Rp856.901.003.284,-. Sedangkan perkiraan maju tahun 2028 diambil dari proyeksi pendanaan pada dokumen RPJMD 2025-2029 dan kebutuhan belanja pada Ranwal Renja Perangkat Daerah tahun 2028. Berikut adalah proyeksi kerangka pendanaan Kota Salatiga tahun 2027 dan perkiraan maju tahun 2028.

Tabel 5. 11 Kerangka Pendanaan Kota Salatiga Tahun 2027

No	Uraian	Proyeksi	
		2027	2028
1	PENDAPATAN	**777.074.654.529**	**796.862.770.500**
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	**313.422.633.337**	**339.612.224.500**
3	Pendapatan Pajak Daerah	99.270.000.000	116.930.275.000
4	Pendapatan Retribusi Daerah	184.145.031.052	185.894.408.000
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	23.055.000.000	27.787.541.500
6	Lain-lain PAD yang Sah	6.952.602.285	9.000.000.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Uraian	Proyeksi	
		2027	2028
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)	313.422.633.337	339.612.224.500
8	PENDAPATAN TRANSFER		
9	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	411.687.356.000	412.250.546.000
10	Dana Bagi Hasil	15.535.700.000	16.519.286.000
12	Dana Alokasi Umum	395.731.260.000	395.731.260.000
13	Dana Alokasi Khusus	-	-
14	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (10 s/d 13)	411.687.356.000	412.250.546.000
15	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA		
16	Dana Otonomi Khusus	-	-
17	Dana Penyesuaian	-	-
18	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (16 s/d 18)	411.687.356.000	412.250.546.000
19	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI		
20	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	42.970.031.000	45.000.000.000
21	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-
22	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (20 s/d 21)	42.970.031.000	45.000.000.000
23	Total Pendapatan Transfer (14 + 18 + 22)	454.657.387.000	457.250.546.000
24	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH		
25	Pendapatan Hibah	-	-
26	Pendapatan Dana Darurat	-	-
27	Pendapatan Lainnya	-	-
28	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (25 s/d 27)	-	-
29	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 23 + 28)	777.074.654.529	796.862.770.500
30	BELANJA		
31	BELANJA OPERASI		
32	Belanja Pegawai	392.328.260.841	425.310.793.290
33	Belanja Barang & Jasa	408.833.761.505	434.491.799.864
34	Belanja Bunga	-	-
35	Belanja Subsidi	-	-
36	Belanja Hibah	6.662.000.000	8.251.548.216
37	Belanja Bantuan Sosial	245.500.000	267.050.000
38	Jumlah Belanja Operasi (32 s/d 37)	807.984.522.346	868.321.191.370
39	BELANJA MODAL		
40	Belanja Tanah	50.000.000	3.000.000.000
41	Belanja Peralatan dan Mesin	8.111.219.897	9.246.430.635

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Uraian	Proyeksi	
		2027	2028
42	Belanja Gedung dan Bangunan	16.166.300.000	3.752.500.000
43	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	20.237.500.341	34.082.647.200
44	Belanja Aset Tetap Lainnya	1.351.460.700	1.070.534.084
45	Belanja Aset Lainnya	-	-
46	Jumlah Belanja Modal (40 s/d 45)	45.916.480.938	51.152.111.919
47	BELANJA TAK TERDUGA		
48	Belanja Tak Terduga	3.000.000	3.000.000.000
49	Jumlah Belanja Tak Terduga (48)	3.000.000	3.000.000.000
50	JUMLAH BELANJA (38 + 46 + 49)	856.901.003.284	922.473.303.289
51	TRANSFER	-	-
52	BELANJA TRANSFER	-	-
53	Belanja Bagi Hasil	-	-
54	Belanja Bantuan Keuangan	-	-
55	JUMLAH TRANSFER/BELANJA TRANSFER (53 s/d 54)	-	-
56	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (50 + 55)	856.901.003.284	922.473.303.289
57	SURPLUS / DEFISIT	(79.826.348.755)	(125.610.532.789)
58	PEMBIAYAAN		-
59	PENERIMAAN PEMBIAYAAN		
60	Penggunaan SILPA	-	-
61	Pencairan Dana Cadangan	-	-
62	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
63	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-
64	Penerimaan Kembali Pemerian Pinjaman Daerah	-	-
65	Penerimaan Piutang Daerah	-	-
66	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN (60 s/d 65)	-	-
67	PENGELUARAN PEMBIAYAAN		
68	Pembentukan Dana Cadangan	-	-
69	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	-
70	Pembayaran Pokok Utang	-	-
71	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-
72	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN (67 s/d 70)	-	-
73	PEMBIAYAAN NETO (66 - 72)	-	-
74	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (73 + 57)	(79.824.348.755)	(125.610.532.789)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN BAB V

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

https://rkpd.salatiga.go.id/2026/07/peraturan-wali-kota-nomor-12-tahun-2026-tentang-rkpd-tahun-2027/

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dari sisi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan dan daya saing. Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi indikator kinerja utama daerah yang menggambarkan kinerja kepala daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang menggambarkan kinerja seluruh perangkat daerah. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada periode pertama RPJMD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 dapat dicapai. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kota Salatiga tahun 2027 berdasarkan hasil Rakortekbang Provinsi Jawa Tengah.

Selain itu, kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah juga memperhatikan target indikator makro yang merupakan Indikator Utama Pembangunan pada RPJPD 2025-2045 sebagai baseline tahun 2025 Tahap I RPJPD yang selaras dengan RPJPN 2025-2045. Penetapan target juga berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 600.1/176lSJ dan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan langka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 serta Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 000.7/0002940 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 dengan memperhatikan dinamika pembahasan terkait Indikator Utama Pembangunan (IUP) dengan Pemerintah Pusat.

6.1 Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka upaya pencapaian prioritas pembangunan daerah tahun 2027, maka ditetapkan target pada Indikator kinerja utama pemerintah Kota Salatiga tahun 2027 sebagai berikut.

Tabel 6. 1. Indikator Kinerja Utama Kota Salatiga Tahun 2027

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kinerja			Perangkat Daerah Koordinator
			2025 (R)	2026 (T)	2027(T)	
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	86,23	86,43	87,63	Sekretariat Daerah
2	Pertumbuhan ekonomi	Persen	5,98	5,56 – 6,56	6,10 – 7,95	Sekretariat Daerah
3	PDRB Perkapita	Juta Rp	95,23	103,48-108,48	112,68 – 117,68	Sekretariat Daerah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kinerja			Perangkat Daerah Koordinator
			2025 (R)	2026 (T)	2027(T)	
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,67	3,84 – 3,54	3,82 – 3,52	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
5	Angka Kemiskinan	Persen	4,20	4,34 – 4,20	3,87-3,52	Sekretariat Daerah
6	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	81,00	82,15	82,66	Sekretariat Daerah
7	Penurunan emisi GRK kumulatif	Ton CO2eq	13.291,89	183.296,80	295.302,60	Dinas Lingkungan Hidup
8	Indeks Daya saing Daerah	Nilai	4,08	4,84	5,15	Bappeda

Keterangan :

*) Target tahun 2027 ditetapkan dengan mempertimbangkan realisasi tahun 2025 dan proyeksi tahun 2026

6.2 Indikator Kinerja Daerah

Indikator kinerja daerah merupakan indikator kinerja yang ditetapkan sebagai ukuran kinerja eluruh penyelenggara pemerintahan daerah Kota Salatiga tahun 2027. Indikator kinerja daerah tahun 2027 adalah sebagi berikut :

Tabel 6. 2. Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah Kota Salatiga Tahun 2027

No	Indikator	Satuan	Kinerja		
			2025 (R)	2026 (T)	2027
I	**INDIKATOR KINERJA DAERAH**				
	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI				
1	Wilayah dengan Infrastruktur Kondisi Baik	%	NA	4964,70	66,04
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Angka	68,70	69,98	70,03
3	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	79,33	81,04	82,55
4	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	12,07	19,40	23,80
5	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitasi Pengolahan Sampah	%	26,30	28,60	29,30
6	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	%	4,67	3,90	3,63
7	Kepadatan Penduduk	Orang/km2	3.626	4.063	4.263
8	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,50	0,55	0,58
9	Persentase Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	NA	43,70	46,80
10	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,28	1,20	1,20
11	Konsumsi Listrik Per kapita	kWh/kapita	353.774.373,06	262.271.447	300.274.580
12	Indeks Risiko Bencana	Angka	75,60	98,44	98,09
13	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	%	NA	66,09	68,35

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator	Satuan	Kinerja		
			2025 (R)	2026 (T)	2027
14	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	31	30	45
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	93,33	79,20	79,40
2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,47	16,10	16,18
3	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	%	8,18	22,80	23,61
4	Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan	%	1,12	1,07	1,12
5	Jumlah Kasus Kematian Ibu (kasus)	kasus	1	2	2
6	Angka Literasi/Numerasi	%	91,92	91,55	91,80
7	Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,222	0,12 – 0,11	0,12 - 0,11
8	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	21,01	100	100
9	Indeks Pembangunan Gender	Angka	95,59	95,41	95,40
10	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	66,49	70,37	74,25
11	Indeks Gini	Angka	0,412	0,372	0,357
12	Prevalensi stunting	%	6.40	5,60	5,43
13	Usia harapan Hidup	Tahun	78,75	78,64	78,87
14	Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir	%	19,53	18,71	18,93
15	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	95.57	96,00	96,50
16	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok Bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan	%	95,31	89,93	90,03
17	Indeks Keluarga Sehat	Angka	TAD	0,41	0,42
18	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	11,49	11,52	11,53
	ASPEK DAYA SAING DAERAH				
1	Indeks Inovasi Daerah	Angka	48,88	52	53
2	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	%	15,89	16,93-17,42	17,43-17,93
3	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,532	0,65	0,64
4	Angka Ketergantungan	%	43,11	49,49	49,5
5	Tingkat Inflasi	%	2,89	2,5	2,5
6	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Nilai	79,70	63,50-64,82	63,50-64,82
7	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang)	Ribu Orang	1.600	1.654	1.708
8	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	5,35	5,49	5,63
9	Rasio PDRB Industri pengolahan	%	33,14	34.,32	34,6
10	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	70,93	71,05	71,27
11	Indeks Zakat Nasional (IZN)	Angka	0,67	0,71	0,73
12	Indeks Akses Keuangan Daerah	Angka	6,56	6,57	6,59
13	Tingkat Kemantapan Jalan	%	86.62	95,53	95,54
14	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	%	7,92	8,2	8,36

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator	Satuan	Kinerja		
			2025 (R)	2026 (T)	2027
15	Ekspor Barang dan Jasa	Rp	170.951.432,84	180.042.471	192.645.444
16	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Persen	42,44	42	41,55
17	Kapabilitas Inovasi	Nilai	4,05	4,06	4,07
18	Jumlah Pengunjung Tempat Bersejarah	Orang	31.693	14,232	14.460
19	Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten/Kota Per PDRB	%	110	44,79	47,55
20	Return on Aset (ROA) BUMD	%	0,46	3,03	3,34
21	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet	Angka	100	91,94	92
22	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	%	62.30	66,74	67,52
23	Disparitas Harga	Angka	-1,61	10	±10
24	Jumlah kejadian konflik SARA	Kali	83.1	0	0
25	Total Dana Pihak Ketiga pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB	%	100	62,6	64,38
26	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	0.8	1,88	1,9
	ASPEK PELAYANAN UMUM				
1	Indeks Reformasi Hukum	Nilai	100	100	100
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	4,11	4,12	4,15
	Indeks Pemerintahan Digital	Nilai	0	1,1	1,2
3	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	4,42	4,68	4,7
4	Indeks Integritas Nasional	Nilai	77,95	80,06	80,65
II	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**				
	URUSAN PENDIDIKAN				
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	81,90	100	100
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	87,40	100	100
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	91,79	100	100
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	71,79	100	100
	URUSAN KESEHATAN				
1	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	%	4,6	4,00	4,5
2	Persentase RS Rujukan Tingkat Kota yang terakreditasi	%	100	100	100
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100	100	100
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100	100	100
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100	100	100

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator	Satuan	Kinerja		
			2025 (R)	2026 (T)	2027
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100	100	100
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100
8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	100
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	100
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100
11	Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	100	100
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	100	100
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	100	100
	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
1	Persentase luas daerah irigasi kewenangan Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	100	100	100
2	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kota	%	97,31	100	100
3	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	92,25	100	100
4	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	%	93,57	88,2	88,46
5	Rasio kemantapan jalan	%	86,62	87,12	95,54
6	Rasio tenaga operator/teknis/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	21.85	25	100
7	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100	100	100
	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT & PERMUKIMAN				
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kota	%	100	100	100
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah Kota	%	100	100	100
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangan	%	36,47	10,60	14,84

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator	Satuan	Kinerja		
			2025 (R)	2026 (T)	2027
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	4,47	4,44	3,81
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	66,51	68,32	71,05
	URUSAN TRANTIBUM & LINMAS				
1	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100	100
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	100
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100
7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	7	15	<15
	URUSAN SOSIAL				
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	%	100	100	100
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kota	%	100	100	100
	URUSAN TENAGA KERJA				
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	100	100	100
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetens	%	100	100	100
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Jt Rp/org	104,297	114,67	114,91
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar	%	46,47	93,79	94,07
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah	%	79,38	71,48	71,69
	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	6	9,29	10,18
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kota	%	100	100	100
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100,000 penduduk perempuan)	%	69,63	68:94:68:94	40,23
	URUSAN PANGAN				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator	Satuan	Kinerja		
			2025 (R)	2026 (T)	2027
1	Persentase cadangan pangan (tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%	100	100	100
	URUSAN PERTANAHAN				
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	0	100	100
2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	100	100	100
3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal,	%	0	100	100
4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	%	0	100	100
5	Tersedianya tanah untuk masyarakat,	%	0	100	100
6	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	100	100	100
	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP				
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota	%	68,70	69,98	70,03
2	Terlaksananya pengelolaan sampah Regional/Terpadu di wilayah Kota	%	98,16	98,25	98,44
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	%	9,23	9,62	21,22
	URUSAN ADMINISTRASI PENDUDUK & CATATAN SIPIL				
1	Perekaman KTP Elektronik	%	97,16	98,2	98,5
2	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	87,52	87,53	87,54
3	Persentase Penduduk usia 0- 18 tahun yang mempunyai Akte Kelahiran	%	99,53	99,54	99,55
4	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	100	100	100
	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BEENCANA				
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	%	1,71	1,72	1,74
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	63,19	67,02	70,00
3	Persentase kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	3,65	7,66	8,45
	URUSAN PERHUBUNGAN				
1	Rasio konektivitas Kota	Rasio	0,88	0,88	0,88
2	Kinerja lalu lintas Kota	Rasio	0,23	0,23	0,23
	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI				
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100	100

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator	Satuan	Kinerja		
			2025 (R)	2026 (T)	2027
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	100	100	100
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kota	%	100	100	100
	URUSAN KOPERASI DAN UMKM				
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	71,88	74,43	77,41
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	%	48,80	100	100
	URUSAN PENANAMAN MODAL				
1	Persentase peningkatan investasi di Kota	%	76.91	6,91	6,92
	URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA				
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	1,03	2,64	3,59
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	36,03	46,13	48,42
3	Peningkatan prestasi olahraga	Medali	76	36	42
	URUSAN STATISTIK				
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100
2	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100
	URUSAN PERSANDIAN				
1	Tingkat keamananan informasi pemerintah	%	70,85	72	73,5
	URUSAN KEBUDAYAAN				
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	100	40,00	42
	URUSAN PERPUSTAKAAN				
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Indeks	54,04	60,8	76,23
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	21,01	28	100
	URUSAN KEARSIPAN				
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) (Pasal 40 dan Pasal 59 UU Nomor 43 Tahun tentang Kearsipan)	%	90,16	88,77	88,92
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	66,67	50	60
	URUSAN KELAUTAN PERIKANAN				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator	Satuan	Kinerja		
			2025 (R)	2026 (T)	2027
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh Kota di wilayah kota (sumber data: one data KKP)	Ton	-483,33	87,00	89
	URUSAN PARIWISATA				
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	110,11	0,50	0,5
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kota	%	123,45	0,20	0,2
3	Tingkat hunian akomodasi	%	52,20	56,69	59,53
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	7,92	7,93	7,94
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD		0,18	0,18	0,19
	URUSAN PERTANIAN				
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ton/Ha	6,30	720,34	722,05
2	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	100	100	100
	URUSAN PERDAGANGAN				
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	100	100	100
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	70	70,56	71,25
3	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	19,54	73,16	74,62
	URUSAN PERINDUSTRIAN				
1	Pertambahan jumlah industri Kecil dan Menengah di Kota	%	1,85	0,50	0,55
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN (Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional) yang ditetapkan dalam RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kota	%	145,73	100	100
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	9,54	100	100
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	0	100	100
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kota	%	100	0	0
6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Ada/tidak	100	100	100
	PERENCANAAN DAN KEUANGAN				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator	Satuan	Kinerja		
			2025 (R)	2026 (T)	2027
1	Persentase Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	%	28,11	19,16	19,36
2	Persentase PAD	%	31,47	32,17	34,22
3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	2,92	3,023	3,043
4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	2,34	3	3
5	Persentase Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	%	86,25	88,06	88,97
6	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP
	PENGADAAN				
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	0	0	0
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	64,39	64	65
3	Persentase nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	100	100	100
4	Presentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah		0,94	1,5	2
	KEPEGAWAIAN				
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	76,33	76,34	76,35
2	Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	25,21	25,44	25,7
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	99,72	99,73	99,74
	MANAJEMEN KEUANGAN				
1	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	62,1	4,5	4,65
2	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	82	22,5	22,5
3	Assets management	Satuan Hasil	4	4	4
	Apakah ada daftar aset tetap?	ada/tidak	Ada	Ada	Ada
	Apakah ada manual untuk menyusun daftar aset tetap?	ada/tidak	Ada	Ada	Ada
	Apakah ada proses inventarisasi aset tahunan?	ada/tidak	Ada	Ada	Ada
	Apakah nilai aset tercantum dalam laporan anggaran?	ada/tidak	Ada	Ada	Ada
4	Cash Management: Persentase anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	12,00	8,28	7,14
	TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator	Satuan	Kinerja		
			2025 (R)	2026 (T)	2027
1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	%	91,70	96,44	96,8
2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	%	100	100	100

6.3 Keselarasan Sasaran Indikator Makro Provinsi Jawa Tengah dengan Kota Salatiga

Sasaran Indikator Makro Provinsi Jawa Tengah dan Kota Salatiga diselaraskan melalui Rakortekbang dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 6. 3. Keselarasan Sasaran Indikator Makro Provinsi Jawa Tengah dengan Kota Salatiga

NO	Indikator Makro	Satuan	Target Tahun 2027	
			Provinsi	Kota Salatiga
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,30 – 7,00	6,60 – 7,60
2	PDRB Per Kapita	Juta Rp	56,0 – 59,8	112,68 – 117,68
3	Kontribusi PDRB Provinsi	Persen	8	
4	Tingkat Kemiskinan	Persen	8,51 – 8,17	3,87 – 3,52
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,65 – 4,08	3,82 – 3,52
6	Rasio Gini	Angka	0,358 – 0,363	0,357
7	Indeks Modal Manusia	Angka	0,63	
8	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka		87,63
9	Penurunan Intensitas Emisi GRK	Persen	7,27	
10	Penurunan Emisi GRK Kumulatif	TonCo2EQ		127.239,68
11	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Angka	75,78	70,03

6.4 Keselarasan Indikator Utama Pembangunan Provinsi Jawa Tengah dengan Kota Salatiga

Keselarasan Indikator Utama Pembangunan antara Provinsi Jawa Tengah dan Kota Salatiga disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 6. 4. Keselarasan Indikator Utama Pembangunan Provinsi Jawa Tengah dengan Kota Salatiga

Provinsi Jawa Tengah			Target Tahun 2027	Kota Salatiga			Target Tahun 2027
Arah Pembangunan	IUP			Arah Pembangunan	IUP		
1	2		3	4	5		6
CJ01. Kesehatan untuk Semua	1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	75,68	1. Kesehatan untuk Semua	4	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	78,87
	2	Kesehatan Ibu dan Anak :				Kesehatan Ibu dan Anak :	
	a	Angka Kematian Ibu	77,21		5	Jumlah Kasus Kematian Ibu (angka)	2
	b	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	16		6	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	5,43
	3	Penanganan Tuberkulosis:				Penanganan Tuberkulosis:	
	a	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)	95		7	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)	135
	b	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	92		8	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	91,45
	4	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	99,43		9	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	100
CJ02. Pendidikan Berkualitas secara Inklusif	5	Hasil Pembelajaran:		2. Pendidikan Berkualitas yang Merata		Hasil Pembelajaran:	
	a	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:			10	Persentase Siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (seluruh jenjang):	
		i) Literasi Membaca	90,00-92,86			a) Literasi Membaca SD/Sederajat	98,8

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Provinsi Jawa Tengah			Target Tahun 2027	Kota Salatiga			Target Tahun 2027
Arah Pembangunan	IUP			Arah Pembangunan	IUP		
1	2		3	4	5		6
		ii) Numerasi	40,00-44,29			b) Literasi Membaca SMP/Sederajat	94,77
						c) Numerasi SD/Sederajat	85,08
						d) Numerasi SMP/Sederajat	94,77
	b	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk :			11	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	16,2
		i) Literasi Membaca	73,69 – 76,19				
		ii) Numerasi	66,55 – 69,05				
	c	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	8,80 – 8,81		12	Harapan Lama Sekolah (tahun)	11,39
	d	Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,09 – 13,11		13	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	23,61
	6	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	8,67		14	Angka partisipasi sekolah 5 - 6 tahun (%)	100
	7	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi	68,52				
CJ03. Perlindungan Sosial yang Adaptif		Tingkat Kemiskinan (%)	8,51 – 8,17	3. Perlindungan Sosial yang Adaptif	1	Tingkat Kemiskinan (%)	4,30-3,39

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Provinsi Jawa Tengah			Target Tahun 2027	Kota Salatiga			Target Tahun 2027
Arah Pembangunan	IUP			Arah Pembangunan	IUP		
1	2		3	4	5		6
		Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%)	53,64		38	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	56,24
		Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	23,50				
CJ04. Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi	11	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	35,24 – 35,89	4. Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi	23	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	34,6
	12	Pengembangan Pariwisata:			24	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	8,36
	a	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	3,72		25	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (ribu orang)*	1.708
	b	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (ribu orang)*	74,76		26	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	5,63
	3	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	13,54		27	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	1,90
	4	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD:			28	Return on Aset (ROA) BUMD (%)	3,34
	a	Proporsi Jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian pada level provinsi	10,59		29	Disparitas Harga	±10
	b	Proporsi jumlah industri kecil dan menengah pada level Provinsi	6,45				
	c	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	3,85				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Provinsi Jawa Tengah			Target Tahun 2027	Kota Salatiga			Target Tahun 2027
Arah Pembangunan	IUP			Arah Pembangunan	IUP		
1	2		3	4	5		6
	d	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	2,34				
	e	Return on Aset (ROA) BUMD (%)	1,82				
	15	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,65 – 4,08		36	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,82-3,52
	16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	63,82		37	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	67,52
	17	Tingkat Penguasaan IPTEK : Kapabilitas Inovasi	4,67		34	Kapabilitas Inovasi (Angka) (bagian dari IDSD)	4,07
CJ05. Penerapan Ekonomi Hijau	18	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau		5. Penerapan Ekonomi Hijau			
	a	Indeks Ekonomi Hijau	48,50				
	b	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	21,87				
CJ06. Transformasi Digital	19	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	6,24	6. Transformasi Digital	39	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet	92,00
CJ07. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	20	Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi	6,50	7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	30	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	41,55
	21	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	30,75		55	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Kabupaten/Kota	112,68-117,68
	22	Ekspor Barang dan Jasa	11,33		56	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	17,43-17,93
CJ08. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	23	Kota dan Desa Maju, Inklusif dan Berkelanjutan:		8. Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	40	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	96,50

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Provinsi Jawa Tengah			Target Tahun 2027	Kota Salatiga			Target Tahun 2027
Arah Pembangunan	IUP			Arah Pembangunan	IUP		
1	2		3	4	5		6
	a	Proposi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap Nasional	2,49		41	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap (%) (sesuai kewenangan)	95,54
	b	Rumah Tangga dengan Askes Hunian Layak, Terjangkau dan Berkenalan	76,08		42	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota	9,26
	c	Persentase Desa Mandiri	28,68		35	Persentase Desa Mandiri	-
	d	Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Permukaan Mantap	93,29				
	e	Indeks Pelayanan Transportasi	6,904				
	f	Persentase Keterwujudan Penataan Ruang					
CJ09. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas, Adaptif dan Kolaboratif	24	Indeks Reformasi Hukum	92,50	9. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	51	Indeks Reformasi Hukum	100
	25	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	4,59		52	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	4,15
	26	Indeks Pelayanan Publik	4,57		53	Indeks Pelayanan Publik	4,7
	27	Indeks Integritas Nasional	82,25		54	Indeks Integritas Nasional	80,65
					50	Indeks Reformasi Birokrasi	82,66
CJ10. Ketentraman dan Ketertiban, serta Demokrasi Substansial	28	Indeks Pembangunan Hukum : Nilai Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	79,50	10. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Provinsi Jawa Tengah			Target Tahun 2027	Kota Salatiga			Target Tahun 2027
Arah Pembangunan	IUP			Arah Pembangunan	IUP		
1	2		3	4	5		6
				Tangguh, dan Demokrasi Substansial			
	29	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	79,50				
	30	Indeks Demokrasi Indonesia	86,80 – 90,22				
CJ11. Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	31	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	1,39	11. Stabilitas Ekonomi makro	31	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,64
	32	Tingkat Inflasi (%)	1,50 – 3,50		32	Total Dana Pihak Ketiga pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB	64,38
	33	Pendalaman/Intermedaiasi Sektor Keuangan:			33	Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB	47,55
	a	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB	24,84				
	b	Aset Dana Pensiun/PDRB	0,39				
	c	Nilai Transaksi Saham Per Provinsi Berupa Nilai Rata-rata Tahunan	4.354.768				
	d	Total Kredit/PDRB	27,15				
	34	Inklusi Keuangan	93,37				
CJ12. Daya Saing Daerah dan Ketahanan Wilayah	35	Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah	Sedang	12. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Provinsi Jawa Tengah			Target Tahun 2027	Kota Salatiga			Target Tahun 2027
Arah Pembangunan	IUP			Arah Pembangunan	IUP		
1	2		3	4	5		6
	36	Indeks Ketahanan Nasional Provinsi Jawa Tengah	Cukup Tangguh				
CJ13. Pemajuan Kebudayaan dan Pendidikan Karakter	37	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	63,40	13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	15	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar mulok bahasa daerah dan atau seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan (%)	90,03
	38	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	80,03 – 80,09		16	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan (%)	42,00
					17	Jumlah pengunjung tempat bersejarah	14.460
					18	Persentase Kelompok Kesenian yang Aktif Terlibat/Mengadakan Pertunjukan Kesenian dalam 1 Tahun Terakhir	18,93
					19	Tingkat pemanfaatan perpustakaan (%)	1,12
					20	Jumlah Kejadian Konflik Sara (kali)	0
CJ14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	39	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	77,79	14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	21	Indeks Pembangunan Keluarga	63,50-64,82
	40	Indeks Ketimpangan Gender	0,301		22	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,12-0,11
CJ15. Lingkungan Hidup Berkualitas	41	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	0,492	15. Lingkungan Hidup Berkualitas	46	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	61,81

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Provinsi Jawa Tengah			Target Tahun 2027	Kota Salatiga			Target Tahun 2027
Arah Pembangunan	IUP			Arah Pembangunan	IUP		
1	2		3	4	5		6
	42	Kualitas Lingkungan Hidup :			43	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	23,8
	a	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	75,78		47	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	29,30
	b	Rumah Tangga dan Akses Sanitasi Aman	21,89				
	c	Pengelolaan Sampah : - Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	24,00				
		- Proposi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	30,50				
CJ16. Ketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	43	Ketahanan Energi, Air dan Pangan		16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian pangan	44	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	46,80
	a	Ketahanan Energi:			45	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota (Angka)	66,50
	-	Konsumsi Listrik per Kapita	945,82		2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	3,63
	-	Intensitas Energi Primer	192,72		3	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	82,55
	b	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	7,43				
	c	Ketahanan Air					

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Provinsi Jawa Tengah			Target Tahun 2027	Kota Salatiga			Target Tahun 2027
Arah Pembangunan	IUP			Arah Pembangunan	IUP		
1	2		3	4	5		6
	-	Kapasitas Air Baku	6,45				
	-	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	45,73				
	-	Persentase Kondisi Baik Infrasrstruktur Tampungan Air Kewenangan Provinsi	64,91				
	-	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Provinsi	69,17				
	-	Persentase Sungai Kondisi Baik Kewenangan Provinsi	52,46				
CJ17. Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	44	Indeks Risiko Bencana	93,33	17. Resiliensi terhadap Bencana dan perubahan Iklim	48	Indeks Risiko Bencana (IRB)	98,09
	45	Persentase Penurunan Emisi GRK:			49	Kontribusi Penurunan Emisi GRK (TonCO2eq)	295.302,60
	a	Kumulatif	7,27				
	b	Tahunan	17,05				

6.5 Keselarasan Indikator Tematik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027

Arah kebijakan Provinsi Jawa Tengah tahun 2027 sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029 adalah “Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah Sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi”. Untuk mengimplementasikan arah kebijakan ini, Kota Salatiga ikut mendukung kinerja provinsi dengan beberapa beberapa kinerja dengan masing-masing target sebagai berikut :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 6. 5. Keselarasan Indikator Tematik Provinsi Jawa Tengah dengan RKPD Kota Salatiga Tahun 2027

No.	Indikator Makro Pembangunan	Satuan	Target Tahun 2027
1	Jumlah DTW Alam yang Dikembangkan	Unit	2
2	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	610.000
3	Jumlah Desa/Kampung Wisata Baru yang Dicanangkan	Unit	8
4	Jumlah Konten Kreator yang dilatih	Orang	15
5	Jumlah Usaha Pariwisata Ramah Muslim yang ditetapkan	Unit	5
6	Jumlah Produk Tersertifikasi Halal	Produk	9.837
7	Jumlah Penyaluran Pembiayaan Syariah	Rupiah	192.000.000.000
8	Jumlah RPH/RPU yang Tersertifikasi Halal	Unit	1
9	Jumlah Tukang Jagal yang Tersertifikat Halal	Orang	2
10	Jumlah Dana Zakat, Infaq, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya yang Dihimpun	Rupiah	6.250.000.000

6.6 Keselarasan Intervensi Pembangunan Kewilayahan RKP dengan RKPD

Keselarasan Intervensi Pembangunan Kewilayahan antara RKP dan RKPD Kota Salatiga disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut.

Tabel 6. 6. Keselarasan Intervensi Pembangunan Kewilayahan antara RKP dengan RKPD Kota Salatiga

RKP 2027		**RKPD 2027**		**KETERANGAN**
FOKUS PRIORITAS PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	**HIGHLIGHT INTERVENSI**	**LOKASI PRIORITAS**	**HIGHLIGHT INTERVENSI**	
Pembangunan Kota Terpadu	1 Peningkatan konektivitas	Kota Salatiga masuk dalam lokasi prioritas bidang Perkotaan berdasarkan RPJMN 2025-2029 untuk kategori Non-Wilayah Metropolitan		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

RKP 2027		RKPD 2027		KETERANGAN
FOKUS PRIORITAS PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	**HIGHLIGHT INTERVENSI**	**LOKASI PRIORITAS**	**HIGHLIGHT INTERVENSI**	
	2 Penataan kawasan perkotaan;			
	3 Penanganan banjir perkotaan			
	4 Penguatan keterkaitan perdesaan perkotaan;			
	5 Peningkatan kapasitas tata kelola perkotaan serta pengembangan pendanaan inovatif.			
	6 Penyusunan dan penetapan RDTR terintegrasi OSS			
	7 Penerbitan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)		**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	
	8 Pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penertiban pemanfaatan ruang		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	
			Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	

6.7 Keselarasan Kegiatan Prioritas Utama (Prioritas Nasional) dengan Kota Salatiga

Keselarasan Kegiatan Prioritas Utama (Prioritas Nasional) dengan Kota Salatiga disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 6. 7. Keselarasan Kegiatan Prioritas Utama (Prioritas Nasional) dengan Kota Salatiga

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026	KETERANGAN
1	Prioritas Nasional 1	Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S)	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	
			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
2	Prioritas Nasional 2	Transformasi tata kelola industri pertahanan dan penerapan skema spend to invest		
		Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP)/lumbung pangan Kalimantan Tengah		
		Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP)/lumbung pangan Sumatra Selatan		
		Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP)/lumbung pangan Papua Selatan		
		Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP)/lumbung pangan lainnya	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
		Pembangunan pangan akuatik (blue food)	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	
		Pembangunan pangan hewani	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	
		Pembangunan pangan lokal dan nabati	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	
		Fortifikasi dan biofortifikasi pangan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
		Peningkatan penyediaan energi	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
		Perluasan akses dan jangkuan pelayanan energi		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026	KETERANGAN
		Penguatan implementasi transisi energi berkeadilan		
		Konservasi sumberdaya air	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
		Pengembangan SPAM terintegrasi hulu ke hilir	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	
		Penyediaan dan pengawasan sanitasi aman, berkelanjutan, dan berketahanan iklim berbasis CWIS	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	
		Pengembangan terpadu pesisir utara jawa		
		Penguatan faktor pendukung ekonomi digital		
		Penguatan ekonomi dan industri digital serta sektor strategis lainnya		
		Pengelolaan susut dan sisa pangan		
		Peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keamanan hayati, serta akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetik	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
		Peningkatan pengelolaan kualitas air sungai dan danau	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
		Peningkatan kualitas ekosistem gambut		
		Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
		Peningkatan pengumpulan dan pengelolaan sampah serta pemrosesan residu di TPA/LUR		
		Pengembangan industri garam dan produk olahan hasil laut		
3	Prioritas Nasional 3	Pembangunan infrastruktur jaringan ketenagalistrikan dan digitalisasinya	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026	KETERANGAN
		Pengembangan dan peningkatan ekosistem digital	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
		Percepatan pembangunan destinasi pariwisata prioritas Borobudur Yogyakarta-Prambanan	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	
		Percepatan pembangunan destinasi prioritas Lombok-Gili Tramena	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	
		Percepatan pembagunan destinasi pariwisata prioritas Danau Toba	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	
		Percepatan pembangunan destinasi prioritas Labuan Bajo		
		Penguatan ekosistem aplikasi dan Gim	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	
		Pengembangan koperasi sektor produksi	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
4	Prioritas Nasional 4	Perluasan layanan pendidikan anak usia dini	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
		Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah madrasah yang berkualitas		
		Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah		
		Pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026	KETERANGAN
		Restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru meliputi formasi rekrutmen, pengangkatan dan penempatan, mobilitas, pembinaan karier profesional (e.g. pelatihan, in-service training), perlindungan hukum, dan kesejahteraan berbasis kinerja	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
		Peningkatan relevansi dan perluasan akses pendidikan tinggi		
		Peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatan IPTEK dan inovasi	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
		Penurunan kematian ibu dan anak	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
		Pencegahan dan penurunan stunting		
		Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis		
		Penuntasan TBC		
		Pemberian makan bergizi untuk siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita		
		Penguatan ekosistem pendukung pemberian makan bergizi		
		Eliminasi penyakit kusta dan Schistosomiasis		
		Investasi pelayanan kesehatan primer		
		Pembangunan RS lengkap berkualitas di kabupaten/kota dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses		
		Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026	KETERANGAN
		Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) seni budaya	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	
		Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) riset dan inovasi	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
		Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	
5	Prioritas Nasional 5	Pengembangan hilirisasi Nikel	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	
		Pengembangan hilirisasi Tembaga	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	
		Pengembangan hilirisasi Bauksit	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	
		Pengembangan hilirisasi Timah	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	
		Pengembangan hilirisasi Kelapa Sawit	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	
		Pengembangan hilirisasi Kelapa	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	
		Pengembangan hilirisasi Rumput Laut	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	
		Pengembangan hilirisasi Kimia	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	
		Pengembangan industri semikonduktor	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	
		Pengembangan industri tekstil dan produk tekstil	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	
		Penguatan industri logam dasar, besi dan baja		
		Pengembangan industri dirgantara		
		Pengembangan KEK Sei Mangkei		
		Pengembangan KIT Batang		
		Pengembangan KI Weda bay		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026	KETERANGAN
6	Prioritas Nasional 6	Penyaluran bantuan sosial adaptif dan subsidi tepat sasaran melalui kartu kesejahteraan	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	
		Peningkatan daya saing melalui kartu usaha produktif	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	
		Peningkatan kemandirian melalui kartu usaha afirmatif	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	
		Perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahan ke Ibu Kota Nusantara	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
		Fasilitasi penyediaan perumahan terintegrasi dengan PSU	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	
		Pemenuhan layanan dasar dan infrastruktur desa	PROGRAM PEMBERDAYAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
7	Prioritas Nasional 7	Pencegahan tindak pidana korupsi	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	
			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	
		Peningkatan kesejahteraan ASN melalui penerapan konsep total reward berbasis kinerja ASN	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
		Transformasi digital layanan publik prioritas	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026	KETERANGAN
		Ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan perpajakan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
		Intensifikasi penerimaan negara bukan pajak		
8	Prioritas Nasional 8	Penguatan karakter dan jati diri bangsa	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	
		Pemanfaatan khazanah budaya dan pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	
		Peningkatan ketahanan iklim pesisir dan laut	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

6.8 Indikator Kinerja Program

Adapun program perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Kota Salatiga Tahun 2026 berdasarkan masing-masing urusan dalam langkah penyelenggaraan pemerintah daerah dijabarkan dalam target kinerja program. Perincian program dan indikator program dikelompokan berdasarkan urusan pemerintahan sebagai berikut

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 6. 8. Program , Indikator dan Target Kinerja berdasarkan urusan Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2027

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	KINERJA		TARGET KINERJA
		2025	2026	2027
		(Baseline)	TARGET	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Prosentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan (%)	100,00	100,00	100,00
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Nilai)	90,00	100,00	100,00
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	79,30	79,31	79,32
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	TIngkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (%)	100,00	100,00	100,00
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (%)	100,00	100,00	100,00
	Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama (%)	100,00	100,00	100,00
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (%)	100,00	100,00	100,00
	Angka Putus Sekolah SD/MI (%)	0,00	0,00	0,00
	Angka Putus Sekolah SMP/MTs (%)	0,05	0,05	0,05
	Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik SD/MI (%)	88,44	88,45	88,46
	Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik SMP/MTs (%)	87,78	87,78	87,79
	Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional (%)	2,81	93,79	93,80
	Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional (%)	2,55	85,07	85,08

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	KINERJA		TARGET KINERJA
		2025	2026	2027
		(Baseline)	TARGET	
	Rata-rata kemampuan literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional (%)	2,84	94,76	94,77
	Rata-rata kemampuan numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional (%)	2,73	90,93	90,94
	Persentase sekolah TK yang memenuhi standar Holistik Integratif dengan kategori sedang (%)	78,07	78,08	78,09
	Persentase Kondisi Kelas PAUD dalam Kondisi Baik (%)	87,43	87,44	87,45
	Kondisi Sarpras Pendidikan Kesetaraan baik (%)	95,45	95,46	95,47
	Iklim Kebhinekaan SD (Nilai)	69,04	69,05	69,06
	Iklim Kebinekaan SMP (Nilai)	74,57	74,58	74,59
	Iklim Keamanan SD (Nilai)	73,69	73,70	73,71
	Iklim Keamanan SMP (Nilai)	74,39	74,40	74,41
	Iklim Inklusivitas SD (Nilai)	61,43	61,44	61,45
	Iklim Inklusivitas SMP (Nilai)	64,09	64,10	64,11
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM				
Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Sekolah yang telah menerapkan kegiatan yang dapat dikembangkan menjadi kurikulum mulok jenjang PKBM (%)	75,00	75,01	75,02
	Persentase Sekolah yang telah menerapkan kegiatan yang dapat dikembangkan menjadi kurikulum mulok jenjang SD/MI (%)	74,19	74,20	74,21
	Persentase Sekolah yang telah menerapkan kegiatan yang dapat dikembangkan menjadi kurikulum mulok jenjang SMP/MTs (%)	63,89	63,90	63,91
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				
Meningkatnya mutu dan distribusi institusi pendidikan	Persentase Guru bersertifikat pendidik Jenjang TK/RA (%)	36,84	36,85	36,86
	Persentase Guru bersertifikat pendidik Jenjang SD (%)	49,31	49,32	49,33

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	KINERJA		TARGET KINERJA
		2025	2026	2027
		(Baseline)	TARGET	
	Persentase Guru bersertifikat pendidik jenjang SMP (%)	58,65	58,66	58,67
	Persentase Pendidik yang telah memenuhi kualifikasi Minimal S1 jenjang PAUD (%)	87,80	87,81	87,82
	Persentase Pendidik yang telah memenuhi kualifikasi Minimal S1 jenjang SD (%)	97,15	97,16	97,17
	Persentase Pendidik yang telah memenuhi kualifikasi Minimal S1 jenjang SMP (%)	99,10	99,11	99,12
1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN				
Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan	Persentase TK/RA yang terakreditasi (%)	90,35	90,36	90,37
	Persentase Pusat Kegiatan dan Belajar Masyarakat (PKBM) yang Terakreditasi (%)	83,33	83,33	83,33
	Persentase lembaga Kursus dan Pelatihan yang berijin (%)	92,86	92,86	92,86
	Persentase Sekolah yang memiliki ijin operasional jenjang SD/MI (%)	100,00	100,00	100,00
	Persentase Sekolah yang memiliki ijin operasional jenjang SMP/MTs (%)	100,00	100,00	100,00
1.01.06 - PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA				
Terlestarikannya bahasa dan sastra daerah	Persentase Sekolah yang mengembangkan model pembelajaran bahasa jawa jenjang SD/MI (%)	20,43	20,43	20,43
	Persentase Sekolah yang mengembangkan model pembelajaran bahasa jawa jenjang SMP/MTs (%)	42,86	42,86	42,86
	Persentase PKBM yang sudah memasukkan pembelajaran Bahasa Jawa pada mata pelajaran yang diberikan ke siswa (%)	66,67	66,67	66,67
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	KINERJA		TARGET KINERJA
		2025	2026	2027
		(Baseline)	TARGET	
Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Prosentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan (%)	100,00	100,00	100,00
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	73,31	73,31	73,40
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Nilai)	86,90	86,91	86,92
	Cost Recovery Rumah Sakit (Nilai)	100,00	100,00	100,00
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Rumah Sakit (%)	86,00	86,50	87,00
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Klinik Paru Masyarakat (Nilai)	84,95	85,00	86,00
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas (Nilai)	86,50	86,50	87,00
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas (Nilai)	88,65	88,75	89,00
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas (Nilai)	88,65	88,75	89,00
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas (Nilai)	86,00	86,50	87,00
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas (Nilai)	85,00	86,50	87,00
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas (Nilai)	88,00	88,75	89,00
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Prevalensi Stunting (EPPBGM) (Angka)	5,69	5,60	5,43
	Angka Kematian balita (AKABA) (Per 1.000 Kelahiran)	11,45	11,40	11,35
	Cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan (%)	100,00	100,00	100,00
	Cakupan bayi baru lahir yang mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD) (%)	84,87	85,00	86,00
	Cakupan Bayi Usia Kurang 6 Bulan Mendapat ASI Eksklusif (%)	82,50	83,00	83,50
	Cakupan Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang Mendapat Makanan Tambahan (%)	100,00	100,00	100,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	KINERJA		TARGET KINERJA
		2025	2026	2027
		(Baseline)	TARGET	
	Cakupan Ibu Hamil yang Mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) Minimal 90 Tablet Selama Masa Kehamilan (%)	100,00	100,00	100,00
	Cakupan ibu nifas mendapat kapsul Vitamin A (%)	99,61	99,62	99,63
	Cakupan kepesertaan JKN (%)	98,55	100,00	100,00
	Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	100,00	100,00	100,00
	Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin (%)	100,00	100,00	100,00
	Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	100,00	100,00	100,00
	Cakupan Pelayanan kesehatan Ibu Nifas (KF3) (%)	99,55	99,55	99,55
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia (%)	100,00	100,00	100,00
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV (%)	100,00	100,00	100,00
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TB (%)	100,00	100,00	100,00
	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (%)	100,00	100,00	100,00
	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (%)	100,00	100,00	100,00
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (%)	100,00	100,00	100,00
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (%)	98,16	100,00	100,00
	Cakupan pembinaan remaja di sekolah (%)	100,00	100,00	100,00
	Cakupan Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional (%)	100,00	100,00	100,00
	Cakupan Puskesmas yang melaksanakan Perkesmas (%)	100,00	100,00	100,00
	Cakupan Remaja Putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) (%)	99,71	99,72	99,73
	Deteksi Dini Triple Eliminasi Ibu Hamil (%)	75,78	75,80	75,85
	Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) (%)	97,00	97,00	98,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	KINERJA		TARGET KINERJA
		2025	2026	2027
		(Baseline)	TARGET	
	Incident Rate DBD per 100.000 penduduk (per 100.000 penduduk)	9,18	9,15	9,10
	Kasus HIV/ AIDS baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV (%)	60,00	61,00	62,00
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi (%)	71,43	73,00	75,00
	Nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan Dinas Kesehatan (%)	86,90	85,00	85,00
	Penemuan kasus AFP (Acute Flaccid Paralysis) (Kasus)	6,00	6,00	6,00
	Persentase Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (Berat Badan kurang dari 2500 gram) (%)	7,22	7,10	7,00
	Persentase Ibu hamil KEK (%)	13,79	13,50	13,00
	Persentase Ibu Hamil yang Anemia (%)	7,44	7,40	7,30
	Proporsi jamaah haji Kota Salatiga yang mendapat pemeriksaaan dan pembinaan kesehatan sesuai standar (%)	100,00	100,00	100,00
	Persentase merokok penduduk 10-21 tahun (%)	12,50	11,40	10,40
	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk (Per 1000 Penduduk)	4,00	4,00	4,10
	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (%)	46,00	50,00	54,00
	Tertanganinya KLB/Bencana dalam 1 x 24 jam (%)	100,00	100,00	100,00
	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)	23,40	23,40	23,40
	Annual Parasite Incidence (API) per 1.000 penduduk (Per 1000 Penduduk)	0,74	0,74	0,74
	Cakupan imunisasi di usia sekolah dasar (%)	97,00	98,00	99,00
	Cakupan kepesertaan JKN Aktif (%)	80,00	81,00	82,00
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	100,00	100,00	100,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	KINERJA		TARGET KINERJA
		2025	2026	2027
		(Baseline)	TARGET	
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (%)	100,00	100,00	100,00
	Cakupan pemberian terapi pencegahan pada orang kontak serumah (Angka)	20,00	30,00	35,00
	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis (%)	30,00	40,00	50,00
	Cakupan Tempat Fasilitas Umum (TFU) yang memenuhi syarat higiene sanitasi (%)	50,00	65,00	68,00
	Capaian penemuan kasus TB (Notifikasi kasus TB) (Kasus)	134,00	134,50	135,00
	Jumlah Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Desa/Kelurahan)	3,00	5,00	8,00
	Persentase Depresi yang mendapatkan layanan (%)	1,00	1,50	1,50
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	83,00	85,00	88,00
	Persentase lanjut usia yang mandiri (%)	87,00	89,00	91,00
	Persentase Puskesmas Yang memfasilitasi Kelurahan Sehat Iklim (%)	33,33	50,00	66,67
	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan KKS (SK Forkom Kec, SK Pokja Kel, Sekretariat, Rencana Kegiatan, Anggaran) (%)	100,00	100,00	100,00
	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan pengawasan kualitas udara dalam ruang memenuhi syarat (%)	16,67	33,33	50,00
	Persentase Pustu, Puskesmas, dan RSUD yang memenuhi standar Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan (SPA) dan Sumber Daya Manusia Kesehatan (%)	100,00	100,00	100,00
	Persentase rumah tangga dengan kualitas air minum memenuhi syarat (%)	30,00	30,00	31,00
	Persentase sarana air minum yang memenuhi syarat (%)	70,00	70,00	71,00
	Persentase tempat kerja formal yang melaksanakan kesehatan kerja (%)	50,00	55,00	60,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	KINERJA		TARGET KINERJA
		2025	2026	2027
		(Baseline)	TARGET	
	Persentase tempat kerja informal yang melaksanakan kesehatan kerja (%)	100,00	100,00	100,00
	Presentase penduduk dengan aktivitas fisik cukup (%)	20,00	20,00	20,00
	Prosentase pasien TBC yang memulai pengobatan (Errollment TBC) (Angka)	90,04	91,00	92,00
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standart (%)	100,00	100,00	100,00
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				
Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang sudah mengikuti pelatihan sesuai kompetensinya (%)	73,25	73,50	73,77
	Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar (%)	100,00	100,00	100,00
	Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar (%)	100,00	100,00	100,00
	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi (%)	8,82	8,91	9,00
	Persentase karyawan RSUD yang yang mendapatkan pelatihan peningkatan kompetensi minimal 20 jam per tahun (%)	59,75	60,00	60,25
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				
Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan (%)	54,00	58,00	62,00
	Persentase apotek dan toko obat yg mampu memelihara persyaratan perijinan (%)	100,00	100,00	100,00
	Persentase pangan Industri Rumah Tangga aman dan bermutu (%)	75,00	76,00	77,00
	Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP-IRT sesuai standar (%)	16,27	29,76	36,51

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	KINERJA		TARGET KINERJA
		2025	2026	2027
		(Baseline)	TARGET	
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti olehPemerintah Daerah (%)	83,50	84,00	84,50
	Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang memenuhi syarat higiene sanitasi (%)	89,28	90,00	90,50
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Cakupan desa siaga strata mandiri (%)	100,00	100,00	100,00
	Cakupan PHBS tatanan rumah tangga strata paripurna (%)	97,61	97,65	97,75
	Cakupan PHBS tatanan institusi pendidikan strata paripurna (%)	96,80	95,75	95,85
	Cakupan PHBS tatanan institusi kesehatan sehat (%)	100,00	100,00	100,00
	Cakupan PHBS tatanan tempat kerja sehat (%)	96,62	90,45	90,56
	Cakupan PHBS tatanan tempat umum sehat (%)	94,40	94,45	90,56
	Cakupan sosialisasi dan edukasi Kawasan Tanpa Rokok (%)	37,50	50,00	62,50
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Prosentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan (%)	100,00	100,00	100,00
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Nilai)	88,50	88,60	88,70
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	71,96	72,00	73,00
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	KINERJA		TARGET KINERJA
		2025	2026	2027
		(Baseline)	TARGET	
Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota (Angka)	65,50	66,00	66,50
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum (%)	65,00	66,09	68,35
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				
Meningkatnya askes masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman ((%))	15,00	19,40	23,80
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				
Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Prosentase jaringan drainase kondisi baik (%)	96,50	96,70	96,90
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				
Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Presentase Bangunan Gedung Negara milik Pemerintah Kota dalam Kondisi Baik (%)	74,50	76,93	77,43
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				
Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan (Persentase)	28,50	32,24	33,77
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Rasio kemantapan jalan (%)	95,52	95,53	95,54
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				
Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi analis/teknisi operator terlatih dan tersertifikasi (Orang)	75,00	75,00	75,00
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Jumlah KKPR yang diterbitkan (Dokumen)	400,00	400,00	400,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	KINERJA		TARGET KINERJA
		2025	2026	2027
		(Baseline)	TARGET	
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Prosentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan (%)	100,00	100,00	100,00
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Nilai)	90,00	95,10	95,20
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	74,65	74,70	74,80
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				
Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terken relokasi akibat pemerintah	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni korban bencana atau relokasi kabupaten/kota (%)	100,00	100,00	100,00
	Persentase fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota (%)	100,00	100,00	100,00
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Presentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/ kota yang ditangani (%)	10,13	10,60	14,84
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH				
Meningkatnya kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki (%)	5,18	5,20	5,25
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				
Meningkatnya penyediaan PSU Permukiman	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (%)	55,00	65,00	70,00
1.04.06 - PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	KINERJA		TARGET KINERJA
		2025	2026	2027
		(Baseline)	TARGET	
Meningkatnya Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Persentase terfasilitasinya registrasi pengembangÂ perumahan (%)	0,00	0,00	0,00
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Nilai)	88,00	88,00	88,00
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	69,00	70,00	70,50
	Prosentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan (%)	100,00	100,00	100,00
Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Prosentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan (%)	100,00	100,00	100,00
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Nilai)	87,00	88,00	88,25
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	64,00	65,00	67,00
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada dan Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (Prosentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran) (%)	100,00	100,00	100,00
	Persentase Penegakan Perda dan Per Ka Da (Prosentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada) (%)	100,00	100,00	100,00
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				
Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat, dan	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Persentase)	100,00	100,00	100,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	KINERJA		TARGET KINERJA
		2025	2026	2027
		(Baseline)	TARGET	
Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana				
	Persentase Cakupan Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana (Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana) (%)	100,00	100,00	100,00
	Persentase Cakupan Layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana) (%)	100,00	100,00	100,00
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				
Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Presentase ketersediaan Sarana Prasarana Damkar yang memadai (%)	75,00	75,00	80,00
	Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Kebakaran (Waktu tanggap (respone time) penanganan kebakaran) (Menit)	15,00	15,00	15,00
	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (%)	100,00	100,00	100,00
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Nilai)	90,00	90,47	91,03
	Prosentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan (%)	100,00	100,00	100,00
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	70,80	70,90	71,05
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	KINERJA		TARGET KINERJA
		2025	2026	2027
		(Baseline)	TARGET	
Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan sosial yang Meningkat Kulaitasnya dalam pelayanan sosial (%)	40,00	46,00	60,00
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				
Meningkatnya rehabilitasi sosial	Presentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti (%)	100,00	100,00	100,00
	Presentase penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti (%)	100,00	100,00	100,00
	Presentase gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti (%)	100,00	100,00	100,00
	Presentase lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti (%)	100,00	100,00	100,00
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				
Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Data Fakir Miskin yang divalidasi (%)	96,00	96,00	98,00
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA				
Meningkatnya perlindungan sosial korban dan bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota (%)	100,00	100,00	100,00
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				
Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan	Persentase TMP yang terkelola dengan baik (%)	100,00	100,00	100,00
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				
Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerjaÂ terlatih (%)	0,04	0,31	0,34
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	KINERJA		TARGET KINERJA
		2025	2026	2027
		(Baseline)	TARGET	
Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar kerja dalam wilayah Kabupaten/kota (%)	71,48	71,69	71,91
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				
Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (%)	93,51	94,07	94,35
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Nilai)	89,00	85,50	85,85
	Prosentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan (%)	100,00	100,00	100,00
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	76,95	77,00	77,10
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Kelembagaan PUG Aktif (%)	100,00	100,00	100,00
	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG (%)	100,00	100,00	100,00
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase perempuan korban kekerasan yang ditangani sesuai standart (%)	100,00	100,00	100,00
	Persentase UPTD PPA sesuai standart layanan (%)	0,00	100,00	100,00
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	KINERJA		TARGET KINERJA
		2025	2026	2027
		(Baseline)	TARGET	
Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Persentase PKK aktif (%)	100,00	100,00	100,00
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				
Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Persentase Perangkat Daerah yang berkontribusi dalam sistem data gender dan anak (%)	100,00	100,00	100,00
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				
Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Persentase kelembagaan forum anak yang aktif (%)	100,00	100,00	100,00
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase korban kekerasan anak yang mendapat layanan komprehensif (%)	100,00	100,00	100,00
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				
2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Nilai)	90,00	90,03	90,06
	Prosentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan (%)	100,00	100,00	100,00
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	71,00	71,35	71,70
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN				
Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Presentase Peningkatan Indeks ketahanan Pangan (%)	3,27	0,06	0,15
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	KINERJA		TARGET KINERJA
		2025	2026	2027
		(Baseline)	TARGET	
Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Rasio jumlah cadangan beras pemerintah daerah (CBPD) terhadap target jumlah CBPD berdasarkan Perbadan 15/2023 (Rasio)	1,56	1,63	1,77
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				
Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	87,44	87,74	88,04
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				
Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan (%)	98,00	90,00	91,05
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				
2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN				
Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi (%)	100,00	100,00	100,00
2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN				
Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase peningkatan penggunaan dan pemanfaatan tanah (%)	100,00	100,00	100,00
2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE				
Meningkatnya akses masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	Persentase bidang tanah yang diredistribusi (%)	100,00	100,00	100,00
2.10.09 - PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH				
Meningkatnya luas lahan bersertifikat	Persentase luas lahan bersertifikat (%)	100,00	100,00	100,00
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	KINERJA		TARGET KINERJA
		2025	2026	2027
		(Baseline)	TARGET	
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Nilai)	84,00	84,50	85,00
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	75,20	75,30	75,40
	Prosentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan (%)	100,00	100,00	100,00
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				
Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan LH (%)	10,00	30,00	60,00
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				
Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase pemantauan status mutu air (%)	100,00	100,00	100,00
	Persentase pemeliharaan sarana prasarana laboratorium (%)	100,00	100,00	100,00
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				
Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase Ruang Terbuka Hijau Tingkat Kota (%)	17,60	18,00	18,50
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				
Meningkatnya penangan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase kelompok masyarakat yang memahami rencana aksi pengurangan dan penghapusan peralatan bermerkuri (%)	7,50	10,00	20,00
	Persentase sampah spesifik yang mengandung bahan berbahaya beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya beracun (limbah B3) yang terkumpul (%)	20,00	30,00	40,00
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	KINERJA		TARGET KINERJA
		2025	2026	2027
		(Baseline)	TARGET	
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				
Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Persentase kegiatan penegakan hukum lingkungan (%)	39,53	39,23	38,93
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				
Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase kelompok masyarakat yang memperoleh penyuluhan, kampanye dan pelatihan lingkungan hidup (%)	50,00	60,00	63,00
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				
Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase penghargaan lingkungan hidup yang terfasilitasi (%)	100,00	100,00	100,00
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				
Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti (%)	100,00	100,00	100,00
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				
Meningkatnya tata kelola persampahan	Persentase penanganan sampah (%)	75,00	74,00	73,00
	Persentase pengurangan sampah perkotaan (%)	23,00	25,00	26,00
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Nilai)	90,85	91,05	91,25
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	68,55	68,60	68,70

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	KINERJA		TARGET KINERJA
		2025	2026	2027
		(Baseline)	TARGET	
	Prosentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan (%)	100,00	100,00	100,00
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				
Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Perekaman KTP-Elektronik (%)	98,00	98,20	98,50
	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA (%)	87,52	87,53	87,54
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL				
Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Penduduk usia 0 - 18 tahun yang mempunyai Akte Kelahiran (%)	99,53	99,54	99,55
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				
Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (%)	100,00	100,00	100,00
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				
Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan (%)	100,00	100,00	100,00
	Cakupan PUS yang istrinya di bawah 20 tahun (%)	0,07	0,08	0,07
	Persentese OPD yang mengintegrasikan dokumen GDPK 5 pilar ke dalam dokumen Perencanaan daerah (%)	100,00	100,00	100,00
	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) (Tahun)	23,00	23,00	23,00
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rasio akseptor KB baru (%)	14,31	14,40	14,50
	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15- 49 (%)	67,70	67,75	68,77

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	KINERJA		TARGET KINERJA
		2025	2026	2027
		(Baseline)	TARGET	
	Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmetneed) (%)	8,51	8,47	8,45
	Persentase Modern Contraceptive Prevelance Rate (mCPR) (%)	65,96	69,75	70,00
	Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) (%)	12,00	11,70	11,20
	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (%)	26,65	26,65	27,05
	Demand Satisfied (Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi) (%)	81,80	82,70	83,50
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera	Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) (Rasio)	46:23	46:23	46:23
	Cakupan Balita/ Anak dengan Tumbuh Kembang sesuai dengan Kartu Kembang Anak (KKA) (%)	100,00	100,00	100,00
	Cakupan Kader BKB yang Terlatih (%)	74,74	74,85	75,97
	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber-KB (%)	95,30	95,50	96,93
	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri (%)	56,50	57,30	57,70
	Indeks Lansia Berdaya (Indeks)	56,10	56,60	57,10
	Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja (Indeks)	92,60	93,10	93,60
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Nilai)	84,28	88,00	89,00
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	74,20	74,30	74,50
	Prosentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan (%)	100,00	100,00	100,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	KINERJA		TARGET KINERJA
		2025	2026	2027
		(Baseline)	TARGET	
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				
Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Rasio konektivitas kabupaten/kota (Rasio)	0,88	0,88	0,88
	Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Kabupaten/Kota (%)	7,50	8,05	9,26
	Rasio Kinerja Lalu Lintas (VCR) (Rasio)	0,23	0,23	0,23
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Prosentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan (%)	100,00	100,00	100,00
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Nilai)	85,00	88,31	88,75
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	75,50	75,25	75,30
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				
Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi (%)	100,00	100,00	100,00
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				
Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo (%)	100,00	100,00	100,00
	Persentase pelayanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (%)	98,00	65,00	70,00
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	KINERJA		TARGET KINERJA
		2025	2026	2027
		(Baseline)	TARGET	
Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Prosentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan (%)	100,00	100,00	100,00
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Nilai)	83,42	85,73	86,10
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	68,95	69,05	69,20
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	65,00	71,79	71,97
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI				
Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (%)	71,78	74,43	77,41
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				
Meningkatnya kualitas SDM Perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (%)	52,00	52,58	53,06
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				
Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Koperasi Aktif (%)	55,00	62,18	62,42
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Prosentase usaha mikro yang mendapatkan legalitas usaha (%)	45,00	47,89	48,64
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				
Meningkatnya daya saing UMKM	Prosentase UMKM yang mengakses pembiayaan (%)	23,00	25,55	25,93
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	KINERJA		TARGET KINERJA
		2025	2026	2027
		(Baseline)	TARGET	
Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Nilai)	90,00	90,00	92,30
	Prosentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan (%)	100,00	100,00	100,00
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	78,50	77,00	77,10
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				
Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Nilai Realisasi PMA dan PMDN (Milyar Rupiah)	586,84	636,44	638,03
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				
Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Jumlah investor berskala nasional (Pelaku Usaha)	367,00	370,00	370,00
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				
Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (%)	97,69	97,75	97,80
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				
Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (%)	67,00	67,00	70,00
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				
Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	persentase ketepatan dalam proses pemenuhan permohonan data (%)	80,00	80,00	80,00
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Prosentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan (%)	100,00	100,00	100,00
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Nilai)	80,00	80,00	80,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	KINERJA		TARGET KINERJA
		2025	2026	2027
		(Baseline)	TARGET	
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	68,20	68,20	68,50
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				
Meningkatnya daya saing kepemudaan	Prosentase Pemuda yang mengikuti pengembangan kapasitas Daya Saing Kepemudaan (%)	5,00	5,00	5,00
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				
Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga	Prosentase Atlet yang mengikuti pengembangan kapasitas Daya Saing Olahraga (%)	27,00	17,00	17,00
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				
Meningkatnya kualitas kepramukaan	Prosentase fasilitasi pengembangan Kapasitas Kepramukaan (%)	70,00	65,00	65,00
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				
Tercapainya kolaborasi, integrasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (%)	85,00	90,00	100,00
	Presentase OPD yang menggunakan data stastistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah (%)	85,00	90,00	100,00
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				
Meningkatnya keamanan siber dan sandi di lingkungan pemerintah daerah	Persentase tingkat kematangan daerah dalam penyelenggaraan keamanan informasi (%)	73,00	70,09	71,05
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				
2.22.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Prosentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan (%)	100,00	100,00	100,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	KINERJA		TARGET KINERJA
		2025	2026	2027
		(Baseline)	TARGET	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Nilai)	85,00	87,00	88,00
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	69,80	70,00	70,50
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dikembangkan (%)	30,00	58,00	59,00
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL				
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan (%)	57,00	58,00	59,00
2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH				
Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Persentase Sejarah yang Dilestarikan dan Dikembangkan (%)	23,00	25,00	30,00
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				
Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (%)	39,50	40,00	42,00
2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN				
Meningkatnya tata kelola museum	Persentase penambahan jumlah koleksi museum (%)	5,00	38,68	39,18
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Nilai)	83,21	82,82	83,23
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	77,11	77,12	77,13
	Prosentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan (%)	100,00	100,00	100,00
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				
Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran mambaca masyarakat (%)	59,80	60,80	61,80

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	KINERJA		TARGET KINERJA
		2025	2026	2027
		(Baseline)	TARGET	
2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO				
Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki (Persentase)	100,00	100,00	100,00
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				
Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (%)	88,67	88,77	88,92
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP				
Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa bernegara kepentingan pemerintahan, untuk negara, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (%)	30,00	50,00	60,00
2.24.04 - PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP				
Meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup (Persentase)	10,00	25,00	30,00
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				
Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan (%)	100,00	100,00	100,00
	Persentase Kelompok Pembudidaya Ikan yang telah menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) (%)	35,00	35,00	35,18
	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	691,26	705,08	719,18
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	KINERJA		TARGET KINERJA
		2025	2026	2027
		(Baseline)	TARGET	
Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Cakupan bina kelompok pengolah dan pemasar ikan (%)	100,00	100,00	100,00
	Prosentase Peningkatan Pengolahan Hasil Perikanan (%)	1,00	1,05	1,10
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				
Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara (%)	5,00	5,00	5,00
	Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara yang Datang ke Kabupaten / Kota (%)	5,00	5,00	5,00
	Tingkat Hunian Akomodasi (%)	53,92	56,42	58,92
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				
Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase fasilitasi pemasaran pariwisata (%)	100,00	100,00	100,00
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL				
Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (%)	4,00	3,00	5,00
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				
Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (%)	25,00	50,00	75,00
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Produksi tanaman pangan (Ton/Ha)	6,95	6,96	6,98
	Pemenuhan kebutuhan sarana pertanian (%)	75,00	75,00	75,38
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	KINERJA		TARGET KINERJA
		2025	2026	2027
		(Baseline)	TARGET	
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Pemenuhan kebutuhan prasarana pertanian (%)	75,00	75,00	75,38
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				
Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Mortalitas hewan/ternak akibat penyakit zoonosis (%)	0,00	0,00	0,00
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				
Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase penanganan bencana pertanian (%)	100,00	100,00	100,00
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				
Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase Cakupan Bina Kelompok Tani PEMULA (%)	53,24	58,56	60,30
	Persentase Cakupan Bina Kelompok Tani LANJUT (%)	53,24	58,56	74,37
	Persentase Cakupan Bina Kelompok Tani MADYA (%)	13,92	15,31	22,11
	Persentase Cakupan Bina Kelompok Tani UTAMA (%)	2,36	2,60	2,61
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				
3.30.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Prosentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan (%)	100,00	100,00	100,00
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Nilai)	84,15	87,06	87,46
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	67,50	67,65	67,95
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				
Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (%)	100,00	100,00	100,00
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Prosentase fasilitasi pedagang pasar rakyat yang menggunakan platform digital (%)	20,00	25,00	40,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	KINERJA		TARGET KINERJA
		2025	2026	2027
		(Baseline)	TARGET	
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				
Menigkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (%)	100,00	100,00	100,00
	Disparitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting (%)	-0,66	-0,64	-0,62
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				
Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Fasilitasi Pelaku Usaha Ekspor Barang dan Jasa (%)	0,00	3,50	3,70
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				
Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (%)	90,00	45,00	55,00
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				
3.31.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat darah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Nilai)	88,98	89,03	89,28
	Prosentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan (%)		100,00	100,00
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)		74,90	75,20
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				
Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase industri yang berkembang (%)	0,56	0,44	0,88
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI				
Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin Usaha Industri (IUI) kesil dan Idustri Menengah Yang dilakukan oleh Instansi terkait (%)	100,00	100,00	100,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	KINERJA		TARGET KINERJA
		2025	2026	2027
		(Baseline)	TARGET	
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait (%)	100,00	100,00	100,00
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				
Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (%)	100,00	100,00	100,00
3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				
3.32.03 - PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI				
Meningkatnya kualitas pembangunan kawasan transmigrasi	Persentase pelaksanaan proses transmigrasi (%)	100,00	60,00	60,00
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH				
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Prosentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan (%)	100,00	100,00	100,00
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Nilai)	85,00	86,00	87,00
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	72,50	73,00	73,25
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				
Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Cakupan Koordinasi Administrasi Pemerintahan (%)	100,00	100,00	100,00
	Cakupan Koordinasi Bidang Administrasi Kewilayahan (%)	100,00	100,00	100,00
	Ketepatan waktu penyampaian LKPJ (30 maret) (%)	100,00	100,00	100,00
	Cakupan Fasilitasi Kerjasama Daerah (%)	100,00	100,00	100,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	KINERJA		TARGET KINERJA
		2025	2026	2027
		(Baseline)	TARGET	
	Prosentase Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat (%)	100,00	100,00	100,00
	Prosentase Pelaksanaan Kebijakan Bidang Hukum (%)	100,00	100,00	100,00
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				
Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Cakupan Koordinasi Program Perekonomian dan Pembangunan (%)	100,00	100,00	100,00
	Cakupan Koordinasi OPD Pengampu DBHCHT (%)	100,00	100,00	100,00
	Cakupan Koordinasi dan Pembinaan BUMD/BLUD (%)	100,00	100,00	100,00
	Cakupan Koordinasi bidang Lingkungan Hidup dan SDA (%)	100,00	100,00	100,00
	Cakupan Koordinasi POK (%)	100,00	100,00	100,00
	Persentase Nilai Belanja yang dilakukan melalui Pengadaan (%)	84,00	60,00	63,00
4.02 - SEKRETARIAT DPRD				
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Nilai)	85,00	86,00	86,50
	Prosentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan (%)	100,00	100,00	100,00
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	72,50	73,00	73,00
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				
Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangandan kualitas penganggaran dan pengawasan	Tingkat capaian kinerja dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (%)	100,00	100,00	100,00
5.01 - PERENCANAAN				
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	KINERJA		TARGET KINERJA
		2025	2026	2027
		(Baseline)	TARGET	
Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Nilai)	82,80	83,00	83,20
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	71,20	71,50	71,80
	Prosentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan (%)	100,00	100,00	100,00
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah (%)	85,00	100,00	100,00
	Indeks Manajemen Risiko (Angka)	2,89	2,91	2,92
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang infrastruktur dan kewilayahan, bidang perekonomian dan SDA	Penjabaran Konsistensi kegiatan RENSTRA ke dalam RENJA Bidang Perencanaan Kesra (%)	87,00	100,00	100,00
	Penjabaran Konsistensi kegiatan RENSTRA ke dalam RENJA Bidang Perencanaan Ekbang (%)	87,00	90,00	90,46
5.02 - KEUANGAN				
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Nilai)	81,50	82,75	82,77
	Prosentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan (%)	100,00	100,00	100,00
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	72,15	72,15	72,19
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				
Meningkatnya tata kelola anggaran, perbendaharaan, akuntasi dan pelaporan	Persentase belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan (%)	19,35	19,16	19,36

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	KINERJA		TARGET KINERJA
		2025	2026	2027
		(Baseline)	TARGET	
	Cash Management: Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya (%)	9,58	8,28	7,14
	Persentase laporan keuangan tepat waktu (%)	100,00	100,00	100,00
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				
Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (%)	2,85	3,00	3,30
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				
Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital (%)	100,00	100,00	100,00
5.03 - KEPEGAWAIAN				
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Nilai)	87,53	87,55	87,65
	Prosentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan (%)	100,00	100,00	100,00
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	79,92	79,95	79,99
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				
Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Nilai Indeks NSPK Manajemen ASN (Nilai)	75,30	76,00	77,00
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				
Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Persentase PNS yang mengikuti Pengembangan Kompetensi (%)	0,00	15,00	16,00
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				
Meningkatnya dukungan hasil kelitbangan di bidang inovasi dalam perencanaan pembangunan	Persentase terfasilitasinya inovasi masyarakat daerah (%)	44,38	44,44	44,53

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	KINERJA		TARGET KINERJA
		2025	2026	2027
		(Baseline)	TARGET	
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH				
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Nilai)	80,00	81,40	81,50
	Prosentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan (%)	100,00	100,00	100,00
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	78,00	78,20	78,40
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				
Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Persentase)	94,00	94,10	94,15
	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Tahun Anggaran N-1 (%)	90,00	90,10	90,15
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				
Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Nilai Monitoring Controlling Surveillance For Prevention (MCSP) (%)	94,00	94,60	94,70
	Prosentase Penyelesaian Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat (DUMAS) (%)	100,00	100,00	100,00
7.01 - KECAMATAN				
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Prosentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan (%)	100,00	100,00	100,00
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Nilai)	80,00	86,00	87,00
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	73,00	73,00	73,01
Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Prosentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan (%)	100,00	100,00	100,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	KINERJA		TARGET KINERJA
		2025	2026	2027
		(Baseline)	TARGET	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Nilai)	90,28	90,29	90,30
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	70,90	70,95	71,00
Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Prosentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan (%)	100,00	100,00	100,00
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Nilai)	88,00	89,00	89,20
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	69,15	70,00	70,20
Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Prosentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan (%)	100,00	100,00	100,00
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Nilai)	91,46	91,47	91,48
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	72,35	72,36	72,37
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Tingkat Pencapaian Pembangunan Kelurahan dalam 1 tahun (%)	75,00	80,00	85,00
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Tingkat Pencapaian Pembangunan Kelurahan dalam 1 tahun (%)	78,00	80,00	85,00
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Tingkat Pencapaian Pembangunan Kelurahan dalam 1 tahun (%)	78,00	80,00	85,00
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Tingkat Pencapaian Pembangunan Kelurahan dalam 1 tahun (%)	80,00	80,00	85,00
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangkel (%)	100,00	100,00	100,00
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangkel (%)	100,00	100,00	100,00
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangkel (%)	100,00	100,00	100,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	KINERJA		TARGET KINERJA
		2025	2026	2027
		(Baseline)	TARGET	
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangkel (%)	100,00	100,00	100,00
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Prosentase Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (%)	100,00	100,00	100,00
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Prosentase Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (%)	100,00	100,00	100,00
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Prosentase Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (%)	100,00	100,00	100,00
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Prosentase Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (%)	100,00	100,00	100,00
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase penyampaian SPPT PBB pada WP (%)	73,37	75,00	76,00
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase penyampaian SPPT PBB pada WP (%)	83,48	83,49	83,50
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase penyampaian SPPT PBB pada WP (%)	89,73	89,74	90,17
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase penyampaian SPPT PBB pada WP (%)	82,90	83,00	83,50
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Nilai)	86,13	86,13	86,14
	Prosentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan (%)	100,00	100,00	100,00
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	68,70	68,70	68,72
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	KINERJA		TARGET KINERJA
		2025	2026	2027
		(Baseline)	TARGET	
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)	5,00	5,00	5,00
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				
Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase)	50,00	55,00	58,00
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				
Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Prosentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (%)	60,00	60,00	61,00
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				
Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat	Prosentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonmi , sosial,budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (%)	80,00	80,00	80,25
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				
Menigkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Penyelesaian Konflik (Persentase)	100,00	100,00	100,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

6.9 Indikator Utama Pembangunan

Indikator utama Pembangunan daerah tahun 2027 merupakan penjabaran indikator dalam dokumen RPJPD Kota Salatiga tahun 2025-2045.

Tabel 6. 9. Indikator Utama Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2027

No	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan	Indikator Utama Pembangunan (IUP)	2027
1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Terdidik, Sehat, dan Berkualitas	1. Kesehatan untuk Semua	4 Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	78,87
			Kesehatan Ibu dan Anak :	
			5 Jumlah Kasus Kematian Ibu (kasus)	2
			6 Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	5,43
			Penanganan Tuberkulosis:	
			7 Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (*treatment coverage*) (%)	135
			8 Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (*treatment success rate*) (%)	91,45
			9 Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	100
		2. Pendidikan Berkualitas yang Merata	Hasil pembelajaran:	
			10 Persentase Siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (seluruh jenjang):	
			a) Literasi Membaca SD/Sederajat	98,8
			b) Literasi Membaca SMP/Sederajat	94,77
			c) Numerasi SD/Sederajat	85,08
			d) Numerasi SMP/Sederajat	94,77

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan	Indikator Utama Pembangunan (IUP)	2027
			11 Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	16,2
			12 Harapan Lama Sekolah (tahun)	11,39
			13 Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	23,61
			14 Angka partisipasi sekolah 5 - 6 tahun (%)	100
		13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	15 Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar mulok bahasa daerah dan atau seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan (%)	90,03
			16 Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan (%)	42
			17 Jumlah pengunjung tempat bersejarah	14.460
			18 Persentase Kelompok Kesenian yang Aktif Terlibat/Mengadakan Pertunjukan Kesenian dalam 1 Tahun Terakhir	18,93
			19 Tingkat pemanfaatan perpustakaan (%)	1,12
			20 Jumlah Kejadian Konflik Sara (kali)	0
		14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	18 Indeks Pembangunan Keluarga	63,50-64,82
			19 Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,221-0,209
2	Terwujudnya Keadilan dan Kesejahteraan Masyarakat	3. Perlindungan Sosial yang Adaptif	1 Tingkat Kemiskinan (%)	4,30-3,39
			38 Cakupan Kepesertaan	56,24

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan	Indikator Utama Pembangunan (IUP)		2027
				Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	
3	Terwujudnya Perekonomian yang Berdaya Saing	4. Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi	23	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	34,6
			24	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	8,36
			25	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (ribu orang)	1.708
			26	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	5,63
			27	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	1,9
			28	*Return on Aset* (ROA) BUMD (%)	3,34
			29	Disparitas Harga	±10
			36	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,82-3,52
			37	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	67,52
			34	Kapabilitas Inovasi (Angka) (bagian dari IDSD)	4,07
		5. Penerapan Ekonomi Hijau			
		6. Transformasi Digital	39	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet	92
		7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	30	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	41,55
			55	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Kabupaten/Kota (Juta Rupiah)	112,68-117,68
			56	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia (%)	17,43-17,93
		8. Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	40	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak (%)	96,50
			41	Persentase Panjang Jalan Kondisi	95,54

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan	Indikator Utama Pembangunan (IUP)		2027
				Permukaan Mantap (%) (sesuai kewenangan)	
			42	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota	9,26
			35	Persentase Desa Mandiri	-
4	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, adil dan demokratis	9. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial	51	Indeks Reformasi Hukum	100
			52	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,81
			53	Indeks Pelayanan Publik	4,7
			54	Indeks Integritas Nasional	80,65
			50	Indeks Reformasi Birokrasi	82,66
		10. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial			
		11. Stabilitas Ekonomi makro	31	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,64
			32	Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB	64,38
			33	Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB	47,55
		12. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan			
5	Terwujudnya Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan adaptasi perubahan iklim	15. Lingkungan Hidup Berkualitas	46	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	61,81
			43	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	23,8

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan	Indikator Utama Pembangunan (IUP)	2027
			47 Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	29,3
		16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian pangan	44 Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	46,8
			45 Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota (Angka)	66,5
			2 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*) (%)	3,63
			3 Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	82,55
		17. Resiliensi terhadap Bencana dan perubahan Iklim	48 Indeks Risiko Bencana (IRB)	98,09
			49 Penurunan Emisi GRK (TonCO2eq)	295.302,6

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB VII PENUTUP

RKPD Kota Salatiga Tahun 2027 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi target dan capaian pembangunan tahun 2025 serta kebijakan pusat dan provinsi Jawa Tengah serta sebagai upaya untuk meningkatkan dan meniciptakan kinerja pemerintah daerah yang efektif dan optimal untuk pencapaian sasaran Pembangunan. Dengan demikian seluruh kebijakan, strategi dan program atau kegiatan pembangunan Kota Salatiga tahun 2027 akan fokus pada pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Salatiga tahun 2027. Selain itu, RKPD Tahun 2027 juga diselaraskan dengan RPJMN 2025-2029, RKP tahun 2027 dan mendukung pencapaian Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals (SDGs), Penerapan Standar Pelayanan Minimal serta mewujudkan perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dalam bentuk rumusan program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator yang terukur beserta sumber pembiayaannya.

7.1 Kaidah Pelaksanaan

Agar pelaksanaan RKPD dapat berjalan dengan baik, perlu diatur kaidah pelaksanaan RKPD sebagai berikut :

a. Seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga agar melaksanakan program-program RKPD dengan sebaik-baiknya mengarah pada pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam RKPD;
b. RKPD akan menjadi pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan tahunan perangkat daerah yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah;
c. RKPD akan menjadi instrumen dalam pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga.
d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga dan masyarakat diharapkan dapat mengawal dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan program-program pembangunan yang tertuang dalam RKPD.

Keberhasilan pencapaian kinerja pembangunan yang tertuang dalam dokumen RKPD Kota Salatiga Tahun 2027 memerlukan kerja bersama seluruh perangkat daerah dan dukungan para pemangku kepentingan di Kota Salatiga. Oleh karena itu dukungan, kesungguhan, rasa tanggung jawab, dan semangat kerja keras harus dimiliki oleh seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan di Kota Salatiga. Semoga dengan pelaksanaan RKPD Kota Salatiga tahun 2027 yang masuk pada tahap **""*Pengembangan SDM yang sehat dan cerdas dan perekonomian daerah yang unggul, didukung pelayanan publik bermutu dan infrastruktur wilayah yang sesuai daya dukung lingkungan hidup*"** dapat mewujudkan cita-cita Kota Salatiga di tahun 2029 yaitu :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

"***Terwujudnya Kota Salatiga Sebagai Kota BEDA: Bergerak, Energik, Dinamis dan Adaptif menuju Salatiga yang Mendunia***"

RKPD selain fokus dalam mencapai visi Kota Salatiga tahun 2025-2029, juga memiliki peran krusial dalam mengintegrasikan berbagai isu penting ke dalam kebijakan dan program pembangunan daerah. Secara nasional, terdapat 5 (lima) pengarusutamaan pembangunan yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan RKPD di daerah, yaitu gender dan inklusi sosial, tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), transfromasi digital, pembangunan rendah karbon; dan pembangunan berketahanan iklim.

7.2 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian sangat penting dalam pelaksanaan RKPD Kota Salatiga Tahun 2027 untuk memastikan bahwa semua program berjalan sesuai dengan rencana dan selaras dengan tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Tanpa pengendalian yang efektif, RKPD berisiko tidak mencapai target, mengalami penyimpangan, atau bahkan mengalami kegagalan. Berikut adalah beberapa alasan utama mengapa pengendalian menjadi hal yang penting dilakukan dalam implementasi RKPD Kota Salatiga Tahun 2027 :

1. Memastikan Seluruh Program Dilaksanakan

   Seluruh program yang tertuang dalam RKPD yang disertai dengan target kinerja dan kebutuhan pendanaan pembangunan telah dijabarkan kedalam rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah, termasuk dalam RAPBD tahunan.
2. Memastikan Pencapaian Tujuan dan Sasaran

   Pengendalian berfungsi sebagai mekanisme untuk memantau kemajuan dan mengevaluasi kinerja secara berkala. Ini membantu pemerintah daerah mengidentifikasi hambatan atau masalah yang muncul di tengah jalan, sehingga dapat mengambil tindakan korektif secepat mungkin.
3. Optimalisasi penggunaan sumberdaya

   Memastikan bahwa sumber daya yang terbatas digunakan secara efisien dan efektif untuk kepentingan publik dalam pelaksanaan RKPD.
4. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi

   Proses pengendalian yang transparan dan terukur akan membuat pemerintah daerah lebih akuntabel terhadap masyarakat. Laporan hasil pengendalian dapat diakses publik, sehingga masyarakat dapat ikut mengawasi dan menilai kinerja pemerintah dalam melaksanakan janji-janji politik yang tertuang dalam RKPD.
5. Menyesuaikan dengan Perubahan Lingkungan

   Lingkungan eksternal (sosial, ekonomi, politik) dapat berubah sewaktu-waktu. Pengendalian yang fleksibel memungkinkan pemerintah daerah untuk menyesuaikan strategi dan program kerja agar tetap relevan dan efektif. Misalnya, jika terjadi krisis ekonomi, pengendalian dapat membantu mengidentifikasi program yang perlu diprioritaskan atau direstrukturisasi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

6. Mendorong Perbaikan Berkelanjutan

   Hasil dari proses pengendalian (evaluasi, audit, dan laporan) memberikan umpan balik yang berharga. Umpan balik ini dapat digunakan untuk memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan program di masa mendatang. Ini menciptakan siklus pembelajaran dan perbaikan yang berkelanjutan dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Pelaksanaan evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah proses penting untuk mengukur keberhasilan, mengidentifikasi kendala, dan memberikan masukan untuk perbaikan di masa mendatang. Evaluasi ini diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017. Evaluasi dilakukan dengan tujuan:

1. Mengukur Pencapaian Sasaran, yaitu menilai sejauh mana target pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD telah tercapai.
2. Menilai Efektivitas dan Efisiensi, yaitu dapat meninjau efektivitas program dan penggunaan anggaran.
3. Mengidentifikasi Masalah, yaitu menemukan faktor penghambat dan pendorong dalam pelaksanaan program.
4. Meningkatkan Akuntabilitas, yaitu dalam rangka mewujudkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah daerah.
5. Menyediakan Masukan, yaitu dalam rangka memberikan rekomendasi untuk penyusunan perencanaan periode berikutnya.

Evaluasi membantu memastikan konsistensi antara RPJMD dengan rencana tahunan (RKPD), Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran (APBD). Hal ini penting untuk mencegah adanya penyimpangan kebijakan dan memastikan bahwa setiap program yang dijalankan selaras dengan tujuan jangka menengah. Pelaksanaan Evaluasi RKPD merupakan langkah krusial yang berfungsi sebagai cerminan keberhasilan dan kegagalan sebuah rencana pembangunan. Proses ini tidak hanya mengukur pencapaian, tetapi juga memberikan landasan untuk perbaikan di masa depan.

Dalam perjalanannya, RKPD selalu menghadapi ketidakpastian dan berbagai potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan. Untuk itu, manajemen risiko berperan sebagai "penjaga" yang memastikan rencana tersebut berjalan sesuai jalur. Untuk memastikan perencanaan yang tertuang dalam RKPD perlu dilakukan analisis manajemen risiko dengan mengidentifikasi potensi risiko baik pada lingkup internal maupun eksternal. Faktor risiko yang teridentifikasi sejak dini, pemerintah daerah dapat menyusun rencana yang lebih realistis dan memiliki strategi mitigasi yang kuat.

Penerapan manajemen risiko pada RKPD Kota Salatiga tahun 2027 diharapkan akan membantu dalam meningkatkan kemungkinan pencapaian target, mengoptimalkan alokasi sumber daya dan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Melalui pengelolaan risiko secara proaktif, pemerintah daerah dapat mencegah atau mengurangi kendala yang berpotensi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

menghambat program dan kegiatan, seperti keterlambatan proyek, pembengkakan biaya, atau kegagalan program yang menghambat pencapaian tujuan dan sasaran daerah. Hal ini secara langsung meningkatkan kemungkinan tercapainya tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RKPD Kota Salatiga tahun 2027.

WALI KOTA SALATIGA

ROBBY HERNAWAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).